



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERDA NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018 - 2023



(PERUBAHAN)

RPJMD
2018-2023



**PEMERINTAH
KABUPATEN SINJAI**

DOKUMEN PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018 - 2023



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap kondisi Daerah pada saat ini dan untuk menyesuaikan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 126);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Rincian visi, misi dan prioritas program Pembangunan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dokumen RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 termuat dalam sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran umum kondisi daerah;
- c. Bab III : Gambaran keuangan daerah;
- d. Bab IV : Permasalahan dan isu strategis daerah;
- e. Bab V : Visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. Bab VI : Strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah;
- g. Bab VII : Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;
- h. Bab VIII : Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- i. Bab IX : Penutup.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 29 Juni 2021

BUPATI SINJAI,


ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 29 Juni 2021


SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN
B. HK. 01. 051. 21

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji hanyalah milik Allah *subhanahu wata'ala* atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 dapat selesai. Dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati, sekaligus juga menjadi instrumen pengukuran kinerja pemerintahan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dokumen Perubahan RPJMD sebagai dokumen perencanaan, dapat dilakukan dilakukan perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Beberapa hal yang menjadi dasar perubahan terhadap dokumen perubahan RPJMD ini adalah karena adanya perubahan kebijakan nasional dan perubahan regulasi mendasar, serta karena terjadinya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan target dan asumsi yang telah ditetapkan mejadi meleset jauh. Olehnya itu perubahan dokumen RPJMD ini menjadi suatu keniscayaan. Dengan demikian, Dokumen Perubahan RPJMD ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 dan Tahun 2023 nantinya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Sinjai.

Sinjai, Juni 2021

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1-1

 1.1 Latar Belakang 1-1

 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1-3

 1.3 Hubungan Antar Dokumen I-9

 1.4 Maksud dan Tujuan I-11

 1.5 Sistematika Penyajian I-12

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

 2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1

 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah II-1

 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah II-10

 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana II-40

 2.2 Aspek Demografi II-43

 2.2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk II-43

 2.2.2 Persebaran Dan Kepadatan Penduduk..... II-43

 2.2.3 Persebaran dan Kepadatan Penduduk..... II-45

 2.3 Kajian Muatan KLHS II-46

 2.3.2 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
 Hidup Untuk Pembangunan..... II-46

 2.3.2 Perkiraan Mengenai Dampak Dan Resiko Lingkungan
 Hidup..... II-54

2.3.3	Kinerja Layanan/Jasa Lingkungan	II-57
2.3.4	Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam.....	II-69
2.3.5	Tingkat Kerentanan Dan Kapasitas Terhadap Pertumguhan Iklim.....	II-73
2.3.6	Tingkat Ketahanan dan Potensi KEHATI.....	II-77
2.4	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-81
2.4.1	Kesjahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-81
2.4.2	Kesejahteraan Sosial	II-106
2.4.3	Seni, Budaya dan Olahraga.....	II-118
2.5	Aspek Pelayanan Umum	II-119
2.5.1	Aspek Pelayanan Dasar	II-119
2.5.2	Aspek Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar.....	II-171
2.5.3	Aspek Layanan Pilihan	II-231
2.5.4	Aspek Penunjang Urusan	II-240
2.6	Aspek Daya Saing Daerah.....	II-255
2.6.1	Produktivitas Total Daerah.....	II-255
2.6.2	Pertumbuhan PDRB Sector Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.....	II-256
2.6.3	Indeks Layanan Infrastruktur.....	II-256
2.7	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	II-258
2.7.1	SPM Dinas Pendidikan.....	II-258
2.7.2	SPM Dinas Kesehatan.....	II-260
2.7.3	SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-264
2.7.4	SPM Perumahan.....	II-266
2.7.5	SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	II-267

2.7.6	SPM Dinas Sosial.....	II-269
2.8	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Developmentgoals (TPB/SDGs).....	II-271
2.9	Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Sinjai Tahun 2016 – 2023.....	II-305
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-3
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	III-3
3.1.2	Neraca Daerah	III-14
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-31
3.2.1	Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi	III-31
3.2.2	Proporsi Penggunaan Anggaran	III-32
3.2.3	Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Priorita Utama.....	III-36
3.2.4	Analisis Pembiayaan Daerah.....	III-39
3.3	Kerangka Pendanaan	III-45
3.3.1	Asumsi Ekonomi, Sosial, dan Fiskal.....	III-45
3.3.2	Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	III-55
3.4	Dampak Pandemi Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020	III-59
3.5	Pembiayaan Pembangunan Daerah Non Pemerintah.....	III-60
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1	Permasalahn Pembangunan Daerah	VI-1
4.1.1	Permasalahan Untuk Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	IV-1
4.2	Permasalahan Untuk Penyelenggaraan Urusan.....	IV-15

	4.2.1	Permasalahan Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar	IV-15
	4.2.2	Permasalahan Pada Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	IV-20
	4.2.3	Urusan Pilihan.....	IV-23
	4.2.4	Penunjang Urusan.....	IV-25
	4.3	Isu Strategis.....	IV-27
	4.3.1	Identifikasi Isu Strategis.....	IV-27
	4.3.2	Isu Strategis Global.....	IV-31
	4.3.3	Prioritas Isu Strategis.....	IV-35
BAB V		VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	V-1
	5.1	Visi.....	V-1
	5.2	Misi.....	V-1
	5.3	Tujuan dan Sasaran.....	V-7
BAB VI		STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	VI-1
	6.1	Strategi.....	VI-1
	6.2	Arah Kebijakan.....	VI-5
BAB VII		KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.....	VII-1
	7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah.....	VII-1
	7.2	Program Perangkat Daerah.....	VII-2
BAB VIII		KINERJA PENYELEGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	VIII-1
	8.1	Penempatan Indikator Kinerja Daerah.....	VIII-1
	8.1.1	Indikator Kinerja Makro.....	VIII-1
	8.1.2	Indikator Kinerja Utama.....	VIII-2
	8.1.3	Indikator Kinerja Kunci.....	VIII-6

8.2	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	VIII-47
8.3	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/Sdgs).....	VIII-52
BAB IX PENUTUP		IX-1
9.1	Pedoman Transisi	IX-1
9.2	Kaidah Pelaksanaan	IX-2

DAFTAR TABEL

TABEL	URAIAN	HAL
2.1	Jumlah Kecamatan, Kelurahan/desa, dan Luas Wilayah Setiap Kecamatan	II-2
2.2	Jumlah dusun/lingkungan Kabupaten Sinjai	II-2
2.3	Luas Wilayah Kecamatan Menurut Ketinggian Diatas Permukaan Laut di Kabupaten Sinjai	II-6
2.4	Beberapa sungai besar yang ada dalam wilayah kabupaten sinjai 2020	II-8
2.5	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	II-13
2.6	Kawasan Pertanian Hortikultura	II-16
2.7	Kawasan Perkebunan	II-17
2.8	Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk kabupaten sinjai tahun 2020	II-43
2.9	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Ratio Kabupaten Sinjai, Tahun 2020	II-44
2.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Umur	II-45
	Kabupaten Sinjai, Tahun 2020	
2.11	Persebaran dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sinjai Tahun 2020	II-46
2.12	Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan Kabupaten Sinjai Tahun 2020	II-48
2.13	Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Sinjai, Tahun 2020	II-49
2.14	Kelas Kemampuan Lahan Di Kabupaten Sinjai Tahun 2020	II-49
2.15	Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Sinjai Tahun 2020	II-51
2.16	Ketersediaan Dan Kebutuhan Penyediaan Pangan Kabupaten Sinjai Tahun 2020	II-53
2.17	Jenis Bahaya Dan Risiko Tinggi Kabupaten Sinjai Tahun 2020	II-56
2.18	Lokasi Risiko Cuaca Ekstrim Tinggi Kabupaten Sinjai Tahun 2020	II-55
2.19	Distribusi Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Air Kabupaten Sinjai Tahun 2020	II-58
2.2	Distribusi Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan Kabupaten Sinjai Tahun 2020	II-60
2.21	Distribusi luas jasa lingkungan pengaturan tata aliran air Kabupaten Sinjai Tahun 2020	II-62

TABEL	URAIAN	HAL
2.22	Distribusi luas jasa lingkungan pengaturan iklim Kabupaten Sinjai Tahun 2020	II-63
2.23	Distribusi Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Bencana Longsor Kabupaten Sinjai Tahun 2020	II-65
2.24	Distribusi Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Bencana Banjir Kabupaten Sinjai Tahun 2020	II-66
2.25	Distribusi Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air Dan Pengolahan Limbah Kabupaten Sinjai Tahun 2020	II-68
2.26	Distribusi Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Penutupan Lahan Kabupaten Sinjai Tahun 2020	II-70
2.27	Penutupan Lahan Pada Kawasan Hutan Di Kabupaten Sinjai Sesuai SK Menlhk no 362	II-70
2.28	Kategori Kerentanan Desa Dikabupaten Sinjai, Tahun 2020	II-77
2.29	Distribusi Luas Jasa Lingkungan Penyedia sumber Daya Genetik di Kabupaten Sinjai Tahun 2020	II-78
2.3	Distribusi Luas Jasa Lingkungan Pendukung Habitat Dan Keanekaragaman Hayati (biodiversity) Kabupaten Sinjai Tahun 2020	II-80
2.31	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020	II-82
2.32	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sinjai, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng dan Kab. Selayar Tahun 2016-2020	II-82
2.33	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Berdasarkan Lapangan Usaha Di Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-84
2.34	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Berdasarkan Lapangan Usaha Di Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-86
2.35	Perkembangan Kontribusi Sector Terhadap DPRB Kabupaten Sinjai, Tahun 2020	II-89
2.36	Perbandingan Inflasi Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020	II-90
2.37	Perbandingan DPRB Per Kapita Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2016-2020	II-91
2.38	PDRB Per Kapita Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-91

TABEL	URAIAN	HAL
2.39	Perbandingan rasio gini Kabupaten Sinjai Provinsi Suawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2016-2020	II-92
2.4	Indeks Ketipangan Williasom Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-93
2.41	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II -94
2.42	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2016-2020	II-94
2.43	Proporsi Penduduk dengan Pendapatan Kurang Dari USD 1,00 (PPP) Per Kapita Perhari Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-95
2.44	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-95
2.45	Indeks Pelayanan Pubik Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-96
2.46	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-96
2.47	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-97
2.48	Capaian Nilai Akuntabilitas Pemerintah Daerah (SAKIP) Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-97
2.49	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-98
2.5	Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-98
2.51	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-98
2.52	Kontribusi Sektor Pertanian Komoditi Palawija terhadap PDRB Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-99
2.53	Produksi Komoditi Sektor Pertanian Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-100
2.54	Konstribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-101
2.55	Produksi sektor perkebunan Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-102
2.56	Konstribusi Kelompok Petani Terhadap PDRB Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-103
2.57	Konstribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-103

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

TABEL	URAIAN	HAL
2.58	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-104
2.59	Kontribusi Sektor Kelautan & Perikanan Terhadap PDRB Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-105
2.6	Kontribusi Sektor perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-105
2.61	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-106
2.62	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional, Tahun 2016-2020	II-107
2.63	Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-107
2.64	Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional, Tahun 2016-2020	II-108
2.65	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional, Tahun 2016-2020	II-109
2.66	Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional, Tahun 2016-2020	II-110
2.67	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-110
2.68	Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-111
2.69	Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-111
2.7	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-112
2.71	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-113
2.72	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2016-2020	II-113
2.73	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-114
2.74	Rasio Penduduk yang Bekerja Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-115
2.75	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-116
2.76	IPG dan IDG Kabupaten Sinjai Tahun 2017-2020	II-117
2.77	Rasio Tuntas Baca Tulis Al Qur'an terhadap Jumlah Penduduk Islam Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-117

TABEL	URAIAN	HAL
2.78	Rasio Hafidz terhadap Jumlah Penduduk Islam Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-117
2.79	Rasio Buta Aksara Al Qur'an terhadap Jumlah Penduduk Islam Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-118
2.8	Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-119
2.81	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Sinjai,Tahun 2016 - 2020	II-120
2.82	Perbandingan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2016-2020	II-120
2.83	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-121
2.84	Persentase Angka Pendidikan yang Ditamatkan Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-122
2.85	Perbandingan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2016-2020	II-123
2.86	Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-124
2.87	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-125
2.88	Angka Putus Sekolah Kabupaten SinjaiTahun 2016-2020	II-127
2.89	Angka Kelulusan Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-128
2.9	Angka Melanjutkan Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-129
2.91	Fasilitas Pendidikan Dalam Kondisi Bangunan Baik Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-130
2.92	Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-131
2.93	Rasio Guru/Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-131

TABEL	URAIAN	HAL
2.94	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Perempuan & Laki-laki Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-132
2.95	Penduduk yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara) Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-133
2.96	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-134
2.97	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-134
2.98	Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-135
2.99	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	II-135
2.1	Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-136
2.101	Angka Kematian Ibu Per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-136
2.102	Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-137
2.103	Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-137
2.104	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-138
2.105	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-138
2.106	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-139
2.107	Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-139
2.108	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-140
2.109	Non Polio AFP Rate Per 1000 Penduduk Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-140

TABEL	URAIAN	HAL
2.110	Cakupan Balita Pnemonia yang ditangani Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-141
2.111	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC dan BTA Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-141
2.112	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-142
2.113	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-142
2.114	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam Program DOTS Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-143
2.115	Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-143
2.116	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-144
2.117	Angka Kejadian Malaria Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-144
2.118	Pravlensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi di Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-145
2.119	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-145
2.12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-146
2.121	Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-146
2.122	Cakupan Puskesmas Pembantu Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-147
2.123	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-147
2.124	Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-148
2.125	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-148

TABEL	URAIAN	HAL
2.126	Cakupan Pelayanan Anak Balita Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-149
2.127	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada Anak Usia 6 – 24Bulan Keluarga Miskin Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-149
2.128	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-150
2.129	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-150
2.13	Cakupan Desa/Kel. Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-151
2.131	Proporsi Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-152
2.132	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-152
2.133	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-153
2.134	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-154
2.135	Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-154
2.136	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-155
2.137	Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-155
2.138	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-156
2.139	Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Sinjai Tahun 2016 - 2020	II-157
2.14	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-157

TABEL	URAIAN	HAL
2.141	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-158
2.142	Persentase Areal Kawasan Kumuh Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-158
2.143	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-159
2.144	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-159
2.145	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-160
2.146	Luasan RTH Public Sebesar 20 % dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-160
2.147	Rasio Bangunan Ber IMB Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-161
2.148	Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-161
2.149	Rasio Rumah layak Huni Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-162
2.15	Rasio Permukiman Layak Huni Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-162
2.151	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-163
2.152	Persentase Pemukiman yang Tertata Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-163
2.153	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-164
2.154	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-164
2.155	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-165
2.156	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-166

TABEL	URAIAN	HAL
2.157	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-166
2.158	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-167
2.159	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (response Time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-167
2.16	Persentase Penegakan PERDA Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-168
2.161	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-168
2.162	Persentase PMKS yang Tertangani Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-169
2.163	Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-169
2.164	Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-170
2.165	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-170
2.166	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-171
2.167	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-172
2.168	Besaran Pekerjaan / Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-172
2.169	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelathan Berbasis Kompotensi Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-173
2.17	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-173

TABEL	URAIAN	HAL
2.171	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-174
2.172	Rasio Lulusan S1 / S2 / S3 Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-174
2.173	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-175
2.174	Proporsi Kursi yang Diduduki perempuan di DPR Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-175
2.175	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-176
2.176	Rasio KDRT Kabupaten SinjaiTahun 2016-2020	II-177
2.177	Partisipasi Jumlah Tenaga Kerja di bawah Umur Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-177
2.178	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-177
2.179	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan TerpaduKabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-178
2.18	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit Kabupaten SinjaiTahun 2016-2020	II-179
2.181	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi SoSial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasaan di dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-179
2.182	Cakupan Penegakan Hukum dariTingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus Kekerasaan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-180
2.183	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasaan yang MendapatkanLayanan Bantuan Hukum Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-180
2.184	Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasaan Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-181

TABEL	URAIAN	HAL
2.185	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-182
2.186	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SD Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-182
2.187	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMP Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-183
2.188	Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-183
2.189	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-184
2.19	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-184
2.191	Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-185
2.192	Tersedianya Dokumen RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-185
2.193	Tersedianya Dokumen KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-186
2.194	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-186
2.195	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-186
2.196	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-187
2.197	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-187
2.198	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung jawab usaha /atau Kegiatan yg diawasi Ketaatannya Terhadap PPLH, PUU LH yg diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-188
2.199	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-189
2.2	Timbulan Sampah yang Ditangani Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-189

TABEL	URAIAN	HAL
2.201	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-189
2.202	Persentase Cakupan Area Pelayanan Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-190
2.203	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-190
2.204	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-191
2.205	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-192
2.206	Rasio Bayi Berakte Kelahiran Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-192
2.207	Rasio Pasangan Berakte Nikah Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-193
2.208	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-193
2.209	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-193
2.21	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-194
2.211	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-195
2.212	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-195
2.213	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-196
2.214	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-197
2.215	Persentase LSM aktif Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-197

TABEL	URAIAN	HAL
2.216	Persentase LPM Berprestasi Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-198
2.217	Persentase PKK Aktif Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-198
2.218	Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-198
2.219	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-199
2.22	Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampong KB Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-200
2.221	Rasio Akseptor KB Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-200
2.222	Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Tahun Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-201
2.223	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15 – 19) Per 1.000 Perempuan usia 15-19 Tahun (ASFR 15 19) Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-201
2.224	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-202
2.225	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-202
2.226	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-203
2.227	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	II-203
2.228	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-203
2.229	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-204
2.23	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber – KB Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-204
2.231	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan	II-205

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

TABEL	URAIAN	HAL
	Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	
2.232	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Kanseling remaja/mahasiswa Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-205
2.233	Cakupan PKB/PLKB yang di Dayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan & Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-205
2.234	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber –KB Mandiri Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-206
2.235	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-207
2.236	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-207
2.237	Persentase Faskes dan Jejaringannya (diseluruh tingkatan wilayah) Yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR sesuai dengan Atandarnisasi Pelayanan Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-208
2.238	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-208
2.239	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD & APBDesa Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-209
2.24	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-209
2.241	Rasio Ijin Trayek Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-210
2.242	Persentase Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-211
2.243	Jumlah Pelabuhan Laut/ Terminal Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-211
2.244	Persentase Layanan Angkutan Darat Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-212
2.245	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kabupaten Sinjai, Tah un 2016-2020	II-212

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

TABEL	URAIAN	HAL
2.246	Pemasangan Rambu-rambu Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-213
2.247	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-213
2.248	Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-214
2.249	Jumlah Orang/Barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun Kabupaten Sinjai, tahun 2018-2020	II-214
2.25	Cakupan Pengembangann pemberdayaan kelompok informasi di tingkat kecamatanKabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-215
2.251	Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-216
2.252	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-216
2.253	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-217
2.254	Proporsi Rumah Tangga yang memiliki computer pribadi Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-217
2.255	Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-218
2.256	Persentase UKM non BPR/LKM Aktif Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-218
2.257	Persentase BPR/LKM Aktif Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-219
2.258	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-220
2.259	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-220
2.26	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN / PMA) Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-221
2.261	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-222

TABEL	URAIAN	HAL
2.262	Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah) Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-222
2.263	Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-223
2.264	Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-223
2.265	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-224
2.266	Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-224
2.267	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-225
2.268	Jumlah Prestasi Olahraga Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-225
2.269	Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-226
2.27	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-227
2.271	Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-227
2.272	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-228
2.273	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-228
2.274	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-228
2.275	Koleksi Buku yang Tersedia di Dalam Perpustakaan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-229
2.276	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-229
2.277	Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan /Tahun Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-230

TABEL	URAIAN	HAL
2.278	Jumlah Koleksi Judul Buku Peprpustakaan Kabupaten Sinjai Tahun 2016-20	II-230
2.279	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Sinjai, Tahun 2019-2020	II-230
2.28	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Sinjai, Tahun 2019-2020	II-231
2.281	Kunjungan Wisata Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-231
2.282	Lama Kunjungan Wisata Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-232
2.283	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-234
2.284	Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) Terhadap PDRB Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-234
2.285	Kontribusi Sektor Perkebunan (tanaman keras) Terhadap PDRB Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-234
2.286	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-236
2.287	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-237
2.289	Cakupan Bina Kelompok Petani Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-237
2.29	Cakupan Bina Usaha Informal/Pedagang Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-238
2.291	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-238
2.292	Produksi Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-239
2.293	Konsumsi Ikan Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-239
2.294	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-240

TABEL	URAIAN	HAL
2.295	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-240
2.296	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-241
2.297	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-242
2.298	Kesesuai Rencana Pembangunan dengan RTRW Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-242
2.299	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-243
2.3	Persentase SILPA Kabupaten Sinjai Tahun, 2016-2020	II-243
2.301	Persentase Belanja Pendidikan (20%) Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-244
2.302	Persentase Belanja Kesehatan (10%) Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-244
2.303	Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-245
2.304	Bagi Hasil Kabupaten / Kota dan Desa Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-246
2.305	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-247
2.306	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-248
2.307	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-248
2.308	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-249
2.309	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-249
2.31	Persentase Implementaasi Rencana Kelitbangan Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-250

TABEL	URAIAN	HAL
2.311	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-250
2.312	Persentase Perangkat Daerah yang di Fasilitas Dalam Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-251
2.313	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-251
2.314	Persentase Tindak Lanjut Temuan Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-252
2.315	Persentase Pelanggaran Pegawai Kabupaten SinjaiTahun 2016-2020	II-253
2.316	Jumlah Temuan BPK Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020	II-254
2.317	Produktivitas Total Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-256
2.318	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-256
2.319	Indeks Layanan Infrastruktur	II-257
2.32	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-258
2.321	Pendidikan Dasar Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-258
2.322	Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-259
2.323	Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-260
2.324	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-260
2.325	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-260
2.326	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-260
2.327	Pelayanan Kesehatan Balita Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-261

TABEL	URAIAN	HAL
2.328	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-261
2.329	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Kab. Sinjai Tahun 2014-2017	II-262
2.33	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-262
2.331	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-262
2.332	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-263
2.333	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-263
2.334	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-263
2.335	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-264
2.336	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-265
2.337	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Kab. Sinjai Tahun 2016-2020	II-266
2.338	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab/KotaKabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-266
2.339	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-267
2.34	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020	II-267
2.341	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-268

TABEL	URAIAN	HAL
2.342	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-268
2.343	Pelayanan Penyelamat dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-269
2.344	Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Bencana Kebakaran Kabupaten Tahun 2016-2020	II-269
2.345	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-270
2.346	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II- 270
2.347	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-270
2.348	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar Panti Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-271
2.349	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	II-271
2.35	Capaian Target Indicator TPB/Sdgs Kabupaten Sinjai Tahun 2017-2020	II-274
3.1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 – 2020	III-4
3.2	Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, Periode 2016-2020	III-7
3.3	Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Sinjai tahun 2016 – 2020	III-8
3.4	Rata-rata Pertumbuhan Belanja Tahun 2016-2020	III-10
3.5	Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Tahun 2016-2020	III-13
3.6	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Sinjai, Periode 2016-2020	III-116
3.7	Perkembangan Rasio Likuiditas Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	III-26
3.8	Perkembangan Rasio Solvabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020	III-28

TABEL	URAIAN	HAL
3.9	Perkembangan Rasio Aktivitas Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai	III-30
	Tahun 2016-2020	
3.1	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Sinjai	III-33
	Tahun 2018-2020	
3.11	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Sinjai 2018-2020	III-34
3.12	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2020	III-35
3.13	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2018-2020	III-36
3.14	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2020	III-38
3.15	Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Sinjai	III-39
3.16	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2020	III-40
3.17	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sinjai Tahun 2017-2020	III-41
3.18	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Sinjai	III-43
	Tahun 2018-2020	
3.19	Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2020	III-44
3.2	Asumsi Capaian Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2023	III-46
3.21	Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Kabupaten Sinjai Tahun 2021-2023	III-46
3.22	Target dan Poyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2023 Kabupaten Sinjai (Ruiah)	III-48
3.23	Target dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021-2023 Kabupaten Sinjai (Rupiah)	III-51
3.24	Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2023 Kabupaten Sinjai (Rupiah)	III-54
3.25	Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Kab. Sinjai Tahun 2019-2023	III-58
3.26	Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021-2023(Rupiah)	III-59

TABEL	URAIAN	HAL
4.1	Pemetaan Permasalahan Prioritas Daerah	IV-2
4.2	Identifikasi Isu Strategis	IV-28
5.1	Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023	V-1
5.2	Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023	V-2
5.3	Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 dengan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023	V-4
5.4	Keterkaitan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2028-2023 dengan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023	V-6
5.5	Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sinjai	V-9
5.6	Hubungan Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025 terhadap RPJMD 2018-2023	V-13
6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Sinjai	VI-2
6.2	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sinjai 2019-2020	VI-7
6.3	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sinjai 2021-2023	VI-14
6.4	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas dan Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Sinjai 2018-2023	VI-27
7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2023 Kabupaten Sinjai	VII-1
7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupatn Sinjai Tahun 2021-2023	VII-3
7.3	Indikasi Rencana Program, Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sinjai Tahun 2021-2023	VII-79
8.1	Penetapan Indikator Kinerja Makro Kabupaten Sinjai 2018-2023	VIII-1
8.2	Penetapan Indikator Kinerja Utam (IKU) Kabupaten Sinjai 2018-2023	VIII-3
8.3	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Sinjai Tahun 2021-2023	VIII-7
8.4	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023	VIII-48

TABEL	URAIAN	HAL
8.5	Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023	VIII-53

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SINJAI NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati/Wakil Bupati Sinjai Periode 2018-2023. Sejak awal periode pemerintahan **Andi Seto Gadhista Asapa, SH,LLM** sebagai **Bupati Sinjai** dan **Hj. Andi Kartini Ottong, SP** sebagai **Wakil Bupati Sinjai** Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Sinjai telah berhasil menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019.

Sebagaimana amanat pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila : a). hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; b). hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan c). terjadi perubahan yang mendasar, dan perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. Selanjutnya perubahan yang mendasar terkait

perubahan RPJMD, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Urgensi perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 didasarkan adanya perubahan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu, terjadinya Bencana Non-Alam yaitu Pandemi Covid-19 yang memberi imbas negatif pada beberapa aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Sinjai. Selain adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan pandemi covid 19, perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 dipengaruhi juga oleh capaian kinerja ekonomi makro pada pelaksanaan RPJMD di tahun 2020.

Seluruh isi dari dokumen perubahan RPJMD ini telah disusun untuk mampu menjawab semua permasalahan dan isu strategis yang kita hadapi di Sinjai, baik itu isu strategis yang telah diangkat pada dokumen RPJMD sebelum perubahan yaitu, penanggulangan kemiskinan, pelayanan pendidikan dan kesehatan, tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, pemenuhan kebutuhan infrastruktur, air minum dan sanitasi, pertanian dan perikanan, perbaikan pelayanan publik, pengelolaan lingkungan hidup serta ketentraman dan ketertiban masyarakat, maupun isu strategis yang bersifat baru sebagai alasan dari dilakukannya perubahan terhadap dokumen RPJMD ini yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan baru dan perkembangan kondisi global sebagai dampak pandemi Covid-19. Olehnya itu setiap tahapan penyusunan perubahan RPJMD berjalan dengan seoptimal mungkin agar dapat menjadi pegangan bersama untuk pembangunan daerah hingga berakhirnya periode RPJMD ini.

Sesuai amanat Pasal 344 Permendagri 86 Tahun 2017, Tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD berlaku ketentuan mutatis mutandis terhadap tahapan

penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD. Adapun tahapan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai yaitu: Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Musrenbang RPJMD, Penyusunan Rancangan Akhir dan Penetapan RPJMD.

Konsistensi Perubahan RPJMD terhadap dokumen RPJMD yang telah ditetapkan sebelumnya juga tetap dijaga dengan mempertahankan Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pada level tujuan dan sasaran dilakukan beberapa penyesuaian *pada* narasi, jenis indikator hingga pergeseran beberapa tujuan dan sasaran dari RPJMD untuk ditempatkan menjadi tujuan/sasaran pada dokumen Renstra Perangkat Daerah. Begitu pula dengan program-program yang dilakukan penyesuaian nomenklatur agar sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019.

Perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 disusun dengan mengacu pada Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta telah memperhatikan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

Perubahan RPJMD ini dilakukan pada tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 dan merupakan tahap ke empat dari RPJPD Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025, dimana target ekonomi makro secara umum telah mampu dicapai dengan cukup baik apabila dibandingkan dengan pencapaian rata-rata Provinsi dan Nasional dalam kondisi menghadapi pandemi Covid-19. Adapun capaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Sinjai Tahun 2020 yaitu: Pertumbuhan Ekonomi 1,55 %, Tingkat Kemiskinan 9,00 %, Tingkat Pengangguran Terbuka 2,65 %, Gini Rasio 0,372, Indeks Pembangunan Manusia 67,60 dan PDRB Perkapita (ADHB) 46,15 Juta Rupiah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan beberapa Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 33. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
 34. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
 35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314).
41. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
42. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);

43. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
44. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
45. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 96);
46. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan peraturan Zonasi kawasan Perkotaan Tahun 2018 - 2038, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 119).

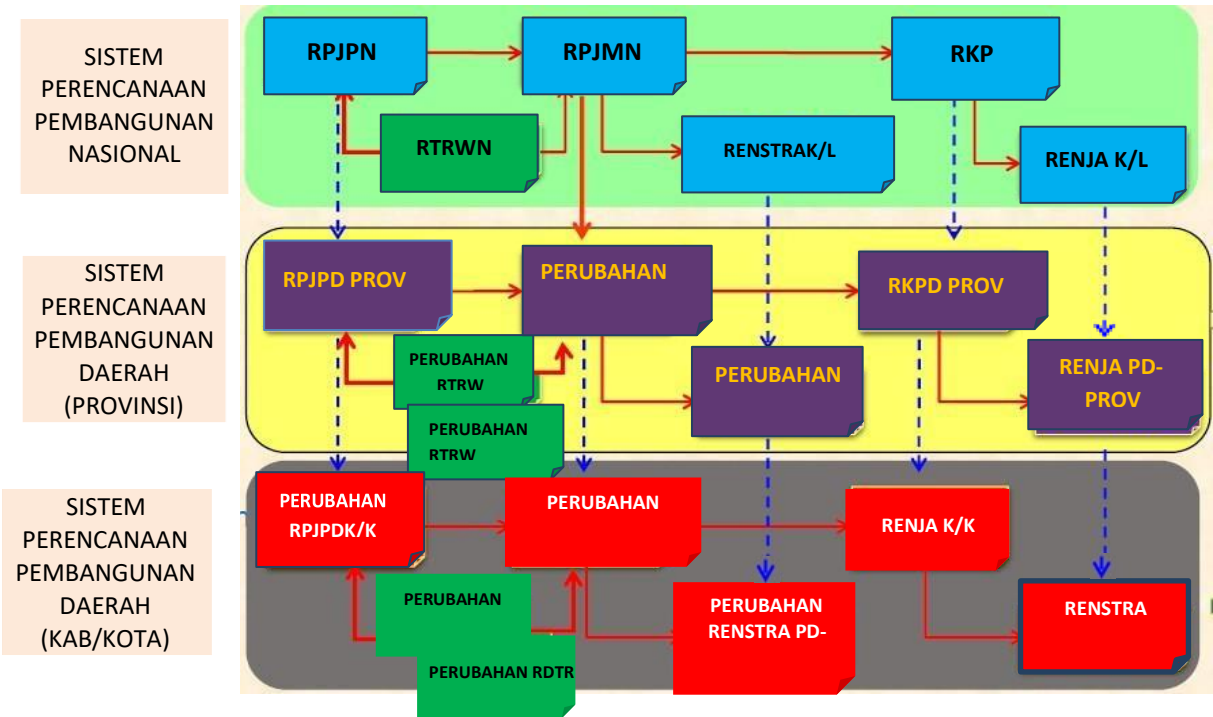
1.3 Hubungan antar Dokumen

Keterkaitan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 dengan dokumen perencanaan dan anggaran lainnya secara vertikal mencakup yaitu penyusunan Perubahan RPJMD ini berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, Perubahan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Keterkaitan secara horizontal mencakup yaitu Perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 ini berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Sinjai Tahun 2009-2029 kemudian dijabarkan kedalam perubahan RENSTRA-PD dan RKPD dan sebagai acuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya KUA-PPAS, RENJA-PD dan dijadikan dasar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Selain itu menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten/Kota.

Dokumen RPJPD Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 termasuk perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan peraturan daerah sedangkan dokumen RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati, KUA-PPAS dengan Nota Kesepakatan dan dokumen APBD ditetapkan dengan peraturan daerah.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar I.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dalam Sistem Perencanaan
Pembangunan



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah

Tabel 1.1.

Keterkaitan Antar RPJM Nasional Tahun 2020-2024 dengan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023

No.	Misi RPJMN 2020-2024	Misi Perubahan RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023	Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter	Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif	Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis
		Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat mealui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah

No.	Misi RPJMN 2020-2024	Misi Perubahan RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018-2023	Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan	Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif	
6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya		Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang patuh kepada hukum.
7	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya		
9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan		

1.4 Maksud dan Tujuan

Perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJPD Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 dan menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program prioritas daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 disusun dengan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD perencanaan daerah untuk satu tahun.
3. Menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4. Sebagai pedoman Tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai.
5. Menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah.
6. Menjadi dasar bagi Pemerintah Pusat dalam pengalokasian anggaran pembangunan di Kabupaten Sinjai berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN.
7. Sebagai pedoman bagi stakeholder khususnya dalam pencapaian target kinerja program prioritas serta dukungan pendanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Perubahan RPJMD Kab. Sinjai Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan RPJMD yang berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan perubahan RPJMD, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan perubahan RPJMD serta sistematika penulisan perubahan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah adalah bagian yang menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang

meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan aspek-aspek tersebut. Gambaran kondisi umum daerah dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian pada tahap perumusan berupa informasi yang relevan dan penting yang menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, meliputi : kinerja keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan, dan kerangka pendanaan.

Bab IV Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah menguraikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang menjadi dasar utama dalam penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah, yang menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Sulawesi Selatan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Bab V Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran menguraikan tentang visi dan misi kepala daerah terpilih, serta perumusan tujuan dan sasaran yang akan hendak dicapai kepala dan wakil kepala daerah Provinsi Sulawesi Selatan hingga akhir periode RPJMD ini.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan, Dan Program Pembangunan Daerah merupakan bagian yang menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sedangkan program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam RENSTRA Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menguraikan penetapan indikator kinerja daerah untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Bab IX Penutup menguraikan pedoman transisi yang disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dengan memasukan program-program yang diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum dicapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dan Kaidah pelaksanaan sebagai acuan dalam pelaksanaan dokumen sehingga sesuai dengan yang direncanakan.

BAB II

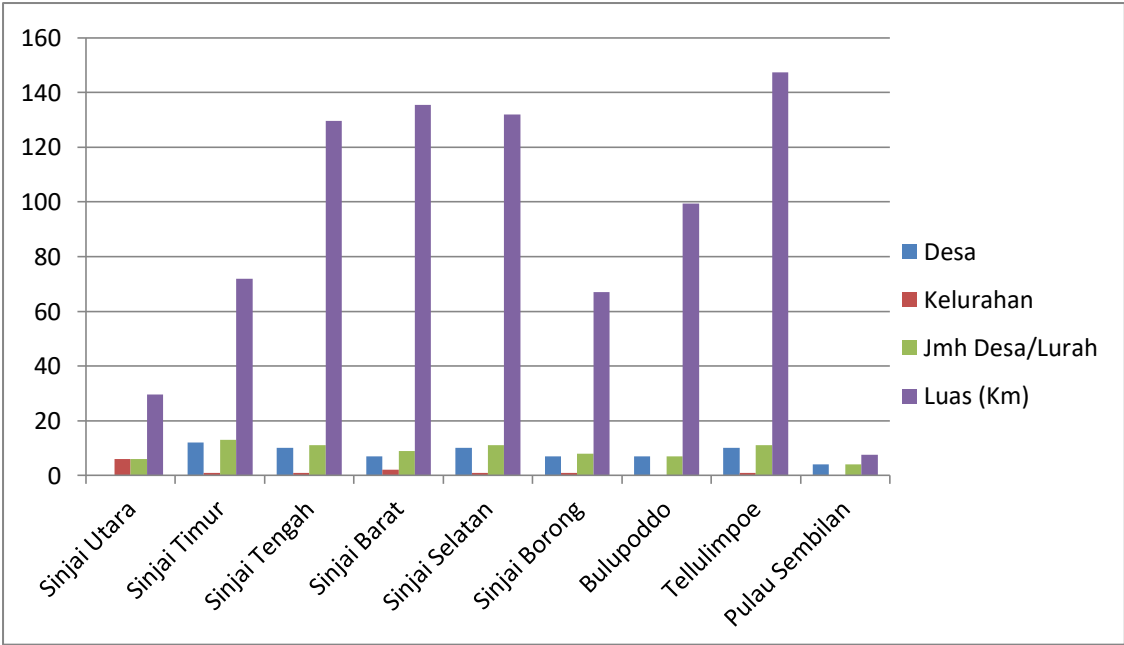
GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Secara administratif, Kabupaten Sinjai terdiri dari 9 Kecamatan, 67 Desa, 13 Kelurahan dan 321 Dusun/Lingkungan, dimana ibukota Kabupaten berada di Kecamatan Sinjai Utara. Kecamatan Tellulimpoe merupakan kecamatan terluas dengan luas 147,30 km² atau 18 persen dari luas wilayah Kabupaten Sinjai. Adapun rincian jumlah kecamatan, kelurahan/desa, dan luas wilayah masing-masing dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.1
Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Luas Wilayah
Setiap Kecamatan



Adapun rincian jumlah kecamatan beserta ibukotanya, jumlah kelurahan/desa, dan luas wilayah masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Kecamatan, Kelurahan / Desa, dan Luas wilayah setiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Kel/Desa
			km ²	%	
1.	Sinjai Barat	Manipi	135,53	16,53	9
2.	Sinjai Borong	Pasir Putih	66,97	8,17	8
3.	Sinjai Selatan	Bikeru	131,99	16,10	11
4.	Tellulimpoe	Mannanti	147,30	17,96	11
5.	Sinjai Timur	Mangarabombang	71,88	8,77	13
6.	Sinjai Tengah	Lappadata	129,70	15,82	11
7.	Sinjai Utara	Balangnipa	29,57	3,61	6
8.	Bulupoddo	Bulupoddo	99,47	12,13	7
9.	P. Sembilan	Kambuno	7,55	0,92	4
Jumlah			819,96	100	80

Sumber: Sinjai Dalam Angka 2021

Adapun rincian jumlah Kecamatan, beserta Kelurahan / Desa dan jumlah dusun /lingkungan masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Dusun/Lingkungan Kabupaten Sinjai

No.	Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah Lingkungan	Jumlah Dusun
1	Sinjai Utara	Lamatti rilau	4	-
		Alehanuae	4	-
		Lappa	7	-
		Balangnipa	5	-
		Bongki	4	-
		Biringere	5	-
		JUMLAH	29	-
2	Sinjai Timur	Samataring	5	-
		Sanjai	-	3
		Pattalassang	-	4
		Panaikang	-	3
		Saukang	-	4
		Kampala	-	3
		Lasiai	-	5
		Biroro	-	3
		Kaloling	-	3
		Pasimarannu	-	3
		Tongke-Tongke	-	5
		Bongki Lengkese	-	3

No.	Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah Lingkungan	Jumlah Dusun
		Salohe	-	3
		JUMLAH	5	42
3	Sinjai Tengah	Samaenre	4	-
		Mattunreng Tellue	-	7
		Kompang	-	3
		Baru	-	4
		Pattongko	-	4
		Saotengnga	-	4
		Saohiring	-	5
		Kanrung	-	6
		Saotanre	-	4
		Bonto	-	3
		Gantarang	-	3
		JUMLAH	4	43
4	Sinjai Selatan	Sangiaseri	5	-
		Puncak	-	6
		Songing	-	4
		Aska	-	5
		Talle	-	6
		Palae	-	4
		Bulu Kamase	-	6
		Palangka	-	5
		Polewali	-	5
		Alenangka	-	4
		Gareccing	-	3
		JUMLAH	5	23
5	Sinjai Barat	Balakia	4	-
		Tassililu	4	-
		Gunung Perak	-	6
		Arabika	-	3
		Bonto Salama	-	5
		Turungan Baji	-	5
		Barania	-	3
		Bonto Lempangan	-	4
		Terasa	-	8
		JUMLAH	8	34

No.	Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah Lingkungan	Jumlah Dusun
6	Sinjai Borong	Pasir Putih	3	-
		Batu Belerang	-	4
		Biji Nangka	-	3
		Barambang	-	4
		Bonto Sinala	-	3
		Kassi Buleng	-	4
		Bonto Katute	-	4
		Bonto Tengnga	-	4
	JUMLAH		3	26
7	Bulupoddo	Lamatti Riattang	-	4
		Lamatti Riaja	-	5
		Bulu Tellue	-	6
		Duampanuae	-	7
		Tompobulu	-	7
		Lamatti Riawang	-	4
		Lappa Cinrana	-	2
JUMLAH		-	36	
8	Tellulimpoe	Mannanti	6	-
		Saotengah	-	4
		Kalobba	-	5
		Tellu Limpoe	-	5
		Massaile	-	4
		Lembang Lohe	-	4
		Pattongko	-	5
		Bua	-	5
		Suka Maju	-	4
		Era Baru	-	4
		Samaturue	-	4
	JUMLAH		6	44
9	Pulau Sembilan	Pulau Buhung Pitue	-	3
		Pulau Harapan	-	4
		Pulau Padaelo	-	3
		Pulau Persatuan	-	3
	JUMLAH		-	13
Jumlah			60	261

Sumber : Kabupaten Sinjai Dalam Angka 2021

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Sinjai memiliki luas wilayah 819,96 km² (81.996 Ha), dengan Jarak antara Kabupaten Sinjai dengan Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dari 3 (tiga) jarak tempuh Sinjai ke Makassar, yaitu 233 Km melalui jalur selatan (Sinjai-Bantaeng-Makassar), 164 Km melalui jalur barat (Sinjai-Malino-Makassar), dan 186 km melalui jalur utara (Sinjai-Maros-Makassar).

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografi

Secara Astronomis Kabupaten Sinjai terletak antara tepatnya terletak diantara 50 2'56"-50 21'16" Lintang Selatan (LS) dan antara 119 56'30" – 120 25'33" Bujur Timur (BT).

Berdasarkan posisi geografis Kabupaten Sinjai memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng
- Sebelah Timur dengan Teluk Bone,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Wilayah Kabupaten Sinjai didominasi oleh wilayah perbukitan dan pegunungan. Meskipun demikian, di wilayah ini tidak terdapat gunung berapi. Daerah pegunungan di Kabupaten Sinjai sebagian besar terletak di Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Borong dan Kecamatan Bulupoddo. Akibat kondisi topografi tersebut, maka pengembangan wilayah Kabupaten Sinjai menjadi terbatas.

Dari 9 (sembilan) kecamatan yang ada di Kabupaten Sinjai, kecamatan yang memiliki wilayah dataran yang cukup luas adalah Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Tellulimpoe dan Kecamatan Pulau Sembilan. Dataran yang memiliki sumber daya air yang cukup dimanfaatkan masyarakat sebagai areal persawahan. Ketinggian dari permukaan laut wilayah Kabupaten Sinjai, bervariasi dari 0–1.000 meter dpl.

2.1.1.3. Topografi

Secara morfologi, kemiringan lereng, wilayah Kabupaten Sinjai terbagi empat kriteria morfologis yaitu datar dengan kemiringan 0-2% seluas 22.247 ha, sangat landai dengan kemiringan 2-5 % seluas 8.407 ha, landai dengan kemiringan 5-15% seluas 56.924 ha, agak curam dengan kemiringan 15-40% seluas 61.417 ha, dan terjal dengan kemiringan >40% seluas 10.736 ha.

Dan ditinjau dari topografi wilayah Kabupaten Sinjai dibedakan atas 7 (tujuh) klasifikasi ketinggian, yaitu ketinggian 0-300 mdpl seluas 86.474 ha, ketinggian 300-500 mdpl seluas 21.012 ha, ketinggian 500-1.000 mdpl seluas 34.180 ha, ketinggian 1.000-1.500 mdpl seluas 11.536 ha, ketinggian 1.500-2.000 mdpl seluas 3.824 ha, ketinggian 2.000-2.500 mdpl seluas 2.311 ha, ketinggian >2.500 mdpl seluas 394 ha.

Berdasarkan klasifikasi menurut ketinggian diatas permukaan laut (dpl), wilayah Kabupaten Sinjai terbagi ke dalam 5 (lima) klasifikasi ketinggian, dengan rincian luasan sebagai berikut :

- Area ketinggian 0-25 m dpl, seluas 45,41 km²;
- Area ketinggian 25–100 m dpl, seluas 79,83 km²;
- Area ketinggian 100–500 m dpl, seluas 455,35 km²;
- Area ketinggian 500–1.000 m dpl, seluas 173,68 km²;
- Area ketinggian >1.000 m dpl, seluas 65,69km².

kondisi ketinggian diatas permukaan laut wilayah Kabupaten Sinjai, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Luas Wilayah Kecamatan Menurut Ketinggian Diatas Permukaan Laut
Kabupaten Sinjai Tahun 2020

NO	KECAMATAN	KETINGGIAN	LUAS(HA)	PERSENTASE
1	Sinjai Barat	<25 Meter	-	-
		25-100 Meter	-	-
		100-500 Meter	1.885	13,91
		500-1000 Meter	6.747	49,78
		>1000	4,921	36,31
LUAS KECAMATAN SINJAI BARAT			13.553	100,00
2	Sinjai Borong	<25 Meter	-	-
		25-100 Meter	-	-
		100-500 Meter	69	4,19
		500-1000 Meter	3.980	69,86
		>1000	1.648	28,93
LUAS KECAMATAN SINJAI BORONG			5.697	100,00
3	Sinjai Selatan	<25 Meter	81	0,61
		25-100 Meter	206	1,56
		100-500 Meter	12.256	96,86
		500-1000 Meter	656	4,97
		>1000	-	-
LUAS KECAMATAN SINJAI SELATAN			13.199	100,00

NO	KECAMATAN	KETINGGIAN	LUAS(HA)	PERSENTASE
4	Tellu Limpoe	<25 Meter 25-100 Meter 100-500 Meter 500-1000 Meter >1000	288 2.254 11.088 - -	2,11 16,54 81,35 -
LUAS KECAMATAN TELLU LIMPOE			13.630	100,00
5	Sinjai Timur	<25 Meter 25-100 Meter 100-500 Meter 500-1000 Meter >1000	1.974 1.379 3.835 - -	27,46 19,18 53,35 - -
LUAS KECAMATAN SINJAI TIMUR			7.188	100,00
6	Sinjai Tengah	<25 Meter 25-100 Meter 100-500 Meter 500-1000 Meter >1000	- - 9.554 3.416 -	- - 73,66 26,34 -
LUAS KECAMATAN SINJAI TENGAH			12.970	100,00
7	Sinjai Utara	<25 Meter 25-100 Meter 100-500 Meter 500-1000 Meter >1000	1.443 1.452 62 - -	48,80 49,10 2,10 - -
LUAS KECAMATAN SINJAI UTARA			2.957	100,00
8	Bulupoddo	<25 Meter 25-100 Meter 100-500 Meter 500-1000 Meter >1000	- 2.592 5.786 1.569 -	- 26,06 66,32 15,77 -
LUAS KECAMATAN BULUPODDO			9.947	100,00
9	Pulau Sembilan	<25 Meter 25-100 Meter 100-500 Meter 500-1000 Meter >1000	755 - - - -	100 - - - -
LUAS KECAMATAN PULAU SEMBILAN			755	100,00

Sumber : Sinjai Dalam Angka, Tahun 2021

2.1.1.4. Geologi

Secara umum keadaan geologi atau jenis batuan merupakan gambaran proses dan waktu pembentukan bahan induk serta penampakan morfologis tanah, seperti tebing, kaldera gunung dan sebagainya. Persebaran jenis batuan di Kabupaten Sinjai

terbagi dalam 5 (lima) kelompok atau golongan yaitu :batuan vulkanik/beku, batuan endapan, batuan mikan atau metamorf, batuan alluvial dan batuan organik.

Sepsifikasi jenis batuan di Kabupaten Sinjai merupakan batuan yang termuda berumur Plesistosen dan tersusun batuan induk, lava, breksi, endapan lahar dan tufa, diatas menindih tidak selaras endapan alluvial yang berupa pasir kerikil, lempung dna lahar yang umumnya masih terlepas. Di kawasan pantai umumnya terdapat hamparan pasir laut yang cukup tebal dengan struktur tanah keras berada di kedalaman 1,5-2 meter dari permukaan lapisan pasir atau tanah.

2.1.1.5. Hidrologi

Ada 2 (dua) jenis kategori hidrologi yang melingkupi wilayah Kabupaten Sinjai, yaitu 1} jenis air permukaan 2} jenis air tanah dangkal dan air tanah dalam. Kedua jenis air tersebut berasal dari air hujan yang sebagian mengalir di permukaan (*run-off*) dan sebagian lagi meresap kedalam tanah.

- Untuk jenis air permukaan, beberapa diantaranya adalah sungai-sungai yang mengalir melalui wilayah ini, diantaranya Sungai Tangka, Sungai Mangottong, Sungai Kalamisu, Sungai Bua, Sungai Lolisang, Sungai Balantieng serta beberapa sungai kecil lainnya, yang sebagian besar bermuara ke Teluk Bone.
- Berdasarkan penelitian, potensi sumber air permukaan (1998) sebesar 15.137.280 ribu m3 atau debit sekitar 3,12 m3 / detik dan sebagian besar potensi air tersebut dimanfaatkan untuk keperluan pertanian. Mengenai air tanah dangkal dengan kedalaman sekitar 6 meter berupa sumur gali banyak mengandung kapur dan air tanah dalam dengan kedalaman 75–100 meter berupa sumur bor, banyak dimanfaatkan penduduk untuk keperluannya.

Sungai yang paling besar yang ada di Kabupaten Sinjai adalah sungai bua dengan panjang sungai 81,45 Km sedangkan sungai yang paling sempit adalah sungai balangtieng dengan panjang 20 km. Adapun sungai paling lebar di Kabupaten Sinjai adalah sungai tangka dengan lebar 90 Meter sedangkan sungai yang sempit adalah sungai balangtieng dengan lebar 15 meter. Dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.4
Beberapa Sungai Besar yang Ada Dalam Wilayah Kabupaten Sinjai,
Tahun 2020

NO.	NAMA SUNGAI	PANJANG (KM)	LEBAR (M)	(DEBIT M ³ /DETIK)	
				Maks.	Min.
1	Tangka	72,00	90	25,00	10,00
2	Mangottong	47,00	55	25,00	8,00

NO.	NAMA SUNGAI	PANJANG (KM)	LEBAR (M)	(DEBIT M ³ /DETIK)	
				Maks.	Min.
3	Kalamisu	57,00	40	30,00	11,00
4	Bua	81,45	30	10,20	3,53
5	Lolisang	29,40	25	10,00	4,50
6	Balangtieng	20,00	15	7,50	2,41

Sumber: Sinjai Dalam Angka Tahun 2021

2.1.1.6. *Klimatologi*

Kabupaten Sinjai merupakan daerah beriklim tropis yang memiliki2 (dua) musim, yaitu musim penghujan pada periode April-Oktober dan musim kemarau yang berlangsung pada periode Oktober-April. Dari keseluruhan tipe iklim yang ada tersebut, Kabupaten Sinjai mempunyai curah hujan berkisar antara 2.000–4.000 mm/tahun, dengan hari hujan yang bervariasi antara 100–160 hari hujan/tahun. Kelembaban udara rata-rata tercatat berkisar antara 64–87 persen, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 21,2°C-32,4°C.

Selain itu ada 3 (tiga) tipe iklim menurut *Schmidt & Fergusson* yang terjadi dan berlangsung di wilayah ini, yaitu iklim tipe B2, C2, D2 & tipe D3.

- Area/zona dengan iklim tipe B2 dimana bulan basah berlangsung selama 7-9 bulan berturut-turut, sedangkan bulan kering berlangsung 2–4 bulan sepanjang tahun. Penyebarannya meliputi sebagian besar wilayah Kecamatan Sinjai Timur dan Sinjai Selatan.
- Zona dengan iklim tipe C2, dicirikan dengan adanya bulan basah yang berlangsung antara 5–6 bulan, sedangkan bulan keringnya berlangsung selama 3–5 bulan sepanjang tahun. Penyebarannya meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Sinjai Timur, Sinjai Selatan dan Sinjai Tengah.
- Zona dengan iklim tipe D2, mengalami bulan basah selama 3–4 bulan, & bulan keringnya berlangsung selama 2–3 bulan. Penyebarannya meliputi wilayah bagian tengah Kabupaten Sinjai, yaitu sebagian kecil wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, Sinjai Selatan dan Sinjai Barat.
- Zona dengan iklim tipe D3, dicirikan dengan berlangsungnya bulan basah antara 3–4 bulan, bulan kering berlangsung antara 3–5 bulan. Penyebarannya meliputi sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, Sinjai Tengah dan Sinjai Selatan.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.2.1. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah merupakan wilayah yang dapat dibudidayakan dan difungsikan untuk kepentingan pembangunan dalam bentuk kegiatan usaha berbagai sektor atau sub sektor pembangunan yang terkait. Kriteria kawasan budidaya adalah ukuran yang meliputi daya dukung, aspek-aspek yang mempengaruhi sinergi antar kegiatan dan kelestarian lingkungan. Penetapan kawasan budidaya dapat dikelompokkan ke dalam dua kriteria, yaitu kriteria sektoral dan kriteria ruang.

Kriteria teknis sektoral kawasan budidaya adalah suatu kegiatan dalam kawasan yang memenuhi ketentuan-ketentuan teknis seperti daya dukung, kesesuaian lahan, bebas bencana, dan lain-lain. Sedangkan kriteria ruang kawasan budidaya menentukan pemanfaatan ruang kegiatan budidaya yang menghasilkan nilai sinergi terbesar untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kelestarian lingkungan.

Pengelolaan kawasan budidaya adalah suatu pendekatan dalam mengelola kawasan-kawasan di luar kawasan lindung agar pemanfaatannya dilakukan secara optimal, selaras, dan serasi dengan kawasan lindung dalam mewujudkan pembangunan daerah.

Rencana pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Sinjai, terdiri atas :

- a. Kawasan Hutan Produksi
- b. Kawasan Perkebunan Rakyat
- c. Kawasan Pertanian
- d. Kawasan Perikanan
- e. Kawasan Pertambangan dan Energi
- f. Kawasan Peruntukan Industri
- g. Kawasan Pariwisata
- h. Kawasan Permukiman
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

a. Kawasan Hutan Produksi

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu. Selain itu, pemanfaatan hutan produksi lainnya berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan baik kayu maupun non kayu. Hutan Produksi memiliki banyak kegunaan dan manfaat. Salah satunya adalah

menghasilkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan bahan baku industri.

Berdasarkan jenisnya, hutan produksi yang terdapat di Kabupaten Sinjai adalah merupakan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 6.883 hektar, meliputi :

- a. Kecamatan Bulupoddo, seluas kurang lebih 1.724,41 hektar
- b. Kecamatan Sinjai Barat, seluas kurang lebih 3.842,21 hektar
- c. Kecamatan Sinjai Selatan, seluas kurang lebih 411,08 hektar, dan
- d. Kecamatan Sinjai Tengah, seluas kurang lebih 904,97 hektar.

b. Kawasan Perkebunan Rakyat

Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman berkayu dan atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap Ha. Artinya perkebunan jenis ini apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai kehutanan termasuk ke dalam perkebunan hak karena lahannya dimiliki oleh sektor privat atau swasta.

Menurut jenis tanaman yang ada pada perkebunan rakyat, ini dibedakan menjadi :

- Perkebunan rakyat murni

Hutan rakyat murni merupakan hutan yang hanya terdiri atas satu jenis pohon yang ditanam secara homogen atau monokultur.

- Campuran

Hutan rakyat campuran (*polyculture*) adalah hutan yang terdiri atas berbagai jenis pepohonan yang ditanam secara campuran.

- **Agroforestry**

Agroforestry merupakan hutan yang memiliki kombinasi antara kehutanan dengan cabang usaha tani lainnya, seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakandan lain-lain yang saling terpadu.

Rencana pengembangan perkebunan rakyat di Kabupaten Sinjai, diarahkan seluas kurang lebih 1.450 (seribu empat ratus lima puluh) hektar, meliputi:

- Kecamatan Bulupoddo, seluas kurang lebih 207,86 hektar
- Kecamatan Pulau Sembilan, seluas kurang lebih 51,77 hektar
- Kecamatan Sinjai Barat, seluas kurang lebih 440.79 hektar
- Kecamatan Sinjai Borong, seluas kurang lebih 536.85 hektar
- Kecamatan Sinjai Selatan, seluas kurang lebih 16,42 hektar, dan
- Kecamatan Sinjai Tengah, seluas kurang lebih 196,40 hektar.

c. Kawasan Pertanian

Rencana pengembangan kawasan budidaya pertanian dilakukan berdasarkan kesesuaian lahannya dan memperhatikan kondisi penggunaan lahan eksisting. Metoda analisis kesesuaian lahan pertanian menggunakan kerangka sistem *Food and Agriculture Organization* yang dikembangkan oleh Lembaga Penelitian Tanah yang menghasilkan peta Kesesuaian Lahan. Parameter yang dinilai meliputi kedalaman efektif tanah, tekstur tanah, permeabilitas, kesuburan, reaksi tanah, kemiringan lahan (*slope*), relief mikro, drainase, ketersediaan air, erosi dan banjir.

Dari data yang terhimpun dikelompokkan sesuai dengan klasifikasi dalam Kriteria Kesesuaian Lahan Pertanian, kemudian ditumpangtindihkan (*superimpose*) antara klasifikasi parameter tersebut. Hasil akhir diperoleh Unit Kesesuaian Lahan dan dinilai secara kualitatif. Adapun klasifikasi kesesuaian lahan yang digunakan:

- S1 (sangat sesuai) : lahan tidak mempunyai pembatas yang serius untuk menerapkan pengelolaan yang diberikan, atau hanya mempunyai pembatas yang tidak berarti.
- S2 (cukup sesuai) : lahan mempunyai pembatas-pembatas agak serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan. Pembatas ini akan mengurangi produksi dan keuntungan dan meningkatkan masukan yang diperlukan.
- S3 (sesuai marginal) : lahan mempunyai pembatas-pembatas serius untuk mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan. Pembatas ini akan mengurangi produksi dan keuntungan atau lebih meningkatkan masukan yang diperlukan.
- N1 (tidak sesuai pada saat ini) : lahan mempunyai pembatas yang lebih serius, tetapi masih mempunyai kemungkinan untuk diatasi hanya tidak dapat diperbaiki dengan tingkat pengelolaan dengan modal normal.
- N2 (tidak sesuai permanen) : lahan mempunyai pembatas permanen sehingga mencegah segala kemungkinan penggunaan berkelanjutan pada lahan tersebut.

Jenis pembatas atau macam perbaikan yang harus dijalankan ditunjukkan dengan huruf kecil, misalnya d (drainase), x (salinitasi), t (topografi), dan m (ketersediaan air). Pemanfaatan ruang kawasan pertanian dikembangkan dalam rangka mencapai tujuan sebagai berikut :

- Tetap terjaga kualitas lingkungan.

- Terciptanya pertumbuhan perekonomian wilayah yang berbasis perekonomian lokal.
- Pengembangan kualitas dan kuantitas produksi pertanian agar dapat mencapai optimal.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka arahan pengembangan pertanian di Kabupaten Sinjai meliputi:

a. Kawasan pertanian tanaman pangan

Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari lahan fungsi budidaya. Keberadaanya sangat penting dalam menyokong kedaulatan pangan baik untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya maupun untuk di jual ke luar wilayahnya.

Bagi sektor pertanian, lahan merupakan faktor produksi utama dan tak tergantikan. Berbeda dengan penurunan produksi yang disebabkan oleh serangan hama penyakit, kekeringan, banjir dan faktor lainnya lebih bersifat sementara, maka penurunan produksi yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan lebih bersifat permanen dan sulit untuk diperbaiki. Sehingga berkurangnya luasan lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian secara signifikan dapat mengganggu stabilitas kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan baik lokal maupun nasional.

Arahan pengembangan lahan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Sinjai diarahkan seluas kurang lebih 14.878,51 Ha. Distribusi lahan pertanian tanaman pangan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

No.	KECAMATAN	LUAS (Ha)
1	Bulupoddo	1.712,65
2	Sinjai Barat	1.985,49
3	Sinjai Borong	1.007,91
4	Sinjai Selatan	3.504,06
5	Sinjai Tengah	1.949,34
6	Sinjai Timur	2.511,12
7	Sinjai Utara	435,41
8	Tellu Limpoe	1.772,53
Total		14.878,51

Sumber : Rencana, 2019

Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian menjadi fenomena yang terjadi hampir di semua wilayah. Satu hal yang mungkin tidak menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan alih fungsi lahan adalah dampak yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan tersebut.

Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh adanya konversi lahan yang begitu luas, maka diperlukan upaya pengendalian yang dapat mengontrol laju alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian dengan menjadikan aspek daya dukung lingkungan dan ketersediaan lahan sebagai salah satu pertimbangan.

Salah satu upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan yang (1) Menjamin tersedianya lahan pertanian yang cukup, (2) Mampu mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian secara tidak terkendali, dan (3) Menjamin akses masyarakat petani terhadap lahan pertanian yang tersedia.

Untuk mengendalikan konversi lahan pertanian, melalui Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diharapkan dapat mendorong ketersediaan lahan pertanian untuk menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 bertujuan untuk:

- Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
- Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
- Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan
- Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani
- Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat
- Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani
- Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak
- Mempertahankan keseimbangan ekologis, dan
- Mewujudkan revitalisasi pertanian

Didalam penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan, lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan mengacu pada turunan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman teknis kriteria dan persyaratan kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

b. Kawasan Pertanian Hortikultura

Kawasan hortikultura adalah hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya maupun faktor infrastruktur fisik buatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, penetapan kawasan hortikultura dilakukan dengan memperhatikan aspek sumberdaya hortikultura, potensi unggulan yang ingin dikembangkan, potensi pasar, kesiapan dan dukungan masyarakat, dan kekhususan wilayah.

Pengembangan hortikultura berbasis kawasan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

- Memungkinkan penangaanan berbasis komoditas hortikultura secara terpadu sesuai dengan kesamaan karakteristiknya.
- Memberikan peluang bagi semua komoditas potensial di kawasan untuk ditangani secara proporsional.
- Merupakan wadah dan wahana pelaksanaan desentralisasi pembangunan secara nyata, sinergis, dan harmonis, diantara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
- Memungkinkan “critical mass” penggalangan sumberdaya sehingga terjadi sinergi dari berbagai sumberdaya.
- Membedakan secara jelas karakter dan pengukuran kinerja antara pengembangan dan perbaikan.
- Meningkatkan kegiatan ekonomi di kawasan dan sekitarnya.
- Skala pengembangan usaha menjadi lebih luas.
- Sebagai entry point pelayanan inovasi, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pembiayaan.

Menurut Permentan No. 41 Tahun 2009, penetapan kawasan budidaya hortikultura dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- Mempunyai kesesuaian lahan yang didukung dengan sarana dan prasarana budidaya, panen, dan pasca panen.
- Memiliki potensi untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis hortikultura.
- Mempunyai akses, prasarana transportasi jalan serta pengangkutan yang mudah dan dekat dengan pusat pemasaran dan pengumpulan produksi.

Berdasarkan pada indikator di atas serta mempertimbangkan potensi dan ketersediaan lahan di Kabupaten Sinjai maka rencana pengembangan kawasan hortikultura sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.6.
Kawasan Pertanian Hortikultura

NO	KECAMATAN	LUAS (Ha)
1	Bulupoddo	1,067.52
2	Sinjai Barat	524.08
3	Sinjai Borong	395.59
4	Sinjai Selatan	595.31
5	Sinjai Tengah	395.51
6	Sinjai Timur	600.07
7	Sinjai Utara	192.39
8	Tellu Limpoe	1,608.89
Total		5,379.36

Sumber : Rencana, 2019

c. Kawasan perkebunan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.

Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan, dengan tujuan:

- Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- Meningkatkan penerimaan negara;
- Meningkatkan penerimaan devisa negara;
- Menyediakan lapangan kerja;
- Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;
- Memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri;
- Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Perkebunan mempunyai fungsi :

- Ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional.
- Ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung.

- Sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Berdasarkan pertimbangan di atas serta mengac pada hasil analisis kesesaian lahan untuk perkebunan, maka arahan pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Sinjai sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.7
Kawasan Perkebunan

NO.	KECAMATAN	LUAS (Ha)
1	Bulupoddo	4,410.59
2	Pulau Sembilan	104.25
3	Sinjai Barat	3,211.25
4	Sinjai Borong	3,817.45
5	Sinjai Selatan	6,848.08
6	Sinjai Tengah	6,888.19
7	Sinjai Timur	2,623.50
8	Sinjai Utara	664.19
9	Tellu Limpoe	9,432.91
Total		38,000.40

Sumber : Rencana, 2019

d. Kawasan peternakan

subsektor peternakan menjadi salah satu andalan pembangunan nasional maupun regional dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, penyediaan produksi kebutuhan pangan dan perolehan devisa. Pembangunan kawasan peternakan merupakan strategi umum untuk meningkatkan kesejahteraan peternak, meningkatkan daya saing produk pertanian serta menjaga kelestarian sumberdaya pertanian. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Daerah telah mendukung masyarakat serta *stakeholder* terutama pada daerah potensil untuk pengembangan peternakan.

Untuk menentukan daerah potensial untuk peternakan maka perlu dilakukan kajian mendalam terhadap sumber daya lahan untuk pengembangan hijauan makanan ternak, daya dukung lahan terhadap satuan unit ternak yang ideal sesuai dengan kemampuan sumberdaya yang ada, dan teknologi pengelolaan sumberdaya lahan agar dapat berproduksi secara lestari. Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka rencana pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Sinjai diarahkan di seluruh wilayah kecamatan dengan mempertimbangkan potensi masing-masing wilayah.

Berdasarkan UU No 41 tahun 2009 Tentang tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian, untuk keperluan Kemandirian, Keamanan dan Ketahanan Pangan maka diperlukan Penyelamatan Lahan Pertanian Pangan. Penyelamatan harus segera dilakukan karena laju konversi lahan sawah atau pertanian pangan lainnya sangat cepat. Penyelamatan lahan pertanian pangan dari lahan pertanian pangan yang sudah ada atau cadangannya yang disusun berdasarkan kriteria yang mencakup kesesuaian lahan, ketersediaan infrastruktur, penggunaan lahan, potensi lahan dan adanya luasan dalam satuan hamparan (Pasal 9). Amanat undang-undang tersebut perlu ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi lahan pertanian yang ada saat ini baik yang beririgasi dan tidak beririgasi. Untuk menghambat laju konversi maka UU ini memerlukan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Upaya perlindungan LP2B dilakukan melalui pembentukan kawasan (KP2B) yang akan terdiri dari LP2B dan LCP2B dan berbagai unsur pendukungnya. Hal ini bermakna selain sawah maka berbagai unsur pendukung juga perlu diketahui untuk menentukan kebijakan atau program yang sesuai. KP2B selanjutnya perlu menjadi bagian integral Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, sedangkan LP2B dan LCP2B diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang rinci. Dalam perundangan ini juga dinyatakan lahan pertanian pangan yang akan dilindungi bisa menjadi bagian kawasan maupun membentang di luar kawasan. Dalam perundangan ini juga dinyatakan lahan pertanian pangan yang akan dilindungi dapat terdapat di dalam kawasan maupun di luar kawasan.

Berdasarkan INDIKATOR di atas, maka penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) kabupaten sinjai adalah seluas kurang lebih 13.588 hektar meliputi:

- Kecamatan Bulupoddo;
- Kecamatan Sinjai Barat;

- Kecamatan Sinjai Borong;
- Kecamatan Sinjai Selatan;
- Kecamatan Sinjai Tengah;
- Kecamatan Sinjai Timur;
- Kecamatan Sinjai Utara; dan
- Kecamatan Tellulimpoe.

d. Kawasan Perikanan

Undang-undang RI No. 45/2009, menjelaskan bahwa kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Lebih lanjut bahwa Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan (usaha penetasan, pembibitan, pembesaran) ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, pengeringan, atau mengawetkan ikan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha.

Berdasarkan karakteristik wilayah Kabupaten Sinjai yang merupakan daerah pegunungan dan sebagian merupakan daerah pantai dan kepulauan, maka pengembangan usaha perikanan yang dapat dikembangkan adalah merupakan perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Pengembangan perikanan tangkap sesuai dengan karakteristik wilayahnya, maka arahan pengembangannya, meliputi:

- a. Kecamatan Pulau Sembilan;
- b. Kecamatan Sinjai Timur;
- c. Kecamatan Sinjai Utara; dan
- d. Kecamatan Tellulimpoe

Sedangkan untuk perikanan budidaya, diarahkan pada pengembangan budidaya air tawar, budidaya air payau, serta budidaya perikanan laut. Arahan pengembangannya adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan perikanan budidaya air tawar berupa minapolitan, meliputi:
 - Kecamatan Bulupoddo;
 - Kecamatan Sinjai Barat;
 - Kecamatan Sinjai Borong;
 - Kecamatan Sinjai Selatan;
 - Kecamatan Sinjai Tengah;

- Kecamatan Sinjai Timur;
 - Kecamatan Sinjai Utara; dan
 - Kecamatan Tellulimpoe.
- b. Kawasan perikanan budidaya air payau, seluas kurang lebih 716 hektar, meliputi:
- Kecamatan Sinjai Utara;
 - Kecamatan Sinjai Timur; dan
 - Kecamatan Tellulimpoe.
- c. Kawasan budidaya perikanan laut, meliputi:
- Kecamatan Pulau Sembilan;
 - Kecamatan Sinjai Utara
 - Kecamatan Sinjai Timur; dan
 - Kecamatan Tellulimpoe.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang ada di Kabupaten Sinjai, maka ketersediaan sarana dan prasarana perikanan sangat dibutuhkan, antara lain pelabuhan perikanan, tempat pelelangan ikan dan pengolahan hasil-hasil perikanan. Untuk menunjang hal tersebut, maka direncanakan pengembangan tempat pelelangan ikan (TPI) Lappa di Kecamatan Sinjai Utara, tempat pelelangan ikan (TPI) Tongke-tongke di Kecamatan Sinjai Timur, pelabuhan pendaratan ikan (PPI) Lappa di Kecamatan Sinjai Utara, dan pelabuhan perikanan di Tongke-tongke di Kecamatan Sinjai Timur

Berdasarkan pada potensi sumber daya dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung perikanan, maka arahan pengembangannya adalah sebagai berikut :

- Pembangunan perikanan bertanggung jawab dan ramah lingkungan;
- Orientasi pembangunan perikanan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan petani ikan;
- Penyediaan bahan pangan, bahan baku industri dan peningkatan ekspor;
- Penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha;
- Penciptaan kualitas sumber daya manusia;
- Penciptaan iklim usaha yang kondusif;
- Pengembangan kelembagaan dan pembangunan kapasitas; dan
- Pemulihan dan perlindungan sumberdaya dan lingkungan.

Arahan pengembangan tersebut diharapkan :

- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;

- Meningkatkan mutu produksi dan produktifitas usaha perikanan untuk penyediaan bahan baku industry perikanan dalam negeri, meningkatkan ekspor hasil perikanan dan memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat;
- Meningkatkan upaya perlindungan dan rehabilitasi sumberdaya perikanan.

e. **Kawasan Pertambangan dan Energi**

Sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah baik melalui sisi fiskal, moneter maupun sektor rill, sekurangnya terdapat 8 peran penting sektor ESDM, antara lain sebagai sumber penerimaan Negara, penggerak pembangunan daerah, neraca perdagangan, investasi, subsidi, penyediaan energi dan bahan baku domestik, dan kegiatan ESDM yang menimbulkan efek berantai serta menciptakan tenaga kerja.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Amanat UUD 1945 ini merupakan landasan dan hakikat pembangunan pertambangan dan energi untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki untuk menjadi kekuatan nyata dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan sehingga pengelolaan pertambangan perlu dilakukan melalui penganekaragaman hasil tambang dan pengelolaan usaha pertambangan secara efisien.

Pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri masih sangat tergantung kepada sumber energi yang tidak terbarukan seperti minyak bumi, gas bumi, gambut, dan batubara. Minyak bumi, selain digunakan sebagai sumber energi di dalam negeri, juga dapat dimanfaatkan sebagai komoditas ekspor andalan dan penghasil devisa negara. Sumber energi yang terbarukan seperti tenaga air, panas bumi, tenaga angin, biomassa, dan tenaga surya saat ini masih relatif terbatas pemanfaatannya. Potensi energi terbarukan cukup besar dan dapat ditingkatkan pemanfaatannya, agar dapat menjadi sumber energi alternatif pengganti minyak bumi.

Berdasarkan pada potensi dan jenis sumber daya pertambangan dan energi di Kabupaten Sinjai, dibedakan atas:

a. kawasan pertambangan mineral, meliputi:

- Kawasan pertambangan mineral logam, berupa :
 - bijih logam nodul Mangan di Kecamatan Bulupoddo;
 - timah hitam di Kecamatan Sinjai Borong dan Kecamatan Sinjai Barat;
 - pasir besi di Kecamatan Sinjai Timur dan Kecamatan Tellulimpoe; dan

- emas, perak dan asosiasinya di Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Bulupoddo, dan Kecamatan Sinjai Tengah.
- Kawasan pertambangan mineral bukan logam, berupa:
 - kaolin di Kecamatan Sinjai Borong;
 - andesit di seluruh kecamatan di kabupaten sinjai;
 - trakit di Kecamatan Bulupoddo dan Kecamatan Sinjai Selatan;
 - basal di Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Bulupoddo, Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Sinjai Selatan, dan Kecamatan Sinjai Timur;
 - jasperoid di Sinjai selatan dan kecamatan Sinjai tengah;
 - granodiorit di Kecamatan Bulupoddo, Kecamatan Sinjai Borong, dan Kecamatan Sinjai Barat;
 - pasir Silika di Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Borong, dan Kecamatan Bulupoddo;
 - sirtu sungai di Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Tellu Limpoe dan Kecamatan Sinjai Tengah;
 - batuapung di Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Pulau Sembilan dan Kecamatan Sinjai Selatan;
 - batupasir di Kecamatan Sinjai Tengah; dan
 - batugamping di Kecamatan Sinjai Selatan.
- Kawasan pertambangan batuan, meliputi:
 - Kecamatan Bulupoddo;
 - Kecamatan Pulau Sembilan;
 - Kecamatan Sinjai Barat;
 - Kecamatan Sinjai Borong;
 - Kecamatan Sinjai Selatan;
 - Kecamatan Sinjai Tengah;
 - Kecamatan Sinjai Timur;
 - Kecamatan Sinjai Utara; dan
 - Kecamatan Tellulimpoe
- b. Kawasan pertambangan batubara, meliputi:
 - Kecamatan Bulupoddo;
 - Kecamatan Sinjai Utara;
 - Kecamatan Sinjai Timur; dan
 - Kecamatan Sinjai Selatan.

- c. kawasan panas bumi yang merupakan kawasan panas bumi Kampala di Kecamatan Sinjai Timur.

f. **Kawasan Peruntukan Industri**

Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan karakteristik wilayah dan potensi pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Sinjai melalui analisis secara makro yang dilakukan dengan metode location quotient, data mining, dan analisis spasial menunjukkan bahwa sektor industri di Kabupaten Sinjai merupakan sektor yang memiliki potensi dan daya saing yang kuat untuk berkembang di masa mendatang.

Secara detail karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan untuk wilayah industri adalah sebagai berikut :

- a. Penggunaan Lahan Penggunaan lahan digunakan untuk melihat daya dukung lahan yaitu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan sumber daya lahan untuk suatu penggunaan tertentu, seperti lokasi industri. Lahan yang dimaksud adalah lahan yang tidak berada di wilayah yang padat penduduk.
- b. Geologi Geologi yang dimaksud adalah jenis tanah. Karakteristik tanah yang cocok untuk kawasan industri adalah bertekstur sedang sampai kasar.
- c. Hidrologi Hidrologi yang dimaksud adalah ketersediaan sumber air. Wilayah yang mempunyai ketersediaan air tinggi memberikan kemudahan dalam penyediaan air untuk industri, karena air sangat diperlukan untuk proses rangkaian kegiatan industri. Ketersediaan air ini dapat berupa sumber air baku, sumber air sekunder ataupun sumber air mandiri.
- d. Aksesabilitas Jalan Aksesabilitas yang dimaksud adalah jalur transportasi yang terdapat di daerah terkait. Dalam penelitian ini aksesabilitas jalan dibedakan berdasarkan keadaan jalannya, apakah daerah tersebut telah memiliki akses jalan yang dapat dilalui setiap saat, dalam musim tertentu, cuaca tertentu atau belum tersedia akses jalan dan tidak dapat dilalui sama sekali.
- e. Topografi Topografi juga berpengaruh penting terhadap kelancaran proses kegiatan industri. Semakin tinggi lokasi yang akan digunakan semakin menghambat aktivitas industri. Ketinggian tempat menggunakan kriteria yaitu wilayah tersebut mempunyai ketinggian di bawah 100 meter dpl.

Berdasarkan pada hasil analisis di atas, maka rencana pengembangan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Sinjai merupakan kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan di Kecamatan Sinjai Timur dan Kecamatan Pulau Sembilan.

g. Kawasan Pariwisata

Pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah khususnya sebagai penyumbang pembentukan PDRB daerah. Pengembangan pariwisata ini akan berdampak sangat luas dan signifikan dalam pengembangan ekonomi, upaya-upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta akan berdampak terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat terutama masyarakat lokal. Pengembangan kawasan wisata mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, membuka peluang usaha dan kesempatan kerja serta sekaligus berfungsi menjaga kelestarian kekayaan alam dan hayati. Pengembangan pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan secara umum menjadi relevan jika pengembangan pariwisata itu sesuai dengan potensi daerah. Dengan demikian maka pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang artinya bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat.

Berdasarkan pada potensi kepariwisataan di kabupaten Sinjai, maka jenis kepariwisataan yang dapat dikembangkan diarahkan pada:

a Kawasan wisata alam, meliputi:

- wisata air terjun Lembang Saukang di Kecamatan Tellulimpoe;
- wisata air terjun Pincuni dan air terjun Barania di Kecamatan Sinjai Barat;
- wisata air terjun Bi'jeE, dan air terjun Baruttung di Kecamatan Sinjai Selatan;
- wisata air terjun Lamatti di Kecamatan Bulupoddo;
- wisata air terjun Kembar Batu Barae di kecamatan Sinjai Borong;
- wisata pantai Ujung Kupang dan Bukit Vandiam di kecamatan Sinjai Timur;
- wisata pantai Pasimarannu di Kecamatan Sinjai Timur;
- wisata pantai Karampuang di Kecamatan Tellulimpoe;
- wisata Bukit Pelangi dan Bamboo Village di Kecamatan Sinjai Utara; dan
- wisata Pulau Larea-rea, Pasi Lampe, dan Kanalo Dua, di kecamatan Pulau Sembilan.

b Kawasan wisata sejarah dan budaya, meliputi:

- Objek pesta rakyat Ma'rimpa Salo di Kecamatan Tellulimpoe;

- Kawasan wisata situs Makam Pattontongan, Situs Bipajeng dan Situs Benteng Lolang Pitue di Kecamatan Sinjai Tengah;
 - Objek wisata pesta rakyat Mappanre Tasi' di Kecamatan Sinjai Timur;
 - Kawasan wisata Adat Karampuang dan Pesta Adat Mappogau Sihanua di kecamatan Bulupoddo;
 - Kawasan Rumah Adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo;
 - Kawasan Purbakala Batu Pake Gojeng di Kecamatan Sinjai Utara;
 - Kawasan Benteng Balanipa di Kecamatan Sinjai Utara; dan
 - Kawasan Situs Perjanjian Topekkong di Kecamatan Sinjai Utara.
- c Kawasan wisata minat khusus, meliputi:
- wisata bahari (marine) pada pantai Larea-rea, pantai Pasi Lampe, pantai Kanalo Dua dan pantai Lafoifoi;
 - wisata sungai (river) pada pada sungai Appareng di Kecamatan Sinjai Selatan;
 - wisata agrowisata, pada kebun sayur dan buah di Kecamatan Tellulimpoe; Peternakan Sapi, Pembuatan minuman khas sinjai (SUSIN), dan kebun sayur di kecamatan Sinjai Barat; dan Kebun buah-buahan di kecamatan Sinjai Selatan;
 - wisata panjat tebing (climbing & mountainaring), pada kawasan air terjun kembar Batu Barae di kecamatan Sinjai Borong;
 - wisata kerajinan, pada kerajinan pandai besi di kecamatan Sinjai Tengah; dan kerajinan pakis di kecamatan Sinjai Borong; dan
 - wisata kuliner (culinary); pada kawasan kuliner TPI Lappa, dan kawasan kuliner Lapangan Sinjai Bersatu di kecamatan Sinjai Utara
- d Kawasan wisata edukasi dan ekologi, meliputi:
- kawasan Hutan Bakau Tongke-Tongke dan Kawasan Hutan Bakau Takkalala (HUBAT) di Kecamatan Sinjai Timur;
 - kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) H.Abd. Latief di kecamatan Sinjai Borong; dan
 - kawasan geowisata panas bumi Kampala dan Kaloling di Kec. Sinjai Timur.
- e Kawasan wisata buatan, meliputi:
- kolam permandian air panas Tondong di kecamatan Sinjai Timur; dan
 - kolam renang Family di kecamatan Sinjai Selatan.
- Dalam pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Sinjai perlu mempertimbangkan Prinsip-prinsip dasar dalam perencanaan pariwisata yaitu:
- a. Perencanaan pembangunan kepariwisataan haruslah dibawah koordinasi perencanaan fisik daerah secara keseluruhan.

- b. Perencanaan fisik untuk tujuan pariwisata harus berdasarkan suatu studi dengan memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan, alam, dan budaya di daerah sekitarnya.
- c. Perencanaan fisik untuk tujuan pariwisata didasarkan atas penelitian yang sesuai dengan lingkungan alam sekitar dengan memperhatikan faktor geografi yang lebih luas dan tidak meninjau dari segi administrasi saja.
- d. Rencana dan penelitian yang berhubungan dengan pengembangan kepariwisataan harus memperhatikan faktor ekologi daerah yang bersangkutan.
- e. Perencanaan pengembangan kepariwisataan tidak hanya memperhatikan masalah dari segi ekonomi saja, tetapi tidak kalah pentingnya memperhatikan masalah sosial yang mungkin ditimbulkannya.
- h. **Kawasan Permukiman**

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (Undang-Undang No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Pada dasarnya pusat permukiman merupakan konsentrasi kegiatan penduduk yang fungsi utamanya merupakan sebagai pengembangan lahan permukiman dan aktivitas penunjangnya. Masing-masing pusat permukiman memiliki susunan fungsi yang berbeda-beda, didasarkan pada klasifikasi dan sistem aktivitas yang dominan pada tiap pusat permukiman.

Dalam pengembangan perumahan ini yang perlu diperhatikan adalah penyesuaian antara kebutuhan rumah dengan tingkat pelayanan kebutuhan fasilitas perumahan. Disamping itu, juga memperhatikan kaidah-kaidah normatif penyesuaian KLB (Koefisien Lantai Bangunan), KDB (Koefisien Dasar Bangunan), dan GSB (Garis Sempadan Bangunan). Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang aman dari bahaya bencana alam maupun buatan manusia, sehat dan mempunyai akses untuk kesempatan berusaha, seperti:

- Aman terhadap bencana alam (banjir, longsor, gempa, tsunami);
- Kemiringan permukaan tanah $\leq 15\%$;
- Ketersediaan atau kecukupan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih;
- Ketersediaan energi;
- Kecukupan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti fasilitas; kesehatan, pendidikan dan perbelanjaan (Standar Perumahan dan Permukiman); dan

- Aksesibilitas tinggi atau potensial ditingkatkan tanpa menimbulkan degradasi kualitas lingkungannya.

Secara ruang apabila digunakan untuk kegiatan permukiman akan memberikan manfaat:

- Meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan sarana permukiman;
- Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
- Tidak mengganggu fungsi lindung;
- Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan SDA;
- Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
- Menciptakan kesempatan kerja; dan
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan peruntukan permukiman, umumnya meliputi kawasan permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang kegiatan utamanya adalah non agraris dan lebih menonjolkan pada kegiatan pemerintahan, pelayanan jasa sosial dan ekonomi. Rencana kawasan peruntukan permukiman perkotaan, meliputi karakteristik:

- Kawasan yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, serta prasarana wilayah perkotaan lainnya; dan
- Bangunan permukiman di tengah kota terutama di PKL dan PPK.

Kawasan pedesaan merupakan kawasan dengan kegiatan utamanya berorientasi pada kegiatan pertanian/agraris, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi pertanian. Rencana kawasan peruntukan permukiman perdesaan, meliputi karakteristik:

- Permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan dan penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan builtup area (daerah terbangun); dan
- Bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya local.

Adapun arahan pengembangan permukiman di Kabupaten Sinjai berdasarkan karakteristiknya meliputi :

a. Kawasan permukiman perkotaan, meliputi:

- kawasan permukiman Kawasan perkotaan Sinjai;
- kawasan permukiman perkotaan Manipi di Kecamatan Sinjai Barat;
- kawasan permukiman perkotaan Bikeru di Kecamatan Sinjai Selatan;
- kawasan permukiman perkotaan Mannanti di Kecamatan Tellulimpoe;
- kawasan permukiman perkotaan Lappadata di Kecamatan Sinjai Tengah;
- kawasan permukiman perkotaan Pasir Putih di Kecamatan Sinjai Borong;
- kawasan permukiman perkotaan Bulupoddo di Kecamatan Bulupoddo; dan
- kawasan permukiman perkotaan Kambuno di Kecamatan Pulau Sembilan;
- pusat permukiman Bua di Kecamatan Tellulimpoe;
- pusat permukiman Puhung Pitue di Kecamatan Pulau Sembilan;
- pusat permukiman Pulau Persatuan di Kecamatan Pulau Sembilan;
- pusat permukiman Bonto Salama di Kecamatan Sinjai Barat;
- pusat permukiman Barania di Kecamatan Sinjai Barat;
- pusat permukiman Barambang di Kecamatan Sinjai Borong;
- pusat permukiman Aska di Kecamatan Sinjai Selatan;
- pusat permukiman Saotengah di Kecamatan Tellulimpoe;
- pusat permukiman Manipahoi di Kecamatan Sinjai Tengah; dan
- pusat permukiman Lamatti Riaja di Kecamatan Bulupoddo.

b. Kawasan permukiman perdesaan adalah kawasan permukiman yang berada di kawasan perdesaan dan kawasan permukiman lainnya yang tersebar pada kawasan budidaya, meliputi:

- Kecamatan Sinjai Barat;
- Kecamatan Sinjai Borong;
- Kecamatan Sinjai Selatan;
- Kecamatan Tellulimpoe;
- Kecamatan Sinjai Timur;
- Kecamatan Sinjai Tengah;
- Kecamatan Bulupoddo; dan
- Kecamatan Pulau Sembilan.

i. **Kawasan Pertahanan dan Keamanan**

Undang-undang No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara mengamanatkan bahwa hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta

yang penyelenggaraannya didasarkan pada hak kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri, serta pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Undang-undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, yang penyelenggaraannya bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang berlandaskan ketahanan nasional, serta harus memperhatikan pertahanan keamanan. Undang-undang ini mengamanatkan pula agar penyusunan rencana tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan rencana tata ruang pertahanan keamanan Kabupaten Sinjai, maka kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:

a Kawasan dislokasi, meliputi:

- Kodim 1424/Sinjai;
- Ramil 1424-01 di Kecamatan Sinjai Utara;
- Ramil 1424-02 di Kecamatan Sinjai Barat;
- Ramil 1424-03 di Kecamatan Sinjai Tengah;
- Ramil 1424-04 di Kecamatan Sinjai Timur;
- Ramil 1424-05 di Kecamatan Sinjai Selatan;
- Ramil 1424-06 di Kecamatan Sinjai Borong;
- Pos Ramil 1424-01 di Kecamatan Bulupoddo;
- Pos Ramil 1424-04 di Kecamatan Pulau Sembilan;
- Pos Ramil 1424-05 di Kecamatan Tellulimpoe;
- Pos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Sinjai di Kecamatan Sinjai Utara;

b Kawasan pertahanan, meliputi:

- daerah pertempuran di Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Sinjai Timur;
- daerah latihan di Kecamatan Sinjai Timur dan Kecamatan Tellulimpoe;
- daerah komunikasi di Kecamatan Bulupoddo, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Selatan dan Kecamatan Tellulimpoe;
- daerah belakang di Kecamatan Bulupoddo, Kecamatan Sinjai Tengah, Kecamatan Sinjai Selatan dan Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Sinjai Barat, dan Kecamatan Sinjai Borong;
- daerah kalwan di Kecamatan Sinjai Barat Kecamatan Sinjai Borong dan Kecamatan Sinjai Selatan;
- daerah pendaratan hely di semua kecamatan;

- daerah gerilya di Kecamatan Bulupoddo, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Sinjai Selatan, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Sinjai Barat, dan Kecamatan Sinjai Tengah; dandaerah penghancur di Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Pulau Sembilan, dan Kecamatan Sinjai Timur.

2.1.2.2. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung menurut UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Pengembangan kawasan lindung bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan.

Rencana pengembangan kawasan peruntukan lindung di Kabupaten Sinjai terdiri atas :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan konservasi;
- d. Kawasan lindung geologi;
- e. Kawasan cagar budaya; dan
- f. Kawasan ekosistem mangrove.

a. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang diarakna di Kabupaten Sinjai adalah berupa hutan lindung. Hutan lindung didefinisikan sebagai kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Tujuan penetapan kawasan ini adalah untuk mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi, menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan serta memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan.

Kawasan hutan lindung adalah kawasan yang memenuhi salah satu dan atau lebih kriteria di bawah ini :

- a. Kawasan yang mempunyai skor lebih dari 175 menurut SK Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980.

- b. Kawasan yang mempunyai kemiringan lereng lapangan rata-rata lebih besar dari 45%.
- c. Kawasan yang mempunyai ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan laut.
- d. Kawasan yang memiliki jenis tanah sangat peka terhadap erosi, yaitu jenis tanah dengan nilai 5 (regosol, litosol, organosol, dan renzina) dan memiliki kemiringan dengan kelas lereng lebih besar dari 15%.
- e. Guna keperluan khusus ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai hutan lindung.

Hutan lindung mempunyai fungsi pokok untuk menjaga kualitas lingkungan dan ekosistem. Fungsi-fungsi tersebut diantaranya:

- a. Mencegah banjir; hutan yang terpelihara dapat menyerap air hujan (run off) agar tidak turun langsung ke daerah bawahnya. Kemampuan hutan untuk menampung air hujan merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir yang efektif.
- b. Menyimpan cadangan air tanah; selain mengendalikan banjir, hutan juga bermanfaat untuk menyimpan cadangan air tanah. Cadangan air tersebut bisa digunakan ketika musim kemarau, sehingga penduduk sekitar hutan terhindar dari bencana kekeringan.
- c. Mencegah erosi dan tanah longsor; lahan terbuka yang di atasnya tidak tertutup hutan akan cepat tergerus erosi. Erosi akan menghasilkan sedimentasi yang akan mendangkalkan sungai-sungai yang ada dibawahnya. Selain itu juga, bagi hutan-hutan yang terdapat di lereng-lereng curam erosi bisa menyebabkan bencana tanah longsor.
- d. Memelihara kesuburan tanah; hutan seperti sebuah tempat pengomposan raksasa. Berbagai macam material organik akan terurai menjadi humus di dalam hutan. Humus hutan ini berfungsi sebagai pupuk yang meningkatkan kesuburan tanah.
- e. Penyimpan sumber daya genetika; di dalam hutan terdapat plasma nuftah yang sangat tinggi. Keanekaragaman hayati hutan merupakan sumber kehidupan.
- f. Habitat hidup hewan dan tumbuhan; hutan yang baik bisa melindungi satwa dan tumbuhan yang ada didalamnya.
- g. Tempat pendidikan dan laboratorium alam; juga bisa menjadi tempat pendidikan, penelitian ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan laboratorium alam.

Mengacu pada INDIKATOR di atas serta berdasarkan SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 362/Menlhk/Sekjen/PLA.0/5/2019, luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Sinjai adalah 9.536 hektar, meliputi :

- Kecamatan Bulupoddo seluas 240.89 hektar
- Kecamatan Sinjai Barat seluas 4078.85 hektar
- Kecamatan Sinjai Borong seluas 2237.73 hektar
- Kecamatan Sinjai Selatan seluas 1493.67 hektar
- Kecamatan Sinjai Tengah seluas 1140.92 hektar, dan
- Kecamatan Tellulimpoe seluas 343.85 hektar.

b. **Kawasan Perlindungan Setempat**

Kawasan perlindungan setempat diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas dan penyediaan tata air dan kelancaran serta penertiban pengaturan dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Kawasan perlindungan setempat yang diarahkan di Kabupaten Sinjai meliputi :

a. **Sempadan pantai**

Batas sempadan pantai adalah ruang sempadan pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu. Penetapan batas sempadan pantai dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga:

- kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana alam;
- alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; dan
- alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.

Penghitungan batas sempadan pantai harus disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain yang terkait dengan ketentuan :

- perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
- perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
- perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;
- perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;
- pengaturan akses publik; dan
- pengaturan untuk saluran air dan limbah.

Kawasan sempadan pantai, diatur dengan ketentuan yaitu daratan sepanjang pantai dengan jarak 100 (seratus) meter dari garis pantai yang ditetapkan. Arahan kawasan perlindungan setempat berupa sempadan pantai di Kabupaten Sinjai yaitu sepanjang pesisir pantai di :

- Kecamatan Sinjai Timur;
- Kecamatan Sinjai Utara;
- Kecamatan Tellulimpoe; dan
- Kecamatan Pulau Sembilan.

b. Sempadan sungai

Sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, perlu dijaga kelestariannya dan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan daerah sekitarnya. Garis Sempadan Sungai merupakan garis batas luar pengamanan sungai yang membatasi adanya pendirian bangunan di tepi sungai dan ditetapkan sebagai perlindungan sungai. Jaraknya bisa berbeda di tiap sungai, tergantung kedalaman sungai, keberadaan tanggul, posisi sungai, serta pengaruh air laut.

Dalam rangka pengamanan terhadap daerah sekitarnya, maka perlu menetapkan lebar atau wilayah sempadan sungai, sebagai penyangga kelestarian fungsi sungai. Sehingga kelestarian sungai, berupa kelestarian sumber daya air yang terkandung di dalamnya serta sistem hidrologinya dapat terjaga dengan baik.

Selain itu, penetapan lebar sempadan sungai merupakan wujud perlindungan pemerintah kepada masyarakat, yaitu perlindungan terhadap daya rusak air. Misalnya ancaman terjadinya bencana banjir. Dengan kata lain, sempadan sungai dapat dikatakan juga, sebagai kawasan rawan bencana, yang sangat berbahaya bagi masyarakat apabila dimanfaatkan sebagai kawasan pemukiman, perdagangan, serta peruntukan budidaya lainnya demi pembangunan dan pendapatan asli daerah.

Pengaturan terhadap perlindungan sempadan sungai diatur dalam Permen Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau bahwa pengertian garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Berdasarkan Permen Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 28/PRT/M/2015, penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas

sumber daya yang ada pada sungai dan danau dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

Penetapan garis sempadan sungai bertujuan agar:

- fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya;
- kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai; dan daya rusak air sungai dan danau terhadap lingkungannya dapat dibatasi.

Oleh sebab itulah, sebagai upaya kegiatan perlindungan terhadap sumber daya yang ada pada sungai, maka Pemanfaatan Daerah Sempadan Sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk :

- bangunan prasarana sumber daya air;
- fasilitas jembatan dan dermaga;
- jalur pipa gas dan air minum;
- rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
- kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan
- bangunan ketenagalistrikan.

Garis sempadan, ditentukan pada:

- sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan:
 - paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan garis sempadannya 100 meter (sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 Km²) dan 50 meter (sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 Km²)

- sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai
- sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 5 meter.

Berdasarkan pada indikator tersebut di atas, maka kawasan perlindungan setempat untuk sempadan sungai ditetapkan di :

- Kecamatan Bulupoddo;
- Kecamatan Sinjai Barat;
- Kecamatan Sinjai Borong;
- Kecamatan Sinjai Selatan;
- Kecamatan Sinjai Tengah;
- Kecamatan Sinjai Timur;
- Kecamatan Sinjai Utara; dan
- Kecamatan Tellulimpoe.

c. ***Kawasan Konservasi***

Konservasi adalah upaya-upaya pelestarian lingkungan akan tetapi tetap memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan cara tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Adapun beberapa tujuan konservasi, yang diantaranya sebagai berikut ini:

- a. untuk memelihara maupun melindungi tempat-tempat yang dianggap berharga supaya tidak hancur, berubah atau punah.
- b. untuk menekankan kembali pada pemakaian bangunan lama supaya tidak terlantar, disini maksudnya apakah dengan cara menghidupkan kembali fungsi yang sebelumnya dari bangunan tersebut atau mengganti fungsi lama dengan fungsi baru yang memang diperlukan.
- c. untuk melindungi benda-benda sejarah atau benda jaman purbakala dari kehancuran atau kerusakan yang diakibatkan oleh faktor alam, mikro organisme dan kimiawi.
- d. untuk melindungi benda-benda cagar alam yang dilakukan secara langsung yaitu dengan cara membersihkan, memelihara dan memperbaiki baik itu secara fisik maupun secara langsung dari pengaruh berbagai macam faktor, misalnya seperti faktor lingkungan yang bisa merusak benda-benda tersebut.

Manfaat dari kawasan konservasi terhadap ekosistem, yang diantaranya sebagai berikut :

- a. Untuk melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara proses – proses ekologi maupun keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan.
- b. Untuk melindungi spesies flora dan fauna yang langka atau hampir punah.
- c. Untuk melindungi ekosistem yang indah, menarik dan juga unik.
- d. Untuk melindungi ekosistem dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, mikro organisme dan lain-lain.
- e. Untuk menjaga kualitas lingkungan supaya tetap terjaga, dan lain sebagainya.

Kawasan konservasi di Kabupaten Sinjai terdiri atas:

a. Kawasan pelestarian alam (KPA)

Kawasan pelestarian alam berupa Kawasan Taman Hutan Raya ditetapkan di Kabupaten Sinjai adalah merupakan konservasi kawasan taman hutan raya seluas kurang lebih 741 (tujuh ratus empat puluh satu) hektar meliputi:

- Kecamatan Sinjai Barat seluas 19,13 hektar, dan
- Kecamatan Sinjai Borong seluas 721,76 hektar.

Taman wisata alam ditetapkan di Kecamatan Sinjai Barat seluas kurang lebih 31 (tiga puluh satu) hektar.

d. **Kawasan Lindung Geologi**

Kawasan lindung geologi ditetapkan dalam rangka memberikan perlindungan semaksimal mungkin terhadap air tanah. Kawasan lindung geologi di Kabupaten Sinjai ditetapkan dengan ketentuan minimal jari-jari 200 (dua ratus) meter dari mata air, yaitu :

- a. mata air Tompobulu;
- b. mata air Lembang Lohe;
- c. mata air Batu Belerang;
- d. mata air Mannanti;
- e. mata air Gunung Perak;
- f. mata air Balakia-Tassililu;
- g. mata air Bonto Sinala;
- h. mata air;
- i. mata air Baru;
- j. mata air Bulu Tellue;
- k. mata air Songing;
- l. mata air Terasa; dan
- m. mata air Turunan Baji.

e. **Kawasan Cagar Budaya**

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Berdasarkan Undang-Undang bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan atau yang biasa disebut dengan bersifat **tangible**. Artinya bahwa warisan budaya yang masuk ke dalam kategori Cagar Budaya adalah warisan budaya yang berwujud konkrit, dapat dilihat dan diraba oleh indra, mempunyai massa dan dimensi yang nyata.

Pelestarian Cagar Budaya Pelestarian Cagar Budaya Bertujuan:

- melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- memperkuat kepribadian bangsa;
- meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Berdasarkan jenisnya, cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Sinjai adalah berupa situs cagar budaya yaitu Taman Purbakala Gojeng di Kecamatan Sinjai Utara dan bangunan cagar budaya yaitu kawasan Benteng Balangnipa di Kecamatan Sinjai Utara.

Disamping itu, terdapat pula cagar budaya dalam rangka pelestarian kearifan lokal yang diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka, meliputi seluruh unsur kehidupan; agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi sosial, bahasa dan komunikasi, serta kesenian. Mereka mempunyai pemahaman, program, kegiatan, pelaksanaan terkait untuk mempertahankan, memperbaiki, dan mengembangkan unsur kebutuhan dan cara pemenuhannya, dengan memperhatikan sumber daya manusia dan sumber daya alam disekitarnya.

Kearifan lokal dipandang sangat bernilai dan mempunyai manfaat tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Sistem tersebut dikembangkan karena adanya kebutuhan untuk menghayati, mempertahankan, dan melangsungkan hidup sesuai dengan situasi, kondisi, kemampuan, dan tata nilai yang dihayati di dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, kearifan lokal tersebut kemudian menjadi bagian dari cara hidup mereka yang arif untuk memecahkan segala

permasalahan hidup yang mereka hadapi. Sebagai bagian dari kebudayaan tradisional, kearifan lokal merupakan satu asset warisan budaya. Kearifan lokal hidup dalam domain kognitif, afektif, dan motorik, serta tumbuh menjadi aspirasi dan apresiasi publik. Dalam konteks sekarang, karena desakan modernism dan globalisasi kearifan lokal berorientasi pada : (1) keseimbangan dan harmoni manusia, alam, dan budaya; (2) kelestarian dan keragaman alam dan kultur; (3) konservasi sumberdaya alam dan warisan budaya; (4) pengematan sumberdaya yang bernilai ekonomi; (5) moralitas dan spiritualitas.

Kawasan cagar budaya dalam bentuk pelestarian spiritual dan kearifan local yang ditetapkan di Kabupaten Sinjai adalah merupakan kawasan Rumah Adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo.

f. ***Kawasan Ekosistem Mangrove***

Hutan mangrove merupakan jenis hutan yang tidak hanya ditumbuhi oleh satu macam tanaman saja, yakni tanaman mangrove. Namun, hutan mangrove juga ditumbuhi oleh jenis tumbuhan yang lainnya. Jenis tumbuhan yang mampu tumbuh di hutan mangrove ini berbeda- berbeda satu dengan yang lainnya, hal ini karena bereaksi terhadap variasi atau perubahan faktor lingkungan fisik tertentu, sehingga menimbulkan zona- zona vegetasi tertentu. Kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan di wilayah Kabupaten Sinjai seluas kurang lebih 6 (enam) hektar terdapat di Kecamatan Sinjai Timur.

Beberapa faktor lingkungan fisik yang dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh antara lain:

▪ **Jenis tanah**

Faktor lingkungan fisik yang pertama mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh adalah jenis tanah sebagai tempat pengendapan, substrat yang ada di wilayah pesisir pantai bisa sangat berbeda dengan daerah lainnya. Pada umumnya, hutan bakau ini berada di wilayah yang tanahnya berupa lumpur tanah liat dan bercampur dengan bahan- bahan organik. Namun ada beberapa wilayah yang memiliki bahan organik dengan porsi yang berlebihan, bahkan berupa lahan gambut. Selain itu juga ada substrat yang berupa lumpur mengandung pasir yang tinggi, bahkan dominan pecahan- pecahan karang. Hal seperti ini terjadi di pantai- pantai yang dekat dengan kawasan terumbu karang. Dengan kondisi substrat yang demikian, maka jenis tumbuhan yang dapat tumbuh di hutan mangrove ini harus bisa beradaptasi dengan keadaan substrat yang demikian.

▪ **Terpaan ombak**

Selain jenis tanah, faktor selanjutnya yang akan mempengaruhi jenis tanaman di hutan mangrove adalah terpaan ombak. Bagian luar dari hutan mangrove ini berhadapan langsung dengan laut lepas, hal ini tentu saja akan membuat bagian depan hutan ini selalu diterpa oleh ombak yang keras juga aliran air yang kuat. Sementara di bagian dalam hutan lebih tenang daripada bagian luarnya.

Hutan mangrove ada kemiripan dengan hutan yang lainnya, yakni di bagian hutan yang berhadapan langsung dengan muara sungai. Melihat kenyataan keadaan di hutan mangrove ini, terlebih berkaitan dengan terpaan ombak, maka sudah bisa dipastikan bahwa tanaman yang berada di luar dan berada di dalam berbeda. Jenis tanaman yang berada di luar tentunya lebih kuat daripada yang ada di dalam karena harus berhadapan langsung dengan ombak dan aliran air yang keras. Jenis mangrove yang tumbuh di bagian luar dan sering digempur ombak adalah mangrove *Rhizophora spp.* Jenis mangrove yang ada di bagian dalam dimana air lebih tenang adalah jenis api- api hitam atau *Avicennia alba*.

▪ **Penggenangan oleh air**

Faktor fisik yang ketiga yang mempengaruhi jenis tumbuhan di hutan mangrove adalah tentang genangan air. Di hutan mangrove yang mana bagian luarnya selalu terkena terpaan ombak, maka akan mengalami genangan air yakni genangan air ombak maupun air pasang. Terkadang genangan ini akan merendam dalam waktu yang lama daripada di bagian lainnya. Sehingga dapat dipastikan bahwa di hutan mangrove akan terbentuk variasi kondisi lingkungan, dimana bagian luar akan sangat basah, bagian tengah lembab, dan bagian dalam yang relatif lebih kering.

Dengan adanya perbedaan kondisi yang demikian ini maka akan tercipta zonasi vegetasi mangrove yang berlapis- lapis secara alami, dan jenis mangrove yang tumbuh pun berbeda- beda di setiap zona nya. Di bagian yang lebih dalam, dimana banyak terdapat air yang tergenang ditumbuhi *R. mucronata* dengan jenis kendeke atau *Bruguiera spp.*, kaboa atau *Aegiceras corniculata*, dan lain sebagainya.

Di dekat sungai, dimana terdapat air tawar, hidup nipah atau *Nypa fruticans*, pipada atau *Sonneratiacaseolaris*, dan bintaro atau *Cerbera spp.* Sementara di bagian yang paling dalam, dimana keadaannya kering, tumbuh nirih atau *Xylocarpus spp.*, teruntum atau *Lumnitzera racemosa*, dungun kecil atau *Heritiera littoralis*, dan kayu buta- buta atau *Exoceria agallocha*.

Itulah beberapa faktor yang mempengaruhi jenis flora yang tumbuh di hutan mangrove berdasarkan karakteristik wilayah atau zona nya masing- masing.

Selanjutnya, flora yang ada di hutan mangrove ini mengalami bentuk adaptasinya sendiri-sendiri.

Beberapa fungsi atau manfaat yang dimiliki oleh hutan mangrove ini antara lain :

- Fungsi ekonomi, meliputi :
 - Menghasilkan beberapa jenis kayu yang kualitasnya diakui baik
 - Menghasilkan hasil-hasil non kayu. Hasil non kayu yang dihasilkan hutan ini dikenal sebagai Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Hasil hutan bukan kayu ini biasanya serupa arang kayu, tanin, bahan pewarna, kosmetik, hewan, serta bahan pangan dan juga minuman.
- Fungsi ekologis, meliputi :
 - Sebagai pelindung pantai dari abrasi ombak-ombak laut yang bisa mengikis pinggir-pinggir pantai
 - habitat berbagai jenis hewan
 - Menjadi tempat hidup atau habitat bagi banyak tumbuhan atau flora.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gerakan tanah dan letusan gunung api), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ternak) serta kegagalan teknologi (kecelakaan transportasi). Kompleksitas dari permasalahan bencana tersebut memerlukan suatu penataan dan perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif, terarah, terpadu dan terkoordinasi. Penanggulangan bencana yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan kadang terdapat langkah upaya penting yang terlewat.

Potensi rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Sinjai adalah berupa bencana banjir, bencana longsor dan bencana tsunami. Berdasarkan kondisi fisik morfologi wilayah Kabupaten Sinjai, wilayah rawan bencana banjir terdapat di 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Selatan dan Kecamatan Tellulimpoe dengan tingkat resiko bencana rendah, sedang sampai tinggi.

Potensi bencana tanah longsor berdasarkan karakter dan kondisi fisik alam di Kabupaten Sinjai, terdapat beberapa wilayah kecamatan yang sangat peka terhadap gangguan luar, baik yang bersifat alami maupun aktifitas manusia sebagai faktor pemicu gerakan tanah sehingga memiliki resiko tinggi diantaranya berada di Kecamatan Sinjai Barat, Sinjai Borong dan Sinjai Selatan. Sedangkan untuk potensi tanah longsor dengan tingkat resiko rendah sampai sedang menyebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sinjai.

Jenis potensi bencana lain yang ada di Kabupaten Sinjai adalah berupa bencana tsunami. Potensi bencana ini terdapat di sepanjang pantai dalam wilayah Kabupaten Sinjai dengan tingkat resiko rendah, sedang dan tinggi. Potensi bencana tsunami dengan tingkat resiko tinggi berada di Kecamatan Pulau Sembilan. Sedangkan untuk tingkat resiko rendah sampai sedang terdapat di Kecamatan Sinjai Utara dan Sinjai Timur

Potensi ancaman (hazard) bencana alam di wilayah Kabupaten Sinjai sesuai dengan hasil identifikasi dan analisis potensi kebencanaan, maupun mengacu pada Indeks Rawan Bencana Indonesia yang diterbitkan oleh BNPB, maka ditetapkan jenis ancaman bencana di wilayah Kabupaten Sinjai terdiri atas:

a. Kawasan rawan banjir

Perubahan kondisi lahan dari waktu ke waktu membuat ancaman terjadinya banjir semakin besar. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 1) Daya tampung sungai makin lama makin kecil akibat pendangkalan. 2) Fluktuasi debit air antara musim penghujan dengan musim kering makin tinggi. 3) Terjadi konversi lahan pertanian dan daerah buffer alami ke lahan non pertanian dengan mengakibatkan konservasi sehingga menyebabkan rusaknya daerah tangkapan air (catchment area). 4) Eksploitasi air tanah yang berlebihan menyebabkan lapisan akuife makin dalam sehingga penetrasi air laut lebih jauh ke darat yang berakibat mengganggu keseimbangan hidrologi.

Berdasarkan hasil overlay kemiringan lahan/ lereng, ketinggian, curah hujan, dan penggunaan lahan, maka terdapat beberapa wilayah/kawasan di Kabupaten Sinjai yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dan ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana banjir, yaitu di wilayah Kecamatan Sinjai Utara dan wilayah Kecamatan Sinjai Timur.

b. Kawasan rawan bencana tanah longsor

Berdasarkan pada hasil overlay peta dan analisis terhadap potensi longsor yang terjadi di Kabupaten Sinjai, maka arahan kawasan rawan bencana longsor

adalah di Kecamatan Sinjai Barat, Kecamatan Sinjai Borong, Kecamatan Sinjai Selatan, dan Kecamatan Sinjai Tengah.

c. Kawasan rawan bencana tsunami

Sebab tsunami yang paling umum adalah gempa bumi bawah laut, terutama yang terjadi di zona penunjaman dengan kekuatan 7,0 skala magnitudo momen atau lebih. Penyebab lainnya adalah longsor, letusan gunung, dan jatuhnya benda besar seperti meteor ke dalam air.

Berdasarkan pada hasil kajian potensi tsunami yang dilakkan oleh BNPB, maka terdapat sebagian wilayah Kabupaten Sinjai yang memiliki potensi atau rawan bencana tsunami, yaitu pada bagian pesisir Kecamatan Sinjai Utara, Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Tellulimpoe, dan Kecamatan Pulau Sembilan.

d. Kawasan rawan bencana gelombang pasang

Berdasarkan pada hasil kajian kerawanan bencana di Kabupaten Sinjai, maka kawasan rawan bencana gelombang pasang terdapat di kawasan pesisir pantai Kecamatan Sinjai Utara dan Kecamatan Sinjai Timur.

e. kawasan rawan bencana abrasi

Berdasarkan hasil interpretasi data citra SRTM menunjukkan bahwa di pesisir Kabupaten Sinjai tersusun atas tiga jenis tipologi pesisir, yaitu tipologi pesisir berbatu, berpasir, dan berlumpur.

Berdasarkan hasil analisis terhadap sebaran ketiga tipolgi wilayah pesisir di Kabupaten Sinjai, maka tipologi yang rentan terhadap abrasi adalah pada tipologi berlumpur. Kerusakan hutan maupun vegetasi mangrove dan bakau menjadi salah satu penyebab tingginya kerawanan abrasi di daerah-daerah pesisir berlumpur. Minimnya pertahanan dan penghalang alami berupa vegetasi khas pesisir berpasir membuat kerawanan abrasi di pesisir bertipologi berpasir meningkat. Kawasan yang teridentifikasi memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap abrasi adalah di wilayah pesisir Kecamatan Sinjai Timur dan Kecamatan Tellulimpoe.

f. Sempadanpatahanaktif(*activefault*)pada kawasanrawan bencana gempa bumi

Kepulauan Sulawesi dikelilingi dengan 40 patahan aktif. Puluhan sel patahan itu masuk dalam zona pertemuan tiga lempeng yang besar di dunia yang dikenal dengan sebutan *triple junction*. Dari puluhan patahan aktif itu, di Sulawesi Selatan terdapat tiga patahan yang bisa memicu terjadinya gempa. Masing-masing adalah patahan Walanae di Teluk Bone, patahan danau Matano di danau Matano, dan patahan Soroako, di Luwu Timur.

Wilayah Kabupaten Sinjai adalah merupakan bagian dari Teluk Bone sehingga patahan Walanae memiliki pengaruh kuat terhadap sebagian wilayah Kabupaten Sinjai. Berdasarkan hasil overlay peta kerawanan gempa di Provinsi Sulawesi Selatan, maka wilayah Kabupaten Sinjai yang teridentifikasi dilalui oleh patahan aktif sesar Walanae adalah pada wilayah Kecamatan Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Utara, dan Kecamatan Tellulimpoe.

2.2. Aspek Demografi

Kondisi demografi merupakan kondisi kependudukan yang meliputi jumlah, persebaran dan komposisi kependudukan serta bagaimana ketiga faktor tersebut berubah dari waktu ke waktu. Kondisi kependudukan merupakan hal yang dapat dipengaruhi dan sebaliknya mempengaruhi keberhasilan pembangunan suatu daerah yang berkelanjutan.

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kondisi kependudukan Kabupaten Sinjai meliputi laju pertumbuhan, jumlah penduduk menurut rasio jenis kelamin dan umur, serta persebaran dan kepadatan penduduk.

2.2.2. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Sinjai, karena apabila pertumbuhan penduduk tidak diawasi dengan baik, maka dalam beberapa tahun ke depan, Kabupaten Sinjai akan menjadi kota yang cukup padat. Hal tersebut kemungkinan akan menimbulkan munculnya berbagai masalah sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, pertumbuhan kawasan kumuh, meningkatnya kriminalitas, dan lain-lain.

Jumlah penduduk di Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 sebanyak 268.678 jiwa. Kecamatan yang paling tinggi tingkat pertumbuhannya adalah Kecamatan Sinjai Utara sebanyak 51.265 Jiwa dan Kecamatan yang rendah jumlah penduduknya adalah Kecamatan Pulau IX sebanyak 7.947 Jiwa. Pertumbuhan penduduk di pengaruhi oleh faktor alamiah maupun karena migrasi. Laju pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah dan struktur penduduk beberapa tahun kedepan. Dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.8
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

Kecamatan	Tahun					Laju Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Sinjai Barat	24.089	24.848	25.614	26.255	26.636	0,015
Sinjai Borong	16.106	17.244	17.923	18.336	18.558	0,012

Sinjai Selatan	38.741	40.433	40.939	41.736	41.986	0,006
Tellulimpoe	33.054	36.451	37.785	38.942	39.358	0,011
Sinjai Timur	30.550	32.807	33.908	34.625	35.136	0,015
Sinjai Tengah	26.994	27.822	28.709	29.215	29.493	0,010
Sinjai Utara	46.637	48.516	49.717	50.930	51.265	0,007
Bulupoddo	15.947	17.002	17.686	18.069	18.299	0,013
Pulau Sembilan	7.571	7.504	7.738	7.820	7.947	0,016
Kabupaten Sinjai	239.689	252.627	260.019	265.927	268.678	0,010

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sinjai, Tahun 2021

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 133.127 Jiwa penduduk laki-laki dan 135.551 Jiwa penduduk perempuan. Adapun jumlah penduduk yang paling besar jumlahnya yaitu Kecamatan Sinjai utara meliputi jumlah laki-laki sebanyak 25.090 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 26.175 Jiwa jadi jumlah keseluruhan sebanyak 51.265 Jiwa sedangkan jumlah penduduk yang paling rendah yaitu Kecamatan Pulau IX yang meliputi Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.970 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3.977 jiwa jadi jumlah seluruhnya yaitu 7.947 jiwa. Dapat dilihat pada table berikut .

Tabel. 2.9
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
dan Sex Ratio Kabupaten Sinjai,Tahun 2020

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
Sinjai Barat	13.355	13.281	26.636	100,56
Sinjai Borong	9.381	9.177	18.558	102,22
Sinjai Selatan	20.662	21.324	41.986	96,90
Tellulimpoe	19.401	19.957	39.358	97,21
Sinjai Timur	17.375	17.761	35.136	97,83
Sinjai Tengah	14.808	14.685	29.493	100,84
Sinjai Utara	25.090	26.175	51.265	95,85
Bulupoddo	9.085	9.214	18.299	98,60
Pulau IX	3.970	3.977	7.947	99,82
Kabupaten Sinjai	133.127	135.551	268.678	98,21

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sinjai, Tahun 2021

Jumlah penduduk Kabupaten Sinjai menurut jenis kelamin dan golongan umur , kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 26.430 jiwa dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 13.398 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 13.032 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa usia SMP dan SMA dan tamat SMA merupakan usia produktif, kondisi ini sangat baik di Kabupaten Sinjai apabila dapat dikelola dengan baik

dengan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan keterampilan. Sedangkan penduduk lanjut usia paling rendah dan diharapkan dimasa yang akan datang proporsi penduduk lansia meningkat. Hal ini dapat terjadi ketika derajat kesehatan meningkat sehingga usia harapan hidup meningkat pula. Dapat dilihat pada table berikut :

Tabel.2.10
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Umur
Kabupaten Sinjai, Tahun 2020

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
00 - 04	9.941	9.199	19.140
05 - 09	11.915	10.925	22.840
10 - 14	13.015	12.211	25.226
15 - 19	13.398	13.032	26.430
20 - 24	11.850	11.789	23.639
25 - 29	9.619	9.348	18.967
30 - 34	9.272	9.337	18.609
35 - 39	9.568	9.707	19.275
40 - 44	9.513	9.877	19.390
45 - 49	9.015	9.341	18.356
50 - 54	7.496	7.979	15.475
55 - 59	5.227	6.196	11.423
60 - 64	4.761	5.438	10.199
65 - 69	3.087	3.582	6.669
70 - 74	2.143	3.062	5.205
75 +	3.307	4.528	7.835
Jumlah	133.127	135.551	268.678

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sinjai, Tahun 2021

2.2.3. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Persebaran atau distribusi penduduk adalah penyebaran penduduk di suatu wilayah, dimana dapat dilihat apakah persebaran penduduk merata atau tidak.Sementara, kepadatan penduduk adalah perbandingan antara banyaknya penduduk suatu daerah dengan luas wilayahnya. Satuan luas wilayah yang umumnya digunakan adalah km². Kepadatan penduduk di suatu daerah tidaklah sama.

Jumlah penduduk Kabupaten Sinjai yang berjumlah 268.678 Jiwadimana jumlah penduduk yang terbesar yaitu Kecamatan Sinja Utara memiliki kepadatan penduduk 1.768 jiwa/ km². Kecamatan yang paling luas (Km²) adalah kecamatan Bulupoddo seluas 136,30 km² sedangkan Kecamatan yang paling sempit adalah Kecamatan Pulau IX seluas 7,55 km². Dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 2.11
Persebaran dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Sinjai, Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	KK	Penduduk	Kepadatan Penduduk	Rata-Rata Anggota KK
1	Sinjai Barat	135,53	7.598	26.636	197	3,51
2	Sinjai Borong	66,97	5.431	18.558	281	3,42
3	Sinjai Selatan	131,99	11.709	41.986	321	3.59
4	Tellulimpoe	146,30	11.313	39.358	268	3,48
5	Sinjai Timur	71,88	9.882	35.136	495	3,56
6	Sinjai Tengah	129,70	8.533	29.493	229	3,46
7	Sinjai Utara	29,57	13.917	51.265	1.768	3,68
8	Bulupoddo	99,47	5.385	18.299	185	3,40
9	Pulau IX	7,55	2.297	7.947	1.135	3,46
Kabupaten Sinjai		135,53	76.065	268.678	328	3,53

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sinjai, Tahun 2021

2.3. Kajian Muatan KLHS

2.3.2. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan

Kajian ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini terutama adalah untuk menentukan apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan atau ditambahkan.

Daya dukung lingkungan merupakan batas kondisi kemampuan dari lingkungan untuk dapat menunjang kehidupan manusia. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Banyak metode yang telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung lingkungan suatu wilayah. Sampai saat ini metode yang kerap digunakan yaitu metode penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis pada potensi lingkungan seperti kapasitas bioekologi, kapasitas lahan, air, dan udara dalam menyerap

karbondioksida. Selain itu penilaian daya dukung lingkungan juga dapat dilakukan berdasarkan jasa ekosistem.

Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (goods) dan pelayanan (services). Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya. Pendekatan nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam perhitungan daya dukung lingkungan dapat dikategorikan dalam empat aspek yaitu :

1. Jasa penyediaan (provisioning);
2. Jasa pengaturan (regulating);
3. Jasa budaya (cultural);

Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem secara gamblang dapat memperlihatkan kondisi spasial nilai manfaat dari tiap ruang pada suatu wilayah. Sebaran nilai manfaat dari setiap ruang dapat tergambar dengan jelas sehingga dalam penentuan arahan kebijakan pembangunan dapat langsung dioverlaykan untuk mengetahui kecocokan suatu ruang untuk suatu peruntukan lahan. Disamping itu, penilaian jasa ekosistem ini juga menghasilkan nilai manfaat dari suatu ruang baik secara langsung dan tidak langsung yang dapat digunakan dalam penentuan kebijakan pembangunan suatu wilayah. Penentuan kebijakan pembangunan dengan melihat nilai manfaat suatu ruang secara komprehensif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna, efektif, dan efisien sehingga pada akhirnya kebijakan pembangunan tidak hanya berkiblat pada nilai ekonomis saja, tetapi juga aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan juga ikut diperhatikan. Pada laporan ini, kajian daya dukung Kabupaten Sinjai akan disajikan daya dukung yang berbasis potensi dan jasa ekosistem. Untuk berbasis potensi, daya dukung ditentukan pada kemampuan lahan di Kabupaten Sinjai. Sementara untuk jasa ekosistem ditentukan melalui penetapan status ketersediaan air dan pangan di wilayah Kabupaten dengan pendekatan jasa ekosistem.

2.3.1.1. Kemampuan Lahan

Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Kelas kemampuan lahan terbagi atas VIII kelas. Dari kelas I s.d. IV dapat digunakan untuk pertanian, sedangkan dari kelas V s.d. VII untuk padang rumput, kelas VIII sebaiknya secara alami sebagai hutan lindung. Masing-masing kelas dibagi lagi menjadi subkelas yaitu subkelas erosi, subkelas genangan air, subkelas solum (penghambat perakaran) dan subkelas iklim. Subkelas dapat diuraikan lagi menjadi beberapa unit. Adapun kriteria penggunaan lahan yang diperkenankan pada setiap kelas kemampuan lahan diperlihatkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.12
Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan
Kabupaten Sinjai Tahun 2020

No.	Kemampuan Lahan	Penggunaan Lahan yang diperkenankan
1	I	Semua jenis penggunaan lahan
2	II	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Pertanian sangat intensif
3	III	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Pertanian sangat intensif dan Pertanian intensif (hanya Pertanian intensif sedang)
4	IV	Pertanian Terbatas. Semua jenis pengembalan, semua jenis hutan
5	V	Semua jenis penggembalan (Penggembala intensif, Penggembala sedang, Penggembala) semua jenis hutan
6	VI	Penggembala sedang, Penggembala terbatas, semua jenis hutan
7	VII	Penggembalaan terbatas, Hutan
8	VIII	Cagar alam dan hutan lindung

Sumber : Klimgebiel dan Montgomery (1961), diringkaskas dan Fenton (2014)

Berdasarkan kriteria tersebut diatas dilakukan analisis kemampuan lahan di Kabupaten Sinjai. Hasilnya kelas VI memiliki persentase terbesar dengan 31.19%, diikuti kelas V dengan 26.12 persen, kelas III dengan 16.54 persen, kelas IV dengan 14.20 persen, kelas I dengan 6.37 persen, kemudian kelas II dengan 3.84 persen, lalu kelas VIII dengan 1.75 persen, dan yang terakhir adalah kelas VII dengan 0.00 persen. Hasil ini menjelaskan bahwa umumnya lahan di Kabupaten Sinjai umumnya hanya mampu untuk penggunaan semua jenis penggembalaan sedang, penggembalaan terbatas dan semua jenis hutan, sedikit untuk pemanfaatan pertanian terbatas, dan sangat sedikit untuk pemanfaatan cagar alam dan hutan lindung.

Berdasarkan kriteria kuantitatif kemampuan lahan dan faktor pembatas, lahan di Kabupaten Sinjai umumnya mengandung krikil atau batuan dan jenderung sering terjadi banjir serta erosi sedang. Selain itu kondisi drainase lahan sangat buruk sehingga sering tergenang air. Terletak pada lereng yang agak curam, ancaman erosi berat. Hanya cocok untuk padang rumput, hutan produksi terbatas tanpa adanya perlindungan. Sebaiknya dibiarkan secara alami. Sementara lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dan budidaya hanya 40,95 persen dari total luas wilayah Kabupaten Sinjai, itupun pertanian yang terbatas.

Tabel 2.13
Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Sinjai, Tahun 2020

No	Kelas	Luas Lahan (Ha)	Persen (%)
1	Kelas I	5.515,39	6,37
2	Kelas II	3.319,93	3,84
3	Kelas III	14.312,56	16,54
4	Kelas IV	12.290,83	14,20
5	Kelas V	22.605,72	26,12
6	Kelas VI	26.996,85	31,19
7	Kelas VII	1,04	0,00
8	Kelas VIII	1.515,93	1,75
	TOTAL	86.558,24	100,00

Sumber : Hasil Analisis Tim Ahli KLHS Perubahan RPJMD Kab. Sinjai Tahun 2021

Adapun kecamatan yang potensi untuk pengembangan budidaya pertanian diperlihatkan pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2. 14
Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Sinjai Tahun 2020

KECAMATAN	KELAS KEMAMPUAN LAHAN								TOTAL
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
Sinjai Barat	-	-	290,90	2.524,26	1.238,05	9.469,47	-	1.322,62	14.845,30
Sinjai Borong	-	-	110,44	2.248,18	1.830,85	4.913,09	-	16,60	9.119,16
Sinjai Selatan	2.047,19	431,76	2.875,94	1.697,92	5.418,69	1.915,51	-	-	14.387,02
Sinjai Tengah	341,83	214,08	690,37	2.392,42	2.685,95	6.328,68	1,04	-	12.654,36
Sinjai Timur	1.164,36	1.083,93	3.704,53	-	1.685,78	-	-	-	7.638,61
Sinjai Utara	516,91	885,88	972,51	153,91	743,61	33,42	-	-	3.306,24
Bulupoddo	338,57	12,42	1.277,31	1.975,37	2.248,25	4.217,93	-	-	10.069,86
Tellulimpoe	1.106,53	676,10	4.390,54	1.278,41	6.754,54	118,75	-	-	14.324,87

KECAMATAN	KELAS KEMAMPUAN LAHAN								TOTAL
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
Pulau IX	-	15,75	-	20,37	-	-	-	176,71	212,82

Sumber : Hasil Analisis Tim Ahli KLHS Perubahan RPJMD Kab. Sinjai 2021

Menunjukkan bahwa untuk kawasan pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh potensi lahan terdapat pada Kecamatan Tellu Limpoe (dengan total luas lahan untuk sektor pertanian 7.451,58 Hektar), lalu Kecamatan Sinjai Selatan dengan 7.052,82 Hktar dan Sinjai Timur dengan 5.952,83 Hektar

2.3.1.2. Analisis Daya Dukung Penyediaan Air Bersih

Pada tahap perhitungan ketersediaan air, data yang digunakan adalah Nilai Indeks Jasa Lingkungan dalam sistem grid dan data potensi ketersediaan air untuk satu kesatuan Wilayah. Satuan Wilayah untuk identifikasi potensi air pada penghitungan daya dukung nasional dan pulau adalah Wilayah Sungai. Untuk dapat menghitung potensi ketersediaan air Kabupaten perlu diidentifikasi terlebih dahulu Wilayah Sungai yang tercakup didalam wilayah administrasinya. Data yang diperlukan adalah debit wilayah sungai tahunan. Total indeks jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air wilayah sungai dan total indeks jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air kabupaten.

Potensi air dihitung berdasarkan data debit andalan bulanan setiap Wilayah Sungai di Indonesia tahun 2016 yang bersumber dari Ditjen SDA, Kementerian PUPR dan hasil penghitungan indeks jasa lingkungan nasional dari Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah itu kemudian dibuat pendistribusian potensi ketersediaan air ke dalam sistem grid. Hal ini dilakukan dengan mendistribusikan total potensi ketersediaan air Kabupaten kedalam sistem grid secara proporsional berdasarkan perbandingan antara Nilai Indeks Jasa Lingkungan masing-masing grid dengan Nilai Indeks total Jasa Lingkungan Penyedia Air Kabupaten. Persamaan yang digunakan untuk menghitung potensi ketersediaan air masing-masing grid.

Hasil penghitungan potensi ketersediaan air pada setiap grid kemudian disajikan dalam bentuk peta. Cara penyajiannya digunakan pengelompokan potensi ketersediaan air dengan sistem pewarnaan gradasi. Penggunaan air untuk rumah tangga tiap grid dihitung dengan menggunakan asumsi kebutuhan air rumah tangga sebesar 43,20 m³ per tahun (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009).

Hasil analisis yang menunjukkan terlampaui atau tidaknya ambang batas penyediaan air bersih menggambarkan status daya dukung suatu wilayah. Adapun penyediaan air bersih di Kabupaten Sinjai diperlihatkan pada tabel 2.15 Hasil kajian daya dukung penyediaan air berdasarkan Error! Reference source not found.menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Sinjai sebesar 1.242.788.326 m³/Tahun, sementara kebutuhan air sebesar 390.608.001 m³/Tahun, dengan selisih sebesar 852.180.326 m³/Tahun. Nilai ini menunjukkan ambang batas daya dukung penyediaan air secara umum belum terlampaui. Tabel di atas juga memperlihatkan selisih terbesar antara ketersediaan air dan kebutuhan air terdapat pada Kecamatan Sinjai Barat (220.863.589m³/Tahun) diikuti oleh Kecamatan Tellu Limpoe (127.359.246 m³/Tahun). Sementara untuk Kecamatan Sinjai Utara memperlihatkan nilai minus pada selisih ketersedian dan kebutuhan (-22.101.077m³/Tahun), yang berarti di kecamatan ini air yang tersedia, tidak mampu memenuhi kebutuhan air untuk penduduknya. Hal ini terjadi karena Kecamatan Sinjai Utara merupakan kecamatan kedua terkecil namun berada pada posisi ketiga terbesar untuk pemanfaatan lahan sebagai pemukiman, sehingga kepadatan penduduknya adalah yang tertinggi di Kabupaten Sinjai.

Tabel 2.15
Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Air Bersih
Kabupaten Sinjai Tahun 2020

Kecamatan	Status Air Tahun 2020 (M3 / Tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
Sinjai Barat	260.099.540	39.235.951	220.863.589
Sinjai Borong	136.265.416	25.915.578	110.349.838
Sinjai Selatan	179.571.058	62.977.007	116.594.051
Sinjai Tengah	155.090.911	43.211.580	111.879.331
Sinjai Timur	105.604.562	51.807.576	53.796.986
Sinjai Utara	52.027.931	74.129.009	-22.101.077
Bulupoddo	148.264.943	26.015.114	122.249.829
Tellu Limpoe	182.451.431	55.092.185	127.359.246
Total	1.242.788.326	390.608.001	852.180.326

Sumber : Hasil Analisis Tim Ahli KLHS Perubahan R/PJMD Kab. Sinjai 2021

Secara umum banyak wilayah di Kabupaten Sinjai yang memperlihatkan ketersediaan airnya tidak mencukupi. Hal itu dapat ditunjukkan padaError! Reference source not found., yang memperlihatkan posisi grid yang merupakan indikator dari penyediaan air telah melampaui ambang batas terlihat tersebar

hampir di Semua wilayah Kecamatan di Kabupaten Sinjai. Khususnya di kawasan Kecamatan Sinjai Utara.

2.3.1.3. Analisis Daya Dukung Penyediaan Pangan

Untuk perhitungan ketersediaan pangan, data yang digunakan adalah Indeks Jasa Lingkungan dalam sistem grid dan data produksi bahan pangan tiap kabupaten. Pendekatan penghitungan ketersediaan jasa lingkungan penyedia pangan Kabupaten adalah diasumsikan sama dengan total ketersediaan energi bahan pangan di wilayah tersebut. Total energi pangan merupakan total produksi bahan pangan di tiap kabupaten yang dikonversikan menjadi satuan energi atau kilo kalori (kkal). Energi untuk tiap jenis bahan pangan masing-masing berbeda. Untuk dapat menghitung ketersediaan pangan, data yang diperlukan adalah total produksi pangan untuk masing-masing jenis bahan pangan. Persamaan untuk menghitung ketersediaan pangan atau ketersediaan energi pangan Kabupaten adalah sebagai berikut:

Pendistribusian ketersediaan energi pangan ke dalam sistem grid dilakukan dengan mendistribusikan total ketersediaan energi pangan Kabupaten ke dalam sistem grid secara proporsional berdasarkan perbandingan antara Nilai Indeks Jasa Lingkungan Peneyedia Pangan masing-masing grid dengan Nilai Indeks total Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kabupaten. Persamaan yang digunakan untuk menghitung ketersediaan energy pangan masing-masing grid.

Kebutuhan bahan pangan atau energi pangan untuk tiap grid diperoleh melalui perhitungan Angka Kecukupan Energi (AKE) penduduk tiap grid selama setahun. AKE merupakan besar kebutuhan energi bahan pangan suatu individu untuk melakukan pekerjaan atau aktifitas harian (Hardinsyah, 2012).

Untuk dapat menghitung kebutuhan Jasa Lingkungan Penyedia Pangan masing-masing grid perlu diketahui jumlah penduduk tiap-tiap grid. Rumus yang digunakan untuk pendistribusian jumlah penduduk dalam satu provinsi, kabupaten, atau kota didistrusikan ke dalam system grid adalah sama dengan rumus pendistribusian penduduk pada saat penentuan DDLH jasa lingkungan penyedia air yaitu menggunakan Model Densitas Populasi.

Kebutuhan bahan pangan atau energi pangan untuk tiap grid dihitung dengan menggunakan asumsi bahwa Angka Kebutuhan Energi (AKE) per kapita sebesar 2.150 kkal/hari/kapita. Persamaan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan Bahan Pangan/Energi Pangan untuk masing-masing grid

Seluruh status DDLH tiap grid perlu disajikan dalam peta agar lebih informatif dan memudahkan untuk mengidentifikasi lokasi. Penyajian informasi daya dukung lingkungan hidup untuk jasa penyedia pangan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu DDLH terlampaui dan DDLH belum terlampaui. Adapun hasil analisis penyediaan pangan di Kabupaten Sinjai diperlihatkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.16
Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Pangan
Kabupaten Sinjai Tahun 2020

Kecamatan	Status Pangan Tahun 2020 (kkal / tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
Sinjai Barat	93.485.807.093	10.069.538.996	83.416.268.097
Sinjai Borong	56.429.068.604	6.650.990.113	49.778.078.491
Sinjai Selatan	77.689.265.793	16.162.458.395	61.526.807.398
Sinjai Tengah	62.342.820.347	11.089.846.926	51.252.973.421
Sinjai Timur	44.499.215.407	13.295.928.760	31.203.286.647
Sinjai Utara	21.843.536.848	19.024.515.104	2.819.021.744
Bulupoddo	58.932.064.834	6.676.535.007	52.255.529.827
Tellu Limpoe	77.535.689.613	14.138.892.896	63.396.796.717
Pulau Sembilan	9.186.749.213	3.137.175.183	6.049.574.030
Total	501.944.217.752	100.245.881.380	401.698.336.371

Sumber : Hasil Analisis Tim Ahli KLHS Perubahan RPJMD Kab. Sinjai 2021

Hasil kajian daya dukung penyediaan pangan berdasarkan tabel diatas menunjukkan ketersediaan pangan di Kabupaten Sinjai sebesar 501.944.217.752 Kkal/Tahun, sementara kebutuhan sebesar 100.245.881.380 Kkal/Tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 401.698.336.371 Kkal/Tahun, hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan pangan secara umum belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan pangan untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Sinjai Barat (83.416.268.097 Kkal/Tahun), diikuti oleh Kecamatan Tellu Limpoe (63.396.796.717 Kkal/Tahun), sementara untuk selisih antara ketersediaan dan kebutuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Sinjai Utara (2.819.021.744 Kkal/Tahun). Hasil ini seirama dengan analisis sebelumnya yaitu analisis daya dukung penyediaan air bersih, dimana alasannya pun sama karena Kecamatan Sinjai Utara merupakan kecamatan kedua terkecil namun berada pada posisi ketiga terbesar untuk pemanfaatan lahan sebagai pemukiman, sehingga kepadatan penduduknya adalah yang tertinggi di Kabupaten Sinjai dan berimbas pada tingginya nilai kebutuhan pangan.

Berbeda dengan analisis grid terhadap ketersediaan air di Kabupaten Sinjai yang memperlihatkan penyebaran grid secara berkluster yang menyebar hampir di Semua wilayah di Kecamatan Sinjai. Dalam masalah pangan, meski secara umum ketersediaan pangan di Kabupaten Sinjai masih berlebih, namun analisis pada skala grid menunjukkan bahwa terdapat beberapa grid yang ketersediaan pangannya tidak mencukupi. Hal ini dikarenakan pada wilayah tersebut kebutuhan pangan lebih besar dari pada ketersediaan. Untuk memperjelas analisis tersebut maka pada gambar dibawah ini diperlihatkan status daya dukung penyediaan pangan di Kabupaten Sinjai berbasis grid. Hal ini menunjukkan terdapat area yang status daya dukung penyediaan pangannya telah melampaui ambang batas. Secara umum grid yang memperlihatkan status penyediaan pangan telah melampaui ambang batas terletak rapat secara cluster di wilayah Kecamatan Sinjai Utara, dan sisanya menyebar tidak merata di beberapa Kecamatan (Kecamatan Sinjai Barat. Tellu Limpoe, Dan Sinjai Selatan). Wilayah yang melampaui ambang batas pangannya tidak signifikan berdampak dikarenakan pada faktanya kebutuhan pangan pada wilayah tersebut dapat disuplai oleh wilayah disekitarnya.

2.3.2. Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

Definisi dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. Namun sebelum dampak dapat terjadi, makhluk hidup dapat mengenali risiko yang merupakan perkiraan kemungkinan terjadinya konsekuensi/dampak dari sebuah aksi. Pada konteks lingkungan hidup, dampak terhadap lingkungan hidup dari kegiatan manusia pada umumnya seringkali bersifat negatif. Lalu sebagai bentuk dari dampak tersebut, maka akan terbentuk risiko-risiko yang akan membahayakan tidak hanya lingkungan itu saja, namun juga manusia. Oleh sebab itu, penting adanya kajian tentang risiko guna mencegah atau memperkecil dampak.

Risiko yang terjadi kepada lingkungan disebut sebagai risiko ekologis. Beragam permasalahan dalam lingkup sistem sosial, proses sosial, dan relasi sosial telah memunculkan tiga macam risiko ekologis, yaitu:

1. Risiko fisik-ekologis (*physical-ecological risk*), yaitu aneka risiko kerusakan fisik pada manusia dan lingkungannya.
2. Risiko mental (*mental risk*), yaitu aneka risiko kerusakan mental akibat perlakuan buruk pada tatanan psikis.

3. Risiko sosial (*social risk*), yaitu aneka risiko yang menggiring pada rusaknya bangunan dan lingkungan sosial (*social-ecological*)

Risiko fisik-ekologis dapat disebabkan oleh proses alam atau oleh kegiatan manusia (*manmade risk*). Salah satu contohnya adalah banjir yang paling sering menimbulkan kerusakan fisik-ekologis. Risiko mental dapat meliputi kerusakan psikis yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal. Kerusakan parah ekosistem mental disebabkan oleh pembiaran aneka risiko mental dari berbagai tindakan sosial, misalnya pembiaran kekerasan dan korupsi. Risiko sosial adalah kerusakan bangunan sosial sebagai akibat dari faktor-faktor eksternal kondisi alam, teknologi, dan industri. Pada umumnya risiko yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan terhadap komunitas sosial adalah risiko kesehatan dan kesejahteraan. Tiga macam risiko ekologis tersebut jika dibiarkan secara terus menerus maka akan menimbulkan efek yang negatif untuk sistem biosfer dimana manusia dan lingkungan hidup secara berdampingan.

Salah satu kajian risiko yang dihadirkan pada laporan ini adalah kajian risiko bencana. Kajian ini didasarkan pada Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020. Pengkajian risiko bencana dilakukan untuk mengidentifikasi bahaya dan kerentanan di suatu daerah sehingga dapat dianalisa terhadap kemungkinan timbulnya potensi bencana di daerah tersebut. Setelah diketahui kemungkinan potensi bencana, dapat ditentukan langkah-langkah sistematis terhadap upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk pengurangan risiko masing-masing bencana yang berpotensi. Secara umum, pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan mengkaji tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas. Batasan dalam pengkajian tersebut selama 5 (lima) tahun sehingga kajian risiko bencana yang disusun sekarang merupakan pengembangan dari kajian sebelumnya. Dasar pengkajian risiko bencana disamakan dengan aturan terkait kebencanaan hingga tingkat nasional. Pengkajian tahun 2015 disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional.

Pengkajian tersebut didasarkan dengan indeks masing-masing bencana terhadap bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Metodologi yang digunakan untuk menerjemahkan indeks tersebut untuk menghasilkan tingkat risiko untuk setiap bencana di suatu daerah. Penyempurnaan terhadap metodologi yang digunakan akan berpengaruh terhadap proses pengkajian risiko dan hasil kajian. Pengaruh tersebut

terkait dengan komponen-komponen yang digunakan dalam pengkajian, yaitu bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko. Adapun hasil pengkajian risiko bencana di Kabupaten Sinjai dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.17
Jenis Bahaya dan Risiko Tinggi
Kabupaten Sinjai Tahun 2020

JENIS BAHAYA	LUAS BAHAYA (Ha)	% BAHAYA
Cuaca Ekstrim	34.505,98	63,39
Tanah Longsor	13.382,01	24,58
Kekeringan	4.736,04	8,70
Kebakaran Hutan dan Lahan	1.069,77	1,97
Banjir Bandang	741,07	1,36
Banjir	1,15	0,00
Grand Total	54.436,01	100,00

Sumber : Hasil Analisis Tim Ahli KLHS Perubahan RPJMD Kab. Sinjai 2021

Tabel 2.18
Lokasi Risiko Cuaca Ekstrim Tinggi
Kabupaten Sinjai Tahun 2020

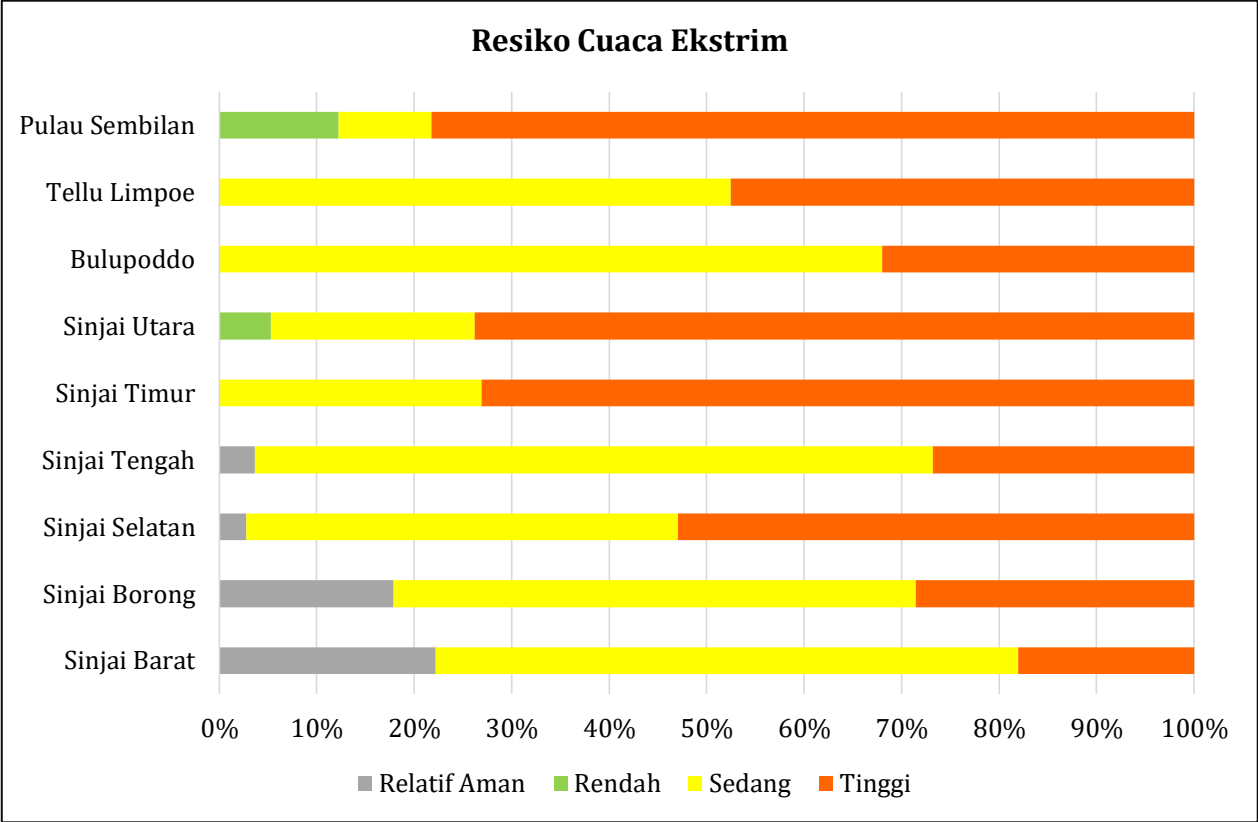
KECAMATAN	LUAS BAHAYA (Ha)	% LUAS
Sinjai Selatan	7.616,41	22,07
Tellu Limpoe	6.812,18	19,74
Sinjai Timur	5.582,04	16,18
Sinjai Tengah	3.391,19	9,83
Bulupoddo	3.220,08	9,33
Sinjai Barat	2.675,73	7,75
Sinjai Borong	2.601,37	7,54
Sinjai Utara	2.440,51	7,07
Pulau Sembilan	166,47	0,48
Total	34.505,98	100,00

Sumber : Hasil Analisis Tim Ahli KLHS Perubahan RPJMD Kab. Sinjai 2021

Berdasarkan tabel 2.17 hasil kajian risiko bencana di Kabupaten Sinjai, menunjukkan bahwa di Kabupaten Sinjai risiko bencana terbesar adalah cuaca ekstrim sekitar 34.505,98 Hektar (63,39%), diikuti oleh risiko tanah longsor sekitar 13.382,01 Hektar (24,58%). Pada kajian ini lebih difokuskan pada kajian risiko bencana terbesar di Kabupaten Sinjai, yaitu cuaca ekstrim. Tabel 2.18 mendeskripsikan cakupan lokasi risiko cuaca ekstrim tinggi untuk setiap kecamatan.

Berdasarkan pada tabel diatas risiko cuaca ekstrim terbesar terdapat pada Kecamatan Sinjai Selatan (22,07%) dan Tellu Limpoe (19,74%). Hal ini mungkin terjadi karena fungsi kawasan di kedua kecamatan tersebut didominasi oleh APL.

Grafik2.2.
Persentase Luas Risiko Cuaca Ekstrem Berdasarkan Kecamatan
di Kabupaten Sinjai Tahun 2020



2.3.3. Kinerja Layanan/Jasa Lingkungan

Jasa lingkungan adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem yang dikelompokkan ke dalam empat macam manfaat yaitu manfaat penyediaan (*provisioning*), produksi pangan dan air; manfaat pengaturan (*regulating*) pengendalian iklim dan penyakit; manfaat pendukung (*supporting*), seperti siklus nutrien dan polinasi tumbuhan; serta manfaat kultural (*cultural*), spiritual dan rekreasional. Sistem klasifikasi jasa ekosistem tersebut menggunakan standar dari *Millenium Ecosystem Assessment* (2005). Diasumsikan semakin tinggi jasa lingkungan suatu wilayah, maka semakin tinggi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kajian ini terutama ditujukan untuk memperkirakan kinerja layanan atau fungsi ekosistem yang terutama didalamnya adalah yaitu :

- a. Layanan/fungsi penyedia (*provisioning services*) : Ekosistem memberikan jasa/produk darinya, seperti misalnya sumber daya alam, sumber daya genetika, air.

- b. Layanan/fungsi pengatur (*regulating services*) : Ekosistem memberikan manfaat melalui pengaturan proses alam, seperti misalnya pengendalian banjir, pengendalian erosi, dan pengaturan iklim.
- c. Layanan/fungsi budaya (*cultural services*) : Ekosistem memberikan manfaat non material yang memperkaya kehidupan manusia, seperti misalnya pengkayaan perasaan dan nilai spiritual, pengembangan tradisi dan adat istiadat, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan.
- d. Layanan/fungsi pendukung kehidupan (*supporting services*) : Ekosistem menyediakan dan/atau mendukung pembentukan faktor produksi primer yang diperlukan makhluk hidup, seperti misalnya produksi biomassa, produksi oksigen, nutrisi, dan air.

Kajian yang dilakukan terutama ditujukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis layanan/fungsi suatu ekosistem serta gambaran kemampuan dan keberfungsian. Adapun hasil analisis penyediaan jasa lingkungan di Kabupaten Sinjai diperlihatkan pada uraian dibawah ini :

2.3.3.1. Jasa Lingkungan Penyediaan (*Provisioning*)

2.3.3.1.1. *Jasa Lingkungan Penyediaan Air*

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air yaitu ketersediaan air baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti bentang lahan.

Tabel 2.19
Distribusi Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Air Kabupaten Sinjai Tahun 2020

Jasa Lingkungan Penyediaan Air (Hektar)					
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Sinjai Barat	452,25	3.726,25	2.720,00	7.946,80	-
Sinjai Borong	197,84	4.458,93	1.950,57	2.511,81	-
Sinjai Selatan	504,65	6.536,73	6.375,02	942,36	28,26
Sinjai Tengah	531,52	7.473,45	2.233,30	2.411,09	4,99
Sinjai Timur	427,91	2.836,17	3.721,47	609,53	43,54
Sinjai Utara	433,61	1.268,88	1.525,57	40,98	37,20
Bulupoddo	398,14	4.722,39	4.160,74	762,36	26,23

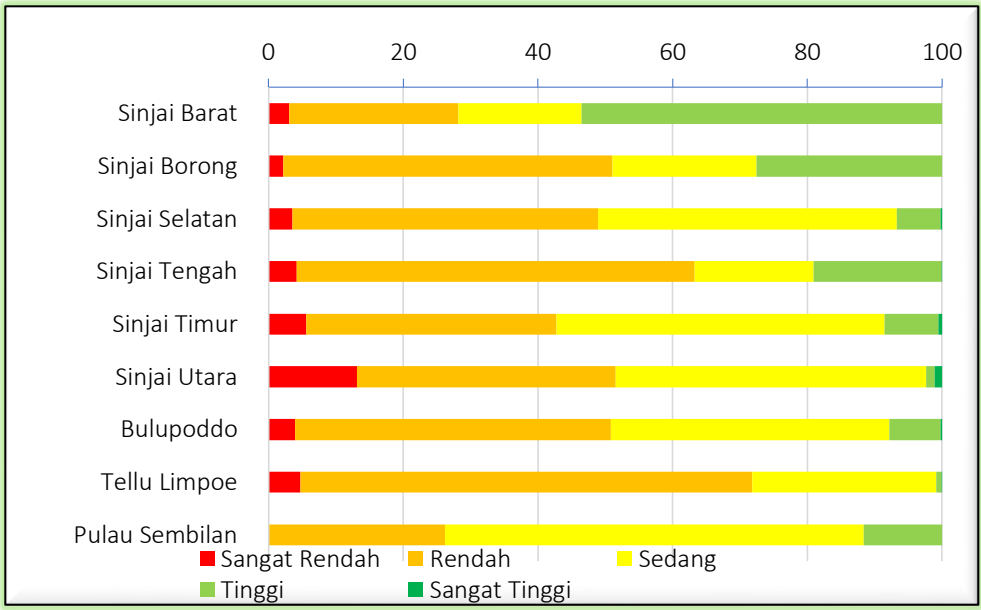
Jasa Lingkungan Penyediaan Air (Hektar)					
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Tellu Limpoe	677,56	9.602,77	3.915,40	123,03	6,11
Pulau Sembilan	-	55,76	132,22	24,84	-
Total (ha)	3.623,47	40.681,33	26.734,28	15.372,82	146,33
Total (%)	4,19	47,00	30,89	17,76	0,17

Sumber : Hasil Analisis Tim Ahli KLHS Perubahan RPJMD Kab. Sinjai 2021

Berdasarkan hasil olah data di atas, Jasa Lingkungan Penyediaan Air di Kabupaten Sinjai untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi – sangat tinggi) sebesar 17,93%. Kategori sedang sebesar 30,89% dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 51,18% dari total luas wilayah Kabupaten Sinjai. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Sinjai secara umum kemampuan jasa lingkungan menyediakan air yang dapat dimanfaatkan berada pada kategori rendah.

Berdasarkan hasil analisis kategori jasa lingkungan penyediaan air untuk setiap kecamatan di Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa kecamatan yang memiliki jasa lingkungan penyediaan air yang paling rendah terdapat pada Kecamatan Tellu Limpoe dan Sinjai Tengah. Sementara yang memiliki jasa lingkungan penyediaan air tinggi terdapat pada Kecamatan Sinjai Barat dan Sinjai Borong.

Grafik 2.3.
Persentase Luas Jasa Lingkungan Penyediaan AirKabupaten Sinjai Tahun 2020



2.3.3.1.2. *Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan*

Jasa lingkungan memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan),

baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.

Tabel 2.20
Distribusi Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan
Kabupaten Sinjai Tahun 2020

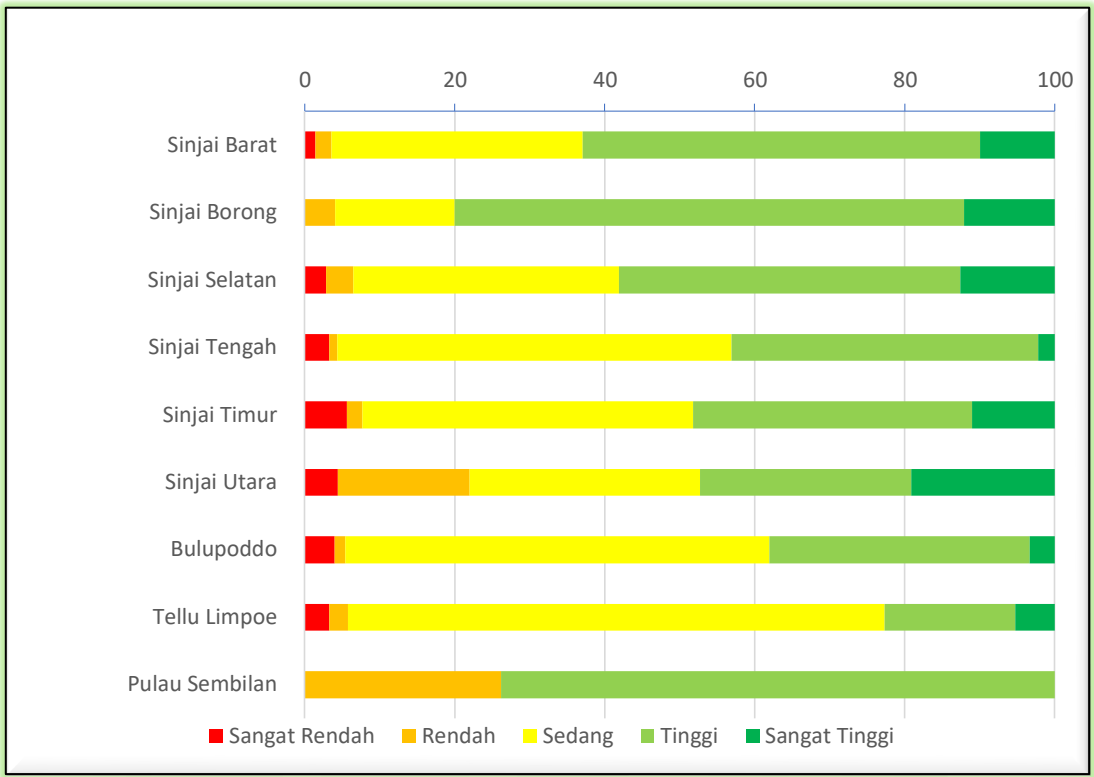
Jasa Lingkungan Penyedia Pangan (Hektar)					
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Sinjai Barat	217,24	312,81	4.976,67	7.863,84	1.474,74
Sinjai Borong	-	367,73	1.458,28	6.189,08	1.104,07
Sinjai Selatan	414,96	517,51	5.099,53	6.547,05	1.807,97
Sinjai Tengah	414,69	136,60	6.648,39	5.180,34	274,35
Sinjai Timur	427,91	160,87	3.366,13	2.844,64	839,06
Sinjai Utara	145,69	581,51	1.015,71	931,96	631,38
Bulupoddo	398,14	145,76	5.698,68	3.489,96	337,33
Tellu Limpoe	464,93	364,69	10.247,86	2.496,14	751,24
Pulau Sembilan	-	55,76	-	157,06	-
Total (ha)	2.483,56	2.643,22	38.511,25	35.700,06	7.220,14
Total (%)	2,87	3,05	44,49	41,24	8,34

Sumber : Hasil Analisis Tim Ahli KLHS Perubahan RPJMD Kab. Sinjai 2021

Berdasarkan hasil olah data, Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan di Kabupaten Sinjai untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi – sangat tinggi) sebesar 49,59%. Kategori sedang sebesar 44,49 % dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 5,92% dari total luas wilayah Kabupaten Sinjai. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Sinjai jasa lingkungan penyediaan pangan umumnya berada pada kategori tinggi dan sedang.

Berdasarkan hasil analisis kategori jasa lingkungan penyediaan pangan untuk setiap kecamatan di Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa kecamatan yang memiliki jasa lingkungan penyediaan pangan yang paling rendah terdapat pada Kecamatan Pulau Sembilan dan Sinjai Utara. Sementara yang memiliki jasa lingkungan penyediaan pangan tinggi terdapat pada Kecamatan Sinjai Borong dan Pulau Sembilan.

Grafik 2.4.
Persentase Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan
Kabupaten Sinjai Tahun 2020



2.3.3.2.Jasa Lingkungan Pengaturan (*Regulating*)

2.3.3.2.1. Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air

Siklus hidrologi (*hydrology cycle*), adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (*evaporasi*), pendinginan massa udara (*kondensasi*), hujan (*presipitasi*), dan pengaliran (*flow*). Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan. ekosistem air tawar, dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.

Tabel 2.21
Distribusi Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air
Kabupaten Sinjai Tahun 2020

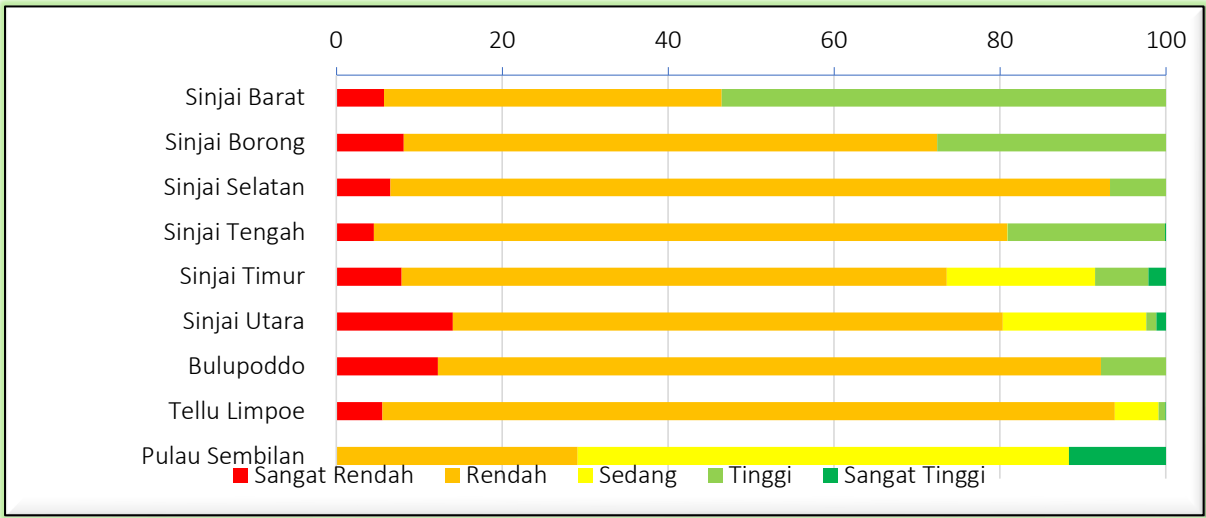
Jasa Lingkungan Pengatur Air (Hektar)					
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Sinjai Barat	854,74	6.043,76	-	7.946,80	-
Sinjai Borong	741,34	5.866,00	-	2.511,81	-
Sinjai Selatan	938,63	12.477,77	-	970,62	-
Sinjai Tengah	569,15	9.662,24	6,89	2.399,21	16,88
Sinjai Timur	601,20	5.018,78	1.365,56	492,12	160,95
Sinjai Utara	465,02	2.190,69	572,34	40,46	37,72
Bulupoddo	1.230,02	8.051,25	-	788,59	-
Tellu Limpoe	795,96	12.648,82	750,94	116,48	12,67
Pulau Sembilan	-	61,93	126,05	-	24,84
Total (ha)	6.196,06	62.021,24	2.821,79	15.266,10	253,05
Total (%)	7,16	71,65	3,26	17,64	0,29

Sumber : Hasil Analisis Tim Ahli KLHS Perubahan RPJMD Kab. Sinjai 2021

Berdasarkan hasil olah data, Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air di Kabupaten Sinjai untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi – sangat tinggi) sebesar 17,93%. Kategori sedang sebesar 16,33% dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 78,81%, sementara untuk kategori sedang sebesar 3,26% dari total luas wilayah Kabupaten Sinjai. Hal ini berarti bahwa di Kabupaten Sinjai jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dalam infiltrasi air dan pelepasan air secara berkala berada pada kategori rendah.

Berdasarkan hasil analisis kategori jasa lingkungan pengaturan tata aliran air untuk setiap kecamatan di Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa kecamatan yang memiliki jasa lingkungan pengaturan tata aliran air yang paling rendah terdapat pada Kecamatan Tellu Limpoe dan Sinjai Selatan. Sementara yang memiliki jasa lingkungan pengaturan tata aliran air tertinggi terdapat pada Kecamatan Sinjai Barat dan Sinjai Borong.

Grafik 2.5.
Persentase Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air
Kabupaten Sinjai Tahun 2020



2.3.3.2.2. *Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim*

Secara alamiah ekosistem ini memiliki fungsi jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca & penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi carbon diokasida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.

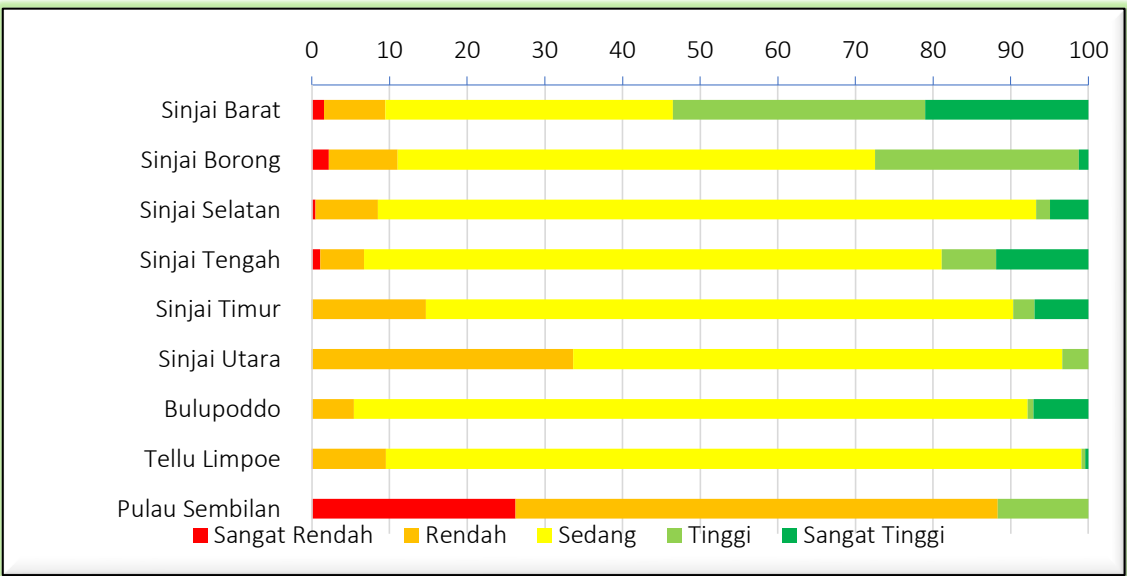
Tabel 2.22
Distribusi Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim
Kabupaten Sinjai Tahun 2020

Jasa Lingkungan Pengatur Iklim (Hektar)					
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Sinjai Barat	235,01	1.165,04	5.500,34	4.826,17	3.118,75
Sinjai Borong	197,73	806,07	5.609,69	2.395,97	109,70
Sinjai Selatan	68,04	1.152,71	12.199,50	250,94	715,83
Sinjai Tengah	136,60	710,79	9.417,84	886,52	1.502,62
Sinjai Timur	0,59	1.120,05	5.780,13	205,46	532,37
Sinjai Utara	0,02	1.111,20	2.082,94	112,08	-
Bulupoddo	-	543,89	8.737,37	72,86	715,74
Tellu Limpoe	11,44	1.349,02	12.835,26	71,84	57,30
Pulau Sembilan	55,76	132,22	-	24,84	-
Total (ha)	705,17	8.091,00	62.163,08	8.846,68	6.752,31

Sumber : Hasil Analisis Tim Ahli KLHS Perubahan RPJMD Kab. Sinjai 2021

Berdasarkan hasil olah data, Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Kabupaten Sinjai untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi-sangat tinggi) sebesar 18,02%, kategori sedang sebesar 71,82% dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 10,16% dari total luas wilayah Kabupaten Sinjai. Hal ini berarti bahwa di Kabupaten Sinjai jasa ekosistem pengaturan iklim secara umum berada pada kategori sedang. Adapun kecamatan di Kabupaten Sinjai yang jasa ekosistem pengaturan iklimnya yang tinggi terdapat pada pada Kecamatan Sinjai Barat. Hal ini terjadi karena sebagai kecamatan terbesar kedua, daerah tersebut banyak terdapat hutan lindung (HL) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) untuk pemanfaatan sumber daya alam fungsi kawasannya dan sisanya termasuk kawasan APL.

Grafik 2.6.
Persentase Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim
Kabupaten Sinjai Tahun 2020



2.3.3.2.3. *Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Longsor*

Ruang lingkup jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana adalah bahwa ekosistem didalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya tanah longsor. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari longsor atau pergerakan tanah. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan

morfologi perbukitan. Adapun distribusi luasan jasa lingkungan pengatur mitigasi bencana longsor di Kabupaten Sinjai diperlihatkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.23
Distribusi Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Bencana Longsor
Kabupaten Sinjai Tahun 2020

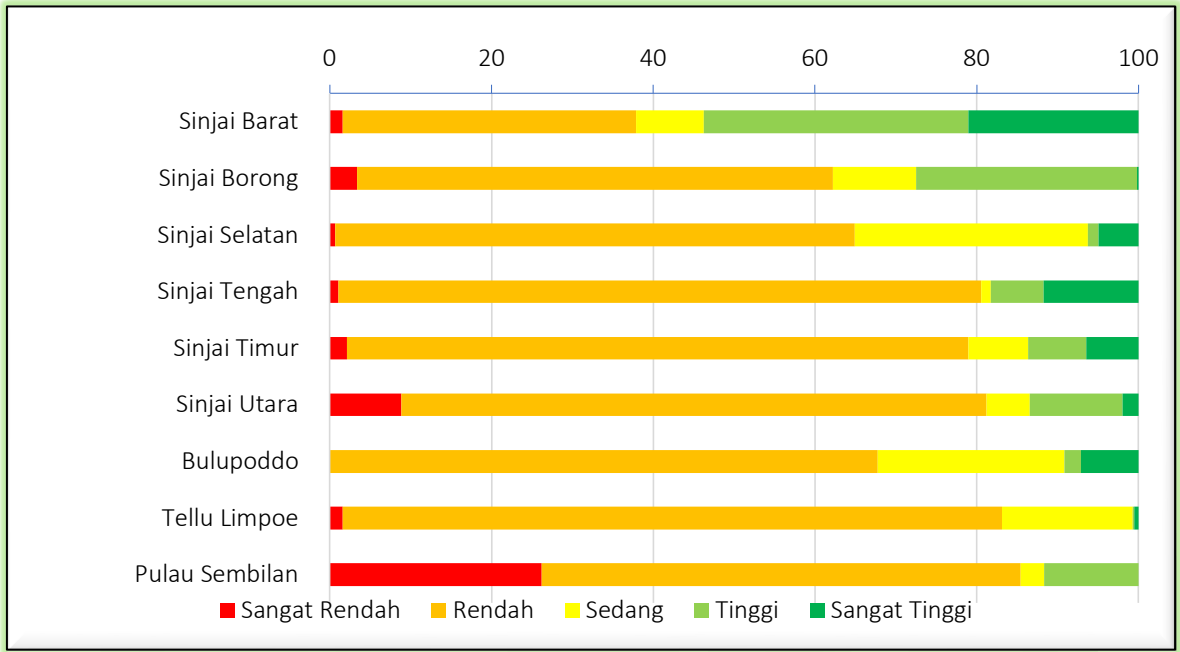
Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Longsor (Hektar)					
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Sinjai Barat	235,01	5.387,50	1.246,20	4.857,84	3.118,75
Sinjai Borong	309,94	5.361,79	941,76	2.490,14	15,53
Sinjai Selatan	100,45	9.238,60	4.153,76	183,11	711,10
Sinjai Tengah	136,60	10.055,08	151,59	824,87	1.486,24
Sinjai Timur	160,87	5.874,26	563,75	548,63	491,11
Sinjai Utara	292,60	2.393,42	175,19	380,99	64,04
Bulupoddo	-	6.823,93	2.327,13	203,07	715,74
Tellu Limpoe	224,06	11.682,56	2.317,81	25,19	75,24
Pulau Sembilan	55,76	126,05	6,17	24,84	-
Total (ha)	1.515,28	56.943,19	11.883,35	9.538,67	6.677,74
Total (%)	1,75	65,79	13,73	11,02	7,71

Sumber : Hasil Analisis Tim Ahli KLHS Perubahan RPJMD Kab. Sinjai 2021

Berdasarkan hasil olah data, Jasa lingkungan pengaturan mitigasi bencana longsor di Kabupaten Sinjai untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi – sangat tinggi) sebesar 18,73%. Kategori sedang sebesar 13,73% dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 67,54% dari total luas wilayah Kabupaten Sinjai.

Data di atas menggambarkan bahwa di Kabupaten Sinjai jasa ekosistem pengaturan mitigasi bencana longsor secara umum berada pada kategori rendah. Adapun kecamatan di Kabupaten Sinjai yang jasa ekosistem pengaturan mitigasi bencana longsornya yang tinggi terdapat pada Kecamatan Sinjai Barat dan Sinjai Borong. Hal ini karena pada daerah tersebut banyak terdapat hutan lindung (HL) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) untuk pemanfaatan sumber daya alam fungsi kawasannya. Sementara yang rendah jasa pengaturan mitigasi bencana longsornya terdapat pada Kecamatan Pulau Sembilan dan Tellu Limpoe.

Grafik 2.7.
Persentase Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Bencana Longsor
Kabupaten Sinjai Tahun 2020



2.3.3.2.4. *Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Bencana Banjir*

Ruang lingkup jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana adalah bahwa ekosistem didalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya banjir. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari banjir. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh banjir umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi datar. Adapun distribusi luasan jasa lingkungan pengaturan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Sinjai diperlihatkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.24
Distribusi Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Bencana Banjir
Kabupaten Sinjai Tahun 2020

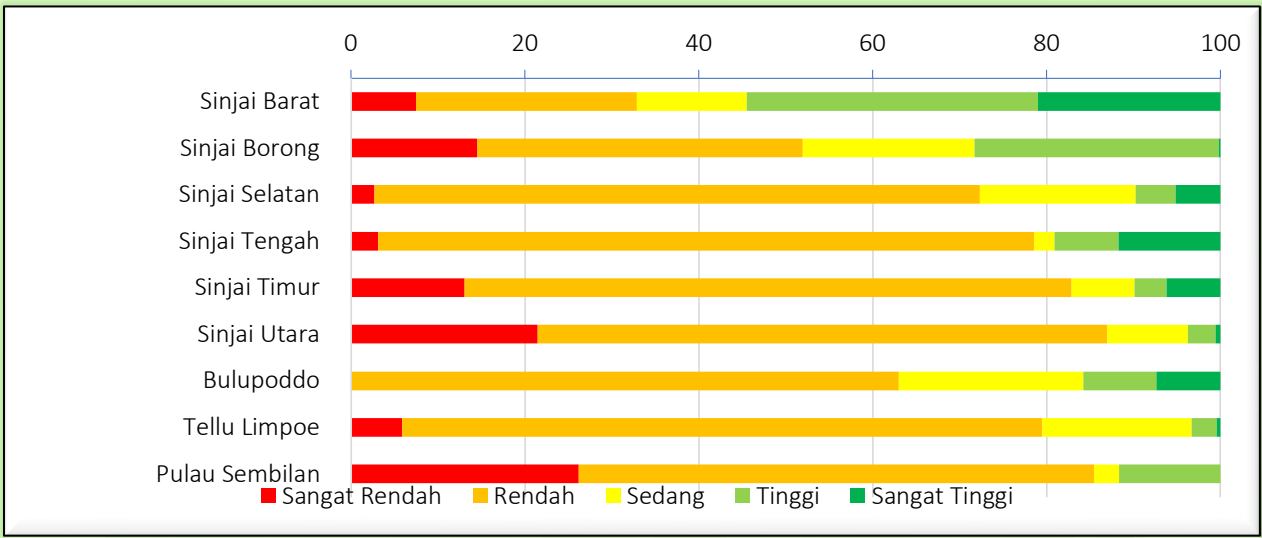
Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Bencana Banjir (Hektar)					
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Sinjai Barat	1.105,00	3.774,93	1.872,63	4.973,99	3.118,75
Sinjai Borong	1.324,89	3.413,43	1.801,81	2.563,50	15,53
Sinjai Selatan	386,77	10.015,64	2.579,43	667,40	737,78
Sinjai Tengah	395,62	9.545,57	296,05	930,89	1.486,24
Sinjai Timur	997,02	5.331,67	554,11	282,78	473,03
Sinjai Utara	709,87	2.166,22	307,02	103,90	19,23
Bulupoddo	-	6.345,03	2.139,74	843,13	741,97

Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Bencana Banjir (Hektar)					
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Tellu Limpoe	845,51	10.545,75	2.458,12	414,07	61,40
Pulau Sembilan	55,76	126,05	6,17	24,84	-
Total (ha)	5.820,45	51.264,30	12.015,08	10.804,50	6.653,91
Total (%)	6,72	59,23	13,88	12,48	7,69

Sumber : Hasil Analisis Tim Ahli KLHS Perubahan RPJMD Kab. Sinjai 2021

Berdasarkan hasil olah data, jasa lingkungan pengaturan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Sinjai untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi – sangat tinggi) sebesar 20,17%. Kategori sedang sebesar 13,88% dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 65,95% dari total luas wilayah Kabupaten Sinjai. Hal ini berarti bahwa di Kabupaten Sinjai, jasa ekosistem pengaturan mitigasi bencana banjir secara umum berada pada kategori rendah. Hal ini berarti wilayah di Kabupaten Sinjai memiliki kemampuan mengendalikan banjir berada pada kemampuan rendah. Berdasarkan pada analisis ini semakin menegaskan bahwa sebagian wilayah di Kabupaten Sinjai berpotensi untuk terjadinya banjir dikarenakan kemampuan untuk melakukan pengaturan mitigasi bencana banjir rendah. Adapun kecamatan yang jasa ekosistem pengaturan mitigasi bencana banjirnya tinggi di Kabupaten Sinjai terdapat di Kecamatan Sinjai Barat dan Sinjai Borong. Hasil ini seirama dengan analisis jasa ekosistem pengaturan mitigasi bencana longsor. Sementara yang rendah jasa pengaturan mitigasi bencana banjirnya terdapat pada Kecamatan Sinjai Utara dan Pulau Sembilan.

Grafik 2.8.
Persentase Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Bencana Banjir
Kabupaten Sinjai Tahun 2020



2.3.3.2.5. *Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air danPengolahan Limbah*

Ekosistem yang memiliki kemampuan untuk “membersihkan” pencemar melalui proses-proses kimia-fisik-biologi yang berlangsung secara alami dalam badan air. Kemampuan pemurniah air secara alami (*self purification*) memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan teknik pemulihan alam khususnya aktivitas bakteri alam dalam merombak bahan organik, sehingga kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar meningkat.

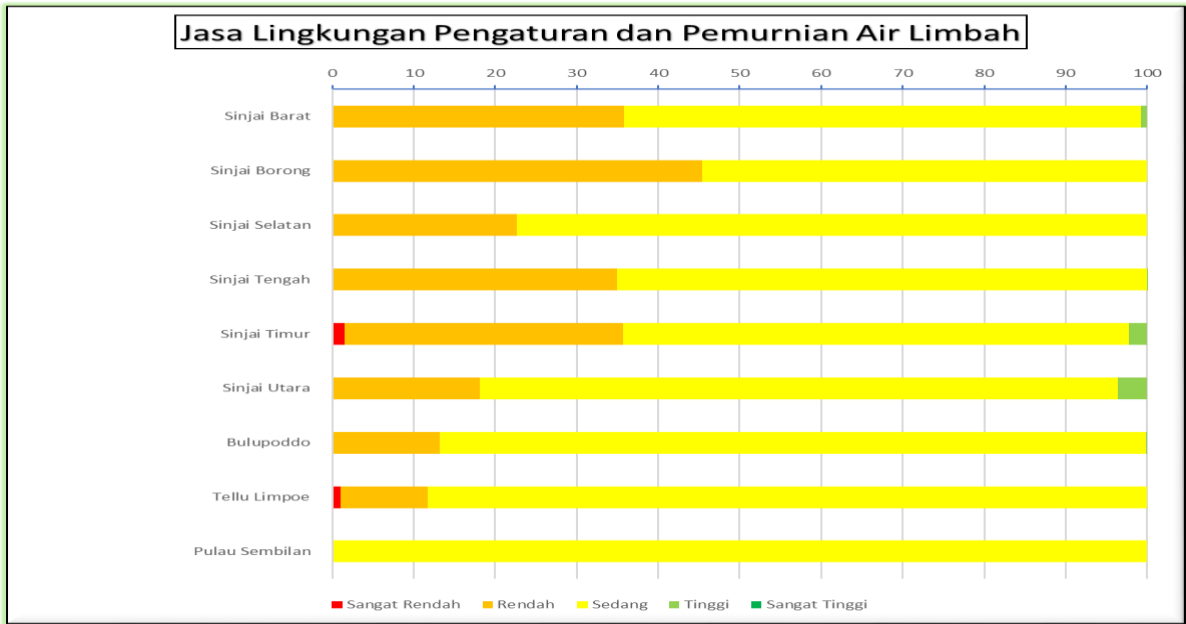
Tabel 2.25
Distribusi Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurniaan Air dan Pengolahan Limbah
Kabupaten Sinjai Tahun 2020

Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah (Hektar)					
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Sinjai Barat	-	5.322,32	9.407,82	115,16	-
Sinjai Borong	-	4.143,96	4.975,20	-	-
Sinjai Selatan	-	3.257,60	11.129,42	-	-
Sinjai Tengah	-	4.426,72	8.225,69	1,95	-
Sinjai Timur	114,67	2.613,28	4.743,46	167,20	-
Sinjai Utara	-	597,92	2.590,34	117,98	-
Bulupoddo	-	1.328,30	8.719,95	21,61	-
Tellu Limpoe	142,58	1.535,00	12.647,29	-	-
Pulau Sembilan	-	-	212,82	-	-
Total (ha)	257,24	23.225,10	62.652,00	423,89	-
Total (%)	0,30	26,83	72,38	0,49	-

Sumber : Hasil Analisis Tim Ahli KLHS Perubahan RPJMD Kab. Sinjai 2021

Berdasarkan hasil olah data, Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah di Kabupaten Sinjai untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi – sangat tinggi) sebesar 0,49%, kategori sedang sebesar 72,38% dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 27,13% dari total luas wilayah Kabupaten Sinjai. Hal ini berarti bahwa di Kabupaten Sinjai jasa lingkungan pengaturan pemurnian air dan pengolahan limbah secara umum berada pada kategori sedang. Adapun kecamatan di Kabupaten Sinjai yang jasa ekosistem pemurnian air dan limbah yang tinggi terdapat pada Kecamatan Sinjai Utara, sementara yang rendah jasa pengaturan pemurnian air dan pengolahan limbah terdapat pada Kecamatan Sinjai Borong.

Grafik 2.9.
Persentase Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah
Kabupaten Sinjai Tahun 2020



2.3.4. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Secara harfiah efisien adalah penggunaan sumberdaya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Proses pemanfaatan sumber daya alam berdasarkan prinsip keefisiensi artinya pengelolaan sumberdaya alam yang tidak merusak atau mengganggu keseimbangan ekosistem yang dilakukan secara efisien serta mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam tersebut.

Salah satu sumber daya alam pemanfaatannya tidak efisien di Kabupaten Sinjai adalah sumber daya penutupan hutan dan lahan. Sektor kehutanan memegang peranan penting untuk kelancaran eksositem lingkungan hidup, disamping menjaga kesinambungan sumberdaya air. Luas kawasan hutan di kabupaten Sinjai

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.362/Menhut-II/2019 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan. Penutupan lahan merupakan garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang buatan. Penutup lahan atau tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati juga dapat didefinisikan sebagai suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutup lahan tersebut. Adapun secara umum penutupan lahan di Kabupaten Sinjai diperlihatkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.26
Distribusi Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Penutupan Lahan
Kabupaten Sinjai Tahun 2020

Penutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
Perkebunan	39.175,11	45,26
Sawah	17.441,95	20,15
Hutan Primer	14.913,94	17,23
Pertanian Lahan Kering	6.683,93	7,72
Pemukiman	5.110,80	5,90
Semak Belukar	1.698,20	1,96
Tambak	788,95	0,91
Tubuh Air	589,44	0,68
Hutan Mangrove Sekunder	124,16	0,14
Lahan Terbuka	15,99	0,02
Rawa	15,77	0,02
Total (Ha)	86.558,24	100

Sumber : Hasil Analisis Tim Ahli KLHS Perubahan RPJMD Kab. Sinjai 2021

Berdasarkan hasil olah data penutupan lahan dominan di Kabupaten Sinjai berupa perkebunan (45,26%), diikuti sawah (20,15%), hutan primer (17,23%), hingga pertanian lahan kering (7,72%). Hal ini menggambarkan bahwa penggunaan sumber daya lahan di Kabupaten Sinjai umumnya berupa penggunaan untuk perkebunan dan pertanian.

Tabel 2.27
Penutupan Lahan Pada Kawasan Hutan di Kabupaten Sinjai Sesuai SK Menlhk no 362

KECAMATAN	KAWASAN SK -362				TOTAL
	APL	HL	HPT	KK	
Sinjai Barat	6.893,75	4.077,21	3.825,11	49,23	14.845,30
Hutan Primer	1.044,76	3.834,95	2.970,52	49,23	7.899,38
Permukiman	520,76	2,02	7,27	-	530,05
Perkebunan	2.080,65	65,30	439,64	-	2.585,99
Pertanian Lahan Kering	1.120,72	63,71	228,30	-	1.412,73

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

KECAMATAN	KAWASAN SK -362				TOTAL
	APL	HL	HPT	KK	
Sawah	2.021,94	17,37	15,12	-	2.045,44
Semak Belukar	68,11	93,73	167,85	-	324,69
Tubuh Air	45,89	0,14	1,40	-	47,42
Sinjai Borong	6.159,96	2.237,41	-	721,79	9.119,16
Hutan Primer	596,97	1.293,05	-	615,65	2.505,67
Lahan Terbuka	7,24	-	-	-	7,24
Permukiman	351,09	7,00	-	2,40	360,50
Perkebunan	3.117,54	554,65	-	-	3.672,19
Pertanian Lahan Kering	903,05	150,20	-	36,49	1.089,73
Sawah	1.030,42	73,65	-	-	1.104,07
Semak Belukar	150,24	156,12	-	67,26	373,61
Tubuh Air	3,41	2,74	-	-	6,15
Sinjai Selatan	12.482,95	1.493,18	410,88	-	14.387,02
Hutan Primer	171,82	436,87	258,86	-	867,54
Permukiman	930,46	1,81	0,19	-	932,47
Perkebunan	6.857,53	836,13	111,38	-	7.805,04
Pertanian Lahan Kering	622,35	212,00	38,77	-	873,12
Sawah	3.793,28	4,64	1,68	-	3.799,60
Semak Belukar	6,16	-	-	-	6,16
Tubuh Air	101,35	1,73	-	-	103,08
Sinjai Tengah	10.591,92	1.140,75	921,70	-	12.654,36
Hutan Primer	978,20	611,55	721,35	-	2.311,10
Lahan Terbuka	2,00	-	-	-	2,00
Permukiman	547,09	0,99	1,21	-	549,29
Perkebunan	6.522,19	492,21	185,84	-	7.200,24
Pertanian Lahan Kering	245,13	21,29	0,44	-	266,87
Sawah	2.180,44	13,77	7,82	-	2.202,03
Semak Belukar	17,86	-	-	-	17,86
Tubuh Air	99,01	0,94	5,04	-	104,98
Sinjai Timur	7.638,61	-	-	-	7.638,61
Hutan Mangrove Sekunder	88,13	-	-	-	88,13
Hutan Primer	532,37	-	-	-	532,37
Lahan Terbuka	2,38	-	-	-	2,38
Permukiman	586,39	-	-	-	586,39
Perkebunan	2.604,32	-	-	-	2.604,32
Pertanian Lahan Kering	238,15	-	-	-	238,15
Sawah	2.867,74	-	-	-	2.867,74
Semak Belukar	213,37	-	-	-	213,37
Tambak	385,06	-	-	-	385,06
Tubuh Air	120,70	-	-	-	120,70
Sinjai Utara	3.306,24	-	-	-	3.306,24
Hutan Mangrove Sekunder	36,03	-	-	-	36,03
Permukiman	727,19	-	-	-	727,19
Perkebunan	904,03	-	-	-	904,03
Pertanian Lahan	218,69	-	-	-	218,69

KECAMATAN	KAWASAN SK -362				TOTAL
	APL	HL	HPT	KK	
Kering					
Rawa	15,77	-	-	-	15,77
Sawah	907,56	-	-	-	907,56
Semak Belukar	50,61	-	-	-	50,61
Tambak	383,94	-	-	-	383,94
Tubuh Air	62,42	-	-	-	62,42
Bulupoddo	8.103,20	240,66	1.726,00	-	10.069,86
Hutan Primer	108,93	61,00	545,80	-	715,74
Lahan Terbuka	2,46	-	1,91	-	4,37
Permukiman	531,97	0,72	6,84	-	539,52
Perkebunan	3.719,08	115,14	790,15	-	4.625,37
Pertanian Lahan Kering	1.285,82	16,90	105,30	-	1.411,02
Sawah	1.980,97	10,08	24,80	-	2.015,86
Semak Belukar	424,91	36,31	224,90	-	686,12
Tubuh Air	49,07	0,49	23,29	-	72,86
Tellulimpoe	13.981,18	343,69	-	-	14.324,87
Hutan Primer	57,30	-	-	-	57,30
Permukiman	828,86	0,77	-	-	829,63
Perkebunan	9.372,04	281,22	-	-	9.653,26
Pertanian Lahan Kering	1.132,73	40,90	-	-	1.173,63
Sawah	2.478,86	20,80	-	-	2.499,56
Semak Belukar	19,61	-	-	-	19,61
Tambak	19,95	-	-	-	19,95
Tubuh Air	71,84	-	-	-	71,84
Pulau IX	212,82	-	-	-	212,82
Hutan Primer	24,84	-	-	-	24,84
Permukiman	55,76	-	-	-	55,76
Perkebunan	126,05	-	-	-	126,05
Semak Belukar	6,17	-	-	-	6,17
Grand Total	69.370,63	9.532,89	6.883,69	771,02	86.558,24

Sumber : Hasil Analisis Tim Ahli KLHS Perubahan RPJMD Kab. Sinjai 2021

Tabel di atas menggambarkan penggunaan lahan di Kabupaten Sinjai berdasarkan SK No 362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Di Provinsi Sulawesi Selatan. Tabel di atas menunjukkan Kecamatan Sinjai Barat sebagai kecamatan dengan kawasan hutan lindung (HL) terluas sebesar 4.077,21 Ha dari total hutan lindung di Kabupaten Sinjai (9.532,88 Ha). Ini berarti sekitar 42,76% hutan lindung di Kabupaten Sinjai terbentang di Kecamatan Sinjai Barat. Sayangnya, terdapat 3,64% (148,40 Ha) kawasan di Kecamatan Sinjai Barat diperuntukkan untuk pemukiman, perkebunan, pertanian lahan kering hingga sawah yang kedepannya akan mengancam kualitas dan ketersediaan sumber daya alam yang

ada. Total terdapat 31,50% (3.003,28 Ha) dari total hutan lindung di Kabupaten Sinjai yang peruntukkan lahannya untuk pemukiman hingga sawah.

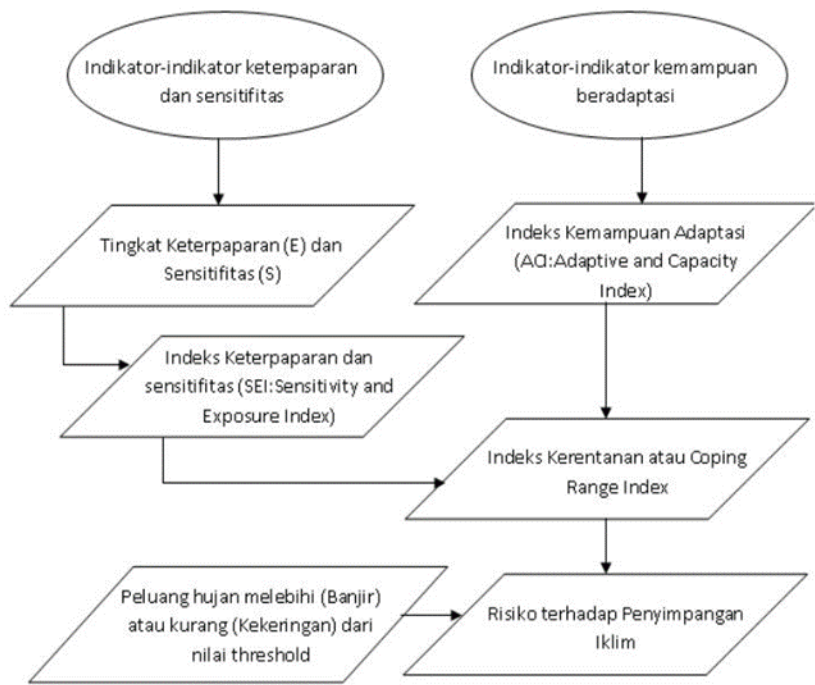
2.3.5. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Terhadap Perubahan Iklim

Pembangunan berkelanjutan dikonstruksikan berlandaskan pada sinergitas basis ekologi, basis ekonomi, dan basis sosial pembangunan pada semua sektor. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan daerah dataran rendah yang luas, Indonesia sangat rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Indonesia telah mengalami kejadian iklim ekstrim seperti banjir dan kekeringan, dan kemungkinan akan mengalami efek jangka panjang dari kenaikan permukaan air laut. Dengan pertambahan penduduk Indonesia, maka bencana alam yang disebabkan perubahan iklim akan berdampak lebih banyak pada manusia dan mata pencahariaannya, sehingga akan lebih sulit untuk bangkit mengurangi kemiskinan. Sebagian masyarakat miskin cenderung tinggal di daerah berisiko tinggi terhadap rawan banjir, tanah longsor, kenaikan permukaan air laut, dan kekurangan air dimusim kemarau. Pemerintah Indonesia memandang konsep yang terintegrasi antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai upaya dalam membangun ketahanan dan pengamanan terhadap banjir, ketersediaan air, dan sumber energi, dan telah melakukan upaya signifikan dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang terdiri dari kerangka kerja untuk inisiatif adaptasi yang telah diarusutamakan ke dalam Rencana Pembangunan Nasional. Dengan pemahaman bahwa membangun ketahanan membutuhkan proses yang panjang, biaya adaptasi perubahan iklim Indonesia akan terus bertambah. Oleh karena itu, tujuan adaptasi Indonesia adalah untuk mempertahankan ekonomi masyarakat yang kuat, untuk menjamin keamanan pangan, serta untuk melindungi mata pencaharian dan kesejahteraan rakyat dengan membangun ketahanan bagi masyarakat yang terkena dampak serta ketahanan sektor seperti ketahanan ekosistem, ekonomi dan sistem penghidupan. Tindakan adaptasi akan diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitas ketahanan dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ke tiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi.

Besar kecilnya dampak atau Konsekuensi (K) yang ditimbulkan oleh kejadian bencana (perubahan iklim) pada suatu sistem akan ditentukan oleh tingkat keterpaparan (*Exposure*, E), Sensitivitas (*Sensitivity*, S) dan Kapasitas (C) dari sistem tersebut. Kerentanan (*Vulnerability*) menggambarkan sejauh mana sistem tersebut dapat mentolerir suatu perubahan atau penyimpangan (dalam kaitannya dengan perubahan iklim). Apabila perubahan/penyimpangan sudah melewati batas toleransi dari sistem maka sistem menjadi rentan karena penyimpangan atau perubahan iklim tersebut menyebabkan dampak negatif. Oleh karena itu, Kerentanan (V) dapat direpresentasikan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi, yang selanjutnya dinyatakan dengan indek sensitifitas dan keterpaparan (*Sensitivity and Exposure Index*, SEI). Misalnya orang miskin lebih rentan dari orang kaya, atau orang yang tinggal di pinggir sungai lebih rentan terhadap bahaya banjir. Kapasitas (C) menunjukkan kemampuan untuk menghindari atau mengantisipasi, mengatasi atau mengelola dampak atau kemampuan untuk pulih kembali dengan cepat setelah terkena dampak. Sistem yang memiliki kapasitas yang tinggi akan memiliki selang toleransi yang lebar terhadap keragaman atau perubahan iklim yang terjadi. Kapasitas juga direpresentasikan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi yang terkait dengan kemampuan. Misalnya petani yang sumber pencaharian satu-satunya hanya dari usahatani akan memiliki kapasitas yang rendah dibanding petani yang memiliki sumber pencaharian alternatif yang banyak. Kemampuan adaptasi ini dinyatakan dalam *Adaptive Capacity Index* (ACI).

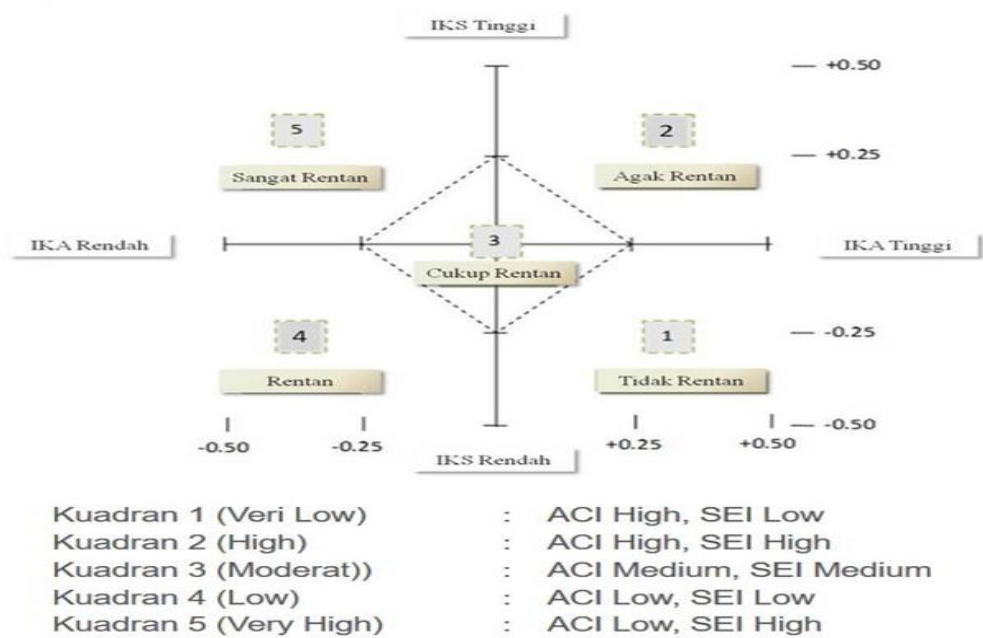
Nilai risiko dari dampak iklim tersebut selain dipengaruhi oleh indeks kerentanan, juga dipengaruhi oleh peluang kemunculannya. Seperti telah disebutkan diatas, besarnya dampak dipengaruhi tingkat toleransi sistem terhadap penyimpangan iklim yang terjadi. Dalam hal risiko terhadap bencana banjir dan kekeringan, maka peubah iklim curah hujan dapat dipergunakan sebagai pemicu kemunculan bencana. Dengan demikian, peluang kemunculan curah hujan di atas batas tertentu (untuk bencana banjir) atau curah hujan di bawah batas tertentu (dalam hal bencana kekeringan) bersama dengan indeks kerentanan dapat dipergunakan sebagai kategori terhadap nilai risiko yang akan terjadi. Gambar 2.1 menyajikan logika berpikir dalam mengkategorikan tingkat risiko terhadap penyimpangan iklim

Gambar 2.1
Kerangka Pikir Perumusan Risiko Terhadap Penyimpangan Iklim



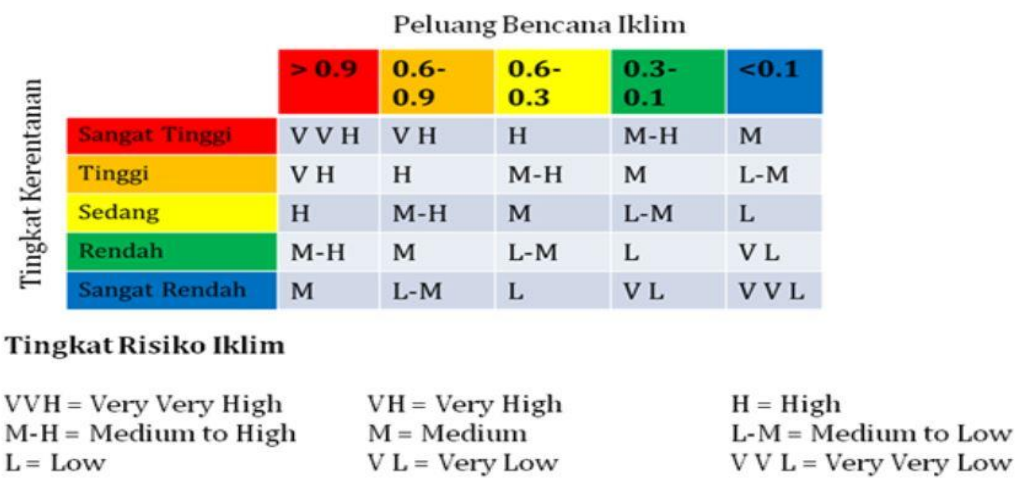
Untuk mendapatkan posisi kerentanan relatif desa terhadap desa lain dalam merespon bencana (*coping range*) ialah dengan melihat posisi nilai indek kerentanan dan kapasitas desa/kelurahan dalam sistem kuadran. Sumbu mendatar mencerminkan kemampuan adaptasi (ACI) dan sumbu vertikal menyatakan tingkat keterpaparan (SEI), yang semuanya dinormalisasi pada internal [-0.5,0.5]. Dengan demikian, sistem kuadran tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 daerah seperti diperlihatkan pada gambar 2.2 Sebagai contoh, apabila nilai indek kerentanan dan kapasitas berada di kuadran 5, maka dikatakan selang toleransi desa terhadap kejadian bencana rendah (*coping range* sempit).

Gambar 2.2
Sistem Kuadran Indeks Kapasitas dan Indeks Kerentanan



Risiko terhadap penyimpangan merupakan fungsi dari tingkat kerentanan dan peluang terjadinya bencana iklim. Peluang terjadinya bencana iklim diformulasikan berdasar peluang terjadinya curah hujan melebihi batas tertentu (untuk bencana banjir) atau peluang curah hujan di bawah nilai tertentu (untuk bencana kekeringan). Untuk memudahkan dalam memahami tingkat risiko ini selanjutnya dikategorikan menjadi 9 kelompok seperti disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 2.3
Kategorisasi Risiko Iklim dan Berdasarkan Tingkat Kerentanan dan Peluang Bencana Iklim



Untuk analisis kerentanan pada kajian ini diambil dari data Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan yang dipublikasikan Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan. Informasi kerentanan ditampilkan dalam dalam basis desa dengan kategori kerentanan terbagi atas lima yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Adapun jumlah desa dengan kategori tingkat kerentanannya diperlihatkan pada tabel dibawah ini.

Tabel.1.28
Kategori Kerentanan Desa di Kabupaten Sinjai, Tahun 2020

KECAMATAN	STATUS KERENTANAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM									
	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Sangat Tinggi		Tinggi	
	Jumlah Desa	Luas (Ha)	Jumlah Desa	Luas (Ha)	Jumlah Desa	Luas (Ha)	Jumlah Desa	Luas (Ha)	Jumlah Desa	Luas (Ha)
SINJAI BARAT			9	15.881						
SINJAI BORONG	2	1.649	5	3.862	1	1.576				
SINJAI SELATAN	1	1.426	9	11.825	1	841				
SINJAI TENGAH			10	12.125	1	1.614				
SINJAI TIMUR			12	7.364	1	492				
SINJAI UTARA			6	2.993						
BULUPODDO			7	10.419						
TELLU LIMPOE	1	1.111			8	10.556	1	1.497	1	1.114
PULAU IX			2	114	2	99				
Total	4	4.186	60	64.583	14	15.178	1	1.497	1	1.114

Sumber : Hasil Analisis Tim Ahli KLHS Perubahan RPJMD Kab. Sinjai 2021

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa umumnya desa di Kabupaten Sinjai berada pada kategori tingkat kerentanan rendah yang ditunjukkan dengan jumlah desa dengan kerentanan rendah sebanyak 60 desa atau 75%% dari total desa di Kabupaten Sinjai (80 desa), diikuti dengan kerentanan sedang sebanyak 14 desa dan kerentanan sangat rendah sebanyak 4 desa. Sementara untuk kerentanan sangat tinggi dan tinggi masing-masing hanya terdapat 1 desa yaitu desa di Kecamatan Tellu Limpoe. Tingginya tingkat kerentanan didaerah tersebut diakibatkan tingkat keterpaparan dan sensitifitas wilayah tersebut yang tinggi sementara disisi lain kapasitas untuk beradaptasi sangat rendah. Kapasitas adaptasi yang rendah mengindikasikan rendahnya ketersediaan infrastruktur diwilayah tersebut, dimana untuk Kecamatan Tellu Limpoe merupakan salah satu kawasan yang rawan terhadap infrastruktur air. Untuk itu pembangunan infrastruktur wilayah dan diversifikasi penghasilan masyarakat perlu perioritaskan pada wilayah yang tingkat kerentanannya sedang hingga sangat tinggi.

2.3.6. Tingkat Ketahanan dan Potensi KEHATI

Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati merupakan hal yang sangat mendasar dan sangat penting dalam menunjang pengembangan Kabupaten Sinjai. Hal yang dikaji dalam melihat potensi keanekaragaman hayati di Kabupaten

Sinjai adalah potensi keanekaragaman genetik. Semakin tinggi keanekaragaman hayati atau genetik, maka semakin tinggi daya dukungnya terhadap kehidupan masyarakat. Untuk itu tingkat ketahanan dan potensi KEHATI di Kabupaten Sinjai berhubungan erat dengan Indikasi jasa penyedia sumber daya genetik dan indikasi jasa ekosistem pendukung habitat keanekaragaman hayati.

2.3.6.1. Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik

Beraneka ragam sumber daya genetik tersedia dalam satu wilayah ekosistem yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sumberdaya genetik berhubungan erat dengan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, dimana keanekaragaman hayati yang tinggi akan diikuti dengan sumber daya genetik yang melimpah. Ketersediaan dan distribusi sumberdaya genetik ditentukan oleh tipe ekosistem, yaitu ekoregion bentang alam dan penutup lahan khususnya areal bervegetasi. Sumber daya genetik yang terlihat dari keanekaragaman hayati adalah semua kehidupan di atas bumi ini baik tumbuhan, hewan, jamur dan mikroorganisme serta berbagai materi genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup. Termasuk didalamnya kelimpahan dan keanekaragaman genetik relatif dari organisme-organisme yang berasal dari semua habitat baik yang ada di darat, laut maupun sistem-sistem perairan lainnya. Keanekaragaman hayati berperan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan, obat-obatan dan bahan bakar.

Tabel 2.29
Distribusi Luas Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik
di Kabupaten Sinjai Tahun 2020

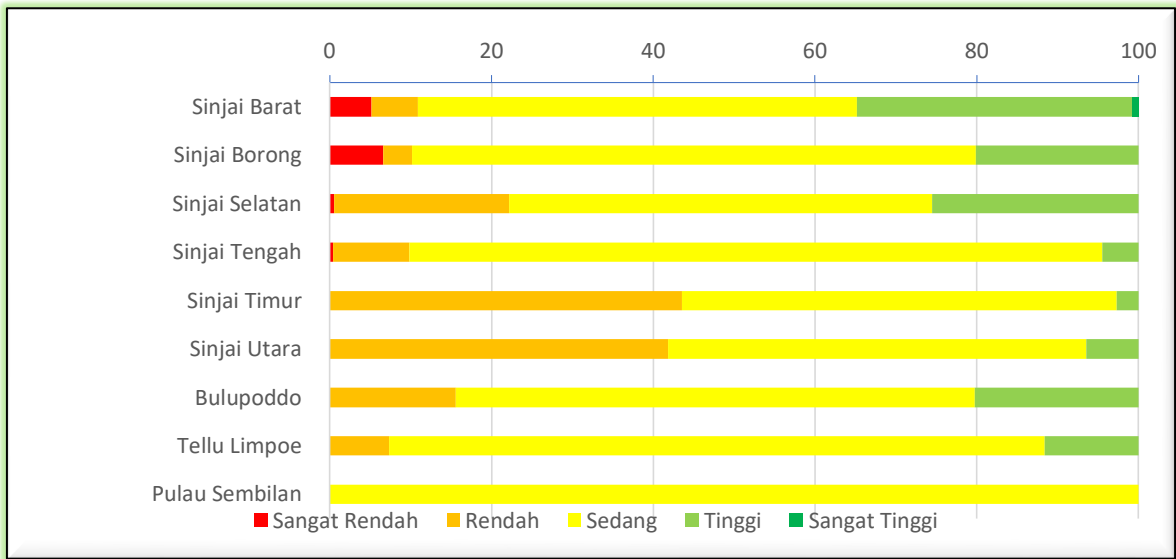
Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik (Hektar)					
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Sinjai Barat	760,72	859,18	8.062,27	5.047,98	115,16
Sinjai Borong	603,16	324,75	6.355,56	1.835,68	-
Sinjai Selatan	81,86	3.108,81	7.528,36	3.667,99	-
Sinjai Tengah	47,65	1.194,59	10.846,64	565,48	-
Sinjai Timur	-	3.329,12	4.106,61	202,89	-
Sinjai Utara	-	1.382,15	1.710,79	213,29	-
Bulupoddo	-	1.566,96	6.467,21	2.035,69	-
Tellu Limpoe	-	1.049,85	11.617,95	1.657,07	-
Pulau Sembilan	-	-	212,82	-	-
Total (ha)	1.493,40	12.815,41	56.908,21	15.226,07	115,16
Total (%)	1,73	14,81	65,75	17,59	0,13

Sumber : Hasil Analisis Tim Ahli KLHS Perubahan RPJMD Kab. Sinjai 2021

Berdasarkan hasil olah data, Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik di Kabupaten Sinjai untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi – sangat tinggi) sebesar 17,72%. Kategori sedang sebesar 65,75% dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 16,54% dari total luas wilayah Kabupaten Sinjai. Hal ini menggambarkan bahwa secara umum Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik di Kabupaten Sinjai berada pada kategori sedang.

Adapun kecamatan di Kabupaten Sinjai yang jasa lingkungan penyedia sumber daya genetik yang tinggi terdapat pada Kecamatan Sinjai Barat dan Sinjai Selatan. Hal ini terjadi karena di kawasan tersebut, khususnya Kecamatan Sinjai Barat terdapat kawasan Hutan Lindung (HL) terbesar untuk Kabupaten Sinjai . Sementara yang rendah jasa penyedia sumber daya genetiknya terdapat pada Kecamatan Sinjai Timur dan Sinjai Utara, dimana pada kedua kecamatan ini efisiensi pemanfaatan sumber daya alam fungsi kawasannya hanyalah APL /Areal Penggunaan Lain.

Grafik2.9
Grafik Persentase Luas Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik
di Kabupaten Sinjai Tahun 2020



2.3.6.2. Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati

Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati (*biodiversity*) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan.

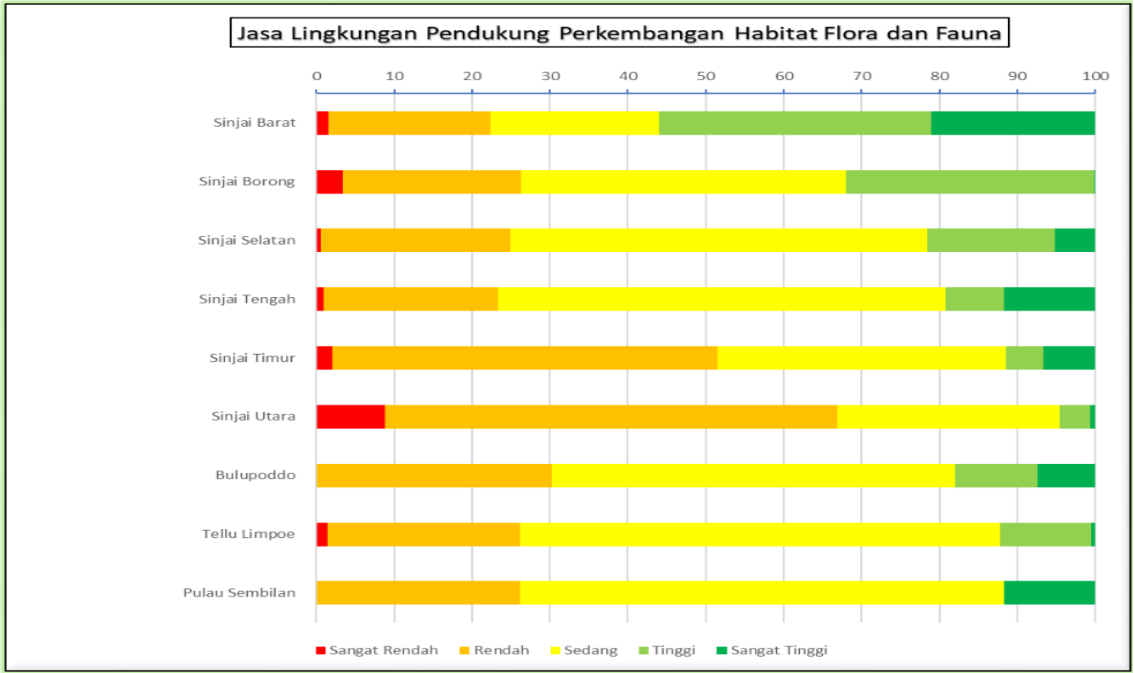
Tabel.2.30
Distribusi Luas Jasa Lingkungan Pendukung Habitat
dan Keanekaragaman Hayati (biodiversity)
Kabupaten Sinjai Tahun 2020

Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati (Hektar)					
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Sinjai Barat	235,01	3.083,06	3.222,07	5.186,42	3.118,75
Sinjai Borong	308,81	2.090,28	3.802,57	2.901,96	15,53
Sinjai Selatan	89,68	3.504,18	7.687,83	2.367,55	737,78
Sinjai Tengah	116,83	2.839,42	7.269,65	942,22	1.486,24
Sinjai Timur	158,48	3.772,10	2.836,56	367,18	504,29
Sinjai Utara	292,58	1.919,90	942,83	131,68	19,24
Bulupoddo	-	3.038,65	5.226,69	1.062,56	741,97
Tellu Limpoe	212,62	3.543,19	8.824,07	1.671,13	73,85
Pulau Sembilan	-	55,76	132,22	-	24,84
Total (ha)	1.414,03	23.846,55	39.944,50	14.630,70	6.722,47
Total (%)	1,63	27,55	46,15	16,90	7,77

Sumber : Hasil Analisis Tim Ahli KLHS Perubahan RPJMD Kab. Sinjai 2021

Berdasarkan hasil olah data, Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Sinjai untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi – sangat tinggi) sebesar 24,67%, kategori sedang sebesar 46,19% dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 29,18% dari total luas wilayah Kabupaten Sinjai. Hal ini menggambarkan bahwa secara umum Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan KEHATI di Kabupaten Sinjai berada pada kategori sedang.

Grafik.1.10
Persentase Luas Jasa Lingkungan Pendukung Habitat
Perkembangan Flora dan Fauna di Kabupaten Sinjai Tahun 2020



Kategori tinggi dan rendah untuk jasa ekosistem pendukung habitat dan keanekaragaman hayati di Kabupaten Sinjai memiliki kondisi yang hampir seirama dengan yang jasa lingkungan penyedia sumber daya genetic, dimana kategori tinggi terletak pada Kecamatan Sinjai Barat, Sinjai Borong dan Sinjai Selatan, begitupun kategori rendah yang terletak di Kecamatan Sinjai Utara dan Sinjai Timur. Hal ini terjadi karena berhubungan dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam fungsi kawasannya.

2.4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.4.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.4.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Sinjai pada tahun 2020 meningkat. Nilai PDRB Sinjai atas dasar harga konstan 2010, mencapai 7,20 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 7,09 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Sinjai mencapai angka sebesar 1,55 persen. Perekonomian Sinjai pada tahun 2020 tersebut tumbuh lebih lambat dibanding tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Sinjai tahun 2020 lebih rendah 4,57 poin dibanding tahun 2019 yang

tercatat 6,12 persen. Angka ini tercatat merupakan pertumbuhan ekonomi Sinjai paling lambat dalam 5 tahun terakhir. Hal ini merupakan efek beruntun dari pandemi COVID-19. Kabupaten Sinjai masih bisa survive dengan tumbuh positif di tengah pandemic dibandingkan dengan provinsi dan nasional yang mengalami resesi dengan pertumbuhan ekonomi negatif. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel2.31
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sinjai,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016 – 2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Sinjai	%	7,09	7,23	7,44	6,12	1,55
2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan	%	7,42	7,21	7,06	6,92	-0,70
3	Pertumbuhan Ekonomi Nasional	%	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Sinjai, Tahun 2021

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sinjai kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami penurunan yang cukup besar, namun masih lebih tinggi di bandingkan antara tiga Kabupaten di sekitarnya. Pertumbuhan tertinggi adalah Kabupaten Sinjai dan Terendah adalah Kabupaten Selayar. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid 19 yang berdampak semua kabuapten yang ada di Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Sinjai dan sekitarnya, namun karena adanya usaha pemerintah Kabupaten Sinjai bersama dengan swasta dan masyarakat mengiatkan dunia usaha, sektor kontruksi dan sektor jasa perdagangan serta sektor jasa lainnya sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sinjai masih tetap bertahan di atas 1 persen.

Tabel2.32
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sinjai, Kab. Bulukumba,
Kab. Bantaeng dan Kab. Selayar Tahun 2016 – 2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Sinjai	%	7,09	7,23	7,44	6,12	1,55
2	Pertumbuhan Ekonomi Kab. Bulukumba	%	6,77	6,89	5,05	5,49	0,43
3	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bantaeng	%	7,39	7,31	8,13	10,57	0,52

4	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Selayar	%	7,35	7,61	8,75	7,66	-1,78
---	---------------------------------------	---	------	------	------	------	-------

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Sinjai, Tahun 2021

PDRB merupakan nilai output bersih yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan dari sektor-sektor ekonomi yang ada di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. PDRB dapat menjadi salah satu indikator kondisi perekonomian suatu daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Hasil penghitungan dari PDRB disajikan Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)

a. Nilai dan Kontribusi Sektor terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 mencapai 11,91 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 0,36 triliun rupiah dibandingkan pada tahun 2019 mencapai 10,78 triliun rupiah. Hal ini disebabkan karena meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Peranan terbesar dalam membentuk PDRB di Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 43,06 persen. Hal ini menunjukkan struktur ekonomi Kabupaten Sinjai didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Lapangan usaha tersebut merupakan lapangan usaha utama yang mampu menyerap sebanyak 60,45 persen dari total tenaga kerja di Kabupaten Sinjai. (SAKERNAS, BPS 2020). Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel2.33
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaetn sinjai
Tahun 2016-2020

NO	SEKTOR	2016		2017		2018		2019		2020(**)	
		(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	3.846.226,1	46,26	4.221.682,6	46,22	4.576.494,8	45,29	4.830.435,5	44,07	4.876.044,52	43,06
2	Pertambangan dan Penggalian	220.442,20	2,65	239.090,7	2,60	267.972,76	2,62	280.890,1	2,56	310.017,76	2,74
3	Industri Pengolahan	227.277,41	2,73	253.708,71	2,76	266.794,78	2,61	303.126,0	2,77	296.040,34	2,61
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6.096,96	0,07	7.401,73	0,08	8.003,65	0,08	8.503,0	0,08	8.855,94	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	5.841,24	0,07	6.346,07	0,07	6.919,1	0,07	7.531,5	0,07	8.148,42	0,07
6	Konstruksi	1.030.652,4	12,37	1.136.609,5	12,33	1.321.421,1	12,93	1.408.849,3	12,85	1.596.352,38	14,10
7	Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil	947.199,5	11,57	.067.285,6	11,90	1.268.291,7	12,49	1.456.697,5	13,29	1.431.530,85	12,64
8	Transportasi dan Pergudangan	128.247,33	1,54	136.886,98	1,49	153.347,30	1,50	170.259,2	1,55	159.176,82	1,41
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28.706,60	0,35	31.845,1	0,35	36.745,91	0,36	42.076,9	0,38	38.106,45	0,34
10	Informasi dan Komunikasi	220.676,62	2,65	245.059,71	2,67	279.288,84	2,73	311.723,1	2,84	357.648,48	3,16
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	252.405,5	2,83	270.030,27	2,94	293.131,3	2,86	308.740,7	2,82	324.919,34	2,87
12	Real Estate	201.301,7	2,46	219.829,6	2,43	237.841,2	2,32	254.490,1	2,32	262.726,94	2,32
13	Jasa Perusahaan	5.192,87	0,06	5.817,02	0,06	6.625,93	0,06	7.382,5	0,07	6.863,59	0,06
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan	501.952,92	6,04	539.629,11	5,87	586.272,78	5,74	636.427,9	5,81	658.299,82	5,81
15	Jasa Pendidikan	494.382,32	5,95	558.206,96	6,07	627.042,66	6,14	679.357,6	6,20	718.223,32	6,34
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	127.280,23	1,53	141.645,89	1,54	160.220,0	1,55	179.446,2	1,64	204.922,67	1,81
17	Jasa Lainnya	50.997,48	0,61	57.124,3	0,62	66.643,48	0,65	74.687,8	0,68	67.176,26	0,59
	PDRB	8.294.879,43	100	9.138.199,86	100	10.163.057,34	100	10.960.624,83	100	11.325.053,91	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Sinjai, Tahun 2021

b. Nilai dan Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

PDRB Atas Dasar Harga Konstan adalah jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap atau harga suatu tahun dasar yang digunakan selama satu tahun

Secara total PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Sinjai menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 kabupaten sinjai mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 1,55 persen, mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan pada tahun sebelumnya akibat pandemi COVID 19. Adapun kenaikan angka PDRB ini disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, serta tidak dipengaruhi inflasi. Sektor dengan kontribusi tertinggi terhadap PDRB ADHK adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Nilai kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB ADHK pada tahun 2020 mencapai 41,18 persen sementara sektor dengan kontribusi terendah adalah sektor jasa perusahaan mencapai 0,07 persen. Dapat dilihat pada table berikut.

Tabel. 2.34
PDRB Atas dasar Harga Konstan berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Sinjai
Tahun 2016-2020

NO	SEKTOR	2016		2017		2018		2019		2020 (**)	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.552.641,50	44,02	2.724.069,10	6,74	2.874.607,50	43,08	3.004.242,30	42,37	2.965.276,66	41,18
2	Pertambangan & Penggalian	123.352,55	2,13	138.900,30	12,60	151.616,10	2,27	158.605,70	2,24	173.942,87	2,42
3	Industri Pengolahan	149.990,08	2,58	161.376,60	7,59	164.678,85	2,47	184.202,20	2,6	177.368,62	2,46
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7.032,75	0,12	7.435,42	5,73	7.721,36	0,12	8.247,10	0,12	8.716,82	0,12
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	4.968,47	0,09	5.326,80	7,21	5.683,80	0,08	6.089,40	0,09	6.544,28	0,09
6	Konstruksi	690.612,40	11,87	736.316,80	6,53	795.009,33	11,91	812.037,60	11,45	905.909,17	12,58
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil	756.912,20	13,11	829.000,40	9,53	934.646,80	13,94	1.050.263,80	14,81	1.022.711,01	14,2
8	Transportasi dan Pergudangan	86.911,66	1,49	93.078,40	7,10	103.150,50	1,54	112.776,70	1,59	102.971,25	1,43
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	22.468,53	0,39	24.488,10	8,81	27.851,14	0,42	31.320,30	0,44	27.886,25	0,39
10.	Informasi dan Komunikasi	214.599,84	3,69	232.213,10	8,21	259.407,82	3,89	286.204,60	4,04	325.471,87	4,52
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	177.579,30	3,06	180.768,68	1,80	188.072,00	2,81	192.803,20	2,72	202.756,71	2,82
12.	Real Estate	140.013,41	2,41	149.701,30	6,92	157.025,50	2,34	165.296,60	2,33	169.577,83	2,36
13.	Jasa Perusahaan	3.948,74	7	4.295,80	8,79	4.714,49	0,07	5.176,90	0,07	4.720,82	0,07

NO	SEKTOR	2016		2017		2018		2019		2020 (**)	
		(Juta Rp)	(%)	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%	(Juta Rp)	%
14.	Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan	337.552,90	5,84	353.926,14	4,85	371.697,45	5,57	392.856,40	5,54	399.263,51	5,55
15.	Jasa Pendidikan	398.682,50	6,87	434.290,40	8,93	476.923,70	7,14	506.534,60	7,14	527.175,31	7,32
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	92.174,98	1,59	99.897,20	8,38	109.291,80	1,62	119.863,50	1,69	132.353,61	1,84
17.	Jasa Lainnya	39.864,30	0,69	43.555,30	9,26	49.152,04	0,74	53.762,70	0,76	47.585,37	0,66
	PDRB	5.799.305,71	100	6.218.639,84	100	6.681.250,19	100	7.090.283,60	100	7.200.231,96	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Sinjai, Tahun 2021

c. Perkembangan Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sinjai positif di tahun 2020. Namun melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 bahkan banyak lapangan usaha yang mengalami kontraksi/penurunan. Hal ini disebabkan Karena dampak pandemi Covid-19.

Perkembangan konstibusi masing-masing sektor terhadap PDRB Kabupaten Sinjai. Sektor Pertanian merupakan sektor yang mendominasi kontribusi terhadap PDRB dari tahun ke tahun dalam kurun waktu tahun 2016-2020. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Pada tahun 2020, kontribusi yang paling besar adalah lapangan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB ADHB adalah 43,06 persen dan kontribusi yang terkecil adalah kontribusi jasa perusahaan sebesar 0,06 persen. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2020 konstibusi yang paling besar adalah kontribusi informasi dan komunikasi sebesar 13,72 persen. Dapat dilihat pada table dibawah ini .

Tabel. 2.35
Perkembangan Kontribusi Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	SEKTOR	2016		2017		2018		2019		2020	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan perikanan	46,37	6,64	46,20	6,72	45,03	5,53	44,07	4,51	43,06	-1,30
2	Pertambangan & Penggalian	2,66	10,64	2,62	12,60	2,64	9,15	2,56	4,61	2,74	9,67
3	Industri Pengelohan	2,74	6,66	2,78	7,59	2,63	2,05	2,77	11,86	2,61	-3,71
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	10,56	0,08	5,73	0,08	3,85	0,08	6,81	0,08	5,70
5	Pengadaan Air,	0,07	6,37	0,07	7,21	0,07	6,70	0,07	7,14	0,07	7,47
6	Konstruksi	12,43	6,87	12,44	6,62	13,00	7,97	12,85	2,14	14,10	11,56
7	Perdagangan Besar dan eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda	11,42	9,47	11,68	9,52	12,48	12,74	13,29	12,37	12,64	-2,62
8	Transportasi dan Pergudangan	1,55	2,01	1,50	7,10	1,51	10,82	1,55	9,33	1,41	-8,69
9	Penyediaan Akomodasi dan makan	0,35	6,45	0,35	8,81	0,36	13,73	0,38	12,46	0,34	-10,96
10	Informasi dan Komunikasi	2,66	9,06	2,68	8,21	2,75	11,71	2,84	10,33	3,16	13,72
11	Jasa Keuangan	3,04	15,62	2,95	1,80	2,88	4,04	2,82	2,52	2,87	5,16
12	Real Estate	2,43	5,71	2,41	6,92	2,34	4,89	2,32	5,27	2,32	2,59
13	Jasa Perusahaan	0,06	6,68	0,06	8,79	0,07	9,75	0,07	9,81	0,06	-8,81
14	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial	6,05	1,86	5,91	4,85	5,77	5,02	5,81	5,69	5,81	1,63
15	Jasa Pendidikan	5,96	6,86	6,11	8,93	6,17	9,82	6,20	6,21	6,34	4,07
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,53	6,63	1,55	8,38	1,58	9,40	1,64	9,67	1,81	10,42
17	Jasa Lainnya	0,61	7,56	0,63	9,26	0,66	12,85	0,68	9,38	8,59	-11,49
	Jumlah	100	7,09	100	7,23	100,00	7,44	100	6,12	100	1,55

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Sinjai, Tahun 2021

2.4.1.2. *Inflasi*

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Kabupaten Sinjai tidak termasuk dalam kabupaten sampel perhitungan inflasi sehingga menggunakan Kabupaten Bone sebagai sister city dengan pertimbangan bahwa mayoritas arus barang dan jasa keluar-masuk melalui Kabupaten Bone.

Inflasi Kabupaten Sinjai yang diaproksimasi melalui angka inflasi Kabupaten Bone menunjukkan tren yang terkendali terutama di dua tahun terakhir 2019 dan 2020 yaitu sebesar 1,64 persen dan 1,89 persen. Angka inflasi tersebut selalu berada dibawah angka inflasi provinsi yang berarti bahwa pengendalian harga-harga barang dan jasa lebih baik dibanding provinsi. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36
Perbandingan Inflasi Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan
dan Nasional Tahun 2016-2020

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
Inflasi Kabupaten Sinjai	%	1,50	5,54	4,69	1,64	1,89
Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan	%	2,94	4,44	3,50	2,35	2,04
Inflasi Nasional	%	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinja, Tahun 2021

2.4.1.3. *PDRB per Kapita*

PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Besaran PDRB perkapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator potensi dan keunggulan wilayah, namun tidak dapat dipakai langsung sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat.

Nilai PDRB per kapita Sinjai atas dasar harga berlaku tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan kenaikan, tahun 2016 tercatat sebesar 34,61 juta rupiah meningkat hingga 46,15 juta rupiah pada tahun 2020. PDRB per kapita Kabupaten Sinjai atas dasar harga berlaku tahun 2020 sebesar 46,15 juta rupiah, dapat diartikan bahwa tiappenduduk di wilayah Sinjai ini mampu memberikan kontribusi nilai tambah secara

ekonomi sebesar 46,15 juta rupiah selama tahun 2020.Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.37
Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Sinjai,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016 – 2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	PDRB Per Kapita Kab. Sinjai	Rp Juta	34,61	37,89	41,88	44,90	46,15
2	PDRB Per Kapita Provinsi Sulawesi Selatan	Rp Juta	43,82	47,82	52,64	56,03	56,51
3	PDRB Per Kapita Nasional	Rp Juta	47,96	51,89	56,00	59,10	56,90

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinja, Tahun 2021

PDRB Per kapita Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa setiap tahun mengalami peningkatan. Nilai PDRB pada tahun 2020 mengalami peningkatan mencapai 11,91Triliun Rupiah dibandingkan tahun 2019 mencapai 10,83Triliun Rupiah. Sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan sebesar 268.678 Jiwa dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 265.027 Jiwa. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.38
PDRB Per Kapita
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

TAHUN	NILAI PDRB (Rp.000)	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)	PDRB Per Kapita (Rp/Jiwa)
2016	8.294.879,43	239,689	34,68
2017	9.138.199,86	252.627	38.10
2018	10.163.057,34	260.019	42.15
2019	10.960.624,83	265.927	44,90
2020	11.325.053,91	268.678	46,15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinja, Tahun 2021

2.4.1.4. Rasio Gini

Koefisien gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Rasio digunakan untuk mengetahui ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk secara menyeluruh. Rasio Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila Rasio Gini berniali 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini

Ratio mengalami penurunan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan. Series data menunjukkan bahwa Rasio gini Kabupaten Sinjai selalu berada di bawah angka provinsi dan nasional. Klasifikasi atau kriteria rasio gini di bawah 0,4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah. Rasio gini antara 0,4 sampai 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang. Rasio gini di atas 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi. Berdasarkan kriteria tersebut, Kabupaten Sinjai termasuk wilayah dengan ketimpangan rendah sejak tahun 2017 (0,376) sampai tahun 2020 (0,372). Program pro poor masih menjadi perhatian utama untuk mereduksi rasio gini sehingga distribusi pendataan makin merata. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.39
Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan
dan Nasional Tahun 2016-2020

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Gini Kabupaten Sinjai	Indeks	0,429	0,376	0,369	0,354	0,372
Rasio Gini Provinsi Sulawesi Selatan	Indeks	0,426	0,407	0,397	0,389	0,389
Rasio Gini Nasional	Indeks	0,291	0,39	0,389	0,382	0,381

Sumber : BPS Kabupaten Sinjai, Tahun 2021 (*) kondisi per maret tahun berjalan

2.4.1.5. Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Indeks Williamson merupakan Indeks untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar wilayah. Untuk mengukur indeks williamson menggunakan PDRB Perkapita dengan kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah secara luas. Apabila angka indeks kesenjangan williamsom semakin mendekati nol, maka menunjukkan kesenjangan semakin kecil dan bila angka indeks menunjukkan semakin mendekati satu maka menunjukkan kesenjangan yang makin melebar. Berdasarkan hal analisis williamson Kabupaten Sinjai terlihat bahwa kurun waktu 2018-2020 mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 dengan nilai indeks 0,172 mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan nilai indeks 0,182. Hal ini di sebabkan karena stimulasi PEN (Pemuliaan Ekonomi Nasional) dari pusat, adanya peningkatan dana ADD yang di fokuskan pada peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan. Fokus pelayanan kinerja pada ketimpangan Indeks Williamson khususnya urusan infrastuktur dan jalan, infrastuktur terminal, infrastuktur

jaringan internet di mana pada beberapa kecamatan distribusi infrastuktur belum merata khususnya jalan. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.40
Indeks Ketimpangan Williamson
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Ketimpangan Williamson	Poin	0,162	0,139	0,160	0,172	0,182

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.4.1.6. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin (Headcount Index/P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Angka yang ditunjukkan oleh HCI-P0 menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Selama 5 tahun terakhir, persentase penduduk miskin Kabupaten Sinjai konsisten dibawah 10 persen atau single digit poverty yaitu sebesar 9,41 persen pada tahun 2016 turun 0,41 poin menjadi 9 persen pada tahun 2020. Jika dikomparasikan, tingkat kemiskinan Kabupaten Sinjai selalu lebih rendah dibanding angka nasional.

Jumlah penduduk diatas garis kemiskinan dapat dihitung berdasarkan angka kemiskinan. Data BPS menunjukkan bahwa pada Tahun 2016 Angka Kemiskinan Kabupaten Sinjai adalah 9,41persen dan pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 9,14persen. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41
Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (KK) (Jiwa)	Angka Kemiskinan (%)	Penduduk Diatas Garis Kemiskinan (%)
1.	2016	22.510	9,41	90,59
2.	2017	22.250	9,24	90,76
3.	2018	22.470	9,28	90.72
4.	2019	22,270	9,14	90,86
5.	2020	22,060	9,00	91,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinja, Tahun 2021

2.4.1.7. *Proporsi Penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) Per Kapita Per Hari*

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin (Headcount Index/P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Angka yang ditunjukkan oleh HCI-P0 menunjukkan proporsi penduduk miskin di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Selama 5 tahun terakhir, persentase penduduk miskin Kabupaten Sinjai konsisten dibawah 10 persen atau single digit poverty yaitu sebesar 9,41 persen pada tahun 2019 turun 0,41 point menjadi 9 persen pada tahun 2020. Jika dikomparasikan, tingkat kemiskinan Kabupaten Sinjai masih lebih tinggi di bandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, namun demikian masih lebih rendah dibanding angka nasional. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.42
Perbandingan Tingkat KemiskinanKabupaten Sinjai,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Sinjai	%	9,14	9,24	9,28	9,14	9,00
Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan	%	9,24	9,48	8,87	8,56	8,72
Tingkat Kemiskinan Nasional	%	10,70	10,12	9,66	9,22	9,78

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

Tabel 2.43

Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP)
per kapita per hari Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	22.510	22.250	22.478	22,270	22,060
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa	239.689	252.627	260.019	265.927	268.678
3	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	%	9,39	8,81	8,64	0,01	0,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinja, Tahun 2021

2.4.1.8. Indeks Pelayanan Publik

Indeks kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator dalam menentukan suatu pelayanan yang telah sesuai standar operasional prosedur. Untuk pelayanan kepada masyarakat diukur dari tingkat kepuasan masyarakat penerima manfaat pelayanan. Untuk Kabupaten Sinjai standar pelayanan masyarakat di lakukan penilaian pada 3 (tiga) perangkat daerah yaitu Catatan Sipil, Rumah Sakit Daerah dan Pelayanan PTSP dengan data IKM . Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.44
Indeks Kepuasan MasyarakatKabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Data IKM Capil	Point	84,30	76,14	80,81	79,42	75,28
2.	Data IKM RSUD	Point	88,40	73,09	80,88	80,08	80,38
3	Data IKM PTSP	Point	81,60	75,29	85,70	85,88	89,22

Sumber : Sekertariat Daerah Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

Selain menggunakan IKM, mengukur tingkat kepuasan juga dengan menggunakan indeks pelayanan public sebagaimana yang di atur pada peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja unit penyelenggaraan pelayanan public. Adapun capaian kinerja Kabupaten Snjai sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.45
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kabupaten Sinjai	Poin	77,80	79,05	80,82	81,52	81,68

Sumber : Sekertariat Daerah Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.4.1.9. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai sebesar 102.318.761.029,69mengalami penurunan. pada tahun 2020 sebesar 98.473.223.045,02Di sebabkan karena adanya pandemi covid 19. Dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 2.46
Persentase PAD terhadap pendapatan
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	INDIKATOR		
		Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Persentase
SATUAN		Rupiah	Rupiah	%
1.	2016	79.491.453.854,80	1.122.559.586.106,60	7,08
2.	2017	113.973.757.128,76	1.076.481.144.522,76	10,59
3.	2018	95.221.950.003,82	1.136.907.609.911,82	8,38
4.	2019	102.318.761.029,69	1.136.257.767.052,50	9,01
5.	2020	98.473.223.045,02	1.120.405.933.071,90	8,98

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.4.1.10. Indeks Reformasi Birokrasi

Penerapan Indeks Reformasi Birokrasi diKabupaten Sinjai pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 56,57 point di bandingkan dengan pada tahun 2019 sebesar 80,01 point. Hal ini di sebabkan karena penerapan reformasi birokrasi pada tingkat perangkat daerah belum sepenuhnya merata dan belum berjalan optimal, perangkat daerah belum menyusun rencana aksi reformasi birokrasi yang menggambarkan hasil/sasaran yang akan di wujudkan beserta dengan ukuran keberhasilan, sehingga belum mampu menunjukkan hasil dalam menggerakkan perubahan pada lingkup organisasi. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47
Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Reformasi Birokrasi	Point	71,85	75,13	76,50	80,01	56,57

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, 2021

2.4.1.11. Capaian Nilai Akuntabilitas Pemerintah Daerah (SAKIP)

Nilai Akuntabilitas pemerintah sebagai bentuk penilaian akuntabilitas pemerintah daerah oleh Kemenpan. Kabupaten Sinjai kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan Nilai SAKIP secara signifikan dan pada tahun 2019 nilai SAKIP sudah mendapatkan nilai “B”. Kabupaten Sinjai selama dan pada tahun 2020 mendapatkan nilai “B” Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.48
Capaian Nilai Akuntabilitas Pemerintah Daerah {SAKIP}
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
Perencanaan Kinerja	Angka	19,21	19,96	20,12	20,69	21,27
Pengukuran Kinerja	Angka	11,27	14,11	14,51	16,34	16,43
Pelaporan Kinerja	Angka	8,09	10,56	10,56	10,58	10,89
Evaluasi Kinerja	Angka	3,13	4,96	5,61	5,98	6,09
Capaian Kinerja	Angka	10,31	10,57	11,23	11,26	11,46
Nilai Hasil Evaluasi	Angka	52,01	60,16	62,12	64,85	66,11
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	Nilai	CC	B	A	B	B

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.4.1.12. Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Opini badan pemeriksa keuangan di Kabupaten Sinjai pada Tahun 2017-2020 telah mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 2.49
Opini Badan Pemeriksa Keuangan Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Sinjai, Tahun 2021

2.4.1.13.Penguatan Cadangan Pangan

Cadangan pangan kabupaten Sinjai ditempatkan diJumlah cadangan pangan kabupaten dari tahun 2016-2020 sebesar 24 ton tidak ada perubahan. Penguatan cadangan pangan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tidak mengalami perubahan karena kondisi ketersediaan pangan utama kabupaten Sinjai sangat tersedia(surplus). Dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 2.50
Penguatan Cadangan PanganKabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cadangan pangan Kabupaten	Ton	24	24	24	24	24
2.	Prosentase dari cadangan pangan wajib daerah 100 Ton	%	24	24	24	24	24

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.4.1.14. Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB bahwa sektor pertanian sangat mendominasi danmenjadi penggerak utama perekonomian di Kabupaten Sinjai. Selama kurun waktu 2016-2020, nilai PDRB sector pertanian meningkat, walaupun nilai share/distribusi dari total PDRB setiap tahun menurun. Sub sektor Perikanan masih menjadi penyumbang tersebsar dari PDRB sektor Pertanian kabupaten Sinjai. Pada tahun 2020 kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku, yakni sebesar 43,06 persen. Capaian PDRB pada tahun 2020 sebtulnya tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, disebabkan oleh pengaruh pandemi covid 19 yang melanda seluruh sektor kehidupan.Hal ini dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.51
Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020

1.	PDRB dari sector pertanian/perkebunan	Rp Juta	3.842.133,83	4.247.419,14	4.576.494,77	4.830.435,52	4.876.044,52
2.	PDRB	Rp Juta	8.294.879,43	9.138.199,86	10.163.057,34	10.960.624,78	11.325.053,91
3.	Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB	%	46,31	46,48	44,64	44,07	43,06

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.4.1.15. Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian komoditi palawija terhadap PDRB bahwa dalam lima tahun terakhir peranan Sub Sektor Pertanian Tanaman pangan khususnya padi dan Palawija cenderung menurun akibat penurunan produksi utamanya tanaman padi dari 117.352 ton GKG 2019 menjadi 94.517 ton GKG 2020 atau sekitar -19,46 persen, walaupun untuk komoditi jagung menunjukkan indikasi peningkatan produksi. Nilai share/distribusi pada komoditi ini mampu dicapai sebesar 7,08 persen pada tahun 2020. Secara umum faktor pencetus penurunan angka produksi pada tahun 2020 adalah ketersediaan anggaran penyediaan sarana dan prasarana pertanian. Demikian halnya pada Sub Sektor Hortikultura. Hal ini dapat dilihat pada table berikut .

Tabel 2.52
Kontribusi Sektor Pertanian Komoditi Palawija terhadap PDRB
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian Komoditi Palawija	Rp Juta	760.821,25	820.130,49	867.125,92	842.331,39	801.378,82
2.	Jumlah PDRB sector pertanian / perkebunan	Rp Juta	3.846.226,30	4.221.682,63	4.576.494,77	4.830.435,5	4.876.044,52
3.	Kontribusi Sektor Pertanian Komoditi Palawija terhadap PDRB	%	9,17	8,97	8,53	7,69	7,08

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.4.1.16. Produksi Komoditi Sektor Pertanian

Jumlah produksi komoditi pertanian dalam kurun lima tahun mengalami fluktuasi yang dinamis, sejalan dengan perkembangan faktor pemicunya. Jumlah produksi komoditas utama yang dimaksud disini merupakan total produksi komoditi padi dan jagung sebagai komoditas pangan utama di Kabupaten Sinjai. Untuk komoditi padi, pada tahun 2016 jumlah produksi mencapai 142.128 ton , sedangkan pada tahun 2020 mencapai 126.198 ton. Terjadi penurunan produksi pada tahun 2020 sebesar ± 15persen jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2019 yang

sebesar 149.187 ton. Hal ini lebih disebabkan oleh efek Pandemi Covid 19 yang secara global mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia di tahun 2020 ini. Situasi pandemi covid 19 menyebabkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian oleh pemerintah dilakukan refocusing untuk menanggulangi dampak tersebut. Akibatnya adalah penyediaan sarana produksi yang diperlukan untuk pengembangan komoditi tanaman padi untuk musim tanam April dan September 2020 menjadi terbatas. Walaupun Data terpilah pada produksi pertanian ini menunjukkan bahwa produksi komoditi Jagung justru mengalami kenaikan setiap tahunnya yang disebabkan oleh kecenderungan harga yang semakin membaik dan tingginya permintaan menjadi faktor utama peningkatan produksi. Secara umum, kendala utama dalam pengembangan komoditi strategis ini adalah faktor Dampak Perubahan Iklim (DPI) serta kuantitas dan kualitas sarana produksi yang diberikan kepada petani.

Faktor penunjang/pemicu keberhasilan pencapaian target produksi adalah tingginya animo petani dan harga jual komoditi yang cenderung kompetitif. Disamping itu, keterlibatan stakeholder lain dalam pengawalan peningkatan produksi sangat mendukung pencapaian kinerja ini. Dukungan APBD Kabupaten Sinjai terhadap pengembangan 2 komoditi strategis ini adalah berupa dukungan dana pembinaan petani dan penangkar serta pengendalian Organisme pengganggu tanaman. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.53
Produksi Komoditi Sektor Pertanian Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi komoditas sektor pertanian	Ton	142.128	141.552	138.671	149.187	126.198

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.4.1.17. Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB

Kontribusi sub sektor pertanian komoditi perkebunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan dari segi share/distribusi. Namun berdasarkan jumlah total (Rp) mengalami peningkatan. Kontribusi komoditi perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Sinjai menurun dalam kurun waktu 2016-2020 yaitu dari 12,95 persen menjadi 11,53 persen. Komoditi tanaman perkebunan sangat strategis untuk dikembangkan lebih lanjut terlebih perannya masih double digit bagi PDRB Kabupaten Sinjai terutama tanaman perkebunan tahunan seperti kopi dan cengkeh.

Nilai Produksi gabungan tanaman perkebunan tahunan meningkat dari 7.623 ton menjadi 7.741 ton pada tahun 2020 atau sekitar 1,55 persen. Ekspansi perkebunan tahunansangat ditopang oleh tanaman kopi robusta, kopi arabika,

cengkeh, lada, dan jambu mete yang tumbuh di kisaran 0,48 - 4,95 persen.Hal ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.54
Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kontribusi sektor Perkebunan (Tan.Keras)	Rp Juta	1.074.343,67	1.152.926,24	1.253.908,82	1.248.138,73	1.306.221,50
2.	Jumlah PDRB sektor pertanian / perkebunan	Rp Juta	3.846.226,10	4.221.682,63	4.576.494,77	4.830.435,52	4.876.044,52
3.	Kontribusi Sektor Perkebunan terhadap PDRB	%	12,95	12,62	12,34	11,39	11,53

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.4.1.18. *Produksi Sektor Perkebunan*

Komoditi kopi dan lada menjadi komoditi perkebunan unggulan kabupaten Sinjai. Pemerintah kabupaten Sinjai mencanangkan penajakan ekport komoditi ini, sekaligus mendukung program Kementerian Pertanian dalam Gerakan Tiga Kali ekspor. Dukungan Pemerintah Provinsi dan Pusat berupa kegiatan rehabilitasi dan intensifikasi tanaman kopi, bahkan oleh Pemprov Sulawesi Selatan Kabupaten Sinjai dijadikan program prioritas untuk pengembangan komoditi yang bernilai ekspor.

Secara umum penurunan produksi komoditas perkebunan lebih disebabkan oleh dampak perubahan iklim (DPI) dan intensitas budidaya terutama perawatan tanaman. Dampak pandemik Covid 19 bagi komoditi perkebunan sangat terasa, terutama pada fluktuasi harga dan biaya sarana produksi. Namun demikian, komoditi kopi dan lada ini telah dicanangkan menjadi komoditi perkebunan unggulan kabupaten Sinjai. Pemerintah kabupaten Sinjai mencanangkan penajakan ekport komoditi ini, sekaligus mendukung program Kementerian Pertanian dalam Gerakan Tiga Kali ekspor.

Dukungan Pemerintah Provinsi dan Pusat berupa kegiatan rehabilitasi dan intensifikasi tanaman kopi, bahkan oleh Pemprov Sulawesi Selatan Kabupaten Sinjai dijadikan program prioritas untuk pengembangan komoditi yang bernilai ekspor. Jumlah produksi komoditi perkebunan Kabupaten Sinjai secara umum mencapai 3.828 ton pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 15 persen di bandingkan

tahun 2019 sebesar 4.050 ton. Komoditi unggulan perkebunan seperti kopi pada tahun 2016 – 2017 mengalami peningkatan. Komoditas perkebunan dimaksud merupakan jumlah produksi komoditi unggulan/utama yang dikembangkan di Kabupaten Sinjai yaitu komoditi kopi, cengkeh, lada dan kakao. Hal ini disebabkan karena rata-rata umur komoditi tersebut sudah memiliki usia yang cukup tua sehingga perlu dilakukan replanting. Di samping itu serangan hama atau penyakit tanaman akibat iklim yang menentu khususnya pada komoditi kakao yang disebabkan pengerek buah kakao. Hal juga disebabkan karena gairah petani menurun akibat harga yang menurun. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.55
Produksi Sektor Perkebunan Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kopi	Ton	4.100	4.102	1.937	2.107	1.847
2	Cengkeh	Ton	1.679	1.850	1.901	964	870
3	Lada	Ton	1.100	2.660	1.501	709	833
4	Kakao	Ton	3.023	2.670	1.594	270	278

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.4.1.19. Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB

Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB di Kabupaten Sinjai bahwa peran kelompok tani dalam pemenuhan target produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam 5 Tahun terakhir mengalami peningkatan, walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat dampak global pandemic Covid19. Kegiatan pembangunan pertanian baik itu penyediaan sarana produksi dan penyediaan infrastruktur pendukung lebih diarahkan pada kelompok-kelompok tani yang telah dilakukan pembinaan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai, sehingga kegiatan pembangunan pertanian tersebut tepat sasaran dan tujuan. Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB secara umum sangat dipengaruhi oleh jumlah petani/kelompok tani yang mendapatkan bantuan pemerintah.

Kontribusi produksi tanaman pangan yang dihasilkan oleh kelompok tani lebih menggambarkan besarnya peran kelompok tani terhadap pengembangan pertanian itu sendiri di kabupaten Sinjai. Bahwa lebih dari 80% sumbangan produksi pertanian tanaman pangan dihasilkan oleh kelompok tani. Hal ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan produksi dengan lebih mengarahkan kebijakan pembangunan pertanian kepada kelompok tani atau Gabungan Kelompok Tani menjadi tepat sasaran.

Demikian halnya dengan kebijakan penyediaan sarana produksi (pupuk) dan Alat dan Mesin Pertanian lainnya kepada kelompok Tani menjadi terarah dan tepat sasaran. Konsep pemberdayaan kelompok tani ini sekarang dikenal dengan konsep korporasi petani, yang semula dicanangkan oleh Pemerintah pada tahun 2017. Konsep korporasi petani merupakan manajemen baru dalam pengelolaan pertanian yang bertujuan untuk mengubah pola kerja petani kearah lebih modern, baik dalam pola pikir (paradigma) maupun cara pengolahan dan pemasaran produk dengan menggunakan *platform* modern. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.56
Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani	Ton	99.225	110.442	111.651	113.777	88.364
2.	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama di daerah	Ton	118.015	126.815	122.671	128.671	105.383
3.	Kontribusi Produksi Kelompok Tani terhadap PDRB	%	84,08	87,09	89,34	88,42	83,85

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.4.1.20. Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB

Jumlah kontribusi PDRB dari sektor kehutanan dalam kurun lima tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 sebesar 5.446,50Juta Rupiah mengalami peningkatan menjadi 5.813,18 Juta Rupiah tahun 2020sedangkan jumlah PDRB juga mengalami peningkatan dari tahun 2019 mencapai 10.960.624,78Juta Rupaih meningkat menjadi 11.325.053,91 Juta Rupiahpada tahun 2020.Dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.57
Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PDRB dari sektor kehutanan	Rp Juta	4.738,44	4.824,51	5.148,49	5.446,50	5.813,18
2.	Jumlah PDRB	Rp Juta	7.517.873,68	8,294.879,43	9.138.199,86	10.960.624,78	11.325.053,91
3.	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.4.1.21. Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB

Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan dalam kurun lima tahun mengalami peningkatan. pada tahun 2019 sebesar Rp. 280.890,13 Juta mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar Rp.310.017,76 Juta sedangkan jumlah PDRB juga mengalami peningkatan dari tahun 2019 mencapai 7.517.873,68 meningkat menjadi 10.960.624,84 pada tahun 2019 sedangkan prosentasenya dari tahun 2015 mencapai 2,13% mengalami peningkatan menjadi 2,64 % pada tahun 2019. Hal ini dapat dilihat pada table berikut .

Tabel 2.58
Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	INDIKATOR		
		Jumlah PDRB dari sektor Per-tambangan	Jumlah PDRB	Kontribusi sektor Pertambangan dalam PDRB
SATUAN		Juta	Juta	%
1.	2016	230.442,20	8,294.879,43	2,37
2.	2017	239.090,69	9.138.199,86	2,51
3.	2018	267.972,8	10.163.057,34	2,64
4.	2019	280.890,1	10.960.624,84	2,64
5.	2020	310.017,76	11.325.053,91	2,74

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.4.1.22. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB

Jumlah Kontribusi PDRB dari sector kelautan dan perikanan, perikanan tangkap yang notabene nya sebagai driven faktor perikanan Kabupaten Sinjai mengalami penurunan sebesar 3,22 persen. Selain itu perikanan budidaya juga ikut mengalami penurunan sebesar -3,83 persen. Sehingga pada tahun 2020 Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada table berikut .

Tabel 2.59
Kontribusi Sektor Kelautan & Perikanan terhadap PDRB
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	INDIKATOR
----	-------	-----------

		Jumlah PDRB dari sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah PDRB	Kontribusi sektor kelautan & perikanan terhadap PDRB
	SATUAN	Juta	Juta	%
1.	2016	1.471.588,94	8,294.879,43	17,74
2.	2017	1.696.592,53	9.138.199,86	18,56
3.	2018	1.845.140,01	10.163.057,34	18,16
4.	2019	2.089.442,10	10.960.624,84	19,06
5.	2020	2.104.283,53	11.325.053,91	18,58

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.4.1.23. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB kabupaten Sinjai pada tahun 2020 mengalami penurunan. Jumlah persentase kontribusi PDRB dari sector perdagangan dalam kurun lima tahun selalu mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 9,86 % meningkat menjadi sedangkan pada tahun 2019 mencapai 13,29 %. Hal ini dapat dilihat pada table berikut

Tabel 2.60
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	INDIKATOR		
		Jumlah PDRB dari sektor Perdagangan	Jumlah PDRB	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
	SATUAN	Juta	Juta	%
1.	2016	962.013,87	8,294.879,43	10,21
2.	2017	1.093.297,22	9.138.199,86	11,96
3.	2018	1.268.291,7	10.163.057,34	12,48
4.	2019	1.456.697,5	10.960.624,84	13,29
5.	2020	1.431.530,85	11.325.053,91	12,64

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.4.1.24. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Kontribusi sector industri terhadap PDRB di Kabupaten Sinjai mengalami penurunan. Dari hasil survey IMK triwulan BPS yang diakumulasikan per tahun menunjukkan bahwa pendapatan bersih dari semua sampel industry pengolahan mengalami kontraksi sampel 31,03 persen. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID -19 sehingga kontribusi sector industry terhadap PDRB mengalami penurunan pada tahun 2020. Dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.61
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	INDIKATOR		
		Jumlah PDRB dari sektor Industri	Jumlah PDRB	Kontribusi sektor industriterhadap PDRB
SATUAN		Juta	Juta	%
1.	2016	227.277,41	8,294.879,43	2,47
2.	2017	253.708,71	9.138.199,86	2,78
3.	2018	266,794,8	10.163.057,34	2,63
4.	2019	303,126,0	10.960.624,84	2,77
5.	2020	296.040,34	11.325.053,91	2,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.4.2. Kesejahteraan Sosial

2.4.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging the choice of people). Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup yang diukur melalui variabel Angka Harapan Hidup (AHH), pengetahuan/tingkat pendidikan yang diukur melalui variabel Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, serta standard hidup layak yang diukur melalui Purchasing Power Parity atau daya beli.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sinjai terus bertumbuh selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Sinjai masih berstatus sedang ($60 < IPM < 70$) yaitu sebesar 67,60, meningkat 0,55 poin dibanding tahun sebelumnya. IPM Kabupaten Sinjai masih berada di bawah IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan IPM Nasional, namun pertumbuhan IPM Kabupaten Sinjai lebih tinggi dari pada pertumbuhan keduanya. Pada tahun 2020, pertumbuhan IPM Kabupaten Sinjai sebesar 0,82 persen sedangkan IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tumbuh

masing-masing 0,38 persen dan 0,03 persen. Tingkat pertumbuhan IPM Kabupaten Sinjai tersebut menempati urutan ke-2 tertinggi se Sulawesi Selatan. Dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 2.62
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sinjai,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasioanl, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Manusia Kab. Sinjai	Poin	65,36	65,80	66,24	67,05	67,60
2	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan	Poin	69,76	70,34	70,90	71,66	71,93
3	Indeks Pembangunan Manusia Nasional	Poin	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.4.2.2.Angka Melek Huruf

Salah satu indikator penilaian mendasar dari tingkat pendidikan penduduk di suatu daerah adalah dengan melihat angka melek huruf (AMH). Melek huruf sendiri adalah kemampuan membaca dan menulis, dimana seseorang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya.

Angka melek huruf menunjukkan bahwa Pada tahun 2019 penduduk berusia diatas 15 Tahun sebesar90,70 persen. Mengalami peningkatan pada Tahun 2020 sebesar 99,27 persen. Walaupun capaiannya mengalami peningkatan namun belum bias memenuhi target yang ditetapkan yaitu 100 persen, Hal ini disebabkan masih ada penduduk yang buta aksara. Dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.63
PerkembanganAngka Melek HurufKabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	AMH Usia 15 > Tahun Kab.Sinjai	%	89,12	89,19	90,70	90,70	99,27

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.4.2.3. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata- rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Angka ini sangat berguna untuk memonitor tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Diasumsikan pada usia 25

tahun, seseorang sudah melewati semua jenjang pendidikan sampai tingkat tertinggi dan dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.

Di Kabupaten Sinjai, sampai dengan tahun 2020 rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas telah mencapai 7,75 tahun atau setara dengan kelas VII-VIII. Selama lima tahun terakhir (2016-2020), rata-rata lama sekolah terus meningkat dari 7,06 tahun (tahun 2016) menjadi 7,75 tahun (tahun 2020) dengan rata-rata pertumbuhan 2,37 persen per tahun. Perlu digaris bawahi bahwa angka rata-rata lama sekolah tidak dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan pendidikan yang sedang berlangsung. Keberhasilan pembangunan tidak dapat diukur secara instan, pasalnya angka RLS ini menunjukkan informasi dan hasil pendidikan dari penduduk usia 25 tahun ke atas dimana hanya sebagian kecil penduduk usia tersebut yang pada usia sebelumnya merasakan program pembangunan pendidikan yang sedang dilaksanakan.

Tabel 2.64
Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sinjai,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sinjai	Tahun	7,06	7,28	7,29	7,48	7,75
2	Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan	Tahun	7,75	7,95	8,02	8,26	8,38
3	Rata-Rata Lama Sekolah Nasional	Tahun	7,95	8,10	8,17	8,34	8,48

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.4.2.4. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang dengan asumsi bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung berdasarkan penduduk yang berumur 7 tahun ke atas. Selama kurun waktu 2016-2020, angka harapan lama sekolah di Kabupaten Sinjai terus meningkat, namun HLS tersebut masih dibawah angka provinsi Sulawesi Selatan. Dari 12,83 tahun pada 2016 menjadi 13,05 tahun pada 2020. Angka HLS pada tahun 2020 tercatat 13,05 tahun, artinya di Kabupaten Sinjai anak usia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan akan dapat bersekolah selama 13,05 tahun atau dengan kata lain mencapai pendidikan Diploma

I. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan pula untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan yang tengah berlangsung saat ini yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sinjai,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Harapan Lama Sekolah Kab. Sinjai	Tahun	12,83	12,84	12,85	12,87	13,05
2	Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan	Tahun	13,16	13,28	13,34	13,36	13,45
3	Harapan Lama Sekolah Nasional	Tahun	12,72	12,85	12,91	12,95	12,98

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.4.2.5. Umur Harapan Hidup

Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat hidup suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Tren angka harapan hidup saat lahir dari tahun 2016 – 2020 cenderung stabil pada kisaran 66-67 tahun dan mencapai 67,30 tahun di tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH Sinjai pada tahun 2020 sebesar 67,30 tahun. Artinya, secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 67,30 tahun.

Peningkatan AHH ini tidak terlepas dari berbagai aspek pendukung masyarakat seperti peningkatan sarana kesehatan melalui pembangunan dan pemerataan di fasilitas kesehatan di berbagai wilayah Kabupaten Sinjai, peningkatan pelayanan kesehatan melalui penambahan jumlah tenaga medis yang ditugaskan di seluruh wilayah Kabupaten Sinjai terutama dalam hal pemeriksaan kehamilan dan penolong kelahiran untuk meminimalisasi besarnya angka kematian bayi. Program pemerintah berupa jaminan BPJS PBI dan Jamkesda Plus dalam rangka penjaminan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati pelayanan kesehatan yang dibutuhkan juga telah digulirkan ke seluruh 80 desa/keluarahan di Kabupaten Sinjai. Dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 2.66

Perbandingan Umur Harapan Hidup, Kabupaten Sinjai,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Umur Harapan Hidup Kab.Sinjai	Tahun	66,54	66,61	66,83	67,17	67,30
2	Harapan Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Selatan	Tahun	69,82	69,84	70,08	70,43	70,57
3	Harapan Lama Sekolah Nasional	Tahun	70,95	71,11	71,23	71,39	71,47

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.4.2.6. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Sinjai berguna untuk mengukur kinerja pelayanan bidang kesehatan di kabupaten/kota. Semakin tinggi jumlah balita dengan status gizi buruk di suatu daerah, maka semakin buruk pula kondisi kesehatan penduduk di daerah tersebut. Hal ini dapat mengindikasikan rendahnya layanan dan akses kesehatan bagi masyarakat di daerah tersebut. Dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 2.67
Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten SinjaiTahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Balita Gizi Buruk (BGM)	Balita	1	3	2	4	5
2	Jumlah Balita	Balita	18.158	18.176	32.057	32.032	17.664
3	PersentaseBalita Gizi Buruk	%	0,01	0,02	0,01	0,01	0,03

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.4.2.7. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Prevalensi Balita gizi kurang Kabupaten Sinjai selama kurun lima tahun cenderungberfluktuasi pada tahun 2019 sebanyak 439 balita mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebanyak 510 balita, sedangkan jumlah balita pada tahun 2019 sebanyak 32.032 balita mengalami penurunan pada tahun 2020 sebanyak 17.664 balita.Persentase Prevalensi Balita gizi kurang pencapiannya mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebanyak 2,89 persen di banding pada tahun 2019 sebanyak 1,37 persen, sehingga pencapaian mengalami penurunan sehingga jumlah gizi kurang meningkat karena kurang optimalnya pelayanan gizi di posyandu akibat pandemi. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68
Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah balita gizi kurang	Balita	159	147	775	439	510
2	Jumlah balita	Balita	18.158	18.176	32.057	32.032	17.664
3	Prevalensi balita gizi kurang	%	0,88	0,81	2,42	1,37	2,89

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.4.2.8. Cakupan Desa Siaga Aktif

Cakupan desa siaga aktif selama lima tahun mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebanyak 93,33 % mengalami peningkatan sebanyak 60 pada tahun 2019, jumlah desa siaga aktif pada tahun 2016 sebanyak 56 desa pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 60 desa sedangkan jumlah desa siaga yang di bentuk pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 60 desa. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.69
Cakupan Desa Siaga AktifKabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	JumlahDesa siaga aktif	Desa	59	60	60	60	60
2	JumlahDesa siaga yang dibentuk	Desa	60	60	60	60	60
3	CakupanDesa Siaga Aktif	%	83,33	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, tahun 2021

2.4.2.9. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) merupakan bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen atau cuti. Disamping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja.

Semakin tinggi Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif atau produksi barang dan jasa dalam periode tertentu.

Angka persentase Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) pada periode tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2019 sebesar 57.40 persen di tahun 2019 mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 69,90

persen.pada tahun 2020 mengalami Kenaikan terjadi akibat adanya Penurunan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas secara signifikan dari tahun 2019 menjadi 197,392 orang, sementara jumlah penduduk angkatan kerja turun dari angka menjadi 113.304 ditahun 2019 dan 127.954 orang pada tahun 2020.

Hal tersebut terjadi karena banyaknya penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan aktifitas ekonomi, sementara jumlah angkatan kerja cenderung menurun. Dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 2.70
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Angkatan kerja 15 tahun ke atas	Orang	-	118.332	118.070	113.304	127.954
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	Orang	-	169.981	171.620	197.392	183.046
3	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	-	69,61	68,80	57,40	69,90

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.4.2.10. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja (PUK). Dengan mengetahui TPAK dan jumlah PUK, maka angkatan kerja untuk tiap kelompok dapat diketahui dengan menghitung angkatan kerja = TPAK x PUK. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Angka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang bekerja atau mencari pekerjaan. Dengan demikian angka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi maupun faktor demografis. Beberapa faktor demografis yang dianggap penting pengaruhnya terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan.

Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)pada tahun 2019sebesar 97,72 persendan pada tahun 2020 mengalami Penurunan menjadi 82,44 %. Penurunan terjadi karena jumlah penduduk angkatan kerja naik dari angka 113.304 ditahun 2019 menjadi angka 127.954 pada tahun 2020, sementara jumlah penduduk usia kerja mengalami Kenaikan, dimana tahun 2019 sebanyak 110.725 orang dan

pada tahun 2020 mengalami Kenaikan menjadi 155.210. Dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 2.71
Tingkat Partisipasi Angkatan KerjaKabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja	Orang	-	118.332	118.070	113.304	127.954
2	Jumlah Penduduk usia kerja (15-64) tahun	Orang	-	151.828	174.496	110.725	155.210
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	-	77,94	67,66	97,72	82,44

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.4.2.11. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. TPT Kabupaten Sinjai pada tahun 2017 sebesar 4,53 persen, turun menjadi 1,95 persen pada tahun 2018 kemudian mengalami kenaikan di 2 tahun berikutnya, yaitu 2,17 persen dan 2,65 persen. Dalam selang waktu 2017-2020, TPT provinsi dan nasional mengalami kenaikan masing-masing 1,51 persen dan 1,57 persen, sedangkan TPT Kabupaten Sinjai mengalami penurunan -1,88 persen. Dampak COVID-19 bagi penduduk usia kerja Kabupaten Sinjai terdiri dari pengangguran karena COVID-19 sebesar 1,57 persen, Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 sebesar 2,66 persen, sementara tidak bekerja karena COVID-19 sebesar 4,29 persen, dan pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebesar 91,47 persen. Dapat dilihat pada table berikut

Tabel 2.72
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sinjai,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2016-2020

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Sinjai	%	-	4,53	1,95	2,17	2,65
2	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi Selatan	%	4,8	5,61	9,94	4,62	6,31
3	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional	%	5,61	5,5	5,30	5,23	7,07

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

Pengangguran terbuka adalah mereka yang (a) mencari pekerjaan, (b) yang mempersiapkan usaha, (c) yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (d) yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sinjai berfluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Tingkat Pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebesar 2,65 persen dengan total 3.395 Jiwa. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,28 persen mengalami kenaikan dibanding pada tahun 2019 dimana pada tahun 2019 sebesar 2,65 persen dengan jumlah total 2.579 Jiwa. Dapat dilihat pada table berikut .

Tabel 2.73
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlahpengangguran terbuka usia angkatan kerja	Jiwa	-	5.362	2.521	2.579	3.395
2	Jumlahpenduduk angkatan kerja	Jiwa	-	118.332	118.070	113.304	127.954
3	Tingkat pengangguran terbuka	%	-	4,53	2,14	2,28	2,65

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kab. Sinjai, Tahun 2021

2.4.2.12. Rasio Penduduk yang Bekerja

Penduduk yang bekerja adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan sekurang-kurangnya 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu sebelum pencacahan. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Perkembangan jumlah penduduk yang bekerja (PYB) di Kabupaten Sinjai selama periode tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 menjadi 110.725 orang pada tahun 2020 mengalami kenaikan mencapai 124.559 orang. Rasio penduduk yang bekerja tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,97 akibat terjadinya kenaikan jumlah angkatan kerja. Namun kenaikan jumlah penduduk yang bekerja dan penurunan jumlah angkatan kerja di tahun 2020 mengakibatkan kenaikan persentase rasio penduduk yang bekerja di kabupaten Sinjai.

Tahun 2016 hingga 2020 dari seluruh penduduk yang bekerja, lebih dari 50 persen bekerja pada sektor pertanian (sektor primer). Hal ini sejalan dengan kondisi

perekonomian yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kontribusi sektor pertanian merupakan yang terbesar dalam pembentuk PDRB Kabupaten Sinjai. Keadaan ini juga hampir sejalan dengan keadaan bahwa sebagian besar penduduk angkatan kerja yang bekerja berpendidikan maksimum SD. Walaupun tidak bisa disimpulkan secara pasti, tetapi angka-angka ini setidaknya mengindikasikan bahwa 5 tahun terakhir di Kabupaten Sinjai, sebagian besar penduduk angkatan kerja yang bekerja berpendidikan maksimum SD bekerja pada sektor pertanian, karena sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja tanpa memandang keahlian maupun tingkat pendidikan, selain itu lahan pertanian yang masih melimpah di Kabupaten Sinjai. Dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 2.74
Rasio Penduduk yang Bekerja
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk yang bekerja	Orang	-	112.970	115.549	110.725	124.559
2	Angkatan kerja	Orang	-	118.332	118.070	113.304	127.954
3	Rasiopenduduk yang bekerja		-	0,95	0,98	0,98	0,97

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kab. Sinjai, Tahun 2021

2.4.2.13. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan

Skor PPH merupakan indikator mutu gizi konsumsi pangan dan keragaman pangan berdasarkan proporsi sumbangan energi yang terdiri dari 9 kelompok yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, serta lain-lain. Sumbangan konsumsi energi di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2247,3 dari tahun 2019 sebesar 2006,6. Sedangkan pencapaian skor PPH tahun 2019 sebesar 88,2 mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 88,7. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan masyarakatnya sudah semakin beragam, bergizi dan seimbang dari skor ideal 100. Dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.75
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka kecukupan gizi	AKG	1.879,6	1.879,8	1.957,6	2.006,6	2247,3
2.	Bobot masing-masing kelompok pangan		11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
3.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	Angka	83,8	87	87,5	88,2	88,7

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Sinjai, Tahun 2021

2.4.2.14. *IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)*

Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Sinjain dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 indeks pembangunan gender mencapai 98,20 dan pada tahun 2020 menurun menjadi 98,02. Walaupun mengalami penurunan, namun jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sulawesi Selatan, maka Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Sinjai masih diatas angka provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun demikian capaian tersebut masih dibawah dari target RPJMD sebesar 98,22.

Sementara capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Sinjai selama periode tahun 2019 sampai tahun 2020 berfluktuasi. Pada tahun 2019 Indeks Pemberdayaan Gender mencapai angka 70,24 atau lebih rendah dari Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai angka 74,01. Pada tahun 2020 mengalami penurunan 72,48, tetapi masih dibawah angka Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 76,01. Walaupun masih rendah dibawah target RPJMD sebesar 72,68

Berdasarkan upaya yang dilakukan dalam mendorong pengarusutamaangender dan kabupaten/kota layak anak, Kabupaten Sinjai telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2017-2019, Kabupaten Sinjai telah mendapatkan penghargaan pada tingkat Pratama.Pencapaianini tidak terlepas juga dari pencapaian kabupaten Sinjai, dimana pada tahun 2019 kabupaten Sinjai yang mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) sebagai penghargaan atas implementasi pangarusutamaan gender. Pertumbuhan IPG dan IDG dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.76
IPG dan IDGKabupaten Sinjai Tahun 2017-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN
----	-----------	--------	-------

			2017	2018	2019	2020
1	IPG	%	98,01	98,07	98,20	98,02
2	IDG	%	72,56	72,60	70,24	72,48

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai, Tahun 2020

2.4.2.15. Rasio Literasi Al Qur'an Terhadap Jumlah Penduduk Islam

Rasio tuntas baca tulis Al Qur'an (TBTQ) terhadap jumlah penduduk islam di Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan hal ini disebabkan program perintah terkait melek baca Al Qur'an sehingga penduduk yang beragama islam mulai usia 12 tahun keatas wajib baca dan tulis AL Qur'an. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.77
Rasio Tuntas Baca Tulis Al Qur'an terhadap Jumlah Penduduk Islam
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tuntas Baca Tulis Al Qur'an (TBTQ)	Orang	185.635	188.871	189.388	192.911	196.765
2.	Jumlah Penduduk Islam	Jiwa	247.334	258.296	252.233	253.738	258.808
3.	Rasio TBTQ		0,75	0,73	0,75	0,76	0,76

Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

Rasio Hafidz terhadap jumlah penduduk islam Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020 cenderung mengalami kenaikan hal ini di sebabkan karena adanya program pemerintah terkait peningkatkan penghafal Al Qur'an. Sehingga menyebabkan banyak berdiri program rumah tahfidz Al Qur'an. Dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.78
Rasio Hafidz terhadap Jumlah Penduduk Islam
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Hafidz	Orang	1.696	1.833	2.230	2,613	2.935
2.	Jumlah Penduduk Islam	Jiwa	247.334	258.296	252.233	253.738	258.808
3.	Rasio Hafidz		0,007	0,007	0,009	0,010	0,011

Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

Rasio Buta Aksara Al Qur'an terhadap Jumlah Penduduk Islam Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020 cenderung menurun karena jumlah kelahiran penduduk beragama

islam bertambah sehingga belum seluruhnya terjangkau oleh program pemerintah pengaktasan buta aksara Al Qur'an. Dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.79
Rasio Buta Aksara Al Qur'an terhadap Jumlah Penduduk Islam
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Buta Aksara Al Qur'an	Orang	51.642	50.127	46.989	46.965	49.595
2.	Jumlah Penduduk Islam	Jiwa	247.334	258.296	252.233	253.738	258.808
3.	Rasio Buta Aksara Al Qur'an		0,21	0,19	0,19	0,19	0,19

Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.4.3.Seni, Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Kualitas hidup manusia yang baik memiliki dampak positif terhadap peningkatan daya saingnya. Kemampuan masyarakat suatu daerah untuk bersaing adalah faktor penting untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera sebagai penggerak roda pembangunan daerahnya.

Pembinaan atlet muda di Kabupaten Sinjai dengan Jumlah atlet pelajar yang meningkat setiap tahun, pada tahun 2019 persentase peningkatannya mencapai 100 %, hal ini disebabkan adanya pemenuhan kuota atlet untuk PORDA Tahun 2018, dan diharapkan untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 420 cabang yang dibina.

Dari data di bawah menunjukkan pada tahun 2017 jumlah cabang olahraga yang berprestasi ada 9 cabang, tahun 2018 berjumlah 15 cabang pad tahun 2017 berjumlah 9 cabang olahraga, prestasi dicapai pada PORDA di Pinrang.Prestasi cabang olahraga mengalami fluktuasi, pada tahun 2015 s.d 2016 tidak ada data lpaoran prestasi cabang olahraga, pada tahun 2018 prestasi cabang olahraga meningkat sekitar 15 cabang dan sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan sejumlah 2 cabang. Dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.80
Cakupan Pembinaan Olahraga
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Cabang	24	24	26	29	33
2	Jumlah atlet pelajar yang dibina	Orang	85	100	403	420	326
3.	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam 1 Tahun	Medali	-	9	15	2	0

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang public maupun jasa public yang menjadi tanggungjawab pemerintah Daerah kabupaten. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada fokus pelayanan Dasar dalam menyusun rancangan awal dokumen.

2.5.1. Aspek Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan uusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib peemrintah daerah

Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan :

2.5.1.1. Bidang Urusan Pendidikan

2.5.1.1.1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Selama periode 2018-2023 capain Angka Partisipasi PAUD cenderung mengalami penurunan walaupun statistik jumlah siswa tetap mengalami kenaikan namun belum seimbang dengan kenaikan pertumbuhan penduduk berdasarkan data pada tabel diatas capaian tahun 2019 mencapai 87,31 persen menurun ditahun 2020 menjadi 82,86 persen dari 14.550 anak usia PAUD yang terlayani baru 14.550 anak. Rendahnya capaian tersebut karena adanya Wabah pandemi Covid 19 sehingga banyak orang tua yang tidak memasukkan anaknya pada PAUD ditahun 2020. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 81
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016 - 2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah siswa pd jenjang TK / RA / Penitipan Anak	Orang	10.978	12.290	12.249	11.539	12.056
2	Jumlah anak usia 4-6 tahun	Orang	11.933	12.755	12.447	13.216	14.550
3	Pendidikan Anak Usia Dini	%	92,79	96,52	97,56	87,31	82,86

Sumber : Dinas Pedidikan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.1.2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sinjai merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2017-2020 pendidikan non formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah., tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.82
Perbandingan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Sinjai,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	ANGKA PARTISIPASI KASAR				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Angka Partisipasi Kasar Kab. Sinjai						
1	SD/MI/Sederajat :	%	108,89	113,98	109,05	109,40	107,70
2	SMP/MTS/Sederajat:	%	89,46	82,08	75,06	77,29	78,77
3	SMA/MA/Sederajat:	%	85,53	83,82	83,75	85,25	84,95
	Angka Partisipasi Kasar Provinsi Sulawesi Selatan						
1	SD/MI/Sederajat :	%	105,71	109,63	110,28	108,46	106,99
2	SMP/MTS/Sederajat:	%	83,38	83,97	86,97	84,22	86,25
3	SMA/MA/Sederajat:	%	83,66	83,14	81,74	86,09	86,44
	Angka Partisipasi Kasar Nasional						
1	SD/MI/Sederajat :	%	109,31	108,50	108,61	107,46	106,32
2	SMP/MTS/Sederajat:	%	90,12	90,23	91,52	90,57	92,06
3	SMA/MA/Sederajat:	%	80,89	82,84	80,68	83,98	84,53

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang

mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK SD/MI Angka Partisipasi Kasar untuk SD menurun dari tahun 2019 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 107,80 persen. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SMP pada tahun 2019 menjadi 107,22 persen pada tahun 2020 APK SMP mengalami kenaikan menjadi 107, 59 persen walaupun terjadi kenaikan pada tahun 2020 namun ada beberapa kendala terkait capaian tersebut yaitu:

1. Tidak adanya data penduduk berdasarkan usia sekolah yang Rill sehingga kadang terjadi beberapa kesalahan dalam pencapaian
2. Lemahnya koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama sehingga data siswa yang bersekolah di bawah naungan Kementrain Agama tidak terlaporkan pada Dinas Pendidikan.
3. Kurangnya anak dari daerah lain yang bersekolah di Kabupaten Sinjai semetara anak dari Kabupaten Sinjai yang bersekolah di daerah lain cenderung meningkat utamanya yang masuk pesantren atau ikut orang tua merantau.

Capaian APK SMA/SMK/MA pada tahun 2016 sebesar 85,53% dan untuk tahun 2017-2020 sudah beralih ke tingkat Provinsi

Tabel 2.83
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI/Sederajat	%	108,89	113,98	115,84	102,19	107,80
2	SMP/MTS/Sederajat	%	89,46	82,08	108,56	107,22	107,59
3	SMA/MA/Sederajat	%	85,53	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.1.3. Angka Pendiidkan yang Ditamatkan

Indikator pendidikan yang menunjukkan dampak dari pembangunan bidang pendidikan adalah pendidikan yang ditamatkan. Pendidikan yang ditamatkan adalah persentase penduduk yang berhasil menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Semakin besar persentase penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan menunjukkan semakin baik sistem pendidikan yang dijalankan. Presentase angka pendidikan yang ditamatkan setiap tahun mengalami perkembangan yang fluktuatif ini dipengaruhi oleh seberapa besar jumlah anak yang berhasil menyelesaikan pendidikan setiap tahunnya. Untuk tahun 2020 sendiri jumlah penduduk yang tamat tingkat SD/MI sebanyak 4.578 anak yang lulus dari 4620 anak yang mengikuti ujian ada 42 anak yang belum lulus, dan berdasarkan data penduduk usia 12 tahun sebanyak 5.040 anak. 420 anak lainnya sudah lebih dulu menempuh pendidikan yang lebih tinggi (SMP/MTs) sehingga presentase hanya mencapai 90,83 persen.

Untuk tingkat SMP/MTs sebanyak 4.356 anak yang lulus dari 4.394 anak yang mengikuti ujian ada 38 anak yang belum lulus, dan berdasarkan data penduduk usia 15 tahun sebanyak 5.286 anak. 892 anak lainnya sudah lebih dulu menempuh pendidikan yang lebih tinggi (SM/MA) sehingga presentase mencapai 82,41 persen. sedangkan untuk pendidikan SMA/MA/Sederajat untuk tahun 2017-2020 sudah beralih ke tingkat Provinsi. Dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.84
Persentase Angka Pendidikan yang Ditamatkan
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI/Sederajat :						
1.1.	Jumlah penduduk yg tamat pada usia 12 tahun	Orang	5.211	4.853	4.498	4.950	4.578
1.2	Jumlah penduduk usia 12 tahun	Orang	5.334	5.208	5.107	5.025	5.040
1.3	Persentase	%	97,69	93,18	88,07	98,51	90,83
2	SMP/MTS/Sederajat:						
2.1	Jumlah penduduk yg tamat pada usia 15 tahun	Orang	4.333	4.627	4.295	4.004	4.356
2.2	Jumlah penduduk usia 15 tahun	Orang	4.452	5.362	5.419	4.111	5.286
2.3	Persentase	%	97,32	86,29	79,25	97,40	82,41
3	SMA/MA/Sederajat:						
3.1	Jumlah penduduk yg tamat pada usia 18 tahun	Orang	3.255	-	-	-	-
3.2	Jumlah penduduk usia 18 tahun	Orang	-	-	-	-	-

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
3.3	Persentase	%	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.1.4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2017, pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C0 turut diperhitungkan . Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari pada APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Pada tahun 2020 SD/MI/ sederajat sebesar 99,36 persen artinya sekitar 99 persen penduduk di Kabuapten Sinjai yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang tersebut. APM SMP/MTs/ sederajat di Kabupaten Sinjai tahun 2020 sebesar 95,20 persen artinya sekitar 95 persen penduduk di Kabupaten Sinjai yang berusia 13-14 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang tersebut. APM SMA/MA/ Sederajat di Kabupaten Sinjai tahun 2020 sebesar 69,43 persen, artinya sekitar 69 persen penduduk di Kabupaten Sinjai yang berusia 16-18 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang tersebut. Dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 2.85
Perbandingan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Sinjai,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	Angka Partisipasi Murni				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Angka Partisipasi Murni Kab. Sinjai						
1	SD/MI/Sederajat :	%	99,50	100	100	100,96	99,36
2	SMP/MTS/Sederajat:	%	78,27	100	99,77	100,97	95,20
3	SMA/MA/Sederajat:	%	68,37	72,62	70,29	69,22	69,43
	Angka Partisipasi Murni Provinsi Sulawesi Selatan						
1	SD/MI/Sederajat :	%	96,99	97,49	98,03	98,06	97,98

NO	INDIKATOR	SATUAN	Angka Partisipasi Murni				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	SMP/MTS/Sederajat:	%	73,67	74,36	75,13	75,82	76,17
3	SMA/MA/Sederajat:	%	59,62	59,86	60,03	60,14	60,32
	Angka Partisipasi Murni Nasional						
1	SD/MI/Sederajat :	%	96,82	97,19	97,58	97,64	97,69
2	SMP/MTS/Sederajat:	%	77,95	78,40	78,84	79,40	80,12
3	SMA/MA/Sederajat:	%	59,95	60,37	60,67	60,84	61,25

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

Angka partisipasi murni (APM) mengukur anak yang bersekolah tepat waktu. Apabila seluruh anak bersekolah tepat waktu maka APM akan mencapai 100 persen. Bahwa realisasi angka partisipasi murni SD/MI pada tahun 2019 sebesar 100,96 persen. APM untuk tahun 2020 capaian SPM menurun dan hanya mencapai 99,36 persen. Hal ini disebabkan adanya anak usia SD/MI yng sudah bersekolah pada jenjang yang lebih tinggi disebabkan usia anak tersebut belum cukup 7 tahun namun sudah terdaftar di SD sehingga mempengaruhi pencapaian APM tingkat Sekolah Dasar.

Peningkatan Angka Partisipasi Murni untuk SMP sederajat pada ditahun 2018 sebesar 99,77 persenmeningkat menjadi 100,97 persen pada tahun 2019. Untuk tahun 2020 kembali mengalami penurunan hingga mencapai 95,20 persen Hal ini karena adanya anak usia SMP yang sudah bersekolahdi jenjang Pendidikan Menengah, banyak anak Usia Sekolah yang semestinya belum masuk ke sekolah namun sudah masuk sekolah serta adanya anak dengan usia transisi sehingga apabila menunggu mereka malah telah terlambat sekolah.Dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.86
Perkembangan Angka Partisipasi Murni
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.4.1	SD/MI/paket A						
1.4.1.1	Jumlah murid usia 7-12 tahun	Orang	29.498	27.350	25.290	27.879	28.358
1.4.1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	Orang	29.498	27.350	25.290	27.615	28.540
1.4.1.3	APM SD/MI/Paket A	%	99,50	100	100	100,96	99,36
1.4.2	SMP/MTS/paket B						
1.4.2.1	Jumlah murid usia 13-15 tahun	Orang	13.508	13.176	14,669	18.811	15.399

NO	JENJANG PENDIDIKAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.4.2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	Orang	13.784	13.176	14.703	18.631	16.176
1.4.2.3	APM SMP/MTS/Paket B	%	78,27	100	99,77	100,97	95,20
1.4.3	SMA / SMK/MA/Paket C						
1.4.3.1	Jumlah murid usia 16-18 taun	Orang	12.405	-	-	-	-
1.4.3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	Orang	16.296	-	-	-	-
1.4.3.3	APM SMA / SMK / MA / Paket C	%	68,37	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pedidikan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.1.5. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Proporsi dari semua anak yang sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Menurunnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) karena adanya data Penduduk Usia 13-15 Tahun yang bersekolah di SMA namun data tidak tersedia karena sudah merupakan kewenangan Provinsi juga adanya Siswa yang bersekolah didaerah lain.Untuk lebih jelas dapat diliat pada table berikut.

Tabel 2.87
Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.5.1	SD/MI						
1.5.1.1	Jumlah Siswa Usia 7-12 tahun	Orang	28.668	27.350	26.264	29.281	28.502
1.5.1.2	Jumlah Penduduk 7-12 Tahun	Orang	32.517	31.155	25.651	27.247	28.540
1.5.1.3	APS SD/MI	%	88,16	87,79	102,39	107,46	99,87
1.5.2	SMP/MTs						
1.5.2.1	Jumlah Siswa Usia 13-15 tahun	Orang	10.218	13.176	14.027	21.764	16.101
1.5.2.2	Jumlah Penduduk 13-15 Tahun	Orang	17.116	17.673	14.018	18.631	16.176
1.5.2.3	APS SMP/MTs	%	59,69	74,54	100,06	116,82	99,54
1.5.3	SMA/MA/SMK						
1.5.3.1	Jumlah Siswa Usia 16-18 Tahun	Orang	9.519	-	-	-	-
1.5.3.2	Jumlah Penduduk 16-18 Tahun	Orang	13.753	-	-	-	-

NO	JENJANG PENDIDIKAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.5.3.3	APS SMP/MTs	%	69,21	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian APS untuk tingkat SD/MI mengalami peningkatan yang fluktuatif atau turun naik pada tahun 2018 telah mencapai 102,39 persen pada tahun 2019 meingkat menjadi 107,46 persen namun ditahun 2020 menurun hingga mencapai 99,87 persen. Untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2018 telah mencapai 100,06 persen pada tahun 2019 meningkat pesat sebesar 116,82 persen dan tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan dan hanya mencapai 99,54 persen hal ini disebabkan karena adanya anak yang bersekolah di bawah umur yang telah ditetapkan sehingga mempengaruhi pencapaian APM sehingga berdampak pada APS hal lain adalah tingginya jumlah siswa yang bersekolah di daerah lain sedangkan siswa yang berasal dari daerah lain semakin berkurang, serta ketersediaan data pembanding yang tidak relevan dimana pada tahun 2019 memakai data penduduk hasil proyeksi statistic namun pada tahun 2020 data tersebut sudah diperoleh langsung dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.5.1.1.6 . *Angka Putus Sekolah*

Angka Putus Sekolah adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah anak yang sudah tidak bersekolah atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Persentase angka putus sekolah untuk SD sederajat cenderung mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 0,02 persen di bandingkan pada tahun 2019 sebesar 0,36 persen, untuk tingkat SMP sederajat pada tahun 2020 mengalami penurunan di banding pada tahun 2019.Pada tahun 2019 mencapai 2,08 persen sedangkan pada tahun 2020 Angka Putus Sekolah SMP Sederajat sederajat mencapai 0,23 persen sedangkan tingkat SMA sederajat pada tahun 2017– 2020 sudah dialihkan ke Makassar. Hal ini terjadi penurunan angka putus sekolah karena kesadaran masyarakat untuk menuntaskan pendidikan dasar semakin tinggi dan dengan adanya program-program pemerintah yang memberikan banyak peluang kepada masyarakat utamanya masyarakat tidak mampu untuk tetap bersekolah, program-program tersebut diantaranya perogram pendidikan dasar, program pembebasan biaya pendidikan dan Biaya Opersional Sekolah. Dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.88

Angka Putus Sekolah
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.6.1	SD/MI						
1.6.1.1	Jumlah capaian kinerja APS SD/MI se kab.	Orang	32.258	31.176	25.290	29.297	27.845
1.6.1.2	Jumlah seluruh APS SD/MI se Kab.	Orang	6	4	4	106	6
1.6.1.3	APS SD/MI	%	0,02	0,02	0,01	0,36	0,02
1.6.2	SMP/MTs						
1.6.2.1	Jumlah capaian kinerja APS SMP/MTs se kab.	Orang	15.447	15.119	12.837	15.961	15.961
1.6.2.2	Jumlah seluruh APS SMP/MTs se Kab.	Orang	31	11	13	460	36
1.6.2.3	APS SMP/MTs	%	0,20	0,07	0,09	2,08	0,23
1.6.3	SMA/MA/SMK						
1.6.3.1	Jumlah capaian kinerja APS SMA/SMK/MA se kab.	Orang	12.400	-	-	-	-
1.6.3.2	Jumlah seluruh APS SMA/SMK/MA se Kab.	Orang	60	-	-	-	-
1.6.3.3	APS SMA/SMK/MA	%	0,48	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.1.7. Angka Kelulusan

Tingkat kelulusan adalah jumlah lulusan pada setiap jenjang pendidikan dibandingkan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada setiap jenjang pendidikan tahun sebelumnya. Untuk Kabupaten Sinjai, angka kelulusan di tiap jenjang pendidikan mengalami perkembangan yang fluktuatif dan berbeda-beda.

Angka Kelulusan adalah perbandingan antara jumlah siswa yang menamatkan pendidikan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan tertentu. Angka kelulusan dari tahun ketahun cenderung berfluktuasi jumlah lulusan tingkat SD sederajat pada tahun 2019 sebesar 98,51 persen mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 99,14 persen sedang tingkat SMP sederajat pada tahun 2019 sebesar 97,40 persen mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 99,14 persen. Hal ini disebabkan adanya penyederhanaan kurikulum dan adanya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian

Nasional dimana penilaian dan kelulusan ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan standard kompetensi lulusan.

Angka kelulusan tingkat SMA sederajat ditahun 2016 mencapai 99,72 persen dan pada tahun 2017 sampai pada tahun 2020 sudah dialihkan ke Makassar. Dapat dilihat pada table berikut .

Tabel. 2.89
Angka Kelulusan
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.7.1	SD/MI/Paket A						
1.7.1.1	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI	Orang	5.280	5.211	4.853	4.950	4.578
1.7.1.2	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya	Orang	5.293	5.221	4.929	5.025	4.620
1.7.1.3	AK SD/MI/Paket A	%	99,75	99,81	98,36	98,51	99,01
1.7.2	SMP/MTs/Paket B						
1.7.2.1	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs/paket B	Orang	4.360	4.333	4.627	4.004	4.396
1.7.2.2	Jumlah Siswa tingkat tertinggi pd jenjang SMP/Mts/ Paket C pada tahun sebelumnya	Orang	4.405	4.361	4.704	4.111	4.394
1.7.2.3	AK SMP/MTs/PAket B	%	99,16	99,36	98,36	97,40	99,14
1.7.3	SMA/MA/SMK/Paket C						
1.7.3.1	Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C	Orang	3.255	-	-	-	-
1.7.3.2	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMS/ SMK/ MA/Paket C pada tahun sebelumnya	Orang	3.264	-	-	-	-
1.7.3.3.	AK SMA/SMK/MA/ PAKet C	%	99,72	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.1.8. Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan Kabupaten Sinjai berfluktuasi selama dalam kurun waktu tahun 2016-2020. Persentase angka melanjutkan dari SD ke SMP sederajat pada tahun 2019 sebesar 106,80 persen mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 114,91 persen , peningkatan ini disebabkan karena tingginya animo masyarakat akan pentingnya pendidikan dan ditunjang oleh program pemerintah dibidang pendidikan utamanya program pembebasan biaya pendidikan dan dana BOS sehingga siswa bersemangat untuk melanjutkan pendidikan hingga ada beberapa siswa yang berasal dari daerah tetangga yang bersekolah di Kabupaten Sinjai. sedangkan angka

melanjutkan SMP ke SMA tidak ada datanya krn tingkat SMA sudah di alihkan ke Provinsi. Dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.90
Angka Melanjutkan
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Lulusan SD/MI	Orang	5.211	4.498	4.498	4.498	4.950
	Jumlah Siswa Baru SMP/MTs	Orang	5.211	4.390	4.390	4.804	5.688
	PRESENTASE	%	100	97,60	102,46	106,80	114,91
2	Jumlah Lulusan SMP/MTs	Orang	4.333	4.295	4.295	4.295	4.004
	Jumlah Siswa Baru SMA/SMK/MA	Orang	4.563	-	-	4.635	-
	PRESENTASE	%	105,31	-	-	107,92	-
3	Jumlah Lulusan SMA/SMK/MA	Orang		-	-	4.498	-
	Jumlah Siswa Baru PT		DATA TIDAK DI KETAHUI				
	PRESENTASE		DATA TIDAK DI KETAHUI				

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.1.9. Fasilitas Pendidikan

Kualitas pendidikan suatu daerah dapat dinilai dari fasilitas pendidikan yang ada. Proses belajar mengajar akan berlangsung maksimal dan member dampak yang lebih baik dengan jumlah sekolah yang cukup dan kondisi ruang belajar yang memadai. Untuk fasilitas pendidikan di Kabupaten Sinjai,

Salah satu bentuk dukungan kemajuan pendidikan di Kabupaten Sinjai adalah pemenuhan fasilitas pendidikan terutama bangunan sekolah yang layak untuk tahun 2015 presentase gedung sekolah dalam kondisi baik untuk tingkat SD sederajat sebesar 90,49, untuk SMP sederajat sebesar 75,00 dan pada tahun 2019 tingkat SD sederajat mengalami penurunan menjadi 84,50 persen dan SMP sederajat meningkat menjadi 84,75% keadaan ini disebabkan karena keterbatasan dana pemeliharaan fasilitas pendidikan utamanya sekolah yang berada didaerah terpencil, kondisi geografis yang tidak mendukung serta kurangnya data rill mengenai keadaan bangunan sekolah dan sekolah yang berada dibawah naungan Deparemen Agama (DEPAG).Dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.91
Fasilitas Pendidikan Dalam Kondisi Bangunan Baik
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.9.1.	Sekolah Pendidikan SD/MI						
1,9.1.1	Jumlah Kondisi Bangunan Baik	Unit	216	203	167	231	238
1.9.1.2	Jumlah Seluruh Sekolah SD/MI	Orang	242	243	242	273	274
1.9.1.3	Peresentase	%	89,26	83,54	69,01	84,50	86,86
1.9.2.	Sekolah Pendidikan SMP/MTs & SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik						
1.9.2.1	Jumlah Sekolah Pendidikan dalam Kondisi Bangunan Baik	Unit	42	35	26	73	75
1.9.2.2	Jumlah Seluruh Sekolah SMP/MTs & SMA/SMK/MA	Orang	42	42	43	86	87
1.9.2.3	PRESENTASE	%	100	83,33	60,47	84,75	86,21

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.1.10. Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan seluruh sekolah yang ada di suatu daerah untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Semakin tinggi rasio ketersediaan sekolah, maka semakin tinggi pula kemampuan suatu daerah untuk menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakatnya.

Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah tingkat pendidikan dasar adalah perbandingan antara ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah. Dari tabel 2.85 di atas untuk tingkat Pendidikan Dasar ketersediaan sekolah sudah memenuhi kebutuhan dimana tiap satuan pendidikan jumlah siswa untuk setiap ruangan rata-rata sudah tidak lebih dari 32 siswa persekolah hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan rata-rata sekolah SD sederajat dan SMP sederajat sudah menyeluruh di semua desa dan kelurahan di Kabupaten Sinjai. Dapat dilihat pada table berikut .

Tabel 2.92
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI						
1.1	Jumlah Sekolah SD/MI	Unit	274	272	272	273	274
1.2	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun	Orang	31.163	27.350	25.290	27.615	26.589
	Rasio		0,009	0,010	0,011	0,010	0,010
2	SMP/MTS						
2.1	Jumlah Sekolah SMP/MTs	Unit	87	86	86	86	87
2.2	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	Orang	17.116	13.176	12.873	18.631	12.959
2.3	Rasio		0,005	0,007	0,007	0,005	0,007

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.1.11. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio guru/murid adalah indikator yang digunakan dalam mengukur capaian jumlah ideal murid untuk setiap guru guna mewujudkan berlangsungnya proses belajar mengajar yang berkualitas. Rasio Guru per siswa adalah perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa perkembangan data yang berfluktuasi disebabkan ketidakadaan data yang memadai sehingga terjadi perkembangan rasio guru per murid yang tidak konsekuen dari tahun ketahun hal ini terlihat jelas pada tiap tabel yang berbeda dan tidak konsisten baik perkembangan maupun penurunannya hal ini dipengaruhi oleh faktor pendataan yang mana adakalanya jumlah guru yang relatif tinggi karena masuknya data guru honorer serta adanya data guru yang ganda karena mengajar pada beberapa sekolah. Dapat diliat pada table berikut.

Tabel. 2.93
Rasio Guru/Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.1	Jumlah Guru SD / MI	Orang	2.954	1.804	1.642	2.469	2.960
1.2	Jumlah Guru SMP / MTs	Orang	998	679	553	975	1.638
	Jumlah Guru (SD/MI + SMP/MTs)	Orang	3.952	2.483	2.195	3.444	4.598
2.1	Jumlah Murid SD / MI	Orang	28.825	31.176	29.297	27.845	32.042

NO	JENJANG PENDIDIKAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
2.2	Jumlah Murid SMP / MTs	Orang	14.317	15.199	14.703	14.902	16.176
	Jumlah Murid (SD/MI + SMP/MTs)	Orang	43.142	46.375	44.000	42.747	48.218
	Rasio Guru / Murid Jenjang Pendidikan Dasar		0,092	0,054	0,050	0,081	0,095

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.1.12. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun, Perempuan dan Laki-laki

Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun di Kabupaten Sinjai setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Angka melek huruf pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 31,83 persen di bandingkan pada tahun 2018 sebesar 41,56 persen . Hal ini disebabkan karena penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus.

Tabel 2.94
Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Perempuan & Laki-laki
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Banyaknya penduduk usia 15-24 tahun	Orang	141.608	182.327	163.484	49.639	37.271
2	Jumlah Penduduk Usia 16-19 Tahun yg melek huruf	Orang	141.608	182.327	169.211	20.633	19.657
3	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Perempuan & Laki-laki	%	100	100	96,62	41,56	31,83

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.1.13. Penduduk yang Berusia 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)

Persentase penduduk usia 15 tahun keatas di Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,99di bandingkan dengan tahun 2019 sebesar 0,98. Hal ini disebabkan penduduk usia 15 tahun keatas yang belum bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari semakin meningkat seiring dengan tingginya animo masyarakat dalam memotivasi diri untuk belajar baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Angka melek

huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus. Dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.95
Penduduk yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara)
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk yang melek huruf usia 15 ke atas	Orang	141.608	182.327	154.172	167.616	199.717
2	Jumlah seluruh penduduk yang berusia > 15 thn	Orang	141.608	182.327	159.899	170.145	201.194
3	Penduduk yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara)	%	100	100	96,42	98,51	99,27

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.1.14. Guru yang Memenuhi Kualitas S1 / D-IV

Guru yang memenuhi kualitas S1 / D-IV di Kabupaten Sinjai tiap tahun sangat beragam dan rata-rata masih di bawah standar yang telah ditentukan. Banyak guru yang belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan dan belum mempunyai kompetensi yang telah disyaratkan.

Tujuan sertifikasi adalah untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional; meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan; meningkatkan martabat guru; dan meningkatkan profesionalisme guru. Untuk tujuan yang terakhir ini guru dituntut agar dapat melaksanakan

Berdasarkan data pada tabel jumlah guru yang memiliki kualifikasi pendidikan SD/MI semakin meningkat pada tahun 2020 sebanyak 2.375 guru di bandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 2.960 guru sedangkan jumlah guru pendidikan SD/MI pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 2.960 guru sedangkan persentase guru yang memiliki kualifikasi S1/D-IV sebesar 92,40 persen. Untuk jumlah guru yang memiliki kualifikasi pendidikan SMP/MTs semakin meningkat pada tahun 2020 sebanyak 1.534 guru di bandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 949 guru sedangkan jumlah guru pendidikan SMP/MTs pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 1.638 guru. hal ini karena adanya beberapa program pemerintah diantaranya pemberian bantuan kepada Mahasiswa Berprestasi, dan adanya sertifikasi pendidik

yang sudah memenuhi kualifikasi pendidikan berdasarkan mata pelajaran yang ampuh sehingga mengharuskan pendidik untuk terus mengembangkan diri walau demikian standar mutu pendidikan masih tergolong rendah dengan belum tercapainya rerata ujian nasional yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Tabel 2.96
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI						
1.1	Jumlah Guru Kualifikasi S1/D4	Orang	1.784	1798	1634	2.307	2.375
1.2	Jumlah Guru	Orang	1.808	1804	1642	2.469	2.960
1.3	Persentase	%	0,99	1,00	1,00	0,93	0,80
2	SMP/MTs						
2.1	Jumlah Guru Kualifikasi S1/D4	Orang	759	679	553	949	1.534
2.2	Jumlah Guru	Orang	759	679	553	975	1.638
2.3	Persentase	%	1,00	1,00	1,00	0,97	0,94

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

2.5.1.2.1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi mengalami kenaikan hal ini menunjukkan program pelayanan bayi belum berhasil dalam pelaksanaannya hal ini dipengaruhi oleh keluarga atau masyarakat belum mengetahui tanda bahaya pada bayi sakit dan risiko tingi Sehingga masyarakat tidak segera mengunjungi fasilitas kesehatan jika tanda bahaya sudah ada. Dapat dilihat pada table berikut .

Tabel. 2.97
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Neonatal (berumur kurang 1 tahun)	Bayi	77	71	69	14	55
2	Jumlah Kelahiran Hidup	Bayi	4.092	4.047	4.072	4.239	4.326
3	Angka Kematian bayi per 1000 Kelahiran Hidup	Bayi/1000 Kelahiran Hidup	18,82	17,54	16,94	3,30	12,71

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi di Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan program pelayanan bayi berhasil dalam pelaksanaannya karena angka kematian bayi mengalami penurunan hal ini dipengaruhi oleh keluarga atau masyarakat sudah mengetahui tanda bahaya pada bayi sakit dan resiko tinggi Sehingga masyarakat sudah mengunjungi fasilitas kesehatan jika tanda bahaya sudah ada. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.2.98
Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO.	TAHUN	SATUAN	Jumlah Kelahiran Hidup	AKHB
1	2016	Bayi	4.032	981
2	2017	Bayi	4.047	982
3	2018	Bayi	4.072	983
4	2019	Bayi	4239	997
5	2020	Bayi	4326	983

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.3. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

Jumlah Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan program pelayanan balita berhasil dalam pelaksanaannya hal ini dipengaruhi oleh keluarga atau masyarakat sudah aktif mengikuti kegiatan posyandu bulanan dan sudah mengetahui tanda bahaya pada balita sakit dan resiko tinggi Sehingga masyarakat sudah mengunjungi fasilitas kesehatan jika tanda bahaya sudah ada. Dapat dilihat pada table berikut .

Tabel. 2.99
Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kematian balita (berumur kurang 5 tahun)	Balita	231	85	11	71	90
2	Jumlah Kelahiran Hidup	Balita	4.092	4.047	4.072	4.239	4.326
3	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	Balita/1000 Kelahiran Hidup	56,45	21,00	2,70	16,75	20,80

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.4. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Jumlah kematian Neonatal (Bayi berumur kurang dari 28 Hari) Kabupaten Sinjai cenderung berfluktuasi dimana pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi karena tingginya kasus bayi baru lahir rendah dan aspyksia. Dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.100
Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kematian Neonatal (berumur kurang 1 tahun)	Bayi	19	5	5	3,3	3,7
2	Jumlah Kelahiran Hidup	Bayi	4.092	4.047	4.072	4.239	4.326
3	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	Bayi/1000 Kelahiran Hidup	4,64	1,23	1,24	0,78	0,86

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.5. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu per 100.000 pada kelahiran hidup di Kabupaten Sinjai setiap tahunnya cenderung berfluktuasi dimana tahun 2020 mengalami penurunan, Hal ini di pengaruhi hipertensi dalam kehamilan, Infeksi dan penyebab lainnya tidak spesifik. Dapat dilihat pada table berikut.

Tabel. 2.101
Angka Kematian Ibu Per 1000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	Ibu Hamil	12	6	12	7	4
2	Jumlah Kelahiran Hidup di wilayah tersebut & pada kurun waktu yang sama	Ibu Hamil	4.092	4.047	4.072	4.239	4.326
3	Angka Kematian Ibu per 1000 Kelahiran Hidup	Ibu Hamil/1000 Kelahiran Hidup	4,64	1,23	1,24	0,78	0,86

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.6. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Rasio posyandu per satuan balita di Kabupaten Sinjai pada Tahun 2020 mengalami peningkatan dimana jumlah posyandu sebanyak 359 sedangkan jumlah balita berkurang sebanyak 17.664 balita di bandingkan dengantahun 2019. Hal ini disebabkan karena satu posyandu masih melayani 49 balita setiap bulan. Dapat dilihat pada table berikut.

Tabel. 2.102
Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Kabupaten SinjaiTahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Posyandu	Unit	338	338	334	352	359
2	Jumlah Balita	Balita	18.779	18.176	32.057	32.032	17.664
3	Rasio posyandu per Satuan Balita	Posyandu / Balita	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.7. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu mengalami peningkatan pada tahun 2020. hal ini berarti 1 Puskesmas melayani 16.792 Jiwa,1 Poliklinik Melayani 44.780 dan 1 pustu melayani 4.334 Jiwa. Dari data tersebut menunjukkan bahwa rasio puskesmas, poliklinik dan pustu masih berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Sehingga belum memungkinkan untuk menambah puskesmas dan pustu karena masyarakat yang berkunjung tidak dalam waktu yang bersamaan. Dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.103
Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas	Unit	16	16	16	16	16
	Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk	Puskesmas / penduduk	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
2	Jumlah Poliklinik	Unit	127	93	93	6	6
	Rasio Poliklinik per Satuan Penduduk	Poliklinik / penduduk	0,53	0,37	0,37	0,02	0,02
3	Jumlah Pustu	Unit	62	62	62	62	62
	Rasio Pustu per Satuan Penduduk	Pustu / Penduduk	0,25	0,25	0,24	0,23	0,23
4	Jumlah Penduduk	Jiwa	239.689	252.627	260.019	265.927	268.678

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.8. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Berdasarkan Peraturan Kemenkumham Nomor 34 tahun 2016 dimana rasio dokter per satuan penduduk adalah 1 : 2500. Sesuai dengan kondisi Rasio Dokter Kabupaten Sinjai Tahun 2020 adalah 1 orang dokter melayani 7.142 pasien setiap tahunnya, sehingga antara jumlah dokter yang di butuhkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sinjai masih kekurangan 71 dokter untuk melayani penduduk. Hal ini memungkinkan untuk menambah jumlah dokter dan sudah ditindak lanjuti dengan pengusulan tenaga Dokter Nusantara Sehat dan Dokter Kontrak. Dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel. 2.104
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Dokter	Orang	38	60	32	42	37
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	239.689	252,627	260.019	265.927	268.678
3	Rasio Dokter		0,16	0,24	0,12	0,16	0,14

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.9. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis persatuan penduduk Kabupaten Sinjai tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun telah dimbangi dengan pertambahan Jumlah tenaga kesehatan secara signifikan, namun demikian distribusi tenaga kesehatan belum merata ke seluruh wilayah Kecamatan, akan tetapi masih terpusat untuk wilayah daerah perkotaan. Dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.105
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlahtenaga kesehatan	Orang	916	597	597	646	635
2	Jumlah Penduduk	Jiwa	239.689	252.627	260.019	265.927	268.678
3	Rasiotenaga medis per satuan penduduk	Tenaga medis / penduduk	0,004	0,002	0,002	0,002	0,002

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.10. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang di Tangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 72,48 persen dengan sebanyak 677 Kasus. Hal ini disebabkan karena komplikasi kebidanan adalah Hipertensi, Infeksi dan Perdarahan. Dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 2.106
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan difenitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Orang	782	1.050	1.050	792	677
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Orang	947	900	904	892	934
3	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	83,58	116,67	116,15	89,79	72,48

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.11. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan Desa/Kelurahan UCI Tahun 2020 Mengalami Penurunan Hal Ini disebabkan oleh adanya wabah /Pandemi Corona Virus Disease 19 sehingga kunjungan bayi keposyandu Menurun dan tidak ada Stok Vaksin IPV Januari sampai dengan Oktober ditingkat Provinsi. Dapat dilihat pada table berikut

Tabel. 2.107
Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)	Desa/Kel.	79	80	80	80	41
2.	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa/Kel.	80	80	80	80	80
3.	Cakupan Desa / Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	98,75	100	100	100	51,25

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.12. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan pada tahun 2020 mengalami penambahan karena kurang optimalnya pelayanan gizi atau intervensi gizi pada balita akibat Pandemi Covid-19. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.108
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Balita	1	3	2	4	5
2.	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	Balita	1	3	2	4	5
3.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.13. Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk

Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk di Kabupaten Sinjai yang dilaporkan mulai dari tahun 2016- 2019 Berfluktuasi. Target Non AFP Polio rate pada penduduk berusia < 15 Tahun, di targetkan $\geq 2/100.000$ Penduduk. bahwa Non polio AFP rate berada dilaporkan pada kisaran 0,007/100.000 penduduk pada tahun 2019sedangkan pada tahun 2020 tidak ada kasus AFP non polio. Dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel. 2.109
Non Polio AFP Rate Per 1000 Penduduk
Kabupaten SinjaiTahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus AFT non polio yang di laporkan	Kasus	2	4	1	4	-
2	Jumlah penduduk < 15 Tahun	Orang	72.062	71.581	71.353	61.527	201.472
3	Non polio AFP rate per 1000 penduduk	%	0,003	0,006	0,001	0,007	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.14. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani di kabupaten sinjai adalah sebanyak 3 Kasus.Rendahnya jumlah kasus menunjukkkan bahwa derajat kesehatan balita meningkat hal ini ditunjukkan dengan pencapaian hanya 0,32 persen dari target. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.110
Cakupan Balita Pnemonia yang ditangani
Kabupaten SinjaiTahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita pnemonia balita yang di tangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun	Orang	9	4	281	-	3
2	Jumlah Perkiraan penderita pheumonia balita di suatu wilayah kerja kurun waktu yang sama	Orang	1.878	1.818	914	3.203	915
3	Cakupan balita pnemonia yang ditangani	%	0,48	0,22	30,7	-	0,32

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.15. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BT

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC dan BTA Kabupaten Sinjai tahun 2020 sejumlah 184 kasus yang ditangani dipuskesmas dan Rumah Sakit sehingga pencapain Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC dan BTA hanya 23,1 Persen karena masih banyak Penderita TBC yang berobat kepraktek swasta dan tidak dilaporkan. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.111
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC dan BTA
Kabupaten SinjaiTahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita TBC BTA yang ditemukan dan diobati	Orang	115	270	279	452	184
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA	Orang	1.058	408	411	3.382	795
3	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC dan BTA	%	10,87	66,18	67,88	13,36	23,14

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.16. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Tingkat prevalensi tuberkulosis Kabupaten Sinjai tahun 2020 jumlah kasus penderita TBC baru dan lama sebanyak 184 Kasus yang ditangani oleh puskesmas dan RS. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.112
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Banyaknya kasus penderita TBC (Baru atau Lama)	Orang	195	436	411	452	184
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Orang	239.689	252.627	260.019	265,927	268.678
3	Tingkatprevalensi tuberkulosis	%	81,36	172,59	158,07	169,97	64,48

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021`

2.5.1.2.17. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Tingkat kematian karena tuberkulosis jumlah kasus kematian karena TB sebanyak 15 Kasus. Hal ini menggambarkan tingkat kematian Karena tuberculosis berdasarkan jumlah penduduk 267.678 sumber data dari Capil sejumlah 6,1terhadap 100.000 Penduduk.

Tabel 2.113
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasien TB yang meninggal	Orang	5	19	11	25	15
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	Orang	239.689	252.627	260.019	265.927	267.678
3	TingkatKematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	Per 100.000 Penduduk	2,09	7,52	4,23	9,40	5,60

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.18. Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi dalam Program DOTS

Proporsi kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Kabupaten Sinjai ada 184 kasus yang ditangani di puskesmas dan Rumah Sakit. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.114
Proporsi Kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam Program DOTS
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	Orang	115	270	279	388	184
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA	Orang	115	270	279	388	184
3	Proporsikasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.19. *Proporsi kasus tuberculosi yang diobati dan sembuh dalam program DOTS*

Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Kabupaten Sinjai. Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh dengan pengobatan DOTS sebanyak 184 Kasus.

Tabel. 2.115
Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh	Kasus	115	270	176	164	184
2	Jumlah pasien TB dan BTA yang sembuh yang diobati	Kasus	115	270	176	164	58
3	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	100	100	100	100	31,52

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.20. *Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD*

Cakupan penemuan dan penanganan penderita Penyakit DBD Kabupaten Sinjai. Jumlah kasus DBD 102 kasus dan jumlah penderita penyakit DBD Yang ditangani sesuai SOP sebanyak 102 Kasus. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.116
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	Orang	4.222	4.386	34	157	102
2	Jumlah penderita DBD	Orang	4.222	4.386	34	157	102
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.21. Angka Kejadian Malaria

Angka kejadian malaria di Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 jumlah penduduk yang menderita malaria yang tertangani sebanyak 14 kasus mengalami penurunan di bandingkan pada tahun 2019 sebanyak 26 kasus. Bahwa angka penyakit Malaria per 100.000 penduduk di kabupaten Sinjai mengalami penurunan dari 9,78/100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 5,21/100.000 penduduk pada Tahun 2020. Dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel. 2.117
Angka Kejadian Malaria
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk yang menderita malaria	Kasus	28	36	34	26	14
2	Jumlah penduduk pada pertengahan tahun	Orang	239.689	252.627	260.019	265.927	268.678
3	Angka kejadian malaria	%	11,68	14,25	13,08	9.78	5,21

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.22. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi

Prevalensi HIV /AIDS dari total Populasi di Kabupaten Sinjai Jumlah Kasus HIV/AIDS yang ditangani pada tahun 2020 sebanyak 20 Kasus. Rasio Pasien HIV &AIDS 0.007 dari Jumlah penduduk 268.678 jiwa. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,007persendi bandingkan pada tahun 2019 menjadi 0,011persen. Sekalipun Nilai prevalensinya kecil namun kejadian Penyakit HIV/AIDS

patut di waspadai. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk kabupaten Sinjai yang memiliki akses yang cukup muda ke ibukota provinsi memiliki resiko yang cukup besar untuk tertular HIV/AIDS.Selain itu ,Meningkatnya jumlah puskesmas yang memiliki layanan Testing HIV juga memberikan kontrbusi terhadap meningkatnya penemuan kasus HIV.Dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel. 2.118
Pravlensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi
di Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasien HIV & AIS+DS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Kasus	26	28	28	29	20
2	Jumlah penduduk disatu wilayah kinerja pada kurun waktu yg sama	Jiwa	239.689	252.627	260.019	265.927	268.678
3	Pravlensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,011	0,011	0,011	0,011	0,007

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.23. *Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yg Memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS*

Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS Kabupaten Sinjai. jumlah penduduk yang memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIV /AIDS sejumlah 3.359 Orang. Penduduk yang jadi sasaran adalah siswa Sekolah Menengah Atas, sehingga upaya deseminasi informasi tentang HIV/AID bagi remaja terus diupayakan. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.119
Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun yang Memiliki
Pengetahuan Komprehensif tentang HIV/AIDS
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS	Orang	22.587	26.915	37.595	3.359	3.359
2	Jumlah penduduk usia HIV/AIDS	Orang	37.645	41.409	37.598	37.452	37.452
3	Proporsi jumlah penduduk Usia 15-24 tahun yang memilikipengetahuan	%	60,00	65,00	99,99	8,97	8,97

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
	komprehensif tentang HIV/AIDS						

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.24. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kabupaten Sinjai sudah mencapai 49,26 persen yang dilayani dari jumlah penduduk miskin secara keseluruhan sejumlah 135.664 Jiwa. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.120
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1	Orang	-	4.288	89.329	10.042	66.826
2	Jumlah seluruh miskin di kabupaten	Orang	-	134.603	135.664	135.664	135.664
3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	-	3,18	65,85	7,40	49,26

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.25. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena kunjungan ulangan bayi dalam memperoleh pelayanan kesehatan kurang maksimal karena adanya pandemi covid-19. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.121
Cakupan Kunjungan Bayi
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan	Bayi	5.037	5.438	3.919	3.987	4.298
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup	Bayi	4.092	4.047	4.037	-	4.326
3	Cakupan kunjungan bayi	%	123,09	134,37	97,08	-	99,35

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.26. Cakupan Puskesmas

Cakupan puskesmas per seluruh kecamatan di Kabupaten Sinjai tahun 2016 – 2020 adalah 177,78persen yang artinya bahwa di Kabupaten Sinjai rata-rata perkecamatan terdapat lebih dari 1 Puskesmas, dimana secara nasional ditargetkan bahwa 1 Kecamatan minimal terdapat 1 Puskesmas.

2.5.1.2.27. Cakupan Puskesmas Pembantu

Cakupan puskesmas pembantu Kabupaten Sinjai mencapai 77,50persen untuk melayani 9 Kecamatan hal ini menggambarkan kalau masyarakat sudah terlayani 77,5 persen dengan jumlah 62 Puskesmas Pembantu. Walaupun cakupannya baru 77,5 persen masyarakat tetap terlayani dengan jumlah 62 Puskesmas Pembantu. Dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel. 2.122
Cakupan Puskesmas Pembantu
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas Pembantu	Unit	62	62	62	62	62
2	JumlahSeluruh Desa	Desa	80	80	80	80	80
3	Cakupan Puskesmas Pembantu	%	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.28. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Jumlah ibu hamil tahun 2020 yang melakukan kunjungan mengalami peningkatan namun demikian cakupan kunjungan Ibu hamil K4 tahun 2020 mengalami penurunandi bandingkan pada tahun 2019. Hal ini di karenakan adanya peningkatan target sasaran ibu hamil pada tahun 2020 yang cukup signifikan, Ibu Hamil dan keluarga sudah memahami dan mengerti tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan pada trimester satu sampai trimester tiga.

Tabel 2.123
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	Ibu Hamil	4.153	4.087	4.077	4.077	4.100
2	Jumlah sasaran ibu hamil	Ibu Hamil	4.734	4.500	4.522	4.522	4.651
3	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	87,75	90,82	90,16	90,16	88,15

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.29. Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan pelayanan nifas di Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 mengalami menurun sebesar 96,47 persen di bandingkan pada tahun 2019 sebesar 99,34 persen. Hal ini disebabkan karena ada ibu nifas yang belum memperoleh Pelayanan Nifas 3 (KF3). Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.124
Cakupan Pelayanan Nifas
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas	Orang	4.060	4.062	4.025	4222	4.296
2	Seluruh ibu nifas di satu wilayah	Orang	4.519	4.285	4.054	4.250	4.458
3	Cakupan pelayanan nifas	%	89,84	94,80	99,88	99,34	96,47

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.30. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yg Ditangani

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani dari tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 55,56 persen dengan absolut 360 kasus dari target 648 kasus neonates komplikasi. Kondisi ini disebabkan oleh salah satunya faktor medik secara langsung yaitu distribusi SDM Kesehatan yang Kompeten untuk penanganan Komplikasi neonatus sudah merata, serta menyangkut sarana dan prasarana yang sudah akurat dalam menangani bayi baru lahir bermasalah. Selain itu masalah kesehatan bayi baru lahir tidak terlepas dari kualitas kesehatan ibu pada masa sebelum dan saat hamil, dimana salah satu aspek yang mempengaruhinya adalah tingkat pengetahuan Ibu dan keluarga untuk penanganan bayi baru yang masih kurang. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.125
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah neonates dengan komplikasi yang tertangani	Kasus	388	400	449	397	360
2	Jumlah seluruh neonates dengan komplikasi yang ada	Kasus	614	607	606	636	648

3	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani	%	63,19	65,90	74,09	62,42	55,56
---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.31. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 44,26 persen di bandingkan pada tahun 2019 sebesar 54,92 persen. Hal ini disebabkan karena menggunakan sasaran Pusdatin .kalau menggunakan data riil sebagai sasaran semua jumlah balita yang ada dikabupaten sinjai sudah dilayani sesuai standard. Dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel. 2.126
Cakupan Pelayanan Anak Balita
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali	Balita	15.971	15.396	18.173	17.593	14.372
2	Jumlah seluruh anak balita	Balita	15.274	18.436	32.057	32.032	32.470
3	Cakupan pelayanan anak balita	%	104,56	84,51	56,69	54,92	44,26

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.32. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pd Anak Usia 6 – 24 Bulan Keluarga Miskin

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak Usia 6-24 bulan keluarga miskin sudah mencapai 100 persen. Pencapaian ini didukung oleh adanya pemberian PMT dari anggaran Dana Alokasi Umum dan Anggaran Dana Desa. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.127
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada
Anak Usia 6 – 24Bulan Keluarga Miskin
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI	Anak	134	280	343	210	216
2	Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Anak	134	280	343	210	216

3	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin	%	100	100	100	100	100
---	--	---	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.33. Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Cakupan penjangkaran siswa SD dan setingkat Kabupaten Sinjai pencapaiannya 33,50persen karena adanya pandemic sehingga murid sekolah dasar mengikuti pembelajaran melalui online yang berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan penjangkaran. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.128
Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	URAIN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Murid setingkat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah Murid	4.176	4.176	3.889	4.069	1.393
2	Jumlah murid SD dan setingkat	Jumlah Murid	5.946	5.946	4.801	4.599	4.158
3	Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	%	70,23	70,23	81,00	88,48	33,50

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.34. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin di sarana kesehatan Strata satu di Kabupaten sinjai mengalami penurunan pada tahun 2020 mencapai sebesar 49,25 persendibandingkan pada tahun 2019 sebesar 88,08 persen. karena tidak semua masrakat miskin dilayani di sarana kesehatan kecuali masyarakat yang sakit. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.129
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1	Orang	76.546	24.288	89.329	119.502	66.826
2	Jumlah seluruh masyarakat miskin	Orang	131.873	134.603	135.664	135.664	135.664
3	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	58,05	18,04	65,85	88,08	49,25

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.2.35. *Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yg Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)*

Cakupan pelayanan gawat darurat Level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Kabupaten Sinjai mencapai 100 persen pelayanan yang diberikan untuk Kategori pelayanan Gadar Level I.

Pelayanan gawat darurat level 1 yang berikan pelayanan kesehatan telah memenuhi standar operasional pelayanan terhadap gawat daruratan hal ini di tandai dengan semakin meningkatnya fasilitas pelayanan gawat daruratan.

2.5.1.2.36. *Cakupan Desa/Kel. Mengalami KLB yg dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam*

Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam dikabupaten sinjai Mencapai 100 % karena hanya satu desa yang mengalami KLB dan dilakukan penyidikan Epidemiologi Kurang dari 24 Jam setelah terjadinya KLB. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.130
Cakupan Desa/Kel. Mengalami KLB yang dilakukan
Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KLB di Desa / Kelurahan yang ditangani >24 jam	Desa/Kel.	22	17	17	11	1
2	Jumlah KLB di Desa/Kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	Desa/Kel.	22	17	17	11	1
3	CakupanDesa/Kel. Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

2.5.1.3.1. *Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik*

Proporsi Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020, dapat diketahui bahwa panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2016 adalah 485,48 Km dari total panjang jalan keseluruhannya 1.256,91 Km atau 38,63 persen. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 0,04 persen, dimana pada tahun 2017 jalan dalam kondisi baik adalah 486,10 Km atau 38,67 persen. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik

sebesar 6,25 persen, dimana pada tahun 2017 jalan dalam kondisi baik adalah 564,57 Km atau 44,92 persen Sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 14,2 persen disebabkan pada tahun 2019 sebagian ruas jalan kabupaten telah mencapai umur jalan, dimana pada tahun 2019 jalan dalam kondisi baik adalah 386,135 Km atau 30,72 persen. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan secara signifikan panjang jalan dalam kondisi baik menjadi 544,38 Km atau 43,31 persen dari seluruh panjang jalan di Kabupaten Sinjai. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.131
Proporsi Jalan Dalam Kondisi Baik
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jalan kondisi baik	Km	485,48	486,10	564,57	386,135	544,38
2	Panjang jalan seluruhnya	Km	1.256,91	1.256,91	1.256,91	1.256,91	1.256,91
3	Proporsi jalan dalam kondisi baik	%	38,63	38,67	44,92	30,72	43,31

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.3.2. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020, dapat diketahui bahwa panjang jalan yang sesuai dengan ruas jalan Kabupaten adalah 1.256,91 Km. Pada tahun 2016, rasio panjang dengan jumlah penduduk Kabupaten Sinjai sebanyak 239.689 adalah 0,0052, sedangkan pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi 0,0049 dengan Jumlah penduduk sebanyak 252.627 orang. Pada tahun 2018 dengan jumlah penduduknya 260.091 orang dengan panjang jalan keseluruhannya 1.256,91 Km sehingga rasio menjadi 0,0047. Sedangkan Pada tahun 2019 rasio turun menjadi 0,0047 diakibatkan pertambahan penduduk menjadi 0,0047. Sedangkan pada tahun 2020 rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk tetap 0,0047 disebabkan pertambahan penduduk sebesar 1,03 persen. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.132
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jalan seluruhnya	Km	1.256,91	1.256,91	1.256,91	1.256,91	1.256,91
2	Jumlah penduduk	Orang	239.689	252.627	260.091	265.927	268.678

3	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Km/ jumlah penduduk	0,0052	0,0049	0,0048	0,0047	0,0047
---	--	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.3.3. Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik

Proporsi jalan dalam kondisi baik Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020, dapat diketahui bahwa panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2016 adalah 485,48 Km dari total panjang jalan keseluruhannya 1.256,91 Km atau 38,63 persen. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 0,04 persen, dimana pada tahun 2017 jalan dalam kondisi baik adalah 486,10 Km atau 38,67 persen. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 6,25 persen, dimana pada tahun 2017 jalan dalam kondisi baik adalah 564,57 Km atau 44,92 persen. Pada tahun 2019 terjadi penurunan panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 14,2 persen disebabkan pada tahun 2019 sebagian ruas jalan kabupaten telah mencapai umur jalan, dimana pada tahun 2019 jalan dalam kondisi baik adalah 386,135 Km atau 30,72 persen. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan secara signifikan panjang jalan dalam kondisi baik menjadi 544,38 Km atau 43,31 persen dari seluruh panjang jalan di Kabupaten Sinjai. Pertambahan ini disebabkan banyak ruas jalan yang ditingkatkan kondisinya sepanjang 132,98 Km.

Tabel 2. 133
Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi Baik
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Km	485,48	486,10	564,57	386,135	544,38
2	Panjang seluruh jalan Kabupaten	Km	1.256,91	1.256,91	1.256,91	1.256,91	1.256,91
3	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	38,63	38,67	44,92	30,72	43,31

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.3.4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi ditahun 2019 sebesar 88,46 persen menjadi 88,50 persen ditahun 2020. Hal ini disebabkan pengalokasian anggaran untuk sanitasi mengalami **recofusing anggaran** akibat Pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada berkurangnya pembangunan/peningkatan akses sanitasi. Untuk tahun 2020, Pengalokasian anggaran untuk Sanitasi bersumber dari dana DAK Penugasan yang difokuskan pada pembangunan tangki septic Skala Komunal (5-10

KK) pada 36 titik yang tersebar di 5 Kecamatan dikabupaten Sinjai,dengan pertimbangan waktu pelaksanaan yang singkat akibat menyebarnya wabah Covid-19. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.134
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	Unit	54.705	59.041	61.594	63.411	63.446
2.	Jumlah rumah tinggal	Unit	44.810	68.017	70.020	71.686	71.688
3.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	82,00	86,80	87,97	88,46	88,50

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.3.5. Sempadan Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar

Berdasarkan RTRW Kabupaten Sinjai terkait dengan pembangunan pada sempadan sungai yang tidak memenuhi ketentuan dan mendapatkan izin diangkap sebagai bangunan liar sepanjang sempadan sungai. Persentase sempadan sungai yang dibangun bangunan liar sejak tahun 2016-2020 di Kabupaten Sinjai tidak mengalami penambahan. Dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 2.135
Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	Km	20	20	20	20	20
2.	Panjang seluruh sempadan sungai	Km	306,8	306,8	306,8	306,8	306,8
3.	Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	%	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.3.6. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidak Tersumbat

Untuk tahun 2020, Persentase drainase dalam kondisi baik mencapai 81,43 persen, masih stagnan pada kondisi tahun sebelumnya meskipun kinerja dalam upaya pemeliharaan rutin yang dilakukan Pemkab bersama aparat lainnya dalam upaya memperlancar pembuangan air/aliran air yang tersumbat masih rutin dilakukan.

Untuk indikator persentase drainase dalam kondisi baik dapat diartikan bahwa semakin menurun persentase semakin berhasil kinerjanya dan sebaliknya semaki

tinggi persentase maka capaian kinerjanya tidak berhasil. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.136
Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air
Tidak Tersumbat Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air	Km	-	5.612	55.354	55.352	55.352
2.	Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten	Km	-	65.574	67.969	67.969	67.969
3.	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik /Pembuangan Aliran Air	%	-	80,56	81,44	81,43	81,43

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.3.7. Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun

Persentase daerah yang tergenang pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tidak mengalami peningkatan yaitu 7,24 persen dengan luas daerah yang tergenang sebesar 212,5 Ha dari daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang seluas 2.936 Ha. Sedangkan pada tahun 2019 luas daerah genangan mengalami penurunan menjadi 141 Ha dengan luas daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang sebesar 2.936 Ha sehingga persentasenya juga berkurang menjadi 4,80 persen dan tidak mengalami peningkatan dan penurunan pada tahun 2020 sesuai dengan data rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.137
Tidak Terjadi Genangan > 2 Kali Setahun
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luasan daerah yang tergenang	Ha	212,5	212,5	212,5	141	141
2.	Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang	Ha	2.936	2.936	2.936	2.936	2.936
3.	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	7,24	7,24	7,24	4,80	4,80

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.3.8. *Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik*

Persentase irigasi dalam kondisi baik dari tahun 2016 sampai tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2016, luas daerah irigasi dalam kondisi baik sebesar 7.949 Ha dari luas total irigasi kabupaten sebesar 12.027 Ha sehingga persentase luas irigasi dalam kondisi baik sebesar 66,09 persen. Kemudian pada tahun 2017, luas irigasi dalam kondisi baik meningkat menjadi 8.309 Ha dari 12.027 Ha luas total irigasi kabupaten sehingga persentasenya pun meningkat menjadi 69,09 persen. Pada tahun 2018, persentase irigasi meningkat menjadi 71,26 persen. Hal ini disebabkan adanya peningkatan luas irigasi dalam kondisi baik menjadi 8.571 Ha dari 12.027 Ha luas total irigasi kabupaten. Selanjutnya pada tahun 2019, persentase irigasi dalam kondisi baik kembali mengalami peningkatan menjadi 72,21 persen dengan luas irigasi dalam kondisi baik menjadi 8.685 Ha dari luas total irigasi kabupaten sebesar 12.027 Ha. Demikian pula halnya dengan tahun 2020, luas irigasi dalam kondisi baik meningkat menjadi 8.7157 Ha dengan luas total irigasi Kabupaten 12.027 Ha. Sehingga persentase irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2020 menjadi 72,81 persen sesuai dengan data indeks kinerja sistem irigasi. Dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 2.138
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas irigasi dalam kondisi baik	Ha	7.949	8.309	8.571	8.685	8.757
2.	Luas irigasi kabupaten	Ha	12.027	12.027	12.027	12.027	12.027
3.	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	66,09	69.09	71,26	72,21	72,81

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.3.9. *Rasio Jaringan Irigasi*

Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020, dapat dikatakan mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2016, rasio jaringan irigasi sebesar 22,32 atau panjang jaringan 226.681 meter dari luas lahan budi daya pertanian sebesar 10.155 Ha. Pada tahun 2017, rasio jaringan irigasi menjadi 23,90 dengan panjang jaringan 235.539 meter dan luas lahan budi daya pertanian sebesar 10.155 Ha. Kemudian, pada tahun 2018 rasio jaringan irigasi menjadi 24,04 dengan luas lahan budi daya pertanian yang tidakmengalami penambahan namun panjang jaringan

meningkat menjadi 241.799 meter. Tahun 2019, luas lahan budi daya pertanian bertambah menjadi 10.205 Ha dan panjang jaringan menjadi 242.227 meter sehingga rasio jaringan irigasi pun ikut meningkat menjadi 23,74. Sama halnya dengan tahun 2019, pada tahun 2020 terjadi penambahan luas lahan budi daya pertanian menjadi 10.383 Ha dan panjang jaringan menjadi 254.929 meter sehingga rasio jaringan irigasi menjadi 24,55. Nilai tersebut sesuai dengan data realisasi tanam dan produktivitas padi dan palawija. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.139
Rasio Jaringan Irigasi
Kabupaten Sinjai Tahun 2016 - 2020

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
Panjang jaringan	Meter	226.681	235.539	241.799	242.227	254.929
Luas lahan budi daya pertanian	Ha	10.155	10.155	10.155	10.205	10.383
Rasiojaringan irigasi	Mater/Ha	22,32	23,90	24,04	23,74	24,55

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.3.10. *Persentase Penduduk Berakses Air Minum*

Persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan terlaksananya pembangunan sistem penyediaan air minum yang berkelanjutan baik dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, maupun yang bersumber dari APBN. Pelaksanaan Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk tahun 2020 dilaksanakan di 3 kecamatan di Kabupaten Sinjai.

Tabel.2.140
Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penduduk berakses air minum	Jiwa	59.520	164.809	186,632	196.951	203.246
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	239.689	252.627	260.019	265.927	268.678
3.	Persentase penduduk berakses air minum	%	24,83	65,23	71,78	74,06	75,65

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.3.11. *Proporsi rumah tangga dgn akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaaan dan pedesaan*

Untuk tahun 2020, proporsi Rumah Tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Keberhasilan ini didukung dengan pengalokasian dana DAK Penugasan bidang Air Minum,serta Dana yang bersumber dari APBN untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang lokasinya ditempatkan di 3 kecamatan dikabupaten Sinjai. Dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.141
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindung dan berkelanjutan	Jiwa	-	-	46.064	53.230	42.879
2.	Jumlah penduduk seluruhnya	Jiwa	-	-	70.626	71.686	56.685
3.	Proporsi rumah terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	%	-	-	65,22	74,25	75,64

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.3.12. Persentase Areal kawasan kumuh

Areal kawasan kumuh Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 mengalami penurunan 100.10 Ha atau 0,12 persen dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 101,90 Ha. Penurunan ini di dukung dengan bantuan dari pusat melalui program “KOTAKU”. Pada tahun 2020 program KOTAKU dialokasikan di Kelurahan Lappa Lingkungan Lengkonge dengan pengurangan selua 1,8 Ha. Dapat dilihat pada table berikut .

Tabel. 2.142
Persentase Areal Kawasan Kumuh Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas kawasan kumuh	Ha	78,41	59,89	114,30	101,90	100,10
2.	Luas wilayah	Ha	81.996	81.996	81.996	81.996	81.996
3.	Persentase areal kawasan kumuh	%	0,10	0,07	0,14	0,12	0,12

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukaan dan Pertanahan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.3.13. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Rasio Pekuburan Umum Per Satuan Penduduk Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020 tidak berbanding lurus antara tempat pemakaman dengan jumlah penduduk. Hal ini di sebabkan tempat pemakaman tidak bertambah setiap tahunnya karena tidak adanya kegiatan penambahan tempat pemakaman pada perangkat daerah terkait.Dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.143
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah daya tampung TPU	Ha	24.727,5	24.743,5	5.324,5	1.424	1.424
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	239.689	252.627	260.019	265.927	268.678
3.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		0,103	0,098	0,020	0,005	0,005

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.3.14. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk Kabupaten Sinjai tahun 2016-2020 tidak mengalami penambahan tempat ibadah. Hal ini di sebabkan tidak adanya pembangunan tempat ibadah. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.144
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah tempat ibadah	Unit	754	754	754	754	754
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	239.689	252.627	260.019	265.927	268.678
3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk		0,003	0,003	0,003	0,003	0,003

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.3.15. Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB

Luas Ruang terbuka Hijau seluruhnya di kawasan perkotaan sinjai seluas 1363,9 Ha didalamnya termasuk (Zona Taman kota, taman rekreasi, taman lingkungan perumahan dan pemukiman, taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;Hutan kota dan bentang alam;Pemakaman umum;Lahan pertanian perkotaan;Jalur di bawah SUTT, sempadan sungai, jalur pengaman jalan, median jalan, dan pedestrian; danZona dan jalur hijau).Sedangkan Luas Wilayah yang ber HPL/HGB

hanya seluas 400,63 Ha (Taman Kota, Hutan Kota, Pemakaman dan Jalur Hijau Jalan) yang telah memiliki sertifikat dan berpotensi untuk tetap dipertahankan. Dapat dilihat pada table berikut.

Tabel. 2.145
Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas ruang terbuka hijau	Ha	-	1.363,9	1.363,9	1.363,9	1.363,9
2.	Luas wilayah ber HPL/HGB	Ha	-	400,63	400,63	400,63	400,63
3.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB		-	3,40	3,40	3,40	3,40

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.3.16. Luasan RTH Public Sebesar 20 % dari Luas Wilayah Kota /Kawasan Perkotaan

Rasio luas RTHpublik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan dari tahun 2016-2020 tidak mengalami perubahan luasan atau tidak terdapat penambahan ruang terbuka hijau pada tahun 2020 sehingga luasan RTH untuk tahun 2017 sama dengan luasan RTH pada tahun 2020. Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan yang mengatur terkait luasan RTH public sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel. 2.146
Luasan RTH Public Sebesar 20 % dari Luas Wilayah Kota/Kawasan
Perkotaan Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luasan RTH public yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM	Ha	33,65	1.372,43	1.372,43	1.372,43	1.372,43
2.	Luasan RTH public yang seharusnya tersedia di wilayah kawasan perkotaan	Ha	20	821,004	821,004	821,004	821,004
3.	Luasan RTH Public sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan	%	168,25	176,16	176,16	176,16	176,16

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.3.17. Rasio Bangunan Ber IMB

Rasio bangunan ber-IMB tahun 2019 adalah 0,75 , untuk tahun 2020 mencapai 0,75 meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun sangat kecil dibanding tahun sebelumnya, hal ini disebabkan faktor kelesuan ekonomi akibat Pandemi Covid-19

Tabel.2.147
Rasio Bangunan Ber IMB
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah bangunan ber IMB	Unit	40.626	41.457	42.300	42.577	42.653
2.	Jumlah bangunan	Unit	54.658	55.489	56.332	56.609	56.685
3.	Rasio bangunan ber IMB		0,74	0,75	0,75	0,75	0,75

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.3.18. Ketaatan terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW yang sesuai dengan peruntukannya berdasarkan jumlah rekomendasi yang masuk sebanyak 12 rencana peruntukan dan rencana peruntukan tersebut telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Sinjai sehingga rasio diperoleh 100 persen.

Tabel. 2.148
Ketaatan terhadap RTRW
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Realisasi RTRW	Rekomondasi	1	1	1	12	12
2.	Rencana peruntukan	Rekomondasi	23	27	23	12	12
3.	Ketaatan terhadap RTRW	%	4,35	3,70	4,35	100	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

2.5.1.4.1. Rasio Rumah Layak Huni

Rasio Rumah Layak Huni merupakan perbandingan rumah layak huni pada kurun waktu tertentu dengan jumlah penduduk pertahunnya.Pencapaian Indikator Kinerja Rasio Rumah Layak Huni tahun 2020 berbanding lurus dengan tahun sebelumnya yaitu 0,18. Pencapaian ini didukung dengan adanya dana bantuan dari pusat baik melalui dana DAK maupun APBN

Tabel. 2. 149
Rasio Rumah layak Huni
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah layak huni	Unit	47.681	49.248	50.070	48.215	48.869
2	Jumlah penduduk	Jiwa	239.689	252.627	260.091	265.930	268.678
3	Rasio rumah layak huni		0,19	0,19	0,19	0,18	0,18

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.4.2. Rasio Permukiman Layak Huni

Luas Permukiman Layak Huni dari tahun 2016-2020 seluas 27.248 Ha atau mencapai 0,47dari luas wilayah permukiman 57.397 Ha. Luas Permukiman Layak huni ini sangat didukung dengan Penataan Kawasan Kumuh. Pencapaian ini berbanding lurus dengan tahun sebelumnya. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.150
Rasio Permukiman Layak Huni
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Pemukiman Layak Huni	Ha	27.226	27.226	27.234	27.247	27.247
2	Luas Wilayah Permukiman	Ha	57.397	57.397	57.397	57.397	57.397
3	Rasio Permukiman Layak Huni		0,47	0,47	0,47	0,47	0,47

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.4.3. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Sinjai sampai pada tahun 2020 mencapai 48.869 unit atau 86,21 persen dari jumlah rumah sekabupaten sinjai 56.685 unit . Capaian ini sangat didukung oleh pemerintah pusat dengan memberikan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah. Jumlah rumah yang ditingkatkan kualitasnya pada tahun 2020 sebanyak 654 unit. Yang tersebar di beberapa lokasi di Kabupaten Sinjai. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.151
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Unit	47.681	49.248	50.070	48.215	48.869
2	Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Unit	54.705	55.536	56.358	55.664	56.685
3	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	87,16	88,68	88,84	86,62	86,21

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.4.4. *Persentase Pemukiman yang Tertata*

Luas area permukiman tertata dari tahun 2016 - 2020 seluas 8.738,80 Ha atau mencapai 15,23 persen dari luas wilayah permukiman 57.397 Ha. Luas area permukiman tertata ini sangat didukung dengan Penataan Kawasan Kumuh. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.152
Persentase Pemukiman yang Tertata
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2017	2019	2020
1	Luas area permukiman tertata	Ha	8.716	8.716	8.724	8.737	8.739,80
2	Luas area permukiman keseluruhan	Ha	57.397	57.397	57.397	57.397	57.397
3	Persentase Pemukiman yang Tertata	%	15,19	15,19	15,20	15,22	15,23

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.4.5. *Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh*

Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh pada tahun 2016-2020 mengalami penurunan penanganan kawasan kumuh sebesar 100,10 Ha atau 0,122 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan kondisi pandemic akibat covid 19 sehingga beberapa program kegiatan yang di rencanakan baik digunakan APBD atau APBN mengalami pengurangan ataupun penghapusan anggaran, sehingga perencanaan penanganan permukiman kumuh dapat tuntas menjadi terlambat. Dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.153
Persentase Lingkungan Permukiman Kumah
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas lingkungan permukiman kumuh	Ha	78,41	59,89	114,30	101,90	100,10
2	Luas wilayah	Ha	81.996	81.996	81.996	81.996	81.996
3	Persentase Lingkungan Permukiman Kumah	%	0,10	0,07	0,139	0,124	0,122

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.4.6. *Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan*

Persentase Luas Permukiman Kumuh yang Tertangani sampai pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 46,70 Ha dibandingkan pada tahun sebelumnya.Hal ini disebabkan adanya program penanganan kumuh perkotaan melalui kegiatan dana alokasi khusus yang dimulai penganggarnya sejak tahun 2018 sampai sekarang.Dapat dilihat pada table berikut.

Tabel. 2.154
Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Luasan permukiman kumuh yang tertangani	Ha	5,66	23,13	31,06	44,99	46,70
2	Luas permukiman kumuh	Ha	78,41	59,89	114,30	101,90	100,10
3	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	%	7,32	38,61	27,17	44,15	46,79

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.4.7. *Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan*

Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu 1,58 persen dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini diakibatkan adanya pertambahan Luas Kawasan Kumuh di daerah pesisir. Di samping itu standar kualitas rumah mengalami peningkatan sehingga menyebabkan penambahan kawasan kumuh perkotaan. Dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.155
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	RT	-	598	448	298	900
2	Jumlah Seluruh Rumah	Unit	-	55.356	55.611	55.664	55.664
3	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	%	-	1,08	0,81	0,54	1,58

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai, Tahun 202

2.5.1.4.8. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) adalah lingkungan hunian dengan batas-batas fisik tertentu baik yang merupakan bagian dari kawasan permukiman maupun kawasan dengan fungsi khusus yang keberadaannya didominasi oleh rumah-rumah dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menyelenggarakan kegiatan penduduk yang tinggal di dalamnya dalam lingkup terbatas dengan penataan sesuai tata ruang dan menjamin kesehatan serta keamanan bagi masyarakat.

Enam kriteria penting yang harus kita penuhi jika ingin membangun lingkungan sehat dan aman dengan dukungan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yaitu jalan, sanitasi, drainase dan pengendalian banjir, persampahan, air minum, dan listrik.

Pada tahun 2016 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) 0,56 persen dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2018 mencapai 5,08 persen , peningkatan ini didukung dengan adanya Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan yang berlokasi di Kecamatan Sinjai Utara, pada tahun 2019 mengalami penurunan hanya mencapai 1,41 persen sampai pada tahun 2020 hanya mencapai 0,28 persen, penurunan ini diakibatkan karena program KOTAKU sebagai penopang capaian hanya menyetuh 1 lingkungan untuk penanganan PSU,dan paling berpengaruh pada capaian ini adalah tidak jelasnya kewenangan penanganan PSU.Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel . 2.156
Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Lingkungan yang didukung PSU pada Kurun waktu tertentu	Lingkungan	2	8	18	5	1
2	Jumlah Lingkungan Perumahan pada kurun waktu tertentu	Lingkungan	354	354	354	354	354
3	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	0,56	2,26	5,08	1,41	0,28

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.5. Bidang Urusan Ketentraman , Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

2.5.1.5.1. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) sejak tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Berdasarkan jumlah kejadian baik yang di laporkan oleh masyarakat maupun yang teridentifikasi oleh satuan polisi pamong praja sebagai penegkan Peraturan Daerah telah melakukan upaya penyelesaian pelanggaran Ketertiban, ketentraman, keindahan. Hal ini di dasarkan pada program dan kegiatan yang dilaksanakan baik yang sifatnya mitigasi maupun penindakan. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.157
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pelanggaran K3 yang disediakan	Kasus	193	350	275	204	179
2.	Jumlah pelanggaran K3 yang di laporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	Kasus	172	271	151	204	179
3.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	112,21	129,15	182,12	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pomong Praja dan Damkar Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.5.2. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten

Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten Sinjai tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan bertambahnya armada pada wilayah terjangkau yang di posisikan pada 3 kecamatan untuk menjangkau pelayanan bencana kebakaran di luar wilayah perkotaan. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.158
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (WMK)	Km ²	29,57	29,57	29,57	29,57	29,57
2.	Luas wilayah Kabupaten	Km ²	819,96	819,96	819,96	819,96	819,96
3.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	%	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73

Sumber : Satuan Polisi Pomong Praja dan Damkar Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.5.3. Tingkat Waktu Tanggap (response Time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran Kabupaten Sinjai pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dalam hal penanganan kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit. Dari data yang di sajikan terlihat bahwa terjadi peningkatatan waktu tanggap kasus kebakaran pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2018. Hal ini di sebabkan jumlah armada yang di siapkan sudah mampu menjangkau 3 Kecamatan untuk menjangkau pelayanan bencana kebakaran di luar wilayah perkotaan. Namun masih belum dapat menjangkau kasus kebakaran yang bersamaan karena ke terbatasan armada dan atau tidak adanya armada setiap kecamatan. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.159
Persentase Tingkat Waktu Tanggap (response Time rate) Daerah
Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Jumlah kasus kebakaran di WMKyg tertangani dalam waktu maksimal 15 Menit	%	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pomong Praja dan Damkar Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.5.4. Persentase Penegakan PERDA

Penegakan PERDA diKabupaten Sinjai Pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan penyelesaian kasus pelanggaran Peraturan Daerah. Hal ini terlihat dari cakupan penegakan PERDA sebesar 100 persen pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan pelibatan aparat PPNS yang terbatas mampu melakukan penegakan PERDA serta kerja sama dengan instansi terkait. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.160
Persentase Penegakan PERDA
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penyelesaian penegakan PERDA	Kasus	193	350	138	18	219
2.	Jumlah Pelanggaran PERDA	Kasus	172	271	138	18	219
3.	Persentase Penegakan PERDA	%	112,21	129,15	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pomong Praja dan Damkar Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.6. Bidang Urusan Sosial

2.5.1.6.1. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Persentase penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan social di Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan pada tahun 2019-2020. Hal ini disebabkan adanya program keluarga harapan (PKH) yang jumlahnya semakin meningkat sehingga menjadi salah satu penyebab angka kemiskinan menurun.

Tabel 2.161
Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	Jiwa	515	575	557	16.273	27.002
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Jiwa	93.147	93.147	93.147	93.147	93.147
3	PersentasePMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	0,55	0,61	0,60	17,47	28,99

Sumber : Dinas Sosial, Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.6.2. *Persentase PMKS yang Tertangani*

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani Kabupaten Sinjai tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Jumlah PMKS yang ditangani pada tahun 2019 sebanyak 16.273 orang dengan persentase 17,47 persen mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebanyak 27.002 orang dengan persentase 28,99 persen. Hal ini disebabkan data jumlah PMKS sudah tertata berdasarkan tingkat kesejahteraannya sehingga program dan kegiatan pemberian bantuan tepat sasaran dan dapat mengintervensi jumlah PMKS yang ada. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.162
Persentase PMKS yang Tertangani
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang ditangani	Orang	515	575	557	16.273	27.002
2	Jumlah PMKS yang ada	Orang	93.147	93.147	93,147	93.147	93.147
3	Persentase PMKS yang Tertangani	%	0,55	0,61	0,60	17,47	28,99

Sumber : Dinas Sosial, Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.6.3. *Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar*

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019 sebesar 99,01 persen mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 98,02 persen. Hal ini disebabkan karena sejak tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial sehingga program kegiatan yang di laksanakan untuk memperoleh bantuan selama dalam 1 tahun selalu meningkat. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.163
Persentase PMKS Skala yang Memperoleh Bantuan
Social Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	Orang	-	4.921	8.485	12.159	17.800
2	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	Orang	-	5.122	9.190	12.280	18.127
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	-	96,08	92,33	99,01	98,20

Sumber : Dinas Sosial, Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.6.4. *Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis lainnya*

Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya di Kabupaten Sinjai pada tahun 2016-2018 mengalami peningkatan namun sejak tahun 2019 mengalami penurunan dan tahun 2020 sudah tidak memprogramkan kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan karena program KUBE sudah tidak ada. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.164
Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE	Orang	435	1.060	1.000	35	-
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menjadi peserta KUBE	Orang	78.675	78.675	78.675	78.675	78.675
3	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	0,55	1,34	1,27	0,04	-

Sumber : Dinas Sosial, Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.6.5. *Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial.*

Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial Kabupaten Sinjai dari tahun 2016-2020 tidak mengalami perubahan karena tidak ada penambahan panti sosial di Kabupaten Sinjai. Hal ini disebabkan pelayanan kesehatan sosial masih lebih banyak ditangani secara mandiri. Dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel. 2.165
Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Unit	13	13	13	13	13

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah panti sosial yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Unit	13	13	13	13	13
3	PersentasePanti Sosial yang Menyediakan SaranaPrasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.1.6.6. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sinjai dan jumlah WKBSM yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tidak ada perubahan. Jumlah WKBSM yang terbentuk di Kabupaten Sinjai hanya 5 berlokasi di Kecamatan Bulupoddo. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.166
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	WKBSM	5	5	5	5	5
2	Jumlah WKBSM yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos skala	WKBSM	5	5	5	5	5
3	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2. Aspek Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar

2.5.2.1. Bidang Urusan Tenaga Kerja

2.5.2.1.1. Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Pencari kerja yang terdaftar pada Tahun 2019 sebanyak 94,14persen sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 97,94 persen. Pencari kerja yang terdaftar sebanyak 243orang mengalami penurunan sebanyak 546orang dari tahun 2019, sedangkan Pencaker yang ditempatkan adalah sebanyak 238orang Penurunan jumlah Pencari kerja yang ditempatkan dan Pencari kerja yang terdaftar dari tahun

2019 disebabkan karena adanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2019 dan adanya Dampak Covid-19. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.167
Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Orang	283	564	393	514	238
2.	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	Orang	408	614	419	546	243
3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	69,36	91,86	93,79	94,14	97,94

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM & Tenaga Kerja, Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.1.2. **Besaran Pekerjaan/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek**

Besaran pekerjaan/buruh yang menjadi peserta program jamsostek mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pesentase besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek dari tahun 2017-2020 Kabupaten Sinjai mengalami kenaikan karena banyaknya perusahaan yang mendaftarkan pekerjaanya untuk menjadi peserta program jamsostek. Pertambahan jumlah pekerja setiap tahunnya diikuti dengan kesadaran pengusaha untuk mendaftarkan pekerjaanya menjadi peserta jamsostek. Dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel. 2.168
Besaran Pekerjaan / Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pekerja / buruh JAMSOSTEK	Orang	1.250	1.657	1.424	4.412	5.586
2.	Jumlah pekerja / buruh	Orang	6.954	10.010	10.310	11.025	11.576
3.	Besaran pekerjaan / buruh yang menjadi peserta program jamsostek	%	17,98	16,55	13,81	79,68	74,36

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM & Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.1.3. **Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi**

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi tahun 2016-2020 jumlahnya fluktuatif, karena pelaksanaan pelatihan, jumlah peserta dan jenis pelatihan keterampilan yang dilaksanakan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Dimana pada tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja yang melaksanakan pelatihan peserta sebanyak 253 orang dengan jumlah pendaftaran

pelatihan peserta sebanyak 201 orang dengan persentase peserta sebanyak 68,97 persen. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.169
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang	16	32	-	48	201
2.	Jumlah pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi	Orang	26	43	-	59	253
3.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen	61,54	74,42	-	81,36	79,45

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM & Tenaga Kerja, Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.1.4. **Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat**

Pelatihan berbasis masyarakat merupakan pelatihan kepada masyarakat agar dapat melakukan kegiatan yang kreatif, berhasil guna dan bermanfaat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan pengalaman kerja bagi masyarakat yang menjadi peserta pelatihan. Pelatihan ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk bisa mensejahterakan masyarakat dengan membekali Pengetahuan yang bisa meningkatkan pendapatan.

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat tahun 2020 sebanyak 32orang atau 2 paket pelatihan, dengan pendaftar sebanyak 48 orang atau 66,67 persen. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.170
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang	26	60	20	16	32
2.	Jumlah pendaftaran pelatihan berbasis masyarakat	Orang	21	98	36	21	48
3.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	76,19	61,22	55,56	76,19	66,67

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM & Tenaga Kerja, Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.1.5. **Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan**

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan di Kabupaten Sinjai tiap tahun mangalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 jumlah

persentase yang mendapat pelatihan kewirausahaan sebanyak 64,00 persen jadi adaPenurunan sebanyak 8,41 persen dari tahun 2019. Dengan jumlah tenaga kerja yang dilatih pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 160 orang di bandingkan pada tahun 2019 sebanyak 328 orang sedangkan jumlah pelatihan kewirausahaan sebanyak 453 orang tahun 2020 sebanyak 250 orang. Hal ini terjadi karena adanya pemotongan anggaran bantuan program pelatihan kewirausahaan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI kepada Pemerintah Kabupaten Sinjai, melalui Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai akibat Dampak Covid-19. Dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.171
Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	Orang	100	160	180	328	160
2.	Jumlah pelatihan kewirausahaan	Orang	138	210	275	453	250
3.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	72,46	76,19	65,45	72,41	64,00

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM & Tenaga Kerja, Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.1.6. Rasio Lulusan S1 / S2 / S3

Rasio kelulusan S1 terhadap jumlah penduduk pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 439,67, sedangkan rasio S2 mengalami peningkatan sebesar 18,61, dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah lulusan S1 dan S2 masih cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Sinjai masih memiliki kesadaran untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.172
Rasio Lulusan S1 / S2 / S3
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Lulusan S1	Orang	3.524	2.931	-	11.250	11.813
	Rasio Lulusan S1		0,014	0,012		0,042	0,044
2.	Jumlah Lulusan S2	Orang	238	296	-	453	500
	Rasio Lulusan S2		0,001	0,001		0,002	0,001
3.	Jumlah Lulusan S3	Orang	2	3	-	12	-

	Rasio Lulusan S3		0,08	0,12		0,45	0
4.	Jumlah Penduduk	Jiwa	239.689	252.627	-	265.927	268.678

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM & Tenaga Kerja, Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

2.5.2.2.1. Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Sinjai pada tahun 2016-2019 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena banyaknya Pekerja perempuan yang lulus menjadi calon pegawai negeri sipil serta banyaknya pelerja perempuan yang menduduki jabatan tertentu lembaga pemerintahan, sementara pada tahun 2020 di lembaga pemerintah menurun di sebabkan beberapa hal yaitu : adanya yang pensiun, pindah keluar daerah dan meninggal dunia. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.173
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja perempuan dilembaga pemerintah	Orang	3.229	3.168	6.757	48.281	4.064
2	Jumlah pekerja perempuan	Orang	7.619	9.608	10.065	90.266	10.413
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	42,38	32,97	67,13	53,48	39,03

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.2.2. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD

Proporsi kursi yang di duduki perempuan di DPRD di Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung sama. Hal ini disebabkan karena kuota perwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif maksimal 30 persen. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.174
Proporsi Kursi yang Diduduki perempuan di DPR
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	Orang	8	8	7	8	8
2	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	Orang	30	30	30	30	30
3	Proporsi Kursi yang Diduduki perempuan di	%	26,67	26,67	23,33	26,67	26,67

	DPR						
--	-----	--	--	--	--	--	--

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.2.3. *Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta*

Partisipasi perempuan di lembaga swasta di Kabupaten Sinjai cenderung fluktuatif dan meningkat sangat drastis pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena banyaknya lembaga swasta yang membuka lapangan kerja yang menhususkan pekerja perempuan. Beberapa peran perempuan di Lembaga Swasta diwujudkan melalui Program Kesetaraan dan Data Gender dengan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu Peningkatan Peran Serta Organisasi Perempuan melalui Pelatihan Kesekretariatan, Pelatihan Publik Speaking, Pelatihan Pengenalan Diri, Pelatihan Prosesing Berbasis Masyarakat, Pembuatan Souvenir, Seminar Pendidikan, Pelatihan Tata Rias Wajah dan Seminar Kesehatan Reproduksi Perempuan. Selain itu dilaksanakan juga kegiatan Temu Organisasi Perempuan dengan beberapa rangkaian acara diantaranya Seminar dengan tema Mendorong Peran Perempuan dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga. Dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel. 2.175
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja perempuan di lembaga swasta	Orang	4.390	12.768	3.308	3.168	6.349
2	Junlah pekerjaperempuan	Orang	7.619	15..635	10.065	9.624	10.413
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	57,61	81,66	32,86	32,91	60,97

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.2.4. *Rasio KDRT*

Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Sinjai pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Hal ini disebabkan ketersediaan informasi terkait kasus KDRT di masyarakat masih sangat kurang sehingga pelayanan terhadap kasus KDRT tersebut masih kurang optimal. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.176
Rasio KDRT
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KDRT	Orang	12	3	5	8	10
2	Jumlah rumah tangga	Orang	64.760	67.688	63094	63.277	63.724
3	RasioKDRT		0,019	0,005	0,008	0.001	0.0012

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.2.5. *Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur*

Jumlah tenaga kerja dibawah umur di Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena usia tersebut merupakan usia sekolah sehingga banyak pekerja di bawah umur yang melanjutkan kejenjang sekolah yang lebih tinggi. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.177
Partisipasi Jumlah Tenaga Kerja di bawah Umur
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja anak usia 5-14 Tahun	Orang	-	-	-	48.281	42.291
2	Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas	Orang	112.970	-	-	90.266	44.202
3	Partisipasi jumlah tenaga kerja di bawah umur	%	-	-	-	53,48	95,67

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.2.6. *Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan*

Partisipasi angkatan Kerja perempuan di Kabupaten Sinjai dari 2020 mengalami mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 terjadi wabah pandemi covid 19 yang menyebabkan jumlah lapangan kerja menurun. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.178
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan	Orang	4.889	5.636	-	48.281	42.291
2	Jumlah angkatan kerja perempuan	Orang	42.857	5.042	-	90.266	44.202
3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	11,41	11,78	-	53,48	95,67

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.2.7. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit Pelayanan terpadu

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 33 orang dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak 40 orang. Hal ini disebabkan karena ketersediaan informasi terkait korban kekerasan perempuan dan anak di masyarakat masih sangat kurang sehingga pelayanan terhadap kasus KDRT tersebut masih kurang optimal. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.179
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan
Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit
Pelayanan Terpadu Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	Pengaduan	42	27	43	40	33
2	Jumlah laporan /pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	Pengaduan	42	27	43	40	33
3	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.2.8. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit pada tahun 2020 tidak ada penindakan karena jumlah kasus yang terdata tidak ada yang memenuhi unsur penindakan. Dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel. 2.180
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan
Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan terlatih di Puskesmas
Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS di suatu wilayah kerja tertentu pada kurung waktu tertentu	Orang	8	8	3	1	0
2	Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan Ke RS di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurung waktu tertentu	Orang	8	8	3	1	0
3	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit	%	100	100	100	100	0

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.2.9. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu pada tahun 2020 tidak ada layanan karena kasus korban kekerasan tidak bersedia untuk mengikuti program pendampingan dari petugas rehabilitasi sosial. Dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel. 2.181
Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan Oleh
Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial	Orang	2	3	1	4	-
2	Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabilitasi sosial	Orang	2	3	1	14	-

3	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100	100	28.57	-
---	---	---	-----	-----	-----	-------	---

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai, Tahun 2021

2.3.2.2.10. **Cakupan Penegakan Hukum dariTingkat Penyidikan sampai denganPutusan Pengadilan atas Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**

Cakupan penegakan hukum dari tingkat sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 mengalami penuruna karena jumlah kasus hukum yang sampai tingkat penyelidikan tidak memenuhi persyaratan. Dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel. 2.182
Cakupan Penegakan Hukum dariTingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengann dasar perundang-undangan yang berkaitan dengankekerasaanterhadappe rempuan dan anak	Kasus	18	10	3	44	3
2	Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan	Kasus	18	10	3	44	3
3	Cakupan Penegakan Hukum dariTingkat Penyidikan Sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.2.11. **Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum**

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yg mendapatkan layanan bantuan hukumdi Kabupaten Sinjai pada tahun 2020mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena kasus perempuan dan anak korban kekerasan banyak di selesaikan secara kekeluargaan dengan memberikan pendampingan secara intensif khususnya bagi yang rentan terjadi kasus kekerasan perempuan dan anak. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.183
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum	Orang	18	10	3	4	3
2	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	Orang	18	10	3	60	37
3	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%	100	100	100	6.66	8,11

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.2.12. Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan fasilitas yang cukup memadai yang dapat dijangkau hingga ke pelosok. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.184
Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan	Pelayanan	3	4	7	1	3
2	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	Orang	42	27	43	60	37
3	Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	7.14	14.81	16.28	1,67	8,11

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.2.13. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban

Cakupan Layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban di Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Hal ini di sebabkan karena partisipasi masyarakat dan khususnya keluarga yang berperan aktif dalam membantu reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.185
Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan
dan Anak Korban Kekerasan
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga pengganti dan masyarakat lainnya	Kasus	-	4	7	1	3
2	Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial	Kasus	-	4	7	1	3
3	CakupanLayanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	%	-	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.2.14. Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SD

Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/ laki-laki di tingkat sekolah dasar (SD) cukup tinggi. Hal ini disebabkan Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian khususnya perempuan. sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.186
Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SD
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	SD Perempuan	%	100,37	98,01	100	100	99,48
2	SD Laki-laki	%	101,01	100,00	100	100	99,31
3	Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SD		0,99	0,98	1,00	1,00	1,00

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.2.15. Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMP

Rasio Angka Partisipasi Murni perempuan/ laki-laki di tingkat sekolah MenengahPertama (SMP) cukup tinggi. Hal ini disebabkan Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian khususnya perempuan. sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.187
Rasio APM Perempuan / Laki-laki di SMP
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	SMP Perempuan	%	102,55	74,45	100	100	95,20
2	SMP Laki-laki	%	93,18	82,38	100	100	95,91
3	RasioAPM Perempuan / Laki-laki di SMP		1,10	0,90	1,00	1,00	0,99

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.3. Bidang Urusan Pangan

2.5.2.3.1. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 mengalami penurunan di bandingkan pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena penurunan produksi komoditas pertanian lebih disebabkan oleh dampak perubahan iklim (DPI) dan intensitas budidaya terutama perawatan tanaman dan adanya efek Pandemi Covid 19 yang secara global mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia di tahun 2020. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.188
Ketersediaan Pangan Utama
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun	Kg	72.192	83.163	67.067,48	62.107,49	60.778,81
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	239.689	252.627	260.019	267.265	268.678
3.	Ketersediaan Pangan Utama	%	30,12	32,92	25,79	23,24	22,62

Sumber : Dinas Ketahanan & Pangan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.3.2 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan tahun 2020 tidak dapat terlaksana sesuai dengan target sehingga terjadi penurunan persentase pada tahun 2020 diakibatkan pelaksanaan kegiatan yang sekiranya akan dilaksanakan pengawasan pangan di 8 komoditi namun untuk tahun 2020 hanya terlaksana 2 komoditi. Yang rencana awal ditargetkan 2 komoditi pangan yang akan diuji keamanan pangannya setiap per triwulan. Namun yang sempat terlaksana hanya triwulan I pada komoditi bawang merah dan kentang, sedangkan triwulan II, III, dan

IV tidak dapat terlaksana karena dana yang disediakan mengalami reconfusin. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.189
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah sampel pangan yang aman di konsumsi	Komoditi	5	5	5	6	2
2.	Jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan	Komoditi	7	8	8	6	2
3.	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	71,43	62,00	62,00	100	100

Sumber : Dinas Ketahanan & Pangan Kaupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.4. Bidang Urusan Pertanahan

2.5.2.4.1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Luas Lahan Bersertifikat sampai pada tahun 2020 seluas 2.867.689 m2 atau 88,43 persen mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pensertifikatan Tanah Pemda pada tahun 2020 sejumlah 75 bidang dengan luas 145.023 m2.

Faktor yang sangat mempengaruhi capaian ini adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan masalah Tanah Milik Pemerintah Daerah yang belum bersertifikat dan adanya dukungan Tim Teknis Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Tabel. 2.190
Persentase Luas Lahan Bersertifikat
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah luas lahan bersertifikat	M2	-	2.551.254	2.575.097	2.722.666	2.867.689
2.	Jumlah luas wilayah	M2	-	3.243.009	3.243.009	3.243.009	3.243.009
3	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	-	78,67	79,40	83,95	88,43

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.4.2. Penyelesaian Izin Lokasi

Penyelesaian Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan perusahaan tersebut untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam rangka kegiatan penanaman modal, dalam kurung waktu tahun 2016-2020 layanan izin lokasi hanya terealisasi pada tahun 2017 berupa pengajuan izin lokasi sebanyak 5 dan telah ditaindak lanjuti.

2.5.2.5. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

2.5.2.5.1. Tersusunnya RPPLH Kabupaten

Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Sinjai sampai dengan tahun 2020 belum tersedia karena Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi acuan belum ditetapkan. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.191
Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten	Ada / Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.5.2. Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten

Belum terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten karena RPPLH Kabupaten Sinjai belum tersedia sampai dengan tahun 2020. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.192
Tersedianya Dokumen RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya Dokumen RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten	Ada / Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.5.3. Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi

Pada Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, telah terintegrasi (1) KLHS RDTR kawasan perkotaan dan penataan zonasi Kabupaten Sinjai (2) KLHS RPJPD Tahun 2005-2025 Kabupaten Sinjai (3) KLHS RPJMD Tahun 2018 – 2023. Karena dokumen KLHS RPJPD dan RPJMD telah tersusun tahun 2018-2020. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.193
Tersedianya Dokumen KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya Dokumen KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi	Ada / Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.5.4. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA)

Hasil pengukuran indeks kualitas air (IKA) Kabupaten Sinjai Pada tahun 2020 Indeks kualitas air (IKA) 83.75 persen menurun dibanding tahun 2019 yaitu 93.13 persen. Hal ini dipengaruhi karena jumlah titik pantau kualitas air cemaran ringan meningkat di tahun 2020. Penyebab meningkatnya titik pantau kualitas air cemaran ringan, perlu kegiatan lebih lanjut yaitu identifikasi sumber-sumber pencemaran lingkungan. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.194
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersediannya Hasil Pengukuran Indeks kualitas udara	%	-	65	86,88	93,13	83,75

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.5.5. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara

Hasil pengukuran indeks kualitas udara Kabupaten Sinjai Pada tahun 2020 Indeks kualitas udara 90,94 persen menurun sebesar 0,03 persen pada tahun 2019 yaitu 90,97 persen. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.195
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas udara	%	-	89,92	90,27	90,97	90,94

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.5.6. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan di Kabupaten Sinjai Tahun 2020 mengacu ke data indeks kualitas tutup lahan yaitu 42.86 persen. Dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 2.196
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Point	38.79	41.51	41.51	42.86	42,86
2.	Tutupan hutan (TH)		0.178	0.20	0.21	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.5.7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pencapaian Indeks kuliatas lingkungan sangat di pengaruhi dari pencapaian Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang telah di lakukan oleh bidang lingkungan hidup sebagai liding sektor urusan lingkungan hidup dan erat kaitannya dengan ketersediaan dan anggaran yang memadai, sumberdaya manusia cukup dan terampil serta di dukung dengan sarana dan prasarana yang baik. Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2020 sebesar 72,46 belum dapat di capai secara optimal. Kurangnya pendanaan untuk merealisasikan jumlah target yang kurangnya sarana dan praasarana menjadi salah satu faktor utama kurang optimalnya pencapaian target nilai indeks kualitas lingkungan hidup. Nilai Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dalam kurun 5 tahun terakhir selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel. 2.197
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		-	-	69,75	72,37	70,08

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.5.8. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha /atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap PPLH, PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten

Total penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dibina pada tahun 2020, sebanyak 14 usaha, menurun dibanding tahun 2019 yaitu 56 usaha. Hal ini disebabkan, karena adanya kebijakan *refocusing* anggaran kegiatan yang berimplikasi pada penurunan target kegiatan pengawasan.

Namun, pada tahun 2020 tingkat ketaatan usaha dan/atau kegiatan meningkat menjadi 28,57persen atau jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat pada tahun 2020 meningkat sebanyak 4 usaha dibanding tahun 2019 tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan atau izin PPLH yaitu 3.57 persen (2 usaha).Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.2.198
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab
usaha /atau Kegiatan yg diawasi Ketaatannya Terhadap PPLH,
PUU LH yg diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dan izin yang diterbitkannya oleh pemerintah daerah	Usaha	105	34	1	2	4
2.	Total penanggungjawab usaha atau kegiatan yang dibina	Usaha	120	36	29	56	14
3.	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab usaha /atau Kegiatan yang diawasi Ketaatannya Terhadap PPLH, PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	%	87,50	94,44	3,45	3.57	28,57

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.5.9. Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Pemberian penghargaan lingkungan hidupdi Kabupaten Sinjai yang terlaksana pada tahun 2019 adalah penghargaan sekolah adiwiyata tingkat Kabupaten sebanyak 5 sekolah sedangkan pada tahun 2020 tidak terlaksana pemberian penghargaan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan adanya kebijakan *refocusing* anggaran kegiatan yang berimplikasi pada penyesuaian target kinerja kegiatan.

Tabel. 2.199
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersediannya Penghargaan Lingkungan Hidup	Ada / Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.5.10.Timbulan Sampah yang Ditangani

Volume timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 yaitu sebesar 75,06 persen meningkatn disbanding kan pada tahun 2019 yaitu 44,98 persen. Meningkatnya prosentase penanganan sampah disebabkan oleh meningkatnya cakupan penanganan sampah di luar area perkotaan. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.200
Timbulan Sampah yang Ditangani
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Volume timbulan sampah yang ditangani	M3	19.245,60	19.512,90	13.395,80	17.465,25	29.446,01
2.	Total timbunan sampah	M3	37.283,73	36.883,54	37.975	38.825,34	39.226,99
3.	Persentase Timbulan Sampah yang Ditangani	%	51.62	52.90	35,29	44,98	75,06

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.5.11.Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R

Jumlah sampah yang terkelola melalui aktivitas pengurangan, pemakaian kembali dan pemanfaatan kembali pada tahun 2020 meningkat disbanding tahun 2019. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.201
Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Volume Sampah yang terkurangi melalui 3 R	M3	-	-	2.765,95	195,68	8.529,44

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
2.	Junlah sampah yang di kelola melalui aktifitas 3 seperti bank sampah, pusat daur ulang dll	M3	-	6.289	2.765,95	195,68	8.529,44
3.	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	%	-	-	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.5.12. Persentase Cakupan Area Pelayanan

Cakupan area pelayanan tahun 2020 sebesar 20,34 persen dari luas wilayah Kabupaten Sinjai, meningkat dibanding tahun 2019 yakni 6,80 persen. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 cakupan pelayanan pengangkutan sampah ditingkatkan. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.202
Persentase Cakupan Area Pelayanan
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas area pelayanan pengelolaan sampah	(Km ² /ha)	11.73	19.45	55.734,30	55.734,30	166,86
2.	Luas area kabupaten	(Km ² /ha)	819.96	819.96	819.960	819.960	819.960
3.	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	1.43	2.37	6,80	6,80	20,34

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.5.13. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani

Jumlah sampah yang tertangan Kabupaten Sinjai pada Tahun 2020 mencapai 75,06 persen mengalami peningkatan dibanding Tahun 2019 sebesar 44,98 persen. Volume timbulan sampah yang tertangani pada tahun 2020 sebanyak 29.446,01 ton meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 17.465,25 ton atau meningkat sebesar 11.980,75 ton. Peningkatan volume timbunan dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan gaya hidup masyarakat. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.203
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah sampah yang tertangani	Ton	19.245,60	19.512,90	13.395,80	17.465,25	29.446,01
2.	Total jumlah timbulan sampah di kabupaten	Ton	37.283,73	36.883,54	37.975	38.825,34	39.226,99
3.	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	51.62	52.90	35,29	44,98	75,06

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.5.14. Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten

Operasionalisasi TPA di Kabupaten Sinjai dalam program Adipura pada Tahun 2019 ≥ 72.

Tabel. 2.204
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya Nilai TPA (Program adipura) Kabupaten	Nilai	71	71,43	≥ 71	≥ 72	≥ 72

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.5.15. Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di Kabupaten Sinjai pada tahun 2016-2020 belum dapat tergambarkan secara umum di karenakan perangkat daerah yang menjadi penanggungjawab belum menghitung emisi gas rumah kaca. Pada tahun 2019 bebrapa perangkat daerah antara lain Dinas Pekerjaan Umun dan Penata Ruang melalui bidang Bina Marga dan Cipta Karya, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perhubungan dan Dinas Perikanan. melaksanakan kegiatan yang fokus pada penurunan emisi gas rumah kaca namun belum dapat tergambarkan penurunan emisi gas rumah kaca.

2.5.2.6. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

2.5.2.6.1. Rasio Penduduk ber KTP Per Satuan Penduduk.

Rasio penduduk ber KTP di Kabupaten Sinjai dalam kurun lima tahun selalu berfluktuasi.Setiap penduduk yang berumur 17 tahun terhitung sejak tanggal kelahirannya wajib memiliki KTP, disamping itu bagi penduduk yang sudah menikah meskipun dibawah umur 17 tahun wajib memiliki KTP. Tingginya rasio capaian penduduk yang ber KTP tidak lepas dari upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dalam melakukan pelayanan langsung perekaman KTP elektonik di setiap Desa/Kecamatan baik dikantor Desa maupun langsung ke rumah warga.

Tabel. 2.205
Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk usia > 17 yang ber KTP	Jiwa	77.900	79.022	176.895	183.258	189.254
2.	Jumlah Penduduk usia 17 atau yang telah menikah	Jiwa	166.435	171.990	179.264	120.426	189.279
3.	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk		0,47	0,46	0,99	1.52	0,99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.6.2. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran di Kabupaten Sinjai setiap tahun mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 sebesar 100 persen mengalami peningkatan di bandingkan dengan pada tahun 2019 sebesar 99,59 persen. hingga tahun 2020 terjadi peningkatan kepemilikan bayi yang memiliki akta kelahiran dan jumlah bayi sebesar 4.844 jiwa. Rasio bayi berakte kelahiran meningkat di sebabkan karena tingginya kesadaran masyarakat yang semakin baik serta adanya inovasi pelayanan One 3 (Tiga berkas jadi dalam sekali pelayanan) dan pelayanan keliling tingkat desa, puskesmas, door to door dan pelayanan tingkat rumah sakit, klinik dan bidan swasta. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.206
Rasio Bayi Berakte Kelahiran
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah bayi berakte kelahiran	Jiwa	89.268	89.268	2.802	2.945	4.844
2.	Jumlah Bayi	Jiwa	90.738	90.738	2.802	2.957	4.844
3.	Rasio Bayi Berakte Kelahiran		0,98	0,98	100	99,59	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.6.3.Rasio Pasangan Berakte Nikah

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 34 mengamanatkan data hasil pencatatan atas peristiwa pelaporan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun kurangnya kesadaran penduduk menyebabkan masih rendahnya jumlah pasangan nikah yang

berakte nikah yang direkam dalam database kependudukan. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.207
Rasio Pasangan Berakte Nikah
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pasangan nikah berakte nikah	Pasangan	4.590	4.713	15.394	21.040	17.193
2.	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Pasangan	56.645	56.775	117.207	120,077	61.836
3.	Rasio Pasangan Berakte Nikah		0,08	0,08	0,13	0,18	0,28

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.6.4. *Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi*

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi di Kabupaten Sinjai mulai tahun 2016-2020 Database kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai telah berskala provinsi. Semua data penduduk dari kabupaten lain ataupun provinsi lain bisa dicek. Semua data online sehingga menghindari adanya nomor NIK yang ganda. Dapat dilihat pada table berikut.

Tabel. 2.208
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ketersediannya data base kependudukan skala Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.6.5.*Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK*

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Kabupaten Sinjai selama tahun 2016-2020 Penerapan Aplikasi SIAK yang sudah sampai ke versi 7 telah berbasis NIK. Semua penduduk punya NIK masing-masing sesuai dengan identitas dari daerah pertama membuat NIK. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.209
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penerapan KTP berbasis NIK	Sudah / Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.6.6.Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk (KTP) Kabupaten Sinjai dalam kurun lima tahun mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2020 mencapai 99,52 persen di bandingkan pada tahun 2019 mencapai 98,76 persen. Hal ini di sebabkan karena tingginya antusias masyarakat dan kesadaran akan pentingnya mendapatkan dokumen kependudukan khususnya KTP tentu saja mempengaruhi tingkat persentase jumlah penduduk yang ber-KTP elektronik, di samping itu KTP sudah menjadi kebutuhan dasar bagi setiap penduduk dan merupakan syarat mendapatkan pelayanan publik. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.210
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	Buah	159.923	167.679	178.655	183.258	189.279
2.	Jumlah Penduduk wajib KTP	Jiwa	175.524	171.990	17.9264	185.,567	190.186
3.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	91,11	97,49	99,66	98,76	99,52

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.6.7.Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran

Akte kelahiran merupakan bukti sah mengenai status kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena akte kelahiran juga merupakan bukti legal hubungan kependataan seoaran anak dengan orang tuanya. Untuk pelayanan terkait penerbitan akte kelahiran semakin di permudah termasuk dengan adanya inovasi pelayanan secara daring dan online.

Cakupan penerbitan akte kelahiranKabupaten Sinjai dalam kurun lima tahun mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2020 mengalami peningkatan mencapai 100 persen di bandingkan pada tahun 2019 mencapai 99,59 persen. Hal ini di sebabkan karena tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya KTP. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana orang tua anak tersebut terdaftar sebagai penduduk paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Dapat dilihat pada tabel di berikut :

Tabel. 2.211
Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk lahir dan memperoleh akte kelahiran di tahun bersangkutan	Jiwa	89.268	89.268	2.802	2.945	4.844
2.	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	Jiwa	90.738	90.738	2.802	2.957	4.844
3.	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	%	98,38	98,38	100	99.59	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.7.Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

2.5.2.7.1. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik di Kabupaten Sinjai dari tahun 2019-2020 tidak ada perubahan. Aktifitas Pemerintahan Desa pada dasarnya berjalan dengan baik walaupun keterbatasan sarana dan prasarana Kantor Desa. Pada Tahun 2019sejumlah 65 Kantor Pemerintahan Desa yang baik dari 67 pemerintah desa atau 97,01 persen. Hal ini disebabkan karena adakah kantor pemerintah desa yang rusak adalah Kantor Desa Arabika dan Kantor Desa Baru. Sedangkan untuk tahun 2020 sejumlah 65 kantor pemerintah desa yang baik dari 67 pemerintah desa atau 97,01 persen. Hal ini disebankan karena adanya Kantor Pemerintahan Desa yang Rusak / rehabilitasi adalah Kantor Desa Biji Nangka dan Kantor Desa Baru. Dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel. 2.212
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kantor Pemerintahan Desa yang Baik	Unit	65	63	63	65	65
2	Jumlah Seluruh Pemerintahan Desa	Desa	67	67	67	67	67
3	CakupanSarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	97,01	94,03	94,03	97,01	97,01

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.7.2 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Jumlah kelompok binaan LPM adalah kelompok masyarakat yang dibina oleh LPM sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sinjai menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2020 jumlah kelompok Binaan LPM di Kabupaten Sinjai yang ada sebanyak 80 Kelompok. Hal ini berarti bahwa pada setiap Desa/Kelurahan memiliki 1 Kelompok Binaan LPM. Dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 2.213
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kelompok Binaan LPM	Lembaga	80	80	80	80	80
2	Jumlah LPM	Lembaga	80	80	80	80	80
3	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LembagaPemberdayaan	Klp	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.7.3.Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Sinjai

Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis.

Rata-rata jumlah kelompok binaan PPK di Kabupaten Sinjai pada Tahun 2018 jumlah PKK 80 (delapan puluh) dari 80 Desa dan Kelurahan se Kabupaten Sinjai dan Jumlah Kelompok Binaan PKK sebanyak 5.208 kelompok atau rata-rata 65,10. Sedangkan untuk tahun 2019 mengalami penambahan menjadi 5.611 Kelompok Binaan atau 70,14 rata-rata kelompok binaan. Dan untuk pada tahun 2020 tidak mengalami perubahan jumlah kelompok binaan PKK yaitu 5.611 kelompok binaan PKK atau rata-rata 70,14 kelompok binaan. Dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 2.214
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	JumlahKelompok Binaan PKK	Klp	3.795	3.795	5.208	5.611	5.611
2	Jumlah PKK	PKK	80	80	80	90	90
3	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Klp	47,44	47,44	65,10	70,14	70,14

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.7.4.Persentase LSM aktif

Persentase LSM aktif di Kabupaten Sinjai pada Tahun 2019-2020 tidak ada perubahan. pada tahun 2019-2020 mengalami mengurangi jumlah LSM aktif sebanyak 9 LSM dan Jumlah LPM sebanyak 80 LPM Desa/Kelurahan.Hal ini disebabkan karena periode Kepengurusan yang belum diperpanjang. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.215
Persentase LSM aktif
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah LSM Aktif	Lembaga	12	15	15	9	9
2.	Jumlah LPM	Lembaga	80	80	80	80	80
3.	PersentaseLSM aktif	%	15,00	18,75	18,75	11,25	11,25

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.7.5. Persentase LPM Berprestasi

LPM Berprestasi dengan asumsi bahwa LPM Desa/Kelurahan yang menjadi Juara I, II dan III Lomba Desa/Kelurahan tingkat Kabupaten. Berdasarkan Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa LPM Berprestasi pada Tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) LPM dari 80 LPM Desa/Kelurahan atau 3,75 Persen.Sedangkan untuk tahun 2019 Jumlah LPM Berprestasi sebanyak 3 (tiga) LPM dari 80 LPM Desa/Kelurahan atau 3,75 Persen.untuk tahun 2020 Jumlah LPM Berprestasi sebanyak 3 (tiga) LPM dari 80 LPM Desa/Kelurahan atau 3,75 Persen. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.216
Persentase LPM Berprestasi
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah LPM Berprestasi	Lembaga	3	3	3	3	3
2	Total LPM	Lembaga	80	80	80	80	80
3	Persentase LPM Berprestasi	%	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.7.6.Persentase PKK Aktif

Jumlah PKK Aktif di Kabupaten Sinjai pada tahun 2016-2020 tidak mengalami perubahan. Karena untuk menghitung Jumlah PKK maka dihitung dari jumlah tim penggerak PKK dalam lingkup wilayah pemerintah daerah. Jumlah PKK sebanyak 90 PKK terdiri dari PKK Kabupaten, 9 PKK Kecamatan dan 80 PKK Desa/Kelurahan. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.217
Persentase PKK Aktif
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PKK Aktif	PKK	80	80	80	90	90
2	Total PKK	PKK	80	80	80	90	90
3	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.7.7. Persentase Posyandu Aktif

Persentase posyandu aktif di Kabupaten Sinjai dari tahun 2016-2020 tidak mengalami perubahan. Jumlah Posyandu Tahun 2018 sebanyak 337 Unit Posyandu dengan Jumlah Posyandu Aktif sebanyak 337 Unit atau 100 persen. Dan untuk tahun 2019 bertambah menjadi 352 Posyandu dengan Jumlah Posyandu Aktif sebanyak 352 Unit atau 100 persen.Untuk tahun 2020 Jumlah Posyandu Aktif tetap sebanyak 352 Unit Posyandu dengan Jumlah Posyandu Aktif sebanyak 352 Unit atau 100 persen. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.218
Persentase Posyandu Aktif
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Total Posyandu	Unit	331	336	337	352	352
2	Jumlah Posyandu Aktif	Unit	331	336	337	352	352
3	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.7.8. *Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat*

Jumlah swadaya masyarakat menurun dari 29,55 persen pada tahun 2019 menjadi 1,76 persen pada tahun 2020. Ha; ini disebabkan karena adanya wabah Pandemi Covid-19 dan jumlah kegiatan fisik di Desa berkurang.

Tabel 2.219
Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Program pemberdayaan masyarakat	Rupiah	43.157.452.992,32	49.584.305.000	51.752.401.000	51.937.206.000	54.001.000.000
2	Swadaya masyarakat	Rupiah	888.896.078.000	1.281.478.000.000	1.299.593.137.966	1.535.000.000.000	95.253.683.000
3	Persentase	%	20,60	25,84	25,11	29,55	1,76

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.8. *Bidang Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana*

2.5.2.8.1. *Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB*

Persentase perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB di Kabupaten Sinjai, dimana pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 80,95 persen dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 59,52 persen. Pada tahun 2019 sebanyak 25 kampung KB mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebanyak 34 kampung KB. Hal ini disebabkan karena partisipasi perangkat daerah terlibat di kampung KB disebabkan karena adanya program yang sasarannya ke kampung KB dan terjadinya komunikasi dengan baik kepada instansi terkait.

Tabel 2.220
Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif
Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB	Perangkat Daerah	42	20	25	25	34
2	Jumlah semua perangkat daerah	Perangkat Daerah	42	42	42	42	42
3	Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%	100	47,62	59,52	59,52	80,95

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab.Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.8.2. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB di Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan Rasio 74,23 persen dibandingkan pada tahun 2019 mencapai 74,21 persen. Hal ini disebabkan karena adanya kesadaran masyarakat khususnya pasangan usia subur dan pentingnya mengatur jarak kehamilan.

Peningkatan akseptor di Pelayanan KB Pasca persalinan peningkatan partisipasi KB pria dan pelayanan MKJP di Fasilitas Kesehatan.peningkatan ber KB di Kelompok Ketahanan Keluarga (BKL.BKB.BKR).

Tabel. 2.221
Rasio Akseptor KB
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Akseptor KB	Akseptor	30.128	28.148	28.546	29.793	30.593
2	Jumlah Pasangan usia Subur	PUS	38.747	38.317	38.904	40.146	41.213
3	Rasio Akseptor KB	%	77,76	73,46	73,38	74,21	74,23

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab.Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.8.3. Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 tahun

Persentase angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun di Kabupaten Sinjai pada tahun 2017-2020 mengalami peningkatan. Jumlah peserta KB aktif tertinggi pada tahun 2019 sebanyak 29.793 dengan jumlah pasangan usia subur sebanyak 40.146 mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebanyak 30.593 dengan jumlah pasangan usia subur sebanyak 41.213 pus

Peningkatan Pelayanan KB Aktif ditingkatkan menjadi peserta KB MKJP. Dukungan ketersediaan alokon MKJP penguatan advokasi dan penyuluhan program KKBPK tingkat Desa/RT.

Tabel. 2.222
Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR Bagi Perempuan Menikah
Usia 15 – 49 Tahun Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Peserta KB Aktif	Orang	30.128	28.148	28.546	29.793	30.593
2	Jumlah Pasangan Usia Subur	PUS	38.747	38.317	38.904	40.146	41.213
3	Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Tahun	%	77,76	73,46	73.38	74.21	74,23

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.8.4. **Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15 – 19) per 1.000 Perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)**

Persentase angka kelahiran remaja per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun di Kabupaten Sinjai selama tiga tahun mengalami fluktuasi. Dimana ASFR indeks dilaksanakan tahun 2019-2020 tidak ada angka kelahiran remaja. Hal ini disebabkan karena tingginya pengetahuan pemakaian kontrasepsi pada usia pus dan pasangan nikah muda.

Tabel. 2.223
Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15 – 19) Per 1.000 Perempuan
usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19	Orang	3.810	3.810	6.119	-	-
2	Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama	Jiwa	4.382	12.260	12.239	-	-
3	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15 – 19) Per 1.000 Perempuan usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	%	86,95	31,08	50,00	-	-

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.8.5. **Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 Tahun**

Cakupan pasangan usia subur di Kabupaten Sinjai, pada tahun 2020 jumlah pasangan usia subur mengalami peningkatan sebesar 41.213 PUS di bandingkan pada tahun 2019 sebanyak 40.146 PUS. Hal ini di sebabkan oleh rendahnya pengetahuan pemakaian kontrasepsi pada usia pus dan pasangan nikah muda.

Kendala/Masalah : pendekatan sosial dan perilaku hidup sehat yang sistematis.

Rencana Tindak lanjut: advokasi dan pergerakan yang lebih tepat sasaran dan efektif
Tabel. 2.224

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah20 Tahun
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 tahun	PUS	934	950	303	-	-
2	Jumlah pasangan usia subur	PUS	37.489	38.747	38.317	40.146	41.213
3	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah20 tahun	%	2,49	2,45	0,79	-	-

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab.Sinjai,Tahun 2021

2.5.2.8.6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi

Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena angka yang sudah terlayani lebih banyak dibandingkan dengan pasangan uisa subur baru. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.225
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PUS yang ingin ber- KB tetapi tidak terlayani	PUS	-	2.061	9.137	9.047	8.690
2	Jumlah pasangan usia subur	PUS	38.745	38.317	38.904	40.146	41.258
3	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi	%	-	5,38	23,49	22,54	21,06

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab.Sinjai,Tahun 2021

2.5.2.8.7. Persentase Penggunaan Kontrasepei Jangka Panjang (MKJP)

Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2019. Hal ini di sebabkan karena masyarakat sudah memahami manfaat jenis kontrasepsi yang akan dipergunakan serta pelayanan yang semakin meningkat. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2.226
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	Akseptor	5.058	5.021	5.604	6.457	7.351
2	Jumlah akseptor KB	Akseptor	30.128	28.148	28.546	29.793	30.593
3	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	16,78	17,83	19,63	21,67	24,03

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab.Sinjai,Tahun 2021

2.5.2.8.8. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena jumlah pasangan usia subur banyak yang tidak lagi memakai kontrasepsi karena banyak pasangan program kehamilan. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.227
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	PUS	8.617	10.169	10.358	5.225	10.620
2	Jumlah akseptor KB	Akseptor	30.128	28.148	28.546	29.793	30.592
3	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	28,60	36,13	36,29	17,53	34,71

Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab.Sinjai,Tahun 2021

2.5.2.8.9. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB

Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber KB di Kabupaten Sinjai mengalami kenaikan. Hal disebabkan karena program promosi KIY yang didukung oleh dana BOKB semakin baik dan banyak.Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.228
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber KB	Orang	1.865	1.770	1.583	1.499	1.609
2	Jumlah anggota kelompok BKB	Orang	3.238	3.150	3.097	3.168	2,894

3	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	%	57,60	56,19	51,11	47,31	55,60
---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab.Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.8.10. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)

Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) di Kabupaten Sinjai mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena dukungan sosialisasi bina keluarga remaja masih terbatas sehingga kesadaran anggota bina keluarga remaja untuk mengikuti program keluarga berencana masih kurang. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.229
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber – KB	Orang	1.223	1.044	1.095	1.057	905
2	Jumlah anggota kelompok BKR	Orang	2.222	2.013	2.008	1.922	1.972
3	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)	%	55,04	51,86	54,53	54,99	45,89

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab.Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.8.11. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber - KB

Cakupan anggota bina keluarga lansia ber –KB di Kabupaten Sinjai mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena yang menjadi peserta bukan lagi pasangan usia subur. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.230
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber - KB
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Anggota kelompok BKL yang ber-KB	Orang	984	809	802	793	89
2	Jumlah Anggota kelompok BKL	Orang	1.876	1.714	1.656	1.686	1.824
3	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber – KB	%	52,45	47,20	48,43	47,03	4,88

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab.Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.8.12.Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

Persentase pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan di Kabupaten Sinjai sudah terdapat di setiap kecamatan yang biasanya ditempatkan di kantor Kecamatan. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.231
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap Kecamatan
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PPKS	PPKS	-	3	1	1	1
2	Jumlah kecamatan	Kec.	9	9	9	9	9
3	Pusat PelayananKeluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	-	33,33	11,11	11,11	11,11

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab.Sinjai,Tahun 2021

2.5.2.8.13. *Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Kanseling remaja / Mahasiswa*

Jumlah remaja dalam pusat informasi dan kanseling remaja / mahasiswa di Kabupaten Sinjaijumlah pusat informasi dan kanseling remaja / mahasiswa mengalami peningkatan secara signifikan ada tahun 2019-2020 di bandingkan pada tahun 2018 dan tersebar di Sembilan kecamatan. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.232
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi
dan Kanseling remaja/mahasiswa
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PIK R/M	PIK R/M	65	60	57	74	74
2	Jumlah Kecamatan	Kec.	9	9	9	9	9
3	Cakupan remaja dalam pusat informasidan kanseling remaja/mahasiswa	%	7,22	6,67	6,33	8,22	8,22

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab.Sinjai,Tahun 2021

2.5.2.8.14. *Cakupan PKB/PLKB yang di dayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk*

Cakupan PKB/PLKB yang di dayagunakanPerangkat Daerah KB untuk perencanaan & pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk di Kabupaten Sinjai dari tahun 2019mencapai 92,00 persen mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 100 persen.

Tabel. 2.233
Cakupan PKB/PLKB yang di Dayagunakan Perangkat Daerah KBuntuk
Perencanaan &Pelaksanaan Pembangunan Daerahdi Bidang Pengendalian
PendudukKabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PKB dan PLKB yang di dayagunakan	PKB/PLKB	99	74	73	73	89
2	Jumlah PKB / PLKB	PKB/PLKB	99	17	17	17	89
3	CakupanPKB/PLKB yang di dayagunakan Perangkat Daerah KBuntuk Perencana an danPelaksanaan Pembangunan Daerahdi Bidang Pengendalian Penduduk	%	100	91,00	92,00	92,00	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab.Sinjai,Tahun 2021

2.5.2.8.15. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber –KB mandiri

Cakupan pasangan usia subur peserta keluarga berencana anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera yang ber-KB mandiri di Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena sosialisasi dan penyuluhan keluarga berencana semakin baik dan berkembang. Selain itu adanya usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera mendorong pasangan usia subur untuk melakukan KB mandiri. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.234
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan PendapatanKeluarga
Sejahtera (UPPKS) yang ber –KB MandiriKabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	Orang	71	76	166	160	160
2	Jumlah anggota kelompok UPPKS	Orang	290	258	327	302	302
3	CakupanPUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan PendapatanKeluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber KB Mandiri	%	24,48	29,46	50,76	52,98	52,98

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab.Sinjai,Tahun 2021

2.5.2.8.16. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa / Kelurahan

Jumlah petugas pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan (PPKBD) di Kabupaten Sinjai pada tahun 2016-2020 mencapai 100 persen. Ini berarti bahwa setiap desa / kelurahan memiliki 1 orang petugas PPKBD. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.235
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Petugas pembantu Pembina KB Desa	Orang	80	80	80	80	80
2	Jumlah Desa / Kelurahan	Desa/Kel.	80	80	80	80	80
3	RasioPetugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan		1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab.Sinjai, 2021

2.5.2.8.17. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat mengalami penurunan. Hal ini disebabkan untuk menyesuaikan jumlah alat dan obat kontrasepsi dengan permintaan masyarakat. Dapat dilihat sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.236
Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah alat kontrasepsi per mix kontrasepsi yang tersedia di fasilitas kesehatan dan gudang alat kontrasepsi Kab/kota	Alat Kontrasepsi	48.081	53.640	70.593	70.593	44.624
2	Perkiraan Permintaan masyarakat	Alat Kontrasepsi	21.968	27.405	21.513	21.513	30.844
3	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	2,19	1,96	3,28	3,28	3,28

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab.Sinjai,Tahun 2021

2.5.2.8.18. Persentase Fasilitas kesehatan dan Jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarnisasi pelayanan

Jumlah fasilitas kesshatan dan Jejaringannya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dgn BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dgn standarnisasi

pelayanan di Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan sesuai dengan faskes dan jejaringnya.

Tabel. 2.237
Persentase Faskes dan Jejaringannya (diseluruh tingkatan wilayah)
Yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan
KBKR sesuai dengan Atandarnisasi Pelayanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Faskes dn jejaringan yang bekerjasama dengan BPJS	Faskes	21	21	23	23	23
2	Jumlah Fasilitas kes dan Jejaringan	Faskes	21	21	23	23	23
3	Persentase Faskes dan jejaringannya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan atandarnisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab.Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.8.19. Cakupan kelompok kegiatan yg melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga

Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga di Kabupaten Sinjai pada tahun 2016- 2020 mencapai 100 persen sesuai dengan target dan rencana kelompok kegiatan yang dilaksanakan. Dapat diliht pada tabel berikut.

Tabel. 2.238
Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan
Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Klp	312	299	299	299	299
2	Jumlah kelompok kegiatan	Klp	312	299	299	299	299
3	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.8.20. Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga bencana dan pembangunan keluarga melalui APBD & APBDesa

Persentase Data APBD dari BPKAD (dalam Rp) masih perlu dukungan pendanaan dari pemerintah daerah untuk menyukseskan program dan kegiatan KKBPK dalam rangka mengurai masalah jumlah penduduk yang besar. Pemerataan

jumlah penduduk wilayah Kota dan Desa. Pemenuhan sarana sosial kesehatan dan publik.

Tabel. 2.239
Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, keluarga Bencana
dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD & APBDesa
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggaran untuk urusan PPKB (Rp)	Rupiah	7.971.517.131	6.908.732.251	8.073.107.933	-	-
2	Jumlah APBD dan APBDesa	Rp	1.173.641.753.778	1.174.680.037.524.75	1.180.790.501.836.98	982.155.391.359,76	1.197.700.977.458,42
3	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan keluarga Bencanadan Pembangunan Keluarga Melalui APBD & APBDesa	%	0.46	0.67	0.58	0.68	-

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab.Sinjai,Tahun 2021

2.5.2.9. Bidang Urusan Perhubungan

2.5.2.9.1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Sinjai dalam kurun lima tahun mengalami fluktuasi. namun pada tahun 2017-2019 mengalami peningkatan. salah satu yang mempengaruhi adanya peningkatan yaitu adanya bantuan pemerintah berupa bis damri. Untuk jumlah penumpang Bis terjadi penurunan yang signifikan dari tahun 2020 mencapai 75.150 penumpang. Hal ini terjadi karena fasilitas yang sudah ada mulai tidak layak digunakan dan semakin banyaknya kendaraan umum yang berganti menjadi kendaraan pribadi, sehingga penumpang bis banyak yang beralih ke kendaraan pribadi dan dengan adanya pandemi covid 19.

Sedangkan untuk penumpang kapal laut pada tahun 2020 mengalami penurunan karena di perngaruhi adanya wabah pandemi covid 19. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.240
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penumpang bis	Orang	74.622	82.913	91.204	98.501	75.150
2	Jumlah penumpang kapal laut	Orang	187.983	170.894	181.353	117.601	105.150
3	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	262.605	253.807	272.557	216.102	180.300

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.9.2. Rasio Ijin Trayek

Rasio ijin trayek di Kabupaten Sinjai terjadi penurunan pada tahun 2020. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar angkutan umum tidak lagi melakukan perpanjangan ijin trayek melainkan beralih menggunakan plat hitam. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.241
Rasio Ijin Trayek
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	Ijin	804	511	503	268	130
2	Jumlah penduduk	Jiwa	239.689	252.627	255.423	265.927	268.678
3	Rasio Ijin Trayek		0,003	0,002	0,002	0,001	0,005

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.9.3. Persentase Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Persentase Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Sinjai pada Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Uji Kir angkutan umum adalah serangkaian kegiatan menguji dan / atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor yang bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan transportasi umum di Kab. Sinjai, selain itu Uji KIR kendaraan Angkutan Umum juga berperan sebagai pos pendapatan asli daerah, sehingga pelaksanaan kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai dalam menyumbang pendapatan asli daerah di Kab. Sinjai. Persentase jumlah uji KIR angkutan umum Kabupaten Sinjai tahun 2016-2020, Terjadi penurunan jumlah baik itu jumlah mobil penumpang umum, jumlah bus, jumlah mobil barang. Hal ini berdampak pada jumlah uji kir kendaraan yang dilaksanakan. Penurunan jumlah kendaraan pada tahun 2020 sangat signifikan tersebut dipengaruhi oleh pandemi global Covid 19 yang terjadi, meski demikian tidak mengurangi persentase pemenuhan target PAD dan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kab. Sinjai.

Secara umum kegiatan uji KIR angkutan umum pada tahun 2020 mencapai target 100 persen dengan rincian jumlah mobil penumpang umum sebanyak 19 kendaraan yang dilakukan uji KIR ,jumlah mobil bus sebanyak 159 kendaraan yang dilakukan uji KIR, dan jumlah mobil barang sebanyak 1.171 kendaraan yang dilakukan uji KIR. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.242
Persentase Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Mobil penumpang umum:						
	Jumlah	Unit	65	91	69	70	19
	Jumlah KIR	KIR	65	91	69	70	19
	Persentase	%	100	100	100	100	100
2	Mobil bus						
	Jumlah	Unit	648	545	408	423	159
	Jumlah KIR	KIR	648	545	408	423	159
	Persentase	%	100	100	100	100	100
3	Mobil barang						
	Jumlah	Unit	2.137	2.406	2.234	2.329	1.171
	Jumlah Uji KIR	KIR	2.137	2.406	2.234	2.329	1.171
	Persentase	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.9.4. **Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal**

Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal di Kabupaten Sinjai tahun 2016-2020 tidak ada perubahan. Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudra, sungai atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Adapun terminal bis adalah salah satu komponen dari system transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara yang kendaraan umum untuk menaik turunkan penumpang.

Secara umum jumlah pelabuhan laut/darat udara/terminal bis pada tahun 2020 sebanyak 2 untuk pelabuhan laut, 1 unit untuk terminal bis. Adapun bandara udara belum terdapat di Kabupaten Sinjai. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.243
Jumlah Pelabuhan Laut/ Terminal
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pelabuhan laut	Pelabuhan	2	2	2	2	2
2	Jumlah terminal bis	Terminal	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.9.5. *Persentase Layanan Angkutan Darat*

Berdasarkan Persentase Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020 adalah diketahui bahwa pelayanan angkutan darat setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Transportasi darat adalah segala bentuk transportasi menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang. Adapun jumlah angkutan darat dan penumpang angkutan darat. Secara umum jumlah angkutan darat pada tahun 2020 yaitu 1.833 kendaraan adapun jumlah penumpang angkutan darat pada tahun 2020 yaitu 72.150 penumpang. Persentase yang didapat dari data tersebut sebesar 2,54 persen. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.244
Persentase Layanan Angkutan Darat
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Angkutan Darat	Unit	1.667	1.515	1667	1.833	1.833
2	Jumlah Penumpang Angkutan Darat	Penumpang	91.204	82.913	91.204	81.510	72.150
3	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	1,83	1,83	1,83	2,25	2,54

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.9.6. *Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum*

Persentase Kepemilikan KIR pada Angkutan Umum di Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020. Angkutan umum adalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Kabupaten Sinjai tahun 2016-2020. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.245
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Angkutan umum yang tidak memiliki KIR	Unit	-	-	-	-	-
2	Jumlah Angkutan Umum	Unit	713	623	477	493	493
3	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	-	-	-	-	-

Sumber :
Dinas
Perhubungan
Kabupaten
Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.9.7.Pemasangan Rambu-rambu

Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, kalimat dan/ atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.246
Pemasangan Rambu-rambu
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pemasangan rambu-rambu	Titik	-	86	-	-	-
2	Jumlah Rambu-rambu seharusnya tersedia	Titik	890	976	890	890	890
3	Persentase Pemasangan Rambu-rambu	%	-	8,81	-	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.9.8.Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan

Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Sinjai pada Tahun 2016-2020, yaitu bahwa panjang jalan dari tahun 2019-2020 tidak ada peningkatan. Sedangkan jumlah kendaraan tiap tahunnya mengalami peningkatan. sehingga dapat dilihat rasio rata-rata 0,18 persen. Dapat disimpulkan bahwa kenaikan jumlah kendaraan di Kabupaten Sinjai diiringi dengan penyedia panjang jalan yang membuat rasiio tiap tahunnya memiliki rata-rata yang sama. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.247
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Jalan	Km	1.276,20	1.418,00	1.461,00	1.504,00	1.504,00
Jumlah kendaraan	Unit	66.794	74.215	77,926	81.822	83.150
RasioPanjang Jalan Per Jumlah Kendaraan		0,019	0,019	0,019	0,018	0,018

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.9.9. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kabupaten Sinjai pada Tahun 2016-2019 mengalami peningkatan secara signifikan. Adapun hal-hal yang mempengaruhi, yaitu selain alat angkut yang semakin memadai juga akses jalan yang semakin baik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat,

sehingga menimbulkan bangkitan pergerakan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi dengan adanya beberapa faktor :

1. Sebagian besar alat angkutan umum mulai beralih ke angkutan pribadi (plat hitam), sehingga penumpang tidak dapat dideteksi karena tidak melalui alur terminal;
2. Terminal tidak lagi merupakan simpul pergerakan karena penumpang rata-rata terjemput dirumah masing-masing;
3. Adanya Pandemi covid 19

Tabel 2.248
Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Orang	Orang	316.889	9.825.102	1.025.124	1.046.138	867.150
2	Jumlah Barang	Ton	3.168.891	98.251.020	10.251.240	10.984.449	8.150.100

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.9.10. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun

Dermaga adalah tempat kapal ditambatkan di pelabuhan. Adapun terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang/atau barang. Jumlah orang/barang melalui dermaga/terminal per tahun Kabupaten Sinjai. Secara umum jumlah orang yang melalui dermaga pada tahun 2020 adalah 110.150 orang dan jumlah barang sebesar 5.600.150. Adapun jumlah orang yang melalui terminal pada tahun 2020 867.150 orang dan jumlah barang sebesar 8.150.100.

Untuk Jumlah Orang/Barang melalui Bandara tidak ada, dikarenakan di Kabupaten Sinjai belum terdapat Bandara.

Tabel 2.249
Jumlah Orang/Barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun
Kabupaten Sinjai, tahun 2018-2020

NO	INDIKATOR	2018		2019		2020	
		Orang	Barang	Orang	Barang	Orang	Barang
1	Dermaga	181.353	2.720.295	117.601	6.150.190	110.150	5.600.150
2	Terminal	302.485	3.024.850	1.046.138	10.984.449	8.150.150	8.150.100
	Jumlah	483.838	5.745.145	1.163.715	17.134.639	977.300	13.750.250

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.10. Bidang Urusan Komunikasi Dan Informatika

2.5.2.10.1. Cakupan Pengembangann pemberdayaan kelompok informasi di tingkatKecamatan

Cakupan pengembangan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat kecamatan dari tahun 2016 sebesar 65,55 persen mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 90 sedangkan jumlah KIM pada tahun 2016 sebesar 59 mengalami kenaikan pada tahun 2018 sebesar 80. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan untuk saling bertukar gagasan, solusi dan informasi, terutama untuk penyebaran berbagai informasi terkait kebijakan pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga semakin diperbanyaklah jumlah KIM, terutama di pedesaaan yang terpencil dan susah untuk terakses jaringan. Pada tahun 2020 jumlah KIM memang tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2018. Tapi dalam hal ini Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian memaksimalkan dalam pembinaan anggota KIM, dengan tujuan agar KIM yang telah terbentuk lebih memaksimalkan fungsi KIM disetiap kecamatan sampai kelurahan dan desa untuk membantu pemerintah dalam diseminasi informasi program pemerintah.

Tabel 2.250
Cakupan Pengembangann pemberdayaan kelompok informasi
di tingkat kecamatanKabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	SATUAN	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KIM	Klp	59	79	80	80	80
2	Jumlah kecamtan yang ada dalam kabupaten	Kec.	9	9	9	9	9
3	Cakupan Pengembangann pemberdayaan kelompok informasi di tingkat kecamatan	%	65,55	87,78	90	90	90

Sumber : Dinas Komunikasi Informatika, persandiaan dan Statistik Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.10.2.Cakupan Layanan Telekomunikasi

Cakupan Layanan Telekomunikasi pada tahun 2016 sampai tahun 2018 sebesar 92,32 persen. Pada Tahun 2020 terjadi peningkatan diarea luas wilayah yang tercoverage layanan telekomunikasi hal ini dikarenakan adanya penambahan pembangunan menara telekomunikasi diluar daerah yang telah tercoverage layanan telekomunikasi, untuk memenuhi kebutuhan layanan telekomunikasi diwilayah yang padat pengguna. Ini didasari pada penambahan jumlah menara pada tahun 2019 sejumlah 67 menara dan meningkat sebesar 74 menara pada tahun 2020. Untuk tahun 2020, mengalami penambahan luas wilayah yang tecoverage dari 762 menjadi 764, karena pembangunan menara baru sebagian dipusatkan pada wilayah blankspot di

kabupaten Sinjai, seperti beberapa wilayah di kecamatan Sinjai Tengah dan kecamatan Tellulimpoe dan Kecamatan Bulupoddo. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.251
Cakupan Layanan Telekomunikasi
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Wilayah yang tercoverage	Km ²	757	757	757	762	764
2.	Luas wilayah Kab. Sinjai	Km ²	819,96	819,96	819,96	819,96	819,96
3	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	92,32	92,32	92,32	92,93	93,05

Sumber : Dinas Komunikasi Informatika, persandiaan dan Statistik Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.10.3.Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon

Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon selama kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan terutama dari tahun 2016 - 2017. Hal ini berdasarkan kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi. Bukan hanya kalangan orang tua dan dewasa, tapi juga telah menjangkau kalangan remaja. Begitu pula di tahun 2020 yang mengalami peningkatan sebesar 0,04 persen. Penambahan ini dikarenakan selama pandemi covid-19, pelajar dihadapkan pada pembelajaran jarak jauh yang mengharuskan para pelajar memiliki alat komunikasi untuk menunjang proses pembelajarannya. Walaupun demikian, peningkatannya tidak terlalu signifikan karena daya beli masyarakat selama pandemi covid-19 juga menurun. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.252
Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk yang menggunakan HP/Telepon	Orang	70.302	81.533	87.492	90.007	91.081
2.	Jumlah Penduduk	Jiwa	239.689	252.627	260.019	265.927	268.678
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon	%	29.33	32.27	33.64	33.85	33.89

Sumber : Dinas Komunikasi Informatika, persandiaan dan Statistik Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.10.4.Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Proporsi rumah tangga yang memiliki akses internet pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat akan akses internet

terus meningkat terutama untuk akses internet di masing-masing rumah tangga, dimana banyak Rumah tangga yang melakukan pemasangan baru internet. Bukan hanya sekedar akses internet, tapi kebutuhan akan akses internet yang stabil dan berkecepatan tinggi. Internet sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang sangat bermanfaat dimasa pandemi saat ini, dengan adanya jaringan internet sangat mendukung masyarakat dalam bekerja dan belajar dari rumah. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.253
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses internet	Rumah Tangga	599	414	420	553	646
2.	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga	71.239	68.015	71.211	73.775	76.065
3	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet		0,008	0,006	0,006	0,007	0,008

Sumber : Dinas Komunikasi Informatika, persandiaan dan Statistik dan PT.TELKOM Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.10.5. Proporsi Rumah Tangga yang memiliki computer pribadi

Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi pada tahun 2020 hanya mengalami kenaikan. Keadaan ini didukung oleh peningkatan kebutuhan komputer pada masyarakat terutama kaum pelajar dan mahasiswa. Dimana komputer merupakan barang kebutuhan penting bagi pelajar dan mahasiswa dalam melaksanakan tugas belajar dirumah. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.254
Proporsi Rumah Tangga yang memiliki computer pribadi
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki computer pribadi	Rumah Tangga	15.342	16.565	17.401	17.993	18.665
2.	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga	71.239	68.015	71.211	73.775	76.065
3	Proporsi Rumah Tangga yang memiliki computer pribadi		0,22	0,24	0,24	0,24	0,25

Sumber : Dinas Komunikasi Informatika, persandiaan dan Statistik Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.11. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

2.5.2.11.1. Persentase Koperasi Aktif

Persentase koperasi aktif di Kabupaten Sinjai pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan secara fluktuatif selama lima tahun, hal ini dipengaruhi bertambahnya koperasi yang baru dan juga oleh rendahnya koperasi yang melaksanakan RAT. Namun kita terus melakukan pembinaan dengan mendampingi Koperasi melalui pembimbingan secara langsung pada penyusunan laporan keuangannya kepada Koperasi-koperasi yang tidak RAT sehingga diharapkan koperasi tersebut bisa aktif dan sehat demi kesejahteraan semua anggotanya. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.255
Persentase Koperasi Aktif
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	115	112	84	86	94
2.	Jumlah Seluruh Koperasi	Unit	140	129	130	132	140
3.	Persentase Koperasi Aktif	%	82,14	86,82	64,62	65,15	67,14

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.11.2. Persentase UKM non BPR/LKM aktif

Persentase UKM non BPR / LKM aktif dalam tiga tahun ini dari tahun 2018 jumlah UMKM 27.870 mengalami peningkatan 90,04 persen sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan dengan jumlah UMKM 29.027 sebesar 90,54 persen .

Pada tahun 2020 peningkatan jumlah data UMKM mengalami peningkatan sebesar 93.90 persen dari jumlah keseluruhan Usaha MikroKecil Menengah berjumlah 32.551 data UMKM pada Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai. dibandingkan pada tahun 2019, jumlah UKM Non BPR/LKM aktif berjumlah 93,32 persen. Dari jumlah keseluruhan UKM Non BPR/LKM aktif sebanyak 30.566. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2. 256
Persentase UKM non BPR/LKM Aktif
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah UKM non BPR / LKM aktif	Unit	-	15.346	25.095	26.283	30.566
2.	Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM	Unit	15.622	17.151	27.870	29.028	32.551
3.	Persentase UKM non BPR / LKM Aktif	%	-	89,47	90,04	90,54	93,90

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.11.3. Persentase BPR/LKM aktif

Persentase BPR /LKM aktif dari tahun 2016 sampai tahun 2019 ,jumlah seluruh BPR/LKM aktif sebanyak 6 unit,Sedangkan jumlah keseluruhan BPR/LKM aktif dari tahun sampai tahun 2019 adalah ,8 unit. Pada tahun 2020 jumlah BPR/LKM aktif sudah tidak ada lagi. Adapun faktor penyebab tidak tercapainya target jumlah BPR/LKM aktif antara lain :

- Setelah diverifikasi kembali terkait keaktifan pengelolaan LKM ditemukan indikasi bahwa LKM dari Tahun 2017-2020 banyak yang tidak beroperasi dan tidak aktif melakukan kegiatan usahanya.
- Kebanyakan LKM pengurus beralih menjadi pengurus bundes, diman LKM yang dikelola melebur dan bergabung bersama bundes.
- Pengembalian pinjaman dari Nasabah tidak lancar sehingga menyebabkan terjadinya tunggakan dari nasabah .
- Tidak dapat membayar biaya operasionalnya ,sehingga tidak aktif antara pendapatan dengan biaya operasionalnya sehingga tidak aktif.

Tabel 2.257
Persentase BPR/LKM Aktif
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah seluruh BPR/UKM	Unit	6	6	6	6	-
2.	Jumlah BPR/LKM aktif	Unit	8	8	8	8	-
3.	Persentase BPR/LKM Aktif	%	75	75	75	75	-

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.11.4. Persentase Usaha Mikro dan kecil

Persentase jumlah usaha mikro kecil dan menengah mengalami peningkatan setiap tahun 2019 jumlah usaha mikro kecil menengah 29.752 berikut pada tahun 2020 jumlah usaha mikro kecil sangat mengalami peningkatan jumlah usaha mikro kecil menengah yang sangat pesat yaitu dari jumlah tahun 2019, usaha mikro kecil menengah presentase UKM nya dari 93.32 persen mengalami peningkatan jumlah usaha mikro kecil menengah 32.551 dengan peresentase 93.90 persen, ini juga dapat dilihat adanya peningkatan kelas dari usaha mikro menjadi usaha berskala kecil begitupun dari usaha kecil menjadi berskala menengah. Ini membuktikan bahwa peningkatan data UMKM bina Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai. Faktor penyebab tercapainya ini karena adanya peningkatan jumlah data usaha mikro yang dipengaruhi oleh adanya BANPRES BPUM yang merupakan

Program Pemulihan Ekonomi yang terdampak Covid-19, dimana Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja menjadi salah satu Instansi Pengusul BPUM, sehingga terjadi lonjakan peningkatan jumlah usaha UMKM di Kabupaten Sinjai.

Upaya koordinasi dengan OPD terkait untuk melakukan sinkronisasi data UMKM dari berbagai sektor usaha di Kabupaten Sinjai yang juga turut memicu terjadinya peningkatan data jumlah pelaku UMKM di Kabupaten. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.258
Persentase Usaha Mikro dan Kecil
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah usaha mikro dan kecil	Unit	13.782	15.200	25.500	27.767	30.566
2.	Jumlah seluruh UKM	Unit	15.622	17.151	27.870	29.750	32.551
3.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	88,22	88,62	91,50	93,33	93,90

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.12. Bidang Urusan Penanaman Modal

2.5.2.12.1 Jumlah Investor berkala Nasional (PMDN / PMA)

Data Jumlah Investor berkala nasional di Kabupaten Sinjai untuk tahun 2016-2018 merupakan jumlah investor secara keseluruhan baik itu skala nasional. Untuk tahun 2019-2020 Investor Berskala Nasional (PMDN) berjumlah 2 Investor. Realisasi jumlah investor ini mencapai target Renstra. Adapun jumlah investor secara keseluruhan untuk Tahun 2019, baik itu berskala nasional maupun lokal adalah 271 PMDN dengan PMDN yang mempunyai investasi \geq Rp. 500.000.000,- sejumlah 17 PMDN. Pada tahun 2020 jumlah Investor /PMDN berskala Nasional maupun local adalah 296 PMDN dengan PMDN yang mempunyai investor \geq Rp. 500.000.000,- sejumlah 21 PMDN. Dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.259
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

TAHUN	INDIKATOR	SATUAN	PMDN
2016	Jumlah Investor	PMDN	7
2017	Jumlah Investor	PMDN	5
2018	Jumlah Investor	PMDN	8
2019	Jumlah Investor	PMDN	1

2020	Jumlah Investor	PMDN	1
------	-----------------	------	---

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.12.2. Jumlah Nilai Investasi berkala nasional (PMDN / PMA)

Jumlah nilai investasi berkala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Sinjai pada tahun 2016-2018 adalah akumulasi nilai investasi dari tahun ke tahun dan mencakup nilai investasi seluruh PMDN/PMA baik Berskala Nasional maupun lokal. Untuk tahun 2020 data yang digunakan adalah data tahun berjalan dengan nilai investasi Berskala Nasional sejumlah Rp. 2.000.000.000,- dan nilai ini mencapai target Renstra tahun 2020. Adapun nilai investasi sesuai Izin yang Tertib Tahun 2020 (Skala Nasional maupun Lokal) adalah Rp, 46.824.760.063,- dengan nilai investasi PMDM ≥ Rp. Rp. 500.000.000,- adalah Rp 22.924.093.402,-. Dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.260
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN / PMA)
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	PERSETUJUAN						
	Jumlah Proyek	Proyek	7	5	9	9	9
	Nilai Investasi	Milyar	124.359.362.000	8.150.000.000	52.332.760.000	1.000.000.000	1.000.000.000
2	REALISASI						
	Jumlah Proyek	Proyek	7	5	9	9	9
	Nilai Investasi	Milyar	124.359.362.000	8.150.000.000	52.332.760.000	1.000.000.000	1.000.000.000

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.12.3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Daya serap tenaga kerja di Kabupaten Sinjai Dari data Untuk Tahun 2020, Jumlah PMDN (Skala Nasional maupun Lokal) secara keseluruhan adalah 296, dengan tenaga kerja berjumlah 802 orang, 500 orang laki-laki dan 302 perempuan, sehingga Rasio Daya Serap Tenaga Kerja mencapai target 2,71. Dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.261
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlahtenaga kerja yang bekerja pada perusahaan	Orang	2.660	1.563	757	787	802
2	Jumlah seluruh PMA/ PMDN	PMA/ PMDN	909	383	304	271	296
3	Rasio daya serap tenaga kerja		2,93	4,08	2,49	2,90	2,71

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.12.4. Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Kenaikan / Penurunan nilai realisasi PMDN di Kabupaten Sinjai pada tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Data Jumlah Investor pada tabel di atas untuk tahun 2016 - 2018 merupakan data akumulasi investasi dari tahun ke tahun baik dari pelaku usaha yang berizin maupun tidak berizin. Untuk tahun 2020, realisasi PMDN merupakan data tahun berjalan dan untuk pelaku usaha yang memiliki izi.

Tabel 2.262
Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi PMDN tahun evaluasi	Rupiah	313.229.862.500	109.902.670.000	34.379.000.000	43.284.168.493,14	46.274.760.063
2	Realisasi PMDN Tahun sebelum evaluasi	Rupiah	240.254.822.308	313.229.862.500	109.902.670.000	34.379.000.000	43.284.168.493,14
3	Persentase	%	30,37	-64,91	-68,72	25,9	6,91

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten . Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.13. Bidang Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga

2.5.2.13.1. Persentase organisasi pemuda yg aktif

Jumlah seluruh organisasi pemuda adalah 28 Organisasi, dan berstatus aktif tahun 2016 sampai akhir 2020. Keaktifan organisasi pemuda ini dilihat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari seluruh organisasi yang telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan memiliki kegiatan yang berkesinambungan.

2.5.2.13.2. *Persentase wirausaha muda*

Jumlah wirausaha muda di Kabupaten Sinjai pada tahun 2016 yakni 30 wirausaha, tahun 2017 berjumlah 40 wirausaha, tahun 2018 berjumlah 55 wirausaha, tahun 2019 berjumlah 1.487 wirausaha dan tahun 2020 berjumlah 1.485 wirausaha. Sedangkan persentase pada tahun 2019 adalah 8,51 persen dari seluruh wirausaha yang berjumlah 17.480 dan persentase pada tahun 2020 adalah 8,53 dari seluruh wirausaha yang berjumlah 17400. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.263
Persentase Wirausaha Muda
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah wirausaha muda	Wirausaha	30	40	55	1.487	1.485
2	Jumlah seluruh wirausaha	wirausaha	-	-	-	17.480	17.400
3.	Persentase wirausaha muda	%	-	-	-	8,51	8,53

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.13.3. *Cakupan pembinaan olahraga*

Cakupan pembinaan olahraga di Kabupaten Sinjai dari tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Cabang olahraga yang dibina pada tahun 2016 dan 2017 adalah 24 cabang olahraga, dan mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya. Yakni pada tahun 2018 sebanyak 26 cabang olahraga, pada tahun 2019 sebanyak 29 cabang olahraga, dan pada tahun 2020 sebanyak 33 cabang olahraga.

Persentase cabang olahraga yang dibina dari tahun 2016 - 2019 adalah 100 persen dari seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar. Namun pada tahun 2020 persentase menurun yakni 94,1 persen disebabkan cabang olahraga yang dibina hanya berjumlah 33 cabang olahraga sementara yang terdaftar berjumlah 35 cabang olahraga. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.264
Cakupan Pembinaan Olahraga
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Cabang	24	24	26	29	33
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada /terdaftar	Cabang	24	24	26	29	35
3.	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100	100	100	100	94,1

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.13.4. Cakupan pelatih yang bersertifikasi

Cakupan pelatih yang bersertifikasi di Kabupaten Sinjai dari tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2016-2017 pelatih bersertifikat berjumlah 33 orang atau 70,21 persen dari seluruh pelatih yang berjumlah 47 orang.
2. Pada tahun 2018 pelatih bersertifikat masih berjumlah 33 orang namun persentase menurun menjadi 42,31 persen disebabkan jumlah pelatih meningkat menjadi 78 orang.

Pada tahun 2019-2020 pelatih bersertifikat berjumlah 41 orang yang persentasenya 40,20 persen di tahun 2019 dari seluruh pelatih yang berjumlah 102 orang dan 41,00 persendi tahun 2020 dari seluruh pelatih yang berjumlah 100 orang. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.265
Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pelatih bersertifikat	Pelatih	33	33	33	41	41
2	Jumlah seluruh pelatih	Pelatih	47	47	78	102	102
3.	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	70,21	70,21	70,21	40,20	40,20

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.13.5. Cakupan pembinaan atlet muda

Cakupan pembinaan atlet muda di Kabupaten Sinjai Pada Tahun 2019 Jumlah atlet pelajar yang dibina sebanyak 420 atlet mengalami penurunan pada tahun 2020 sebanyak 236 atlet . Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.266
Cakupan Pembinaan Atlet Muda
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah atlet pelajar yang dibina	Atlet	85	100	403	420	326
2	Jumlah seluruh atlet pelajar	Atlet	170	210	403	420	326

3.	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	50,00	47,62	100	100	100
----	------------------------------	---	-------	-------	-----	-----	-----

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai, Tahun 2020

2.5.2.13.6. Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah Atlet Berprestasi diKabupaten Sinjai pada tahun 2019 jumlah altet yang memenangkan kejuaran tingkat nasional dan internasional sebanyak 6 orang, Sedangkan pada tahun 2020 tidak ada atlet yang memenangkan kejuaran.

Tabel 2.267
Jumlah Atlet Berprestasi
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah atlet yang memenangi kejuruan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	Atlet	-	1	1	6	-

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.13.7. Jumlah prestasi olahraga

Jumlah prestasi olah raga di Kabupaten Sinjai pada tahun 2019berjumlah 2 cabang olahraga, sedangkan pada tahun 2020 tidak ada prestasi cabang olahraga yang dimenangkan.

Tabel. 2.268
Jumlah Prestasi Olahraga
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam 1 Tahun	Medali	-	9	15	2	-

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.14. Bidang Urusan Statistik

2.5.2.14.1. Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi

Sistem data dan Statistik yang terintegrasi di Kabupaten Sinjai telah menghadirkan sistem data yang memenuhi standar yang dapat digunakandalampengambilankebijakan. DinasKomunikasiInformatikaStsstatistikdan Persandian Kabupaten Sinjaiyang bekerja sama dengan Badan Statistik Pusat sebagai wali data yang berfungsi sebagai pusat data.Seluruh Perangkat Daerah menjadi produsen data wajib memberikan data kepada Diskominfo sebagai wali data. Dalam

kurung waktu 2016 hingga tahun 2020 telah tersedia sistem data statistik yang terintegrasi di Kabupaten Sinjai.

2.5.2.14.2. *Buku “Kabupaten Dalam Angka”*

Buku Kabupaten Dalam angka merupakan publikasi yang cukup penting karena melibatkan data-data dari stakeholder terkait. Kabupaten Dalam Angka ketersediaan data tergantung dari Perangkat Daerah tersebut hingga masing-masing daerah memiliki keberagaman data sesuai potensi wilayahnya. Ketersediaan buku Kabupaten Dalam Angka, Dalam kurung waktu 2016 hingga tahun 2020 telah tersedia buku Kabupaten dalam angka di Kabupaten Sinjai.

2.5.2.14.3. *Tersedianya Buku “PDRB”*

Hal ini tercapai karena Pemerintah Kabupaten Sinjai menjadikan Buku PDRB untuk keperluan perencanaan, evaluasi dan penentuan kebijakan pembangunan daerah. Buku PDRB memegang peranan penting karena perannya sebagai salah satu indikator utama dalam perekonomian. Dengandata pada buku PDRB dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur perkonomian dan tingkat kemakmuran penduduk. Ketersediaan buku PDRB. Dalam kurung waktu 2016 hingga tahun 2020 telah tersedia buku PDRB di Kabupaten Sinjai.

2.5.2.15. **Bidang Urusan Persandian**

2.5.2.15.1. *Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sandi dalam Komunkasi Perangkat Daerah*

Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerahdi Kabupaten Sinjai yang menggunakan persandian dalam komunikasi perangkat daerah adalah 100 persen, dimana dalam proses pengiriman dan penerimaan surat-surat dan berkas berharga semuanya melalui persandian dalam proses penyalurannya. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.269
Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan
Sandi dalamKomunkasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Peangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	Perangkat Daerah	31	42	42	42	42
2	Jumlah Total Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	31	42	42	42	42
3	PersentasePerangkat Daerah yang telah menggunakan	%	100	100	100	100	100

	sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah						
--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Dinas Kominfo, Persandian & Statistik Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.16. Bidang Urusan Kebudayaan

2.5.2.16.1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Penyelenggaraan festival seni dan budaya dari tahun 2016-2019 tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 3 festival.Sedangkan pada tahun 2020 terget penyelenggaraan festival seni dan budaya berjumlah 3 kali pelaksanaan namun terealisasi berjumlah 1 kali dan 2 kali tidak terealisasi, hal ini di sebabkan karena adanya pandemi covid 19 yang sampai akhir tahun 2020 tidak meredam sehingga tidak dilaksanakan. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.270
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Festival	3	3	3	3	1

Sumber : Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.16.2. Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Untuk tahun 2020 Jumlah Koleksi Museum tidak bertambah dikarenakan pada tahun 2020 tidak diadakan pengadaan koleksi museum, dan untuk Cagar budaya dikarenakan kondisi Pandemi Covid 19 sehingga pendataan dan pendaftaran tidak secara maksimal dilakukan sehingga tidak bertambah. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.271
Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Unit	99	153	150	154	155
2	Total benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	Unit	159	159	159	169	169
3	Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	62,26	96,23	94,34	91,12	91,71

Sumber : Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.16.3. *Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi*

Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi untuk tahun 2020 hanya dilakukan pendataan dan tidak dilakukan pendaftaran serta penetapan tim ahli cagar budaya kabupaten/kota Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.272
Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	unit	3	3	3	3	9

Sumber : Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.16.4. *Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu*

Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu untuk tahun 2020 tidak melakukan penambahan hal ini disebabkan karena adanya pandemic Covid 19.

Tabel 2.273
Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	unit	159	159	159	105	108

Sumber : Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.17. Bidang Urusan Perpustakaan

2.5.2.17.1. *Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun*

Jumlah kunjungan ke perpustakaan di Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena adanya pembatasan waktu dan jumlah pengunjung perpustakaan guna mencegah penularan virus covid-19. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.274
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan ke perpustakaan Selama 1 tahun	kali	29.647	30.585	31.369	71.072	25.060

2	Jumlah orang dalam populasi yang harus di layani	orang	165.615	166.689	167.676	-	194.122
3	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun		0,18	0,18	0,19	-	0,13

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.17.2. Koleksi Buku yang Tersedia di Dalam Perpustakaan Daerah

Persentase koleksi buku yang tersedia di dalam perpustakaan daerah persentase tiap tahunnya berfluktuasi. Pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2019. Dapat dilihat padatable berikut.

Tabel 2. 275
Koleksi Buku yang Tersedia di Dalam Perpustakaan Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah koleksi judul buku	Ekspler	15,101	12.299	12.531	12.380	13.672
2.	Jumlah koleksi jumlah buku	Ekspler	76.151	57.357	57.821	19.223	23.688
3.	Persentase Koleksi Buku yang Tersedia di Dalam Perpustakaan Daerah	%	0,20	0,21	0,22	0,64	0,50

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.17.3. Rasio perpustakaan persatuan penduduk

Rasioperpustakaan persatuan penduduk pada tahun 2016-2020 jumlah perpustakaan yaitu 1 unit sedangkan jumlah penduduk selalu mengalami peningkatan. Dimana penduduk belum dapat memenuhi kebutuhan Bahan Bacaan berdasarkan data Jumlah Penduduk Kabupaten Sinjai.

Tabel 2.276
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk
Kabupaten SinjaiTahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perpustakaan	Unit	1	1	1	1	1
2.	Jumlah penduduk	Jiwa	239.689	252.627	260.019	265.927	268.678
3.	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk		0,004	0,004	0,004	0,004	0,004

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.17.4. Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan /Tahun

Persentase Pengunjung Perpustakaan pada setiap tahun 2020 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena adanya pembatasan waktu dan jumlah pengunjung perpustakaan guna mencegah virus covid 19.

Tabel 2.277
Jumlah Rata-rata Pengunjung Perpustakaan /Tahun
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata pengunjung perpustakaan	Orang	2.549	2.614	4.289	5.920	2.089

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.17.5. Jumlah koleksi judul buku peprpustakaan

Jumlah koleksi judul buku perpustakaan di Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 mengalami peningkatan karena adanya bantuan dari perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.278
Jumlah Koleksi Judul Buku Peprpustakaan
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul	15.101	12.299	12.531	12.380	13.672

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.18. Bidang Urusan Kearsipan

2.5.2.18.1. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku

Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 62,50 persen. Hal ini disebabkan karena Perangkat daerah yang telah menerapkan pengelolaan arsip baku. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 279
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku
Kabupaten Sinjai, Tahun 2019-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	Perangkat Daerah	22	39	22	22	25
2.	Jumlah perangkat daerah	Perangkat Daerah	39	39	39	39	40

3.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	56,41	100	56,41	56,41	62,50
----	--	---	-------	-----	-------	-------	-------

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.2.18.2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

Peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan pada tahun 2020 tidak adanya kegiatan peningkatan SDM pengelola perpustakaan karena keterbatasan anggaran dengan adanya Recofusing Anggaran. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.280
Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
Kabupaten Sinjai,Tahun 2019-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Kali	1	1	-	-	-

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.3. Aspek Layanan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indicator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu urusan

2.5.3.1. Bidang Urusan Pariwisata

2.5.3.1.1. Kunjungan Wisata

Persentase kunjungan wisata di Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 144,28 persen di dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 117,58 persen.Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid 19. Dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.281
Kunjungan Wisata
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se kab.	Kunjungan	37.678	39.324	70.000	104.451	134.516
2	Jumlah kunjungan wisata yang direncanakan se kab.	Kunjungan	32.357	35.919	40.000	88.836	93.277
3	Kunjungan Wisata	%	116,44	109,48	175,00	117,58	144,29

Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.3.1.2. Lama Kunjungan Wisata

Rata-rata lama kunjungan wisata di Kabupaten Sinjai dalam kurun lima tahun selalu mengalami peningkatan. Sejak pada Tahun 2017-2020 mengalami peningkatan yang sangat besar. Pada tahun 2020 mencapai 134.516 pengunjung dan pada tahun 2019 sebanyak 104.451 pengunjung. Peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sinjai dikarenakan semakin bertambahnya sarana dan prasarana pendukung di obyek wisata, Sejak thun 2017 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai mendapat dukungan alokasi dana dari kementarian Pariwisata yaitu melalui Dana alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan ke obyek wisata Pulau Larea-rea, Hutan mangrove tongke-tongke dan Taman Hutan raya Abdul Latif. Selain itu semakin meningkatnya peran serta Desa dalam pemajuan pariwisata dibuktikan dengan banyaknya tempat-tempat wisata baru di desa misalnya Pantai Mallenreng dan Pantai Marannu Serta wisata Kampung Galung , Obyek wisata bulu lancing, pantai bulokkong dan baling flower garden.

Tabel 2.282
Lama Kunjungan Wisata
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Lama Kunjungan Wisata	Kunjungan	30.360	33.350	40.750	104.451	134.516

Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.3.2. Bidang Urusan Pertanian

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Berdasarkan indikator ini kita akan memperoleh gambaran tingkat pertumbuhan ekonomi maupun tingkat kemakmuran masyarakat suatu wilayah. Sektor pertanian merupakan sumber utama mata pencaharian sebagian besar penduduk di Sinjai. Selain itu sektor pertanian juga menjadi lapangan usaha yang memberikan pengaruh paling dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sinjai. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB berdasarkan jumlah keseluruhan mengalami peningkatan setiap tahun, namum terjadi penurunan dari sisi prosentase. Hal ini merupakan hal yang positif dan diharapkan dalam terus menurun secara prosentase namun meningkat dalam jumlah dengan maksud bahwa daya saing sektor pertanian mengalami perbaikan dan disisi lain sektor lain penyumbang PDRB juga mengalami peningkatan.

2.5.3.2.1. Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB kabupaten Sinjai bahwa sektor pertanian sangat mendominasi dan menjadi penggerak utama perekonomian Kabupaten Sinjai. Selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2020, nilai PDRB sektor Pertanian meningkat, walaupun nilai share/distribusi dari total PDRB setiap tahun menurun. Sub sektor Perikanan masih menjadi penyumbang terbesar dari PDRB sektor Pertanian kabupaten Sinjai. Pada tahun 2020 kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku, yakni sebesar 43,06 persen. Capaian PDRB pada tahun 2020 sebetulnya tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, disebabkan oleh pengaruh pandemi covid 19 yang melanda seluruh sektor kehidupan.

Tabel 2.283
Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan Terhadap PDRB
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	INDIKATOR		
		PDRB dari sektor pertanian/perkebunan	Jumlah PDRB	Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB
SATUAN		Rp. Juta	Rp. Juta	%
1.	2016	3.842.133,83	8,294.879,43	46,31
2.	2017	4.247.419,14	9.138.199,86	46,48
3.	2018	4.576.494,77	10.163.057,34	44,64
4.	2019	4.830.435,52	10.960.624,84	44,07
5.	2020	4.876.044,52	11.325.053,91	43,06

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.3.2.2. Kontribusi Sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB kabupaten Sinjai bahwa dalam lima tahun terakhir peranan Sub Sektor Pertanian Tanaman pangan khususnya padi dan Palawija cenderung menurun akibat penurunan produksi utamanya tanaman padi dari 117.352 ton GKG 2019 menjadi 94.517 ton GKG 2020 atau sekitar -19,46 persen, walaupun untuk komoditi jagung menunjukkan indikasi peningkatan produksi. Nilai share/distribusi pada komoditi ini mampu dicapai sebesar 7,08 persen pada tahun 2020. Secara umum faktor pencetus penurunan angka produksi pada tahun 2020 adalah ketersediaan anggaran penyediaan sarana dan prasarana pertanian. Demikian halnya pada Sub Sektor Hortikultura

Tabel 2.284
Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) Terhadap PDRB
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	INDIKATOR		
		Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian Komoditi Palawija	Jumlah PDRB sector pertanian / perkebunan	Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) Terhadap PDRB
SATUAN		Rp. Juta	Rp. Juta	%
1.	2016	760.821,25	3.846.226,30	9,17
2.	2017	820.130,49	4.221.682,63	8,97
3.	2018	867.125,92	4.576.494,77	8,53
4.	2019	842.331,39	4.830.435,5	7,69
5.	2020	801.378,82	4.876.044,52	7,08

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.3.2.3. Kontribusi Sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

kontribusi sub sektor pertanian komoditi perkebunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan dari segi share/distribusi. Namun berdasarkan jumlah total (Rp) mengalami peningkatan. Kontribusi komoditi perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Sinjai menurun dalam kurun waktu 2016-2020 yaitu dari 12,95 persen menjadi 11,53 persen. Komoditi tanaman perkebunan sangat strategis untuk dikembangkan lebih lanjut terlebih peranan nya masih double digit bagi PDRB Kabupaten Sinjai terutama tanaman perkebunan tahunan seperti kopi dan cengkeh. Nilai Produksi gabungan tanaman perkebunan tahunan meningkat dari 7.623 ton menjadi 7.741 ton pada tahun 2020 atau sekitar 1,55 persen. Ekspansi perkebunan tahunan sangat ditopang oleh tanaman kopi robusta, kopi arabika, cengkeh, lada, dan jambu mete yang tumbuh di kisaran 0,48 - 4,95 persen.

Tabel 2.285
Kontribusi Sektor Perkebunan (tanaman keras) Terhadap PDRB
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	INDIKATOR		
		Jumlah Kontribusi sektor Perkebunan (Tan.Keras)	Jumlah PDRB sector pertanian / perkebunan	Kontribusi Sektor Perkebunan (tanaman keras) Terhadap PDRB
SATUAN		Rp. Juta	Rp. Juta	%

1.	2016	1.074.343,67	3.846.226,30	12,95
2.	2017	1.152.926,24	4.221.682,63	12,62
3.	2018	1.253.908,82	4.576.494,77	12,34
4.	2019	1.248.138,73	4.830.435,5	11,39
5.	2020	1.306.221,50	4.876.044,52	11,58

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Sinjai, Tahun 2021

2.5.3.2.4. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB

bahwa peran kelompok tani dalam pemenuhan target produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam 5 Tahun terakhir mengalami peningkatan, walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat dampak global pandemic Covid19. Kegiatan pembangunan pertanian baik itu penyediaan sarana produksi dan penyediaan infrastruktur pendukung lebih diarahkan pada kelompok-kelompok tani yang telah dilakukan pembinaan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai, sehingga kegiatan pembangunan pertanian tersebut tepat sasaran dan tujuan. Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB secara umum sangat dipengaruhi oleh jumlah petani/kelompok tani yang mendapatkan bantuan pemerintah.

Kontribusi produksi tanaman pangan yang dihasilkan oleh kelompok tani lebih menggambarkan besarnya peran kelompok tani terhadap pengembangan pertanian itu sendiri di kabupaten Sinjai. Dari tabel 2.63 diatas terlihat bahwa lebih dari 80% sumbangan produksi pertanian tanaman pangan dihasilkan oleh kelompok tani. Hal ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan produksi dengan lebih mengarahkan kebijakan pembangunan pertanian kepada kelompok tani atau Gabungan Kelompok Tani menjadi tepat sasaran.

Demikian halnya dengan kebijakan penyediaan sarana produksi (pupuk) dan Alat dan Mesin Pertanian lainnya kepada kelompok Tani menjadi terarah dan tepat sasaran. Konsep pemberdayaan kelompok tani ini sekarang dikenal dengan konsep korporasi petani, yang semula dicanangkan oleh Pemerintah pada tahun 2017. Konsep korporasi petani merupakan manajemen baru dalam pengelolaan pertanian yang bertujuan untuk mengubah pola kerja petani kearah lebih modern, baik dalam pola pikir (paradigma) maupun cara pengolahan dan pemasaran produk dengan menggunakan *platform* modern.

Tabel 2.286
Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah produksi padi / bahan pangan utama local hasil kelompok tani	Ton	99.225	110.442	111.651	98.164	88.364
2.	Jumlah produksi padi / bahan pangan utama di daerah	Ton	118.015	126.815	122.671	117.351	105.383
3.	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	%	84,08	87,09	89,34	83,65	83,85

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.3.2.5. *Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar*

Produktivitas padi atau bahan pangan utama merupakan ukuran kinerja dari pembangunan pertanian itu sendiri. Produktivitas yang tinggi seharusnya berkorelasi langsung dengan tingkat kesejahteraan petani. Persoalan luas kepemilikan lahan pertanian yang semakin sempit/berkurang hanya dapat diatasi dengan upaya meningkatkan produktivitas lahan, misalnya dengan memberikan input-input yang optimal dan berkelanjutan pada lahan-lahan pertanian serta dukungan infrastruktur pertanian (irigasi) dan alat mesin pertanian. Tingkat produktivitas padi atau bahan pangan utama local lainnya.

Bahwa rata-rata produktivitas padi selama kurun waktu 5 tahun terakhir adalah 47 kwintal /Ha. Rata-rata produktivitas padi Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 50 kw/Ha, maka posisi Kabupaten Sinjai masih dibawah rata-rata produktivitas Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini hanya dapat dicapai dengan meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana pada lahan-lahan pertanian di Kabupaten Sinjai. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan ketersediaan benih unggul bermutu melalui pemberdayaan kelompok tani penangkar dan kesiapsiagaan terhadap gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan iklim (DPI). Dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.287
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya	Ton	118.015	126.815	122.671	117.351	105.383
2.	Luas areal tanaman padi /bahan pangan utama local lainnya	Ha	24.814	24.686	25.180	26.678	24.198
3.	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	%	47,56	51,37	48,45	43,99	43,55

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.3.2.6. Cakupan Bina Kelompok petani

Cakupan bina kelompok tani merupakan ukuran untuk menunjukkan seberapa besar bantuan yang diberikan oleh Pemerintah terhadap kelompok tani. Bantuan Pemerintah disini dimaksudkan tidak hanya berupa bantuan fisik ataupun infrastruktur, namun dapat pula berupa pembinaan/peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam rangka peninghkatan produksi pertanian.

Bahwa rata-rata cakupan bina kelompok tani berada pada kisaran 39 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian Pemerintah daerah terhadap kelompok-kelompok tani cukup besar. Keberpihakan Pemerintah Kabupaten Sinjai terhadap pembinaan kelompok tani ini dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah atas upaya kelompok tani dalam meningkatkan produksi pertanian yang pada akhirnya juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani.Dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.289
Cakupan Bina Kelompok Petani
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda	Kelompok	620	769	484	328	287
2.	Jumlah kelompok tani	Kelompok	1.124	1.314	1.314	1.422	1.453
3.	Cakupan Bina Kelompok Petani	%	55,16	58,53	36.83	23,07	19,75

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Sinjai, Tahun 2021

2.5.3.3. Bidang Urusan Perdagangan

2.5.3.3.1. Cakupan Bina Usaha Informal/Pedagang

Cakupan bina usaha informal/pedagang di Kabupaten Sinjai selama 5 tahun terakhir berjumlah 17 pelaku usaha. Para pelaku usaha tersebut merupakan pedagang kuliner yang berada di jalan tondong. Pembinaan ini terkait penataan dan penertiban lokasi tempat usaha sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan pedagang. Sementara kelompok pedagang informal secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Sinjai sementara proses pendata.

Tabel 2.290
Cakupan Bina Usaha Informal/Pedagang
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok pedagang informal	Klp	17	17	17	17	17
2	Jumlah kelompok pedagang informal yang dibina	Klp	17	17	17	17	17
3	Cakupan Bina Usaha Informal/Pedagang	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.3.4. Bidang Urusan Perindustrian

2.5.3.4.1. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Prosentase jumlah kelompok pengrajin yang di bina Tahun 2016 jumlah pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan sebanyak 3 pengrajin dengan persentase 42,86 persen tahun 2017 - 2019 jumlah pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan sebanyak 1 kelompok sedangkan pada tahun 2020 tidak ada kelompok yang mendapat bantuan binaan pemda. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.291
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda	Klp	3	1	1	1	-
2	Jumlah kelompok pengrajin	Klp	7	9	10	14	24
3	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	42,86	11,11	10,00	7,14	-

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.3.5. Bidang Urusan Kelautan Dan Perikanan

2.5.3.5.1. Produksi Perikanan

Produksi Perikanan selama lima tahun meningkat, Sektor perikanan di Kabupaten Sinjai memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan yang tersebar di tiga wilayah meliputi laut, pesisir dan darat diharapkan mampu mewujudkan harkat dan tingkat kehidupan masyarakat nelayan/petani ikan yang maju dan berkembang secara mandiri. Kabupaten Sinjai merupakan pemasok ikan tuna segar ke sebagian besar daerah di Propinsi Sulawesi Selatan, serta ikan kerapu yang bernilai ekspor tinggi. Untuk perikanan budidaya peningkatan dipengaruhi beberapa faktor, antara lain harga rumput laut kembali normal sehingga minat masyarakat pembudidaya cukup bagus, tingkat salinitas air ditambah dan dilaut serta pasokan air baik budidaya air payau maupun air tawar sudah bagus, meningkatnya pengetahuan pembudidaya ikan, didukung dengan adanya pendampingan penyuluh dan penyuluh bantu.

Tabel 2.292
Produksi Perikanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Produksi ikan	Ton	67.087,3	77.268,2	75.723,2	79,803,6	83.045,71
2	Target Daerah	Ton	60.421	62.222	65.194	75.723	82.045
3	Produksi perikanan	%	1,11	1,24	1,16	1.05	1,01

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.3.5.2. Komsumsi Ikan

Konsumsi ikan Kabupaten Sinjai termasuk salah satu yang terbesar di Sulawesi Selatan. Hal ini disebabkan karena masyarakat Kabupaten Sinjai gemar makan ikan segar. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.293
Konsumsi Ikan
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah konsumsi ikan	Kg	76	76	47	47	47
2	Target Daerah	Kg	76	76	47	47	47
3	Konsumsi ikan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.3.5.3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 mengalami penurunan di banding tahun 2019. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan pemotongan bantuan pemda yang diberikan pada kelompok nelayan..Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.294
Cakupan Bina Kelompok Nelayan
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda	Kelompok	-	8	19	48	30
2	Jumlah kelompok nelayan	Kelompok	86	90	90	91	91
3	Cakupan bina kelompok nelayan	%	-	3,33	4,73	1,9	3,01

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.3.5.4. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Persentaseproduksi perikanan kelompok nelayan Kabupaten Sinjai 0 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid 19 yang kelompok nelayan tidak melakukan baik penangkapan ikan maupun pembudidayaan selama beberapa bulan. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.295
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	INDIKATOR		
		Jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan	Jumlah produksi ikan di daerah	Produksi perikanan kelompok nelayan
SATUAN		Rp. Juta	Rp. Juta	%
1.	2016	210,70	500.721.306	0,004
2.	2017	2.209,3	33.139.455.000	0,007
3.	2018	3.607,1	54.106.426.000	0,001
4.	2019	3.607,1	54.106.426.000	0,007
5.	2020	3.675,55	36.632,12	9,96

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.4. Aspek Penunjang Urusan

2.5.4.1. Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan

2.5.4.1.1. Tersediaanya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah telah tersedia dimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025.

2.5.4.1.2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai telah tersedia. RPJMD Kabupaten Sinjai telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

2.5.4.1.3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah di tetapkan dengan PERKADA

Selama kurun waktu lima tahun telah ada dokumen perencanaan RKPD yang telah di tetapkan dengan PERKADA.

2.5.4.1.4. Tersedianya Dokumen RTRW yang telah di tetapkan dengan PERDA

Dokumen RTRW yang telah di tetapkan dengan PERDA selama kurun waktu lima tahun telah ada dokumen RTRW yang telah di tetapkan dengan PERDA.

2.5.4.1.5. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD adalah jumlah program RKPD tahun berkenaan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan. Pada tahun 2020 terdapat 232 program di RKPD sedangkan di RPJM terdapat 233 Program. Dengan demikian terdapat satu programyang tidak sesuai antara RPJMD dan RKPD. Hal ini disebabkan karena program RPJMD tidak dijabarkan dalam RKPD yaitu Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran karena ada satu program digabung menjadi satu program. seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.296
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Program RKPD tahun berkenan	Program	186	214	183	230	232
2	Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenan	Program	186	214	183	234	233

3	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100,00	100,00	100,00	98,29	99,58
---	--	---	--------	--------	--------	-------	-------

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.4.1.6. Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD

Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD Pada tahun 2020 terdapat 232 program di RKPD sedangkan di APBD terdapat 211 Program. Dengan demikian terdapat 21 program yang tidak sesuai antara RKPD dan APBD. Hal ini disebabkan karena program RKPD tidak di anggarkan di APBD. seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.297
Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Program RKPD tahun berkenan	Program	186	214	183	230	232
2	Jumlah Program APBD yang harus dilaksanakan tahun berkenan	Program	186	214	183	230	221
3	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	100	100	100	100	104,98

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.4.1.7. Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW

Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW selama kurun waktu lima tahun tidak mengalami perubahan yaitu 100 persen dan kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW dan dokumen RTRW pada tahun 2016-2020 sebanyak 1 dokumen. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.298
Kesesuai Rencana Pembangunan dengan RTRW
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kesesuaian program/ kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang	Program	1	1	1	1	1
2	Dokumen RTRW	Dokumen	1	1	1	1	1
3	Kesesuai Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.4.2. Bidang Urusan Keuangan

2.5.4.2.1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Hasil opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan selama dua tahun berturut-turut telah mendapatkan WDP sedangkan pada tahun 2018-2020 kabupaten sinjai mendapatkan WTP. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.299
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.4.2.2. Persentase SILPA

Persentase SILPA APBD Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 7,34 persen dengan pertumbuhan sebesar 2,34 persen. Hal ini disebabkan terjadi penghematan pembelanjaan pada APBD tahun 2020 sehingga pembelanjaan pada Perangkat Daerah telah dimaksimalkan. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.300
Persentase SILPA
Kabupaten Sinjai Tahun, 2016-2020

NO	TAHUN	INDIKATOR		
		Total SILPA	Total APBD	Persentase SILPA
SATUAN		Rupiah	Rupiah	%
1.	2016	90.611.040.515,05	1.270.956.299.690,98	7,13
2.	2017	47.100.024.263,81	1.138.712.309.454,04	4,14
3.	2018	49,352,260,678.43	1.180.790.501.836,98	4,18
4.	2019	49.352.260.678,43	987.155.391.359,76	5,00
5.	2020	87.878.065.810,93	1.197.700.977.458,42	7,34

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.4.2.3. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Belanja Pendidikan yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai sudah memenuhi amanat undang undang yaitu sebesar 20 persen dari APBD, hal ini terlihat dari data yang ada, yakni pada tahun 2019 yang mencapai angka 33,14 persen mengalami penurunan pada tahun 2020 mencapai angka 28,58 persen. Dalam penyusunan alokasi anggaran berpedoman dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat 1 Perat

uranPemerintahNomor48Tahun2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Peningkatan yang signifikan terhadap Dana BOS yang menjadi bagian dari perhitungan belanja fungsi pendidikanini

Tabel 2.301
Persentase Belanja Pendidikan (20%)
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	INDIKATOR		
		Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan	Total APBD	Persentase Belanja Pendidikan (20%)
SATUAN		Rupiah	Rupiah	%
1.	2016	409.625.577.294,84	1.270.956.299.690,98	32,23
2.	2017	328.285.092.681	1.138.712.309.454,04	28,83
3.	2018	315.533.893.361,98	1.180.790.501.836,98	26,72
4.	2019	327.112.435.433	987.155.391.359,76	33,14
5.	2020	1.197.700.977.458,42	1.197.700.977.458,42	28,58

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.4.2.4. Persentase Belanja Kesehatan (10%)

BelanjaKesehatanpadaAPBDKabupaten Sinjai padatahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 18,21 persen, dan sudah berada di atas angka minimal nasional yang dipersyaratkan sesuai dengan Undang-Undang Yang Berlaku, Dimana SetiapOPDtelahBerkomitmenuntukbekerjadanmenyusunsertamenetapkanalokasi anggaran sesuai dengan aturan yangberlaku. Dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 2.302
Persentase Belanja Kesehatan (10%)
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	INDIKATOR		
		Jumlah Belanja Bidang Urusan Kesehatan	Total APBD	Persentase Belanja Kesehatan(10%)
SATUAN		Rupiah	Rupiah	%
1.	2016	273.491.361.368,11	1.270.956.299.690,98	21,52
2.	2017	210.432.464.350	1.138.712.309.454,04	18,48
3.	2018	202.527.405.240	1.180.790.501.836,98	17,15
4.	2019	123.387.934.225	987.155.391.359,76	12,50
5.	2020	218.126.180.898	1.197.700.977.458,42	18,21

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.4.2.5 . Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan data 5 tahun terakhir, proporsi belanja tidak langsung masih lebih dominan dibanding belanja langsung. Selama periode tersebut, komponen belanja tidak langsung yang bertumbuh pesat ditunjukkan pada alokasi belanja pegawai khususnya terkait kebijakan pemberian Tujungan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi ASN, Sedangkan alokasi untuk belanja langsung cenderung berfluktuasi pada tahun 2019 terjadi peningkatan belanja langsung yang cukup signifikan sebesar 54,11 persen. Hal ini disebabkan Kabupaten Sinjai pada tahun 2019 mendapatkan pinjaman dari Bank Sulsel dan pada tahun 2020 masih cukup tinggi di bandingkan pada tahun 2018 disebabkan karena alokasi pinjaman pada tahun 2019 dilanjutkan pada tahun 2020 dan menurun dibandingkan pada tahun 2019 karena alokasi belanja langsung sebagian diperuntungkan untuk membayaran utang. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.303
Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Belanja Langsung	Rupiah	534.296.025.291,00	490.562.341.831,30	561.541.900.306	534.136.877.728,76	589.057.957.093,96
2	Total APBD	Rupiah	1.270.956.299.690,98	1.138.712.309.454,04	1.180.790.501.836,98	987.155.391.359,76	1.197.700.977.458,42
	Persentase	%	42,04	43,08	47,56	54,11	49,18
3	Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rupiah	616.952.425.218,40	570.183.014.297,70	619.248.601.530,98	453.018.513.629	608.643.020.364,46
4	Total APBD	Rupiah	1.270.956.299.690,98	1.138.712.309.454,04	1.180.790.501.836,98	987.155.391.359,76	1.197.700.977.458,42
	Persentase	%	48,54	50,07	52,44	45,89	50,82

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.4.2.6 .Bagi Hasil Kabupaten / Kota dan Desa

Penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Sinjai mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja bagi hasil Kabupaten/kota dan desa mengalami peningkatan sampai pada tahun 2019 sebesar 0,25 persen. Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,19 persen di sebabkan karena adanya Refocusing Anggaran yang berdampak pada pengurangan alokasi anggaran pada Kabupaten dan desa.

Tabel 2.304
Bagi Hasil Kabupaten / Kota dan Desa
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	INDIKATOR		
		Jumlah Belanja bagi hasil Kab / Kota /Desa	Total APBD	Bagi Hasil Kabupaten / Kota dan Desa
SATUAN		Rupiah	Rupiah	%
1.	2016	1.493.325.400,00	1.270.956.299.690,98	0,12
2.	2017	1.709.170.382,00	1.138.712.309.454,04	0,15
3.	2018	1,932,781,061.00	1.180.790.501.836,98	0,16
4.	2019	2.442.823.272,72	987.155.391.359,76	0,25
5.	2020	2.223.906.322,46	1.197.700.977.458,42	0,19

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.4.2.7.Penetapan APBD

Dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maupun dalam regulas iterbaru yakni PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD yang telah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri, ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Berdasarkan capaian 5 tahun terakhir, terlihat bahwa dalam penetapan APBD Kabupaten Sinjai tahun 2016 sampai dengan 2020, telah dilaksanakan sesuai aturan yang ada yakni rata-rata ditetapkan di bulan Desember tahun sebelumnya yang dilaksanakan dengan adanya Kordinasi dan Sinergi yang baik dengan seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam setiap tahapan penyusunan hingga penetapan APBD Kabupaten, sertaKerjasamayangbaikdenganpihaklegislatifDPRDKabupaten,sehinggaAPBDdapat ditetapkan tepat waktu yakni sebelum tanggal 31 Desember, Hal ini sudah menjadikomitmenbersamaantarapihakeksekutif(KepalaDaerahbesertajajarannya) serta DPRD Kabupaten Sinjai yang akan dipertahankan terus di tahun-tahun mendatang.

2.3.4.3. Bidang Urusan Kepgawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan

2.3.4.3.1. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah Total ASN pada Tahun 2020 sebanyak 4.644 Orang, ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2020 sebanyak 44 Orang ASN yang

terdiri dari yang mengikuti Pendidikan lanjutan/Izin belajar dan tugas belajar sebanyak 44 Orang. Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2020 yaitu 0,95%, terjadi Penurunan sebesar 4,7% dari capaian Tahun 2019 sebesar 5,65% disebabkan karena pada Tahun 2020 tidak ada pelaksanaan Pendidikan Latihan Dasar CPNS di karenakan CPNS Formasi Tahun 2020 Penerimaan SK CPNS di Bulan Februari 2021 sehingga Pelatihan Dasar (Latsar) dilaksanakan pada Tahun 2021. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.305
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pendidikan formal	orang	41	42	68	272	44
2	Jumlah ASN	orang	5.648	4.906	4699	4.813	4.644
3	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	0,73	0,86	1,45	5,65	0,95

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.4.3.2. Persenatse Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Pada Tahun 2020 tidak terdapat Pejabat ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Struktural di sebabkan karena adanya Pandemi Covid-19 yang memaksakan kita untuk membatasi aktifitas transaksi sosial secara fisik sehingga kegiatan Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan tidak dapat terlaksana. Begitupun pada Tahun 2019 tidak terdapat Pejabat ASN yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan Struktural disebabkan adanya kegiatan pelatihan dasar CPNS yang lebih prioritas dari pada Pendidikan dan Pelatihan Struktural dikarenakan amanat dari Perkalan nomor 12 Tahun 2018 dan Surat Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Republik Indonesia Nomor: B/500/M.SM.01.00/2019 Tanggal 30 April 2019 yang menyatakan bahwa dalam Pasal 64 Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa masa percobaan bagi Calon PNS dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Instansi pemerintah wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada CPNS selama masa percobaan. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.306
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pendidikan Struktural	Orang	133	106	164	-	-
2	Jumlah Total Jabatan	Jabatan	716	754	754	780	775
3	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	18,58	14,06	21,75	-	-

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.4.3.3. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah

Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah di Kabupaten Sinjai pada Tahun 2020 yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi pratama sebanyak 38 Jabatan, yang terisi sebanyak 28 Jabatan yang terdiri dari Jabatan Eselon II.a sebanyak 1 Jabatan dan Jabatan Eselon II.b sebanyak 27 Jabatan. Jadi jumlah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang tidak terisi pada Tahun 2020 sebanyak 10 Jabatan dimana jabatan yang lowong ini di rencanakan akan di lakukan lelang jabatan secara terbuka pada Tahun anggaran 2021. Di bandingkan data Tahun 2019 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sebanyak 38 Jabatan tidak mengalami Perubahan.. Dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 2.307
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	33	37	37	38	38

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.4.3.4. Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah

Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Kabupaten Sinjai pada Tahun 2020 sebanyak 833 ASN, sedangkan pada Tahun 2019 sebanyak 981 ASN. Pada tahun 2020 mengalami penurunan disebabkan karena adanya promosi jabatan dan mutasi pegaewai. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.308
Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	1.652	1.763	1.763	981	833

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.4.3.5. *Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah*

Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu tertentu pada instansi pemerintah pada Tahun 2020 sebanyak 3063 Jabatan yang terdiri dari Fungsional Guru sebanyak 2261, Fungsional Kesehatan sebanyak 730 Jabatan dan Fungsional Auditor sebanyak 72 Jabatan. Sedangkan pada Tahun 2019 sebanyak 3083 Pemangku Jabatan Fungsional tertentu. Mengalami peningkatan di sebabkan adanya Penerimaan CPNSD Formasi tahun 2019 jabatan Fungsional Tertentu. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.309
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	Pemangku Jabatan	3.712	3.106	3.004	3.083	3.063

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.4.4. *Penelitian Dan Pengembangan*

2.5.4.4.1. *Persentase Implementaasi Rencana Kelitbangan*

Jumlah hasil kelitbangan di Kabupaten Sinjai pada tahun 2019-2020 sebanyak 12 (Dua belas) Kelitbangan. Pada tahun 2019 persentase implementasi rencana kelitbangan Kabupaten Sinjai sebesar 100 persen dan tahun 2020 sebesar 100 persen menandakan bahwa kelitbangan dalam RPJMD sama dengan jumlah kelitbangan yang diakomodir dalam RKPD. Persentase implementasi hasil rencana kelitbangan Kabupaten Sinjai. Dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 2.310
Persentase Implementaasi Rencana Kelitbangan
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelitbangan dalam RKPD	Kelitbangan	2	4	6	6	6
2	Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	Kelitbangan	4	10	10	6	6
3	Persentase implementaasi rencana Kelitbangan	%	50,00	40,00	60,00	100	100

Sumber : Badan Pelatihan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.4.4.2. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan sampai dengan tahun kedua periode RPJMD tahun 2019-2020 sebanyak 12 (duabelas) kelitbangan dan terealisasi sebanyak 9 (sembilan) kelitbangan atau 75 persen. Pada tahun 2019 persentase implementasi rencana kelitbangan Kabupaten Sinjai sebesar 6 (enam) kelitbangan yang termanfaatkan oleh perangkat daerah yang terkait dengan hasil kelitbangan atau sebesar 100 persen, dan pada tahun 2020 persentase implementasi rencana kelitbangan Kabupaten Sinjai sebanyak 6 (enam) kelitbangan yang diakomodir dalam Renja Tahun 2020 dan terealisasi sebesar 3 (tiga) kelitbangan atau sebesar 50 %. Terdapat 3 (tiga) dari 6 (enam) kelitbangan yang tidak terealisasi disebabkan adanya kebijakan refocusing akibat adanya pandemi Covid-19. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Kabupaten Sinjai Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.311
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti	Kelitbangan	2	4	6	6	3
2	Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah	Kelitbangan	2	4	6	6	6
3	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	100	100	100	100	50,00

Sumber : Badan Pelatihan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.4.4.3. *Persentase perangkat daerah yang di fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah*

Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Kabupaten Sinjai sampai dengan tahun kedua periode RPJMD tahun 2019-2020 sebanyak 42 Perangkat Daerah. Untuk tahun 2019 terealisasi sebanyak 15 dari 42 perangkat daerah yang difasilitasi atau sebesar 36,00 persen, dan untuk tahun 2020, persentase capaian sebesar 69,05 persen dari yang direncanakan. Hal disebabkan karena adanya kebijakan refocusing akibat adanya pandemi Covid-19, sehingga kegiatan ini tidak berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.312
Persentase Perangkat Daerah yang di Fasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi	Perangkat Daerah	-	1	2	15	29
2	Jumlah total perangkat daerah	Perangkat Daerah	-	42	42	42	42
3	Persentase Perangkat Daerah yang di Fasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	-	2,38	4,76	36,00	69,05

Sumber : Badan Pelatihan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.4.4.4. *Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah*

Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Kabupaten Sinjai sampai dengan tahun kedua periode RPJMD tahun 2019-2020 sebanyak 6 (enam) kebijakan atau sebesar 100 persen. Untuk tahun 2019 sebanyak 5 kebijakan dan tahun 2020 sebanyak 1 kebijakan. Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 2.313
Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kebijakan Inovasi yang diterapkan	Inovasi	-	1	1	5	1
2	Jumlah Inovasi yang diusulkan	Inovasi	-	1	1	5	1
3	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	%	-	100	100	100	100

Sumber : Badan Pelatihan dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.4.5. Pengawasan

2.5.4.5.1. Persentase Tindak Lanjut Temuan

Pesentase tindak lanjut terlihat mengalami penurunan angka sejak tahun 2016-2020, namun Temuan yang di tindak lanjuti dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan, walau total temuan setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Adapun yang faktor pendukung peningkatan temuan yang ditindaklanjuti sebagai berikut:

Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja antara lain:

1. Adanya pemantauan tindak lanjut yang dilakukan persemester dan penyelesaian tindak lanjut setiap adatemuan tidak lewat 60 hari
2. Adanya kerjasama yang baik oleh para stakeholder dalam mendukung tindak lanjut dan penyelesaian rekomendasi yang disampaikan
3. Perhatian SKPD menindaklanjuti temuan-temuan, baik administrasi maupun Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- ✓ program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah

- ✓ Kegiatan Tindak Lanjut Laporan Hasil Temuan Pengawasan.

Tabel 2.314
Persentase Tindak Lanjut Temuan
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah temuan yang ditindak lanjuti	Temuan	143	158	174	178	201
2	Jumlah total temuan	Temuan	180	202	245	254	282
3	Persentase tindak lanjut temuan	%	79,44	78,22	71,02	71,08	71,28

Sumber : Inspektorat Kabupaten Kabupaten . Sinjai, Tahun 2021

2.5.4.5.2. Persentase Pelanggaran Pegawai

Persentase pelanggaran pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Sinjai yang dikenai Sanksi sebanyak 11 Orang dari 4.648 Orang ASN sampai dengan Desember 2020, dengan persentasi pelanggaran 0.24persen. Hal ini menunjukkan bahwa Persentase pelanggaran ASN di Kabupaten Sinjai masih tergolong minim, namun demikian Pemerintah Kabupaten Sinjai tetap melakukan Upaya untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pagawai, dengan melakukan :

1. Kegiatan sosialisasi bisa melalui pendidikan dan latihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bintek) serta bentuk program kerja lainnya yang bertujuan memberikan pemahaman dan mengaplikasikan peraturan yang berkaitan disiplin PNS.
2. Memberikan sanksi/tindakan secara tegas bilamana seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan shock terapi agar PNS yang lain tidak meniru atau melakukannya dan juga agar tidak melakukan pelanggaran yang hukumannya lebih berat lagi;

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggungjawab mengawasi dan melakukan pembinaan secara dini dilingkungan kerjanya mengenai kedisiplinan PN. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.315
Persentase Pelanggaran Pegawai
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN yg di kenai sanksi	Orang	4	4	6	6	11
2	Jumlah total ASN	Orang	5.648	4.906	4.756	4.805	4.648
3	Persentase Pelanggaran Pegawai	%	0,07	0,08	0,13	0,12	0,24

Sumber : Inspektorat Kabupaten Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.4.5.3. Jumlah Temuan BPK

Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan Kuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai mulai dari Tahun 2016-2019. Jumlah temuan BPK di tahun 2020 belum keluar karena BPK belum melaksanakan pemeriksaan di Kabupaten Sinjai sehingga belum ada catatan maupun temuan dari BPK. Adapun analisa data pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya hal ini disebabkan oleh :

- 1) Pejabat/ASN terkait temuan belum sepenuhnya berkomitmen terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
- 2) Lemahnya pengendalian internal SKPD, Tim SPI belum optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan sehingga kejadian-kejadian yang sama terulang kembali pada pelaksanaan APBD tahun berikutnya
- 3) Pihak terkait temuan sudah mutasi/pensiun/meninggal dunia dan yang terkait dengan pihak ketiga yaitu perusahaan telah non aktif serta alamat tidak diketahui lagi.

- 4) Pengembalian kerugian Negara/Daerah belum dilaksanakan secara maksimal oleh SKPD
- 5) Rotasi pegawai pada Pemerintah Kabupaten Sinjai berdampak pada kelambanan penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK
- 6) Adanya ketidaksepakatan atas hasil pemeriksaan yang berdampak pada berlarut-larutnya temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti karena penghapusan temuan oleh BPK harus melalui proses yang cukup lama

Dari berbagai kendala diatas Pemerintah Kabupaten Sinjai melakukan upaya untuk percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebagai berikut :

- 1) Komitmen terhadap percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan melalui koordinasi antara Baperjakat dengan Inspektorat terkait pengenaan sangsi bagi pejabat yang lambat dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan
- 2) Meningkatkan fungsi pengawasan internal melalui program dan kegiatan pengawasan oleh Inspektorat diantaranya yaitu : Probit Audit; Evaluasi SPIP; aktif melaksanakan Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR) yang didalamnya terdapat Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKND); telah membuat mekanisme baku/standar yang berkaitan dengan proses penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dan SOP penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Melakukan kegiatan pemantauan melalui monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan seluruh SKPD terkait temuan secara berkala.

Tabel 2.316
Jumlah Temuan BPK
Kabupaten Sinjai,Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Temuan BPK	Temuan	26	9	9	14	

Sumber : Inspektorat Kabupaten Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.5.4.6. Sekretariat Dewan

2.5.4.6.1.Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota

Untuk melihat ada atau tidak ada rencana kerja tahunan pada DPRD Kabupaten Sinjai dari tahun 2016-2020. Penyusunan rencana kerja tahunan DPRD dimaksudkan untuk menyediakan instrumen bagi DPRD didalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewajiban secara terarah, efesien dan efektif sesuai dengan mandat yang diberikan.

2.5.4.6.2. Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi-fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi RPJM dan RKPD

Untuk melihat terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi-fungsinya ke dalam dokumen Setwan dari tahun 2016 – 2020. Tercapainya program-program DPRD didukung oleh kegiatan dan anggaran kedalam dokumen Sekretariat DPRD itu sendiri, sehingga fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran akan terlaksana secara maksimal.

2.5.4.6.3. Terintegritas Program-program DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Setwan DPRD

Untuk melihat terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi-fungsinya ke dalam dokumen Sekretariat DPRD dari tahun 2016-2020. Tercapainya program-program DPRD didukung oleh kegiatan dan anggaran kedalam dokumen Sekretariat DPRD itu sendiri, sehingga fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Peraturan Daerah dan fungsi anggaran akan terlaksana secara maksimal.

2.6. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.6.1. Produktivitas Total Daerah

Nilai tambah sector dalam kurun lima tahun mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 29 persen dan pada tahun 2018- 2020 mengalami peningkatan sebesar 36 persen, sedangkan jumlah angkatan kerja tidak mengalami perubahan dari tahun 2016-2020 sebesar 80 angkatan kerja sedangkan prosentasenya mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 23,75persen dan pada tahun 2018-2020 mengalami peningkatan sebesar 45,00 persen. Hal ini dapat dilihat pada table berikut .

Tabel 2.317
Produktivitas Total Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai tambah sector	%	7	29	36	36	36
2	Jumlah Angkatan kerja	AK	80	80	80	80	80
3	Produktivitas Total Daerah	%	8,75	23,75	45,00	45,00	45,00

Sumber : BPS Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.6.2. *Pertumbuhan PDRB Sector Pertanian, Kehutanan dan Perikanan*

Pertumbuhan PDRB Sector Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun. Dimana tahun 2019 sebesar 44,07 persen mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 43,06 persen. Hal ini disebabkan karena dalam kurun waktu tersebut sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tidak banyak memberikan kontribusi khususnya sektor pertanian dan kehutanan. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.318
Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	46,37	46,20	45,03	44,07	43,06

Sumber BPS Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.6.3. *Indeks Layanan Infrastruktur*

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan daerah dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu kawasan. Jaringan transportasi merupakan salah satu tulang punggung distribusi baik barang, penumpang maupun jasa, serta merupakan aspek penting dalam peningkatan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan pelabuhan, terminal, irigasi, layananairminumdansanitasisecaraluasdanmeratasertapengelolaansumberdaya air yang berkelanjutan turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka

regulasi maupun kerangka investasimelaluiirehabilitasi dan peningkatankapasitas fasilitas infrastruktur yang rusak, serta pembangunan baru. Kerangka kebijakan regulasi dan investasi, diharapkan akan meningkatkan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur. Namun ketersediaan infrastruktur perlu ditingkatkan agar angka kecelakaan di sektor transportasi, serta lamanya pemulihan infrastruktur akibat bencana gempa, tanah longsor, banjir, yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dapat ditekan. Ketersediaan layanan infrastruktur secara lengkap dapat dilihat pada tabelberikut.

Tabel 2. 319
Indeks Layanan Infrastruktur

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kemantapan Jalan	Km	52,81	53,39	57,03	44,41	52,60
Rasio Jaringan Irigasi	Km/Ha	22,32	23,90	24,04	23,74	24,55
Ketersediaan Terminal dan Pelabuhan	Unit	3	3	3	3	3
Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	78,13	80,29	84,07	71,15	80,15

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari empat komponen komposit, pemantapan jalan yang memiliki capaian kinerja tertinggi dan capaian kinerja terendah dicapai oleh ketersediaan terminal dan pelabuhan.

Infrastruktur jalan merupakan instrumen penting untuk mengakselerasi perwujudan posisi Kabupaten Sinjai sebagai pilar utama pembangunan nasional. Infrastruktur jalan yang berkualitas akan berdampak langsung terhadap efisiensisektor-sektorlainnyasebagaiakibatdariterinduksinyabiayatransportasidan meningkatnya waktu tempuh, yang pada akhirnya akan mendorong akselerasi kesejahteraan masyarakat. Walaupun pada kenyataannya, jumlah panjang jalan kondisi mantap meningkat secara signifikan. pembangunan transportasi jalan di Kabupaten Sinjai, kondisi jalan tidak mengalami perubahan panjang jalan dimana kondisi jalan baik pada tahun 2016 adalah 52,80 persen dan meningkat pada tahun 2018 sebesar 57,03 persen. Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 44,41 persen, hingga tahun 2020 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap sebesar 52,60 persen.

Tabel 2.320
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
Panjang Jalan Kondisi baik	Km	485,48	486,10	564,57	386,14	544,38
Panjang jalan Keseluruhan	Km	1.256,91	1.256,91	1.256,91	1.256,91	1.256,91
Proporsi Jalan kondisi baik	%	38,62	38,67	44,92	30,72	43,31
Mantap	Km	663,70	671,11	716,78	558,19	661,08
Tidak Mantap	Km	593,21	585,80	540,13	698,72	595,83
Proporsi kondisi jalan mantap	%	52,80	53,39	57,03	44,41	52,60

Sumber : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai, Tahun 2021

2.7. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menerangkan bahwa SPM

2.7.1. SPM Dinas Pendidikan

2.7.1.1. Pendidikan Dasar

Berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menerangkan bahwa SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal dan Dinas Pendidikan selaku pelaksana pelayanan Dasar memiliki 3 jenis pelayanan Dasar hal ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Tabel 2.321
Pendidikan Dasar
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	INDIKATOR	Target Nasional	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Prosentase Jumlah warga Megara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasa (SD/MI, SMP/MTs)	100 %	99,00	100	100	96,38	99,58

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.7.1.2. Pendidikan Kesetaraan

Jenis pelayanan dasar yang kedua adalah Penerimaan Pelayanan Dasar SPM Pendidikan kesetaraan untuk tahun 2019 Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan sebanyak 153,79 Persen sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 73,12 persen. Hal ini disebabkan karena adanya anak yang putus sekolah yang tidak mau lagi melanjutkan pendidikannya juga karena adanya anak yang putus sekolah yang terlanjur bekerja dan ikut orang tuanya.

Tabel 2.322
Pendidikan Kesetaraan
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	Target Nasional	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	Bukan SPM 2013-2018	Bukan SPM 2013-2018	Bukan SPM 2013-2018	153,79	73,12

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.7.1.3. Pendidikan Anak Usia Dini

Jenis pelayanan dasar yang ketiga adalah penerimaan pelayanan Dasar Pendidikan Anak USia Dini pencapaiannya adalah untuk tahun 2019 mencapai 95,37% dan tahun 2020 mencapai 95,51 persen walau mengalami peningkatan namun belum mencapai target yaitu 100%.

Dari ketiga indicator SPM belum ada yang memenuhi target hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu:

1. Rendahnya kemampuan Daerah membiayai penyelenggaraan Pelayanan Dasar sebagaimana yang diatur dalam SPM
2. Rendahnya komitmen dan kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan SPM
3. Penerbitan regulasi dan surat edaran tidak cukup untuk menjadikan kepedualian terhadap pelaksanaan SPM
4. Rendahnya Monitoring dan Evaluasi

Tabel 2.323
Pendidikan Anak Usia Dini
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	Target Nasional	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah warga Megara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	91,51	96,52	97,56	95,37	95,51

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.7.2. SPM Dinas Kesehatan

2.7.2.1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan Kesehatan Ibu hamil tidak mencapai target karena Penentuan Sasaran Pusdatin lebih tinggi dari data riil yang ada dilapangan.Walaupun kenyataannya semua ibu hamil terlayani sesuai Standar.

Tabel 2.324
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	Target Nasional	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Jumlah ibu hamil yang mendapat layanan kesehatan	100 %	87.73	90.76	88.36	95.1	90.79

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.7.2.2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin tidak mencapai target karena Penentuan Sasaran Pusdatin lebih tinggi dari data riil yang ada dilapangan.Walaupun kenyataannya semua ibu bersalin terlayani sesuai Standar.

Tabel 2.325
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	Target Nasional	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	89.84	95	99,28	100	97,13

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.7.2.3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Tabel 2.326
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	Target Nasional	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020

1	Persentase jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	122,67	98,68	98,21	104	101,27
---	--	-------	--------	-------	-------	-----	--------

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.7.2.4. Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan balita mengalami penurunan pada tahun 2020 karena adanya pandemi Covid 2019 sehingga Posyandu diliburkan. Dimana Posyandu merupakan sarana penyumbang tertinggi pencapaian pelayanan kesehatan Balita.

Tabel 2.327
Pelayanan Kesehatan Balita
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	Target Nasional	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	85,28	83,51	54,32	53,72	19,46

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.7.2.5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar di Kabupaten Sinjai mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pengaruh pendami covid-19 sehingga siswa tidak masuk sekolah atau tatap muka dengan guru. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.328
Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	Target Nasional	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	70,23	70,20	94,36	83	33,50

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.7.2.6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kabupaten Sinjai Skrining Usia Produktif belum maksimal, Karena keterbatasan anggaran untuk pengadaan Bahan Medis Habis Pakai yang merupakan BMHP untuk penegakan Diagnosa walaupun ditahun 2020 sudah mencapai target.

Tabel 2.329
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Kab. Sinjai Tahun 2014-2017

NO	INDIKATOR	Target Nasional	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jumlah warna Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	-	33,94	10,14	21,59	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.7.2.7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Pelayanan kesehatan usia lanjut bahan medis habis pakai tidak Mencukupi anggaran, keluarga yang tidak mendukung dan lansia berkunjung kefasilitas kesehatan swasta dan pelayanan kesehatan pada usia lanjut mengalami peningkatan pada tahun 2020 disebabkan tingkat kepedulian masyarakat khususnya Usia lanjut sudah meningkat dalam hal pemanfaatan Posyandu Lansia

Tabel 2.330
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	Target Nasional	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jumlah warga Negara uisa lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	22,97	42,65	58,18	21,59	62,39

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.7.2.8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi di Kabupaten Sinjai masih kurang pencapaian masih dibawah target, hal ini disebabkan oleh Pelaksanaan Deteksi dini Baru 6,81 % karena kekurangan tenaga untuk petugas penyakit tidak menular

Tabel 2.331
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	Target Nasional	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jumlah warga Negara penderita hepertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	-	100	12,53	12,45	6,81

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.7.2.9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus masih dibawah target pencapaiannya karena belum ada intervensi yang spesifik untuk penderita baru dan pada tahun 2020 pencapaian 98,17 karena pemanfaatan Pos pelayanan terpadu sudah maksimal. Pencapaian tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga pelayanan di pos pelayanan terpadu tidak dilaksanakan.

Tabel 2.332
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	Target Nasional	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jumlah warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	-	100	15,60	98,17	60,25

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.7.2.10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat pencapaiannya dibawah target karena adanya Pandemic sehingga tidak ada pelayanan kunjungan rumah .

Tabel 2.333
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	Target Nasional	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jumlah warga Negara usia pendiidkan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	-	100	100	68,63	79,24

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.7.2.11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis mengalami penurunan karena Adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sehingga ada ketakutan masyarakat untuk berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Tabel 2.334
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	Target Nasional	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jumlah warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	100	100	61,80	50,37	20,42

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.7.2.12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Pelayanan kesehatan orang dengan Resiko terinfeksi Virus pencapaiannya tidak mencapai target karena Adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) keadaan ini berdampak terhadap petugas yang tugasnya melakukan Skrining sasaran tidak bisa melaksanakan tugasnya karena petugas harus melakukan skrining kontak Covid 19.dimana fasilitas kesehatan kekurangan tenaga Skrining.

Tabel 2.335
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	Target Nasional	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Prosentase jumlah warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang mendapat kan layanan kesehatan	100 %	-	100	100	163,95	4,87

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.7.3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.7.3.1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Pelayanan dasar dalam standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan urusan Pemerintah wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintah wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar yang selanjutnya Menjadi jenis SPNM, Salah satunya menjadi Jenis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Jenis Pelayanan dasar SPM Bidang pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah :

1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari
2. Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air limbah Domestik.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis Pelayan Dasar sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam standar Teknis, Yang sekurang – kurangnya memuat :

- a. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan, atau Jasa.
- b. Petunjuk teknis atau tata cara Pemenuhan Standar.

Untuk Capaian Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari – hari, Proporsi Rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Peningkatan ini didukung Oleh pengalokjasian dana DAK Penugasan Bidang Air Minum, DAK Reguler Bidang Air Minum, Pembangunan Jaringan Perpipaam SPAM Perkotaan melalui Dana Insentif Daerah (DID) Serta Dana yng tersumber dari APBN yaitu Kegiatan PAMSIMAS.

Untuk tahun 2020 persentase Penduduk Berakses Air Minum mengalami peningkatan dari 74.05 menjadi 75.65, Kondisi ini dicapai dengan adanya Pelaksanaan kegiatan pengembangan Jaringan Perpipaam sambungan rumah untuk tiap rumah tangga yang tersebar di 3 Kecamatan, di 5 Desa yang ada di Kabupaten Sinjai. Kegiatan ini merupakan Kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Ketiga yang nantinya akan diserahkan kemasyarakat.

Tabel 2.336
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
Kab. Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase jumlah warga Negara yang memeproleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	-	71,10	71,78	74,06	75,65

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.7.3.2. *Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik*

Untuk Capaian penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik mengalami Peningkatan dari tahun ketahun. Peningkatan ini didukung oleh Kegiatan DAK Penugasan Bidan Sanitasi Serta kegiatan Peyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah.

Untuk tahun 2020 persentase penduduk yang berakses Sanitasi meningkat dari 88,46 menjadi 88,50. Peningkatan yang tidak Signifikan ini disebabkan adanya beberapa paket Pekerjaan yng dihilangkan.

Pelaksanaan Kegiatan Sanitasi di tahun 2020 yaitu pelaksanaan Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal (5-10 KK) yang tersebar dibeberapa Desa di Kabupaten Sinjai diantaranya Desa Tongke-Tongke, Desa Sanjai, Desa Bontosalama, Desa Bulukamase, Desa Bonto Katute, Desa Kanrung, dan Desa Puncak. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diwakelolakan melalui kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang di dampingi Fasilitator yang hasilnya akan diserahkan ke Masyakat sendiri

Tabel 2.337
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
Kab. Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	-	86,80	87,97	88,46	88,50

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.7.4. SPM Perumahan

2.7.4.1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten dari prosentase Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang ditarget 100 persen. Dengan capaian prosentase jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni capaian 100 persen, capaian ini didukung dengan pendataan rumah layak huni yang dilaksanakan pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai.

Tabel 2.338
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi
Korban Bencana Kab/Kota Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.7.4.2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten

Prosentase Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 0 persen capaian ini tidak menggambarkan karena pada tahun 2020 tidak ada program pemerintah daerah yang mengharuskan merelokasi.

Tabel 2.339
Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena
Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100 %	100	100	100	100	-

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.7.5. SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar

2.7.5.1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) sejak tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Berdasarkan jumlah kejadian baik yang di laporkan oleh masyarakat maupun yang teridentifikasi oleh satuan polisi pamong praja sebagai penegahkan Peraturan Daerah telah melakukan upaya penyelesaian pelanggaran Ketertiban, ketentraman, keindahan. Hal ini di dasarkan pada program dan kegiatan yang dilaksanakan baik yang sifatnya mitigasi maupun penindakan. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.340
Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum
Kabupaten Sinjai, Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Prosentase Jumlah pelanggaran K3 yg di laporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	100 %	112,21	129,15	182,12	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pomong Praja dan Damkar Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.7.5.2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana berdasarkan SPM, dilaksanakan mulai tahun 2019, sebagaimana dasar pelaksanaan sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal sub urusan bencana Kabupaten, yang ditetapkan pada tanggal 29 oktober 2018, sehingga

pelaksanaannya efektif pada tahun 2019. Adapun pelayanan informasi yang diberikan berupa sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana Kabupaten perjenis bencana serta penyusunan kajian resiko bencana Kabupaten.

Tabel 2.341
Pelayanan Informasi Rawan Bencana
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Prosentase Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	-	-	-	13,13	89,66

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.7.5.3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten Sinjai di laksanakan mulai pada tahun 2019 , sebagaimana dasar pelaksanaan sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal sub urusan bencana Kabupaten, yang ditetapkan pada tanggal 29 oktober 2018, sehingga pelaksanaannya efektif pada tahun 2019. Adapun jenis layanan yang diberikan berupa pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana serta pusdalops.

Tabel 2.342
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Prosentase Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	-	-	-	12,12	86,66

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.7.5.4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Sinjai selama tahun 2016-2020 telah memberikan layanan bagi korban bencana pada setiap kejadian bencana, dimana hamper setiap kejadian bencana, direspon dengan baik melalui layanan dari tim reaksi cepat yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun oleh tim terpadu yang dibentuk hamper setiap tahun melalui dengan keputusan Bupati Sinjai dengan melibatkan stakeholder terkait. Adapun gambaran pelayanan yang diberikan tercermin dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.343
Pelayanan Penyelamat dan Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Prosentase Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana	100 %	-	-	-	100	100

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.7.5.5. *Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran*

Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kabupaten Sinjai tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan bertambahnya armada pada wilayah terjangkau yang di posisikan pada 3 kecamatan untuk menjangkau pelayanan bencana kebakaran di luar wilayah perkotaan. Dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 2.344
Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Bencana Kebakaran
Kabupaten Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Prosentase Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100 %	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73

Sumber : Satuan Polisi Pomong Praja dan Damkar Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.7.6. **SPM Dinas Sosial**

2.7.6.1. *Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti*

Rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti di Kabupaten Sinjai belum memenuhi target. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah keluarga manfaat (KPM) dari program keluarga harapan (PKH) dari 8.302 KK menjadi 10.201 KK. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.345
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang tertangani	100 %	-	14,24	18,83	15,01	19,79

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.7.6.2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti

Rehabilitasi sosial dasar anakterlantar di luar panti di Kabupaten Sinjai belum memenuhi target. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah keluarga manfaat (KPM) dari program keluarga harapan (PKH) dari 8.302 KK menjadi 10.201 KK. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.346
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase anak terlantar yang tertangani	100 %	-	4,62	83,45	75,49	73,75

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.7.6.3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti di Kabupaten Sinjai belum memenuhi target. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah keluarga manfaat (KPM) dari program keluarga harapan (PKH) dari 8.302 KK menjadi 10.201 KK. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.347
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase lanjut usia terlantar yang tertangani	100 %	-	1,8	42,70	53,34	56,43

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.7.6.4. *Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti*

Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti di Kabupaten Sinjai sudah sesuai dengan standar pelayanan minimal. Hal ini di dasarkan pada penanganan gelandangan dan pengemis yang ditemukan / dilaporkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Sinjai segera dilakukan pelayanan / penanganan yang maksimal. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.348
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya
Gelandangan dan Pengemis diluar Panti
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase gelandangan dan pengemis yang tertangani	100 %	-	-	-	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.7.6.5. *Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten*

Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten sudah sesuai standar pelayanan minimal. Hal ini didasarkan pada penanganan korban bencana alam dan sosial yang dilaporkan kepada Dinas Sosial Kabuapten Sinjai segera dilakukan penanganan yang maksimal. Dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.349
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan
Paska Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	TAHUN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase korban alam dan sosial yang tertangani	100 %	-	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, Tahun 2021

2.8. **TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN / SUISTAINABLE DEVELOPMENTGOALS (TPB/SDGs)**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup

serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Regulasi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals TPB/SDGs telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesenjangan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Kabupaten. Target-target SDGs di tingkat Kabupaten telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator yang terukur serta dukungan pembiayaannya.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana digambarkan pada kondisi pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Sinjai seperti yang dihasilkan pada laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Sinjai dengan rincian sebagai berikut :

- a. Indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional sebanyak 94 indikator (47%)

- b. Indikator yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 94 indikator (27%)
- c. Indikator yang belum dilaksanakan sebanyak 10 indikator (5%)
- d. Indikator yang tidak ada sebanyak 42 indikator (21%)

Tabel. 2. 350
Capaian Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Sinjai Tahun 2017-2020

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Capaian TPB/SDGs		
					2018	2019	2020
Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN							
Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial	%	9,24	9,28	9,14	9
Target 1.3. Menerapkan secara nasional system dan upaya perlindungan social yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada Tahun 2030 mencapai cakupan substansi bagi kelompok miskin dan rentan							
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan	%	75	97	95	100
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan .	Dinas Koperasi, UKM dan tenaga	orang	100	831	2.833	3.306

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Capaian TPB/SDGs		
					2018	2019	2020
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan .	Dinas Sosial	KPM	8500	8431	8320	-
Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan control atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro							
1.4.1.(a)	Persentase perempuan yang pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan .	Dinas Kesehatan	%	90	93,7	99,2	100
1.4.1.(b)	Persentase Anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan	%	90	68,4	79,86	84,72
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	DP3AP2KB	%	73	38,3	38,3	38,40

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Capaian TPB/SDGs		
					2018	2019	2020
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas PUPR	%	71,10%	72,04	74,25	75,64
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas PUPR	%	86,80	87,97	88,46	88,5
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendidikan	%	99,02	100	99,12	99,12
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendidikan	%	78,77	75,06	73,39	73,52
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	%	100	99,31	99,64	100
Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN							
Target 2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.							

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Capaian TPB/SDGs		
					2018	2019	2020
2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence Of Undernourishment)	Dinas Ketahanan Pangan	%	-	17,80	11,80	11,50
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Dinas Kesehatan	%	18	0,80	2,90	18,00
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Ketahanan Pangan	%	8,66	1,24	1,19	1,14
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Dinas Ketahanan Pangan	kkal/kapita/hari	-	2.173,70	200,60	2.247,30
Target 2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.							
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Dinas Kesehatan	%	43,70	35,80	8,40	30,00

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Capaian TPB/SDGs		
					2018	2019	2020
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Dinas Kesehatan	%	43,70	35,80	8,40	30,00
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Dinas Kesehatan	%	10,00	0,80	3,50	4,00
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan	%	10,00	7,60	11,06	< 15
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas Kesehatan	%	80,00	73,00	85,90	80,00
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	DINAS KETAHANAN PANGAN	Skor	86,80	Skor PPH = 87,5, Tingkat Pangan hewani = 24,00	Skor PPH = 88,2, Tingkat Pangan hewani = 24,00	Skor PPH = 88,7, Tingkat Pangan hewani = 24,00
Target 2.3 : Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.							

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Capaian TPB/SDGs		
					2018	2019	2020
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	%	-	44,24	48,89	50,79
Target 2.4 : Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.							
2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Ha	13.593	13.593	13.593	13.593
Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA							
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.							
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan	Kasus	6	297/100.00 KH	165/100.00 KH	4/4.450 KH
3.1.2*	Proporssi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Dinas Kesehatan	%	-	94,30	100	100

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Capaian TPB/SDGs		
					2018	2019	2020
3.1.2(a)	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	Dinas Kesehatan	%	-	93,70	99,20	100
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.							
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Kasus	21,00	2,70	16,75	20,80
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Kasus	17,54	16,94	3,30	12,71
3.2.2.(b)	Persentase Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi lengkap pada bayi	Dinas Kesehatan	%	95	93,04	94,31	100
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.							
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan	%	<1	0,01	0,009	<1/100.000 Penduduk
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Per 100.000 pddk	70	17,00	22,30	65.50

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Capaian TPB/SDGs		
					2018	2019	2020
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinas Kesehatan	per 1000 org	<1	>1/1.000	>1/1.000	>1/1.000
3.3.3.(a)	Jumlah Kecamatan Yang mencapai eliminasi Malaria	Dinas Kesehatan	Kec	9	1	1	9
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Dinas Kesehatan	%	80,00	100	100	100
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Flariasis dan Kusta)	Dinas Kesehatan	Orang		77	85	1/10.000 pddk
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta	Dinas Kesehatan	provinsi	-	-	-	1
3.3.5.(b)	Jumlah Kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	Dinas Kesehatan	Kabupaten	-	-	-	1
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.							
3.4.1.(a)	Persentase Merokok Pada Penduduk Umur 18 tahun	Dinas Kesehatan	%	PM	3,75	30,25	< 20

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Capaian TPB/SDGs		
					2018	2019	2020
3.4.1.(b)	Prevalensi Tekanan Darah tinggi	Dinas Kesehatan	%	PM	12,50	8,10	< 20
3.4.1.(c)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk umur 18 Tahun	Dinas Kesehatan	%	PM	2,56	5,08	< 20
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan	%	-	1	1	1
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.							
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Dinas Kesehatan	Sekolah (Lokasi Penyuluhan)	-	38	46	-
3.5.2.*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir	Dinas Kesehatan	Orang	-	39	12	-
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.							

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Capaian TPB/SDGs		
					2018	2019	2020
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	77,21	28.546	29.793	30.593
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	77,21	28,55	70,00	70,00
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	24,55	5,60	6,45	20,00
3.7.2*	Angka Kelahiran Pada Perempuan Umur 15-49 tahun (Age Spesific Fertiliti)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kelahiran pada perempuan umur 15-49 tahun	11,36	30,20	30,20	30,20
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	%	2,76	2,64	2,31	2,32

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Capaian TPB/SDGs		
					2018	2019	2020
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.							
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan	orang	-	0,3	0,2	21
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Org	-	232.940	262.130	259.478
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	%	100	97	95,00	100
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.							
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan	%	80	100	100	86
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.							
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan	Tenaga Medis : 100.000 Penduduk	-	75	88,00	5

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Capaian TPB/SDGs		
					2018	2019	2020
Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA							
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.							
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Dinas Pendidikan	%	-	80,00	85,00	89,97
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan	%	-	70,00	75,00	89,74
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan	%	-	75,00	79,00	81,71
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	%	113,98	115,84	115,84	112,27
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Dinas Pendidikan	%	115,35	114,54	114,54	107,23
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan	Tahun	7,06	7,29	7,48	7,75

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Capaian TPB/SDGs		
					2018	2019	2020
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.							
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Dinas Pendidikan	%	96,52	53,04	41,00	44,96
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.							
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi	Dinas Pendidikan	%	87,21	85,00	86,81	86,32
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.							
4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan	%	100	96,42	100	99,52

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Capaian TPB/SDGs		
					2018	2019	2020
4.6.1 (b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59	Dinas Pendidikan	%	100	96,42	100	99,27
Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN							
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.							
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DP3AP2KB	Dokumen (Perda/SK Bupati)	6	6	6	10
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.							
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DP3AP2KB	Orang	14	7	12	26
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DP3AP2KB	%	34	22	9	10

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Capaian TPB/SDGs		
					2018	2019	2020
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DP3AP2KB	Orang	9	2	3	10
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DP3AP2KB	%	100	100	100	100
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.							
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	DP3AP2KB		0	4,755	2,862	3,020
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	DP3AP2KB	Jumlah	0	16.269	16.061	16.426
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	BPS/DP3AP2KB	Jumlah	38,10	30,20	30,20	30,20

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Capaian TPB/SDGs		
					2018	2019	2020
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.							
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	DP3AP2KB	Orang	38	8	8	35
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	DP3AP2KB	Orang	-	3.308	3.168	6.340
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.							
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	DISKOMINFO	%	-	56,84	76,17	85,00
Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA							
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.							
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas PUPR	%	28,09	75,00	75,05	75,10

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Capaian TPB/SDGs		
					2018	2019	2020
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Dinas PUPR	Liter/Detik	-	-	700	700
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.							
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Dinas Kesehatan	%	-	6,58	6,39	6,69
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas PUPR	%	90,00	75,00	75,05	75,10
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan	Desa/Kel	43	77	80	80
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Kesehatan	Desa/Kel	43	44	61	80

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Capaian TPB/SDGs		
					2018	2019	2020
6.2.1.(e)	Jumlah Kecamatan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	Dinas PUPR	Kec	-	-	4,00	-
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas PUPR	RT	-	600	300	-
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.							
6.3.1.(a)	Jumlah Kecamatan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Dinas PUPR	Kec.	-	1	1	1
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Dinas PUPR	%	-	0,23	0,26	0,30
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Dinsa Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	68,75	86,88	93,13	83,75

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Capaian TPB/SDGs		
					2018	2019	2020
Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA							
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Badan Pusat Statistik (BPS), BAPPEDA	%	7,23	7,44	6,12	1,55
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Badan Pusat Statistik (BPS), BAPPEDA	Juta	37,89	41,88	44,9	46,15
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.							
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	%	7,20	64,83	95,59	95,61
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	%	30,00	1,05	1,11	1,20
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	%	59,65	24,28	64,99	65,82

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Capaian TPB/SDGs		
					2018	2019	2020
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	46,20	45,03	45,97	47,70
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.							
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Rp.	-	-	89.500	97.000
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	%	4,53	2,14	2,28	2,65
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	%	0	46,46	43,93	93,00
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.							
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	%	24,8	65,45	72,41	--
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	%	-	0,36	0,38	0,38

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Capaian TPB/SDGs		
					2018	2019	2020
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Org	30	25	25	0
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Org	39.324	84.581	44.997	134.516
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rupiah	582.919.500	#####	658.110.000	476.026.000
8.9.2.*	Jumlah pekerja pada industri perawisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Dinas Koperasi	orang	-	79	93	107
Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI							
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.							
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dinas Perhubungan	Unit	1	1	1	1
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan kedalam rantai nilai dan pasar.							
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Dinas Perdagangan	%	-	4,51	3,65	-

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Capaian TPB/SDGs		
					2018	2019	2020
9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.							
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	DISKOMINFO	%	0	87,16	88,28	92,45
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	DISKOMINFO	%	-	87,16	88,29	91,50
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	DISKOMINFO	%	-	56,84	76,17	79,20
Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA							
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.							
10.1.1.*	Koefisien Gini	Dinas Sosial	%	13	13	5	5
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Dinas Sosial		13	13	5	5
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	DPMD	Desa Tertinggal	13	13	5	5
Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN							

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Capaian TPB/SDGs		
					2018	2019	2020
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.							
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Unit	49.248	88,84	86,62	86,21
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.							
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup	%	24	42,58	55,47	57,29
Tujuan SDGs 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN							
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.							
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Dinas Lingkungan Hidup	Ton	-	26.598	23.194,4	21.594
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.							
12.5.1.(a)	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.	Dinas Lingkungan Hidup	Ton	-	-	4.425,79	5.092,70

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Capaian TPB/SDGs		
					2018	2019	2020
Tujuan SDGs 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN							
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.							
14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Dinas Perikanan	Org	1.019	606	847	897
Tujuan SDGs 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLAH HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI							
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.							
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Lingkungan Hidup	%		29,25	N/a	N/a
Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN							
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.							

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Capaian TPB/SDGs		
					2018	2019	2020
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	DP3AP2KB	%	-	3	18	10
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DP3AP2KB	%	-	10	10	20
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	DP3AP2KB	%	-	2	4	2
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.							
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Badan Pusat Statistik (BPS), Inspektorat	%	-	96,14	-	-
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.							
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BAPPEDA	%	100	100	100	100

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Capaian TPB/SDGs		
					2018	2019	2020
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BPK-RI PERWAKILAN MAKASSAR & INSPEKTORAT	%	100	100	100	100
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bagian Organisasi Setdakab Sinjai	Predikat	B	B	B	B
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Bagian Barang & Jasa Setdakab Sinjai	%	21	45,6	80,82	85,85
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bagian Organisasi Setdakab Sinjai	%	75,13	57,11	57,25	61,50

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Capaian TPB/SDGs		
					2018	2019	2020
16.6.2.(a)	Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota)	Bagian Organisasi Setdakab Sinjai	%	-	80,82	81,52	82,30
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.							
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Sekretariat Dewan	%	30	24,13	26,67	26,67
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah	%	10	6,757	6,456	4.064
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.							
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	%	100	99	100	100

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Capaian TPB/SDGs		
					2018	2019	2020
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	%	-	90,48	95,04	95,05
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	%	100	99,31	99,64	100
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.							
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah	1	0	0	1
Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN							
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.							
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Badan Pendapatan Daerah	%	-	11,19	10,37	9,89

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Capaian TPB/SDGs		
					2018	2019	2020
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Badan Pendapatan Daerah	%	-	0,16	0,15	0,13
17.1.2.*	Proporsi Anggaran domestik yang di danai oleh pajak domestik	Badan Pendapatan Daerah	%	-	16,62	16,05	16,23
17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.							
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Dinas Komunikasi dan Informatika	%	23,2	28,38	37,11	37,11
17.8.1.(a)	Persentase Kabupaten 3 Titik yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet	Dinas Komunikasi & Informatika	Titik	-	40	40	45
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.							
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Badan PusatT Statistik (BPS)	%	0	98,21	100	100

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Capaian TPB/SDGs		
					2018	2019	2020
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Badan PusatT Statistik (BPS)	%	0	81,48	78,79	78,79
17.18.1.(c)	Jumlah Metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam sistem informasi rujukan Statistik (SiruSa)	Badan PusatT Statistik (BPS)	Kegiatan	32	38	38	38
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Bappeda	%	-	48	54	100
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.							
17.19.2.(b)	Tersedianya data registtrasi terkait kelahiran dan kematian (vital statistik register)	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Badan PusatT Statistik (BPS)	Pengunjung	5.986	7.248	6.529	6.529

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline (2017)	Capaian TPB/SDGs		
					2018	2019	2020
17.19.2.(d)	Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Badan PusatT Statistik (BPS)	%	0	98,61	98,75	98,75

2.9 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Sinjai Tahun 2016 - 2023

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Sinjai sebagai hasil capaian Tahun 2016 - 2020 di mana indikator yang diukur untuk menilai kinerja pembangunan pemerintah tahun 2016-2023 sebanyak 289 indikator dan untuk indicator SPM sebanyak 29 indikator. Indikator yang belum tercapai sebanyak 121 indikator, indikator yang sesuai sebanyak 68 indikator sedangkan indicator yang melampaui sebanyak 80 indikator, indikator yang N/A sebanyak 20 indikator sedangkan untuk SPM indikator yang belum tercapai sebanyak 22 indikator, indicator yang sesuai sebanyak 6 indikator dan indicator yang melampaui sebanyak 1 indikator. Dapat dilihat pada berikut :

Tabel.2.351
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.1.	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
2.2	ASPEK KESEJAHTRAAN MASYARAKAT								
2.2.1.	KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI								
2.2.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,09	7,23	7,44	6,12	1,55	7 - 9	Belum Tercapai (<)
2.2.1.2.	Inflasi	%	1,5	5,54	4,69	1,64	1,89	3 - 4	Belum Tercapai (<)
2.2.1.3.	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	Rp Juta	34,61	37,89	41,88	44,9	46,15	38 - 42	Melampaui (>)
2.2.1.4.	Rasio Gini	Indeks	0,429	0,376	0,369	0,354	0,372	0,2 - 0,4	Sesuai (=)
2.2.1.5.	Indeks Ketimpangan Williamson	Poin	0,162	0,139	0,160	0,172	0,182	0,182	Sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.2.1.6.	Prosentase Penduduk dan garis kemiskinan	%	9,14	9,24	9,28	9,14	9,00	8 - 9	Sesuai (=)
2.2.1.7.	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	%	9,39	8,81	8,64	0,01	0,01	0,01	Sesuai (=)
2.2.1.8.	Indeks Pelayanan Publik	Poin	77,80	79,05	80,82	81,52	81,68	81,68	Sesuai (=)
2.2.1.10.	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	7,08	10,59	8,38	9,01	8,98	8,70	Melampaui (>)
2.2.1.11.	Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf / Angka	B	BB	BB	A	CC	BB	
			71,85	75,13	76,5	80,01	56,57	77,50	Belum Tercapai (<)
2.2.1.13.	SAKIP	Huruf	CC	B	A	B	B	B	Sesuai (=)
2.2.1.14.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP *	WTP	Sesuai (=)
2.2.1.15.	Prosentase dari cadangan pangan wajib daerah 100 Ton	%	24	24	24	24	24	NA	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.2.1.16.	Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB	%	46,31	46,48	44,64	44,07	43,06	45,52	Belum Tercapai (<)
2.2.1.17.	Kontribusi Sektor Pertanian Komoditi Palawija terhadap PDRB	%	9,17	8,97	8,53	7,69	7,08	15,55	Belum Tercapai (<)
2.2.1.18.	Produksi komoditas sektor pertanian	Ton	142,128	141,552	138,671	149,187	126,198	167,429	Belum Tercapai (<)
2.2.1.19.	Kontribusi Sektor Perkebunan terhadap PDRB	%	12,95	12,62	12,34	11,39	11,53	10,37	Melampaui (>)
2.2.1.20.	Kontribusi Produksi Kelompok Tani	%	84,08	87,09	89,34	88,42	83,85	84,58	Belum Tercapai (<)
2.2.1.21.	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,08	Belum Tercapai (<)
2.2.1.22.	Kontribusi sektor Pertambangan dlm PDRB	%	2,37	2,51	2,64	2,56	2,74	14,76	Belum Tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.2.1.23.	Kontribusi sektor kelautan & perikanan terhadap PDRB	%	17,74	18,56	18,16	19,06	18,58	20,24	Belum Tercapai (<)
2.2.1.24.	Kontribusi sektor Perdagangan dalam PDRB	%	10,21	11,96	12,48	13,29	12,64	12,83	Belum Tercapai (<)
2.2.1.25.	Kontribusi sektor Industri dalam PDRB	%	2,47	2,78	2,63	2,77	2,61	4,12	Belum Tercapai (<)
2.2.2.	KESEJAHTERAAN SOSIAL								
2.2.2.1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	65,36	65,8	66,24	67,05	67,60	65-70	Sesuai (=)
2.2.2.2.	Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) AUsia 15 > Tahun Kab.Sinjai	%	89,12	89,19	90,70	90,70	99,27	NA	
2.2.2.3.	Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Sinjai	%	7,06	7,28	7,29	7,48	7,75	7-10	Sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.2.2.4.	Harapan lama sekolah (HLS)	%	12,83	12,84	12,85	12,87	13,05	12-14	Sesuai (=)
2.2.2.5.	Perbandingan Umur Harapan Hidup	%	66,54	66,61	66,83	67,17	67,30	66-70	BelumTercapai (<)
2.2.2.6.	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,01	0,02	0,01	0,01	0,03	0.01	Sesuai (=)
2.2.2.7.	Prevalensi balita gizi kurang	%	0,88	0,81	2,42	1,37	2,89	0,66	Melampaui (>)
2.2.2.8.	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	83,33	100	100	100	100	87,50	Melampaui (>)
2.2.2.9.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	-	69,61	68,80	57,40	69,9	NA	
2.2.2.10.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	-	77,94	67,66	97,72	82,44	70,00	Melampaui (>)
2.2.2.11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	-	4,53	2,14	2,28	2,65	1-4	Sesuai (=)
2.2.2.12.	Rasio penduduk yang bekerja		-	0,95	0,98	0,98	0,97	0,91	Melampaui (>)
2.2.2.13.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	Angka	83.8	87	87,5	88,2	88,7	NA	Melampaui (>)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.2.2.14.	IPG	%	-	98,01	98,07	98,2	98,02	98,22	Belum Tercapai (<)
	IDG	%	-	72,56	72,6	70,24	72,48	72,68	Belum Tercapai (<)
2.2.3.	SENI, BUDAYA DAN OLAHRAGA								
2.2.3.1.	Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam 1 Tahun	Medali	-	9	15	2	-	N/A	
2.3	ASPEK PELAYANAN UMUM								
2.3.1.	Aspek Pelayanan Dasar								
2.3.1.1.	BIDANG URUSAN PENDIDIKAN								
2.3.1.1.1	Pendidikan Anak Usia Dini	%	92,79	96,52	97,56	87,31	82,86	100	Belum Tercapai (<)
2.3.1.1.2.	Angka Partisipasi Kasar								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	SD/MI/Sederajat :	%	108,89	113,98	109,05	109,40	107,70	114,90	Belum Tercapai (<)
	SMP/MTS/Sederajat:	%	89,46	82,08	75,06	77,29	78,77	117,00	Belum Tercapai (<)
	SMA/MA/Sederajat:	%	85,53	83,82	83,75	85,25	84,95	100,00	Belum Tercapai (<)
2.3.1.1.3.	Persentase Angka Pendidikan yang Ditamatkan								
	Persentase SD/MI/Sederajat	%	97,69	93,18	88,07	98,51	90,83	100	Belum Tercapai (<)
	Persentase SMP/MTS/Sederajat	%	97,32	86,29	79,25	97,4	82,41	100	Belum Tercapai (<)
2.3.1.1.4.	Angka Partisipasi Murni (APM)								
	SD/MI/Sederajat :	%	99,5	100	100	100,96	99,36	100	Belum Tercapai (<)
	SMP/MTS/Sederajat:	%	78,27	100	99,77	100,97	95,20	100	Belum Tercapai (<)
2.3.1.1.5.	Angka partisipasi Sekolah								
	Angka partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	88,16	87,79	102,39	107,46	99,87	115,00	Belum Tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Angka partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	59,69	74,54	100,06	116,82	99,54	115,90	Belum Tercapai (<)
2.3.1.1.6.	Angka Putus Sekolah								
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,02	0,02	0,01	0,36	0,02	N/A	
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,2	0,07	0,09	02,08	0,23	N/A	
2.3.1.1.7.	Angka Kelulusan								
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99,75	99,81	98,36	98,51	99,01	100	Belum Tercapai (<)
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99,16	99,36	98,36	97,40	99,14	100	Belum Tercapai (<)
2.3.1.1.8.	Angka Melanjutkan (AM);								
	Angka Melanjutkan (AM)dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	97,6	102,46	106,80	114,91	100	Melampaui (>)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA /SMK/MA	%	105,31	-	-	107,92	-	N/A	
2.3.1.1.9.	Fasilitasi Pendidikan	%							
	Peresentase Sekolah Pendidikan SD/MI	%	89,26	83,54	69,01	84,5	86,86	85,00	Belum Tercapai (<)
	Prosentase Sekolah Pendidikan SMP/MTs & SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	%	100	83,33	60,47	84,75	86,21	80,00	Belum Tercapai (<)
2.3.1.1.10.	Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar								
	Rasio SD/MI		0,009	0,01	0,011	0,01	0,01	1	Belum Tercapai (<)
	Rasio SMP/MTS		0,005	0,007	0,007	0,005	0,007	1	Belum Tercapai (<)
2.3.1.1.11.	Rasio Guru/Murid Jenjang Pendidikan Dasar		0,092	0,05	0,05	0,08	0,09	0,01	Melampaui (>)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.1.1.12.	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Perempuan & Laki-laki	%	100	100	-	41,56	31,83	N/A	
2.3.1.1.13.	Penduduk yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara)	%	100	100	96,42	98,51	99,27	100	Belum Tercapai (<)
2.3.1.1.14.	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV								
	Rasio SD/MI		0,99	1,00	1,00	0,93	0,92	100	Belum Tercapai (<)
	Rasio SMP/MTs		1,00	1,00	1,00	0,97	0,93	100	Belum Tercapai (<)
2.3.1.2.	BIDANG URUSAN KESEHATAN								
2.3.1.2.1.	Angka Kematiaan Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran hidup	Bayi	18,82	17,54	16,94	3,30	12,71	64,00	Belum Tercapai (<)
2.3.1.2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi	bayi	981	982	983	997	983	985,12	Belum Tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.1.2.3.	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	balita	56,45	21,00	2,70	16,75	20,80	70,00	Belum Tercapai (<)
2.3.1.2.4.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	bayi	4,64	1,24	1,23	0,78	0,86	0,47	Melampaui (>)
2.3.1.2.5.	Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	Ibu Hamil	2,93	1,48	2,95	1,65	0,92	98,77	Belum Tercapai (<)
2.3.1.2.6.	Rasio posyandu persatuan balita		0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	1,8.93	Belum Tercapai (<)
2.3.1.2.7.	Rasio Puskesmas Persatuan		0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	Sesuai (=)
	Rasio poliklinik persatuan		0,530	0,368	0,358	0,023	0,022	0,36	Belum Tercapai (<)
	Rasio pustu persatuan penduduk		0,25	0,25	0,24	0,23	0,23	0,23	Sesuai (=)
2.3.1.2.8.	Rasio dokter persatuan penduduk		0,16	0,24	0,12	0,16	0,14	0,45	Belum Tercapai (<)
2.3.1.2.9.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk		0,004	0,002	0,002	0,002	0,002	3,39	Belum Tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.1.2.10.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	83,58	116,67	116,15	89,79	72,48	100,00	Belum Tercapai (<)
2.3.1.2.11.	Cakupan desa/ kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	%	98,75	100	100	100	51,25	100,00	Belum Tercapai (<)
2.3.1.2.12.	Cakup balita Gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100,00	Sesuai (=)
2.3.1.2.13.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	0,003	0,006	0,001	0,007	-	0,03	Belum Tercapai (<)
2.3.1.2.14.	Cakupan Balita pnemonia yang ditangani	%	0,48	0,22	30,7	-	0,32	100,00	Belum Tercapai (<)
2.3.1.2.15.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	10,87	66,18	67,88	13,36	23,14	100,00	Belum Tercapai (<)
2.3.1.2.16.	Tingkat prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk	%	81,36	172,59	158,07	169,97	64,48	0,14	Melampaui (>)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.1.2.17.	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 Penduduk	2,09	7,52	4,23	9,40	5,60	2,69	Melampaui (>)
2.3.1.2.18.	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	100	100	100	100	100	100,00	Sesuai (=)
2.3.1.2.19	Proporsi kasus tuberkulosis yang di obati dan sembuh dalam program DOTS	%	100	100	100	100	31,52	100,00	Belum Tercapai (<)
2.3.1.2.20	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100,00	Sesuai (=)
2.3.1.2.21	Rasio Angka kejadian malaria	%	11,68	14,25	13,08	9,78	5,21	0,14	Belum Tercapai (<)
2.3.1.2.22	prevalensi HIV/AIDS (persen) dari totalpopulasi	%	0,011	0,011	0,011	0,011	0,007	0,02	Sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.1.2.23	Proporsi jumlah penduduk 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	60,00	65,00	99,99	8,97	8,97	100,00	Belum Tercapai (<)
2.3.1.2.24	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	-	3,18	65,85	7,40	49,26	100,00	Belum Tercapai (<)
2.3.1.2.25	Cakupan Kunjungan bayi	%	123,09	134,37	97,08	-	99,35	95,07	Melampaui (>)
2.3.1.2.26	Cakupan pembantu puskesmas	%	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	Sesuai (=)
2.3.1.2.27	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	%	87,75	90,82	90,16	90,16	88,15	91,75	Belum Tercapai (<)
2.3.1.2.28	Cakupan pelayanan nifas	%	89,84	94,80	99,88	99,34	96,47	96,83	Belum Tercapai (<)
2.3.1.2.29	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang tangani	%	63,19	65,90	74,09	62,42	55,56	100,00	Belum Tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.1.2.30	Cakupan Pelayanan anak balita	%	104,56	84,51	56,69	54,92	44,26	100,00	Belum Tercapai (<)
2.3.1.2.31	cakupan pemberian makanan pendapatan ASI pada anak usia 6 -24 bulankeluarga miskin	%	100	100	100	100	100	100,00	Sesuai (=)
2.3.1.2.32	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	70,23	70,23	81,00	88,48	33,50	93.48	Belum Tercapai (<)
2.3.1.2.33	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	58,05	18,04	65,85	88,08	49,25	100,00	Belum Tercapai (<)
2.3.1.2.34	Cakupan pelayanan gawat darurat level Iyang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	6,744	5,932	5,932	10,036	3,303	228,90	Belum Tercapai (<)
2.3.1.2.35	Cakupan desa kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikanepidemiologi , 24 jam	%	100	100	100	100	100	100,00	Sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.1.3.	BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
2.3.1.3.1.	Proporsi jalan dalam kondisi baik	%	38,63	38,67	44,92	30,72	43,31	0,50	Melampaui (>)
2.3.1.3.2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	Km/ jumlah penduduk	0,0052	0,0049	0,0048	0,0047	0,0047	0,0047	Sesuai (=)
2.3.1.3.3.	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	38,63	38,67	44,92	30,72	43,31	43,31	Sesuai (=)
2.3.1.3.4.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	82,00	86,8	87,97	88,46	88,50	100,00	Belum Tercapai (<)
2.3.1.3.5.	Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar	%	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	19,00	Melampaui (>)
2.3.1.3.6.	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik /Pembuangan Aliran Air	%	-	80,56	81,44	81,43	81,43	86,00	Belum Tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.1.3.7.	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	7,24	7,24	7,24	4,80	4,80	46,00	Belum Tercapai (<)
2.3.1.3.8.	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	66,09	69,09	71,26	72,21	72,81	72,76	Melampaui (>)
2.3.1.3.9.	Rasio jaringan irigasi	Mater/Ha	22,32	23,9	24,04	23,74	24,55	24,97	Belum Tercapai (<)
2.3.1.3.10.	Persentase penduduk berakses air minum	%	24,83	65,23	71,78	74,06	75,65	100,00	Belum Tercapai (<)
2.3.1.3.11.	Proporsi rumah terhadap air minum layak, perkotaaan dan pedesaaan	%	-	-	65,22	74,25	75,64	100,00	Belum Tercapai (<)
2.3.1.3.12.	Persentase areal kawasan kumuh	%	0,1	0,07	0,14	0,12	0,12	N/A	
2.3.1.3.13.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		0,103	0,098	0,020	0,005	0,005	0,020	Belum Tercapai (<)
2.3.1.3.14.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk		0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,029	Belum Tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.1.3.15.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB		-	3,40	3,40	3,40	3,40	0,05	Melampaui (>)
2.3.1.3.16.	Luasan RTH Public sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan	%	168,25	176,16	176,16	176,16	176,16	33,75	Belum Tercapai (<)
2.3.1.3.17.	Rasio bangunan ber IMB		0,74	0,75	0,75	0,75	0,75	N/A	
2.3.1.3.18.	Ketaatan terhadap RTRW	%	4,35	3,7	4,35	100	100	100,00	Sesuai (=)
2.3.1.4.	BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
2.3.1.4.1.	Rasio rumah layak huni		0,19	0,19	0,19	0,18	0,18	0,20	Belum Tercapai (<)
2.3.1.4.2.	Rasio Permukiman Layak Huni		0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	Sesuai (=)
2.3.1.4.3.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	87,16	88,68	88,84	86,62	86,21	88,89	Belum Tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.1.4.4.	Persentase Pemukiman yang Tertata	%	15,19	15,19	15,2	15,22	15,23	15,22	Melampaui (>)
2.3.1.4.5.	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	0,1	0,07	0,139	0,124	0,122	0,127	Belum Tercapai (<)
2.3.1.4.6.	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	%	7,32	38,61	27,17	44,15	46,79	39,37	Melampaui (>)
2.3.1.4.7.	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	%	-	1,08	0,81	0,54	1,58	0,53	Melampaui (>)
2.3.1.4.8.	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	0,56	2,26	5,08	1,41	0,28	10,73	Belum Tercapai (<)
2.3.1.5.	BIDANG URUSAN KETENTRAMAN , KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
2.3.1.5.1.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	112,21	129,15	182,12	100	100	100	Sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.1.5.2.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	%	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	Sesuai (=)
2.3.1.5.3.	Persentase Jumlah kasus kebakaran di WMKyg tertangani dalam waktu maksimal 15 Menit	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai (=)
2.3.1.5.4.	Persentase Penegakan PERDA	%	112.21	129.15	100	100	100	100	Sesuai (=)
2.3.1.6.	BIDANG URUSAN SOSIAL								
2.3.1.6.1.	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	0,55	0,61	0,6	17,47	28,99	0,20	Melampaui (>)
2.3.1.6.2.	Persentase PMKS yang Tertangani	%	0,55	0,61	0,6	17,47	28,99	0,21	Melampaui (>)
2.3.1.6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	-	96,08	92,33	99,01	98,20	94,30	Melampaui (>)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.1.6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	0,55	1,34	1,27	0,04	-	0,15	Belum Tercapai (<)
2.3.1.6.5.	persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	100	100	100	100,00	Sesuai (=)
2.3.1.6.6.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100,00	Sesuai (=)
2.3.2.	ASPEK PELAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.2.1.	BIDANG URUSAN TENAGA KERJA								
2.3.2.1.1.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	69,36	91,86	93,79	94,14	97,94	94,77	Melampaui (>)
2.3.2.1.2.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	17,98	16,55	13,81	70,68	74,36	15,10	Melampaui (>)
2.3.2.1.3.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	61,54	74,42	-	81,36	79,45	68,97	Melampaui (>)
2.3.2.1.4.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	76,19	61,22	55,56	71,64	66,67	58,82	Melampaui (>)
2.3.2.1.5.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	72,46	76,19	65,45	72,41	64,00	69,57	Belum Tercapai (<)
2.3.2.1.6.	Rasio lulusan S1/S2/S3	Jiwa	239.689	252.627	-	265.927	268.678	N/A	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.2.2.	BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2.3.2.2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	42,38	32,97	67,13	53,48	39,03	18,60	Belum Tercapai (<)
2.3.2.2.2.	Proporsi Kursi yang Diduduki perempuan di DPR	%	26,67	26,67	23,33	26,67	26,67	16,00	Belum Tercapai (<)
2.3.2.2.3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	57,61	81,66	32,86	32,91	60,97	82,50	Belum Tercapai (<)
2.3.2.2.4.	Rasio KDRT		0,019	0,005	0,008	0,001	0,0012	0,0001	Melampaui (>)
2.3.2.2.5.	Partisipasi jumlah tenaga kerja di bawah umur	%	-	-	-	53,48	95,67	0,031	Belum Tercapai (<)
2.3.2.2.6.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	11,41	11,78	-	53,48	95,67	11,25	Belum Tercapai (<)
2.3.2.2.7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan	%	100	100	100	100	100	10,00	Sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu								
2.3.2.2.8.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	-	N/A	
2.3.2.2.9.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	28,57	-	30,00	Belum Tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.2.2.10.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai (=)
2.3.2.2.11.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	6,66	8,11	100,00	Belum Tercapai (<)
2.3.2.2.12.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	7,14	14,81	16,28	1,67	8,11	15,30	Belum Tercapai (<)
2.3.2.2.13.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	-	100	100	100	100	100,00	Sesuai (=)
2.3.2.2.14.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD		0,99	0,98	1,00	1,00	1,00	1	Sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.2.2.15.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP		1,10	0,90	1,00	1,00	0,99	1	Belum Tercapai (<)
2.3.2.3.	BIDANG URUSAN PANGAN								
2.3.2.3.1.	Ketersediaan pangan utama	%	30,12	32,92	25,79	23,24	22,62	5,00	Melapau (>)
2.3.2.3.2.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	71,43	62,00	62,00	100	100	75,00	Melapau (>)
2.3.2.4.	BIDANG URUSAN PERTANAHAN								
2.3.2.4.1.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	-	78,67	79,40	83,95	88,43	N/A	
2.3.2.5.	BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP								
2.3.2.5.1.	Tersedianya Dokumen RPPLH	Ada / Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Belum Tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.2.5.2.	Tersedianya Dokumen RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten	Ada / Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Belum Tercapai (<)
2.3.2.5.3.	Tersedianya Dokumen KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi	Ada / Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai (=)
2.3.2.5.4.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas air	%	-	65	86,88	93,13	83,75	60,00	Melampaui (>)
2.3.2.5.5.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas udara	%	-	89,92	90,27	90,97	90,94	89,30	Melampaui (>)
2.3.2.5.6.	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Point	38,79	002	002	42,86	42,86	56,10	Belum Tercapai (<)
2.3.2.5.7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	-	-	69,75	73,97	70,08	72,46	Belum Tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.2.5.8.	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung-jawab usaha /atau Kegiatan yang diawasi Ketaatannya Terhadap PPLH, PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	%	87,5	94,44	3,45	03,57	28,57	20,00	Melampaui (>)
2.3.2.5.9.	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Ada / Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Belum Tercapai (<)
2.3.2.5.10.	Persentase Timbulan Sampah yang Ditangani	%	51,62	52,90	35,29	44,98	75,06	74,00	Melampaui (>)
2.3.2.5.11.	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	%	-	-	100	100	100	22,00	Melampaui (>)
2.3.2.5.12.	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	1,43	2,37	6,8	6,8	20,34	100,00	Belum Tercapai (<)
2.3.2.5.13.	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	51,62	52,90	35,29	44,98	75,06	75,00	Melampaui (>)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.2.5.14.	Nilai TPA (Program adipura	Nilai	71	71,43	≥ 71	≥ 72	≥ 72	≥ 72	Sesuai (=)
2.3.2.6.	BIDANG URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
2.3.2.6.1.	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk		0,47	0,46	0,99	01,52	0,99	0,53	Belum Tercapai (<)
2.3.2.6.2.	Rasio Bayi Berakte Kelahiran		0,98	0,98	100	99,59	100	0,98	Melampaui (>)
2.3.2.6.3.	Rasio Pasangan Berakte Nikah		0,08	0,08	0,13	0,18	0,28	0,11	Melampaui (>)
2.3.2.6.4.	Ketersediannya data base kependudukan skala Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai (=)
2.3.2.6.5.	Penerapan KTP berbasis NIK	Sudah / Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sesuai (=)
2.3.2.6.6.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	91,11	97,49	99,66	98,76	99,52	99,69	Belum Tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.2.6.7.	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	%	98,38	98,38	100	99,59	100	98,31	Melampaui (>)
2.3.2.7.	BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
2.3.2.7.1.	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	97,01	94,03	94,03	97,01	97,01	97,01	Sesuai (=)
2.3.2.7.2.	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan	Klp	1	1	1	1	1	100,00	Sesuai (=)
2.3.2.7.3.	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Klp	47,44	47,44	65,1	70,14	70,14	65,10	Melampaui (>)
2.3.2.7.4.	Persentase LSM aktif	%	15	18,75	18,75	11,25	11,25	18,75	Belum Tercapai (<)
2.3.2.7.5.	Persentase LPM Berprestasi	%	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	Sesuai (=)
2.3.2.7.6.	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100	100.00	Sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.2.7.7.	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100	100.00	Sesuai (=)
2.3.2.7.8.	Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	20,60	25,84	25,11	29,55	1,76	34,54	Belum Tercapai (<)
2.3.2.8	BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2.3.2.8.1.	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	100	47,62	59,52	59,52	80,95	62,00	Melampaui (>)
2.3.2.8.2.	Rasio Akseptor KB	%	77,76	73,46	73,38	74,21	74,23	73,55	Melampaui (>)
2.3.2.8.3.	Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Tahun	%	77,76	73,46	73,38	74.21	74,23	73,60	Melampaui (>)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.2.8.4.	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15 – 19) Per 1.000 Perempuan usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	%	86,95	31,08	50,00	-	-	0,23	Belum Tercapai (<)
2.3.2.8.5.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun	%	2,49	2,45	0,79	-	-	6,65	Belum Tercapai (<)
2.3.2.8.6.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi	%	-	5,38	23,49	22,54	21,06	25,50	Belum Tercapai (<)
2.3.2.8.7.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	16,78	17,83	19,63	21,67	24,03	18,00	Melampaui (>)
2.3.2.8.8.	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	28,60	36,13	36,29	17,53	34,71	11,88	Melampaui (>)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.2.8.9.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	%	57,60	56,19	51,11	47,31	55,60	56,70	Belum Tercapai (<)
2.3.2.8.10.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)	%	55,04	51,86	54,53	54,99	45,89	52,20	Belum Tercapai (<)
2.3.2.8.11.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber - KB	%	52,45	47,20	48,43	47,03	4,88	47,50	Belum Tercapai (<)
2.3.2.8.12.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	-	33,33	11,11	11,11	11,11	23,22	Belum Tercapai (<)
2.3.2.8.13.	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja / mahasiswa	%	7,22	6,67	6,33	8,22	8,22	75,55	Belum Tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.2.8.14.	Cakupan PKB/PLKB yang di dayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan & Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	%	100	91,00	92,00	92,00	100	100,00	Sesuai (=)
2.3.2.8.15.	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber –KB Mandiri	%	24,48	29,46	50,76	52,98	52,98	15,60	Melampaui (>)
2.3.2.8.16.	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100,00	Sesuai (=)
2.3.2.8.17.	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	2,19	1,96	3,28	3,28	3,28	100,00	Belum Tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.2.8.18.	Persentase Faskes dan jejaringannya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan atandarnisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100	100,00	Sesuai (=)
2.3.2.8.19.	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	100	100	100	100	100	100,00	Sesuai (=)
2.3.2.8.20.	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga Melalui APBD & APBDesa	%	0,46	0,67	0,58	0,68	-	23,80	Belum Tercapai (<)
2.3.2.9.	BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN								
2.3.2.9.1.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	262.605	253.807	272.557	216.102	180.300	326.742	Belum Tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.2.9.2.	Rasio Ijin Trayek		0,003	0,002	0,002	0,001	0,005	0,004	Melampaui (>)
2.3.2.9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	%	100	100	100	100	100	100,00	Sesuai (=)
2.3.2.9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut	Pelabuhan	2	2	2	2	2	15,00	Belum Tercapai (<)
2.3.2.9.5.	Jumlah terminal bis	Terminal	1	1	1	1	1	1,00	Sesuai (=)
2.3.2.9.6.	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	1,83	1,83	1,83	2,25	2,54	1.84	Melampaui (>)
2.3.2.9.7.	Persentase Pemasangan Rambu-rambu	%	-	8,81	-	-	-	N/A	
2.3.2.9.8.	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan		0,019	0,019	0,019	0,018	0,018	0,018	Sesuai (=)
2.3.2.9.9.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	316.889	9.825.102	1.025.124	1.046.138	867.15	N/A	
2.3.2.9.10.	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	3.168.891	98.251.020	10.251.240	10.984.449	8.150.100	3.668.387,00	Belum Tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.2.10.	BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2.3.2.10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	65,55	87,78	90	90	90	N/A	
2.3.2.10.2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	92,32	92,32	92,32	92,93	93,05	100,00	Belum Tercapai (<)
2.3.2.10.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon	%	29,33	32,27	33,64	33,85	33,89	100,00	Belum Tercapai (<)
2.3.2.10.4.	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet		0,008	0,006	0,006	0,007	0,008	100,00	Belum Tercapai (<)
2.3.2.10.5.	Proporsi Rumah Tangga yang memiliki computer pribadi		0,22	0,24	0,24	0,24	0,25	N/A	Melampaui (>)
2.3.2.11.	BIDANG URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
2.3.2.11.1.	Persentase Koperasi Aktif	%	82,14	86,82	64,62	65,15	67,14	66,42	Melampaui (>)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.2.11.2.	Persentase UKM non BPR / LKM Aktif	%	-	89,47	90,04	90,54	93,90	90,69	Melampaui (>)
2.3.2.11.3.	Persentase BPR/LKM Aktif	%	75	75	75	75	-	75,00	Belum Tercapai (<)
2.3.2.11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	88,22	88,62	91,50	93,33	93,90	91,73	Melampaui (>)
2.3.2.12.	BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL								
2.3.2.12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	PMDN	6	5	8	1	1	1	Sesuai (=)
2.3.2.12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp Juta)								
	Persetujuan Nilai Investasi	Proyek	7	5	9	9	9	N/A	
		Milyar	124.359.362.000	8.150.000.000	52.332.760.000	1.000.000.000	1.000.000.000	N/A	
	Realisasi Nilai Investasi	Proyek	7	5	9	9	9	N/A	
		Milyar	124.359.362.000	8.150.000.000	52.332.760.000	1.000.000.000	1.000.000.000	N/A	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.2.12.3.	Rasio daya serap tenaga kerja		2,93	4,08	2,49	2,96	2,71	2,00	Melampaui (>)
2.3.2.12.4.	Persentase Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	%	30,37	-64,91	-68,72	25,9	6,91	2	Melampaui (>)
2.3.2.13.	BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								
2.3.2.13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100	100	100	100	100	91,00	Melampaui (>)
2.3.2.13.2	Persentase wirausaha muda	%	-	-	-	8,51	8,53	29,61	Belum Tercapai (<)
2.3.2.13.3	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100	100	100	100	94,1	100,00	Belum Tercapai (<)
2.3.2.13.4.	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	70,21	70,21	70,21	40,20	40,20	66,15	Belum Tercapai (<)
2.3.2.13.5.	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	50,00	47,62	100	100	100	80,14	Melampaui (>)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.2.13.6.	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	Atlit	-	1	1	6	-	N/A	
2.3.2.13.7.	1 Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam 1 Tahun	Medali	-	9	15	2	-	29.00	Belum Tercapai (<)
2.3.2.14.	BIDANG URUSAN STATISTIK								
2.3.2.14.1.	Tersedia Sistem Data Statistik yang Terintegrasi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai (=)
2.3.2.14.2.	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai (=)
2.3.2.14.3.	Buku PDRB	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.2.15.	BIDANG URUSAN PERSANDIAN								
2.3.2.15.1.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	N/A	
2.3.2.16.	BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN								
2.3.2.16.1	Jumlah Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Festival	3	3	3	3	1	4	Belum Tercapai (<)
2.3.2.16.2	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	62,26	96,23	94,34	91,12	91,71	155	Belum Tercapai (<)
2.3.2.16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	unit	3	3	3	3	9	11	Belum Tercapai (<)
2.3.2.16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	unit	159	159	159	105	108	107	Melampaui (>)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.2.17.	BIDANG URUSAN PERPUSTAKAAN								
2.3.2.17.1	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun		0,18	0,18	0,19	-	0,13	N/A	
2.3.2.17.2	Koleksi Buku yang Tersedia di Dalam Perpustakaan Daerah	%	0,20	0,21	0,22	0,64	0,50	50	Sesuai (=)
2.3.2.17.3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk		0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	N/A	
2.3.2.17.4	Rata-rata pengunjung perpustakaan	Orang	2,549	2,614	4,289	5,92	2,089	33,500	Belum Tercapai (<)
2.3.2.17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul	15,101	12,299	12,531	12,38	13,672	200	Belum Tercapai (<)
2.3.2.18.	BIDANG URUSAN KEARSIPAN								
2.3.2.18.1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	56,41	100	56,41	56,41	62,50	92,86	Belum Tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.2.18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kali	1	1	-	-	-	1	Belum Tercapai (<)
2.3.3.	ASPEK LAYANAN URUSAN PILIHAN								
2.3.3.1.	BIDANG URUSAN PARIWISATA								
1.1	Kunjungan Wisata	%	116,44	109,48	175	117,58	144,29	93,277	Melampaui (>)
1.2	Lama Kunjungan Wisata	Kunjungan	30,360	33,350	40,750	104,451	134,516	10,00	Melampaui (>)
2.3.3.2.	BIDANG URUSAN PERTANIAN								
2.1	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan Terhadap PDRB	%	46,31	46,48	44,64	44,07	43,06	45,52	Belum Tercapai (<)
2.2	Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) Terhadap PDRB	%	9,17	8,97	8,53	7,69	7,08	15,55	Belum Tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.2	Kontribusi Sektor Perkebunan (tanaman keras) Terhadap PDRB	%	12,95	12,62	12,34	11,39	11,53	10,37	Melampaui (>)
3.2	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	%	84,08	87,09	89,34	83,65	83,85	84,58	Belum Tercapai (<)
2.3	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	%	47,56	51,37	48,45	43,99	43,55	52,90	Belum Tercapai (<)
2.3.3.2.6.	Cakupan Bina Kelompok Petani	%	55,16	58,53	36,83	23,07	19,75	61,24	Belum Tercapai (<)
2.3.3.3.	BIDANG URUSAN PERDAGANGAN								
2.3.3.3.1.	Cakupan Bina Usaha Informal / Pedagang	%	-	-	-	-	-	5,58	Belum Tercapai (<)
2.3.3.4.	BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.3.4.1.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	42,86	11,11	10,00	7,14	-	50,00	Belum Tercapai (<)
2.3.3.5.	BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN								
2.3.3.5.1.	Produksi perikanan	%	1,11	1,24	1,16	1,05	1,01	100	Belum Tercapai (<)
2.3.3.5.2.	Konsumsi ikan	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai (=)
2.3.3.5.3.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	-	3,33	4,73	1,9	3,01	100	Belum Tercapai (<)
2.3.3.5.4.	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	%	0,004	0,007	0,001	0,007	9,96	N/A	
2.3.4.	ASPEK PENUNJANG URUSAN								
2.3.4.1.	BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.4.1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai (=)
2.3.4.1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai (=)
2.3.4.1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai (=)
2.3.4.1.4.	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai (=)
2.3.4.1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	100	98,29	99,58	100	Belum Tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.4.1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	100	100	100	100	104,98	100	Melampaui (>)
2.3.4.1.7.	Kesesuai Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai (=)
2.3.4.2.	BIDANG URUSAN KEUANGAN								
2.3.4.2.1.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sesuai (=)
2.3.4.2.2.	Persentase SILPA	%	7,13	4,14	4,18	5	7,34	7	Melampaui (>)
2.3.4.2.3.	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	32,23	28,83	26,72	33,14	28,58	22,67	Melampaui (>)
2.3.4.2.4.	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	21,52	18,48	17,15	12,5	18,21	13,42	Melampaui (>)
2.3.4.2.5.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	Persentase Jumlah Belanja Langsung	%	42,04	43,08	47,56	54,11	49,18	N/A	
	Persentase Jumlah Tidak Belanja Langsung	%	48,54	50,07	52,44	45,89	50,82	N/A	
2.3.4.2.6.	Bagi Hasil Kabupaten / Kota dan Desa	%	0,12	0,15	0,16	0,25	0,19	N/A	
2.3.4.2.7.	Penetapan APBD	Tepat waktu / Tidak Tepat Watu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Sesuai (=)
2.3.4.3.	KEPENTINGAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
2.3.4.3.1.	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	0,73	0,86	1,45	5,65	0,95	0,92	Melampaui (>)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.4.3.2.	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	18,58	14,06	21,75	-	-	98,20	Belum Tercapai (<)
2.3.4.3.3.	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	33	37	37	38	38	37	Melampaui (>)
2.3.4.3.4.	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	1,652	1,763	1,763	981	833	2,567	Belum Tercapai (<)
2.3.4.3.5.	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	Pemangku Jabatan	3,712	3,106	3,004	3,083	3,063	2,760	Melampaui (>)
2.3.4.4.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
2.3.4.4.1	Persentase implementasi rencana Kelitbangan	%	50,00	40,00	60,00	100	100	19,44	Belum Tercapai (<)
2.3.4.4.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	100	100	100	100	50,00	100	Belum Tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.4.4.3	Persentase Perangkat Daerah yang di Fasilitas Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	-	2,38	4,76	36,00	69,05	4,76	Belum Tercapai (<)
2.3.4.4.4	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	%	-	100	100	100	100	100	Sesuai (=)
2.3.4.5.	PENGAWASAN								
2.3.4.5.1	Persentase tindak lanjut temuan	%	79,44	78,22	71,02	71,08	71,28	80,00	Belum Tercapai (<)
2.3.4.5.2	Persentase Pelanggaran Pegawai	%	0,07	0,08	0,13	0,12	0,24	N/A	
2.3.4.5.3	Jumlah Temuan BPK	Temuan	26	9	9	14		9.00	Belum Tercapai (<)
2.3.4.6.	SEKETARIAT DEWAN								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.3.4.6.1	Tersedia rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Provinsi / Kab. / Kota	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai (=)
2.3.4.6.2	Tersusun dan Terintegritas program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi - fungsi pengawasan , fungsi pembentukan Perda dan fungsi RPJMD dan RKPD	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai (=)
2.3.4.6.3	Terintegritas program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan , pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan Dokumen Setwan DPRD	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.4.	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
2.4.1.	Produktivitas Total Daerah	%	8,75	23,75	45,00	45,00	45,00	100	Belum Tercapai (<)
2.4.2.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	46,37	46,20	45,03	44,07	43,06	100	Belum Tercapai (<)
2.4.3.	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	78,13	80,29	84,07	71,15	80,15	90,00	Belum Tercapai (<)
2.5.	STANDAR PELAYANAN MINAMAL (SPM)								
2.5.1.	SPM Dinas Pendidikan								
2.5.1.1.	Prosentase Jumlah warga Megara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasa (SD/MI, SMP /MTs)	%	99,00	100	100	96,38	99,58	100	Belum Tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.5.1.2.	Persentase jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	Bukan SPM 2013-2018	Bukan SPM 2013-2018	Bukan SPM 2013-2018	153,79	73,12	100	Belum Tercapai (<)
2.5.1.3.	Jumlah warga Megara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	91,51	96,52	97,56	95,37	95,51	100	Belum Tercapai (<)
2.5.2	SPM Dinas Kesehatan								
2.5.2.1.	Persentase Jumlah ibu hamil yang mendapat layanan kesehatan	%	87,73	90,76	88,36	95,1	90,79	100	Belum Tercapai (<)
2.5.2.2.	Persentase jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	89.84	95	99,28	100	97,13	100	Belum Tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.5.2.3.	Persentase jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	122,67	98,68	98,21	104	101,27	100	Melampaui (>)
2.5.2.4.	Persentase jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	85,28	83,51	54,32	53,72	19,46	100	Belum Tercapai (<)
2.5.2.5.	Persentase jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	70,23	70,20	94,36	83	33,50	100	Belum Tercapai (<)
2.5.2.6.	Persentase jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	-	33,94	10,14	21,59	100	100	Sesuai (=)
2.5.2.7.	Persentase jumlah warga Negara uisa lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	22,97	42,65	58,18	21,59	62,39	100	Belum Tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.5.2.8.	Persentase jumlah warga Negara penderita hepertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	-	100	12,53	12,45	6,81	100	Belum Tercapai (<)
2.5.2.9.	Persentase jumlah warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	-	100	15,60	98,17	60,25	100	Belum Tercapai (<)
2.5.2.10.	Persentase jumlah warga Negara usia pendiidkan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	-	100	100	68,63	79,24	100	Belum Tercapai (<)
2.5.2.11.	Persentase jumlah warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	61,80	50,37	20,42	100	Belum Tercapai (<)
2.5.2.12.	Prosentase jumlah warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang	%	-	100	100	163,95	4,87	100	Belum Tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
	melemahkan daya tahan tubuh manusia yang mendapat kan layanan kesehatan								
2.5.3.	SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
2.5.3.1.	Persentase jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	-	71,10	71,78	74,06	75,65	100	Belum Tercapai (<)
2.5.3.2.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	-	86,80	87,97	88,46	88,50	100	Belum Tercapai (<)
2.5.4.	SPM PERUMAHAN								
2.5.4,1	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai (=)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.5.4,2	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	-	100	Belum Tercapai (<)
2.5.5.	SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar								
2.5.5.1	Prosentase Jumlah pelanggaran K3 yg di laporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	%	112,21	129,15	182,12	100	100	100	Sesuai (=)
2.5.5.2	Prosentase Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	-	-	-	13,13	89,66	100	Belum Tercapai (<)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.5.5.3	Prosentase Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	-	-	-	12,12	86,66	100	Belum Tercapai (<)
2.5.5.4	Prosentase Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana	%	-	-	-	100	100	100	Sesuai (=)
2.5.5.5	Prosentase Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (WMK)	%	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	100	Belum Tercapai (<)
2.5.6	SPM DINAS SOSIAL								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interprestasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
			2016	2017	2018	2019	2020		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
2.5.6.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang tertangani	%	-	14,24	18,83	15,01	19,79	100	Belum Tercapai (<)
2.5.6.2	Persentase anak terlantar yang tertangani	%	-	4,62	83,45	75,49	73,75	100	Belum Tercapai (<)
2.5.6.3	Persentase lanjut usia terlantar yang tertangani	%	-	1,8	42,70	53,34	56,43	100	Belum Tercapai (<)
2.5.6.4	Persentase gelandangan dan pengemis yang tertangani	%	-	-	-	100	100	100	Sesuai (=)
2.5.6.5	Persentase korban alam dan sosial yang tertangani	%	-	100	100	100	100	100	Sesuai (=)

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan dimasa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa 5 (lima) tahun mendatang dan khusus pada rancangan perubahan RPJMD tahun ini akan memproyeksikan ketersediaan dana pada masa 3 (tiga) tahun mendatang. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya, sehingga dibutuhkan gambaran tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

APBD merupakan instrumen kunci dalam sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi adalah anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan. Fungsi perencanaan adalah anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan Kegiatan pada tahun berkenaan. Fungsi pengawasan adalah anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi adalah anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi adalah kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi adalah anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, sehingga dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis objek pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan

bersih. Kriteria pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Dengan berdasarkan pada ketentuan tersebut, pendapatan daerah diperoleh dengan mengacu pada kebijakan di bidang keuangan negara dan mempertimbangkan kondisi perekonomian, yang dicerminkan melalui asumsi indikator makro ekonomi, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah yang diupayakan melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, yang digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penyusunan Gambaran Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Untuk memahami kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, perlu dicermati kondisi kinerja keuangannya, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Gambaran kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan pada waktu yang telah lalu. Dari analisis kinerja masa lalu, maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan kedepan. Kinerja keuangan masa lalu terdiri atas kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan neraca keuangan daerah. APBD meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah, sedangkan neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam pengelolaan keuangan daerah selalu diterapkan prinsip dan pendekatan serta norma yang berlaku secara universal, yaitu dilaksanakan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Analisis kinerja pelaksanaan APBD meliputi semua komponen struktur APBD, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kinerja struktur APBD tersebut dianalisis dalam lima tahun terakhir, satu periode pemerintahan terakhir, dari 2016 hingga 2020. Selama tahun 2016-2020 menggambarkan realisasi APBD, sedangkan APBD tahun 2021 merupakan APBD pokok yang sedang berjalan.

Pengukuran kinerja pelaksanaan APBD dilaksanakan dengan mengukur perkembangan pendapatan dan belanja, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan dan gambaran realisasi belanja daerah dan pembiayaan. Sebagaimana pada tabel 3.1 dibawah ini, digambarkan bahwa pendapatan daerah selama tahun 2016 -2020 yaitu PAD secara umum mengalami peningkatan, kecuali pada pos Hasil Penenerimaan Daerah yang dipisahkan. Sedangkan pada pendapatan daerah dari dana perimbangan mengalami penurunan. Pendapatan daerah dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Postur belanja pada APBD tentunya menyesuaikan dengan pendapatan, meski belanja lebih besar dari pendapatan, tetapi defisit anggaran ini dapat ditutupi dari pembiayaan, sehingga APBD Tahun 2016 – 2020 tetap pada posisi neraca berimbang.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Tabel 3.1.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (persen)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	1.122.559.586.106,60	1.076.481.144.522,76	1.136.907.609.911,82	1.136.257.767.052,50	1.120.534.922.427,90	1,18
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	79.491.453.854,80	113.973.757.128,76	95.221.950.003,82	102.318.761.029,69	98.602.212.401,02	4,40
1.1.1.	Pajak Daerah	11.895.081.350,07	14.326.759.765,00	15.829.106.434,00	16.419.188.482,60	14.336.813.933,00	3,8
1.1.2.	Retribusi Daerah	6.757.038.051,00	6.180.733.098,00	6.095.746.861,80	8.330.261.548,50	8.209.764.795,00	3,97
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	5.532.994.995,00	5.855.148.706,70	4.660.802.844,00	4.773.194.827,00	4.335.457.725,00	(4,76)
1.1.4.	Lain-Lain PAD Yang Sah	55.306.339.458,73	87.611.115.559,06	68.636.293.864,02	72.796.116.171,59	71.720.175.948,02	5,34
1.2.	Dana Perimbangan	942.186.494.783,00	864.137.112.789,00	864.678.302.484,00	867.367.968.940,00	820.634.784.868,00	(2,72)
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	24.734.540.663,00	16.739.843.903,00	16.196.347.740,00	14.201.186.452,00	16.284.357.620,00	(8,02)
1.2.3.	Dana alokasi Umum	596.296.644.000,00	585.821.629.000,00	585.911.082.000,00	611.802.671.000,00	551.234.025.000,00	(1,56)
1.2.4.	Dana Alokasi Khusus	321.155.310.120,00	261.575.639.886,00	262.570.872.744,00	241.364.111.488,00	253.116.402.248,00	(4,65)
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	100.881.637.468,80	98.370.274.605,00	177.007.357.424,00	166.571.037.082,81	201.297.925.158,88	14,82
1.3.1.	Hibah	15.156.110.000,00	0	31.106.920.000,00	40.804.620.800,00	40.134.080.000,00	21,50
1.3.2.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**)	32.794.490.588,80	36.556.929.005,00	35.620.644.479,00	46.334.241.882,81	38.686.482.239,88	3,36
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus***)	43.157.455.000,00	55.525.848.000,00	59.003.588.193,00	79.432.174.400,00	43.157.455.000,00	10,61

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (persen)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	6.287.497.600,00	10.276.204.752,00	0	28.229.874.328,00	64,97
1.3.6	Pendapatan Lainnya	9.773.581.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)
1.3.7	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	41.000.000.000,00	0,00	22.778.311.000,00	(25,46)
2	Belanja	1,173.641.753.778,00	1.118.056.638.912,00	1.131.550.893.497,20	1.124.207.594.621,48	1.197.745.398.807,42	0,41
2.1.	Belanja tidak Langsung	600.695.574.463,00	571.442.786.342,00	614.081.745.700,25	633.065.974.901,72	620.694.363.743,46	0,66
2.1.1.	Belanja Pegawai	459.693.281.130,00	395.945.630.440,00	433.265.411.735,25	451.136.851.469,00	448.273.085.508,00	(0,50)
2.1.2.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	2.136.303.212,00	6.706.860.938,00	0,00
2.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Belanja Hibah	32.378.879.083,00	49.714.265.890,00	57.927.198.914,00	39.525.441.959,00	25.626.661.180,00	(4,57)
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	4.977.820.000,00	0,00	2.625.000.000,00	0,00	(100,00)
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil	1.609.212.000,00	1.709.170.382,00	1.932.781.061,00	136.475.796.892,72	2.223.906.323,46	6,68
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	105.302.175.889,00	117.850.468.250,00	120.532.613.990,00	576.406.369,00	127.263.150.591,00	3,86
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.712.026.361,00	1.245.431.380,00	423.740.000,00	590.175.000,00	10.600.699.203,00	44,00
2.2.	Belanja Langsung	572.946.179.315,00	546.613.852.570,00	517.469.147.796,95	491.141.619.719,76	577.051.035.063,96	0,14
2.2.1.	Belanja Pegawai	31.096.690.550,00	31.336.956.600,00	3.622.565.721,00	1.881.662.160,00	1.496.192.440,00	(45,49)
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	197.255.088.994,00	236.144.975.454,00	269.440.402.655,00	316.036.445.306,20	267.287.413.010,00	6,26
2.2.3.	Belanja Modal	344.594.399.771,00	279.131.920.516,00	244.406.179.420,95	173.223.512.253,56	308.267.429.613,96	-2,2
3	Pembiayaan	141.693.208.186,45	88,675.518.653,05	43.995.544.263,81	130.788.369.759,43	165.088.542.190,45	3,10
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	146.849.318.186,45	90.675.518.653,05	46.995.544.263,81	133.788.369.759,43	212.838.542.190,45	7,70

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (persen)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3.2.	Pegeluaran Pembiayaan	5.156.110.000,00	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	47.750.000.000,00	56,07

Sumber: Buku APBD Kabupaten Sinjai, berbagai seri

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Secara keseluruhan APBD Kabupaten Sinjai selama periode 2016-2020 ini menunjukkan rata-rata pertumbuhan belanja daerah yang lebih besar dari rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah. Selama periode tersebut, pendapatan daerah hanya bertumbuh rata-rata sebesar 1,18 persen. Pendapatan daerah ini menunjukkan peningkatan yang signifikan selama satu periode pemerintahan, meningkat dari Rp 1,12 trilyun pada tahun 2016 menjadi Rp 1,136 trilyun pada tahun 2019, namun turun menjadi Rp. 1,120 trilyun pada tahun 2020. Kontribusi komponen pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel3.2
Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai, Periode 2016-2020
(Rp dalam Jutaan)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
		Pagu (Rp) r (%)	Pagu (Rp) r (%)	Pagu (Rp) r (%)	Pagu (Rp) r (%)	Pagu (Rp) r (%)	
1	Pendapatan Asli Daerah	79,491.45	113,973.75	95,221.95	102,318.76	98,473.22	8.77
		7.08	10.59	8.38	9	8.79	
2	Dana Perimbangan	942,186.49	864,137.11	864,678.30	867,367.97	820,634.78	77.97
		83.93	80.27	76.06	76.34	73.24	
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	100,88,63	98,370.27	177,007.36	166,571.04	201,297.93	13.26
		8.99	9.14	15.57	14.66	17.97	
	Jumlah Pendapatan	1,122,559.58	1,076,481.14	1,136,907.61	1,136,257.77	1,120,405.93	

Sumber: Buku APBD Kabupaten Sinjai, berbagai seri

Proporsi pendapatan daerah Kabupaten Sinjai masih didominasi oleh Pendapatan transfer. Selama lima tahun terakhir, yaitu tahun 2016 – 2020, rata-rata kontribusi pendapatan daerah dari dana perimbangan adalah 77,97%. Pertumbuhan dana perimbangan yang lebih besar dari PAD ini, terutama dikontribusi oleh rata-rata pertumbuhan DAK yang mencapai 23,75 persen. Selama periode 2016-2020 rata-rata kontribusi PAD dari total pendapatan adalah sebesar 8,77%, lebih kecil dari rata-rata komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, yaitu sebesar 13,26%. Komponen dana perimbangan dikontribusi oleh DAU, disusul DAK dan hanya sebagian kecil yang dikontribusikan oleh komponen bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak. Secara lengkap dapat dilihat pada table 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3.
Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Sinjai tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (persen)
1.	PENDAPATAN DAERAH	1,122,559,586,106.60	1,076,481,144,522.76	1,136,907,609,911.82	1,136,257,767,052.50	1,120,534,922,427.90	1.18
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	79,491,453,854.80	113,973,757,128.76	95,221,950,003.82	102,318,761,029.69	98,602,212,401.02	4.40
1.1.1.	Pajak Daerah	11,895,081,350.07	14,326,759,765.00	15,829,106,434.00	16,419,188,482.60	14,336,813,933.00	3.80
1.1.2.	Retribusi Daerah	6,757,038,051.00	6,180,733,098.00	6,095,746,861.80	8,330,261,548.50	8,209,764,795.00	3.97
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	5,532,994,995.00	5,855,148,706.70	4,660,802,844.00	4,773,194,827.00	4,335,457,725.00	(4.76)
1.1.4.	Lain-Lain PAD Yang Sah	55,306,339,458.73	87,611,115,559.06	68,636,293,864.02	72,796,116,171.59	71,720,175,948.02	5.34
1.2.	Dana Perimbangan	942,186,494,783.00	864,137,112,789.00	864,678,302,484.00	867,367,968,940.00	820,634,784,868.00	(2.72)
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	24,734,540,663.00	16,739,843,903.00	16,196,347,740.00	14,201,186,452.00	16,284,357,620.00	(8.02)
1.2.2.	Dana alokasi Umum	596,296,644,000.00	585,821,629,000.00	585,911,082,000.00	611,802,671,000.00	551,234,025,000.00	(1.56)
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	321,155,310,120.00	261,575,639,886.00	262,570,872,744.00	241,364,111,488.00	253,116,402,248.00	(4.65)
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	100,881,637,468.80	98,370,274,605.00	177,007,357,424.00	166,571,037,082.81	201,297,925,158.88	14.82
1.3.1.	Hibah	15,156,110,000.00	0,00	31,106,920,000.00	40,804,620,800.00	40,134,080,000.00	21.50
1.3.2.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**)	32,794,490,588.80	36,556,929,005.00	35,620,644,479.00	46,334,241,882.81	38,686,482,239.88	3.36
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus***)	43,157,455,000.00	55,525,848,000.00	59,003,588,193.00	79,432,174,400.00	43,157,455,000.00	10.61
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	6,287,497,600.00	10,276,204,752.00	0,00	28,229,874,328.00	64.97
1.3.6.	Pendapatan Lainnya	9,773,581,880.00	0,00	0,00	0,00	0,00	(100.00)
1.3.7.	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	41,000,000,000.00	0,00	22,778,311,000.00	(25.46)

Sumber: Buku APBD Kabupaten Sinjai, berbagai seri

3.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2016-2020, disusun menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Analisis belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran anggaran dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2016-2020 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana belanja daerah di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, sebagaimana yang tertuang dalam tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (persen)
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	
2.	Belanja	1,173,641,753,778.00	1,118,056,638,912.00	1,131,550,893,497.20	1,124,207,594,621.48	1,197,745,398,807.42	0.41
2.1.	Belanja tidak Langsung	600,695,574,463.00	571,442,786,342.00	614,081,745,700.25	633,065,974,901.72	620,694,363,743.46	0.66
2.1.1.	Belanja Pegawai	459,693,281,130.00	395,945,630,440.00	433,265,411,735.25	451,136,851,469.00	448,273,085,508.00	(0.50)
2.1.2.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	2,136,303,212.00	6,706,860,938.00	0,00
2.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Belanja Hibah	32,378,879,083.00	49,714,265,890.00	57,927,198,914.00	39,525,441,959.00	25,626,661,180.00	(4.57)
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	4,977,820,000.00	-	2,625,000,000.00	-	(100.00)
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil	1,609,212,000.00	1,709,170,382.00	1,932,781,061.00	136,475,796,892.72	2,223,906,323.46	6.68
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	105,302,175,889.00	117,850,468,250.00	120,532,613,990.00	576,406,369.00	127,263,150,591.00	3.86
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1,712,026,361.00	1,245,431,380.00	423,740,000.00	590,175,000.00	10,600,699,203.00	44.00
2.2.	Belanja Langsung	572,946,179,315.00	546,613,852,570.00	517,469,147,796.95	491,141,619,719.76	577,051,035,063.96	0.14
2.2.1.	Belanja Pegawai	31,096,690,550.00	31,336,956,600.00	3,622,565,721.00	1,881,662,160.00	1,496,192,440.00	(45.49)
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	197,255,088,994.00	236,144,975,454.00	269,440,402,655.00	316,036,445,306.20	267,287,413,010.00	6.26
2.2.3.	Belanja Modal	344,594,399,771.00	279,131,920,516.00	244,406,179,420.95	173,223,512,253.56	308,267,429,613.96	(2.20)

Sumber Buku: APBD Kabupaten Sinjai Berbagai Seri

Dari rincian anggaran belanja daerah sebagaimana disajikan pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran belanja tahun 2016 hingga tahun 2020 sebesar 0,41 persen dengan rata-rata pertumbuhan anggaran belanja tidak langsung sebesar 0,66 persen, sedangkan rata-rata pertumbuhan anggaran belanja langsung tahun 2016 hingga tahun 2020 sebesar 0,14 persen.

Anggaran belanja daerah dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Selama periode tahun 2016 sampai tahun 2020, secara proporsi, diketahui bahwa anggaran belanja langsung relatif lebih rendah dibandingkan anggaran belanja tidak langsung dengan rata-rata proporsi diatas 50 persen pertahun. Peningkatan belanja tidak langsung didasari atas pertimbangan bahwa kebutuhan aparat pemerintah dan pengalokasian belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga memperlihatkan perkembangan yang meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara garis besar, analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan..

Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang diarahkan pada:

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
- b. Penerimaan pinjaman dalam negeri;
- c. Penyertaan modal kepada BUMD;
- d. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri;
- e. Persentase SiLPA diupayakan tidak meningkat dengan semakin efektifnya perencanaan anggaran.

Tabel 3.5 menyajikan gambaran anggaran Pembiayaan Daerah tahun 2016 hingga tahun 2020, berikut ini.

Tabel 3.5
Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (persen)
		2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	
3.	Pembiayaan	141,693,208,186.45	88,675,518,653.05	43,995,544,263.81	130,788,369,759.43	165,088,542,190.45	3.10
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	146,849,318,186.45	90,675,518,653.05	46,995,544,263.81	133,788,369,759.43	212,838,542,190.45	7.70
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	146,849,318,186.45	90,675,518,653.05	46,995,544,263.81	49,352,260,678.43	142,838,542,190.45	
	Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0,00	0,00	0,00	84,436,109,081.00	70,000,000,000.00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	146,849,318,186.45	90,675,518,653.05	46,995,544,263.81	133,788,369,759.43	212,838,542,190.45	7.70
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5,156,110,000.00	2,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	47,750,000,000.00	56.07
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5,156,110,000.00	2,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	1,500,000,000.00	
	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	46,250,000,000.00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5,156,110,000.00	2,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	47,750,000,000.00	56.07
	Pembiayaan Netto	141,693,208,186.45	88,675,518,653.05	43,995,544,263.81	130,788,369,759.43	165,088,542,190.45	3.10

Sumber Buku: APBD Kabupaten Sinjai Berbagai Seri

Pembiayaan daerah Kabupaten Sinjai selama periode 2016-2020 menggambarkan kebijakan anggaran defisit. Terlihat pada alokasi belanja daerah yang lebih besar dari pada pendapatan daerah. Hal ini berimplikasi pada alokasi anggaran penerimaan pembiayaan yang lebih besar daripada alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan. Selama rentang waktu 2016-2020, anggaran penerimaan pembiayaan secara akumulatif mencapai Rp631.147.293.053,19 dan secara rata-rata sebesar Rp126,23 milyar setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan 7,70 persen. Alokasi pengeluaran pembiayaan selama kurun waktu 2016-2019 menunjukkan trend yang cenderung stagnan, sedangkan alokasi pengeluaran pembiayaan cenderung meningkat pada tahun 2020, yang dianggarkan untuk pembayaran pokok pinjaman dalam negeri sedangkan penerimaan pinjaman tersebut dianggarkan pada penerimaan pembiayaan APBD tahun 2019 dan 2020.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengeluaran pembiayaan hanya mencapai Rp60.906.110.000,00 atau rata-rata hanya Rp12,18 milyar per tahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selama periode ini kebijakan surplus anggaran tidak dapat ditempuh oleh pemerintah daerah, mengingat terbatasnya pendapatan daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah yang semakin besar dari peningkatan kebutuhan fiskal setiap tahunnya. Dalam lima tahun pemerintah daerah menempuh kebijakan penganggaran defisit untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah yang kian besar yang tergambar pada kebutuhan fiskal yang semakin besar. Kebutuhan fiskal untuk implementasi program pembangunan daerah dan pelayanan publik ini akan berdampak positif bagi kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat jika dapat dialokasikan secara tepat untuk kepentingan sasaran strategis daerah. Defisit tersebut sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

3.1.2 Neraca Daerah.

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu saat tertentu. Neraca daerah memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca

pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan, antara lain: rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan, antara lain: rasio total hutang terhadap total aset (*debt to asset ratio*) dan rasio hutang terhadap modal (*debt to equity ratio*). Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Jenis rasio aktivitas yang digunakan dalam analisis, antara lain: rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. Perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Sinjai tahun 2016-2020 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Sinjai, Periode 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020*)	Rata-rata Pertumbuh an (%)
	ASET	1,588,977,121,987.12	1,776,206,196,232.55	1,971,673,341,652.10	2,092,684,846,847.29	2,241,279,363,799.45	7.12
	ASET LANCAR	127,592,624,012.58	85,950,668,304.00	93,352,890,406.59	191,046,631,220.13	122,250,785,406.99	-0.85
	Kas di Kas Daerah	73,910,216,537.94	31,696,214,490.81	35,622,483,358.43	130,308,328,207.45	79,439,239,336.93	1.45
	Kas di Bendahara Pengeluaran	108,933,320.00	10,900,000.00	185,351,096.00	24,906,128.00	476,450.00	-66.26
	Kas di Bendahara Penerimaan	20,465,663.00	52,975,453.00	2,677,278.00	0.00	4,798,000.00	-25.18
	Kas di Bendahara JKN FKTP	4,774,475,187.00	2,796,937,058.00	1,255,744,850.00	4,049,119,949.00	361,293,151.00	-40.33
	Kas di Bendahara BOS	384,785,366.00	1,017,501,068.00	1,128,511,703.00	85,316,073.00	2,745,153,460.00	48.14
	Kas di Kas BLUD	6,296,949,907.11	2,051,036,045.00	5,658,147,092.00	2,871,579,504.00	5,327,621,413.00	-3.29
	Setara Kas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Investasi Jangka Pendek	5,500,000,000.00	9,500,000,000.00	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00	0.00	-100.00
	Piutang Pajak Netto	4,827,392,069.13	3,257,002,070.33	1,455,079,427.20	1,582,599,844.20	1,317,723,380.45	-22.87
	Piutang Retribusi Netto	232,740,015.40	200,648,959.10	158,455,217.80	238,538,347.80	66,379,889.55	-22.19
	Belanja Dibayar Dimuka	299,278,192.09	297,313,939.19	276,153,011.61	652,508,395.07	299,108,667.96	-0.01
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	19,093,500.00	1,333,113,632.10	735,296,535.50	733,996,250.00	0.00	-100.00
	Piutang Lainnya Netto	14,955,571,030.42	14,883,964,236.00	22,842,649,000.30	24,520,813,543.26	14,301,647,622.00	-0.89
	Persediaan	16,262,723,224.49	18,853,061,352.47	18,532,341,836.75	20,478,924,978.35	18,387,344,036.10	2.49
	JUMLAH ASET LANCAR	127,592,624,012.58	85,950,668,304.00	93,352,890,406.59	191,046,631,220.13	122,250,785,406.99	-0.58
	INVESTASI JANGKA PANJANG	14,940,478,669.86	19,315,049,278.55	12,816,762,485.56	14,790,066,951.18	26,805,077,219.11	12.40
	Pinjaman Kepada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020*)	Rata-rata Pertumbuh an (%)
	Perusahaan Negara						
	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Investasi Dalam Surat Utang Negara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dana Bergulir Netto	14,640,335.00	1,525,000.00	0.00	0.00	0.00	-100
	Investasi Non Permanen Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	14,925,838,334.86	19,313,524,278.55	12,816,762,485.56	14,790,066,951.18	26,805,077,219.11	12.42
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	14,940,478,669.86	19,315,049,278.55	12,816,762,485.56	14,790,066,951.18	26,805,077,219.11	12.42
	ASET TETAP	1,366,645,024,804.93	1,572,782,359,759.00	1,757,153,603,385.95	1,861,818,452,385.51	2,068,010,982,195.88	8.64
	Tanah	168,027,913,775.00	300,465,248,570.00	369,760,118,870.00	370,791,349,828.00	372,665,574,068.00	17.27
	Peralatan dan Mesin	387,492,462,961.00	397,390,554,724.00	400,612,110,066.95	462,418,143,651.95	494,006,016,478.95	4.98
	Gedung dan Bangunan	603,227,010,745.00	610,639,106,410.00	655,917,197,433.00	749,642,552,839.56	807,882,091,106.52	6.02
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,280,453,510,797.00	1,503,942,146,155.00	1,660,741,804,215.00	1,732,774,954,456.00	1,806,796,439,903.00	7.13
	Aset Tetap Lainnya	23,979,892,459.00	20,833,311,780.00	21,977,047,672.00	25,135,721,036.00	26,729,797,175.00	2.20
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	100,185,878,011.93	18,207,856,994.00	23,028,221,656.00	37,805,628,452.00	208,704,204,445.41	15.81
	Akumulasi Penyusutan	-1,196,721,643,944.00	-1,278,695,864,874.00	-1,374,882,896,527.00	-1,516,749,897,878.00	-1,648,773,140,981.00	6.62
	JUMLAH ASET TETAP	1,366,645,024,804.93	1,572,782,359,759.00	1,757,153,603,385.95	1,861,818,452,385.51	2,068,010,982,195.88	8.64
	ASET LAINNYA	79,798,994,499.75	98,158,118,891.00	108,350,085,374.00	25,029,696,290.47	24,212,518,977.47	-21.22
	Tuntutan Ganti Rugi Netto	1,667,391,559.00	199,399,159.00	199,399,159.00	199,399,159.00	199,399,159.00	-34.61
	Aset Tak Berwujud Netto	866,577,840.75	1,121,330,125.00	1,390,402,500.00	892,185,925.00	457,499,511.00	-11.99
	Aset Lain-lain	77,265,025,100.00	96,837,389,607.00	106,760,283,715.00	23,938,111,206.47	23,555,620,307.47	-21.15

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020*)	Rata-rata Pertumbuh an (%)
	JUMLAH ASET LAINNYA	79,798,994,499.75	98,158,118,891.00	108,350,085,374.00	25,029,696,290.47	24,212,518,977.47	-21.22
	JUMLAH ASET	1,588,977,121,987.12	1,776,206,196,232.55	1,971,673,341,652.10	2,092,684,846,847.29	2,241,279,363,799.45	7.12
	KEWAJIBAN	25,276,815,454.15	12,552,114,311.65	17,691,535,859.98	103,012,826,229.30	153,355,898,446.61	43.42
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	25,276,815,454.15	12,552,114,311.65	17,691,535,859.98	64,826,717,148.30	83,355,898,446.61	26.95
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0.00-	25,539,851.00	654,699.00	707,671.00	516,000.00	81.66
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	46,250,000,000.00	38,186,109,081.00	0.00
	Pendapatan Diterima Dimuka	606,276,849.07	577,786,613.17	475,007,243.16	451,505,367.23	431,492,068.66	-6.58
	Utang Belanja	23,386,411,787.08	10,664,661,029.48	15,931,747,099.82	16,840,377,292.07	43,453,654,478.95	13.19
	Utang Jangka Pendek Lainnya	1,284,126,818.00	1,284,126,818.00	1,284,126,818.00	1,284,126,818.00	1,284,126,818.00	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	25,276,815,454.15	12,552,114,311.65	17,691,535,859.98	64,826,717,148.30	83,355,898,446.61	26.95
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00	0.00	0.00	38,186,109,081.00	70,000,000,000.00	0.00
	Utang Dalam Negeri - sektor Perbankan	0.00	0.00	0.00	38,186,109,081.00	0.00	0.00
	Utang Dari Lembaga Keuangan bukan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000,000.00	0.00
	JUMLAH KEWAJIBAN	25,276,815,454.15	12,552,114,311.65	17,691,535,859.98	103,012,826,229.30	153,355,898,446.61	43.20
	EKUITAS DANA	1,563,700,306,532.97	1,763,654,081,920.90	1,953,981,805,792.12	1,989,672,020,618.00	2,087,923,465,352.84	5.95
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1,588,977,121,987.12	1,776,206,196,232.55	1,971,673,341,652.10	2,092,684,846,847.30	2,241,279,363,799.45	7.12
	Utang Dari Lembaga Keuangan bukan Bank	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000,000,000.00	0.00

Sumber: Laporan Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai, berbagai seri/ Tahun 2015- 2019 *audited*, Tahun 2020 *unaudited*

Definisi dari setiap elemen utama neraca serta sub-sub rekening yang terdapat di dalam elemen utama neraca sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Sinjai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual, adalah sebagai berikut :

3.1.2.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak memenuhi kriteria tersebut, dikategorikan sebagai aset non lancar.

Aset Pemerintah Kabupaten Sinjai selama periode tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,12 persen, dengan rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis aset antara lain, aset lancar rata-rata turun sebesar 0,85 persen, investasi jangka panjang terjadi peningkatan sebesar 12,40 persen, aset tetap rata-rata naik sebesar 8,64 persen, dan aset lainnya rata-rata turun sebesar 21,22 persen. Adapun yang menjadi sub-sub rekening dari aset, dijelaskan berikut :

1. Kas di Kas Daerah; mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah, meliputi :
 - a) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening - rekening pada bank yang ditentukan oleh bupati untuk menampung penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sinjai;
 - b) Setara kas, antara lain Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola bendahara umum daerah;
2. Kas di Bendahara Penerimaan; mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu. Kas tersebut berasal dari pungutan dan setoran yang sudah

diterima oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu yang belum disetorkan ke kas daerah.

3. Kas di Bendahara Pengeluaran; mencakup seluruh saldo rekening bank bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu per tanggal neraca.
4. Kas di BLUD; merupakan kas yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah, yang bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Kas Lainnya; merupakan kas yang dikelola bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang bukan berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetor kepada pihak terkait per tanggal neraca.
6. Investasi Jangka Pendek; adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan dalam rangka untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek dapat berupa :
 - a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);
 - b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN);
 - c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
 - d) Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
7. Piutang; adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/ atau hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
8. Penyisihan Piutang; adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
9. Beban Dibayar Dimuka; adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah. Klasifikasi beban dibayar di muka, antara lain: pembayaran premi asuransi dan sewa guna (leasing).

10. Persediaan; adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, termasuk barang-barang yang akan dihibahkan.
11. Investasi Jangka Panjang Non Permanen; merupakan investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
12. Investasi Jangka Panjang Permanen; merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen terdiri atas penyertaan modal di perusahaan daerah dan di perusahaan negara.
13. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
14. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
15. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
16. Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
17. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah aset tetap renovasi.
18. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
19. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

20. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
21. Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/ kepala daerah pemerintah daerah, sedangkan ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit.
22. Kemitraan dengan Pihak Ketiga; merupakan upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimiliki dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa: kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa, kerja sama pemanfaatan (KSP), bangun guna serah (BGS), dan bangun serah guna (BSG).
23. Aset Tidak Berwujud adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.
24. Aset tak Berwujud terdiri atas: goodwill, hak paten atau hak cipta, royalti, software, lisensi, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, aset tak berwujud lainnya, dan aset tak berwujud dalam pengerjaan.
25. Aset Lain-lain merupakan aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah/direklasifikasi. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak

digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). b. Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

3.1.2.2 Kewajiban

Kewajiban diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban yang penyelesaiannya setelah dua belas bulan dari tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sinjai selama periode tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 43,42 persen, dengan rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis kewajiban antara lain kewajiban jangka pendek tumbuh positif rata-rata sebesar 26,95 persen, sedangkan untuk kewajiban jangka panjang rata-rata pertumbuhannya adalah 0,00 persen.

Adapun sub-sub rekening dari kewajiban jangka pendek, dijelaskan sebagai berikut :

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga adalah hutang kepada pihak ketiga yang timbul dari pemotongan yang dilakukan oleh entitas dari kegiatan/transaksi yang dilakukan oleh entitas yang bersangkutan. Utang perhitungan pihak ketiga (PFK), terdiri atas: utang taspen, utang askes, utang PPh pusat, utang PPN pusat, dan utang perhitungan pihak ketiga lainnya.
2. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, terdiri atas: a) utang bank; b) utang obligasi (SUN); c) utang pemerintah pusat; d) utang pemerintah provinsi; dan e) utang pemerintah kabupaten/kabupaten lain.
3. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
4. Utang Belanja adalah sejumlah kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga sebagai akibat belanja modal dan barang jasa yang sudah

menjadi kewajiban sampai dengan tanggal pelaporan namun oleh pemerintah daerah belum dibayarkan, misalnya belum jatuh tempo atau baru akan dibayar.

5. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam utang jangka pendek lainnya, antara lain: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun, seperti biaya sewa atau bunga yang sudah menjadi kewajiban namun belum jatuh tempo.

Sedangkan sub-sub rekening dari kewajiban jangka panjang, dijelaskan sebagai berikut :

1. Utang Dalam Negeri, terdiri atas :
 - a) utang dalam negeri sektor perbankan;
 - b) utang dari lembaga keuangan bukan bank;
 - c) utang dalam negeri – obligasi;
 - d) utang kepada pemerintah pusat;
 - e) utang kepada pemerintah provinsi; dan
 - f) utang kepada pemerintah kabupaten/kabupaten.
2. Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok utang dalam negeri dan utang luar negeri, misalnya utang kemitraan.

3.1.2.3 Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah yang terbagi dalam tiga kategori, yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya. Atau dengan kata lain, ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Perkembangan ekuitas Pemerintah Kabupaten Sinjai selama periode 2016-2020 tumbuh rata-rata sebesar 5,95 persen.

3.1.2.4 Rasio Keuangan

Tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen

laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Disamping itu, analisis neraca daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah juga dapat dilakukan melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Rasio likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas yang diperoleh dari neraca daerah Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum dalam tabel 3.7, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid., rumusnya yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek. Kinerja rasio likuiditas Kabupaten Sinjai disajikan pada tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7
Perkembangan Rasio Likuiditas Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Rasio Lancar (Current Ratio)			Rasio Quick (Quick Ratio)			
		Aktiva Lancar	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio	Aktiva Lancar	Persediaan	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio Quick
a	b	C	D	e = c/d	F	G	H	i = (f-g)/h
1	2016	127,592,624,012.58	25,276,815,454.15	5.05	127,592,624,012.58	16.262.723.224,49	25,276,815,454.15	4.40
2	2017	85,950,668,304.00	12,552,114,311.65	6.85	85,950,668,304.00	18.853.061.352,47	12,552,114,311.65	5.35
3	2018	93,352,890,406.59	17,691,535,859.98	5.28	93,352,890,406.59	18,532,341,836.75	17,691,535,859.98	4.23
4	2019	191,046,631,220.13	64,826,717,148.30	2.95	191,046,631,220.13	20,478,924,978.35	64,826,717,148.30	2.63
5	2020*)	122,250,785,406.99	83,355,898,446.61	1,47	122,250,785,406.99	18,387,344,036,10	83,355,898,446.61	1.25

Sumber: Laporan Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai, berbagai seri/ Tahun 2015- 2019 *audited*, Tahun 2020 *unaudited*

- a. Rasio Lancar (*Current Ratio*), yang menunjukkan kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Semakin besar nilai rasio lancar artinya semakin likuid. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2016, setiap Rp100,00 kewajiban jangka pendek dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp5,05, tahun 2017 sebesar Rp6,85, tahun 2018 sebesar Rp5,28, tahun 2019 sebesar Rp2,95, dan tahun 2020 sebesar Rp1,47.
- b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*), yaitu ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Dengan melihat pada tabel tersebut, rasio cepat tahun 2016 sebesar Rp4,40, artinya bahwa kewajiban jangka pendek sebesar Rp100,00 dijamin dengan aktiva sebesar Rp4,40, tahun 2017 sebesar Rp5,35, tahun 2018 sebesar Rp4,23, tahun 2019 sebesar Rp2,63, dan tahun 2020 sebesar Rp1,25. Hal tersebut menunjukkan kelebihan kas dan piutang untuk membayar kewajiban jangka pendek.

2. Rasio Solvabilitas

Analisis rasio solvabilitas diperlukan untuk mengukur kemampuan kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Kinerja rasio solvabilitas Kabupaten Sinjai disajikan pada tabel 3.8 berikut ini.

Tabel 3.8
Perkembangan Rasio Solvabilitas Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Rasio Hutang-Asset			Rasio Hutang-Modal		
		Total Hutang	Total Asset	Rasio Hutang Thd Total Asset	Total Hutang	Total Ekuitas	RasioHutang Thd Modal
a	B	C	D	e = c/d	F	G	h= f/g
1	2016	25,276,815,454.15	1,588,977,121,987.12	0.0159	25,276,815,454.15	1,563,700,306,532.97	0.0162
2	2017	12,552,114,311.65	1,776,206,196,232.55	0.0071	12,552,114,311.65	1,763,654,081,920.90	0.0071
3	2018	17,691,535,859.98	1,971,673,341,652.10	0.0090	17,691,535,859.98	1,953,981,805,792.12	0.0091
4	2019	103,012,826,229.30	1,861,818,452,385.51	0.06	103,012,826,229.30	1,989,672,020,618.00	0.0518
5	2020*)	153,355,898,446.61	2,241,279,363,799.45	0,07	153,355,898,446,61	2,087,923,465,352.85	0,0734

Sumber: Laporan Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai, berbagai seri/ Tahun 2015- 2019 *audited*, Tahun 2020 *unaudite*

- a. Rasio Total Hutang terhadap Total Aset (*Debt to Asset Ratio*), menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditur. Pengaruh hutang terhadap aktiva tahun 2016 sebesar 0,0159 persen, tahun 2017 sebesar 0,0071 persen, tahun 2018 sebesar 0,0090 persen, tahun 2019 sebesar 0,06 persen, dan tahun 2020 sebesar 0,07 persen.
- b. Rasio Hutang terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*) digunakan untuk mengukur seberapa perlunya hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari kreditur. Tahun 2016 sebesar 0,0162 persen, tahun 2017 sebesar 0,0071 persen, tahun 2018 sebesar 0,0091 persen, tahun 2019 sebesar 0,0518 persen, serta tahun 2020 sebesar 0,0734 persen.

3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat seberapa efektif pemerintah kabupaten Sinjai dalam memanfaatkan semua sumber daya yang dipunyai. Penghitungan rasio aktivitas menggunakan hasil perhitungan dari rata-rata umur piutang. Piutang merupakan hak Pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib retribusi/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kinerja rasio aktivitas Kabupaten Sinjai disajikan pada tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9
Perkembangan Rasio Aktivitas Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Rasio Aktivitas						
		Saldo awal piutang	Saldo akhir piutang	Total Piutang	Rata-rata Piutang Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	Perputaran Piutang	Rata-rata Umur Piutang
a	b	c	d	e = d	f = e	g	h = g/f	i = 365/h
1	2016	8,809,232,838.08	5,060,132,084.53	5,060,132,084.53	5,060,132,084.53	1,122,559,586,106.60	221.84	1.65
2	2017	5,060,132,084.53	3,457,651,029.43	3,457,651,029.43	3,457,651,029.43	1,076,481,144,522.76	311.33	1.17
3	2018	3,457,651,029.43	1,613,534,645.00	1,613,534,645.00	1,613,534,645.00	1,136,907,609,911.82	704.61	0.52
4	2019	1,613,534,645.00	1,821,138,192.00	1,821,138,192.00	1,821,138,192.00	1,136,257,767,052.50	623.93	0.59
5	2020	1,821,138,192.00	1,384,103,270.00	1,384,103,270.00	1,384,103,270.00	1,120,534,922,427.90	809.57	0.45

Sumber: Laporan Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai, berbagai seri/ Tahun 2015- 2019 *audited*, Tahun 2020 *unaudited*

Rata-rata umur piutang mengukur efisiensi pengelolaan piutang suatu Pemerintah Daerah, serta menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melunasi piutang atau merubah piutang menjadi kas. Pada tahun 2016, rata-rata umur piutang Pemerintah Kabupaten Sinjai sebesar 1,65 hari, pada tahun 2017 sebesar 1,17 hari, pada tahun 2018 sebesar 0,52 hari, dan pada tahun 2019 sebesar 0,59 hari. Sedangkan pada tahun 2020, rata-rata umur piutang Pemerintah Kabupaten Sinjai menjadi 0,45 hari. Hal ini mengindikasikan berkurangnya waktu yang dibutuhkan oleh pihak ketiga untuk melunasi hutangnya pada pemerintah daerah, sehingga menunjukkan semakin menurunnya risiko pemberian piutang kepada pihak ketiga.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, baik mencakup sisi pendapatan daerah maupun yang berkaitan dengan sisi belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pada sisi pendapatan daerah, terutama yang berkaitan dengan kebijakan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil dari yang secara langsung meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Kebijakan pada sisi belanja daerah, terutama yang terkait dengan postur anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan alokasi anggaran untuk pelayanan publik dan kepentingan masyarakat secara luas.

3.2.1 Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan

Kebijakan keuangan daerah pada sisi pendapatan daerah, lebih banyak didorong dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, terutama yang terkait dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah, khususnya yang terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang ditempuh pemerintah daerah. Selain PAD, peningkatan kapasitas fiskal juga dapat didorong melalui peningkatan dana bagi hasil daerah (DBH), baik melalui pengelolaan pajak maupun melalui pengelolaan sumber daya daerah, khususnya pengelolaan sumber daya alam daerah, artinya kebijakan dari sisi pendapatan daerah dapat diupayakan baik oleh pemerintah maupun oleh pemerintah daerah. Fokusnya pada dua aspek, yakni aspek yang terkait upaya mengintensifkan pengelolaan pendapatan daerah pada yang sudah berjalan selama ini melalui kebijakan intensifikasi, dan pada saat yang sama melakukan perluasan sumber-sumber pendapatan daerah baru melalui kebijakan ekstensifikasi.

Kebijakan intensifikasi yang telah dan akan dilaksanakan adalah : (1) Optimalisasi pemungutan dan pemanfaatan hasil pajak dan retribusi daerah, salah satunya melalui perbaikan sistem pengelolaan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah, memperbaiki porsi dan mengatur kembali pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah. (2) optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan melalui peningkatan kinerja BUMD dan pengelolaan daerah lainnya.

Kebijakan ekstensifikasi yang telah, sedang dan akan dijalankan, antara lain: (1) Penguatan *local taxing power*, memperluas objek pajak dan retribusi daerah, menambah jenis pajak dan retribusi daerah, menaikkan tarif maksimum pada beberapa jenis pajak dan retribusi daerah melalui penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah. (2) Perluasan akses pemerintah daerah untuk sharing pembiayaan program-program pembangunan daerah yang bersifat strategis, misalnya melalui skim kerjasama pemerintah-swasta untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah dalam jangka panjang.

3.2.2 Proporsi Penggunaan Anggaran

Kebijakan alokasi belanja daerah berkaitan dengan konsentrasi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelayanan publik guna memastikan semua masyarakat memperoleh layanan dasar dan non dasar. Proporsi pembelanjaan pemerintah Kabupaten Sinjai dibandingkan anggaran dari tahun 2018 (n-3) sampai tahun 2020 (n-1) digunakan untuk menentukan rencana belanja daerah dimasa akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan. Proporsi realisasi belanja dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 3.10.
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Sinjai
Tahun 2018-2020

No	Uraian	(n-3) 2018	(n-2)2019	(n-1)2020
		(persen)	(persen)	(persen)
A	Belanja Tidak Langsung	7.46	3.09	-1.95
1	Belanja Pegawai	9.43	4.12	-0.63
2	Belanja Bunga	-	100	213.95
3	Belanja Subsidi	-	-	-
4	Belanja Hibah	16.52	-31.77	-35.16
5	Belanja Bantuan Sosial	-100	100	-100
6	Belanja Bagi Hasil	13.08	6,961.11	-98.37
7	Belanja Bantuan Keuangan	2.28	-99.52	21,978.72
8	Belanja Tidak Terduga	-65.98	39.28	1,696.20
B	Belanja Langsung	5.33	-5.09	17.49
1	Belanja Pegawai	-88.44	-48.06	-20.49
2	Belanja Barang dan Jasa	14.1	17.29	-15.43
3	Belanja Modal	-12.44	-29.12	77.967

Tabel 3.11.
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja
Kabupaten Sinjai 2018-2020

No	Uraian	2018	Pro-porsi (%)	2019	Pro-porsi (%)	2020	Pro-porsi (%)	Rata-Rata (%)
A	Belanja Tidak Langsung	614,081,745,700.25	54.27	633,065,974,901.72	56.31	620,694,363,743.05	51.82	54.13
1	Belanja Pegawai	433,265,411,735.25	38.29	451,136,851,469.00	40.13	448,273,085,508.00	37.43	38.62
2	Belanja Bunga	0	0	2,136,303,212.00	0.19	6,706,860,938.00	0.56	0.25
3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
4	Belanja Hibah	57,927,198,914.00	5.12	39,525,441,959.00	3.516	13,614,919,150.00	1.14	3.26
5	Belanja Bantuan Sosial	0	0	2,625,000,000.00	0.233	12,011,742,030.00	1	0.41
6	Belanja Bagi Hasil	1,932,781,061.00	0.17	136,475,796,892.72	12.14	2,223,906,323.46	0.19	4.17
7	Belanja Bantuan Keuangan	120,532,613,990.00	10.65	576,406,369.00	0.051	127,263,150,591.00	10.63	7.11
8	Belanja Tidak Terduga	423,740,000.00	0.04	590,175,000.00	0.052	10,600,699,203.00	0.89	0.33
B	Belanja Langsung	517,469,147,796.95	45.73	491,141,619,719.76	43.69	577,051,035,063.96	48.18	45.87
1	Belanja Pegawai	3,622,565,721.00	0.32	1,881,662,160.00	0.167	1,496,192,440.00	0.12	0.2
2	Belanja Barang dan Jasa	269,440,402,655.00	23.81	316,036,445,306.20	28.11	267,287,413,010.00	22.32	24.75
3	Belanja Modal	244,406,179,420.95	21.6	173,223,512,253.56	15.41	308,267,429,613.96	25.74	20.92
Total Belanja		1,131,550,893,497.20	100	1,124,207,594,621.48	100	1,197,745,398,807.42	100	100

Proporsi belanja daerah terbesar terdapat pada belanja tidak langsung, yaitu pada tahun 2018 proporsi belanja tidak langsung tercatat sebesar 54,27 persen kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 56,31 persen namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan yaitu sebesar 51,82 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah Kabupaten Sinjai ke depannya agar mengalokasikan anggaran untuk secara langsung ditujukan untuk meningkatkan layanan publik.

Gambaran kinerja kebijakan alokasi belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Sinjai selama periode 2018-2020, disajikan pada tabel 3.12 dan tabel 3.13 berikut ini

Tabel 3.12
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Sinjai
Tahun 2018-2020

No	Uraian	(n-3) 2018	(n-2)**) 2019	(n-1)**) 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
A.	Belanja Tidak Langsung	433,265,411,735.25	451,136,851,469.00	448,273,085,508.00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	302,161,531,800.00	314,599,009,721.00	316,597,068,947,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan **)	124,637,103,254.25	131,021,001,836.00	128,509,386,879,00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	5,864,652,347.00	4,898,200,000.00	2,668,000,000.00
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah **)	602,124,334.00	618,639,912.00	498,629,682,00
B	Belanja Langsung	334,111,817,450.95	275,260,419,282.56	188,759,506,167.96
1	Belanja Honorarium PNS**)	3.622,565,721.00	356,615,000.00	131,340,000.00
2	Belanja Uang Lembur**)	0.00	0.00	0.00
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0.00	0.00	0.00
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	4,023,063,000.00	2,593,408,927.00	430,200,000.00
5	Belanja premi asuransi kesehatan	27,851,755,272.00	36,822,851,783.00	51,689,454,220.00
6	Belanja makanan dan minuman pegawai***)	17,612,772,800.00	21,974,290,200.00	10,027,622,250.00
7	Belanja pakaian dinas dan	378,920,000.00	638,632,000.00	261,050,018.00

No	Uraian	(n-3) 2018	(n-2)**) 2019	(n-1)**) 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	atributnya**)			
8	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu*)	739,290,000.00	1,086,230,000.00	463,580,000.00
10	Belanja pakaian kerja*)	997,285,000.00	298,150,000.00	275,875,000.00
11	Belanja Perjalanan Dinas	34,479,986,237.00	38,266,729,119.00	15,214,651,181.00
12	Belanja perjalanan pindah tugas	0.00	0.00	0.00
13	Belanja pemulangan pegawai	0.00	0.00	0.00
14	Belanja modal (kantor, mobil dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	244,406,179,420.95	173,223,512,253.56	110,265,733,498.96
	Total	762,757,378,465.20	726,397,270,751.56	637,032,591,675.96

Sumber: Buku APBD Kabupaten Sinjai, berbagai seri

Tabel 3.13
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun 2018-2020

No	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Proporsi
		A	b	(a)/(b)*100
1	2018	762,757,378,465.20	1,134,550,893,497.20	67.22
2	2019	726,397,270,751.56	1,127,207,594.621.48	64.44
3	2020	637,032,591,675.96	1,245,495,398,807.42	51.14
Rata-Rata				60.93

Sumber: Buku APBD Kabupaten Sinjai, berbagai seri

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari waktu ke waktu, tahun 2018 sebesar 67,22 persen, tahun 2019 sebesar 64,44 persen, dan tahun 2020 sebesar 51,14 persen, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan semakin besar proporsinya setiap tahun terhadap APBD dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Selain itu, dari tahun ke tahun diupayakan efisiensi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur jika diproporsikan terhadap APBD.

3.2.3 Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan

yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Penyelenggaraan fungsi pemerintah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*). Gambaran analisis pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel 3.14 sebagai berikut :

Tabel 3.14
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sinjai
Tahun 2018-2020

No	Uraian	(n-3) 2018	(n-2) 2019	(n-1) 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	308.026.184.147,00	324.076.336.205,72	328,195,836,208.46
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	302,161,531,800	314.599.009.721,00	316,597,068,947.00
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	5,864,652,347	4.898.200.000,00	2,668,000,000.00
3	Belanja Bunga	0,00	2.136.303.212,00	6,706,860,938.00
4	Belanja Bagi Hasil	1.932.781.061,00	2.442.823.272,72	2,223,906,323.46
B	Pembiayaan Pengeluaran	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	47,750,000,000.00
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0.00
2	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	46,250,000,000.00
3	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	1,500,000,000.00
	TOTAL (A+B)	311.026.184.147,00	327.076.336.205,72	375,945,836,208.46

Sumber: Buku APBD Kabupaten Sinjai, berbagai seri

3.2.4 Analisis Pembiayaan Daerah

Analisis Pembiayaan Daerah tahun anggaran berkenaan bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah dalam tabel yang berikut ini.

Tabel 3.15
Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Sinjai

No	Uraian	2018	2019	2020*)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo kas neraca daerah dikurangi	43,852,915,377,43	137,339,249,861.45	87,878,581,810.93
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	17,216,528,616,82	102,561,320,862.07	152,924,406,377.95
3	Kegiatan lanjutan	2,831,466,900.00	6.736.714.000.00	7,421,161,687.59
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	23,804,919,860.61	28,041,214,999.38	-72,466,986,254,61

Sumber: Buku APBD Kabupaten Sinjai, berbagai seri

Kinerja kebijakan pembiayaan daerah yang berpihak pada masyarakat dapat dicermati pada kebijakan keuangan daerah yang bersifat ekspansif. Kebijakan pembiayaan yang bersifat ekspansif, cenderung untuk mengalokasikan belanja daerahnya yang lebih besar dari kemampuan pendapatannya, dengan harapan untuk memenuhi ekspektasi kebutuhan pelayanan umum dan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat luas. Perspektif ini akan menempatkan pembiayaan daerah selalu dalam posisi defisit, sehingga pemerintah daerah selalu berupaya untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pembiayaan untuk menutupi kebutuhan pengeluaran yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat dan kemajuan pembangunan daerah

Tabel 3.16
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2020

No	Uraian	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,136,907,609,911.82	1,136,257,767,052.50	1,120,534,922,427.90
	Dikurangi realisasi			
2	Belanja Daerah	1,131,550,893,497.20	1,124,207,594,621.48	1,197,745,398,807.42
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	47,750,000,000.00
	Defisit riil	2,356,716,414.62	9,050,172,431.02	-124,960,476,379.52

Sumber: Buku APBD Kabupaten Sinjai, berbagai seri

Berdasarkan tabel tersebut selama kurun waktu 2018-2020, APBD Kabupaten Sinjai mengalami surplus artinya realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah pada tahun 2018 dan 2019. Namun demikian, tahun 2020 mengalami defisit, yang artinya realisasi pendapatan daerah kurang dari realisasi belanja daerah. Selanjutnya untuk mendapatkan surplus atau defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman daerah, pembayaran kegiatan lanjutan tahun lalu, dan pengembalian kelebihan penerimaan tahun lalu. Pada tahun 2018 dan 2019 terjadi surplus riil masing-masing sebesar Rp2,356 miliar dan Rp9,050 miliar, sedangkan pada tahun 2020 terjadi defisit riil sebesar Rp124,960 miliar.

Tabel 3.17
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sinjai Tahun 2017-2020

No	Uraian	Komposisi dari total defisit riil			
		2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Defisit Riil	-43,575,494,389.24	2,356,716,414.62	9,050,172,431.02	-124,960,476,379,52
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya	192.52	95.22	94.04	-86.09
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	59.11	121,08
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0
6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0

Sumber: Buku APBD Kabupaten Sinjai, berbagai seri

Dengan memperhatikan data defisit riil anggaran dan komposisi penutup defisit riil anggaran selama tahun 2017 sampai dengan 2019, maka dapat diterjemahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sinjai mempunyai sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan yang cukup besar sebagai akumulasi dari surplus/defisit riil anggaran ditambah penerimaan pembiayaan yang relatif besar sebagai komposisi penutup defisit riil anggaran.

Tabel 3.18
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Sinjai
Tahun 2018-2020

No	Uraian	2018		2019		2020		Rata-rata pertumbuhan
		Rp	persen dari SILPA	Rp	persen dari SILPA	Rp	persen dari SILPA	
	Jumlah SILPA	49,352,260,678.43		142,838,542,190.45		57,808,757,881		
1	Pelampauan penerimaan PAD	5,380,548,637.06	10.9	2,486,042,230.65	1.74	5,899,289,157.02	10.2	7.62
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-15,509,357,924.00	-288.25	-8,975,737,516.00	-361.05	-5,366,501,585.00	-90.97	246.75
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	9,097,885,805.00	18.43	904,414,954.85	0.63	5,163,339,142.02	15.5	11.52
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	46,995,544,263.81	95.44	49,352,260,678.43	34.55	142,838,542,190.45	247.09	125.69

Sumber: Buku APBD Kabupaten Sinjai, berbagai seri

Keterangan*) Pelampauan Penerimaan dana perimbangan, Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, Kegiatan lanjutan

Optimisme tersebut semakin dipertegas dengan mencermati komponen-komponen pembentuk SiLPA yang pada dasarnya merupakan langkah-langkah kongkrit penyehatan keuangan daerah, baik dari sisi penerimaan/pendapatan maupun dari sisi pengeluaran/belanja daerah. Kinerja kebijakan keuangan daerah yang mendorong perolehan SiLPA Kabupaten Sinjai dalam tiga tahun terakhir, ditunjukkan pada tabel 3.18. Pada tahun 2018, pembentukan SiLPA lebih dominan didorong oleh langkah-langkah penghematan yang dilakukan pemerintah daerah, dan capaian-capaian lainnya, seperti adanya pelampauan penerimaan dana perimbangan dan adanya kegiatan lanjutan, selebihnya berupa pelampauan penerimaan PAD dan pelampauan lain-lain pendapatan daerah. Kinerja tersebut berlanjut pada tahun berikutnya, bahkan SiLPA hampir sepenuhnya diperoleh dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Sebagian yang lain diperoleh dari pelampuan penerimaan lain-lain pendapatan daerah. Pada akhir tahun 2020, kinerja pembiayaan keuangan daerah Kabupaten Sinjai ini tetap menunjukkan kondisi keuangan daerah yang sehat, tidak membebani keuangan daerah dan masyarakat, sehingga dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkesinambungan.

Berikut ini ditampilkan tabel analisis realisasi Sisa Lebih (riil) pembiayaan anggaran tahun berkenaan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan.

Tabel 3.19
Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2020

No	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020*) (Rp)
1	Saldo kas neraca daerah Dikurangi	43,852,915,377,43	137,339,249,861.45	87,878,581,810.93
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	17,216,528,616,82	102,561,320,862.07	152,924,406,377.95
3	Kegiatan lanjutan	2,831,466,900.00	6.736.714.000.00	7,421,161,687.59
4	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	23,804,919,860.61	28,041,214,999.38	-72,466,986,254,61

Analisis proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan.

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Asumsi Ekonomi, Sosial, dan Fiskal

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi sosial masyarakat, dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2021-2023. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Artinya, asumsi tersebut, selain akan menuntun proyeksi besaran pendapatan daerah, juga akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu tiga tahun ke depan.

Asumsi makro ekonomi daerah yang diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah tiga tahun ke depan. Namun karena adanya bencana terkait dengan merebaknya wabah covid-19 akan memberikan imbas negatif terhadap perekonomian Kabupaten Sinjai beberapa sektor antara lain : 1) sektor transportasi terutama transportasi darat dan laut; 2) Sektor industri pengolahan; 3) sektor perdagangan besar dan eceran. Meski demikian, asumsi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sinjai pada triwulan pertama 2021 tetap diperkirakan naik 1-2 persen di level triwulan yang sama tahun sebelumnya. Sebagai langkah antisipasi agar perekonomian tetap bertumbuh sesuai asumsi, maka pemerintah daerah perlu menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memastikan agar dunia usaha dan industri kecil menengah tetap bergerak melalui penyediaan berbagai kemudahan berusaha dan pemberian stimulus ekonomi (keringanan pajak dan biaya perijinan, pemberian bantuan, dan lain lain). Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai tetap optimis untuk pencapaian target pertumbuhan yang telah ditetapkan, perekonomian dapat terkendali dengan asumsi bahwa faktor utama yang berpengaruh terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut adalah *multiplier effects* dari berbagai proyek infrastruktur yang memacu kenaikan produksi dan mendorong investasi swasta. Selain itu, permintaan terhadap komoditas utama kabupaten diperkirakan juga masih terjaga.

Tabel 3.20
Asumsi Capaian Indikator Makro Ekonomi dan Sosial
Kabupaten Sinjai Tahun 2020-2023

No.	Indikator	Satuan	Tahun		
			2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	68,15	68,55	69,06
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,30-4,40	4,28-5,71	4,39-5,86
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,64	2,58	2,53
4	Tingkat Kemiskinan	%	8,85	8,65	8,45
5	Rasio Gini	Angka	0,365	0,357	0,350
6	PDRB Perkapita	Rp. Juta	46,65	51,65	52,15

Sumber : Hasil Proyeksi, 2021

Asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal khususnya Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2021-2023 diperkirakan akan tumbuh melambat. Hal ini disebabkan oleh adanya bencana terkait dengan merebaknya wabah covid-19.

Tabel 3.21
Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Kabupaten Sinjai Tahun 2021-2023

No	Uraian	2021		2022		2023	
		(Rp dalam Jutaan)					
		Pagu (Rp)	r (%)	Pagu (Rp)	r (%)	Pagu (Rp)	r (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	99.292,7	8.27	102.863,9	7,93	106.568,1	8,10
2	Pendapatan Transfer	1.068.935,2	89.08	1.162.276,5	89,55	1.174.800,4	89,33
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	31.761,6	2.65	32.714,4	2,52	33.695,8	2,56

Sumber : Hasil Proyeksi, 2021

Terjadinya Pandemi Covid-19 mengakibatkan asumsi-asumsi ekonomi, sosial dan fiskal yang telah *direncanakan* sebelumnya harus direvisi mendalam. Termasuk juga asumsi pendapatan daerah yang turut mendapat imbas dari dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan pandemi tersebut.

3.3.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

3.3.2.1 Proyeksi Pendapatan

Asumsi laju pertumbuhan ekonomi yang melambat akibat adanya pandemi covid-19 akan mengurangi peluang sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dari pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, meski terjadi penurunan PDRB per kapita, namun tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka tetap turun tipis, yang secara konsisten akan menjaga kemampuan daya beli dan kemampuan membayar pajak dan retribusi bagi masyarakat, sehingga melalui capaian-capaian indikator-indikator makro ekonomi daerah tersebut dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah Kabupaten Sinjai untuk periode 2021-2023 ke depan.

Pendapatan daerah untuk tiga tahun yang akan datang, diproyeksikan secara realistis sesuai dengan potensi pendapatan daerah yang tercipta dari melambatnya perekonomian daerah Kabupaten Sinjai yang semakin tetap menunjukkan trend positif. Untuk itu, pendapatan daerah yang bersumber dari PAD diproyeksikan tetap bertumbuh lebih pesat dibandingkan dua komponen lainnya, yaitu dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini diyakini sebagai langkah nyata guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, selain menciptakan adanya tingkat kepastian pendapatan daerah yang semakin baik dari tahun ke tahun.

Asumsi makro ekonomi dan sosial daerah yang ditetapkan merupakan basis utama pendapatan daerah, khususnya bersumber dari PAD. Proyeksi pendapatan daerah yang bertumbuh lebih cepat dari pertumbuhan belanja daerah merupakan optimisme dalam capaian makro ekonomi dan sosial daerah yang berpotensi dalam meningkatkan PAD untuk tiga tahun ke depan.

Target pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan tetap naik konsisten dan stabil dalam tiga tahun ke depan akan memberi gambaran aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Sinjai diharapkan terus bergairah, baik dari sisi *supply* maupun dari sisi *demand*. Peningkatan produksi daerah bukan hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga diharapkan meningkatkan PDRB per kapita secara signifikan, dari hanya sebesar Rp46,94 juta pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp71,26 juta pada tahun 2023 yang akan datang. Pada saat yang sama dengan pertumbuhan

ekonomi daerah sebagaimana yang diharapkan tersebut, akan mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga akan mendorong peningkatan nilai IPM yang signifikan dalam lima tahun ke depan. Diperkirakan meningkat dari hanya 67 poin pada tahun 2019 menjadi 69,46 pada tahun 2023. Kualitas pertumbuhan ekonomi yang semakin baik tersebut diharapkan secara konsisten akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka, sehingga tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan dari 9 persen pada tahun 2020 menjadi hanya 8,57 persen pada tahun 2023.

Tantangan bagi pemerintah daerah dan pelaku ekonomi daerah di Kabupaten Sinjai adalah bagaimana mempertahankan dan mewujudkan asumsi-asumsi makro ekonomi dan sosial daerah tersebut. Asumsi-asumsi tersebut tidak cukup kuat dalam mendorong peningkatan PAD dan pendapatan daerah secara umum jika tidak disertai dengan kebijakan keuangan daerah yang tepat dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban-kewajiban fiskalnya. Pemerintah daerah harus berupaya untuk menghadirkan kebijakan keuangan daerah yang tepat sesuai dengan perkembangan ekonomi masyarakat. Diperlukan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang baik, mampu mengelola segenap potensi PAD yang berkembang dalam kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Kebijakan tersebut hendaknya disertai dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah beserta dengan sumber-sumber pendapatan PAD lainnya. Proyeksi pendapatan tahun 2021- 2023 dapat dilihat pada tabel 3.22 berikut ini.

Tabel 3.22
Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2023
Kabupaten Sinjai(Rupiah)

Kode	Uraian	TARGET 2021	PROYEKSI 2022	PROYEKSI 2023
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	99,292,703,653	102,863,965,629	106,568,066,929
4.1.01	Pajak Daerah	15,832,784,926	16,228,604,549	16,634,319,662
4.1.02	Retribusi Daerah	10,863,626,350	11,135,217,008	11,413,597,433
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,773,194,827	4,964,122,620	5,162,687,524
4.1.04	Lain-lain PAD yang	67,823,097,550	70,536,021,452	73,357,462,310

Kode	Uraian	TARGET 2021	PROYEKSI 2022	PROYEKSI 2023
	Sah			
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,068,935,262,000	1,162,276,471,468	1,174,800,377,744
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,025,190,526,000	1,117,219,393,388	1,128,391,587,322
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	43,744,736,000	45,057,078,080	46,408,790,422
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	31.761.600.000	32,714,448,000	33,695,881,440
4.3.01	Lain-lain Pendapatan	31,761,600,000	32,714,448,000	33,695,881,440
	Jumlah Pendapatan	1.199.989.565.653	1,297,854,885,097	1,315,064,326,113

Sumber: Hasil Proyeksi, 2021

Secara struktur, postur pendapatan daerah selama tiga tahun ke depan, nampaknya masih didominasi sumber pendapatan dari dana transfer, tetapi secara bertahap diharapkan kontribusi PAD juga akan semakin meningkat.

Hingga tahun 2023 yang akan datang, tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Sinjai masih akan tinggi. Ditandai dengan tetap tingginya pendapatan daerah yang bersumber dari luar daerah. Selama periode 2019-2023, dana perimbangan / dana transfer daerah diperkirakan tetap menyumbang hingga 77 sampai 80 persen terhadap total pendapatan daerah, dengan harapan kebijakan keuangan negara juga tetap konsisten dalam mendorong peningkatan pendapatan negara, sehingga bagi hasil ke daerah juga tetap memadai untuk mendukung operasional pemerintahan daerah, sedangkan pendapatan dari PAD mencapai 12 persen dari total pendapatan daerah selama periode ini. Kontribusi PAD ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Mengingat kontribusi PAD diperkirakan akan meningkat dari hanya sekitar 7 persen selama periode sebelumnya dan diharapkan meningkat hingga 12 persen selama periode pembangunan 2021-2023 yang akan datang.

Harapan untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah secara bertahap ini, terutama dibebankan pada sumber PAD dari pajak dan retribusi daerah yang diharapkan berkontribusi minimal 23 persen hingga tahun 2023 yang akan datang. Pada saat yang sama kinerja sumber PAD yang

berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah (HPKD) yang dipisahkan diharapkan juga akan semakin baik, terutama inovasi dalam pengelolaan BUMD, membentuk BUMD baru dalam hal ini Perusahaan Umum Daerah (Perumda) serta penyertaan modal pada BUMD/BUMN/BUMS yang mampu menghasilkan deviden dan menjadi sumber PAD yang berkesinambungan bagi Kabupaten Sinjai ke depan. Selain itu, sumber PAD dari lain-lain PAD yang sah juga diharapkan tetap berkinerja baik untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah yang semakin akuntabel. Diharapkan dari sumber PAD ini akan semakin memperbaiki keeluasaan fiskal daerah Kabupaten Sinjai untuk periode pembangunan yang akan datang.

Sumber pendapatan daerah dari bantuan keuangan provinsi tetap diasumsikan ada secara realistis. Meskipun demikian, sumber ini tetap diharapkan memberi kontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah agar tidak mengganggu sumber-sumber pendapatan daerah lainnya untuk alokasi belanja dan pengeluaran pemerintah daerah untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Sinjai sampai akhir periode RPJMD Tahun 2023 yang akan datang.

3.3.1.2 Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi kebutuhan belanja daerah untuk lima tahun yang akan datang, selain memperhitungkan kemampuan pendapatan daerah, juga sangat memperhatikan target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan, terutama target asumsi makro ekonomi dan sosial daerah yang hendak dicapai untuk lima tahun ke depan. Target tren pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan PDRB per kapita yang cukup besar, peningkatan IPM yang konsisten hingga setara dengan provinsi, serta penurunan tingkat kemiskinan yang tajam dan tingkat pengangguran yang kembali pada posisi terendah selama periode pembangunan sebelumnya, akan mendorong kebutuhan pengeluaran dan belanja daerah yang juga meningkat secara konsisten selama periode yang sama.

Gambaran hubungan kebutuhan alokasi belanja daerah untuk pencapaian target-target makro ekonomi dan sosial daerah Kabupaten Sinjai untuk periode 2019-2023 yang akan datang, diilustrasikan tabel berikut :

Tabel 3.23
Target dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2021-2023
Kabupaten Sinjai (Rupiah)

Kode	Uraian	TARGET 2021	PROYEKSI 2022	PROYEKSI 2023
5	BELANJA			
5.1	BELANJA OPERASI	820,244,563,707	892,478,639,520	896,294,100,404
5.1.01	Belanja Pegawai	483,754,407,164	551,453,817,359	553,659,632,628
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290,297,577,460	296,458,767,769	297,624,602,840
5.1.03	Belanja Bunga	1,988,092,636	185,000,000	185,000,000
5.1.04	Belanja Hibah	44,141,986,447	44,318,554,392	44,761,739,936
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	62,500,000	62,500,000	63,125,000
5.2	BELANJA MODAL	252,148,708,173	253,157,303,004	260,179,093,710
5.2.01	Belanja Tanah	-	7,500,000,000	500,000,000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71,767,306,562	64,554,375,788	72,274,919,546
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	108,314,617,823	108,747,876,294	114,305,572,733
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70,327,616,988	70,608,927,455	71,335,016,730
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,739,166,800	1,746,123,467	1,763,584,702
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12,000,000,000	15,000,000,000	20,000,000,000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12,000,000,000	15,000,000,000	20,000,000,000
5.4	BELANJA TRANSFER	132.218.942.573	137,218,942,573	138,591,131,999
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.523.626.973	2.523.626.973	2,548,863,243
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	129.695.315.600	134,695,315,600	135,995,125,000
	Jumlah Belanja	1,216,612,214,453	1,297,854,885,097	1,315,064,326,113
	Total Surplus/(Defisit)	(16.622.648.800)	0	0

Sumber: Hasil Proyeksi, 2021

Target-target tersebut berimplikasi pada alokasi belanja langsung semakin besar, bukan hanya ditujukan untuk memastikan berjalannya roda pemerintahan daerah untuk pelayanan publik, tetapi juga untuk menjamin dukungan terhadap akselerasi kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat secara berkesinambungan. Diharapkan, proyeksi alokasi kebutuhan belanja modal secara bertahap akan dialokasikan lebih besar daripada tahun-tahun

sebelumnya. Hal ini mengindikasikan dukungan untuk pelayanan publik serta kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah Kabupaten Sinjai.

Alokasi belanja daerah, alokasi belanja operasi, dan alokasi belanja modal yang menunjukkan trend meningkat secara konsisten, diharapkan mampu mendorong pencapaian kinerja indikator makro ekonomi dan sosial daerah yang semakin baik. Hanya saja, perlu dipahami bahwa kontribusi sektor keuangan publik daerah ini bukan sepenuhnya sebagai penentu dalam pencapaian kinerja makro ekonomi dan sosial tersebut. Banyak faktor penentu lainnya yang bersinergi dalam pencapaian kinerja makro dan sosial daerah ini. Dari pihak pemerintah, selain APBD Kabupaten, juga diharapkan adanya kontribusi dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga dari APBN melalui implementasi program dan kegiatan pembangunan yang dialokasikan di Kabupaten Sinjai, setidaknya untuk periode pembangunan 2022-2023 yang akan datang. Selain itu, kontribusi sektor swasta dan masyarakat tidak kalah pentingnya. Tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi, investasi sektor swasta yang tetap kondusif, dan permintaan ekspor komoditi strategis diharapkan semakin membaik sehingga akan menjadi faktor utama dalam peningkatan pencapaian target ekonomi makro dan sosial daerah Kabupaten Sinjai. Keuangan sektor publik yang bersumber dari APBD Kabupaten Sinjai diharapkan sebagai pemicu dalam menggerakkan dan menciptakan iklim kegiatan ekonomi dan sosial yang semakin baik menuju pertumbuhan daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

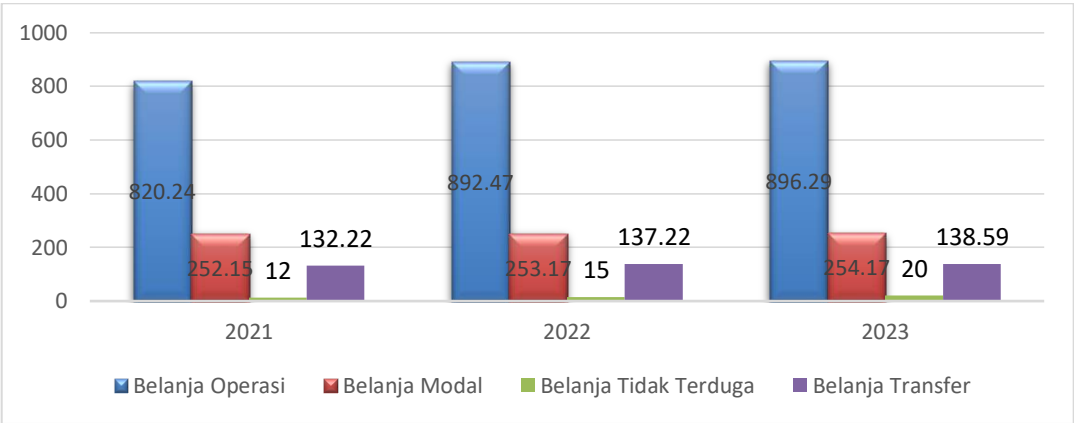
Kebutuhan alokasi belanja daerah yang semakin besar tersebut mendorong pengelolaan belanja daerah yang efektif, efisien dan tepat sasaran. Untuk itu, alokasi belanja daerah bukan hanya dituntut untuk bertumbuh secara konsisten, tetapi juga penting untuk diperhatikan proporsinya antara alokasi belanja modal dan belanja operasi yang semakin berimbang secara proporsional.

Gambaran pengelolaan alokasi belanja daerah yang diharapkan semakin berimbang untuk tiga tahun yang akan datang, merupakan upaya pemerintah daerah dalam membangun kesadaran pentingnya mengedepankan orientasi pembangunan daerah untuk kepentingan masyarakat secara langsung. Membangun kesadaran bahwa alokasi belanja daerah harus menjamin nilai kemanfaatan dari program pembangunan daerah akan dinikmati langsung

oleh masyarakat. Alokasi belanja daerah harus lebih diorientasikan pada alokasi belanja modal, khususnya untuk alokasi belanja modal nfrastruktur serta belanja barang dan jasa, sebagaimana diilustrasikan pada dua grafik berikut ini

Grafik 3.1.

Proyeksi Postur Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Sinjai, Periode 2021-2023

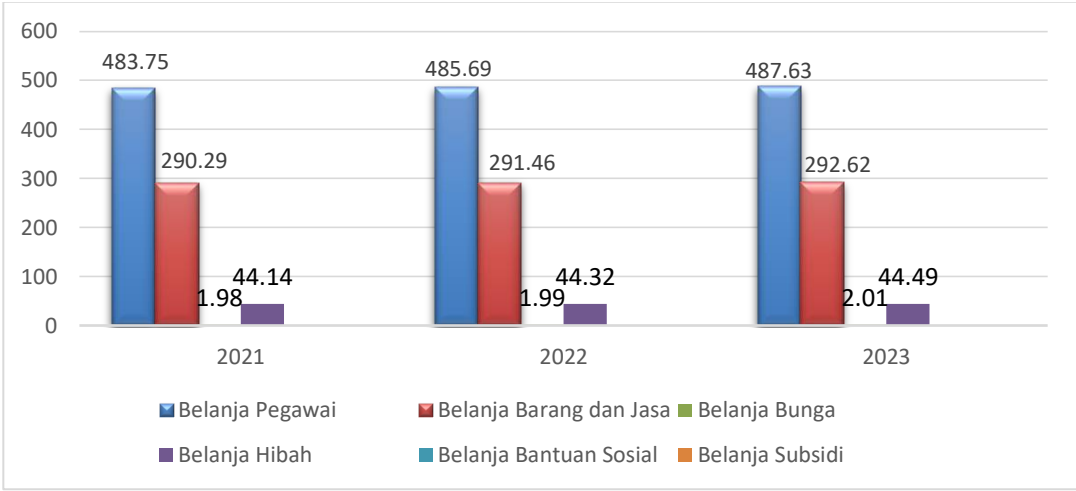


Sumber: Hasil proyeksi tim penyusun

Gambaran proyeksi postur alokasi belanja Operasi Kabupaten Sinjai untuk periode pembangunan 2021-2023, pada grafik berikut ini.

Grafik 3.2.

Proyeksi Postur Alokasi Belanja Operasi Kabupaten Sinjai, Periode 2021-2023



3.3.1.3 Pembiayaan Daerah

Hasil proyeksi pembiayaan daerah, menunjukkan upaya yang semakin kehati-hatian dari pemerintah daerah Kabupaten Sinjai hingga akhir periode RPJMD tahun 2023 yang akan datang. Hal ini terlihat pada kebijakan pembiayaan berimbang hingga periode pembangunan tahun 2022 dan 2023. Defisit ini, bukan hanya tetap aman sebagaimana yang dipersyaratkan

perundangan di bawah 3 persen dari PDRB, tetapi juga menunjukkan kecenderungan yang menurun hingga akhir periode 2023. Defisit anggaran pada dua tahun terakhir akan diupayakan dapat tertutupi dari Silpa tahun sebelumnya. Kinerja keuangan daerah yang diproyeksikan semakin stabil, alokasi pengeluaran dan belanja daerah bukan hanya untuk sekedar implementasi program dan kegiatan pembangunan daerah, tetapi juga mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari bertumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Selengkapanya postur pembiayaan defisit Kabupaten Sinjai selama periode 2021-2023 digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.24
Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021-2023
Kabupaten Sinjai(Rupiah)

Kode	Uraian	TARGET 2021	PROYEKSI 2022	PROYEKSI 2023
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	57.808.757.881	18,301,474,981	18,223,222,730
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	57.808.757.881	18,301,474,981	18,223,222,730
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	41.186.109.081	18,301,474,981	18,223,222,730
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	3,000,000,000
6.2.02	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	38.186.109.081	15,301,474,981	15,223,222,730
6.2.0.3	Pembiayaan Netto	16,622,648,800	0	0
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0

Sumber: Hasil Proyeksi, 2021.

Neraca keuangan defisit diproyeksikan terjadi pada tahun 2021, hal ini ditempuh guna memastikan semua target-target capaian pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai pada akhir periode pemerintahan dan pembangunan 2023. Upaya untuk menjamin capaian kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan hingga akhir periode dan memasuki periode berikutnya. Sumber penerimaan

untuk menutupi defisit anggaran, bukan hanya diharapkan dari dalam daerah, tetapi tidak tertutup kemungkinan diperoleh dari luar daerah, misalnya melalui mekanisme hutang daerah. Syaratnya, harus mampu dikelola dengan baik, agar tidak membebani masyarakat. Untuk itu harus dapat dialokasikan pada program-program pembangunan yang bersifat produktif. Bukan hanya yang bersifat *cost recovery*, tetapi juga program-program pembangunan daerah yang berpola *income generation*. Sehingga kebijakan defisit hingga akhir periode pemerintahan daerah 2023 ini, menunjukkan langkah nyata pemerintah daerah untuk memperbesar belanja daerah yang ditujukan untuk pelayanan publik dan kesinambungan kegiatan ekonomi masyarakat pada periode pembangunan berikutnya.

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan menunjukkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk alokasi belanja langsung program pembangunan daerah, baik berupa program pembangunan daerah maupun berupa program perangkat daerah. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ini merupakan selisih dari penerimaan daerah dan kewajiban daerah untuk belanja operasi dan pengeluaran wajib daerah.

Selanjutnya, berdasarkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut, dialokasikan penggunaannya untuk belanja langsung daerah, baik berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa maupun untuk alokasi belanja modal daerah.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya didistribusikan dalam tiga prioritas, yaitu:

1. Prioritas pertama, untuk pemenuhan kebutuhan belanja operasi yang wajib dan mengikat, serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar, berupa implementasi urusan wajib pelayanan dasar, dalam hal ini pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM);

Prioritas *pertama*, menyangkut enam urusan wajib pelayanan dasar, oleh PP No. 2 Tahun 2018 ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimum (SPM), yakni pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta pelayanan bidang sosial. Untuk menjalankannya,

diserahkan kepada perangkat daerah yang relevan untuk menjalankan urusan wajib pelayanan dasar di Kabupaten Sinjai.

2. Prioritas kedua, ditujukan untuk mendanai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah, sebagaimana yang telah dijanjikan pada saat proses pemilihan kepala daerah berlangsung. Dalam urusan pemenuhan visi dan misi kepala daerah ini, termasuk dalam urusan pelayanan dasar maka juga dikategorikan dalam prioritas pertama;

Prioritas kedua, sebagaimana naskah visi dan misi kepala daerah terpilih Kabupaten Sinjai Periode 2018-2023, fokus pada empat belas program bidang, yakni bidang: (1) ekonomi, (2) pertanian, (3) peternakan, (4) perikanan, (5) kesehatan, (6) pendidikan, (7) infrastruktur, (8) sosial, keagamaan dan kemasyarakatan, (9) penegakan supremasi hukum dan HAM, (10) lingkungan hidup, (11) pemerintahan, (12) pariwisata, (13) pemuda dan olahraga, serta (14) pemberdayaan perempuan dan anak. Untuk menjalankannya terkait dengan perangkat daerah yang relevan, baik pada perangkat daerah untuk penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, serta untuk penyelenggaraan urusan penunjang urusan.

3. Prioritas ketiga, diperuntukkan untuk alokasi belanja urusan pemerintahan daerah lainnya yang belum termuat dalam prioritas pertama dan kedua, khususnya untuk penyelenggaraan urusan penunjang urusan.

Prioritas ketiga fokus pada urusan pemerintahan daerah lainnya, berupa penyelenggaraan urusan penunjang dan urusan lainnya yang belum tercover dalam prioritas pertama dan kedua. Penyelenggaraannya sebagian besar oleh perangkat daerah berkaitan dengan urusan penunjang urusan, dan perangkat daerah lainnya yang tidak tergolong dalam prioritas pertama dan kedua.

Khusus untuk penyelenggaraan urusan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur, dan urusan bidang sosial, selain merupakan urusan wajib pada prioritas pertama, juga menjadi konsen pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program pembangunan daerah untuk pencapaian visi dan misi kepala daerah. Sehingga penyelenggaraan urusan keempat bidang tersebut yang digolongkan dalam prioritas kedua adalah yang belum tercantum dalam urusan wajib pelayanan dasar. Sedangkan untuk layanan urusan bidang keagamaan hendaknya disertai dengan pencermatan lebih lanjut, harus

dialokasikan secara hati-hati karena penyelenggaraan urusan bidang bukan merupakan urusan yang didesentralisasikan. Selengkapnya mengenai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah beserta dengan komponen-komponen pembentukannya untuk Kabupaten Sinjai selama periode 2019-2023, disajikan secara lengkap pada tabel berikut ini.

Tabel 3.25
Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Kab. Sinjai
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020 (APBD Perubahan)	2021 (APBD Pokok)	2022 (Proyeksi)	2023 (Proyeksi)
1	Pendapatan	1,136,257,767,052.41	1,111,039,011,814.00	1,199,989,565,653	1,297,854,885,097	1,315,064,326,113
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan/atau Penerimaan Pinjaman	49,352,260,678.43	142,838,542,190.45	57,808,757,881	18,301,474,981	18,223,222,730
Total Penerimaan		1,185,610,027,738.84	1,253,877,554,004.45	1,257,798,323,534.00	1,316,156,360,078	1,333,287,548,843
	Dikurangi					
4	Belanja Tidak Langsung/Belanja Pegawai	633,065,974,901.72	652,069,279,597.95			
5	Pengeluaran Pembiayaan	3,000,000,000.00	47.750.000.000	41.186.109.081	18,301,474,981	18,223,222,730
Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah		549,544,052,837.00	554,058,274,406.50	1,216,612,214,453	1,297,854,885,097.00	1,315,064,326,113

Tabel 3.26
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2021-2023 (Rupiah)

Uraian	2021 (Target)	2022	2023
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1,199,989,565,653.00	1,297,854,885,097.00	1,315,064,326,113
Prioritas I	203.998.226.161,01	220.635.330.466,49	223.560.935.439,21
Prioritas II	287.997.495.756,72	48.959.574.278,64	315.615.438.267,12
Prioritas III	707.993.843.735,27	765.734.382.207,23	775.887.952.406,67

Sumber: Hasil Proyeksi, 2021

Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat diestimasikan kebutuhan untuk alokasi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah kedalam tiga prioritas selama periode 2021-2023, yakni 17 persen untuk prioritas pertama, 24 persen untuk prioritas kedua, serta 59 persen untuk prioritas ketiga.

3.4 Dampak Pandemi Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020

Pandemi Covid-19 memberi dampak sangat besar diberbagai bidang yang membuat ekonomi menjadi terpuruk dan Pendapatan Daerah mengalami penurunan yang drastis. Dampak covid-19 dari sisi ekonomi berimplikasi kepada melambatnya sektor-sektor usaha yang selama ini menjadi sumber retribusi. Covid-19 turut mengganggu kegiatan-kegiatan yang selama ini sumber pendapatan dari sektor pajak yang dikelola Bapenda. Kurangnya pendapatan yang diterima dari sektor usaha itu, tentu menghambat pembiayaan atau belanja kegiatan prioitas lainnya sehingga dibutuhkan anggaran yang besar untuk diarahkan pada agenda penanggulangan Covid-19.

Penurunan penerimaan negara juga berimplikasi pada terganggunya dana transfer kepada pemerintah daerah (pemda) kabupaten. Sebagian besar APBD pemda bertumpu pada alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Dalam struktur APBD Kabupaten Sinjai tahun 2016-2020, tumpuan anggaran dari dana transfer rata-rata 78 persen. Kabupaten Sinjai masih dalam kategori dengan posisi kapasitas fiskal rendah, yang masih bertumpu pada dana transfer pemerintah pusat, namun di sisi lain Kementerian Keuangan perlu mengadakan

penyesuaian dana transfer ke daerah. Secara umum Dana Bagi Hasil (DBH) dikurangi 33 persen, Dana Alokasi Umum (DAU) kurang 10 persen, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 30 persen. Dampak Covid-19 terhadap Penerimaan Pajak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD Pokok tahun anggaran 2020, mengalami defisit akibat dampak Covid-19 yang sangat mempengaruhi semua sektor pendapatan daerah.

Adanya perubahan target pendapatan pajak ini merujuk pada surat keputusan bersama (SKB) Mendagri dan Menteri Keuangan tentang Percepatan Penyesuaian APBD tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Sosial. penyesuaian (target pajak) menindaklanjuti SKB Mendagri dan Menteri Keuangan. Dalam SKB itu, diatur kepala daerah bisa melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD.

3.5 Pembiayaan Pembangunan Daerah Non Pemerintah

Untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah yang berimplikasi pada semakin meningkatnya kebutuhan anggaran dan pembiayaan pembangunan di Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai mempunyai keterbatasan dalam kemampuan pembiayaan pembangunan daerah, untuk itu dibutuhkan alternatif sumber-sumber pembiayaan lain, di antaranya dapat melalui :

1. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha merupakan kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum, dengan ketentuan yang mengacu pada spesifikasi khusus yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga / kepala daerah /badan usaha milik negara (BUMN) / badan usaha milik daerah (BUMD), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan tetap memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak terkait. Manfaat penggunaan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur adalah penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu; kesinambungan dalam proses perencanaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan; serta mengatasi

keterbatasan kapasitas pendanaan pemerintah melalui pengerahan dana swasta, sehingga penyediaan infrastruktur dapat lebih dioptimalisasi. Dengan landasan hukumnya yang telah dimuat dalam Perpres No.38/2015 dimana dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa bentuk pengembalian investasi kepada pihak swasta (badan usaha) atas penyediaan infrastruktur dapat bersumber dari pembayaran oleh pengguna infrastruktur dalam bentuk tarif (user fee), pembayaran oleh penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) melalui skema ketersediaan layanan (availability payment), ataupun pembayaran dalam bentuk lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa kriteria yang dapat dibiayai dari skema KPBU berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur antara lain : a) Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial; b) Termasuk ke dalam 19 jenis infrastruktur yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; dan c) Memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat dengan memperhatikan analisa biaya manfaat dan sosial dan analisa nilai manfaat uang (Value for Money) apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha.

Dalam pengimplementasiannya, Skema KPBU ini diharapkan dapat memacu baik aktifitas pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah, maupun animo investasi bagi pihak swasta/badan usaha. Adapun bentuk stimulus bagi pihak swasta/badan usaha diantaranya adanya jaminan dan dukungan Pemerintah serta kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran

Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah. Namun demikian dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan resiko fiskal dan ketepatan sasaran penggunaannya secara jangka panjang.

2. Pembiayaan melalui pinjaman daerah

Pembangunan Infrastruktur berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Infrastruktur yang layak dan memadai mampu meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah melalui penciptaan efektifitas dan efisiensi yang dihasilkan. Salah satu komponen penting pada pembangunan infrastruktur yang baik didukung oleh pembiayaan yang layak dalam tahap perencanaan (*planning*), proses pembangunan (*construction*), hingga tahap operasi dan pemeliharaan infrastruktur (*operational and maintenance*).

Konsep struktur pembiayaan meliputi pemilihan instrument keuangan, dan bentuk pembiayaan yang didasarkan pada analisis estimasi arus kas yang dihasilkan baik berupa initial *cash outflow* yaitu pengeluaran kas untuk membiayai proyek selama dalam proses perencanaan, konstruksi, sampai dengan proyek siap untuk dioperasikan, maupun operational cash inflow yaitu penerimaan kas dari hasil pembangunan proyek infrastruktur dan pengeluaran kas untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur. Struktur pembiayaan yang baik memegang peranan penting dalam menanggulangi risiko konstruksi dan risiko ekonomi yang merupakan 2 risiko utama dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini disebabkan karena struktur pembiayaan mempengaruhi total *life-cycle cost* yang berdampak pada viabilitas keuangan suatu proyek pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut, struktur pembiayaan yang baik juga akan mempengaruhi motivasi dan komitmen dari para pihak yang berpartisipasi sehingga mampu mencapai pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien. Pertimbangan konsep struktur pembiayaan pada proyek pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan komponen investasi yang baik dalam pelaksanaannya. Hal ini mengingat bahwa proyek infrastruktur memiliki karakteristik dan keunikan dibandingkan dengan proyek lainnya.

Pembiayaan melalui pinjaman merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk: 1) menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan; dan/atau kekurangan arus kas dalam rangka belanja modal daerah.

2) Percepatan pencapaian target Program Pembangunan Daerah. 3) Adanya kegiatan Prioritas Daerah. 4) Pembangunan infrastruktur dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Adapun alternative pinjaman yaitu melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("PT SMI"), Pemilihan PT. SMI, disebabkan beberapa hal yaitu: 1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan yang fokus pada pembiayaan infrastruktur. 2) Skema dan siklus pembiayaan tidak mengikuti tahun anggaran. 3) Tujuan pembiayaan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial serta manfaat lainnya. 4) Alternatif pembiayaan infrastruktur daerah.

Manfaat Pinjaman Daerah : 1) Infrastruktur publik dapat segera memberikan manfaat kepada masyarakat. 2) Penghematan anggaran daerah dan meningkatkan pendapatan daerah (PAD). 3) Tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di daerah. 4) Akselerasi program pembangunan jangka menengah daerah 5) Persiapan untuk mendapatkan akses instrumen pembiayaan yang lebih luas (salah satunya obligasi).

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Pada bab ini diuraikan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian pembangunan periode RPJMD lalu dan analisis lingkungan strategis yang mempengaruhi pembangunan Kabupaten Sinjai lima tahun kedepan. Permasalahan diidentifikasi berdasarkan analisis kesenjangan antara standar kinerja dengan capaian kinerja pada berbagai indikator pembangunan. Isu strategis diidentifikasi dengan menganalisis isu-isu internasional, nasional, regional dan provinsi.

Permasalahan pembangunan daerah diuraikan dalam dua bagian. Bagian pertama adalah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Bagian kedua adalah permasalahan untuk penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan penunjang urusan. Isu strategis diuraikan dalam format identifikasi isu, penilaian isu dan prioritasasi isu.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

4.1.1. Permasalahan untuk Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan untuk perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dimaksudkan sebagai permasalahan yang bersifat makro yang akan dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Analisis permasalahan ini dilakukan pada tiga level. Pertama, masalah pokok, yakni permasalahan yang melibatkan indikator level impact yang sifatnya makro dan akan dipecahkan melalui misi, tujuan dan sasaran. Kedua, masalah, yakni menyebabkan dari masalah pokok, kompleksitasnya lebih terjabarkan dari masalah pokok, dan akan dipecahkan melalui rumusan strategi. Ketiga, akar masalah, yakni penyebab dari masalah dan akan dipecahkan melalui rumusan arah kebijakan. Berdasarkan pemahaman itu maka pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. IV.I
Pemetaan Permasalahan Prioritas Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Belum Optimalnya Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif	Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya reformasi birokrasi• Belum Optimalnya peningkatan Akuntabilitas Kinerja pemerintah Daerah.
2.	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Kepada Masyarakat	Belum optimalnya peningkatan pelayanan masyarakat melalui pemenuhan standar pelayanan minimal dan pelayanan umum yang strategis	<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar yang belum optimal• Belum Optimalnya Pelayanan Umum yang strategis yang memenuhi standar operasional dan prosedur.
3.	Belum optimalnya pemenuhan kesejahteraan masyarakat	Belum optimalnya Peningkatan kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">• Belum Optimalnya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan• Belum optimalnya penciptaan Iklim Investasi Yang Kondusif• Masih tingginya Tingkat pengangguran terbuka
4.	Peningkatan kecerdasan dan kualitas sumberdaya manusia yang belum optimal	Belum optimalnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya Peningkatan Kualitas Pendidikan• Belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat• Belum optimalnya peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan• Belum optimalnya Peningkatan aktualisas nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat
5.	Peningkatan kuantitas dan	Belum optimalnya	Belum optimalnya

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
	kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah yang belum optimal	pemenuhan ketersediaan infrastruktur wilayah	aksebilitas wilayah
6.	Belum Optimalnya penciptaan ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang patuh kepada hukum	Belum maksimalnya penciptaan lingkungan yang tentram dan aman	Belum optimalnya perwujudan kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman
7.	Pemeliharaan kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam yang belum optimal	Belum optimalnya pelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">• Belum optimalnya peningkatan kapasitas daerah dalam penanganan bencana• Belum Optimalnya pemeliharaan kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Berdasarkan table tersebut diatas permasalahan pokok daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Bersih, Profesional, Transparan Dan Partisipatif

Tata kelola pemerintah yang baik menjadi core business dalam mengimplementasikan pembangunan daerah, mengingat aparatur pemerintah adalah subyek utama dalam pembangunan daerah. Pengelolaan pemerintahan yang baik menciptakan pelayanan publik yang cepat dan bersih sehingga tercipta kondisi yang kondusif antara pemerintahan dan masyarakat. Sekurang-kurangnya terdapat empat elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus diperhatikan untuk mencapai good governance, yakni accountability, transparency, predictability, dan participation. Empat hal tersebut akan menjadikan pelaksanaan pemerintahan menjadi efektif dan efisien. Ada dua hal yang menjadi akar masalah belum optimalnya tata Kelola pemerintahan di Kabupaten Sinjai yaitu :

1) Masih belum optimalnya reformasi birokrasi.

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis e – government merupakan salah satu dalam komponen penilaian reformasi birokrasi. Berbagai penertiban administrasi maupun pengawasan penggunaan keuangan daerah akan menjadi basis utama dalam meminimalisir kasus tindak pidana penyimpangan penggunaan anggaran baik secara teknis maupun administrasi. Dari sisi akuntabilitas, kinerja pegawai juga menjadi tolak ukur dalam pengukuran tata kelola pemerintahan yang baik. Ukuran kinerja pegawai yang kurang jelas, baik dalam dokumen perencanaan maupun anggaran menjadi salah satu akar masalah. Selain itu pula menurunnya persentase ASN di Kabupaten Sinjai yang mengikuti Pendidikan structural juga menjadi akar permasalahan belum optimalnya tata kelola pemerintahan. Paradigma bahwa berkinerja adalah kalau sudah menghabiskan uang, sudah melaksanakan kegiatan, sudah menghasilkan produk masih melekat. Hal ini terlihat dari penggunaan indikator “terlaksananya”, masih banyak digunakan sebagai keluaran (output) suatu kegiatan. Salah satu penerapan e – government yaitu dengan telah melakukan sinkronisasi perencanaan melalui aplikasi “SIPD” yang mengakomodir dan menyatukan beberapa program dan kegiatan dalam satu aplikasi. Pada tahun 2021 ini telah dilakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pada APBD pokok tahun 2022. Berdasarkan data yang ada nilai indeks reformasi birokrasi Kabupaten Sinjai di tahun 2020 yaitu “B”.

2). Belum Optimalnya Nilai Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Penilaian atas pengelolaan kinerja pemerintah daerah tercermin dari penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kabupaten Sinjai selama periode RPJMD 2016 – 2020 hanya memperoleh nilai SAKIP “B”. Penilaian tersebut diperoleh dari unsur perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal dan capaian kinerja pemerintah daerah. Pada tahun 2020 perencanaan kinerja pada perangkat daerah sudah memenuhi unsur penilaian. Sementara kriteria yang lain masih perlu ditingkatkan.

b) Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat merupakan kewajiban dari pemerintah. Dengan terlaksananya penyelenggaraan pelayanan dasar yang optimal maka akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Ada dua akar masalah dari belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan dasar yaitu ;

- 1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar yang belum optimal.

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar merupakan kewajiban bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun saat pemenuhan pelayanan SPM kepada masyarakat belumlah optimal. Akar permasalahan dari permasalahan tersebut yaitu Cakupan 100% terhadap penerima layanan untuk urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, pemukiman dan perumahan, ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, dan sosial sesuai PP 02/2018 belum terpenuhi semua. Untuk urusan pendidikan, pelayanan pendidikan dasar belum sepenuhnya memenuhi standar minimal, urusan pendidikan ini mencakup layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Untuk urusan kesehatan ini mencakup pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita DM, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberculosi, orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia. Untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ini mencakup layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Untuk urusan perumahan dan permukiman ini mencakup penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Untuk urusan ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat ini mencakup pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Untuk urusan sosial ini mencakup layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, anak telantar di luar panti, lanjut usia telantar di luar panti, layanan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. Masalah utama dalam pemenuhan SPM untuk layanan-layanan tersebut adalah kelengkapan data penerima layanan dan kecukupan SDM, sarana/prasarana dan fasilitas dalam penyelenggaraan layanan. Pemenuhan SPM di Kabupaten Sinjai Ditahun 2020 ini beberapa SPM sudah mencapai 90% hingga 100% namun adapula yang capaiannya menurun bahkan 0%. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid - 19, hal ini utamanya mempengaruhi

pemenuhan SPM dibidang Kesehatan dan Pendidikan. Sedangkan untuk Pemenuhan SPM di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang masih dibawah target nasiona yaitu 100%. Capaian untuk SPM air minum yaitu hanya sekitar 75,65% di tahun 2020 ini dan capaian SPM untuk sanitasi yaitu sekitar 88,50%. Untuk SPM dibidang perumahan untuk capaian SPM hanya penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota yang mencapai 100% sedangkan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten tidak ada yang tercapai dikarenakan di tahun 2020 ini tidak ada kegiatan pemerintah yang menunjang capaian tersebut. Untuk SPM dibidang satuan Poisi pamong Praja dan Damkar hanya satu target tercapai 100% yaitu pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, sedangkan untuk 4 capaian lainnya tidak ada yang tercapai di tahun 2020 ini. Dan untuk SPM Bidang Sosial hanya ada dua capaian kegiatan yang mencapai 100% ditahun 2020 ini yaitu rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dan perlindungan dan jaminan social pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana sedangkan tiga capaian lainnya masih dibawah target nasional.

- 1) Belum Optimalnya Pelayanan Umum yang strategis yang memenuhi standar operasional dan prosedur

Kepuasan masyarakat atas pelayanan umum yang strategis yang sesuai standar operasional dan prosedur diukur berdasarkan hasil dari indeks kepuasan masyarakat. Indeks Kepuasan masyarakat ini menggambarkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat atas berbagai pelayanan yang disiapkan untuk masyarakat. Trend indeks kepuasan masyarakat atas layanan kepada masyarakat untuk 5 tahun terakhir di kabupaten Sinjai dapat dikategorikan baik hal ini dapat diliat dari nilai IKM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dikategorikan sangat baik. Sedangkan untuk data IKM Rumah Sakit Umum Daerah dan IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dikategorikan baik, yang mana diharapkan kedepannya pula dapat meningkat menjadi kategori sangat baik. Trend Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah kepada masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu cenderung mengalami kenaikan periode tahun 2016 sampai 2020 dan kenaikan paling signifikan pada tahun 2020, sedangkan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengalami penurunan namun kondisi penurunannya masih di atas 50% atau nilai Bagus (B). Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan umum yang

strategis sudah memenuhi standar operasional dan prosedur. Namun tentunya ini menjadi suatu perhatian untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

1) Belum optimalnya pemenuhan kesejahteraan masyarakat

Pemenuhan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari peningkatan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Ada beberapa yang mempengaruhi dari permasalahan pemenuhan kesejahteraan masyarakat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian adalah salah satu unsur penting dalam kesejahteraan penduduk. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dasar untuk menilai kinerja perekonomian suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dinilai berdasarkan dari perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sinjai untuk tahun 2020 ini termasuk kategori sangat lambat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sinjai di tahun 2020 ini hanya sebesar 1,55 persen turun sebesar 4,57% dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 yaitu sebesar 6,12%. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh adanya pandemic COVID – 19 yang mempengaruhi semua sector. Namun kondisi Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sinjai di tengah penyebaran pandemic ini dapat dikategorikan masih bisa survive dengan tumbuh positif dibandingkan kondisi dari provinsi maupun nasional. Dengan tetap meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sinjai ini diharapkan dapat menjadi penyemangat untuk melakukan inovasi dalam mengembalikan kondisi perekonomian masyarakat yang normal.

2) Rasio Gini

Rasio Gini merupakan suatu koefisien untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran dari pendapatan penduduk secara menyeluruh disuatu wilayah. Untuk mengukur rasio gini berdasarkan dari kurva Lorenz. Rasio Gini ini berkisar 0 sampai 1. Apabila koefisien gini suatu wilayah bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Klasifikasi Rasio Gini dibawah 0,4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah. Rasio Gini antara 0,4 sampai 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang. Rasio Gini diatas 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi. Kondisi Ratio Gini Kabupaten Sinjai untuk 4 tahun terakhir ini sudah termasuk dalam kategori ketimpangan rendah. Kondisi Ratio Gini ditahun 2020 ini sebesar 0,372. Walaupun begitu kondisi rasio gini Kabupaten Sinjai masih berada dibawah nilai rasio gini provinsi dan nasional.

3) Angka Kemiskinan

Kesenjangan sosial dalam masyarakat sangat terlihat pada masyarakat yang berada pada kategori miskin maupun keluarga pra sejahtera. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur berdasarkan dari angka kemiskinan di daerah tersebut. Berdasarkan data dari BPS angka kemiskinan di Kabupaten Sinjai untuk 5 (lima) tahun terakhir ini konsisten berada dibawah 10%. Yang mana setiap tahunnya terjadi penurunan angka kemiskinan meskipun kondisi angka kemiskinan ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan rencana capaian pada RPJMD periode lalu sebesar 7,38%. Hal tersebut terlihat pada tahun 2016 angka kemiskinan di Kabupaten Sinjai mencapai 9,41 % dengan jumlah penduduk diatas garis kemiskinan sebesar 90,59 %. Ditahun 2017 angka kemiskinan sebesar 9,24% dan penduduk diatas garis kemiskinan mencapai 90,76%. Pada tahun 2018 angka kemiskinan di Kabupaten Sinjai mengalami peningkatan sebesar 0,04% dari tahun sebelumnya menjadi 9,28% dan jumlah penduduk diatas garis kemiskinan mencapai 90,72%. Ditahun 2019 jumlah angka kemiskinan Kembali menurun menjadi 9,14 % dan penduduk diatas garis kemiskinan mencapai 90,86%. Dan ditahun 2020 ini meskipun dengan adanya kejadian luarbiasa yang melanda Indonesia bahkan dunia angka kemiskinan di Kabupaten Sinjai mengalami penurunan 0,14% menjadi 9 % dan persentase penduduk diatas garis kemiskinan sebesar 91 %. Angka kemiskinan ini harus selalu dipantau dan diminimalisir guna menjalankan salah satu amanat pembangunan nasional untuk menyejahterakan kehidupan rakyat.

4) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan gambaran kondisi penduduk usia kerja produktif yang menjadi pengangguran. Hal ini juga menunjukkan kurangnya tenaga kerja yang terserap dalam pasar kerja. Persentase tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sinjai terdata mulai tahun 2017 sebesar 4,53%, Ditahun 2018 menurun menjadi 2,14%. Dan mengalami peningkatan sebesar 0, 14% ditahun 2019 menjadi 2,28% serta ditahun 2020 mengalami peningkatan lagi sebesar 0,37%. Hal ini merupakan dampak dari menyebarnya virus COVID-19 di Kabupaten Sinjai, yang mana banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka saat ini masih jauh dari target angka pengangguran di akhir RPJMD periode sebelumnya yaitu sebesar 0,95%.

2) Peningkatan Kecerdasan Dan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Belum Optimal

Peningkatan kecerdasan dan kualitas sumberdaya manusia merupakan salah satu indikator penting dalam kemajuan suatu daerah. Ada beberapa factor pendukung dalam mewujudkan peningkatan kecerdasan dan kualitas sumberdaya manusia yaitu :

1) IPM

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan gambaran bagaimana masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, Kesehatan, Pendidikan dan sebagainya. IPM menjadi salah satu indicator dalam melihat keberhasilan suatu daerah. Kondisi IPM Kabupaten Sinjai di tahun 2020 ini masuk kategori sedang yaitu sebesar 67,60, meningkat 0,55 poin dari tahun 2019 yang hanya sebesar 67,05. Kondisi IPM Kabupaten Sinjai ini lebih rendah dari IPM Provinsi sebesar 71,93 maupun IPM Nasional sebesar 71,94%. Namun Pertumbuhan IPM Kabupaten Sinjai di tahun 2020 ini lebih tinggi daripada pertumbuhan IPM Provinsi yaitu sebesar 0,82% dibandingkan pertumbuhan IPM Provinsi yang hanya sebesar 0,38% dan IPM Nasional sebesar 0,03. Yang mana kondisi ini menempatkan Kabupaten Sinjai urutan ke - 2 tertinggi di Sulawesi Selatan untuk tingkat pertumbuhan IPM -nya. Kabupaten Sinjai menempati peringkat 17 se Sulawesi Selatan. Akar masalah yang menjadi factor masih rendahnya capaian IPM Kabupaten Sinjai yaitu :

Dimana IPM ini sendiri diukur melalui variable rata -rata lama sekolah, dimana rata - rata lama sekolah di Kabupaten Sinjai sampai pada tahun 2020 ini mencapai 7,75 tahun atau setara dengan kelas VII-VIII. Kondisi rata - rata lama sekolah di kabupaten Sinjai masih rendah dibandingkan rata - rata lama sekolah Provinsi. Harapan Lama sekolah di Kabupaten Sinjai di tahun 2020 ini tercatat 13,05 tahun atau untuk anak usia 7 tahun yang masuk dunia Pendidikan diharapkan dapat bersekolah selama 13,05 tahun atau mencpau Diploma I. Kondisi ini masih dibawah provinsi yang sebesar 13,45 tahun.

Angka Harapan Hidup (AHH) di kabupaten Sinjai di tahun 2020 ini cenderung meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 67,30 tahun. Peningkatan ini didukung oleh peningkatansarana Kesehatan melalui pembangunan dan pemerataan di fasilitas Kesehatan diberbagai wilayah Kabupaten Sinjai serta penambahan jumlah tenaga medis di seluruh wilayah Kabupaten Sinjai.

2) Indeks Pendidikan

Faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang. Salah satu ukuran keberhasilan

pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya IPM suatu daerah tergantung dari komponennya. Kondisi Pendidikan di Kabupaten Sinjai dapat dikatakan kondisinya cukup baik. Hal ini tergambar dari nilai indeks Pendidikan Kabupaten Sinjai 5 tahun terakhir ini yang mana tiap tahunnya mengalami peningkatan. Meskipun kondisi indeks Pendidikan Kabupaten Sinjai masih berada dibawah Indeks Pendidikan provinsi. Indeks Pendidikan di tahun 2020 ini meningkat 1,40% dari nilai indeks Pendidikan di tahun 2019 yaitu sebesar 62,08% di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebesar 60, 68%. Kondisi ini menggambarkan kualitas Pendidikan di Kabupaten Sinjai sudah mengalami peningkatan, meskipun masih banyak aspek yang harus ditingkatkan utamanya untuk pencapaian SPM di bidang Pendidikan 100%.

3) Indeks Kesehatan

Ukuran kualitas hidup manusia yang terdapat dalam indeks pembangunan manusia (IPM) yang dibentuk melalui tiga dimensi dasar, dan kesehatan termasuk dalam salah satu dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Indeks kesehatan dibentuk dari indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan, balita yang pernah mendapatkan imunisasi lengkap, balita dengan gizi normal (tidak stunting), dan angka harapan hidup. Indeks Kesehatan di Kabupaten Sinjai 5 (lima) tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena kesadaran dari masyarakat akan pentingnya Kesehatan. Nilai indeks Kesehatan di tahun 2020 ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 72,77 % dibandingkan tahun 2019 sebesar 72,57%. Kondisi Indeks kesehatan di Kabupaten Sinjai telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun tetap memerlukan upaya peningkatan lebih lanjut. Sehingga peningkatan indeks kesehatan sangat penting dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

4) IDG

IDG adalah indeks yang mencerminkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan secara politik dan ekonomi. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang partisipasi politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi. kondisi IDG di Kabupaten Sinjai di tahun 2020 ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 72,48 dari tahun 2019 sebesar 70,24. Kesetaraan gender di

Kabupaten Sinjai saat ini menjadi salah satu masalah yang mendapat perhatian lebih oleh pemerintah daerah Kabupaten Sinjai.

5) Aktualisasi nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat

Aktivitas keagamaan di Kabupaten Sinjai terdapat banyak jenis. Hal ini merupakan cerminan dari salah satu ikon Kabupaten Sinjai sebagai *BUMI PANRITTA KITTA*. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan pemenuhan kebutuhan dalam berbagai aspek diantaranya pemenuhan sarana dan prasarana yang terkait dengan aktivitas keagamaan ini yang representative, dukungan dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan terkait keagamaan, dan dukungan dalam penegakan sendi – sendi agama. Pemenuhan sarana prasarana yang representative ini dipenuhi dengan pembangunan islamic centre, pembentukan lembaga hafidz Qur'an dan bantuan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana dari Pesantren, termasuk dukungan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti tingkat keikutsertaan kita dalam MTQ tingkat Provinsi dan Nasional, dan lomba – lomba keagamaan lainnya serta peningkatan dukungan dalam peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kaidah – kaidah agama. Salah satu bentuk aktualisasi nilai – nilai agama di masyarakat adalah dengan peningkatan penghafal al qur'an di Kabupaten Sinjai. Setiap tahun ditargetkan dihasilkan 20 orang penghafal alqur'an. Namun untuk mendukung ikon Kabupaten Sinjai ini masih banyak sekali yang harus di siapkan dan disediakan serta dilakukan untuk menjadikan Kabupaten Sinjai sebagai ***BUMI PANRITTA KITA***.

3) Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Sarana/Prasarana Publik Serta Infrastruktur Wilayah Yang Belum Optimal

Penyediaan sarana dan prasarana public serta Infrastruktur wilayah merupakan suatu komponen utama dalam mendukung kemajuan suatu daerah. Sarana dan prasarana public yang nyaman dan berfungsi dengan baik merupakan salah satu layanan penting bagi masyarakat. Juga dengan adanya sarana dan prasarana yang baik akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah. Ada beberapa hal yang menjadi akar masalah dari belum optimalnya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana/prasaran public serta infrastruktur wilayah yaitu :

1) Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah

Daya saing (competitiveness) suatu daerah merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Secara konsep, daya saing menunjukkan kemampuan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Infrastuktur merupakan salah satu pilar yang berpengaruh pada daya saing daerah. Kelengkapan sarana dan prasarana wilayah (infrastuktur) akan mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, kondisi infrastruktur yang baik merupakan prasyarat utama bagi upaya meningkatkan daya saing daerah maupun perkembangan perekonomian. Gambaran kondisi ketersediaan sarana dan prasarana wilayah di Kabupaten Sinjai dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya yaitu :

a. Aksebilitas wilayah yang belum optimal

Salah satu permasalahan mendasar di Kabupaten Sinjai adalah aksesibilitas wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau secara mudah sehingga menyebabkan kesulitan baik distribusi barang maupun jasa. Peningkatan aksesibilitas akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan dasar seperti pendidikan maupun kesehatan. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2020 ini meningkat secara signifikan yaitu 544,38 km atau sebesar 43,31% dari seluruh Panjang jalan di Kabupaten Sinjai. Kondisi jalan kondisi baik ini meningkat jauh dari tahun 2019 yang sebesar 30,72% dari total Panjang jalan di Kabupaten Sinjai atau sebesar 386,135 Km. Capaian tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan target perencanaan pada periode RPJMD sebelumnya sebesar 62,26%. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat penggunaan jalan di wilayah Kabupaten Sinjai masih membutuhkan peningkatan guna meningkatkan akses pelayanan masyarakat, khususnya pada wilayah dengan kondisi jalan yang rusak.

b. Jumlah infrastruktur pelabuhan dan terminal

Kondisi infrastruktur perhubungan dapat dikatakan juga belum memadai. Jumlah pengguna pelabuhan dan terminal selama ini cenderung meningkat, namun jika dilihat dari potensi jumlah pengguna, maka sesungguhnya pengguna fasilitas lebih banyak. Penyebab utama dari hal ini adalah ketersediaan sarana prasarana yang tersedia pada fasilitas tersebut perlu ditingkatkan baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Keberadaan sarana dan prasarana transportasi laut merupakan salah satu yang paling penting bagi pengembangan wilayah Republik Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan. Pelabuhan laut di Kabupaten Sinjai sejumlah 3, sebagian besar merupakan pelabuhan rakyat, dengan kondisi belum seluruhnya memenuhi standar. Sedangkan terdapat 12 terminal, yang mengindikasikan belum seluruh kecamatan/desa yang berjumlah 9 kecamatan memiliki terminal.

c. Akses sumber air minum (%)

Pemenuhan akses air minum bagi masyarakat merupakan salah satu isu strategis di Kabupaten Sinjai. Pemenuhan akses air minum bagi penduduk ini adalah salah satu SPM yang pemenuhannya wajib 100% tiap tahunnya. Capaian penduduk yang mengakses sumber air minum di Kabupaten Sinjai di tahun 2020 ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 203.246 orang dengan persentase sebesar 75,65% dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar 196.951 orang atau sebesar 74,06%. Capaian ini juga dihasilkan dari meningkatnya pula pemenuhan akses sumber air minum yang terlindung dan berkelanjutan baik diperkotaan maupun diperdesaan meskipun belum memenuhi target pelayanan minimal (100%), capaian akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan tahun 2020 ini mencapai 75,64% atau meningkat sebesar 1,39% dari tahun sebelumnya. Belum terpenuhinya target pelayanan minimal 100% ini harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah Kabupaten Sinjai karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar dari penduduk.

d. Pemukiman kumuh

Perkembangan penurunan luas Permukiman kumuh selama ini, menunjukkan hasil yang baik, dimana luas kawasan kumuh tertangani pada tahun 2016 sebesar 5,66 Ha sampai tahun 2020 telah mencapai 46,70 Ha, penurunan ini dari sisi kinerja masih sangat rendah yang seharusnya pada tahun 2019 luasan permukiman kumuh menjadi 0%. Kemudian dilakukan pendataan dengan melakukan *Base line* pada kawasan kumuh perkotaan, dan kawasan kumuh pesisir Kabupaten Sinjai tahun 2020 sesuai surat Dirjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga luasan kawasan kumuh pada tahun 2016 sebesar 78,41 Ha menjadi 100,10 Ha pada tahun 2020. Meningkatnya angka lingkungan permukiman kumuh ini disebabkan karena dengan adanya pandemic Covid – 19 sehingga menyebabkan beberapa program kegiatan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD mengalami pengurangan atau penghapusan anggaran. Hal ini berdampak penanganan permukiman kumuh jadi terlambat.

Dari gambaran ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Sinjai dapat dikatakan kondisinya cukup baik walaupun masih ada ketimpangan dalam ketersediaan infrastruktur namun secara umum ketersediaan infrastruktur ini sudah melayani hampir seluruh masyarakat Kabupaten Sinjai. Namun tetap saja dibutuhkan pemenuhan ketersediaan infrastruktur wilayah agar dapat melayani seluruh masyarakat Kabupaten Sinjai secara optimal.

2) Indeks layanan infrastruktur

Indeks layanan infrastruktur merupakan bentuk evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan. Indeks ini merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah. Kondisi ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Sinjai 5 tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan sehingga layanan infrastruktur terhadap masyarakat tiap tahunnya juga meningkat.

- 4) Belum Optimalnya penciptaan ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang patuh kepada hukum

Secara umum penciptaan lingkungan strategis di Kabupaten Sinjai mengalami perkembangan yang cukup baik, terutama dari aspek penanganan gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3). Kondisi penanganan gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3) Kabupaten Sinjai 5 tahun ini cenderung berfluktuasi. Persentase jumlah kasus gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3) yang tertangani di tahun 2020 ini mencapai 100% dari kasus K3 yang terdapat di Kabupaten Sinjai. Capaian ini tidak lepas dari sudah tingginya kesadaran masyarakat untuk melaporkan gangguan K3 yang ada di lingkungan mereka serta kesiapan dari Satpol PP dalam menangani laporan gangguan K3 tersebut.

- 5) Pemeliharaan kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam yang belum optimal

Permasalahan pemeliharaan kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam yang belum optimal disebabkan oleh beberapa akar masalah yaitu :

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah

Secara umum indeks kualitas lingkungan hidup daerah di Kabupaten Sinjai diukur berdasarkan kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan. Pada tahun 2020 indeks kualitas air di Kabupaten Sinjai mengalami penurunan dari 93,13 di tahun 2019 menjadi 83,75 di tahun 2020. Penurunan ini disebabkan banyaknya titik pantau kualitas air cemar ringan sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut. Untuk indeks kualitas udara di Kabupaten Sinjai di tahun 2020 ini juga menurun sebesar 0,03% dibanding tahun 2019. Yaitu dari 90,97 menurun menjadi 90,94. Sedangkan indeks kualitas tutupan lahan di Kabupaten Sinjai di tahun 2020 ini 42,86 % kondisi ini sama dengan tahun sebelumnya.

- b. Jumlah Bencana yang Tertangani

Trend kejadian bencana alam yang tidak tertangani secepatnya di Kabupaten Sinjai saat ini telah masih dikategorikan tinggi. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya penempatan posko bencana alam di setiap ibukota kecamatan. Kondisi ketersediaan posko bencana alam di Kabupaten Sinjai telah terdapat 3 posko bencana alam yang tersebar di 3 ibu kota kecamatan yaitu di Kecamatan Sinjai Utara, di Kecamatan Sinjai Selatan, dan Kecamatan Sinjai Barat. Melihat tingginya kerawanan bencana di Kabupaten Sinjai, maka perlunya penempatan sarana dan prasarana kebencanaan dan kebakaran pada setiap level yang dapat menjangkau wilayah bencana dengan jarak maksimal 10 km.

c. **Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)**

Capaian potensi penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Sinjai belum dapat digambarkan atau diprediksi untuk 5 tahun ke terakhir ini. Hal ini disebabkan oleh belum adanya data dari perangkat daerah terkait dengan potensi penurunan emisi gas rumah kaca. Tidak adanya data ini disebabkan karena belum isu perubahan iklim belum menjadi prioritas dari perangkat daerah untuk ditangani. Hal ini menyebabkan belum ada aksi atau usaha untuk menangani atau mencegah terjadi dampak emisi gas rumah kaca, juga tidak adanya evaluasi untuk mengetahui dampak dari emisi gas rumah kaca di Kabupaten Sinjai.

4.1. Permasalahan untuk Penyelenggaraan Urusan

4.1.2 Permasalahan pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a) Urusan Pendidikan

1. Pelayanan dasar pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan salah satu pelayanan dasar yang masuk dalam SPM. Kondisi cakupan pelayanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sinjai untuk 2 tahun terakhir mengalami penurunan. Partisipasi masyarakat dalam Pendidikan PAUD di tahun 2020 sebesar 82,86% mengalami penurunan sekitar 4,45% dari tahun 2019 yang sebesar 87,31%. Pelayanan dsar Pendidikan anak usia dini saat ini belum mencapai target nasional yaitu 100%. Indikator penyebab permasalahan dalam penyelenggaraan PAUD ini yaitu tidak tersedianya anggaran yang memadai, rendahnya komitmen dan kepedulian baik pemerintah maupun masyarakat terhadap pelaksanaan SPM terkait PAUD.
2. Dalam hal pendidikan dasar, Angka Partisipasi Murni (APM) SD Kabupaten Sinjai ditahun 2020 kondisinya menurun dari tahun sebelumnya yaitu 99,36% dibandingkan tahun 2019 sebesar 100,96%. Penurunan APM SD ini disebabkan oleh kondisi adanya anak yang belum berumur 7 tahun sudah masuk SD(MI).

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP di Kabupaten Sinjai di tahun 2020 ini juga mengalami penurunan sebesar 5,77% dari tahun sebelumnya yaitu dari 100,97% ditahun 2019 menjad 95,20% ditahun 2020. Penurunan nilai APM SMP ini juga dipengaruhi banyaknya anak sekolah usia SMP yang sudah masuk sekolah menengah. Hal ini merupakan dampak banyaknya anak yang belum cukup umur untuk bersekolah sudah masuk sekolah, hal ini utamanya terjadi di anak – anak yang usia tanggung. Dalam hal capaian angka putus sekolah di Kabupaten Sinjai telah mengalami penurunan persentase, angka putus sekolah untuk SD dan sederajat ditahun 2020 ini menunjukkan penurunan cukup signifikan yaitu sebesar 0,02% di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya 0,36. Jumlah angka putus sekolah SMP dan sederajat di tahun 2020 ini sebesar 0,23 ditahun 2020 dan ditahun 2019 sebesar 2,08. Angka Kelulusan di Kabupaten sinjai di tahun 2020 ini rata – rata mengalami kenaikan. Angka kelulusan anak sekolah ditahun 2020 ini belum mencapai 100%, angka kelulusan untuk SD di tahun 2020 ini sebesar 99,01% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 98,51%. Angka kelulusan SMP di tahun 2020 ini juga meningkat dari tahun 2019. Angka kelulusan SMP ditahun 2020 di tahun ini sebesar 99,14% meningkat dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 97,40%. Permasalahan utama yang dihadapi terkait Pendidikan di Kabupaten Sinjai adalah belum meratanya ketercukupan dan kualitas sarana/prasarana serta tenaga kependidikan SD dan SMP, khususnya pada wilayah pegunungan/dataran tinggi dan kepulauan/pesisir.

3. Salah satu permasalahan pendidikan yang dialami di Kabupaten Sinjai yaitu masih kurangnya kualifikasi pendidikan D4, S1 dan S2 untuk pengajar SD dan SMP yang ditempatkan pada beberapa sekolah khususnya sekolah yang berada di daerah jauh dari ibukota kabupaten. Tahun 2020 ini rasio guru berkualifikasi S1/D4 pada level SD belum mencapai 100% yaitu hanya sebesar 92,40% . jumlah guru dengan kualifikasi SI/D4 ditahun 2020 ini sebanyak 2.960. Pada level SMP rasio guru berkualifikasi S1/D4 ditahun 2020 sebanyak 1.636 orang atau sebesar 93,63%.

b) Urusan Kesehatan

1. Permasalahan angka kematian ibu dan anak di Kabupaten Sinjai masih menjadi isu permasalahan utama. Angka kematian ibu di Kabupaten Sinjai di tahun 2020 ini mengalami penurunan yaitu terdapat 4 kasus dibanding tahun 2019 yang terdapat 7 kasus. Angka kematian bayi di tahun 2020 ini cenderung

mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya terdapat 55 kasus di tahun 2020 ini dibandingkan tahun 2019 yang hanya 14 kasus. Jumlah kasus kematian Neonatal (Bayi berumur kurang dari 28 Hari) Kabupaten Sinjai pada tahun 2020 ini mengalami kecenderungan peningkatan. Dari 14 kasus di tahun 2019 menjadi 38 kasus di tahun 2020. Kenaikan ini disebabkan oleh tingginya kasus bayi baru lahir rendah dan asfyksia. Kecenderungan kenaikan ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum paham akan tanda bahaya atau resiko tinggi yang dialami bayi. Selain itu salah satu isu terkait kesehatan yaitu ketersediaan sarana dan prasarana Kesehatan di kabupaten. Salah satu yang menjadi sorotan dari ketersediaan sarana dan prasarana Kesehatan yaitu kecenderungan penurunan rasio PUSTU. Rasio PUSTU di tahun 2020 ini senilai 0,221 turun dibandingkan tahun 2019 senilai 0,223. Hal ini disebabkan oleh jumlah PUSTU yang tersedia tetap sama dibandingkan jumlah penduduk yang bertambah dari tahun sebelumnya. Permasalahan yang cukup mencolok terkait kesehatan yaitu rasio ketersediaan dokter. Rasio dokter di tahun 2020 ini turun dibandingkan dari tahun sebelumnya. Rasio dokter di tahun 2020 ini adalah 0,14 turun dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,16. Hal ini disebabkan oleh menurunnya jumlah dokter di tahun 2020 dari 42 dokter di tahun 2019 turun menjadi 37 dokter di tahun 2020. Permasalahan yang terkait Kesehatan selanjutnya yaitu penurunan cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunisation (UCI). Di tahun 2020 cakupan desa/kelurahan senilai 51,25% turun sebanyak 48,75% dari tahun sebelumnya yang mencapai 100%. Hal ini disebabkan oleh adanya Pandemi COVID - 19 sehingga menyebabkan penurunan kunjungan bayi ke posyandu bahkan tidak ada kunjungan. Permasalahan terkait Kesehatan selanjutnya yaitu cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di tahun 2020 ini senilai 72,48% menurun dibandingkan di tahun 2019 senilai 89,79%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya penanganan komplikasi kebidanan yang terdiri dari hipertensi, infeksi dan pendarahan disebabkan juga dampak dari Pandemi COVID -19.

2. Cakupan pelayanan Standar Pelayanan Minimal belum memenuhi standar 100% pelayanan tiap tahunnya.
3. Standar pelayanan pada kesehatan belum sesuai standar nasional dan internasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dalam upaya peningkatan derajat kesehatan.

c) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Kondisi jalan dan jembatan yang belum semuanya kondisi baik dan memenuhi standar. Persentase panjang jalan yang baik ditahun 2020 ini mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya. Persentase Panjang jalan yang baik ditahun 2020 ini sebesar 43,31% dibandingkan tahun 2019 yang hanya sebesar 30,72%.
2. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapat layanan akses sumber air minum yang layak. Di tahun 2020 ini capaian persentase jumlah rumah tangga yang mendapat layanan akses sumber air minum yang layak yaitu 75,1%, mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang sebesar 75,05%. Walaupun begitu capaian ini belum memenuhi target SPM yaitu 100% pertahunnya.
3. Ada beberapa permasalahan yang terkait penataan ruang di Kabupaten Sinjai. Terkait rasio bangunan ber-IMB di Kabupaten Sinjai untuk tahun 2020 ini mengalami peningkatan sedikit dari tahun sebelumnya, yaitu terdapat 42.653 rumah. Dalam ketersediaan ruang terbuka hijau, cenderung berbanding lurus untuk 5 tahun terakhir ini. Perbandingan sama dengan tahun sebelumnya. Ketaatan terhadap penggunaan ruang masih belum mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat dari penggunaan ruang yang masih berdasarkan pada ketersediaan lahan dan bukan pada penggunaan zona ruang yang telah diatur. Masih banyaknya izin yang keluar belum berpedoman pada RTRW Kab. Sinjai dan RDTR Perkotaan, Masih sedikitnya kawasan strategis yang memiliki rencana rinci tata ruang. Belum optimalnya tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang.
4. Belum optimalnya akses pelayanan Sanitasi
Dihubungkan dengan TPB dan SPM, masalah yang dihadapi adalah belum tercapainya akses universal dan merata terhadap sanitasi. Pada tahun 2020 jumlah penduduk berakses sanitasi mencapai 75,65%, kondisi sangat meningkat dari capaian di 2016 yang hanya 24,83%. Dihubungkan dengan TPB, masalah pokok yang dihadapi adalah belum tercapainya akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai. Belum tercapai 100% akses terhadap sanitasi yang layak secara merata bagi semua, dan masih terjadinya praktik buang air besar di tempat terbuka khususnya pada kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

d) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Adanya ketimpangan/backlog rumah yang disebabkan terbatasnya masyarakat mengakses rumah layak huni karena rendahnya tingkat kesejahteraan khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Buruh/Pekerja/Nelayan) serta masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah

1. Masih banyaknya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) .
2. Belum mantapnya sistem pendataan perumahan dan kawasan permukiman
3. Rumah layak Huni
Cakupan rumah layak huni ditahun 2020 ini mengalami penurunan yaitu mencapai 86,21% turun dari capaian tahun 2018.
4. Luas area pemukiman yang tertata
Luas permukiman yang tertata/terorganisir di tahun 2020 ini mencapai 8.739 ha mengalami kenaikan sedikit dari tahun sebelumnya dengan persentase mencapai 15,23% dari total luas permukiman 57.397 ha.
5. Cakupan Lingkungan yang didukung oleh PSU
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada tahun 2020 ini mengalami penurunan yaitu hanya terdapat 1 lingkungan atau sebesar 0,28%. Hal ini disebabkan program KOTAKU yang menjadi penopang capaian hanya menangani satu Kawasan.

e) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. K3 yang tertangani
Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan dan diidentifikasi cenderung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 pelanggaran K3 yang tertangani adalah 179 kasus menurun dari tahun 2019 yang terdapat 204 kasus. Target pelaporan pelanggaran K3 yang tertangani tahun 2020 ini mencapai 100%.
2. Luas Jangkauan Wilayah WMK
Dalam fungsi perlindungan masyarakat, pelayanan informasi rawan bencana belum optimal, begitu pula pelayanan pemadaman kebakaran masih berhadapan keterbatasan sarana/prasarana satgas pemadam kebakaran termasuk di kecamatan. Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (WMK) di tahun 2020 mencapai 29,57 km² dari total wilayah 819,96 km². Kondisi ini masih sama dengan kondisi tahun - tahun sebelumnya. Belum adanya satgas TRC pada tiap kecamatan yang mampu melakukan tindakan penanganan terhadap laporan kejadian kebakaran.
3. Masih terdapat potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum

4. Tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada masih dibawah nasional
5. Meningkatnya ancaman terorisme dan intoleransi, serta ancaman terhadap kebebasan berdemokrasi dan ketahanan nasional yang membutuhkan pencegahan dan penanganan secara komprehensif dan terpadu

f) Urusan Sosial

1. Belum terpadunya penanganan PMKS antar pemerintahan dan antar sector,
2. PMKS yang tertangani, apa masalahnya
Belum optimalnya penanganan PMKS
3. Belum optimalnya pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya

4.2.2. Permasalahan pada Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a) Urusan Tenaga Kerja

1. Tingginya jumlah tenaga kerja dengan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja yang rendah
2. Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
Belum optimalnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki.
3. Jumlah peserta Jamsostek
Jumlah pekerja yang telah mendaftar jamsostek cenderung mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir ini. Pada tahun 2020 jumlah peserta jamsostek sebesar 74,36% sedangkan ditahun 2019 hanya mencapai 58,73%. Pertambahan ini karena sudah tingginya kesadaran perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya untuk menjadi peserta jamsostek.
4. Penyelesaian perselisihan buruh-perusahaan
Belum adanya media pengaduan dan penyelesaian perselisihan buruh perusahaan.
5. Penurunan persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan. Adanya penurunan besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan di tahun 2020 ini sebesar 64% dibandingkan tahun 2019 sebesar 72,41%. Hal ini disebabkan dampak dari pandemic COVID – 19 sehingga menurunnya jumlah pelatihan kewirausahaan yang diadakan.
6. Masalah lain adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya peningkatan kesempatan kerja (bursa kerja) belum memadai dalam kondisi peluang kesempatan kerja dan lapangan berusaha tidak seimbang dengan

pertumbuhan angkatan kerja. Selain itu, perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan belum memadai.

b) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Perempuan dilembaga pemerintah
Masih tertinggalnya kompetensi dan kemampuan perempuan untuk terlibat bekerja pada lembaga pemerintah/birokrasi, Lembaga legislatif dan Lembaga swasta
2. Belum optimalnya penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender pada seluruh perangkat daerah termasuk penggunaan data terpilah gender dalam penentuan isu strategis dan penerima manfaat kegiatan.
3. Jumlah KDRT
Belum efektifnya pelaporan kejadian kekerasan dalam rumah tangga serta kekerasan terhadap anak, serta belum tercakupinya semua korban kekerasan dengan pelayanan pada unit penanganan terpadu serta layanan kesehatan dan rehabilitasi sosial dan bantuan hukum

c) Urusan Pangan

1. Sinergi dan koordinasi antar stakeholder dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan yang beredar di pasaran belum efektif menekan peredaran produk pangan yang tidak memenuhi standar.
2. Belum optimalnya jaminan terhadap pasokan dan harga komoditas pangan yang terintegrasi dan informatif.
3. Konsumsi pangan yang belum beragam bergizi seimbang dan aman

d) Urusan Lingkungan Hidup

1. Cakupan pelayanan persampahan sudah mulai merambah area luar perkotaan sehingga jumlah timbulan sampah yang tertangani sudah meningkat.
2. Masih rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan
3. Belum adanya pengakuan terhadap masyarakat yang memiliki potensi sebagai masyarakat hukum adat serta belum teridentifikasi dan termemanfaatkannya pengetahuan lokal yang mereka miliki dalam pengelolaan lingkungan hidup.
4. Pemantauan, pengukuran dan pengendalian kualitas tutupan lahan, air dan udara belum terkordinasikan secara rutin dan efektif berbasis RPPLH.
5. Masih rendahnya kualitas air akibat polusi, pembuangan, dan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, dan masih rendahnya proporsi air limbah yang dapat diolah, dan rendahnya jumlah sampah yang di daur ulang,

serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.

6. Kualitas tutupan lahan terus menurun seiring dengan bertambahnya luas lahan kritis dan tingkat kerusakan hutan seiring dengan semakin menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan, khususnya pada daerah dataran tinggi/pegunungan serta dampaknya pada daerah di bawahnya.
7. Belum terpenuhinya arahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Taman Hutan Raya.

e) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilikan dokumen kependudukan (KTP Elektronik, KK dan Kartu Identitas Anak) dan catatan sipil (Akta Kelahiran dan Akta Kematian) serta Akte Nikah masih rendah.
2. Terbatasnya jangkauan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil pada wilayah terpencil pegunungan dan pulau-pulau.
3. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan dalam berbagai sektor pembangunan

f) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Masih rendahnya desa mandiri
2. Kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), PKK, LSM level desa belum efektif dalam mendorong keberdayaan masyarakat.

g) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Belum adanya arahan kebijakan pengendalian kependudukan level daerah yang dijadikan dasar bagi perangkat daerah untuk mengintegrasikan pertimbangan kependudukan dalam penyelenggaraan program/kegiatan.
2. Masih tingginya angka drop out akseptor KB dan ,masih rendahnya pengguna KB metode kontrasepsi jangka Panjang.

h) Urusan Perhubungan

1. Masih rendahnya kapasitas pengelolaan perhubungan laut dan darat.

i) Urusan Komunikasi dan Informatika

1. Belum efektifnya fungsi kelompok informasi masyarakat (KIM) tingkat kecamatan sebagai wadah penyebaran informasi public dari pemerintah kepada masyarakat dan wadah pertukaran informasi di antara masyarakat.
2. Belum tercakupinya seluruh wilayah dalam layanan informasi melalui akses poin.

3. Belum efektifnya pemanfaatan aplikasi informatika dan website dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah.

j) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Rendahnya tingkat produktifitas koperasi dan UMKM
2. Masih kurangnya kepedulian anggota koperasi terhadap keaktifan koperasi .
3. Kurangnya akses permodalan terhadap pengembangan UKM.

k) Urusan Penanaman Modal

1. Kurang tersedianya data potensi ekonomi dan unggulan daerah yang akurat dan detail serta terintegrasi antar stakeholder pemerintah dengan dunia usaha untuk mendukung promosi investasi daerah.
2. Belum optimalnya realisasi penanaman modal.
3. Pertumbuhan dan persebaran investasi belum merata

l) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

1. Belum optimalnya prestasi atlet di tingkat nasional dan internasional.
2. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga sesuai standar
3. Kualitas SDM olahraga berbasis IPTEK rendah
4. Kurangnya kesinambungan pembibitan dan pembinaan atlet serta kemitraan dengan stakeholder

m) Urusan Statistik

1. Masih diperlukan peningkatan penyediaan data/informasi yang reliable, up to date dan relevan guna menunjang pembangunan daerah secara terintegrasi.

n) Urusan Persandian

1. Masih perlunya peningkatan sistem pengamanan pada jaringan komunikasi dan sistem informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai

o) Urusan Kebudayaan

1. Belum optimalnya pelestarian dan pengembangan cagar budaya, serta nilai-nilai budaya lokal.

p) Urusan Perpustakaan

1. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat

q) Urusan Kearsipan

1. Belum efektifnya pengolahan, penyelamatan/pelestarian arsip daerah guna mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

4.2.3 Urusan Pilihan

a) Urusan Pariwisata

1. Adanya destinasi wisata yang terbengkalai pengelolaannya sehingga pengunjungnya semakin berkurang.
2. Kurang terpromosikannya sejumlah destinasi wisata budaya dan ekologi pada tingkat nasional dan global sehingga jumlah pengunjungnya tidak berkembang pesat.
3. Belum diketahuinya nilai jual objek pariwisata
4. Pengelolaan sektor kepariwisataan belum terintegrasi optimal dengan pengelolaan fasilitas ekonomi wilayah seperti hotel dan restoran dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor kepariwisataan terhadap PAD dan PDRB.
5. Belum optimalnya kinerja lembaga/forum pariwisata dan ekosistem Ekonomi Kreatif
6. Belum adanya design untuk menggambarkan kebutuhan pariwisata

b) Urusan Pertanian

1. Adanya stagnasi pada usaha peternakan, khususnya ternak ayam kampung dan produksi susu, serta kurang optimalnya peningkatan populasi ternak melalui inseminasi buatan.
2. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian, dan peternakan.
3. Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian karena usaha pertanian masih berorientasi pada on-farm.
4. Belum optimalnya perlindungan terhadap komoditas pertanian dan peternakan.

c) Urusan Perdagangan

1. Rendahnya daya saing pasar yang disebabkan oleh belum adanya pemetaan pasar baik komoditi maupun produk, domestik maupun internasional, yang diharapkan dapat memberikan info pasar dan menciptakan struktur pasar yang efisien dan berdaya saing

d) Urusan Perindustrian

1. Masih rendahnya produk industri kecil dan menengah yang memenuhi standarisasi.
2. Belum optimalnya keterkaitan sektor industri dengan sektor lainnya.

e) Energi Sumberdaya Mineral

1. Masih maraknya penambangan tanpa ijin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat dan kurangnya pemahaman penambangan yang benar (good mining practice).
2. Masih terdapat rumah tangga yang belum mendapatkan akses tenaga listrik secara layak
3. Masih tingginya investasi energi baru terbarukan (EBT) dan harganya belum mencapai keekonomian, sehingga mengganggu keberlanjutan pemanfaatan EBT karena energi fosil harganya lebih murah
4. Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah

f) Urusan Kelautan dan Perikanan

1. Belum optimalnya produksi dan produksi perikanan.
2. Tingginya kerusakan ekosistem mangrove, terumbu karang, estuarin sebagai habitat vital.
3. Belum efektifnya kelompok nelayan dan pembudidaya sebagai wahana kerjasama dan wadah belajar dalam peningkatan kemampuan dan penguatan kelembagaan nelayan dalam menjalankan usaha penangkapan maupun budidaya yang produktif dan ramah lingkungan.
4. Belum optimalnya perkembangan kawasan tempat pelelangan ikan di Lappa sebagai kawasan wisata kuliner yang bersih dan estetik.

4.2.4. Penunjang Urusan

a) Perencanaan

1. Belum optimalnya proses perencanaan pembangunan daerah
2. Belum optimalnya proses evaluasi perencanaan pembangunan sebagai feed back dalam proses pembangunan daerah.

b) Keuangan

1. Belum optimalnya pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.
2. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah

c) Kpegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

1. Kecilnya porsi ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
2. Kecilnya porsi ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
3. Belum proporsionalnya perbandingan pemangku jabatan struktural/pimpinan, jabatan fungsional dan jabatan adminsitratif.

d) Penelitian dan Pengembangan

1. Kurangnya implementasi dan pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence*).
2. Kurangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pengembangan ekonomi daerah.

e) Pengawasan

1. Belum optimalnya manajemen pengawasan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
2. Belum optimalnya peningkatan level SPIP dan kapabilitas APIP serta pendampingan/fasilitasnya sampai ke Perangkat Daerah
3. Belum optimalnya dampak perubahan dari tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran administrasi dan keuangan dalam penyelenggaraan urusan di setiap perangkat daerah.

f) Sekretariat Dewan

1. Belum efektifnya dukungan dalam penyelenggaraan fungsi legislasi, pengawasan dan budgeting yang dijalankan oleh legislatif daerah.
2. Belum kuatnya integrasi program kerja DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen perencanaan RPJMD dan RKPD.

g) Sekretariat Daerah

1. Belum optimalnya fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan oleh sekretariat daerah dalam penyelenggaraan tugas perangkat daerah.
2. Belum efektifnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik

h) Pemerintah Kecamatan

1. Belum optimalnya fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan.
2. Belum optimalnya fungsi kordinasi dalam pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan PD di kecamatan, penerapan dan penegakan Perda.
3. Belum efektifnya fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan di desa dan kelurahan.

4.3 Isu Strategis

4.3.1 Identifikasi Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi yang perlu diperhatikan atau dalam penyelenggaraan pembangunan kedepan. Isu strategis pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan diidentifikasi pada level internasional, nasional dan daerah. Hasil identifikasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Identifikasi Isu Strategis

Tingkat Isu	Isu Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
Tingkat Internasional:		
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	1. Kemiskinan (T1)	Penanggulangan Kemiskinan melalui koordinasi bidang terkait
	2. Gizi, pangan dan pertanian berkelanjutan (T2)	Penanganan Gizi dan Peningkatan ketersediaan paangan utama dan pertanian yang berkelanjutan
	3. Kehidupan sehat pada semua usia (T3)	Pemenuhan standar pelayanan minimal kesehatan serta pengembangan pola hidup sehat dalam masyarakat
	4. Akses dan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan (T4)	Pemenuhan standar pelayanan minimal kesehatan dan peningatan dukungan terhadap dukungan pelayanan pendidikan
	5. Kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (T5)	Penetapan regulasi tentang kesetaraan gender,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	6. Air bersih dan sanitasi (T6)	Peningkatan cakupan penggunaan air bersih khususnya pada masyarakat pedesaan
	7. Kesempatan kerja yang produktif dan pekerjaan yang layak (T8)	Peningkatan kesempatan kerja dan perbekalan dan pelatihan tenaga kerja
	8. Infrastruktur, industri dan inovasi (T9)	Peningkatan infrastuktur wilayah, penungktan industri dan Inovasi.
	9. Kesenjangan pendapatan antar lapisan masyarakat dan antara kawasan perdesaan dengan perkotaan (T10)	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan desa tertinggal
	10. Pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni (T11)	Bedah rumah dan pembangunan PSU pada pemukiman kumuh
	11. Limbah B3 dan timbulan sampah (T12)	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

		persampahan dan optimalisasi kinerja pengelolaan layanan persampahan
	12. Perubahan iklim (T13)	Penurunan emisi gas rumah kaca
	13. Penangkapan ikan dalam batasan biologis aman (T14)	Perda penangkapan ikan dalam batasan bioglas aman
	14. Pemeliharaan tutupan lahan (T15)	Pemantauan dan pengendalian tutupan lahan
	15. Konflik dan Tatakelola Pemerintahan (T16)	Penanganan konflik dan Reformasi Birokrasi
	16. Pendapatan Pemerintah Daerah	Percepatan dan peningkatan PAD
Pandemi Covid – 19	1. Angka Pengangguran Meningkat	Peningkatan ekonomi masyarakat pasca pandemi
	2. Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin	Membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat
Perubahan Iklim	1. meningkatnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim secara menyeluruh dilapisan masyarakat.
Bonus Demografi	1. Jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif	Pemerintah harus menangkap peluang ini untuk menjadi peluang strategis daerah.
Tingkat Nasional:		
Prioritas pembangunan nasional	1. Revolusi mental	Peningkatan pembangunan mental spritual
	2. Pendidikan	Peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan dan tenaga kependidikan
	3. Kesehatan	Peningkatan pola hidup sehat dan pencapaian SPM
	4. Infrastruktur	Peningkatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur transportasi, perhubungan, perumahan dan pemukiman
	5. Kemandirian pangan	Peningkatan kemandirian pangan
	6. Kemandirian energi dan ketenagalistrikan	Pengembangan kemandirian energi dan ketenaga listrikan
	7. Kemaritiman dan kelautan	Pemanfaatan kelautan
	8. Industri dan pariwisata	Pengembangan kawasan industri dan pariwisata

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

	9. Pemerataan antar kelompokpendapatan	Pemerataan pendapatan kelompok marginal
	10. Pembangunan desa	Pengawasan pemanfaatan dana desa
	11. Pembangunan perbatasan	Penegasan pembangunan batas wilayah
	12. Pembangunan perkotaan	Pembangunan pemukiman kumuh perkotaan
	13. Kepatuhan dan penengakan hukum	Penegakan perda
	14. Keamanan dan ketertiban	Pengaktifan Kantibmas dan peningkatan keamanan danketertiban masyarakat
	15. Politik dan demokrasi	Pendidikan politik dan demokrasi
	16. Tata kelola	Penataan dan reformasi birokrasi
Tingkat Daerah:		
Permasalahan Pembangunan Daerah	1. Pendidikan	Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidik-an.
	2. Pelayanan Kesehatan Bagi Seluruh Masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan
	3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha
	4. SDM yang berkualitas	Peningkatan SDM dengan memanfaatkan Bonus Demografi
	5. Peningkatan Sumber Daya Alam	Kebijakan Ekonomi yang berdasarkan pelestarian Lingkungan.
	6. Peningkatan Infrastruktur wilayah	Pembangunan infrastruktur wilayah khususnya pada daerah pegunungan dan dataran tinggi
	7. Lingkungan hidup	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup
	8. Tatakelola pemerintahan	Penguatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
	9. Pelayanan public	Pemenuhan standar pelayanan minimal
	10. Ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	Pengendalian gangguan ketertiban dan ketenteram-an serta penanganan bencana

4.1.3 Isu strategis Global

a. Pandemi Covid-19

World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa Coronaviruses (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Sampai saat ini terdapat 93 negara yang mengkonfirmasi terkena virus Corona. Merebaknya pandemi Covid-19, memunculkan permasalahan baru bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Salah satunya pada aspek ketenagakerjaan Indonesia. Banyak pekerja yang terpaksa dirumahkan dan menyebabkan angka pengangguran melonjak tajam. Serta menyebabkan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi.

Di Kabupaten Sinjai, pada tahun 2020, jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebesar 238 orang sangat menurun dibanding tahun 2019 sebesar 514 orang. Hal ini disebabkan banyaknya usaha yang terdampak khususnya pada sektor perdagangan, industri dan pariwisata. Hal ini juga berdampak menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Sinjai, berdasarkan data BPS di tahun 2020 ini angka kemiskinan Sinjai berada diangka 9 mengalami penurunan sebesar 0,14 poin dari tahun 2019 yang mana angka kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 9,14.

b. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG's)

Pembangunan Berkelanjutan adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/- Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) adalah 17 tujuan dengan 169 target yang meliputi masalah-masalah pembangunan yang berkelanjutan yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut dengan capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan SDG's ini disahkan pada tanggal 25 September 2015, dimana 193 kepala negara hadir dan menandatangani kesepakatan global tersebut sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.

DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023 Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah | IV-19 Hasil kesepakatan bersama tingkat global telah ditindaklanjuti pemerintah Indonesia dengan meratifikasinya dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDG's. Keseriusan dan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan SDG's tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, dimana SDG's sudah menjadi mainstreaming untuk pembangunan Indonesia 5 tahun kedepan. Ada 3 prinsip utama implementasi SDG's di Indonesia, yaitu; (1) SDG's adalah tugas bersama, (2) efek domino implementasi SDG's, dan (3) pembiayaan inovatif. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini dalam pelaksanaannya di Kabupaten Sinjai menjadi target dari perangkat daerah. Tujuan tersebut menjadi target yang akan dicapai oleh seluruh perangkat daerah berdasarkan tugas pokok mereka.

c. Perubahan Iklim

Pemanasan global merupakan sebuah fenomena yang disebabkan karena meningkatnya jumlah Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer yang diakibatkan berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, perubahan tata guna lahan dan hutan, serta kegiatan pertanian dan peternakan. Gas rumah kaca ini menyerap sebagian dari radiasi inframerah dan memantulkan kembali panas yang terperangkap oleh gas rumah kaca dalam atmosfer. Hal inilah yang mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih hangat dan berdampak secara langsung pada bergesernya musim, pendeknya musim hujan dengan intensitas hujan yang cukup tinggi, naiknya permukaan air laut, serta dampak lainnya. Peran aktif Indonesia terhadap isu perubahan iklim telah ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi Kesepakatan Paris (Paris Agreement) dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan komitmen Indonesia secara nasional (Nationally Determined Contribution-NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan dan kerjasama internasional. Pada pertemuan Conference of the Parties (COP) -24 di Polandia pada tanggal 11 Desember 2018, Indonesia telah menyampaikan strategi dalam upaya menurunkan emisi GRK pada Talanoa Dialogue.

Untuk mengantisipasi perubahan iklim dan meminimalisasi dampaknya maka pemerintah provinsi melakukan tiga pendekatan yaitu antisipasi, adaptasi dan

mitigasi dampak perubahan iklim. Antisipasi dampak perubahan iklim dilakukan pada tataran penyusunan rencana, kebijakan dan program dengan mempertimbangkan isu dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan. Hal ini pun dilaksanakan di Kabupaten Sinjai dengan menjadikan perubahan iklim sebagai pertimbangan dalam perencanaan kegiatan. Pada sisi mitigasi, komitmen Pemerintah Provinsi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 11 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca provinsi Sulawesi Selatan. Pergub dari provinsi mengenai rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca ini menjadi pedoman bagi kabupaten Sinjai dalam menurunkan emisi gas rumah kaca.

d. Bonus Demografi

Bonus demografi adalah suatu fenomena dimana jumlah penduduk usia produktif (15- 64 tahun keatas) lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 64 tahun keatas). Saat ini Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi dan kondisi ini memberi keuntungan ekonomi berupa percepatan pertumbuhan ekonomi, karena menurunnya rasio ketergantungan. Bonus demografi menjadi peluang strategis bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, karena tersedianya sumber daya manusia produktif. Agar bonus demografi menjadi peluang yang menguntungkan di daerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas SDM, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan. Ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah. Jumlah penduduk yang besar pada masa bonus demografi tentu akan meningkatkan penawaran angkatan kerja di Indonesia. Dan penawaran angkatan kerja dalam jumlah yang besar akan berpotensi meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Menyikapi fenomena bonus demografi ini Kabupaten Sinjai harus bisa memanfaatkan dengan baik peluang ini dengan Menyusun strategi untuk mengembangkan SDM tersedia sehingga dapat berdaya saing.

e. Transformasi Digital

Saat ini dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 yang mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi

pada revolusi industri 1, 2, dan 3 secara umum telah membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan berbagai pekerjaan. Revolusi industri 4.0 memberikan dampak efisiensi dalam proses bisnis dan cara baru di setiap value chain dari suatu produk, walaupun juga menimbulkan disrupsi di berbagai industri. Revolusi Industri 4.0 kini telah masuk seiring dengan transformasi proses bisnis yang cepat ke arah ekonomi digital. Indonesia menjadi salah satu target bagi para pemain industri dunia yang tengah berebut masuk pasar Indonesia. Salah satu transformasi model bisnis di era Industri 4.0 adalah penggunaan platform e-commerce oleh pelaku ekonomi. Melalui e-commerce, segala aktivitas transaksi jual-beli barang, promosi, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. E-commerce mengalami perkembangan cepat dengan kemudahan yang ditawarkan. Kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi mampu memangkas keterbatasan sarana, jarak dan waktu antara penjual dan pembeli. Saat ini telah banyak bermunculan start up e-commerce dan market place yang memudahkan konsumen untuk berbelanja, seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak dan lainnya. Perkembangan e-commerce sejatinya dapat dinikmati oleh segenap masyarakat, termasuk pelaku usaha. Pelaku usaha Usaha Mikro Kecil (UMK) menjadi bagian penting dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) jumlah usaha UMK mencapai 98,89 persen dan mampu menyerap tenaga kerja sekitar 85,29 persen dari total tenaga kerja non pertanian di Sulawesi Selatan. Transformasi digital ini telah diadopsi dalam pemasaran hasil peternakan Namun, pemasaran menjadi kesulitan terbesar untuk Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari hasil Survei Industri Mikro Kecil tahun 2017. Selain itu, produk IMK yang dihasilkan masih dipasarkan secara lokal, hanya 8 persen produk IMK yang dipasarkan ke luar kabupaten/kota. Transformasi digital para pelaku UMK di Sulawesi Selatan tidak bisa ditawar lagi. Hal ini perlu untuk meningkatkan kinerja usaha dan daya saing UMK itu sendiri sehingga tetap menjadi pilar yang kuat bagi perekonomian. Teknologi digital juga bisa dimanfaatkan selama proses on farm dan off farm dalam bidang pertanian. Potensi sistem pertanian digital juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan minat dan kreativitas anak muda menggeluti bidang pertanian yang selama ini mulai menurun. Potensi generasi muda memiliki andil besar dalam perubahan sistem pertanian, karena pemuda lebih adaptif terhadap adanya perubahan dan memiliki semangat yang lebih besar sehingga bisa lebih produktif. Dengan adanya sistem pertanian digital pemerintah dapat mengontrol komoditas apa yang ditanam dan dipanen dari daerah satu ke daerah

lainnya. Melalui sistem ini, pemerintah dapat lebih mudah mengetahui wilayah mana yang sedang surplus dan defisit pangan, mempermudah distribusi dari petani hingga konsumen dengan memperpendek sistem rantai pasok pangan serta tidak ada keterbatasan waktu dan tempat untuk mengakses segala informasi sehingga berpeluang meningkatkan keberdayaan petani. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap dengan sistem pertanian digital akan mampu menurunkan ketimpangan akses pangan, mempercepat pemenuhan kebutuhan pangan dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan perekonomian di Sulawesi Selatan. Melalui hilirisasi beberapa komoditas unggulan Sulawesi Selatan dengan sentuhan teknologi, konektivitas antar daerah, penguatan infrastruktur dan peningkatan daya saing maka diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara positif.

4.3.2 Prioritisasi Isu Strategis

Untuk menemukan isu strategis secara terprioritaskan maka diperlukan kriteria prioritisasi dan proses menilai isu berdasarkan kriteria tersebut. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas untuk dijadikan dasar perumusan visi dan misi serta tujuan dan sasaran. Adapun kriteria yang digunakan untuk memprioritisasi isu strategis RPJM Teknokratis Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel 4.3.

Berdasarkan kriteria tersebut maka dilakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria berdasarkan bobot masing-masing kriteria. Adapun isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut.

- a) Integrasi perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbasis elektronik

Mulai terintegrasinya perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi hal ini ditandai dengan nilai SAKIP dengan perolehan B ditahun 2019 dan 2020, meskipun pada tahun 2018 nilai tersebut pernah meningkat menjadi A. Sistem monitoring belum berbasis elektronik sehingga cukup menyulitkan untuk mengintegrasikan pada perencanaan dan penganggaran.

- b) SPM dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar

Pelayanan penyelenggaraan urusan baik wajib dasar maupun wajib bukan dasar, termasuk pilihan, belum memenuhi standar. Hal ini ditunjukkan dengan capaian standar pelayanan minimal (SPM) belum mencapai target.

- c) Pelayanan umum strategis yang menempatkan Sinjai sebagai sentra pelayanan
Berkembangnya pelayanan umum strategis yang menempatkan Sinjai sebagai sentra pelayanan pada destinasi wisata Taman Hutan Rakyat (TAHURA)
- d) Meningkatnya taraf hidup masyarakat tidak mampu
Trend perkembangan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan selama periode 2016-2020. Pada tahun 2020 angka kemiskinan sebesar 9%, menurun dari 2019 sebesar 9,14%.
- e) Berkembangnya iklim usaha dan investasi
Perkembangan investasi berskala nasional di Kabupaten Sinjai untuk 2 tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2019 dan 2020 jumlah investor yang masuk di Kabupaten Sinjai hanya terdapat 1, dibandingkan tahun 2018 yang terdapat 9 investor
- f) Meningkatkan produktivitas sektor-sektor perekonomian masyarakat
Perkembangan produktivitas pada sektor pertanian selama periode 2016-2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi pertanian di Kabupaten Sinjai masih membutuhkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat khususnya pelaku tani karena memiliki potensi yang besar dalam nilai produksi.
- g) Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat
Salah satu hal yang dapat meningkatnya derajat pendidikan masyarakat adalah Guru yang memenuhi kualifikasi Sarjana dan atau diploma. Berdasarkan data pada tabel jumlah guru yang memiliki kualifikasi pendidikan SD/MI semakin meningkat pada tahun 2020 sebanyak 2.375 guru dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 2.960 guru.
- h) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Angka harapan hidup rata-rata cenderung sabil. Pada tahun 2016 sebesar 66,54, tahun 2017 naik menjadi 66,61, sedangkan tahun 2018 sebesar 66,83, tahun 2019 sebesar 67,17 dan di tahun 2020 sebesar 67,30. Meskipun demikian rata-rata angka harapan hidup ini masih lebih rendah dibandingkan provinsi.
- i) Meningkatkan peranan perempuan dalam pembangunan
IPG mengalami kenaikan yang fluktuatif selama periode 2016 – 2020. IPG mengalami penurunan tahun 2020 dari tahun 2019. IPG di tahun 2020

senilai 98,02 sedangkan ditahun 2019 sebesar 98,20. IPG Kabupaten Sinjai dibandingkan dengan provinsi Sulawesi Selatan masih diatas. Peranan perempuan dalam pembangunan khususnya di legislatife masih belum memenuhi 30% keterpenuhan kuota dalam parlemen.

- j) Meningkatnya aktualisasi nilai – nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat

Meningkatnya aktivitas keagamaan khususnya penuntasan buta aksara alquran dan hafidz alquran seiring dengan penggalian kembali nilai-nilai spiritual yang berhubungan dengan motto PANRITA KITTA. Berdasarkan kondisi yang ada terdapat fasilitas-fasilitas keagamaan yang bermunculan termasuk berdirinya rumah-rumah tahfidz dan program penghapal Alquran pada beberapa pesantren modern. Namun seiring upaya peningkatan nilai spiritual sebagai PANRITA KITTA masih terdapat kendala seperti minat untuk menjadi hafidz alquran yang tidak berbanding lurus dengan sarana penunjang bagi masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki penghasilan menengah kebawah. disamping itu masih kurangnya dukungan program pemerintah bagi masyarakat yang berminat menjadi hafidz alquran. Selai itu, meningkatnya aktivitas keagamaan juga dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarna keagamaan yang lebih baik. Namun ada beberapa sarana dan prasarana keagamaan yaitu Gedung Islamic Centre yang belum berfungsi karena pembangunannya belum selesai. Diharapkan Gedung Islamic Centre ini akan menjadi pusat aktivitas keagamaan di Kabupaten Sinjai khususnya aktivitas keagamaan hari-hari besar dan aktivitas keagamaan rutin lainnya.

- k) Meningkatnya aksesibilitas wilayah

Proporsi Jalan Dalam Kondisi Baik Kabupaten Sinjai Tahun 2016-2020, dapat diketahui bahwa panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2016 adalah 485,48 Km dari total panjang jalan keseluruhannya 1.256,91 Km atau 38,63 persen. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 0,04 persen, dimana pada tahun 2017 jalan dalam kondisi baik adalah 486,10 Km atau 38,67 persen. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 6,25 persen, dimana pada tahun 2017 jalan dalam kondisi baik adalah 564,57 Km atau 44,92 persen Sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan panjang jalan dalam kondisi baik sebesar 14,2 persen disebabkan pada tahun 2019

sebagian ruas jalan kabupaten telah mencapai umur jalan, dimana pada tahun 2019 jalan dalam kondisi baik adalah 386,135 Km atau 30,72 persen. Sedangkan pada tahun 2020 terjadi peningkatan secara signifikan panjang jalan dalam kondisi baik menjadi 544,38 Km atau 43,31 persen dari seluruh panjang jalan di Kabupaten Sinjai.

l) Terpenuhinya kebutuhan air minum sehari-hari

Salah satu pencapaian pelayanan standar minimal adalah akses air minum sebesar seratus persen. Akses air minum penduduk di perkotaan dan perdesaan pada tahun 2020 sebesar 75,64 persen.

m) Terpenuhinya sarana/pra-sarana perumahan dan pemukiman

Jumlah unit rumah pada tahun 2020 sebanyak 56.685 dengan jumlah rumah layak huni sebanyak 48.869 (sebesar 86,21 persen). Luas permukiman layak huni di tahun 2020 tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 27.247 Ha. Dari total luas wilayah permukiman sebesar 57,397 Ha. Dengan demikian selama periode tersebut rasio luas permukiman layak huni terhadap luas wilayah permukiman sebesar 47,47 persen.

n) Berkurangnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

Dalam upaya meningkatkan ketertiban, nyaman dan ketenteraman yang menjadi indikatornya adalah penanganan terhadap pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum. Jumlah kasus yang ditangani tahun 2020 sebanyak 179 dengan jumlah kasus yang ditangani sebanyak 179 (sebesar 100%). Tingkat penyelesaian pelanggaran gangguan ketertiban, keamanan dan ketenteraman masyarakat yang tertangani mengalami peningkatan selama 2016 – 2020. Namun peningkatan ini ditinjau dari sisi penanganannya maka wajar kasus tersebut dapat ditangani sampai seratus persen.

o) Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu kabupaten yang memiliki beberapa kecamatan yang rawan bencana. Untuk itu Penanganan bencana menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian. Keterlibatan masyarakat dalam hal penanganan menjadi salah satu upaya dalam hal tanggap bencana.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi dalam RPJMD ini diartikan sebagai kondisi yang hendak diwujudkan selama periode 2018-2023. Rumusan visi ini dijabarkan dari visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023. Adapun rumusan visi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”

Penjelasan dari rumusan visi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Mandiri	Kondisi perekonomian masyarakat dan keuangan pemerintah daerah yang memiliki derajat kemandirian
	Berkeadilan	Kondisi dimana masyarakat mendapatkan keadilan dalam mendapatkan pelayanan dasar maupun pelayanan publik lainnya
	Religius	Kondisi dimana terwujud ketertiban, ketentraman dan kenyamanan hidup dalam masyarakat sebagai dampak dari ketaatan beribadah
	Unggul dan Berdaya saing	Kondisi dimana kualitas manusia dan kapasitas infrastruktur daerah unggul dan berdaya saing

5.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut:

- (1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif
- (2) Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis
- (3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat
- (4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa
- (5) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah
- (6) Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat
- (7) Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel 5.2. :

Tabel 5.2.
Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023

Pernyataan Visi:			
No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif	Misi ini mencakup upaya umum dalam menyelenggarakan siklus perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan menggunakan sistem informasi berbasis elektronik yang diawasi secara internal dalam rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Mandiri
2.	Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang	Misi ini mencakup upaya umum dalam penyelenggaraan dan pencapaian target-target pelayanan dasar pada enam urusan wajib pengampu standar pelayanan minimal dan pelayanan umum lainnya	Berkeadilan

Pernyataan Visi:			
No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
	strategis	yang strategis	
3.	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat	Misi ini mencakup upaya umum dalam penguatan kemandirian ekonomi masyarakat agar lebih sejahtera secara adil merata dan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah	Mandiri
4.	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkat-kan keunggulan sumberdaya manusia pada aspek pendidikan dan kesehatan serta iman dan taqwa	Unggul dan Religius
5.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/ prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah dengan pembukaan akses dengan jalan dan jembatan serta meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Berdayasaing
6.	Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat	Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat dengan meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban dan memperkuat harmoni social	Unggul dan Religius
7.	Memelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.	Misi ini mencakup upaya umum dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam serta penguatan kemampuan dalam mitigasi dan penanganan bencana	Unggul dan Berdayasaing

Misi pembangunan Kabupaten Sinjai sejalan dengan arahan RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 dengan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 5.3.
Keterkaitan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 dengan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023

No.	Misi RPJMN 2020-2024	Misi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023
1.	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa
2.	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis
		Mewujudkan kesejahteraan masyarakat mealui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat
3.	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah

No.	Misi RPJMN 2020-2024	Misi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023
4.	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.
5.	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang patuh kepada hukum.
6.	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	
7.	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	
8.	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif
9.	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	

Misi pembangunan Kabupaten Sinjai sejalan dengan arahan Misi Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2023 yaitu:

1. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
2. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif;
3. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan
5. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif;

Keterkaitan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan misi pembangunan RPJMD Kabupaen Sinjai Tahun 2018-2023 dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 5.4.
Keterkaitan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2028-2023
dengan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023

No.	Misi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
1.	Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa	Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
2.	Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis	Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
3.	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat mealui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan
4.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
5.	Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan
6.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif	Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif

No.	Misi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
7.	Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang patuh kepada hukum.	

5.3. Tujuan dan Sasaran

Menurut Permendagri 86/2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Sasaran RPJMD juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPD.

Terkait RPJMD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMART-C.

Langkah-langkah perumusan tujuan dan sasaran: (1) merumuskan rancangan pernyataan tujuan dari setiap misi dan melihat kesesuaian dengan program kepala daerah terpilih; (2) menguji apakah rancangan pernyataan tujuan dapat memecahkan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (3) merumuskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dari setiap tujuan; (4) merumuskan indikator tujuan dan sasaran yang terukur, sekurang-kurangnya memenuhi indikator sasaran pokok RPJPD periode RPJMD berkenaan; dan (5) menyelaraskan rancangan pernyataan-pernyataan sasaran dan capaian indikator yang terukur terhadap pernyataan arah kebijakan dan sasaran RPJMN untuk penyusunan rancangan awal RPJMD.

Berdasarkan pemahaman tersebut maka rumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023 dirumuskan pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5.
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sinjai

Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Target			
						2021	2022	2023	Akhir RPJMD
Misi 1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif								
	Tujuan 1	Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik	T.1. Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/ angka	CC 56,57	B 76,61-88,30	B 76,61-88,30	B 76,61-88,30	B 76,61-88,30
	Sasaran 1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintah Daerah	S.1. Nilai SAKIP Kabupaten	Huruf/ angka	B 66,11	B (61 – 70)	BB (71 - 80)	BB (71 - 80)	BB (71 - 80)
Misi 2	Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis								
	Tujuan 2	meningkatkan pelayanan masyarakat melalui pemenuhan standar pelayanan minimal dan pelayanan umum yang strategis	T.2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81,68	80	82	85	85
	Sasaran 2	Terpenuhinya standar pelayanan minimal	S.2. Cakupan pemenuhan SPM pelayan dasar	persen	100	100	100	100	100
Misi 3	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat mealui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat								
	Tujuan 3	Meningkatkan kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	T.3. Rasio Gini	Angka	0,372	0.365	0.357	0.350	0.350

Misi/Tujuan/Sasaran		Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Target			
					2021	2022	2023	Akhir RPJMD
		T.3. Kemiskinan	%	9,00	8,93	8,43	7,90	7,90
Sasaran 3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan	S.3. Pertumbuhan Ekonomi	%	1,55	3,30-4,40	4,28-5,71	4,39-5,86	4,39-5,86
Sasaran 4	Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif	S.4 Tingkat pengangguran terbuka	Angka	2,65	2,64	2,58	2,53	2,53
Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa								
Tujuan 4	Meningkatkan Kualitas SDM	T.4. IPM	Angka	67,6	68.15	68.55	69.06	69.06
Sasaran 5	Meningkatnya Kualitas dan Pemertaan Akses Pendidikan	S.5. Indeks Pendidikan	Angka	62,08	63,19	64,3	65,41	65,41
Sasaran 6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	S.6. Indeks Kesehatan	Angka	72,77	72,92	73,04	73,17	73,17
Sasaran 7	Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan	S.7. IDG	Nilai	IDG : 72.64	IDG : 72.68	IDG : 72.7	IDG : 72.74	IDG : 72.74
Sasaran 8	Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	S.8. Rasio Literasi Alquran	Rasio	0,76	0,76	0,77	0,77	0,77
Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah								
Tujuan 5	Meningkatkan ketersediaan dan daya Saing Infrastruktur Daerah	T.4. Indeks Wiliamson	point	-	0,181	0,180	0,179	0,179

Misi/Tujuan/Sasaran			Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Target			
						2021	2022	2023	Akhir RPJMD
	Sasaran 9	Meningkatnya kualitas dan pemenuhan ketersediaan infrastruktur wilayah	S.9. Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	80,15	90,12	94,19	95,36	95.36
Misi 6	Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang patuh kepada hukum								
	Tujuan 6	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	T.6. Indeks Ketentraman dan Ketertiban	%	73	72 - 74	74 - 75	75 -80	75 -80
	Sasaran 10	terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman	S.10. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	%	100	100	100	100	100
Misi 7	Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan								
	Tujuan 7	Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup secara berkelanjutan	T.7. IKLH	Angka	72,37	79,65	79,77	79,91	79,91
	Sasaran 11	Meningkatnya Ketangguhan menghadapi bencana	S.11. Indeks Resiko Bencana	Angka	76	78	79	80	80
	Sasaran 12	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	S.12. potensi penurunan Emisi GRK	Ton	-	302,21	351,96	375,00	375,00

Berdasarkan tabel V.4 di atas, menunjukkan tujuan sasaran serta indikator yang akan mendukung pencapaian Misi Kabupaten Sinjai terdiri atas 7 tujuan, 12 sasaran dengan rumusan indikator sebanyak 8 indikator tujuan dan 12 indikator sasaran, sehingga total indikator yang digunakan untuk mengukur capaian Misi Kabupaten Sinjai sebanyak 19 indikator.

Tujuan dan sasaran yang terdapat pada RPJMD Perubahan 2018 – 2023 diarahkan pula untuk mendukung sasaran yang telah ditetapkan pada RPJPD 2005 – 2025. Berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat 10 sasaran pokok RPJPD 2005 – 2025 yang didukung oleh 5 tujuan dan 6 sasaran yang terdapat dalam RPJMD perubahan 2018 – 2023, yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 5.6.

Hubungan Sasaran Pokok RPJPD 2005-2025 terhadap RPJMD 2018-2023

Sasaran Pokok RPJPD 2005 - 2025	Indikator	Target RPJPD Periode 2020 - 2025	Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018 - 2023	Indikator	Kondisi Akhir Periode RPJMD (2023)
Meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan sektorsektor perekonomian daerah (S1)	Pertumbuhan ekonomi	8,0 - 9,0	Meningkatkan kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (T3)	Angka Kemiskinan	7,90
	PDRB/kapita	48,26 - 72,06		Gini Ratio	0,350
	Angka kemiskinan	8,84 - 7,32	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan (S3)	Pertumbuhan ekonomi	4,39-5,86
	Angka pengangguran terbuka = 1-0,6	1-0,6			
	% kontribusi bidang usaha pertanian dalam	PDRB = 45,83 - 45			
	% kontribusi bidang usaha industri dalam PDRB	PDRB= 6 - 8,7			
	% kontribusi bidang usaha jasa dalam PDRB	16 - 17,8			
	Nilai investasi PMDN dan PMA	5.015.433.058.390	Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif (S4)	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,53

Sasaran Pokok RPJPD 2005 - 2025	Indikator	Target RPJPD Periode 2020 - 2025	Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018 - 2023	Indikator	Kondisi Akhir Periode RPJMD (2023)
Terpeliharanya daya dukung lingkungan dan sumberdaya alam bagi keberlanjutan perkembangan ekonomi daerah (S2)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	(IKLHD) IPA : 62 - 64 , IPU : 91 - 92	Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup secara berkelanjutan (T7)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah IKLH	
			terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (S12)	potensi penurunan Emisi GRK	72,37
Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah dalam mendukung perekonomian daerah (S3)	Porsi panjang jaringan jalan kualitas baik	785,63 km (62,51%)	Meningkatkan ketersediaan dan daya saing dan infrastruktur Daerah (T5)	Indeks Wiliamson	62,44
	Jumlah Angkutan Umum 1939, Jumlah Terminal Angutan Darat 13, Jumlah Kapal Bermotor : 20	Jumlah Angkutan Umum : 1939, Jumlah Terminal Angutan Darat : 13, Jumlah Kapal Bermotor : 20	Meningkatkan kualitas dan pemenuhan ketersediaan infrastruktur Wilayah (S9)	Indeks Layanan Infrastruktur (kemantapan jalan, cakupan layanan irigasi, rumah layak huni, permukiman tidak kumuh)	90,12
	Jumlah Pelabuhan Rakyat	2			
Meningkatnya capaian pembangunan manusia pembangunan manusia secara merata pada seluruh wilayah (S4)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,65 - 70,82	Meningkatkan Kualitas SDM (T4)	IPM	69,06

Sasaran Pokok RPJPD 2005 - 2025	Indikator	Target RPJPD Periode 2020 - 2025	Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018 - 2023	Indikator	Kondisi Akhir Periode RPJMD (2023)
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2025	7,91 - 8,77	Meningkatnya Kualitas Pendidikan (S5)	Indeks Pendidikan	62,08
	Angka Harapan Hidup	66,81-67,18/ Tahun	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S6)	Indeks Kesehatan	72,77
			Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan (S7)	IDG	72,74
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dan kualitas pelayanan umum (S5)	Nilai LAKIP	B	Meningkatkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang baik (T1)	Indeks Reformasi Birokrasi	B (76,61 – 88,30)
	Opini Laporan Keuangan	WTP	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (S1)	Nilai SAKIP Kabupaten	BB (71 - 80)
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik (S6)	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik.	meningkatkan pelayanan masyarakat melalui pemenuhan standar pelayanan minimal dan pelayanan umum yang strategis (T2)	Indeks Kepuasan Masyarakat	85
			Terpenuhinya standar pelayanan minimal (S2)	Cakupan pemenuhan SPM pelayan dasar (%)	100

Sasaran Pokok RPJPD 2005 – 2025	Indikator	Target RPJPD Periode 2020 - 2025	Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018 - 2023	Indikator	Kondisi Akhir Periode RPJMD (2023)
Meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan Pancasila serta apresiasi kearifan lokal (S7)	Rasio rumah ibadah/ jumlah penduduk		Meningkatnya aktualisas nilai- nilai agama dalam kehidupan masyarakat (S8)	Rasio Literasi Alquran	0,77
	Cakupan cagar budaya dan kearifan lokal yang menunjang perkembangan pariwisata	Jumlah: 153, Jenis : 4			
Terpeliharanya ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (S8)	Angka Kriminalitas	80%	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban (T6)	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	75 – 80
			terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman (S10)	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	100

Tabel V.6 diatas menggambarkan keterkaitan antara sasaran RPJPD tahun 2000-2025 dengan tujuan dan sasaran RPJMD 2018-2023, dari tujuan dan sasaran tersebut terdapat beberapa indikator yang memiliki target yang tidak bersesuaian namun indikator tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Adapun indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran 3 pada RPJPD yaitu Meningkatnya kapasitas infrastruktur wilayah dalam mendukung perekonomian daerah dengan indikator Porsi panjang jaringan jalan kualitas baik, Jumlah Angkutan Umum, Jumlah Terminal Angkutan Darat, Jumlah Kapal Bermotor sedangkan pada RPJMD 2018-2023 Tujuan 5 yaitu Meningkatnya kualitas pemenuhan ketersediaan infrastruktur Wilayah diukur dengan indikator Indeks daya saing Infrastruktur Daerah dan sasaran 7 Meningkatnya aksesibilitas wilayah dengan indikator Indeks Layanan Infrastruktur (kemantapan jalan, cakupan layanan irigasi, rumah layak huni, permukiman tidak kumuh). Indikator tersebut memiliki keterkaitan karena semua yang menjadi indikator dalam Sasaran 3 pada RPJPD adalah komponen pendukung pada sasaran dan tujuan pada RPJMD 2018-2023.
- b. Sasaran 4 pada RPJPD yaitu Meningkatnya capaian pembangunan manusia pembangunan manusia secara merata pada seluruh wilayah dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2025, Angka Harapan Hidup sangat berkaitan dengan RPJMD 2018-2023 pada tujuan 7 : Meningkatkan Kualitas SDM dengan indikator Pembangunan Manusia (IPM) dan sasaran : meningkatnya Meningkatnya Kualitas Pendidikan diukur dengan indikator Indeks pendidikan, sasaran 6 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator Indeks Kesehatan dan sasaran 7 : Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan dengan Indikator, karena semua komponen pada Sasaran 4 pada RPJPD ada pada tujuan 7 dan sasaran 5, 6, dan 7 pada RPJMD 2018-2023.
- c. Sasaran 7 pada RPJPD yaitu Meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan Pancasila serta apresiasi kearifan lokal yang diukur dengan Rasio rumah ibadah/jumlah penduduk Cakupan cagar budaya dan kearifan lokal yang menunjang perkembangan pariwisata, sedangkan pada RPJMD 2018-2023, sasaran 8, Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat yang diukur dengan indikator. Rasio Literasi Alquran, di Kabupaten Sinjai memiliki keterkaitan peningkatan aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat termaksud dalam

Meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan Pancasila serta apresiasi kearifan lokal yang diukur dengan Rasio rumah ibadah.

- d. Sasaran 8 pada RPJPD yaitu Terpeliharanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan indikator Angka Kriminalitas memiliki kesesuaian dengan tujuan 8 RPJMD 2018 – 2023 yaitu Meningkatnya ketentraman dan ketertiban dengan indikator Indeks Ketentraman dan Ketertiban (Total Nilai Indeks Ketentraman + Indeks Ketertiban) serta sasaran 10 terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman dengan dengan indikator Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum saling berkaitan mengingat Angka Kriminalitas adalah salah satu komponen Indeks Ketentraman dan Ketertiban

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi

Strategi dalam RPJMD ini merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sinjai lima tahun kedepan. Langkah yang ditempuh dalam perumusan strategi ini adalah :

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah;
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi;
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.

Berdasarkan pengertian dan langkah-langkah penyusunan strategi tersebut maka rumusan strategi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Sinjai

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif		
1. Meningkatkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang baik	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Mendorong pengawasan yang ketat terhadap seluruh siklus pemerintahan secara bersinergi dengan keterbukaan informasi publik berbasis elektornik 2. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan pelatihan formal maupun struktural serta optimalisasi perencanaan pelaporan dan pengukuran kinerja perangkat daerah berbasis elektornik serta Peningkatan Kualitas konsistensi penyusunan dokumen prencanaan dan penganggaran
Misi 2 : Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis		
2. meningkatkan pelayanan masyarakat melalui pemenuhan standar pelayanan minimal dan pelayanan umum yang strategis	2. Terpenuhinya standar pelayanan minimal	3. Meningkatkan pemenuhan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan umum sesuai standard.
Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat mealui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat		
3. Meningkatkan kesejahteraan dan Pemerataan	3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang	4. Mendorong perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat bagi rakyat

Tujuan	Sasaran	Strategi
Ekonomi	berkeadilan	miskin
	4. Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif	5. Memperbaiki pelayanan investasi secara bersinergi dengan penciptaan wirausaha baru serta stimulus bagi UMKM
Misi 4 : Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa		
4. Meningkatkan Kualitas SDM	5. Meningkatnya dan Pemertaan Akses Kualitas Pendidikan	6. Penguatan peran pendidikan tinggi daerah, penuntasan penyelenggaraan urusan pendidikan yang menjadi kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam SPM 7. Pemberian bantuan pendidikan pascasarjana dan doktor serta penguatan peran pendidikan tinggi daerah
	6. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	8. Penguatan sistem jaminan kesehatan secara proporsional dengan perluasan jangkauan sarana pelayanan serta insentif bagi pelayan kesehatan
	7. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	9. Meningkatkan peran perempuan dalam perekonomian dan pembangunan secara luas seiring dengan perlindungan terhadap kekerasan
	8. Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	10. Mengembangkan Islamic Center sebagai pusat syiar Islam dan memberi dukungan bagi aktivitas lembaga pendidikan dan lembaga sosial keagamaan

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 5 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah		
5. Meningkatkan ketersediaan dan daya Saing Infrastruktur Daerah	9. Meningkatnya kualitas dan pemenuhan ketersediaan infrastruktur wilayah	11. Membangun, memelihara dan meningkatkan jalan untuk konektivitas dan keterbukaan isolasi wilayah 12. Peningkatan kulaitas dan kuantitas infrastruktur wilayah antara lain air minum dan air limbah untuk pemenuhan SPM 13. peningkatan kualitas dan cakupan jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktifitas pertanian kabupaten sinjai
Misi 6 : Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang patuh kepada hukum		
6. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	10. terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman	14. Meningkatkan kapasitas Satpol-PP dalam pelayanan ketertiban dan ketenteraman secaraberiringan dengan penguatan kelembagaan masyarakat dalam swadaya pengamanan lingkungan
Misi 7 : Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan		
7. Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup secara berkelanjutan	11. Meningkatnya Ketangguhan menghadapi bencana	15. Meningkatkan kapasitas daerah dalam meningkatkan kulaitas lingkungan hidup dan penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan dan penanganan bencana
	12. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam RPJMD ini diartikan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Langkah-langkah dalam merumuskan arah kebijakan ini adalah :

- 1) Mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun;
- 2) Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategik terkait tiap tahun;
- 3) Diskusi tim atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi;
- 4) Merumuskan draft arah kebijakan;
- 5) Menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 6) Memutuskan arah kebijakan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang akan melahirkan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Keterkaitan tema atau fokus pembangunan, arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Sinjai digambarkan sebagai berikut:

1. Tema pembangunan Kabupaten Sinjai Tahun 2019 : ***“Peningkatan Daya Saing Melalui Pembangunan Perekonomian infrastruktur dan Profesionalisme Aparatur “***
2. Tema pembangunan Kabupaten Sinjai Tahun 2020 : ***“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengembangan SDM dan Infrastruktur”***
3. Tema pembangunan Kabupaten Sinjai Tahun 2021 : ***“Percepatan Pemulihan Ekonomi, Infrastruktur dan SDM ”***
4. Tema pembangunan Kabupaten Sinjai Tahun 2022 : ***“Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Inovasi Untuk Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan”***
5. Tema pembangunan Kabupaten Sinjai Tahun 2023 : ***“ Masyarakat Religius Dan Sejahtera Elalui Sarana Pendidikan Dan Kesehatan Yang Berkualitas”***

Berdasarkan pengertian dan langkah-langkah perumusan tersebut maka arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 6.2 setelah mengalami perubahan dengan mempedomani Tujuan dan sasaran yang juga telah mengalami perubahan :

Tabel 6.2.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Pembangunan Kabupaten Sinjai 2019 - 2020

SEBELUM PERUBAHAN RPJMD

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
				Tahun 2019	Tahun 2020
Visi: Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing					
1.	Misi-1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif.				
	Tujuan 1: Meningkatkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang baik	Sasaran 1: Integrasi perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbasis elektronik	Strategi 1: Mendorong pengawasan yang ketat terhadap seluruh siklus pemerintahan secara bersinergi dengan keterbukaan informasi publik berbasis elektronik	Pengawasan internal oleh APIP dalam mendukung reformasi birokrasi	Pelibatan peran tim terpadu dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
				Tahun 2019	Tahun 2020
2.	Misi-2: Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis.				
	Tujuan 2: Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui pemenuhan standar pelayanan minimal dan pelayanan umum yang strategis	Sasaran 2: Terpenuhinya standar pelayanan minimal	Strategi 2: Memenuhi kebutuhan sarana/prasarana dan SDM pelayanan secara beriringan dengan penyadaran masyarakat dalam memanfaatkan layanan dasar secara seksama	Pemenuhan cakupan dan standar SPM untuk pelayanan dasar	Peningkatan kualitas penyelenggaraan SPM pelayanan dasar

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
				Tahun 2019	Tahun 2020
3.	Misi-3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat mealui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat.				
	Tujuan 3: Meningkatkan kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	Sasaran 3: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara merata	Strategi 3: Mendorong perlindungan social dan pemberdayaan masyarakat bagi rakyat miskin	Layanan kesehatan gratis warga miskin	Bantuan pendidikan bagi siswa miskin
		Sasaran 4: Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif	Memperbaiki pelayanan investasi secara bersinergi dengan penciptaan wirausaha baru serta stimulus bagi UMKM	Stimulus modal dan teknologi bagi UMKM	Pengembangan Badan Usaha Milik Petani

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
				Tahun 2019	Tahun 2020
4	Misi-4: Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa.				
	Tujuan 4:	Sasaran 5:	Strategi 4:		
	Meningkatkan Kualitas SDM	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Meningkatkan taraf kualitas lembaga pendidikan dan memberi bantuan pendidikan pasca sarjana dan doktor serta penguatan peran pendidikan tinggi daerah	Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemuda serta civil society	Penguatan kelitbangan daerah dalam mendukung kebijakan dan pembangunan
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Penguatan sistem jaminan kesehatan secara proporsional dengan perluasan jangkauan sarana pelayanan serta insentif bagi pelayan kesehatan	Pembangunan rumah sakit tipe D setiap kecamatan	Pelayanan kesehatan khusus serta home care dan home visit

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
				Tahun 2019	Tahun 2020
		Sasaran 6: Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	Mengembangkan Islamic Center sebagai pusat syiar Islam dan memberi dukungan bagi aktivitas lembaga pendidikan dan lembaga sosial keagamaan	Pemberian insentif kepada pesantren, lembaga keagamaan dan pemuka agama	Pengembangan kegiatan keagamaan pada lembaga pemerintah dan masyarakat
5.	Misi-5: Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah.				
	Tujuan 5: Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah	Sasaran 7: Meningkatnya kualitas dan pemenuhan ketersediaan infrakstruktur wilayah	Strategi 5: Membangun, memelihara dan meningkatkan jalan untuk konektivitas dan keterbukaan isolasi wilayah	Pemeliharaan jalan dan jembatan secara merata ke pelosok desa	Pembangunan jalan dan jembatan pembuka isolasi wilayah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
				Tahun 2019	Tahun 2020
6.	Misi-6: Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang patuh kepada hukum				
	Tujuan 6:	Sasaran 8:	Strategi 6:		
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman	Meningkatkan kapasitas Satpol-PP dalam pelayanan ketertiban dan ketenteraman secara beriringan dengan penguatan kelembagaan masyarakat dalam swadaya pengamanan lingkungan	Penguatan harmoni sosial antar golongan masyarakat	Penguatan kesatuan bangsa
7.	Misi-7: Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.				
	Tujuan 7:	Sasaran 9:	Strategi 7:		
	Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup secara berkelanjutan	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	Memetakan wilayah rawan bencana seiring dengan penguatan kapasitas masyarakat untuk tangguh menghadapi bencana	Pembentukan desa tangguh bencana	Pengembangan desa tangguh bencana

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
				Tahun 2019	Tahun 2020
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Menata taman kota dan RTH pada setiap kecamatan secara bersinergi dengan pengelolaan sampah modern dan revitalisasi terumbu karang	Pembangunan dan optimalisasi fungsi drainase perkotaan dan perdesaan	Revitalisasi terumbu karang

Tabel 6.3.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Sinjai 2021 - 2023

PERUBAHAN RPJMD

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Visi: Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing						
1.	Misi-1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif					
	Tujuan 1: Meningkatkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang baik	Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintah Daerah	Strategi 1: Mendorong pengawasan yang ketat terhadap siklus pemerintahan secara bersinergi dengan keterbukaan informasi publik.	Pengawasan internal oleh APIP dalam mendukung reformasi birokrasi	Pemanfaatan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Pelibatan peran tim terpadu dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam peningkatan kualitas aparatur

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
			Strategi 2:			
			Persentase ASN yang mengikuti pendidikan pelatihan formal maupun struktural serta optimalisasi perencanaan pelaporan dan pengukuran kinerja perangkat daerah berbasis elektornik serta Peningkatan Kualitas konsistensi penyusunan dokumen prencanaan dan penganggaran	Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur serta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaporan dan pengukuran kinerja perangkat daerah	Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur serta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam meningkatkan kualitas perencanaan pelaporan dan pengukuran kinerja perangkat daerah	Peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur serta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam meningkatkan kualitas perencanaan pelaporan dan pengukuran kinerja perangkat daerah

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
2.	Misi-2: Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis					
	Tujuan 2:	Sasaran 2:	Strategi 3:			
	Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui pemenuhan standar pelayanan minimal dan pelayanan umum yang strategis	Terpenuhinya standar pelayanan minimal	Meningkatkan pemenuhan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan umum sesuai standar	Pemenuhan cakupan dan standar SPM untuk pelayanan dasar	Peningkatan kualitas penyelenggaraan SPM pelayanan dasar, dalam mengoptimalkan pengumpulan data dan informasi penyelenggaraan pelayanan berbasis TIK	Pemeliharaan Peningkatan kualitas penyelenggaraan SPM pelayanan dasar, dalam men optimalisasikan pengumpulan data dan informasi penyelenggaraan pelayanan berbasis

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
						TIK
3.	Misi-3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat mealui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat					
	Tujuan 3: Meningkatkan kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	Sasaran 3: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkeadian	Strategi 4: Stabilisasi pertumbuhan ekonomi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, perdagangan peridustrian	Bantuan sarana dan prasarana untuk peningkatan produktifitas pertumbuhan ekonomi	pembinaan terhadap pelaku utama pertanian dan usaha industry melalui pemberian berbagai pelatihan, bimbingan, penyuluhan dan pendampingan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kompetensinya, termasuk didalamnya mengembangkan inovasi, serta pengenalan teknologi pertanian	Peningkatan Pertumbuhan ekonomi lapangan usaha industri pengolahan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
		Sasaran 4: Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif	Strategi 5: Memperbaiki pelayanan investasi secara bersinergi dengan penciptaan wirausaha baru serta stimulus bagi UMKM	Stimulus modal dan teknologi bagi UMKM	Pengembangan Badan Usaha Milik Petani, fasilitasi peningkatan produktifitas UMKM	Pemantapan bisnis wirausaha muda, fasilitasi peningkatan produktifitas UMKM

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
4	Misi-4: Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa					
	Tujuan 4:	Sasaran 5:	Strategi 6:			
	Meningkatkan Kualitas SDM	Meningkatnya Kualitas dan Pemertaan Akses Pendidikan	Penuntasan penyelenggaraan urusan pendidikan yang menjadi kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam SPM	Peningkatan kualitas Pendidikan untuk pencapaian SPM di bidang Pendidikan	Penguatan kelitbangan daerah dalam mendukung kebijakan dan pembangunan, untuk peningkatan kualitas akses dan pelayanan pendidikan	Penguatan peran lembaga pendidikan tinggi daerah dalam pembangunan dalam peningkatan kualitas akses dan pelayanan pendidikan
			Strategi 7:			

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
			Meningkatkan taraf kualitas lembaga pendidikan dan memberi bantuan pendidikan pasca sarjana dan doktor serta penguatan peran pendidikan tinggi daerah	Perumusan produk hukum sebagai dasar pemberian bantuan	Seleksi dan pemberian bantuan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan	Evaluasi pemberian bantuan pendidikan dalam rangka upaya penyempurnaan pelaksanaan
		Sasaran 6: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Strategi 8 : Penguatan sistem jaminan kesehatan secara proporsional dengan perluasan jangkauan sarana pelayanan serta insentif bagi pelayan kesehatan	Pembangunan rumah sakit tipe D di dua kecamatan	Pemantapan keterpenuhan sarana/peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan kualitas sarana/prasarana kesehatan untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
		Sasaran 7 : Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan	Strategi 9 : Meningkatkan peranan perempuan dalam perekonomian dan pembangunan secara luas seiring dengan perlindungan terhadap kekerasan	Penguatan peranan perempuan dalam pengembangan kesejahteraan keluarga	Penguatan peranan perempuan pada birokrasi dan legislative dalam pembangunan	Pemantapan peranan perempuan dalam pembangunan
		Sasaran 8	Strategi 10 :			

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
		Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat	Menumbuhkan kebiasaan membaca dan memahami aksara alquran serta Mengembangkan Islamic Center sebagai pusat syiar Islam dan memberi dukungan bagi aktivitas lembaga pendidikan dan lembaga social keagamaan	Motivasi siswa siswi agar senantiasa mencintai dan merutinkan baca Alquran dan Pemberian insentif kepada pesantren,guru mengaji, lembaga keagamaan dan pemuka agama	Pengembangan literasi Alquran,pada anak usia Sekolah dan Pengembangan kegiatan keagamaan pada lembaga pemerintah dan masyarakat	Pemantapan manifestasi keagamaan dalam kehidupan sehari-hari
5	Misi-5 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah					
	Tujuan 5:	Sasaran 9:	Strategi 11:			

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	Meningkatkan ketersediaan dan daya Saing Infrastruktur Daerah	Meningkatnya kualitas dan pemenuhan ketersediaan infrastruktur wilayah	Membangun, memelihara dan meningkatkan jalan untuk konektivitas dan keterbukaan isolasi wilayah	Pemeliharaan jalan dan jembatan secara merata ke pelosok desa	Pembangunan jalan dan jembatan pembuka isolasi wilayah dalam rangka peningkatan kapasitas dan layanan terminal dan pelabuhan serta peningkatan kualitas kawasan kumuh dan RTLH.	Pemantapan jalan Kabupaten
			Strategi 12 :			
			Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah antara lain air minum dan air limbah untuk pemenuhan SPM	Peningkatan kualitas jaringan air bersih	Perluasan cakupan air bersih	Optimalisasi pemanfaatan sarana pengolahan air limbah
			Strategi 13:			

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
			Peningkatan kualitas dan cakupan jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produktifitas pertanian Kabupaten Sinjai	Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder	Peningkatan jaringan irigasi tersier	Optimalisasi pemanfaatan jaringan irigasi
6.	Misi-6: Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang patuh kepada hukum					
	Tujuan 6:	Sasaran 10:	Strategi 14:			
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang aman dan nyaman	Meningkatkan kapasitas Satpol-PP dalam pelayanan ketertiban dan ketenteraman secara beriringan dengan penguatan kelembagaan masyarakat dalam swadaya pengamanan lingkungan	Penguatan harmoni sosial antar golongan masyarakat	Penguatan kesatuan bangsa	Penyadaran kepatuhan hukum

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
7	Misi-7: Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.					
	Tujuan 7: Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup secara berkelanjutan	Sasaran 11: Meningkatnya Ketangguhan menghadapi bencana	Strategi 15: Meningkatkan kapasitas daerah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan dan penanganan bencana	Pembentukan desa tangguh bencana	Pengembangan desa tangguh bencana	Pemantapan desa tangguh bencana
		Sasaran 12 terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim		Pembangunan dan optimalisasi fungsi drainase perkotaan dan perdesaan	Revitalisasi terumbu karang	Revitalisasi dan pengerukan daerah aliran sungai

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, maka dirumuskan program pembangunan daerah yang merupakan implemetasi dari arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Program pembangunan daerah merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun. Program pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Sinjai dipetakan Matriks Program Pembangunan Daerah (Perubahan RPJMD) berdasarkan hasil pemetaan nomenklatur Program sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 6.4.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas dan Indikator Kinerja Pembangunan
Kabupaten Sinjai 2018 - 2023

No	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome Lama	Indikator Kinerja Impact / Outcome Hasil Perbaikan	Keterang an	Satuan Indikat or Kinerja Impact / Outco me	Kondis i Kinerja Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perang kat Daerah Penang gung Jawab
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
							Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Visi : "Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing"															
Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif															
	Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola penyekenggaraan pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi			Huruf/ angka	77	B 76,61- 88,30	729.549.825. 496	B 76,61 - 88,30		B 76,61- 88,30		B 76,61- 88,30		
	Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten			Huruf/ angka	B	B (61 – 70)	729.549.825. 496	BB (71 - 80)		BB (71 - 80)		BB (71 - 80)		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (Program Administrasi Umum)	Persentase Pemenuhan SAKIP; Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; Persentase Kelembagaan Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran			%	100	100%	573,709,542, 915.00	100 %	574,753,117 ,241.80	100%	578,454,082, 508.64	100%	1,726,916,74 2,665.44	SEMUA OPD

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

No	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome Lama	Indikator Kinerja Impact / Outcome Hasil Perbaikan	Keterang an	Satuan Indikat or Kinerja Impact / Outco me	Kondis i Kinerja Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perang kat Daerah Penang gung Jawab
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
							Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti			%	80	80	2,197,402,28 0	81%	2,631,687,2 80.00	81%	2,640,476,89 0.00	81%	7,469,566,45 0	INSPEK TORAT DAERA H
3	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu (RPJPD, RPJMD, RKPD).			%	100	100%	309,727,100. 00	100 %	539,300,000 .00	100%	616,500,000. 00	100%	1,465,527,10 0	BAPPED A
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			%	100	100%	177,545,888 ,931.00	100 %	174,392,35 6,295.00	100%	174,392,356 ,295.00	100%	526,330,601, 521	B K A D
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi DBH Pajak			%	100	100%	42,500,000	100 %	42,500,000	100%	42,500,000	100%	127,500,000	BAPEND A
5	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur penyediaan informasi			-	-	91.50%	743,172,118. 00	92%	811,170,000 .00	93%	700,119,880	93%	2,374,222,11 8	DINAS KOMINF O DAN PERSAN DIAN
6	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mendapatkan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi			%	0	21%	1,087,632,00 0	23%	111,500,000	25%	2,788,800,00 0	25%	6,246,825,00 0	BKPSD MA
Misi 2 : Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis															

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

No	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome Lama	Indikator Kinerja Impact / Outcome Hasil Perbaikan	Keterang an	Satuan Indikat or Kinerja Impact / Outco me	Kondis i Kinerja Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perang kat Daerah Penang gung Jawab
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
							Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Tujuan 2 : meningkatkan pelayanan masyarakat melalui pemenuhan standar pelayanan minimal dan pelayanan umum yang strategis	Indeks Kepuasan Masyarakat			Angka	75	80		82		85		85		
	Sasaran 2 : Terpenuhinya standar pelayanan minimal	Cakupan pemenuhan SPM pelayan dasar (%)			Angka	100	100		100		100		100		
7	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (Prioritas)	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum layak, perkotaan dan perdesaan (SPM)			%		100%	12,924,770,900.00	100.00%	12,910,242,000.00	100.00%	14,416,000,000.00	100.00%	40,251,012,900	DINAS PUPR
8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH (Prioritas)	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (SPM)			%	88.46	100.00%	9,333,453,000.00	100.00%	14,530,087,252.00	100.00%	19,582,000,000.00	88.80%	43,445,540,252	DINAS PUPR
9	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Anak			%	100	100	50,430,645,667.00	100	62,971,384,551	100	63,489,435,825	100	176,891,466,043	DINAS PENDIDIKAN

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

No	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome Lama	Indikator Kinerja Impact / Outcome Hasil Perbaikan	Keterang an	Satuan Indikat or Kinerja Impact / Outco me	Kondis i Kinerja Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perang kat Daerah Penang gung Jawab
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
							Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Usia Dini (SPM)													
		Persentase Warga Negara Usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar (SPM)			%	100	100		100		100				
		Prosentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar atau Pendidikan Menengah yang berprestasi dalam Pendidikan Kesetaraan (SPM)			%	100	100		100		100				
10	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil (SPM)	Cakupan pemenuhan indikator SPM Kesehatan Dinas kesehatan dan RS		%	85	100%	150,131,682,361.00	100 %	175,170,564,648	100%	169,494,555,244	100%	494,796,802,253	DINAS KESEHA TAN
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (SPM)				100	100		100		100		100		

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

No	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome Lama	Indikator Kinerja Impact / Outcome Hasil Perbaikan	Keterang an	Satuan Indikat or Kinerja Impact / Outco me	Kondis i Kinerja Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perang kat Daerah Penang gung Jawab
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
							Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase penderita hipertensi mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar (SPM)				100	100		100		100		100		
		Persentase penderita DM mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar (SPM)				100	100		100		100		100		
		Persentase prevalensi balita stunting				7.5			7.8		8		8		
		Persentase ibu hamil yang mendapat asupan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)				2.0	2.0		3.00		4.00		4.00		

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

No	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome Lama	Indikator Kinerja Impact / Outcome Hasil Perbaikan	Keterang an	Satuan Indikat or Kinerja Impact / Outco me	Kondis i Kinerja Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perang kat Daerah Penang gung Jawab
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
							Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Persentase ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan RS sesuai RS kelas B				100	100	37,764,105,800	100	42,288,287,000	100	43,026,713,900	100	123,145,226,700	RSUD
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA				100	100		100	30,000,000	100	30,120,000	100		RSUD
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan				100	100		100	3,000,000	100	3,000,000	100		RSUD
		% hasil survey standar akreditasi					-	-	80%	350,000,000	0%	0	100%	350,000,000	RSUD SINJAI
		% hasil survey verifikasi akreditasi					-	-	-	0	100%	280,000,000	100%	280,000,000	RSUD SINJAI
11	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	persentase ketersediaan rumah layak huni bagi warga kabupaten sinjai korban bencana			%	100	100	54.763.900	100	260,000,000.00	100	160,000,000.00	100	474,763,900	DINAS PERKIM TAN

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

No	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome Lama	Indikator Kinerja Impact / Outcome Hasil Perbaikan	Keterang an	Satuan Indikat or Kinerja Impact / Outco me	Kondis i Kinerja Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perang kat Daerah Penang gung Jawab	
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD			
							Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		persentase ketersediaan rumah layak huni bagi warga kabupaten sinjai yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kab/Kota														
12	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persentase penegakan perda dan perkara				100%	3,255,273,720.00	100%	3,353,398,920.00	100%	3,348,200,000.00	100%	9,956,872,640	SATPOL. PP DAN DAMKA R	
13	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti (SPM)			%	100	100	161,887,200.00	100	220,000,000.00	100	350,000,000.00	100	731,887,200	DINAS SOSIAL	
		Persentase Anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar diluar panti (SPM)				100	100		100		100		100			
		Persentase warga negara lanjut usia				100	100		100		100		100			

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

No	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome Lama	Indikator Kinerja Impact / Outcome Hasil Perbaikan	Keterang an	Satuan Indikat or Kinerja Impact / Outco me	Kondis i Kinerja Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perang kat Daerah Penang gung Jawab
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
							Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)													
		Persentase warga negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti (SPM)				100	100		100		100		100		
14	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL (Prioritas)	Persentase Keluarga Miskin dan Anak-Anak Terlantar yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial			%	100%	100%	171,376,500. 00	100 %	250,000,000 .00	100%	700,000,000. 00	100%	1,121,376,50 0	DIINAS SOSIAL
15	PROGRAM PENANGANAN BENCANA (Prioritas)	Jumlah Warga Negara Korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial			%	100	100%	113,186,200. 00	100 %	360,000,000 .00	100%	310,000,000. 00	100%	783,186,200	DIINAS SOSIAL

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

No	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome Lama	Indikator Kinerja Impact / Outcome Hasil Perbaikan	Keterang an	Satuan Indikat or Kinerja Impact / Outco me	Kondis i Kinerja Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perang kat Daerah Penang gung Jawab
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
							Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat mealui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat															
	Tujuan 3 : Meningkatkan kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi (%)					3,30-4,40		4,28- 5,71		4,28- 5,71		4,28- 5,71		
	Sasaran 3 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkeadian	Rasio Gini			%	0,372	0.365		0.357		0.350		0.350		
		Kemiskinan			%	9,00	8,93		8,43		8,43		7,90		
16	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatkan Produksi bahan Pangan Utama dan hortikultura	Meningkatka n Produksi bahan Pangan Utama dan hortikultura, dan Perkebunan Unggulan	Padi : 117,351 (Ton GKG)	Ton GKG (Gabah Kering Giling)		122.092	888,838,950. 00	124.5 34	1,566,000,0 00.00	127.024	1,572,264,00 0.00	378.582	4,027,102,95 0	DINAS TPHP
				Jagung : 16,000 Ton (PPK)	Ton PPK (Pipilan Kering)				18.35 8		19.276		38.595		
				Hortikultu ra Sayuran : 2,168 Ton SS	Ton SS (Sayura n Segar)	2168	2.390	2.510	2.635	3.125					
				Hortikultu ra Buah : 9,944 BS	Ton BS (Buah Segar)	9944	10.963					11.51 1	12.087	34.561	

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

No	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome Lama	Indikator Kinerja Impact / Outcome Hasil Perbaikan	Keterang an	Satuan Indikat or Kinerja Impact / Outco me	Kondis i Kinerja Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perang kat Daerah Penang gung Jawab
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
							Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Meningkatkan Produksi Tanaman Perkebunan Unggulan		Komodit i Cengkeh	Ton BK (Buah Kering)	964	1.063		1.116		1.172		3.351		
				Komoditi Kopi	Ton BK (Buah Kering)	2107	2.323		2.439		2.561		7.323		
				Komoditi Pala	Ton BK (Buah Kering)	709	781		820		861		2.462		
				Komoditi Kakao	Ton BK (Buah Kering)	270	298		313		328		939		
17	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya popiulasi ternak						713,499,415		713.499.425		1,330,000,00 0		3,453,499,41 5	DINAS PETERN AKAN & KESWA N
		Sapi potong (Ekor)		114.141 Ekor	121.66 0 Ekor	713,49 9,415	124.660 Ekor		128.3 99 Ekor		128.399 Ekor		153.031 Ekor		
		Kambing		27.574 Ekor	Ekor		28.539 Ekor		28.96 7 Ekor		29.401 Ekor		86.907 Ekor		
		ayam kampung		1.136.700 Ekor	28.539 Ekor		28.967 Ekor		29.40 1 Ekor		29.401 Ekor		1.434.4 17 Ekor		
18	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi perikanan tangkap (Ton)			Ton/Rp	85 unit	37,707	777,335,600. 00	38,83 8	931,882,000 .00	40,003	1,624,400,00 0.00	321 unit	3,333,617,60 0	DINAS PERIKA NAN

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

No	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome Lama	Indikator Kinerja Impact / Outcome Hasil Perbaikan	Keterang an	Satuan Indikat or Kinerja Impact / Outco me	Kondis i Kinerja Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perang kat Daerah Penang gung Jawab
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
							Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	PROGRAM PENGELOLAAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi perikanan budidaya (Ton)			Ton/Rp	38 Paket	47,709	10,617,499,999.00	49,592	1,804,442,979.00	52,071	1,316,500,000.00	133 Paket	13,738,442,978	DINAS PERIKANAN
20	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Terlaksananya pengawasan dan pemantauan pelaku usaha perdagangan serta dokumen data pedagang	Cakupan Peningkatan Sarana Distribusi Pangan		%	100	100%	307,251,900.00	100%	292,395,000.00	100%	343,570,000.00	100%	943,216,900	DINAS DAGPERIND DAN ESDM
21	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Presentase pelaksanaan promosi wisata daerah		53 destinasi	53 destinasi	13.4	304,064,900.00	4.4	495,767,045.00	4.4	402,000,000.00	58 destinasi	1,201,831,945	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
22	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan			%	100	3.7	11,916,600.00	6.5	50,000,000.00	6.5	100,000,000.00	1	161,916,600	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Sasaran 4 : Terciptanya Iklim Investasi Yang Kondusif	Tingkat Pengangguran Terbuka			angka		2.64		2.58		2.53		2.53		
23	PROGRAM	Persentase jumlah	Persentase		%		94,29%		94,34		94,39%		94,39%	110,487,400	DINAS

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

No	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome Lama	Indikator Kinerja Impact / Outcome Hasil Perbaikan	Keterang an	Satuan Indikat or Kinerja Impact / Outco me	Kondis i Kinerja Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perang kat Daerah Penang gung Jawab
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
							Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	PENGEMBANGAN UMKM	usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	usaha mikro dan kecil					44,603,200.0 0	%	20,281,000. 00		45,603,200. 00			KOPERA SI, UKM DAN TK
24	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			%	0.00%	85,71%	390,304,000 .00	85,71 %	400,800,00 0.00	85,71%	400,800,000 .00	85,71%	1,191,904,00 0	DINAS KOPERA SI, UKM DAN TK
25	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Minat Investasi			Calon Investo r		5 calon Investor	32,329,600. 00	5 calon Inves tor	82,329,360. 00	5 calon Investo r	216,787,000 .00	30 calon Investor	331,445,960	DPM DAN PTSP
26	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kenaikan Realisasi Investasi			%	-85%	10%	2,426,500.00	10%	90,000,000. 00	10%	170,000,000. 00	10%	262,426,500	DPM DAN PTSP
27	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	Pertambaha n jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten		%	0	100%	32,116,920,0 00.00	100 %	391,377,560 .00	100%	742,943,000. 00	12%	33,251,240,5 60	DINAS DAGPER IND DAN ESDM
28	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Fasilitasi Rekomendasi dalam penerbitan izin usaha perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai		%	-	100	25,000,000.0 0	100 %	25,000,000. 00	100%	25,100,000.0 0	100%	75,100,000	DINAS DAGPER IND DAN

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

No	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome Lama	Indikator Kinerja Impact / Outcome Hasil Perbaikan	Keterangan	Satuan Indikat or Kinerja Impact / Outco me	Kondis i Kinerja Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perang kat Daerah Penang gung Jawab
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
							Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			dengan ketentuan												ESDM
Misi 4 : Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa															
	Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas SDM	IPM			Angka	67,65	68.15		68.55		69.06		69.06		
	Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas dan Pemertaan Akses Pendidikan	Indeks Pendidikan			Angka	60,68	63,19		64,3		65,41		65,41		
30	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase keberhasilan siswa dalam mencapai prestasi akademik				100%	100%	695,090,000	100 %	695,090,000	100%	1,050,000,00 0	100%	2,440,180,00 0	DINAS PENDID IKAN
31	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (Prioritas)	Presenatse Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Kualifikasi S1/D4 dan tersertifikasi	Rata-Rata Nilai Perilaku Pegawai Berdasarkan Penilaian Kinerja ASN			55%	-	322,000,000. 00	70%	322,000,000 .00	80%	200,000,000	80%	844,000,000	DINAS PENDID IKAN
	Sasaran 6 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan			Angka	72,57	72,892		73,04		73,17		73,17		

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

No	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome Lama	Indikator Kinerja Impact / Outcome Hasil Perbaikan	Keterang an	Satuan Indikat or Kinerja Impact / Outco me	Kondis i Kinerja Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perang kat Daerah Penang gung Jawab
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
							Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio Dokter per satuan penduduk	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang kompoten		%	6,21	7,0	1,404,000,00 0.00	97%	1,723,877,2 27	97%	1,786,003,5 82	10%	4,913,880,81 0	DINAS KESEHA TAN
		kesehatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada area kritis				100	100	22,387,500	100	150,000,000	100	202,500,000	100	374,887,500	RSUD SINJAI
33	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Berperilaku PHBS			%	22,2 %	100%	28,360,000.0 0	100 indus tri Rt%	27,500,000	110 industri RT	42,491,343	70%	98,351,343	DINAS KESEHA TAN
34	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (khusus BLUD)	cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten sinjai					100%	73.148.227.3 78	100 %	82.102.289. 049	100%	86.408.053.3 44	100%	86.408.053.3 44	R S U D
	Sasaran 7 : Meningkatnya Peran Perempuan dalam pembangunan	IDG			%	IDG : 72.64	IDG : 72.68		IDG : 72.7		IDG : 72.74		IDG : 72.74		
35	PROGRAM PENGARUSUTAMAA	Persentase perempuan yang	Persentase Perangkat		%	72,48%	100%	35,000,000.0	100 %	35,000,000.	100%	35,000,000.0	100%	105,000,000	DINAS P3AP2K

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

No	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome Lama	Indikator Kinerja Impact / Outcome Hasil Perbaikan	Keterang an	Satuan Indikat or Kinerja Impact / Outco me	Kondis i Kinerja Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perang kat Daerah Penang gung Jawab
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
							Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	berada di posisi managerial.	daerah yang menerapka n Perencanaa n dan Penganggar an Responsif Gender (PPRG)					0		00		0			B
36	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Indikator Pemenuhan Hak Anak yang tercapai	Presentase Perempuan dan Anak yang mendapatk an layanan		%	100	60%	30,000,000. 00	70%	30,000,000. 00	80%	31,000,000. 00	100%	91,000,000	DINAS P3AP2K B
37	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kabupaten sinjai yang dilaksanakan	Jumlah keluarga yang mendapatka n advokasi dan in formasi peningkatan kualitas keluarga		%	100	100 KK	25,000,000.0 0	100 KK	25,000,000. 00	100 KK	25,000,000.0 0	100%	75,000,000	DINAS P3AP2K B
	Sasaran 8 : Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dalam kehidupan	Rasio Literasi Alquran	Persentase Penduduk usia 5 - 19 tahun yang melek		%	100	100		100		100		100		

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

No	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome Lama	Indikator Kinerja Impact / Outcome Hasil Perbaikan	Keterang an	Satuan Indikat or Kinerja Impact / Outco me	Kondis i Kinerja Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perang kat Daerah Penang gung Jawab
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
							Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	masyarakat		aksara Al- Quran (Prioritas)												
38	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Meningkatnya Kualitas Mental Spritual dan Keagamaan serta bidang kesra					100	9.121.060.68 0	100	9,896,148,7 60.00	100	8,998,015,09 8.00	100	28,015,224,5 38	BAG. KESRA SETDA
39	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase penurunan penyalahgun aan narkoba dan komplik antar agama		%	100	0%	78,420,100.0 0	0%	180,000,000 .00	1 dokume n	79,048,715.0 0	100%	337,468,815	BADAN KESBAN GPOL
Misi 5 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan koneksivitas antar wilayah															
	Tujuan 5 : Meningkatkan ketersediaan dan daya Saing Infrastruktur Daerah	Indeks wiliamson		Angka			0,181		0,18		0,179		0,179		
	Sasaran 9 : Meningkatnya kualitas dan pemenuhan ketersediaan infrastruktur wilayah	Indeks Layanan Infrastruktur		Angka			90,12		94,19		95,36		96,54		
40	PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN	persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>		%		30.72%	46.16%	75,908,602,2 00.00	52.68 %	87,094,443, 410.00	53.88%	99,700,484,0 00.00	53.88%	262,703,529, 610	DINAS PUPR

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

No	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome Lama	Indikator Kinerja Impact / Outcome Hasil Perbaikan	Keterang an	Satuan Indikat or Kinerja Impact / Outco me	Kondis i Kinerja Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perang kat Daerah Penang gung Jawab
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
							Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		40km/jam)													
41	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) (Prioritas)	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik		%		72.21%	73.56%	20,709,586,0 00.00	74.4 0%	22,606,597, 000.00	75.17%	22,606,597,0 00.00	75.17	65,922,780,0 00	DINAS PUPR
42	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Permukiman Kumuh yang Tertangani Kewenangan Kabupaten/Kota		%		0,122% (100,10 Ha)	0,196% (160,61 Ha)	1,000,000,00 0.00	0,195 % (159, 61 Ha)	1,000,000,0 00.00	0,193% (158,61 Ha)	1,000,000,00 0.00	0,192% (157,61 Ha)	3,000,000,00 0	DINAS PERUM AHAN KAWAS AN PERMU KIMAN DAN PERTAN AHAN
		Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni		%		86.21%	86.23%	1,309,778,50 0.00	0.86	1,160,000,0 00.00	86.31%	1,160,000,00 0.00	86,35%	3,629,778,50 0	DINAS PERUM AHAN KAWAS AN PERMU KIMAN DAN PERTAN AHAN

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

No	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome Lama	Indikator Kinerja Impact / Outcome Hasil Perbaikan	Keterang an	Satuan Indikat or Kinerja Impact / Outco me	Kondis i Kinerja Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perang kat Daerah Penang gung Jawab
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
							Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
43	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU		%	%	0.28%	3.11%	2,000,000,00 0.00	5.93	1,000,000,0 00.00	8.76%	1,000,000,00 0.00	11,58%	4,000,000,00 0	DINAS PERUM AHAN KAWAS AN PERMU KIMAN DAN PERTAN AHAN
44	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Oprator/Teknisi/Ana lisis yang memiliki sertifikat kompetensi			%	9.48%	12.14%	175,107,150. 00	14.81 %	1,344,159,3 50.00	17.47%	1,732,180,00 0.00	17.47%	3,251,446,50 0	DINAS PUPR
45	PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Cakupan Prasarana LLAJ dlm kondisi baik	Jumlah angkutan umum darat	%		80%	299 Unit	841,061,140. 00	299 Unit	2,332,389,1 40.00	299 Unit	754,389,140. 00	95%	3,927,839,42 0	DINAS PERHUB UNGAN
Misi 6 : Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang patuh kepada hukum															
	Tujuan 6 : Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban	Indeks Ketentraman dan Ketertiban		Angka		70 -72		74 - 75		75 -80		75 -80			
	Sasaran 10 : terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3			%	100	100		100		100		100		

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

No	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome Lama	Indikator Kinerja Impact / Outcome Hasil Perbaikan	Keterang an	Satuan Indikat or Kinerja Impact / Outco me	Kondis i Kinerja Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perang kat Daerah Penang gung Jawab
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
							Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	aman dan nyaman yang aman dan nyaman														
46	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Prioritas)	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)		%		100	100%	3,255,273,72 0.00	100 %	3,353,398,9 20.00	100%	3,348,200,00 0.00	100%	9,956,872,64 0	SATPOL. PP DAN DAMKA R
47	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasioanal dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	Presentase Penanganan Konflik	%		100	0%	879,937,300. 00	20%	841,190,900 .00	20%	886,990,877. 00	100%	2,608,119,07 7	BADAN KESBAN GPOL
48	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase penurunan penyalahgun aan narkoba dan komplik antar agama	%		100	0%	78,420,100.0 0	0%	180,000,000 .00	1 dokume n	79,048,715.0 0	100%	337,468,815	BADAN KESBAN GPOL
Misi 7 : Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan															
	Tujuan 7 : Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup secara berkelanjutan	IKLH		Angka	Angka	72,37	79,65		79,77		79,91		79,91		
	Sasaran 11 : Meningkatnya	Indeks Resiko Bencana		Angka	Angka	76	78		79		80		80		

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

No	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome Lama	Indikator Kinerja Impact / Outcome Hasil Perbaikan	Keterang an	Satuan Indikat or Kinerja Impact / Outco me	Kondis i Kinerja Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perang kat Daerah Penang gung Jawab
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
							Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ketangguhan menghadapi bencana														
49	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (Prioritas)	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran (SPM)	Cakupan pelayanan bencana kabakaran kabupaten/k ota		%	100	100%	215,605,100. 00	100 %	154,999,000 .00	100%	180,000,000. 00	100%	550,604,100	SATPOL. PP DAN DAMKA R
50	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (SPM)			%	100	100%	549,960,950. 00	100 %	550,000,000 .00	100%	750,000,000. 00	100%		BPBD
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)			%	100	100		100		100		100		
		Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana			%	100	100		100		100		100		

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

No	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome Lama	Indikator Kinerja Impact / Outcome Hasil Perbaikan	Keterang an	Satuan Indikat or Kinerja Impact / Outco me	Kondis i Kinerja Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perang kat Daerah Penang gung Jawab
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
							Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Sasaran 12 : terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	potensi penurunan Emisi GRK			Ton	0	302,21		351,9 6		375		375		
51	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	prosentase pengelolaan sampah			%	47.60	98%	3,123,857,20 0.00	99%	3,073,493,3 50.00	99%	4,595,787,32 3.00	99%	10,793,137,8 73	DINAS LHK
52	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKLH	Indeks Kualitas Air		Poin	93.13	60.78	198,181,710. 00	61	3,826,668,6 00.00	62	3,710,400,00 0.00	87.5	7,735,250,31 0	DINAS LHK
53	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			%	28.57 %	16.67	59,522,700.0 0	50	66,361,000. 00	100%	66,626,444.0 0	100%	192,510,144	DINAS LHK
54	PROGRAM PENGELOLAAN	Cakupan pengelolaan keanekaragaman			%	0	20%	17,184,796.0	40%	23,900,000.	40%	23,995,600.0	100%	65,080,396	DINAS

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

No	Visi/Misi/Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Impact/Outcome Lama	Indikator Kinerja Impact / Outcome Hasil Perbaikan	Keterang an	Satuan Indikat or Kinerja Impact / Outco me	Kondis i Kinerja Awal (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perang kat Daerah Penang gung Jawab
							2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
							Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	KEANEKARAGAMAN HAYATI	hayati						0		00		0			LHK
55	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Nilai Indeks METT			Poin	73	74	452,637,797. 00	74	504,404,400 .00	74	1,081,526,00 0.00	74	2,038,568,19 7	DINAS LHK

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Restra Perangkat Daerah beserta indikator Kinerja, Pagu Indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Kerangka pendanaan dalam Perubahan RPJMD ini merupakan perspektif rencana penganggaran untuk alokasi belanja langsung program pemerintah daerah, baik program pembangunan daerah maupun program perangkat daerah untuk tiga tahun periode pemerintahan 2018-2023 Kabupaten Sinjai yang akan datang. Memuat hasil perhitungan dan perkiraan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan belanja langsung program pembangunan daerah dan program perangkat daerah. Perhitungan kerangka pendanaan ini diawali dengan proyeksi asumsi makro ekonomi dan sosial daerah, sebagai instrumen-instrumen pokok dalam memproyeksikan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk periode Tiga tahun pembangunan Kabupaten Sinjai yang akan datang.

Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2023
Kabupaten Sinjai

NO.	KAPASITAS RIIL/BELANJA	PROYEKSI (Rp)		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5
	KAPASITAS RIIL KEUANGAN			
5	BELANJA DERAH	1,216,612,214,453	1,297,854,885,097	1,315,064,326,113
5.1	BELANJA OPERASI	820,244,563,707	892,478,639,520	896,294,100,404
5.1.01	Belanja Pegawai	483,754,407,164	551,453,817,359	553,659,632,628
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290,297,577,460	296,458,767,769	297,624,602,840
5.1.03	Belanja Bunga	1,988,092,636	185,000,000	185,000,000
5.1.05	Belanja Hibah	44,141,986,447	44,318,554,392	44,761,739,936

NO.	KAPASITAS RIIL/BELANJA	PROYEKSI (Rp)		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	62,500,000	62,500,000	63,125,000
5.2	BELANJA MODAL	252,148,708,173	253,157,303,004	260,179,093,710
5.2.01	Belanja Tanah	-	7,500,000,000	500,000,000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71,767,306,562	64,554,375,788	72,274,919,546
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	108,314,617,823	108,747,876,294	114,305,572,733
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70,327,616,988	70,608,927,455	71,335,016,730
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,739,166,800	1,746,123,467	1,763,584,702
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12,000,000,000	15,000,000,000	20,000,000,000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12,000,000,000	15,000,000,000	20,000,000,000
5.4	BELANJA TRANSFER	132.218.942.573	137,218,942,573	138,591,131,999
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.523.626.973	2.523.626.973	2,548,863,243
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	129.695.315.600	134,695,315,600	135,995,125,000

7.2 Program Perangkat Daerah

Berdasarkan Kondisi Umum Daerah, Visi dan Misi, Strategi, Arah Kebijakan Keuangan dan Arah Kebijakan Umum yang telah diuraikan di atas , serta guna mencapai sinergitas dan sinkronisasi Kebijakan program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten, maka rumusan program prioritas pembangunan daerah telah diformulasikan menurut **urusan Pemerintahan, wajib dan pilihan** yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian disesuaikan dan dikembangkan guna menjawab tantangan dan kebutuhan daerah yang akan dicapai selama tiga tahun ke depan sebagai berikut :

TABEL 7.2
INDIKASI RENCANA PROGRAM ,PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 - 2023

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
1				URUSAN WAJIB									
1	1			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1	1	1		PENDIDIKAN									
1	1	1		DINAS PENDIDIKAN									
				PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan perkantoran	100%	100%	95%	3,076,393,750	100%	100%	1,243,559,090	Disdik
				PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	82%	201,048,510	100%	100%	120,173,165	Disdik

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13	
1	1	1	15	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berprestasi dalam Pendidikan	100%	100%	87%	727,607,730	100%	82.86	8,477,428,396	Disdik	
				PROGRAM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berprestasi dalam	100%	100%	115%	16,714,220,750	100%	109.75	14,121,708,630	Disdik	
				PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar,Menengah yang berprestasi dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	100%	98.51	1,236,681,990	100%	73.12	1,776,171,000	Disdik	

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13	
				PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru yang memiliki kualifikasi S1,S2,D4 dan tersertifikasi	100%	100%	89.57%	3,299,964,770	100%	55	1,724,282,464	Disdik	
				PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH	APK,,APM dan Dapodikdasmen	100%	100%	100	31,148,440,000	100%	100	41,733,270,414	Disdik	
1	1	2		KESEHATAN										
1	2	2	1	DINAS KESEHATAN										
				PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	cakupan pemenuhan Pelayanan Perkantoran	94,58 %	100%	90,50 %	4,567,973,425	100%	91,07 %	2,638,921,680	DINAS KESEHATAN	
				PROGRAM PELAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	Cakupan pemenuhan pelayanan Perkantoran	80,19 %	100%	98,61	285,738,905			-	DINAS KESEHATAN	

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1					2	3	4		5	6		7	8	13
					PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan Berkelanjutan (Continum Of Care)	91,78 %	80%	89,5 %	4,512,888,260	82%	7,17 %	3,822,531,300	DINAS KESEHATAN
					PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	Semua masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	94,02 %	100%	97%	84,930,427,270	100%	92,86 %	105,055,726,067	DINAS KESEHATAN
					PROGRAM KEFARMASIAN, PERBEKALAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Ketersedian Sumber Daya Kesehatan (SDK) sesuai standar Pelayanan Minimal	95,95 %	100%	91,35 %	13,865,406,800	100%	100%	17,188,319,042	DINAS KESEHATAN
					PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Penanganan dan pencegahan penyakit menular tertangani sesuai standar:	90,50 %	100%	95,07 %	1,165,684,000	100%	100%	4,560,000,000	DINAS KESEHATAN

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
				PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGA N PENYAKIT TIDAK MENULAR	Penanganan dan pencegahan penyakit tidak menular tertangani sesuai standar :	98,96 %	100%	99,65 %	216,048,000			-	DINAS KESEHATAN
				PROGRAM PENGADAAN ,PEMELIHARAAN ,PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA/PRASARA NA PUSKESMAS /PUSTU DAN JARINGANNYA	Cakupan Sarana Prasarana Puskesmas dan Jaringannya	100%			-	100%	100%	111,812,663	DINAS KESEHATAN
1	2	2	2	RSUD									
			1	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran		100%	100%	3,902,105,000	100%	100%	2,730,241,930	RSUD SINJAI

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
			2	PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja		100%	100%	32,190,000	100%	100%	14,200,800	RSUD SINJAI
			19	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD	Quality of Services (GDR, NDR)	GDR (21/1000), NDR (14/1000)	GDR (40/1000), NDR (20/1000)	GDR : 33/1000, NDR : 13/1000	40,000,000,000	GDR (40/1000), NDR (20/1000)	GDR (31/1000), NDR 11/1000	50,638,984,389	RSUD SINJAI
					Quality of Place (BOR, LOS, BTO,TOI)			BOR:83.%,LOS 4 HR, BTO:30 kali,TOI:1hari		BOR (66%), LOS (4HR), BTO (42), TOI (3)	BOR(58.99%),LOS (4HR),BTO(52),TOI(3)	50,638,984,389	
			20	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	% Pelayanan Pasien Miskin yang datang di RS dan Dilayani di RS	100%	100%	100%	30,000,000	100%	0%	0	RSUD SINJAI
			21	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	% Pasien Klinik Berhenti Merokok yang berhenti merokok	0%	6%	9.75%	89,090,000	6%	0%	39,420,000	RSUD SINJAI

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
					% Pasien rawat Jalan dan rawat inap TB yang ditangani dengan Strategi DOTS	100%	100%	100%		100%	100%		
			22	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	% Pemenuhan Kebutuhan makan minum pasien sesuai standar	90%	100%	100%	5,000,000	100%	100%	5,000,000	RSUD SINJAI
			23	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	Persentase Pemenuhan Indikator Lingkungan Sehat dan Lingkungan Sosial	0%	80%	80%	250,000,000	85%	0	0	RSUD SINJAI
			24	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita HIV AIDS	100%	100%	100%	151,025,000	100%	100%	99,763,500	RSUD SINJAI

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
			25	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Pemenuhan Standar Pelayanan Sesuai Akreditasi RS	72%	82%	86.40%	284,910,000	82%	83,29%	131,021,300	RSUD SINJAI
					Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100%	100%	100%		100%	100%		
			26	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA RUMH SAKIT/ RS JIWA/ RS PARU-PARU/ RS MATA	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS Sesuai Standar RS Kelas B	67%	65%	59%	37,165,673,000	66%	61%	43,013,623,000	RSUD SINJAI
			32	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	Kejadian Kematian Ibu karena Persalinan : Pre-eklampsia	2.42%	≤30%	3.64%	25,480,000	≤30%	5%	9,140,000	RSUD SINJAI

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1					2	3	4		5	6		7	8	13
						Kejadian Kematian Ibu Karena Persalinan : Perdarahan	3.30%	≤1%	1.68%		≤1%	2%		
						Kejadian Kematian Ibu karena Persalinan : Sepsis	0%	0.10%	0%		0.10%	0%		
1	2	3			PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	2	3	1		DINAS PUPR									
			1		PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	1,339,958,485	100%	100%	787,993,004	PUPR
			2		PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	100%	339,269,440	100%	100%	294,976,100	PUPR

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
			1 5	PROGRAM KECIPTAKARYAAN	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	71.78%	100%	74.06%	32,709,003,720	-	-	20,292,431,200	PUPR
					Persentase rumah tinggal yang bersanitasi	87.97%	100%	88.46%		-	-		PUPR
					Capaian Bangunan Gedung Negara yang ditangani	100%	100%	100%		100%	100%		PUPR
			1 6	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	44.92%	45.52%	30.72%	235,409,053,995	50.30%	43.31%	217,265,257,346	PUPR
					Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	91.44%	91.72%	91.44%		91.79%	91.79%		PUPR
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	71.26%	7.01%	72.21%	10,125,659,975	72.76%	72.81%	14,671,914,215	PUPR

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
				PROGRAM PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan	-	-	-	-	100%	75.64%	13,877,211,829	PUPR
				PROGRAM PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	-	-	-	-	100%	88.50%	2,037,609,100	PUPR
					Persentase Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/ Saluran Pembuangan Air	-	-	-	-	0.60%	0.38%		PUPR
					Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	-	-	-	-	84.00%	81.43%		PUPR

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1					2	3	4		5	6		7	8	13
					PROGRAM PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RTRW	4.34	4.54	100%	220,212,950	4.76	100%	121,133,200	PUPR
						Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB	0,03 Ha	0,04 Ha	29,37 Ha		0,05 Ha	29,37 Ha		PUPR
					PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK	0%	100%	62.22%	211,374,435	100%	40.00%	15,255,300	PUPR
1	2	4			PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	2	4	1		DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN									

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1					2	3	4		5	6		7	8	13
					PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	CAKUPAN PEMENUHAN PELAYANAN PERKANTORAN	100%	100%	100%	1,199,212,746	100%	100%	531,734,724	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
					PROGRAM PELAPORAN KINERJA	CAKUPAN PEMENUHAN PELAPORAN KINERJA	100%	100%	100%	119,104,339	100%	100%	89,366,000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
					PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	CAKUPAN KETERSEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI	88,84%	88,87%	86,62%	1,168,580,478	88,89%	86,21%	2,637,372,700	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1					2	3	4		5	6		7	8	13
					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Permukiman Kumuh	59,89 Ha	118,30 Ha	101,90 Ha	1,081,653,297	104,40 Ha	101,10 Ha	140,074,600	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
					PROGRAM PERTANAHAN	LUAS LAHAN BERSERTIFIKAT MILIK PEMERINTAH DAERAH	-	3,5 HA	14,78 Ha	252,699,140	3,5 Ha	14,5023 Ha	3,300,975,976	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	2	5			KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	2	5	1		SATPOL PP DAN DAMKAR									
					Program Pelayanan Perkantoran	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	840,380,802	100%	100%	629,541,531	SATPOL.PP DAN DAMKAR

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1					2	3	4		5	6		7	8	13
					Program Pelaporan Kinerja	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	99,46%	-	-	-	100%	100%	8,344,700	SATPOL.PP DAN DAMKAR
					Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan keindahan (K3)	100%	100%	100%	3,383,700,000	100%	100%	3,086,700,000	SATPOL.PP DAN DAMKAR
					Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Akibat dari Penegakan Perda dan Perkada.	75%	-	-	-	100%	100%	26,769,000	SATPOL.PP DAN DAMKAR
					Program Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran.	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran.	100%	100%	100%	1,070,240,000	100%	100%	35,606,750	SATPOL.PP DAN DAMKAR

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab	
							Tahun 2019			Tahun 2020				
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)		
1	2	5	2	2	3	4		5	6		7	8	13	
1	2	5	2	2	BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH									
					PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	Rp462,696,798	100%	97,34 %	Rp272,139,825	BPBD
					PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	100%	Rp21,222,088	100%	99,23 %	Rp6,662,700	BPBD
					PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN DALAM PENANGGULANGA N BENCANA	Persentase Tingkat kerentanan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko Bencana	100%	100%	100%	Rp20,000,000	100%	97,88 %	Rp142,074,300	BPBD
					PROGRAM LOGISTIK DAN TANGGAP DARURAT BENCANA	Cakupan Layanan Logistik dan Tanggap Darurat	100%	100%	100%	Rp514,964,028	100%	98,21 %	Rp338,062,600	BPBD

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
				PROGRAM REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCA BENCANA	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100%	100%	100%	Rp11,000,000	100%	100%	Rp4,299,000	BPBD
1	1	6		SOSIAL									
1	1	6	1	DINAS SOSIAL									
				PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	1,372,286,348	100%	100%	689,286,691	Dinas Sosial
				PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	100%	90,830,323	100%	100%	82,136,500	Dinas Sosial
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM Bidang Sosial)	100%	100%	100%	739,188,646	100%	100%	135,391,600	Dinas Sosial
				PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL	Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM Bidang Sosial)	100%	100%	100%	236,879,210	100%	100%	171,889,300	Dinas Sosial

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1					2	3	4		5	6		7	8	13
					PROGRAM JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial	8.724 KK	8.724 KK	8.724 KK	209,840,430	8.724 KK dan 50 Orang	10.201 KK	84,259,600	Dinas Sosial
					PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Dilibatkan dalam Pemberdayaan masyarakat	300 Org	300 Org	300 Org	535,289,656	500 Org	0	264,152,116	Dinas Sosial
1	2				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
1	2	1			PERHUBUNGAN									
1	2	1	1		DINAS PERHUBUNGAN									
					PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	942,537,500	100%	100%	1,243,559,090	DINAS PERHUBUNGAN
					PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	100%	60,959,000	100%	100%	120,173,165	DINAS PERHUBUNGAN

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
				PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	Jumlah ketersediaan angkutan umum darat dan laut	259 unit AUD, 21 AUL	269 unit AUD, 22 AUL	292 unit AUD, 2 AUL	1,013,716,300	279 unit AUD, 23 AUL	297 AUD unit,23 AUL	1,546,128,700	DINAS PERHUBUNG AN
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas	SOT RLL,13,53 1 MJ, 5 14 Guad ril, 5 TL, 28 RPPJ 552	1000 m marka jalan	1000 m marka jalan	389,265,300	1000 m marka jalan	1000 m marka jalan	1,137,000,000	DINAS PERHUBUNG AN
				PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	% kendaraan umum yang laik operasi	1500 KBW U&6 Alat Uji	1550 KBW U & 11 Alat Uji	1550 KBW U &6 Alat Uji	120,893,000	1600 KBW U & 11 Alat Uji	1600 KBW U & 11 Alat Uji	1,260,000,000	DINAS PERHUBUNG AN
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	Jumlah ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	7 halte bus, 2 rambu suar, 17 dermaga	0	0	0	2 halte bus, 1 rambu suar, 1 dermaga, 50 Tambatan Perahu	0	715,000,000	DINAS PERHUBUNG AN
1	2			LINGKUNGAN HIDUP									
1	2	2	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN									

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
				PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	1,102,284,325	100%	100%	455,370,150	DLHK
				PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	100%	7,529,320	100%	100%	41,464,100	DLHK
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN LIMBAH B3	Prosentase Pengelolaan Sampah	52.9	100%	47.6	4,933	97%	96.97	1,847,963,337	DLHK
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan hidup Daerah	63.05	67	72.37	317,413,400	68	70.08	112,130,050	DLHK
				PROGRAM PENATAAN DAN PENAATAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan Usaha dan/atau Kegiatan yang Taat Terhadap Pelaksanaan Dokumen Lingkungan	3,45	10%	3.57%	1,037,514,420	20%	28.57%	141,669,200	DLHK

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN TAMAN HUTAN RAYA	Prosentase Pelaksanaan RPJP Tahura	-	25%	22.95%	506,431,560	40%	28%	727,317,900	DLHK
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pemenuhan parameter pengujian kualitas lingkungan	-	7 parameter	7 parameter	224,502,000	14 parameter	7 parameter	68,068,400	DLHK
1	2	4		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL									
1	2	4	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL									
				PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan pemenuhan layanan perkantoran	100%	100%	100%	1041739200	100%	100%	674941387	Disdukcapil

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
				PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan pemenuhan pelaporan kinerja	100%	100%	100%	19414800	100%	100%	12794900	Disdukcapil
				PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prosentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99.69%	99.42%	98.76%	46130600	99.69%	99,52%	89467000	Disdukcapil
					Prosentase Penerbitan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	99.31%	99.30%	99.64%	90907500	99.35%	100.00%	21574500	Disdukcapil
					Rasio Pasangan Berakta Nikah	0.10%	0.11%	0,29%	0	0.11%	0,26%	0	Disdukcapil
					Prosentase Penerbitan Akta Kematian	0%	98%	100%	0	99%	100%	0	Disdukcapil
					Prosentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	63.05%	65%	68.31%	33146000	80%	75%	1502500	Disdukcapil

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13	
				PROGRAM PENERAPAN KAIDAH GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	77.95	77.96	0	80.51	81,88	0	Disdukcapil	
					Prosentase pemanfaatan data kependudukan organisasi perangkat daerah	0%	0%	0%	0	8%	26%	0	Disdukcapil	
1	2	7		TENAGA KERJA										
1	2	8	1	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA										

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KESEMPATAN KERJA, PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAA N	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	564 ORANG	412org	514 org	Rp366,937,148	453 org	238 org	277,852,919	dinas koperasi UKM dan Tenaga Kerja
1	2	8		KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
1	2	8	1	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA									
				PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran	100%	100%	100%	Rp947,596,840	100%	100%	377,048,725	dinas koperasi UKM dan Tenaga Kerja
				PROGRAM PELAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	Cakupan pemenuhan pelaporan kinerja	100%	100%	100%	Rp61,303,600	100%	100%	27,305,700	dinas koperasi UKM dan Tenaga Kerja

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	JUMLAH WIRAUSAHA BARU	15200 UMK	25900 UMK	27767 UMK	Rp214,281,054	26300 UMK	30566 UMK	212,287,700	dinas koperasi UKM dan Tenaga Kerja
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	Jumlah koperasi yang aktif	112 kop	87kop	86 kop	Rp311,977,158	89 kop	94 kop	344,627,100	dinas koperasi UKM dan Tenaga Kerja
1	2	9		PENANAMAN MODAL									
1	2	9	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU									
				PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	1,124,206,879	100%	100%	507,622,771	DPMPTSP

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
				PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	100%	10,775,000	100%	100%	563,400	DPMPTSP
				PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Jumlah Minat Investasi	PMDN = 304	10 calon Investor	9 calon Investor	153,843,000	10 calon Investor	5 calon Investor	34,670,000	DPMPTSP
				PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	Jumlah Realisasi Investasi	6,007,662,08 7,394	1,312,938,813 ,787	1,373,566,738 ,719	70,130,000	1,339,197,590. 63	1,371,308,078, 430	15,040,000	DPMPTSP
				PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK	% Pengajuan Perizinan dan Non Perizinan yang ditindaklanjuti	30586 Izin	100%	100%	529,967,828	100%	100%	228,637,500	DPMPTSP
1	2	1	1	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1	2	1	1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA									

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13	
				PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	1,062,654,504	100%	100%	682,744,900	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
				PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	100%	61,147,056	100%	100%	104,047,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
				PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN KEPEMUDAAN	Kota Layak Pemuda	Jumlah pemuda berprestasi tingkat provinsi/nasional	1 Ranperda Kepemudaan	Penghargaan kota layak pemuda, 1 Orang lolos seleksi paskibraka Tingkat Nasional dan 2 orang tingkat provinsi	692,935,905	1 orang lolos seleksi pemuda pelopor tingkat provinsi	100%	21,047,300	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBUDAYAAN OLAHRAGA	Program Pembinaan dan Pembudayaan Olahraga	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi/Nasional	10 Orang Tingkat Provinsi	6 Org Tingkat Nasional , 8 Orang Tingkat Provinsi	128,095,374	-	100%	31,387,800	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1					2	3	4		5	6		7	8	13
					PROGRAM SARANA PRA SARANA PEMUDA DAN OLAHRAGA	Meningkatnya sarana dan prasarana keolahragaan yang berkualitas baik	Jumlah sarana olahraga yang terkelola dengan baik	2 sarana olahraga	2 sarana olahraga	98,766,150	2 sarana olahraga	100%	146,841,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	2		1	2	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	2		1	2	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
					PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran								
					PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja								
					PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN	Persentase LSM Aktif (%)	18.75%	18.75%	18.75%	57,888,315	18.75%	11.25%	0	DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1					2	3	4		5	6		7	8	13
						Persentase LPM Berprestasi (%)	3,75%,	3,75%,	3,75%,		3,75%,	3.75%		DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA
						Rata-rata Jumlah kelompok binaan LPM (Kelompok)	1	1	1		1	1		DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA
					PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (%)	25.11%	29.55%	29.55%	12,098,875	34.54%	1.76%	0	DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA
					PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (Kelompok)	65.1	65.1	70.14	611,549,500	70.14	70.14	354,918,276	DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA
						PKK Aktif (%)	100%	100%	100%		100%	100%		DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1					2	3	4		5	6		7	8	13
						Posyandu Aktif (%)	100%	100%	100%		100%	100%		DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA
					PROGRAM PENDORONGAN SWADAYA MASYARAKAT DALAM MENURUNKAN AKI, AKB, PERBAIKAN GIZI BALITA, DAN IMUNISASI	Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi, perbaikan Gizi balita dan Cakupan Imunisasi		AKI<6/4050 Kelahiran Hidup, AKB<5 /1000 Kelahiran Hidup, Stunting 43%, IDL 92%	AKI<6/4050 Kelahiran Hidup, AKB<5 /1000 Kelahiran Hidup, Stunting 43%, IDL 92%	170,883,000	-	-		DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA
					PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan Aktif	100%	100%	100%	49,379,630	100%	100	40,157,400	DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA
					PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)	Jumlah Posyantek Aktif	9	9	9	28,852,425	-	-		DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13	
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	67	67	67	231,692,690	67	67	193,322,050	DINAS PEMBERDAY AAN MASYARAKA T DAN DESA	
1	2	1	5	PERPUSTAKAAN										
1	2	1	5	1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN									
					PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	518,280,606	100%	100%	355,283,052	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	82%	100%	100%	11,120,000	100%	100%	10,357,800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	Cakupan SKPD yang menerapkan Sistem Administrasi Kearsipan	78.79%	100	92.04%	36,613,000	100%	78%	13,712,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1					2	3	4		5	6		7	8	13
					PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP	Persentase Penyelamatan dan Pelestarian Dok/Arsip yang terpenuhi	78.00%	100	56,25%	42,371,550	100%	97%	9,168,400	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	80.15%	100	100.00%	444,446,440	100%	72%	121,952,850	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1	2	1	7		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	2	1	7	1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN									
					PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	173,200,000	100%	100%	577,234,337	DKIP
					PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	100%	61,700,946	100%	100%	48,140,060	DKIP

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1					2	3	4		5	6		7	8	13
					PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DATA INFORMASI STATISTIK SERTA KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral dan layanan informasi publik	100%	100%	100%	1,532,401,298	100%	100%	1,949,230,316	DKIP
					PROGRAM PENGEMBANGAN TATA KELOLA E- GOVERNMENT DAN LAYANAN PUBLIK	Cakupan ketersediaan akses internet, penyelenggaraan e-government, pemanfaatan website, smart city, dan tersedianya data center di Kabupaten Sinjai	100%	100%	100%	2,121,299,194	100%	100%	946,696,920	DKIP

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1					2	3	4		5	6		7	8	13
					PROGRAM PERSANDIAN, KEAMANAN DATA DAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI	Persentase SKPD yang memanfaatkan persandian serta pengawasan dan pengendalian layanan telekomunikasi	100%	100%	100%	178,581,404	100%	100%	91,297,600	DKIP
1	2	1	8		PANGAN									
1	2	1	8	1	DINAS KETAHANAN PANGAN									
					PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	424,354,354	100%	100%	294,937,676	DKP
					PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	100%	27,233,650.00	100%	100%	29,033,800	DKP
					PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	Cakupan Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan	100%	100%	100%	515,889,949	100%	100%	117,176,500	DKP

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab	
							Tahun 2019			Tahun 2020				
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)		
1				2	3	4		5	6		7	8	13	
1	2	1	9	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1	2	1	9	1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB									
					PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	530,951,115	100%	100%	476,907,600	DP3AP2KB
					PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	100%	48,409,940	100%	100%	43,521,600	DP3AP2KB

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KELUARGA SERTA INFORMASI DATA GENDER	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan Kelembagaan Gender, PPRG dan Data Gender	21%	24%	24%	98,939,780	33%	33%	72,160,650	DP3AP2KB
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK	Persentase Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan	58%	61%	61%	131,960,100	65%	65%	108,596,650	DP3AP2KB
1	2		20	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA									
1	2		191	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB									

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
				PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	Jumlah Akseptor Baru	4500	4500 Akseptor Baru	4746	1,464,244,920	4600 Akseptor Baru	4180	4,273,083,500	DP3AP2KB
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN	Jumlah lembaga yang menintegrasikan program KKBPK	6 OPD, 9 Kec, 13 Desa/Kel	6 OPD, 9 Kec, 13 Desa/Kel	100%	2,600,234,145	-	-	-	DP3AP2KB
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Jumlah Akseptor Baru	-	-	-	-	71,6 %	78,41 %	4,315,101,090	DP3AP2KB
2				URUSAN PILIHAN									
2	1			URUSAN PILIHAN									
2	1	1		PERTANIAN									
2	1	1	1	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN									

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
				PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	1,437,830,795	100%	100%	880,761,000	
				PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	100%	98,850,190	100%	100%	95,164,000	
				Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Serta Nilai Tambah Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatkan Produksi bahan Pangan Utama dan hortikultura	Padi : 117,351 (Ton GKG)	117,351	117,351	590,504,145	119,698	105,383	434,590,700	DINAS TPHP
						Jagung : 16,000 Ton (PPK)	16,480	18,326		16,974	20,815		
						Hortikultura Sayuran : 2,168 Ton SS	2,168	2,168		2,276	3,593		
						Hortikultura Buah : 9,944 BS	9,944	9,944		10,441	10,848		
				Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Serta Nilai Tambah Tanaman	Meningkatkan Produksi Tanaman Perkebunan Unggulan	Cengkeh (Ton) : 964	964	964	1,210,205,750	1,012	870	479,232,200	DINAS TPHP
						Kopi (Ton) : 2107	2,107	2,107		2,212	1,847		

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
				Perkebunan		Lada (Ton) : 709	709	709		744	833		
						Kakao (Ton) : 270	270	270		284	278		
				Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian	Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Pertanian dan kinerja kelembagaan petani	Pengelolaan Air : 1,000 Ha	1,000 Ha	1,000	11,105,746,012	1,000 Ha	1,450	2,138,013,600	DINAS TPHP
						Pengelolaan Lahan : 20 KM	20 KM	20		20	21.6		
						Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian : 50 Unit	50 unit	50		50	80		
						Jumlah Kelompok tani yang meningkat kelas Kemampuann ya : 100 KT	240	240		240	140		

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1					2	3	4		5	6		7	8	13
							Jumlah kelompok Tani yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP)/ Badan Usaha Milik Petani (BUMP) : 1 Unit	20	20		20	0		
2	1	1	2		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN									
					PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	749,462,650	100%	100%	420,146,786	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KAB. SINJAI
					PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	100%	44,795,800	100%	100%	27,879,800	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KAB. SINJAI

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1					2	3	4		5	6		7	8	13
					Program Peningkatan Produksi dan Pengolahan Hasil Pernakan	Peningkatan Populasi Ternak Sapi Potong	2.50%	3%	3%	2,575,331,200	3%	6,08%	540,432,350	DINAS PETERNAKA N DAN KESEHATAN HEWAN KAB. SINJAI
						Peningkatan Jumlah Kelompok Binaan Pengolahan Pernakan	2 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok		2 Kelompok	2 Kelompok		DINAS PETERNAKA N DAN KESEHATAN HEWAN KAB. SINJAI
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Prosentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan	80%	80%	100%	2,060,170,808	85%	107,4%	308,681,464	DINAS PETERNAKA N DAN KESEHATAN HEWAN KAB. SINJAI
					Program Peningkatan Pemasaran Teknologi dan Usaha Hasil Pernakan	Peningkatan Promosi Produk Unggulan Pernakan	4 Kali	6 Kali	6 Kali	495,999,950	6 Kali	1 Kali	135,836,400	DINAS PETERNAKA N DAN KESEHATAN HEWAN KAB. SINJAI
						Peningkatan Jumlah Kelompok Pernak yang memanfaatkan	-	4 Kelompok	4 Kelompok		4 Kelompok	6 Kelompok		DINAS PETERNAKA N DAN KESEHATAN HEWAN KAB.

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1					2	3	4		5	6		7	8	13
						Teknologi								SINJAI
2	1	1			ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
2	1	1	1		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM									
					PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	1,807,794,823	100%	100%	721,506,454	Dinas Perdagangan Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral
					PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	100%	49,051,040	100%	100%	41,516,500	Dinas Perdagangan Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13	
				PROGRAM PENEGELOLAAN EBTKE DAN PANAS BUMI	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemanfaatan EBT berbasis pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	453,829,698	100%	100%	45,642,500	Dinas Perdagangan Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral	
				PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Terlaksananya Pembinaan Pelaku Usaha, Sosialisasi Perlindungan Konsumen, Persentase alat UTTP yang memenuhi Standasrisasi Ketepatan UTTP.	50%	95%	95%	1,481,792,119	95%	95%	72,822,346	Dinas Perdagangan Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral	

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1					2	3	4		5	6		7	8	13
					PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Meningkatnya nilai perdagangan, Jumlah sarana dan prasarana perdagangan yang direvatalisasi, Cakupan Bina Kelompok/Peda gang Usaha Informal	1,093,297,00 0	1213297000 Rupiah	1213297000 Rupiah	5,891,913,500	1273297000 Rupiah	1273297000 Rupiah	419,645,300	Dinas Perdagangan Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral
					PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya nilai produksi dari sektor industri daerah; Jumlah Pertumbuhan industri; Bina Kelompok Binaan.	468,293,043	498293000 Rupiah	498293000 Rupiah	3,224,383,820	513293000 Rupiah	513293000 Rupiah	892,743,900	Dinas Perdagangan Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral
					PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSI	Jumlah Sentra- sentra/IKM Industri Baru	5	2 Kelompok	2 Kelompok	150,000,000	2 Kelompok	2 Kelompok	41,250,000	Dinas Perdagangan Perindustrian Energi dan Sumber Daya Mineral

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
2	1	4		PARIWISATA									
2	1	4	1	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN									
				PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran	100%	100%	100%	580,901,100	100%	100%	585,267,695	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N
				PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan pelaporan kinerja	100%	100%	100%	72,182,000	100%	100%	51,171,800	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N
				PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun/dikem bangkan	5 paket	5 paket	6 paket	4,453,151,400	5 paket	6 paket	3,439,918,680	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN SUMBER DAYA PARIWISATA	Terwujudnya pengembangan kemitraan dan sumber daya pariwisata	4 kali	4 kali	4 kali	521,736,000	-	-	-	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13	
				PROGRAM PENGEBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	39,324	88,836	104,451	295,662,500	93,277	134,516	225,550,425	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N	
				PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA	Jumlah Kegiatan Budaya Yang Terpelihara	3 event	3 event	3 event	299,540,000	1 event	1 event	127,060,300	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAA N	
2	1	5		KELAUTAN DAN PERIKANAN										
2	1	5	1	DINAS PERIKANAN										
				PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran	100%	100%	100%	778,921,209	100%	100%	416,383,825	DINAS PERIKANAN	
				PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan pelaporan kinerja	100%	100%	100%	67,142,500	100%	100%	29,441,400	DINAS PERIKANAN	
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP, PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL	Volume dan nilai produksi Perikanan Tangkap	84 unit	84 unit	84 unit	1,470,061,750	127 unit	127 unit	168,122,500	DINAS PERIKANAN	

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13	
				PROGRAM PENGELOLAAN PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Volume dan nilai produksi Perikanan Budidaya	39 Paket	39 Paket	39 Paket	915,546,250	25 Paket	25 Paket	66,900,000	DINAS PERIKANAN	
				PROGRAM PENGELOLAAN HASIL DAN PEMASARAN PRODUK PERIKANAN	Volume pemasaran produk perikanan	3 kali	3 Kali	3 kali	76,382,998	3 kali	1 kali	10,000,000	DINAS PERIKANAN	
3				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
3	1			URUSAN PILIHAN										
3	1	1		PERENCANAAN										
3	1	1	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										
3	1	1	1	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	1,180,494,021	100%	100%	756,324,166	Bappeda	

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
3	1	1	1	PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	100%	115,335,779	100%	100%	61,746,600	Bappeda
3	1	1	1	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Ketersediaan RPJPD dan RPJMD yang berbasis Perda, RKPD yang berbasis Perbup yang sesuai Kalender Perencanaan	100%	100%	100%	4,129,170,200	100%	100%	985,596,234	Bappeda
3	1	2		SEKRETARIAT DAERAH									
3	1	2	1	SEKRETARIAT DAERAH									
				PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	16,450,655,539	100%	100%	7,908,826,802	Sekretariat daerah
				PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	100%	1,134,905,832	100%	100%	465,545,413	Sekretariat daerah

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANG ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	Persentase Pemenuhan SAKIP	100%	-	-	-	100%	100%	408,143,390	
				PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISA JABATAN	% OPD yang memenuhi ketepatan standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan	100%	100%	100%	230,350,528			-	Sekretariat daerah
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANG ORGANISASI DAN TATA LAK-SANA	Persentase Pemenuhan SAKIP Persentase Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Persentase kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran	100%	-	-	-	100%, 76,39 %, 85 %	100%; - 100%; 100%	43,749,530	Sekretariat daerah

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
				PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	% OPD yang memenuhi capaian area reformasi birokrasi	100%	-	-	-	100%	100%	75,731,193	Sekretariat daerah
				PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH	Cakupan pemenuhan pelayanan kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100%	100%	100%	3,315,711,716	100%	100%	2,592,560,612	Sekretariat daerah
				PROGRAM PENINGKATAN BIDANG MENTAL SPRITUAL, SOSIAL KEMASYARAKATAN, DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Kualitas Mental Spritual dan Keagamaan serta Bidang Kesra	100%	100%	100%	6,574,554,079	100%	100%	6,995,084,200	Sekretariat daerah
				PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA	% Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	100%	100%	100%	2,802,526,650	-		-	Sekretariat daerah

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN	Persentase capaian pelaksanaan laporan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	1,524,696,166	-	-	-	Sekretariat daerah
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANG PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan koordinasi administratif bidang pemerintahan umum	100%	-	-	-	100%	100%	765,881,992	Sekretariat daerah

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1					2	3	4		5	6		7	8	13
					PROGRAM KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Terwujudnya Pelaksanaan Prog/Kegiatan Pembangunan di Daerah Kabupaten Lebih Efisien, Efektif, dan Berkualitas	100%	100%	100%	1,054,415,140	-		-	Sekretariat daerah
					PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANG PEMBANGUNAN	Cakupan sistem monitoring evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan	100%	-	-	-	100%	100%	326,017,143	Sekretariat daerah
					PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN KEBIJAKAN KDH	Jumlah Produk Hukum Daerah; Persentase jumlah temuan yang tertindak lanjut		Perda 12, Perbup 40, SK 830	Perda 32, Perbup 58, SK 1013	983,908,043	-		-	Sekretariat daerah

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANG HUKUM DAN HAM	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan koordinasi administratif bidang Hukum dan HAM	100%	-	-	-	Perda 8; Perbup 45, SK 850	Perda 4; Perbup 62; SK 875	543,364,321	Sekretariat daerah
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Persentase capaian pelaksanaan laporan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	215,677,000	-	-	-	Sekretariat daerah

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13	
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANGPEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan koordinasi administratif bidang pemerintahan umum	100%	-	-	-	100%	100%	175,114,868	Sekretariat daerah	
				PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI PEREKONOMIAN	Terwujudnya Akselerasi Program bidang Perekonomian	100%	100%	100%	816,227,073				Sekretariat daerah	
				PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANG PEREKONOMIAN	Persentase penyelenggaraan koordinasi administrasi yang dihasilkan ; Jumlah rumusan kebijakan bidang ekonomi yang dihasilkan	100%	-	-	-	100% ; 1 Perda; 6 Perbup / Pedum / Juklak / Juknis	100% ; 1 Perbup	319,167,026	Sekretariat daerah	

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN	Persentase capaian pelaksanaan laporan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	61,630,719				Sekretariat daerah
				PROGRAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI ADMINISTRATIF BIDANG PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan koordinasi administratif bidang pemerintahan umum	100%	-	-	-	100%	100%	28,101,100	Sekretariat daerah

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
				PROGRAM PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Terwujudnya pengadaan barang/jasa pemerintah yang terpadu efektif dan efesien serta terjaminnya kesempatan, akses dan hak bagi penyedia barang/jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat	100%	100%	100%	464,313,864	-	-	-	Sekretariat daerah

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1					2	3	4		5	6		7	8	13
					PROGRAM PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Terwujudnya pengadaan barang/jasa pemerintah yang terpadu efektif dan efisien serta terjaminnya kesempatan, akses dan hak bagi penyedia barang/jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat	100%	-	-	-	100%	100%	368,068,017	Sekretariat daerah
3	1	3			SEKRETARIAT DPRD									
3	1	3	1		SEKRETARIAT DPRD									
					PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran	100	100	92.74	9,410,227,000	100	93.25	6,481,102,350	Set DPRD
					PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan kineria	100	100	98.79	507,839,000	100	99.51	345,383,200	Set DPRD

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13	
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Terintegrasinya program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran de dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	100	100	79.58	5,081,940,003	100	98.97	2,423,514,450	Set DPRD	
3	1	4		KEUANGAN										
3	1	4	1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					1,444,478,130			756,004,095		
				PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	1,367,349,650	100%	100%	705,771,495	BKAD	
				PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	100%	77,128,480	100%	100%	50,232,600	BKAD	

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13	
				PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	3,555,521,838	Tepat Waktu	Tepat Waktu	1,962,018,155	BKAD	
					Ketepatan Waktu Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan,									
					Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan dan Aset Daerah Sesuai									
					Peraturan Perundang - undangan									
3	1	4	3	BADAN PENDAPATAN DAERAH										
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	903,343,566	100%	100%	573,801,918	Bapenda	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	253,066,730	100%	100%	90,647,460	Bapenda	

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya SDM Aparatur yang mengerti tupoksinya	100%	100%	100%	24,500,000	100%	100%	-	Bapenda	
				Program Peningkatan Pengembangan Sisem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Lakip, Lap Keuangan dan Dokumen perencanaan lainnya	100%	100%	100%	73,219,800	100%	100%	29,701,700	Bapenda	
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	100%	100%	100%	1,851,906,000	100%	100%	1,200,691,950	Bapenda	
3	1	5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
3	1	5	1	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH										
3	1	5	1	Program pelayanan perkantoran	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran	100%	100%	100%	466,182,179	100%	100%	210,112,950	BALITBANGD A	

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1					2	3	4		5	6		7	8	13
3	1	5	1		Program pelaporan kinerja	Cakupan pemenuhan pelaporan kinerja	100%	100%	100%	57,278,472	100%	100%	27,273,000	BALITBANGD A
3	1	5	1		Program peningkatan kapasitas kelembagaan litbang daerah	Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan litbang daerah	100%	100%	100%	179,904,124	0%	0%	27,659,600	BALITBANGD A
3	1	5	1		Program peningkatan penelitian dan pengembangan sosial, ekonomi dan pemerintahan	Persentase rekomendasi kebijakan hasil kelitbangan bidang sosial, ekonomi, pemerintahan,	100%	50%	50%	345,589,430	50%	50%	133,950,200	BALITBANGD A
3	1	5	1		Program peningkatan penelitian dan pengembangan pembangunan, sumber daya alam dan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi kebijakan hHasil kelitbangan bidang pembangunan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup	100%	50%	50%	247,409,950	50%	50%	95,216,000	BALITBANGD A

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1					2	3	4		5	6		7	8	13
3	1	5	1		Program pengembangan sistem inovasi daerah	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam pengembangan Inovasi	100%	90%	90%	73,256,345	48%	31%	160,223,500	BALITBANGDA
3	1	6			KECAMATAN									
3	1	6	1		KECAMATAN SINJAI UTARA									
					PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	511,653,850	100%	100%	337,535,613	KEC.SINJAI UTARA
					PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	97%	13,232,640	100%	100%	17,300,000	KEC.SINJAI UTARA
					PROGRAM KOORDINASI PEMERINTAHAN KELURAHAN	Cakupan pemenuhan pelaksanaan koordinasi pemerintahan kelurahan	100%	100%	97%	485,941,880	100%	100%	426,074,020	KEC.SINJAI UTARA

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
				PROGRAM PELAYANAN DAN KOORDINASI PEMERINTAHAN KECAMATAN	Cakupan pemenuhan pelayanan dan koordinasi pemerintahan kecamatan Sinjai Utara	100%	100%	100%	197,552,930	100%	100%	141,633,900	KEC.SINJAI UTARA
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Cakupan pemenuhan pelaksanaan peningkatan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat	100%	100%	98%	2,220,828,000	100%	100%	2,976,286,527	KEC.SINJAI UTARA
3	1	6	2	KECAMATAN SINJAI SELATAN									
				PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	91%	386,467,723	100%	98%	221,086,174	KEC. SINJAI SELATAN
				PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	99%	10,051,282	100%	100%	5,280,000	KEC. SINJAI SELATAN

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
				PROGRAM KOORDINASI PEMERINTAHAN KELURAHAN	Cakupan pemenuhan pelaksanaan koordinasi pemerintahan kelurahan	100%	100%	99%	82,348,789	100%	99%	85,415,000	KEC. SINJAI SELATAN
				PROGRAM PELAYANAN DAN KOORDINASI PEMERINTAHAN KECAMATAN	Cakupan pemenuhan pelayanan dan koordinasi pemerintahan kecamatan Sinjai Selatan	100%	100%	98%	185,848,206	100%	99%	77,802,500	KEC. SINJAI SELATAN
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Cakupan pemenuhan pelaksanaan peningkatan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat	100%	100%	96%	370,138,000	100%	100%	587,529,400	KEC. SINJAI SELATAN
3	1	6	3	KECAMATAN SINJAI BARAT									
				PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	94%	388,031,000	100%	95%	179,626,800	KEC.SINJAI BARAT

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
				PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	100%	12,512,110	100%	99%	14,024,200	KEC.SINJAI BARAT
				PROGRAM KOORDINASI PEMERINTAHAN KELURAHAN	Cakupan pemenuhan pelaksanaan koordinasi pemerintahan kelurahan	100%	100%	100%	144,137,700	100%	100%	150,136,100	KEC.SINJAI BARAT
				PROGRAM PELAYANAN DAN KOORDINASI PEMERINTAHAN KECAMATAN	Cakupan pemenuhan pelayanan dan koordinasi pemerintahan kecamatan Sinjai Utara	100%	100%	100%	175,282,590	100%	100%	173,372,500	KEC.SINJAI BARAT
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Cakupan pemenuhan pelaksanaan peningkatan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	740,276,000	100%	99%	838,931,123	KEC.SINJAI BARAT
3	1	6	4	KECAMATAN SINJAI TIMUR									

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1					2	3	4		5	6		7	8	13
					PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	376,662,390	100%	100%	166,586,171	KEC.SINJAI TIMUR
					PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	100%	14,288,550	100%	100%	5,352,000	KEC.SINJAI TIMUR
					PROGRAM KOORDINASI PEMERINTAHAN KELURAHAN	Cakupan pemenuhan pelaksanaan pemerintahan kelurahan yang terkoordinasi	100%	100%	100%	61,056,000	100%	100%	59,704,800	KEC.SINJAI TIMUR
					PROGRAM PELAYANAN DAN KOORDINASI PEMERINTAHAN KECAMATAN	Cakupan pemenuhan pelayanan dan Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dikoordinasikan	100%	100%	100%	170,683,760	100%	100%	91,139,300	KEC.SINJAI TIMUR

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13	
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Cakupan pemenuhan pelaksanaan peningkatan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	361,708,000	100%	100%	443,845,000	KEC.SINJAI TIMUR	
3	1	6	5	KECAMATAN SINJAI BORONG										
				PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	98%	269,284,510	100%	97%	148,369,674	KEC. SINJAI BORONG	
				PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	99%	17,645,980	100%	100%	13,616,700	KEC. SINJAI BORONG	
				PROGRAM KOORDINASI PEMERINTAHAN KELURAHAN	Cakupan pemenuhan pelaksanaan koordinasi pemerintahan kelurahan	100%	100%	99%	78,637,700	100%	99%	54,078,050	KEC. SINJAI BORONG	

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13	
				PROGRAM PELAYANAN DAN KOORDINASI PEMERINTAHAN KECAMATAN	Cakupan pemenuhan pelayanan dan koordinasi pemerintahan kecamatan Sinjai Utara	100%	100%	99%	224,723,010	100%	100%	78,007,250	KEC. SINJAI BORONG	
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Cakupan pemenuhan pelaksanaan peningkatan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	370,138,000	100%	99%	562,366,603	KEC. SINJAI BORONG	
3	1	6	6	KECAMATAN SINJAI TELLULIMPOE										
				PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	98%	369,502,010	100%	98.08%	201,403,776	KECAMATAN TELLULIMPOE	
				PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pelaporan Kinerja	100%	100%	96%	5,784,170	100%	93.70%	3,477,800	KECAMATAN TELLULIMPOE	

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13	
				PROGRAM KOORDINASI PEMERINTAHAN KELURAHAN	Cakupan Koordinasi Pemerintahan Kelurahan	100%	100%	99%	90,296,890	100%	99.41%	73,027,600	KECAMATAN TELLULIMPO E	
				PROGRAM PELAYANAN DAN KOORDINASI PEMERINTAHAN KECAMATAN	Cakupan Pelayanan dan Koordinasi Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	99%	157,511,850	100%	98.90%	75,486,400	KECAMATAN TELLULIMPO E	
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	100%	370,138,000	100%	96.11%	393,685,277	KECAMATAN TELLULIMPO E	
3	1	6	7	KECAMATAN SINJAI BULUPODDO										

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1					2	3	4		5	6		7	8	13
					PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	97%	296,521,075	100%	97%	168,198,450	KEC. BULUPODDO
					PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	100%	7,684,750	100%	100%	4,572,500	KEC. BULUPODDO
					PROGRAM PELAYANAN DAN KOORDINASI PEMERINTAHAN KECAMATAN	Cakupan pemenuhan pelayanan dan koordinasi pemerintahan kecamatan Sinjai Utara	100%	100%	100%	186,977,425	100%	100%	50,526,500	KEC. BULUPODDO
3	1	6	8		KECAMATAN SINJAI TENGAH									
					PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	99%	363,824,709	100%	99%	195,052,200	KEC. SINJAI TENGAH
					PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	99%	6,253,759	100%	99%	4,886,900	KEC. SINJAI TENGAH

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
				PROGRAM KOORDINASI PEMERINTAHAN KELURAHAN	Cakupan pemenuhan pelaksanaan koordinasi pemerintahan kelurahan	100%	100%	99%	66,378,700	100%	99%	51,183,100	KEC. SINJAI TENGAH
				PROGRAM PELAYANAN DAN KOORDINASI PEMERINTAHAN KECAMATAN	Cakupan pemenuhan pelayanan dan koordinasi pemerintahan kecamatan Sinjai Utara	100%	100%	99%	155,994,080	100%	99%	66,577,500	KEC. SINJAI TENGAH
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Cakupan pemenuhan pelaksanaan peningkatan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat	100%	100%	98%	370,138,000	100%	99%	416,123,500	KEC. SINJAI TENGAH
3	1	6	9	KECAMATAN PULAU SEMBILAN									
				PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan pemenuhan pelayanan perkantoran	100%	100%	94.74%	292,297,212	100%	97.81%	136,310,392	Kec. Pulau Sembilan

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13	
				PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan pemenuhan pelaporan kinerja	100%	100%	85.46%	17,471,452	100%	94.15%	3,266,200	Kec. Pulau Sembilan	
				PROGRAM PELAYANAN DAN KOORDINASI PEMERINTAHAN KECAMATAN	Cakupan pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan	100%	100%	98.58%	148,417,720	100%	99.40%	80,403,100	Kec. Pulau Sembilan	
3	1	7		PEMERINTAHAN										
3	1	7	2	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan pemenuhan Pelayanan Perkantoran	100%	100%	100%	543,220,000	100%	100%	422,220,600	KESBANGPOL	
				PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan pelaporan kinerja	100%	100%	100%	44,150,000	100%	100%	49,328,000	KESBANGPOL	

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13	
				PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEAMANAN DAN KENYAMANAN TINGKAT DAERAH	Jumlah lembaga dan unsur agama/etnis yang berkoordinasi dalam kegiatan Peningkata keamanan dan kenyamanan tingkat daerah	9 lembaga, 5 agama, 7 etnis	9 lembaga, 5 agama, 7 etnis	9 lembaga, 5 agama, 7 etnis	256,202,500	9 lembaga, 5 agama, 7 etnis	9 lembaga, 5 agama, 7 etnis	239,426,600	KESBANGPOL	
				PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah Kelompok dan Organisasi Masyarakat yang berpartisipasi dalam Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	9 Lembaga	9 Lembaga	9 Lembaga	553,447,500	9 Lembaga	9 Lembaga	33,482,400	KESBANGPOL	
				PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	Presentase Partisipasi Parpol, Masyarakat wajib pilih pada, Pileg, Pilpres, Pilgub, Pilbup dan Pilkades	80%	80%	80%	402,980,000	80%	80%	111,345,700	KESBANGPOL	
3	1	8		INSPEKTORAT										

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
3	1	8	1	INSPEKTORAT DAERAH									
				PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Layanan administrasi perkantoran yang terlayani	100%	100%	100%	934,434,050	100%	100%	571,727,970	Inspektorat Daerah
				PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	100%	43,205,340	100%	100%	45,872,370	Inspektorat Daerah
				PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	% Rekomendasi tindak lanjut LHP yang berhasil diimplementasik an dan tidak berulang	79%	80%	80%	2,225,158,216	81%	81%	2,306,003,660	Inspektorat Daerah
				PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Persentase APIP yang tersertifikasi	100%	100%	100%	344,702,394	100%	100%	134,820,000	Inspektorat Daerah

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode					BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
								Tahun 2019			Tahun 2020			
								Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1					2	3	4		5	6		7	8	13
3	1	9			KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
3	1	9	1		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDMA									
					PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Cakupan Layanan administrasi perkantoran yang terlayani	100%	100%	100%	850,905,744	100%	100%	462,167,966	BKPSDMA
					PROGRAM PELAPORAN KINERJA	Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100%	100%	100%	47,429,350	100%	100%	49,228,500	BKPSDMA
					PROGRAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA	Persentase Pegawai yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi	-	-	-	-	69.60%	118.53%	1,192,029,534	BKPSDMA

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permendagri 13)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal (2017)	Target/Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						OPD Penanggung jawab
							Tahun 2019			Tahun 2020			
							Target	Capaian	APBD Pokok (Rp)	Target	Capaian	APBD Perubahan (Rp)	
1				2	3	4		5	6		7	8	13
				PROGRAM PENINGKATAN KINERJA APARATUR	Persentase ASN yang Memiliki Nilai SKP ≥ 76	70%	80%	83,69%	113,329,250	-		-	BKPSDMA
				PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian yang Memenuhi Syarat untuk Diproses		86.99	96.8	589,283,300	-		-	BKPSDMA
				PROGRAM PENGEMBANGAN KARIR APARATUR	Persentase ASN yang Memenuhi Kompetensi Sesuai Jabatan	85%	85%	95,45%	1,141,531,556	-		-	BKPSDMA
				PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR	Persentase ASN yang Mendapatkan Pelatihan Pengembangan Kompetensi	20%	20%	11,15%	2,057,520,800	-		-	BKPSDMA

Tabel 7.3

INDIKASI RENCANA PROGRAM ,PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 - 2023

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubah an RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
1				URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				337,152,679,181		402,497,501,641		440,256,593,394		1,179,906,774,217	
1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				51,447,735,667.00		63,988,474,551.00		64,739,435,825.00		180,175,646,043.00	
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (Prioritas)	Persentase Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Anak Usia Dini (SPM)	95.51%	100%	50,430,645,667.00	100%	62,971,384,551	100%	63,489,435,825	100%	176,891,466,043	DINAS PENDIDI KAN	
				Persentase Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar (SPM)	97.28%	100%		100%		100%		DINAS PENDIDI KAN			

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
					Prosentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar atau Pendidikan Menengah yang berprestasi dalam Pendidikan Kesetaraan (SPM)	73.12%	100%		100%		100%		100%		DINAS PENDIDIKAN
1	1	3		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase keberhasilan siswa dalam mencapai prestasi akademik	100%	100%	695,090,000	100%	695,090,000	100%	1,050,000,000	100%	2,440,180,000	DINAS PENDIDIKAN
1	1	4		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (Prioritas)	Rata-Rata Nilai Perilaku Pegawai Berdasarkan Penilaian Kinerja ASN	55%	-	322,000,000.00	70%	322,000,000.00	80%	200,000,000	80%	844,000,000	DINAS PENDIDIKAN
1	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				152,056,542,361.00		177,692,928,275		171,794,036,569		501,543,507,205.56	

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (Prioritas)	Cakupan pemenuhan indikator SPM Kesehatan Dinas kesehatan dan RS	95,1 %	100%	150,131,682,361.00	100%	175,170,564,648	100%	169,494,555,244	100%	494,796,802,253	DINAS KESEHATAN
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (Prioritas)	Persentase sumber daya manusia kesehatan yang kompeten	6,21	7,0	1,404,000,000.00	97%	1,723,877,227	97%	1,786,003,582	10%	4,913,880,810	DINAS KESEHATAN
1	2	4	PROGRAM KESEDIAAN FARMASI,ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	% Pemenuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sesuai Standar	100%	100%	492,500,000.00	100%	770,986,400	100%	470,986,400	100%	1,734,472,800	DINAS KESEHATAN
1	2	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN (Prioritas)	Persentase Rumah Tangga Berperilaku PHBS	22,2 %	100%	28,360,000.00	100 industri Rt%	27,500,000	110 industri RT	42,491,343	70%	98,351,343	DINAS KESEHATAN

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubah an RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				124,442,434,583.0 0		151,867,700,895.0 0		193,984,921,000		470,295,056,478. 00	
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) (Prioritas)	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	72.21%	73.56%	20,709,586,000.00	74.40 %	22,606,597,000.00	75.17%	22,606,597,000.00	75.17	65,922,780,000	DINAS PUPR
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (Prioritas)	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum layak, perkotaan dan perdesaan (SPM)	74.25%	100%	12,924,770,900.00	100.00 %	12,910,242,000.00	100.00 %	14,416,000,000.00	100.00%	40,251,012,900	DINAS PUPR

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	0%	0%	250,000,000.00	0%	300,000,000.00	0%	7,000,000,000.00	0%	7,550,000,000	DINAS PUPR
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH (Prioritas)	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (SPM)	88.46%	100.00 %	9,333,453,000.00	100.00 %	14,530,087,252.00	100.00 %	19,582,000,000.00	88.80%	43,445,540,252	DINAS PUPR
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	81.44%	81.43%	1,823,209,753.00	81.43 %	4,609,427,273.00	81.43%	5,412,000,000.00	81.43%	11,844,637,026	DINAS PUPR
1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Presentase Kawasan Permukiman Penduduk yang belum dapat dilalui roda 4	Na	7.39%	1,000,000,000.00	6.39%	3,000,000,000.00	5.39%	3,652,160,000.00	5.39%	7,652,160,000	DINAS PUPR
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan Gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	98.62%	98.70%	1,114,000,000.00	98.81 %	2,114,000,000.00	98.92%	12,862,500,000.00	98.92%	16,090,500,000	DINAS PUPR

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
1	3	9		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	0%	0%	824,000,000.00	1.10%	824,000,000.00	1.15%	824,000,000.00	1.15%	2,472,000,000	DINAS PUPR
1	3	#		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN (Prioritas)	persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 km/jam)	30.72%	46.16%	75,908,602,200.00	52.68 %	87,094,443,410.00	53.88%	99,700,484,000.00	53.88%	262,703,529,610	DINAS PUPR
1	3	#		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI (Prioritas)	Rasio Tenaga Oprator/Teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	9.48%	12.14%	175,107,150.00	14.81 %	1,344,159,350.00	17.47%	1,732,180,000.00	17.47%	3,251,446,500	DINAS PUPR
1	3	#		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan Terhadap RTRW	100%	100%	379,705,580.00	100%	2,534,744,610.00	100%	6,197,000,000.00	100%	9,111,450,190	DINAS PUPR
1	4			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				4,514,542,400.00		3,570,000,000.00		3,370,000,000.00		11,454,542,400.00	

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubah an RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Warga Kabupaten Sinjai Korban Bencana	0%	100%	54,763,900.00	100%	260,000,000.00	100%	160,000,000.00	100%	474,763,900	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
				Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Warga Kabupaten Sinjai yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0%	100%		100%		100%		DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Permukiman Kumuh yang Tertangani Kewenangan Kabupaten/Kota	0,122% (100,10 Ha)	0,196% (160,61 Ha)	1,000,000,000.00	0,195 % (159,61 Ha)	1,000,000,000.00	0,193% (158,61 Ha)	1,000,000,000.00	0,192% (157,61 Ha)	3,000,000,000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
					Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	86.21%	86.23%	1,309,778,500.00	0.86	1,160,000,000.00	86.31%	1,160,000,000.00	86,35%	3,629,778,500	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA	Persentase Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	0.28%	3.11%	2,000,000,000.00	5.93	1,000,000,000.00	8.76%	1,000,000,000.00	11,58%	4,000,000,000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
			DAN UTILITAS UMUM (PSU)												
1	4	6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI,KUALIFIKASI,KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi dan Registrasi bidang perumahan dan kawasan perumahan	0%	0%	150,000,000.00	100%	150,000,000.00	100%	50,000,000.00	1	350,000,000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				4,020,839,770.00		4,058,397,920.00		4,278,200,000.00		12,357,437,690.00	
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (Prioritas)	Persentase penegakan perda dan perkara	100%	100%	3,255,273,720.00	100%	3,353,398,920.00	100%	3,348,200,000.00	100%	9,956,872,640	SATPOL.P P DAN DAMKAR
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (Prioritas)	Cakupan pelayanan bencana kabakaran kabupaten/kota	100%	100%	215,605,100.00	100%	154,999,000.00	100%	180,000,000.00	100%	550,604,100	SATPOL.P P DAN DAMKAR
1	5	5	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (Prioritas)	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (SPM)	100%	100%	549,960,950.00	100%	550,000,000.00	100%	750,000,000.00	100%		B P B D

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubah an RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
				Persentase Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	100%	100%		100%		100%		100%			
					Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100%		100%		100%		100%		100%	
1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				670,584,400.00		1,320,000,000.00		2,090,000,000.00		4,080,584,400.00		
1	6	2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL (Prioritas)	Persentase PSKS yang terlibat dalam Pemberdayaan Sosial	2%	5%	163,081,800.00	5%	390,000,000.00	5%	630,000,000.00	25%	1,183,081,800	DIINAS SOSIAL	
1	6	3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	100%	30,252,700.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	130,252,700	DIINAS SOSIAL	
1	6	4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (Prioritas)	Persentase Anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar diluar panti (SPM)	100%	100%	161,887,200.00	100%	220,000,000.00	100%	350,000,000.00	100%	731,887,200	DIINAS SOSIAL	

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubah an RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13	
					Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	100%	100%			100%		100%		100%		
					Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti (SPM)	100%	100%			100%		100%		100%		
					Persentase warga negara/gelandang an dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti (SPM)	100%	100%			100%		100%		100%		

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
1	6	5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL (Prioritas)	Persentase Keluarga Miskin dan Anak-Anak Terlantar yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	80%	100%	171,376,500.00	100%	250,000,000.00	100%	700,000,000.00	100%	1,121,376,500	DIINAS SOSIAL	
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA (Prioritas)	Jumlah Warga Negara Korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	113,186,200.00	100%	360,000,000.00	100%	310,000,000.00	100%	783,186,200	DIINAS SOSIAL	
1	6	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara	100% (3 TMP/MP)	100%	30,800,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	130,800,000	DIINAS SOSIAL	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				22,785,914,316.00		69,815,057,787.00		39,748,777,342.00		132,349,749,445.00		

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubah an RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
2	7		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				134,000,000.00		142,602,500.00		334,041,900.00		610,644,400.00	
2	7	2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0.00%	0%	32,000,000.00	100%	32,000,000.00	100%	32,000,000.00	100%	96,000,000.00	DINAS KOPERAS I, UKM DAN TK
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0.00%	94,55%	30,000,000.00	94,91 %	35,767,800.00	95,21%	137,000,000.00	95,21%	202,767,800.00	DINAS KOPERAS I, UKM DAN TK
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	94,14%	95,59%	42,000,000.00	96,45 %	44,834,000.00	98,11%	146,400,000.00	98,11%	233,234,000.00	DINAS KOPERAS I, UKM DAN TK
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	0.00%	50%	30,000,000.00	75%	30,000,700.00	75%	18,641,900.00	80%	78,642,600.00	DINAS KOPERAS I, UKM DAN TK

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubah an RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
				Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	79,68%	74,35%			74,51 %		74,51%		74,87%		
2	8		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					154,000,000.00		148,000,000.00		149,000,000.00		451,000,000.00	
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat daerah yang menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	72,48%	100%	35,000,000.00	100%	35,000,000.00	100%	35,000,000.00	100%	105,000,000	DINAS P3AP2KB	
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentase Perempuan dan Anak yang mendapatkan layanan	100.00%	60%	30,000,000.00	70%	30,000,000.00	80%	31,000,000.00	100%	91,000,000	DINAS P3AP2KB	

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumlah keluarga yang mendapatkan advokasi dan in formasi peningkatan kualitas keluarga	100.00%	100 KK	25,000,000.00	100 KK	25,000,000.00	100 KK	25,000,000.00	100%	75,000,000	DINAS P3AP2KB	
2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak	100.00%	100%	26,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%	66,000,000	DINAS P3AP2KB	
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	presentase anak yang mendapatkan pemenuhan hak anak	100.00%	100%	21,000,000.00	100%	21,000,000.00	100%	21,000,000.00	100%	63,000,000	DINAS P3AP2KB	
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	presentase anak yang mendapatkan perlindungan khusus	100.00%	100%	17,000,000.00	100%	17,000,000.00	100%	17,000,000.00	100%	51,000,000	DINAS P3AP2KB	
2	9		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				1,751,311,100.00		2,945,575,180.00		3,198,596,154.00		7,895,482,434.00		
2	9	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Cakupan kelompok pengelola infrastruktur pendukung ketahanan pangan pangan yang di bina	100.00%	100%	1,000,000,000.00	100%	2,000,000,000.00	100%	2,200,000,000.00	100%	5,200,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN	

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
2	9	3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Presentase ketersediaan pangan utama(%)	100%	100%	676,216,700.00	100%	835,044,140.00	100%	917,448,554.00	94.5	2,428,709,394	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	4	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase wilayah bebas kerawanan pangan	100.00%	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100.00%	150,000,000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	9	5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	100.00%	100%	25,094,400.00	100%	60,531,040.00	100%	31,147,600.00	100%	116,773,040	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				580,000,000.00		625,000,000.00		625,000,000.00		1,830,000,000.00	
2	#	2	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	0%	100%	55,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	255,000,000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
2	#		PROGRAM PENYELESAIAAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	0%	0%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%	150,000,000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
				Persentase Luas Lahan Pemda Bersertifikat	88,43%	0%	50,000,000.00	56,86 %	50,000,000.00	57,37%	50,000,000.00	57,37%	150,000,000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
2	#	6	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTE	Cakupan Penyelesaian Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente	0%	0%	200,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	200,000,000.00	100%	600,000,000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
2	#	8	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Cakupan Inventarisasi Tanah Kosong di Kabupaten Sinjai	0%	0%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	300,000,000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	#	9	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Pengelolaan Izin Membuka Tanah	0%	0%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	100%	300,000,000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	#	#	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Lahan Pemda Bersertifikat	88,43%	56,36%	25,000,000.00	10%	25,000,000.00	26,15%	25,000,000.00	56,36%	75,000,000	DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				4,123,547,653.00		7,803,399,750.00		9,950,833,707.00		21,877,781,110.00	

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
2	#	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	0%	50	175,000,000.00	75%	175,000,000.00	100%	275,700,000.00	100%	625,700,000	DINAS LHK
2	#	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks kualitas air	93.13	60.78	198,181,710.00	61	3,826,668,600.00	62	3,710,400,000.00	87.5	7,735,250,310	DINAS LHK
2	#	4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati	0%	20%	17,184,796.00	40%	23,900,000.00	40%	23,995,600.00	100%	65,080,396	DINAS LHK
2	#	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Cakupan usaha dan /atau kegiatan penghasil B3 dan LB3 yang dibina dalam melaksanakan pengendalian B3 dan LB3	17 usaha dan/atau kegiatan	22 usaha dan/atau kegiatan	14,013,900.00	22 usaha dan/atau kegiatan	23,179,200.00	25 usaha dan/atau kegiatan	33,271,917.00	22 usaha dan/atau kegiatan	70,465,017	DINAS LHK

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
2	#	6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	28.57%	16.67	59,522,700.00	50	66,361,000.00	100%	66,626,444.00	100%	192,510,144	DINAS LHK
2	#	7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Prosentase Pelaksanaan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan local yang di fasilitasi	0%	-	-	0%	24,000,000.00	50%	20,000,000.00	100%	44,000,000	DINAS LHK
2	#	8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Prosentase Peserta Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup yang memahami Peraturan Lingkungan Hidup	%	25	23,293,250.00	25	26,400,000.00	50	83,293,250.00	100%	132,986,500	DINAS LHK

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
2	#	9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	5 Penghargaan	5 Penghargaan	25,555,300.00	10 penghargaan	25,555,300.00	10 penghargaan	25,657,521.00	25 penghargaan	76,768,121	DINAS LHK
2	#	#	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100.00%	100%	34,301,000.00	100%	34,437,900.00	100%	34,575,652.00	100%	103,314,552	DINAS LHK
2	#	#	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Prosentase Pengelolaan Sampah	47.6	98%	3,123,857,200.00	99%	3,073,493,350.00	99%	4,595,787,323.00	99%	10,793,137,873	DINAS LHK
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Nilai Indeks METT	28	74	452,637,797.00	74	504,404,400.00	74	1,081,526,000.00	74	2,038,568,197	DINAS LHK
2	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				269,305,480.00		269,305,480.00		269,305,480.00		807,916,440.00	

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1			2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
2	#	2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Prosentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	98,76%	5000 KTP	110,416,320.00	500 KTP	110,416,320.00	500 KTP	110,416,320.00	99%	331,248,960	DINAS DUKCAPI L
				Prosentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	68,31%	5000 KIA		500 KIA		500 KIA		83%		
2	#	3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Jumlah kepemilikan akta kelahiran	99,64%	5000 jiwa	65,232,160.00	5000 jiwa	65,232,160.00	5000 jiwa	65,232,160.00	99,50%	195,696,480	DINAS DUKCAPI L
				Jumlah laporan kepemilikan akta kematian	100.00%	12 laporan		12 lapora n		12 laporan		99%		
2	#	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prosentase pemanfaatan data kependudukan organisasi perangkat daerah	0.00%	100%	93,657,000.00	100%	93,657,000.00	100%	93,657,000.00	45%	280,971,000	DINAS DUKCAPI L
2	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				2,766,030,980.00		2,391,652,932.00		2,950,814,348.00		8,108,498,260.00	

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubah an RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
2	#	3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan Kerjasama	0%	52.23	38,670,700.00	52.23	34,500,000.00	52.23	65,000,000.00	94.03%	138,170,700	DINAS PMD
				Persentase peningkatan status Desa Mandiri	0%	0.00%		0.00%		1.49%		0.00%		
2	#	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang tertib, transparan dan akuntabel	100%	100%	1,980,531,180.00	100%	1,564,152,932.00	100%	1,850,814,348.00	100%	5,395,498,460	DINAS PMD
2	#	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LSM Aktif	18,75%	18,75 %	746,829,100.00	18,75 %	793,000,000.00	18,75%	1,035,000,000.00	11.25%	2,574,829,100	DINAS PMD
				Persentase LPM Berprestasi	3,75%	3,75%		3,75%		3,75%				
				Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM	1 Kelompo k	1 Kelomp ok		1 Kelom pok		1 Kelompo k				
				Cakupan Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	37,04%	37,04%		37,04 %		37,04%		46,87 %		

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
				Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	70.14 Kelompo k	65,10 Kelomp ok		65,10 Kelomp ok		65,10 Kelomp ok		70.14 Kelompo k		
				PKK Aktif	100%	100%		100%		100%		100%		
				Posyandu Aktif	100%	100%		100%		100%		100%		
2	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3,294,638,625.00		6,910,638,625.00		6,824,277,250.00		17,029,554,500.00	
2	#	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah Akseptor KB	2.31%	4,800	2,883,000,000.00	4,900	6,274,500,000.00	500	5,768,000,000.00	71,62%	14,925,500,000	DINAS P3AP2KB
2	#	3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan metode kontrasepsi (CPR)	81,57%	52	348,138,625.00	52,5	348,138,625.00	53	696,277,250.00	86,61%	1,392,554,500	DINAS P3AP2KB
2	#	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase poktan yang melaksanakan Program Bangga Kencana	100%	100%	63,500,000.00	100%	288,000,000.00	100%	360,000,000.00	100%	711,500,000	DINAS P3AP2KB

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
2	#			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				890,359,780.00		2,381,687,780.00		803,687,780.00		4,075,735,340.00	
2	#	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah angkutan umum darat	80%	299 Unit	841,061,140.00	299 Unit	2,332,389,140.00	299 Unit	754,389,140.00	95%	3,927,839,420	DINAS PERHUB UNGAN
2	#	3		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah angkutan umum laut	299; 25 Unit AUD ; Unit AUL	211530	49,298,640.00		49,298,640.00		49,298,640.00	246728	147,895,920	DINAS PERHUB UNGAN
2	#			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				2,982,665,918.00		3,080,409,000.00		3,098,676,000.00		9,161,750,918.00	
2	#	2		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks kepuasan masyarakat dan data yang akurat	90.50%	91%	2,239,493,800.00	91.50 %	2,269,239,000.00	92%	2,278,796,000.00	92%	6,787,528,800	DINAS KOMINFO DAN PERSAND IAN

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
2	#	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur penyediaan informasi	91%	91.50%	743,172,118.00	92%	811,170,000.00	93%	700,119,880	93%	2,374,222,118	DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN
2	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				615,334,600.00		666,687,500.00		752,830,600.00		2,034,852,700.00	
2	#	2	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.00%	8,06%	23,000,000.00	13,56 %	25,000,000.00	21,62%	45,000,000.00	21,62%	93,000,000	DINAS KOPERASI, UKM DAN TK

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
2	#	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.00%	10,71%	17,000,000.00	12,86 %	17,000,000.00	14,29%	31,000,000.00	14,29%	65,000,000	DINAS KOPERAS I, UKM DAN TK
2	#	4	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.00%	44,78%	31,850,000.00	52,24 %	31,850,000.00	56,72%	32,850,000.00	56,72%	96,550,000	DINAS KOPERAS I, UKM DAN TK
2	#	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.00%	85,71%	390,304,000.00	85,71 %	400,800,000.00	85,71%	400,800,000.00	85,71%	1,191,904,000	DINAS KOPERAS I, UKM DAN TK

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
2	#	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Peningkatan koperasi yang berkualitas	65,15%	67,38%	54,000,000.00	67,61 %	137,751,000.00	67,83%	55,000,000.00	67,83%	246,751,000	DINAS KOPERAS I, UKM DAN TK
2	#	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya usaha mikro menjadi wirausaha	0.00%	26,80%	54,577,400.00	27,80 %	34,005,500.00	28,80%	142,577,400.00	28,80%	231,160,300	DINAS KOPERAS I, UKM DAN TK
2	#	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro dan kecil	0.00%	94,29%	44,603,200.00	94,34 %	20,281,000.00	94,39%	45,603,200.00	94,39%	110,487,400	DINAS KOPERAS I, UKM DAN TK
2	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				622,059,100.00		933,683,200.00		1,701,240,000.00		3,256,982,300.00	
2	#	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kenaikan Realisasi Investasi	-85%	10%	2,426,500.00	10%	90,000,000.00	10%	170,000,000.00	10%	262,426,500	DPM DAN PTSP
2	#	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Minat Investasi	9 Calon Investor	5 calon Investor	32,329,600.00	5 calon Investor	82,329,360.00	5 calon Investor	216,787,000.00	30 calon Investor	331,445,960	DPM DAN PTSP

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
2	#	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengajuan Perizinan dan Non Perizinan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	257,316,600.00	100%	420,842,720.00	100%	971,880,000.00	100%	1,650,039,320	DPM DAN PTSP	
2	#	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Realisasi Investasi	42,803,500,000	11,000,000,000	322,573,000.00	12,000,000,000	322,573,000.00	13,000,000,000	322,573,000.00	100%	967,719,000	DPM DAN PTSP	
2	#	6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	7,413,400.00	1 Dokumen	17,938,120.00	1 Dokumen	20,000,000.00	100%	45,351,520	DPM DAN PTSP	
2	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				4,176,405,640.00		41,155,000,000.00		7,595,000,000.00		52,926,405,640.00		

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
2	#	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan kepemudaan dan organisasi kepemudaan		50%	875,447,740.00	50%	1,220,000,000.00	100%	1,450,000,000.00	100%	3,545,447,740	DINAS PEMUDA DAN OLAHRA GA
				Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan										
2	#	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Ptresentase Prestasi Olahraga	100%	100%	3,300,957,900.00	100%	39,400,000,000.00	100%	5,510,000,000.00	100%	48,210,957,900	DINAS PEMUDA DAN OLAHRA GA
2	#	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan pelaksanaan kegiatan kepramukaan	100%	0	-	100%	535,000,000.00	100%	635,000,000.00	100%	1,170,000,000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRA GA
2	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				29,527,100.00		29,650,000.00		29,780,000.00		88,957,100.00	

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
2	#	#	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan ketersediaan data statistik sektoral	100%	100%	29,527,100.00	100%	29,650,000.00	100%	29,780,000.00	100%	88,957,100	DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN	
2	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				54,012,200.00		55,000,000.00		55,000,000.00		164,012,200.00		
2	#	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase SKPD yang menggunakan persandian dalam komunikasi Perangkat daerah	100%	100%	54,012,200.00	100%	55,000,000.00	100%	55,000,000.00	100%	164,012,200	DINAS KOMINFO DAN PERSANDIAN	
2	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				175,582,200.00		73,214,460.00		595,802,500.00		844,599,160.00		
2	#	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	100%	20%	131,217,200.00	20%	7,480,760.00	20%	450,000,000.00	100%	588,697,960	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubah an RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
2	#	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pengembangan kesenian tradisional	100%	10%	28,562,500.00	20%	25,406,200.00	40%	40,000,000.00	100%	93,968,700	DINAS PARIWIS ATA DAN KEBUDAY AAN
2	#	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase pelestarian cagar budaya	-	-	-	5.17	24,525,000.00	1.7	62,000,000.00	100%	86,525,000	DINAS PARIWIS ATA DAN KEBUDAY AAN
2	#	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengelolaan permuseum	100%	100%	15,802,500.00	0	15,802,500.00	100%	43,802,500.00	100%	75,407,500	DINAS PARIWIS ATA DAN KEBUDAY AAN
2	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				142,454,740.00		147,241,300.00		597,785,000.00		887,481,040.00	
2	#	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Meningkatnya Jumlah Pemustaka.	20%	20%	142,454,740.00	20%	147,241,300.00	20%	597,785,000.00	0	887,481,040	DINAS PERPUST AKAAN DAN KEARSIP AN
2	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				24,679,200.00		56,310,080.00		217,106,623.00		298,095,903.00	

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
2	#	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang mengelola arsip secara baku	20%	20%	24,679,200.00	20%	26,536,180.00	20%	187,406,623.00	baik	238,622,003	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2	#	3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	20%	0	-	80%	29,773,900.00	80%	29,700,000.00	1	59,473,900	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				262,621,278,792.00		233,808,839,645.00		238,443,728,366.00		734,873,846,803.00		
3	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				11,591,685,599.00		2,963,510,679.00		3,210,900,000.00		17,766,096,278.00		
3	#	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi perikanan tangkap (Ton)	34,508	37,707	777,335,600.00	38,838	931,882,000.00	40,003	1,624,400,000.00	321 unit	3,333,617,600	DINAS PERIKANAN	
3	#	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi perikanan budidaya (Ton)	41,215.20	47,709	10,617,499,999.00	49,592	1,804,442,979.00	52,071	1,316,500,000.00	133 Paket	13,738,442,978	DINAS PERIKANAN	

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
3	#	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)	1,420	1,505	196,850,000.00	1,535	227,185,700.00	1,565	270,000,000.00	5 Paket	694,035,700	DINAS PERIKANAN
3	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				490,486,420.00		815,674,545.00		823,087,000.00		2,129,247,965.00	
3	#	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	34 destinasi	13.4	304,064,900.00	4.4	495,767,045.00	4.4	402,000,000.00	58 destinasi	1,201,831,945	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	#	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase pelaksanaan promosi wisata daerah	100%	100%	174,504,920.00	100%	269,907,500.00	100%	321,087,000.00	1	765,499,420	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	#	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100%	3.7	11,916,600.00	6.5	50,000,000.00	6.5	100,000,000.00	1	161,916,600	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				12,844,963,605.00		17,665,228,376.00		16,136,133,511.00		46,646,325,492.00	

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD							
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023										
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp						
1			2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13						
3	#	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatkan Produksi bahan Pangan Utama dan hortikultura	Padi : 117,351 (Ton GKG)	122.092	888,838,950.00	124.534	1,566,000,000.00	127.024	1,572,264,000.00	127.024	4,027,102,950	DINAS TPH DAN PERKEBUNAN						
					Jagung : 16,000 Ton (PPK)	17.484				18.358		19.276			19.276					
					Hortikultura Sayuran : 2,168 Ton SS	2.39				2.51		2.635			2.635					
					Hortikultura Buah : 9,944 BS	10.963				11.511		12.087			12.087					
				Meningkatkan Produksi Tanaman Perkebunan Unggulan	Cengkeh (Ton) : 964	1.063				1.116		1.172			1.172					
					Kopi (Ton) : 2107	2.323				2.439		2.561			2.561					
					Lada (Ton) : 709	781				820		861			861					
					Kakao (Ton) : 270	298				313		328			328					
				Meningkatnya Populasi Ternak :		121.660 Ekor				713,499,415		124.660 Ekor			713.499.425	128.399 Ekor	1,330,000,000	128.399 Ekor	3,453,499,415	DINAS PETERNA

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD	
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13	
				- Sapi Potong (ekor)	114.141 Ekor											KAN DAN KESWAN
				- Kambing (ekor)	27.574 Ekor	28.539 Ekor		28.967 Ekor		29.401 Ekor		29.401 Ekor				
				- Ayam Kampung (ekor)	1.136.700 Ekor	1.188.462 Ekor		1.215.797 Ekor		1.243.760 Ekor		1.243.760 Ekor				
3	#	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Pertanian	Pengelolaan Air : 1,000 Ha	1000	2,774,991,800.00	1000	5,848,000,000.00	1000	5,871,392,000.00	5,000 Ha	14,494,383,800	DINAS TPH DAN PERKEBUNAN		
					Pengelolaan Lahan : 20 KM	20		20		20		100 KM				
					Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian : 50 Unit	50		50		50		250 unit				
				Jumlah Ketersediaan Prasarana Pertanian	-	2 Paket	7,500,000,000.00	2 Unit (2 Paket)	7,750,000,000.00	9 Unit (1 Paket)	5,700,000,000.00	15 Unit (3 Paket)	20,950,000,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN		
3	#	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINEER	Prosentase Pelayanan Kesehatan Hewan	80%	90%	274,721,540.00	90%	210,000,000.00	95%	355,000,000.00	95%	839,721,540	DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN		

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubah an RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
3	#	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Penurunan Tingkat Serangan OPT/DPI	5%	5%	90,000,000.00	4,5%	290,000,000.00	4%	522,000,000.00	4%	902,000,000	DINAS TPH DAN PERKEBU NAN
3	#	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatkan Kinerja Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompo k tani yang meningka t kelas Kemamp uannya : 100 KT	240	582,911,900.00	300	646,228,376.00	300	660,477,511.00	1,320 KT	1,889,617,787	DINAS TPH DAN PERKEBU NAN
					Jumlah kelompok Tani yang menjadi Kelembag aan Ekonomi Petani (KEP)/ Badan Usaha Milik Petani (BUMP) : 1 Unit	10		10		5		30 Unit		

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
					Peningkatan Jumlah Kelompok Peternak yang memanfaatkan teknologi peternakan	4 Kelompok	16 Kelompok	20,000,000.00	24 Kelompok	25,000,000.00	30 Kelompok	45,000,000.00	70 Kelompok	90,000,000	DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN
3	#			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				452,637,797.00		304,404,400.00		5,744,447,051.00		6,501,489,248.00	
3	#	4		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Nilai Indeks METT	73	74	452,637,797.00	74	304,404,400.00	74	5,744,447,051.00	74	6,501,489,248	DINAS LHK
3	#			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				47,384,900.00		70,000,000.00		120,280,000.00		237,664,900.00	
3	#	5		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kanb/kota	0	100%	47,384,900.00	100%	70,000,000.00	100%	120,280,000.00	100%	237,664,900	DINAS DAGPERIND DAN ESDM

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
3	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				758,710,340.00		598,495,000.00		700,900,000.00		2,058,105,340.00	
3	#	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	0	100	25,000,000.00	100%	25,000,000.00	100%	25,100,000.00	100%	75,100,000	DINAS DAGPERI ND DAN ESDM
3	#	3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan peningkatan sarana distribusi perdagangan	0	100%	307,251,900.00	100%	292,395,000.00	100%	343,570,000.00	100%	943,216,900	DINAS DAGPERI ND DAN ESDM
3	P e	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting	0	100%	67,854,900.00	100%	88,000,000.00	100%	138,355,000.00	75%	294,209,900	DINAS DAGPERI ND DAN ESDM
3	#	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	0	95%	58,603,540.00	100%	75,000,000.00	100%	75,300,000.00	100%	208,903,540	DINAS DAGPERI ND DAN ESDM

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
3	#	7	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri	0	100%	300,000,000.00	100%	118,100,000.00	100%	118,575,000.00	100%	536,675,000	DINAS DAGPERI ND DAN ESDM
3	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				32,205,619,880.00		473,331,020.00		815,186,000.00		33,494,136,900.00	
3	#	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	0	100%	32,116,920,000.00	100%	391,377,560.00	100%	742,943,000.00	12%	33,251,240,560	DINAS DAGPERI ND DAN ESDM
3	#	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industry menengah yang diterbitkan	0	100%	17,999,880.00	100%	18,773,460.00	100%	8,808,000.00	3	45,581,340	DINAS DAGPERI ND DAN ESDM
3	#	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0	1750 IKM	70,700,000.00	2350 IKM	63,180,000.00	3000 IKM	63,435,000.00	2 Kec	197,315,000	DINAS DAGPERI ND DAN ESDM

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1			2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				17,937,367,240.00		24,952,593,640.00		24,186,844,358.00		67,076,805,238.00	
4	1	2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Koordinasi Administratif Bidang Pemerintahan Umum	100%	100%	9,121,060,680.00	100%	9,896,148,760.00	100%	8,998,015,098.00	100%	28,015,224,538	SEKRETA RIAT DAERAH
				Presentase pelaksanaan peyelenggaraan koordinasi administrative di bidang kesejahteraan rakyat	100%	100%		100%		100%				
				Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan koordinasi administratif bidang Hukum dan HAM		100%		100%		Perda 26; Perbup 125, SK 2400				

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
4	1	3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase penyelenggaraan koordinasi administrasi yang dihasilkan; Jumlah rumusan kebijakan bidang ekonomi yang dihasilkan		100%	1,308,872,300.00	100%	1,327,862,880.00	100%	1,377,863,260.00	100%; 1 Perda, 6 Perbup/Pedum/Juklak/Juknis	4,014,598,440	SEKRETA RIAT DAERAH
				Cakupan sistem monitoring evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan	100%	100%		100%		100%				
				Terwujudnya pengadaan barang/jasa pemerintah yang terpadu efektif dan efisien serta terjaminnya kesempatan, akses dan hak bagi penyedia barang/jasa agar tercipta persaingan usaha yang sehat	100%	100%		100%		100%				

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	7,507,434,260.00	100%	13,728,582,000.00	100%	13,810,966,000.00	100%	35,046,982,260	SEKRETA RIAT DPRD
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				183,253,256,651.00		182,492,150,625.00		183,220,342,420.00		548,965,749,696.00	
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu (RPJPD, RPJMD, RKPD).	100%	100%	309,727,100.00	100%	539,300,000.00	100%	616,500,000.00	100%	1,465,527,100	BAPPEDA
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Bidang Sosial dan Pemerintahan, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.	100%	100%	402,876,400.00	100	446,884,800.00	100%	485,250,000.00	100%	1,335,011,200	BAPPEDA

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indikator Program : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sesuai Regulasi	100%	100%	177,545,888,931.00	100%	174,392,356,295.00	100%	174,392,356,295.00	100%	526,330,601,521	B K A D
				Terlaksananya monitoring dan evaluasi DBH Pajak	100%	100%	42,500,000	100%	42,500,000	100%	42,500,000	100%	127,500,000	BAPEND A
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Regulasi	100 Persen	100 Persen	1,025,045,740.00	100 Persen	1,025,045,740.00	100 Persen	1,025,045,740.00	100%	3,075,137,220	B K A D
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan PAD dan pajak daerah	100%	100%	1,236,862,000.00	100%	1,216,862,000.00	100%	1,239,190,000	100%	3,692,914,000	BAPEND A
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase nilai penerapan Sistem Merit	0%	83.00%	1,106,018,980.00	74,25 %	1,697,624,790.00	81%	2,023,160,385.00	81%	4,826,804,155	BKPSDM A
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mendapatkan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi	0%	21%	1,087,632,000.00	21%	2,532,077,000.00	25%	2,788,800,000.00	25%	6,408,509,000	BKPSDM A

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah		100%	496,705,500.00	100%	599,500,000.00	100%	607,540,000.00	100%	1,703,745,500	BALITBA NGDA	
				Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	12 Perangkat Daerah	42 Perangkat Daerah		3 Perangkat Daerah		3 Perangkat Daerah		48 Perangkat Daerah			
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				3,039,166,360.00		3,473,451,360.00		3,485,608,026.00		9,998,225,746.00		
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	71.08%	80%	2,197,402,280.00	81%	2,631,687,280.00	81%	2,640,476,890.00	81%	7,469,566,450	INSPEKTORAT DAERAH	
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase rumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100%	100%	841,764,080.00	100%	841,764,080.00	100%	845,131,136.00	100%	2,528,659,296	INSPEKTORAT DAERAH	

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
7				UNSUR KEWILAYAHAN				15,490,517,335.00		11,496,669,649.00		12,812,183,804.00		39,799,370,788.00	
7	1	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				606,021,860.00		560,751,260.00		795,692,028.00		1,962,465,148.00	
				Sinjai Utara	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	86,951,000.00	100%	89,600,000.00	100%	128,779,500.00	100%	305,330,500	KEC. SINJAI UTARA
				Bulupoddo	Cakupan pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	5,164,300.00	100%	5,516,000.00	100%	6,000,000.00	100%	16,680,300	KEC. BULUPODDO
				Tellulimpoe	Cakupan pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	38,836,600.00	100%	64,000,000.00	100%	201,000,000.00	100%	303,836,600	KEC. TELLULIMPOE
				Sinjai Selatan	Cakupan pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	43,060,000.00	100%	55,100,000.00	100%	66,000,000.00	100%	164,160,000	KEC. SINJAI SELATAN

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
				Pulau Sembilan	Cakupan pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	56,085,200.00	100%	60,435,700.00	100%	99,495,200.00	100%	216,016,100	KEC. PULAU SEMBILAN
				Sinjai Timur	persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	90,717,000.00	100%	86,982,000.00	100%	87,329,928.00	100%	265,028,928	KEC. SINJAI TIMUR
				Sinjai Tengah	persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	48,533,900.00	100%	57,337,400.00	100%	57,337,400.00	100%	163,208,700	KEC. SINJAI TENGAH
				Sinjai Barat	Cakupan pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	175,643,700.00	100%	80,750,000.00	100%	80,750,000.00	100%	337,143,700	KEC. SINJAI BARAT
				Sinjai Borong	Cakupan pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	61,030,160.00	100%	61,030,160.00	100%	69,000,000.00	100%	191,060,320	KEC. SINJAI BORONG
7	1	3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				14,518,747,054.00		10,506,157,301.00		11,465,942,401.00		36,490,846,756.00	

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubah an RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
				Sinjai Utara	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	6,834,116,439.00	100%	4,936,559,901.00	100%	4,704,329,901.00	100%	16,475,006,241	KEC. SINJAI UTARA
				Bulupoddo	Cakupan pemenuhan pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan	100%	100%	13,016,000.00	100%	15,828,700.00	100%	15,473,000.00	100%	44,317,700	KEC. BULUPOD DO
				Tellulimpoe	Cakupan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	1,157,091,267.00	100%	810,000,000.00	100%	1,105,000,000.00	100%	3,072,091,267	KEC. TELLULI MPOE
				Sinjai Selatan	Cakupan pemenuhan pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan	100%	100%	1,087,773,205.00	100%	798,400,000.00	100%	1,122,000,000.00	100%	3,008,173,205	KEC. SINJAI SELATAN
				Pulau Sembilan	Cakupan pemenuhan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	100%	2,119,800.00	100%	5,563,300.00	100%	24,055,000.00	100%	31,738,100	KEC. PULAU SEMBILAN

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
				Sinjai Timur	persentase pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan	100%	100%	1,076,763,426.00	100%	780,000,000.00	100%	783,120,000.00	100%	2,639,883,426	KEC. SINJAI TIMUR
				Sinjai Tengah	pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan	100%	100%	1,080,719,830.00	100%	783,964,500.00	100%	783,964,500.00	100%	2,648,648,830	KEC. SINJAI TENGAH
				Sinjai Barat	Cakupan pemenuhan pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan	100%	100%	2,175,542,715.00	100%	1,581,000,000.00	100%	1,821,000,000.00	100%	5,577,542,715	KEC. SINJAI BARAT
				Sinjai Borong	Cakupan pemenuhan pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan	100%	100%	1,091,604,372.00	100%	794,840,900.00	100%	1,107,000,000.00	100%	2,993,445,272	KEC. SINJAI BORONG
7	1	4		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				98,004,800.00		88,666,500.00		107,092,800.00		293,764,100.00	
				Sinjai Utara	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	18,454,300.00	100%	15,500,000.00	100%	8,454,300.00	100%	42,408,600	KEC. SINJAI UTARA

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)				Indikator Kinerja Program (Outcome)				Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD				OPD					
																Tahun 2021				Tahun 2022										Tahun 2023			
																Target		Rp		Target		Rp								Target		Rp	
1				2				3				4				5		6		7		8.00		9		10.00		11		12		13	
				Bulupoddo				Cakupan pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum				100%		100%		7,500,000.00		100%		13,858,400.00		100%		15,000,000.00		100%		36,358,400		KEC. BULUPODDO			
				Tellulimpoe				Cakupan pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum				100%		100%		10,190,000.00		100%		10,090,000.00				15,000,000.00		100%		35,280,000		KEC. TELLULIMPOE			
				Sinjai Selatan				Cakupan pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum				100%		100%		21,620,000.00		100%		10,000,000.00		100%		12,000,000.00		100%		43,620,000		KEC. SINJAI SELATAN			
				Pulau Sembilan				Cakupan pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum				100%		100%		403,000.00		100%		598,600.00		100%		15,000,000.00		100%		16,001,600		KEC. PULAU SEMBILAN			
				Sinjai Timur				Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum				100%		0		5,000,000.00		100%		4,997,000.00		100%		5,016,000.00		100%		15,013,000		KEC. SINJAI TIMUR			

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
				Sinjai Tengah	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	12,205,500.00	100%	12,205,500.00	100%	12,205,500.00	100%	36,616,500	KEC. SINJAI TENGAH
				Sinjai Barat	Cakupan pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	11,900,000.00	100%	10,685,000.00	100%	13,685,000.00	100%	36,270,000	KEC. SINJAI BARAT
				Sinjai Borong	Cakupan pemenuhan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	10,732,000.00	100%	10,732,000.00	100%	10,732,000.00	100%	32,196,000	KEC. SINJAI BORONG
7	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				140,322,681.00		160,067,388.00		225,296,739.00		525,686,808.00	
				Sinjai Utara	Cakupan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	59,281,181.00	100%	40,379,788.00	100%	60,141,307.00	100%	159,802,276	KEC. SINJAI UTARA

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubah an RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
				Bulupoddo	Cakupan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	15,000,000.00	100%	25,000,000.00	100%	35,000,000.00	100%	75,000,000	KEC. BULUPOD DO
				Tellulimpoe	Cakupan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	6,014,600.00	100%	15,000,000.00	100%	25,000,000.00	100%	46,014,600	KEC. TELLULI MPOE
				Sinjai Selatan	Cakupan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	29,760,000.00	100%	35,550,000.00	100%	35,550,000.00	100%	100,860,000	KEC. SINJAI SELATAN
				Pulau Sembilan	Cakupan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	403,000.00	100%	797,200.00	100%	20,031,200.00	100%	21,231,400	KEC. PULAU SEMBILAN
				Sinjai Timur	persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	100%	100%	8,068,000.00	100%	8,458,000.00	100%	8,491,832.00	100%	25,017,832	KEC. SINJAI TIMUR
				Sinjai Tengah	Cakupan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	-	100%	10,125,000.00		10,125,000.00	100%	20,250,000	KEC. SINJAI TENGAH

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
				Sinjai Barat	Cakupan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	6,410,000.00	100%	9,371,500.00	100%	9,371,500.00	100%	25,153,000	KEC. SINJAI BARAT
				Sinjai Borong	Cakupan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	15,385,900.00	100%	15,385,900.00	100%	21,585,900.00	100%	52,357,700	KEC. SINJAI BORONG
7	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				127,420,940.00		181,027,200.00		218,159,836.00		526,607,976.00	
				Bulupoddo	Cakupan pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	100%	100%	8,123,940.00	100%	15,754,300.00	100%	14,450,000.00	100%	38,328,240	KEC. BULUPODDO
				Tellulimpoe	Cakupan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	7,852,700.00	100%	35,000,000.00	100%	41,000,000.00	100%	83,852,700	KEC. TELLULI MPOE

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
				Sinjai Selatan	Cakupan pemenuhan pembinaan dn pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	20,340,000.00	100%	40,667,000.00	100%	51,000,000.00	100%	112,007,000	KEC. SINJAI SELATAN
				Pulau Sembilan	Cakupan pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	5,191,800.00	100%	14,291,600.00	100%	34,877,800.00	100%	54,361,200	KEC. PULAU SEMBILAN
				Sinjai Timur	persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	100%	100%	22,426,000.00	100%	17,134,000.00	100%	17,202,536.00	100%	56,762,536	KEC. SINJAI TIMUR
				Sinjai Tengah	persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	100%	100%	24,435,700.00	100%	20,679,500.00	100%	20,679,500.00	100%	65,794,700	KEC. SINJAI TENGAH
				Sinjai Barat	Cakupan pemenuhan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	13,000,000.00	100%	11,450,000.00	100%	11,450,000.00	100%	35,900,000	KEC. SINJAI BARAT

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
				Sinjai Borong	Cakupan pemenuhan pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	100%	100%	26,050,800.00	100%	26,050,800.00	100%	27,500,000.00	100%	79,601,600	KEC. SINJAI BORONG
8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				1,813,115,554.00		2,010,247,773.00		1,863,352,672.00		5,686,715,999.00	
8	1			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				1,813,115,554.00		2,010,247,773.00		1,863,352,672.00		5,686,715,999.00	
8	1	2		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase tingkat keikutsertaan aparat pemerintah daerah dalam mengikuti bela negara. Angka persentase penurunan angka pemahaman radikalisme	9 Lembaga, 4 Agama, 12 Etnis	10%	91,579,300.00	10%	188,000,000.00	10%	92,313,399.00	9 Lembaga, 4 Agama, 12 Etnis	371,892,699	BADAN KESBANG POL

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode			BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu	79%	79%	693,179,174.00	79%	631,056,873.00	80%	734,720,000.00	80%	2,058,956,047	BADAN KESBANG POL
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi sesuai prundang-undangan yang berlaku	100%	0%	69,999,680.00	20%	170,000,000.00	1 laporan	70,279,681.00	100%	310,279,361	BADAN KESBANG POL
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA	Persentase penurunan penyalahgunaan narkoba dan komplik antar agama	100%	0%	78,420,100.00	0%	180,000,000.00	1 dokumen	79,048,715.00	100%	337,468,815	BADAN KESBANG POL

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023**

Kode				BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN (Permnedagri 90/2019)	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD		OPD
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1				2	3	4	5	6	7	8.00	9	10.00	11	12	13
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	100%	0%	879,937,300.00	20%	841,190,900.00	20%	886,990,877.00	100%	2,608,119,077	BADAN KESBANG POL	
X			URUSAN PENUNJANG				573,709,542,915.00		574,753,117,241.80		578,454,082,508.64		1,726,916,742,665.44		
X	XX		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan kebutuhan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	573,709,542,915.00	100%	574,753,117,241.80	100%	578,454,082,508.64	100%	1,726,916,742,665.44	SEMUA OPD	
JUMLAH							1,216,612,214,453.00		1,297,854,885,097.00		1,315,064,326,113.00		3,829,531,425,663.00		

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

8.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penetapan Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan indikator kinerja, penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan indikator kinerja utama dan penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 selanjutnya disajikan dalam tabel 8.1 dan tabel 8.2 sebagai Berikut :

8.1.1. Indikator Kinerja Makro

Penetapan Indikator Makro adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja secara makro. Indikator makro tersebut terdiri dari lima indikator yang diamanahkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Lima indikator kinerja makro tersebut juga merupakan bagian dari IKU daerah sebagaimana dituangkan pada tabel berikut.

Tabel 8.1
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Sinjai 2018-2023

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Tahun 2020		Target Kinerja Tahun:			Kondisi Akhir Periode RPJMD
				Tar get	Realisasi	2021	2022	2023	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai/ Angka	67,05	65-70	67,60	68,15	68,55	69,06	69,06
2	Tingkat Kemiskinan	%	9,14	8-9	9,00	8,93	8,43	7,90	7,90

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Tahun 2020		Target Kinerja Tahun:			Kondisi Akhir Periode RPJMD
				Target	Realisasi	2021	2022	2023	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,58	3,92	2,65	2,64	2,58	2,53	2,53
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,12	7 - 9	1,55	3,30 - 4,40	4,28 - 5,71	4,39 - 5,86	4,39 - 5,86
5	Rasio Gini	Angka	0,354	0,2 - 0,4	0,372	0,365	0,357	0,350	0,350
6	PDRB Per kapita	Rp. Juta	44,90	46,15	46,65	51,65	52,15	44,90	44,90

8.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*impact based*) untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah pada masa jabatan pemerintah daerah. Adapun target IKU disajikan sebagai berikut.

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Sinjai 2018-2023

No	Indikator Kinerja Impact / Outcome Lama	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Tahun 2020		Target Kinerja Tahun:			Kondisi Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf/ angka	77	B	CC	B	B	B	B	
				77,5	56,57	76,61-88,30	76,61-88,30	76,61-88,30	76,61 - 88,30	
2	Nilai SAKIP Kabupaten	Huruf/ angka	B (64,65)	B	B	B	BB	BB	BB	BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB
				(61 - 70)	(66,11)	(61 - 70)	(71 - 80)	(71 - 80)	(71 - 80)	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	75	77	81,68	80	82	85	80	BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB
4	Cakupan pemenuhan SPM pelayan dasar	persen	100	100	100	100	100	100	100	PUPR, BPBD, DINSOS, DISPERKIMTAN, KESEHATAN, DIKNAS
5	T.3. Pertumbuhan Ekonomi	%	6,12	7 - 9	1,55	3,30 - 4,40	4,28 - 5,71	4,39 - 5,86	4,39 - 5,86	DINAS PERIKANAN, DINAS TPHP, DINAS PETERNAKAN DAN KESWAN, DINAS PERINDAG ESDM
6	S.3. Rasio Gini	Angka	0,354	0,2 - 0,4	0,372	0,365	0,357	0,350	0,350	
7	S.4. Tingkat Kemiskinan	%	9,14	8-9	9,00	8,85	8,65	8,45	8,45	DINAS SOSIAL
8	S.5 Tingkat pengangguran terbuka	Angka	2,58	3,92	2,65	2,64	2,58	2,53	2,53	DINAS PERINDAG ESDM DINAS KOPERASI UMKM

**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018 - 2023**

No	Indikator Kinerja Impact / Outcome Lama	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Tahun 2020		Target Kinerja Tahun:			Kondisi Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp.)	Juta	1	1	1	2	2	2	2	DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP
10	IPM	Angka	67,05	65 - 70	67,60	67,96	68,40	68,76	68,76	DP3AP2KB
11	Indeks Pendidikan	Angka	60,68	62,00	62,08	63,19	64,3	65,41	65,41	DINAS PENDIDIKAN
12	Indeks Kesehatan	Angka	72,57	72,50	72,77	72,92	73,04	73,17	73,17	DINAS KESEHATAN
13	IDG	%	70,24	72,68	72,48	72,60	72,80	72,85	72,85	DP3AP2KB
14	Persentase peningkatan penghafal alqur'an di kab. sinjai	%	100	100	100	100	100	100	100	SETDAKAB
15	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Indeks wiliamson	0,172	0,180	0,182	0,181	0,180	0,179	0,179	DINAS PUPR, DISHUB
16	Indeks Layanan Infrastruktur	Angka	62,30	N/A	80,15	90,12	94,19	95,36	96,54	DINAS PUPR, DISHUB
17	Indeks Ketentraman dan Ketertiban (Total Nilai Indeks Ketentraman + Indeks Ketertiban)	%	72	72 - 74	73	72 - 74	74 - 75	75 - 80	75 - 80	DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR
18	Persentase gangguan K3 yang tertangani	%	100	77	100	100	100	100	100	DINAS SATPOL PP DAN DAMKAR

No	Indikator Kinerja Impact / Outcome Lama	Satuan Indikator Kinerja Impact / Outcome	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Tahun 2020		Target Kinerja Tahun:			Kondisi Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target	Realisasi	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	IKLH (IKU, IKA, IKL)	poin	72,37	68,00	70,08	79,65	79,77	79,91	79,91	DLHK
20	% bencana yang tertangani	%	76	N/A	N/A	78	79	80	80	BPBD
21	potensi penurunan Emisi GRK	Ton	N/A	N/A	N/A	302,21	351,96	375,00	375,00	DLHK
	(Indikator Limbah)			N/A	N/A					

8.1.3. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (*outcome based*) pada masa jabatan pemerintah daerah yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan Daerah.

Tabel 8.3

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Sinjai Tahun 2021-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.2	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
2.2.1.	KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI							
2.2.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,12	1,55	3,30 - 4,40	4,28 - 5,71	4,39 - 5,86	4,39 - 5,86
2.2.1.2.	Laju Inflasi Kabupaten	%	1,64	1,89	2,39	2,89	3,39	3,39
2.2.1.3.	PDRB per kapita (Juta/Tahun)	Rp Juta	44,90	46,15	46,65	51,65	52,15	52,15
2.2.1.4.	Rasio Gini	Angka	0,354	0,372	0,365	0,357	0,350	0,350
2.2.1.5.	Persentase Penduduk dan Angka Kemiskinan	%	9,14	9,00	8,85	8,65	8,45	8,45
2.2.1.6.	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2.2.1.7.	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	9,01	8,98	8,27	8,32	8,36	8,36
2.2.1.8.	Indeks Reformasi Birokrasi	Point	80,01	56,57	62,50	63,50	65,50	65,50

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.2.1.10.	SAKIP	Nilai	B	B	BB	BB	BB	BB
2.2.1.11.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2.1.13.	Prosentase dari cadangan pangan wajib daerah 100 Ton	%	24	24	24	24	24	24
2.2.1.14.	Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB	%	44,07	43,06	43,63	43,41	43,19	.43,19
2.2.1.15.	Kontribusi Sektor Pertanian Komoditi Palawija terhadap PDRB	%	7,69	7,08	15,05	14,51	13,99	13,99
2.2.1.16.	Produksi komoditas sektor pertanian	Ton	149.187	126.198	139.576	142.892	147.179	147.179
2.2.1.17.	Kontribusi Sektor Perkebunan terhadap PDRB	%	11,39	11,53	10,03	9,67	9,33	9,33
2.2.1.18.	Kontribusi Produksi Kelompok Tani	%	88,42	83,85	84,81	84,5	83,68	83,68
2.2.1.19.	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	%	0,05	0,05	0,55	1,05	1,55	1,55
2.2.1.20.	Kontribusi sektor Pertambangan dlm PDRB	%	2,56	2,74	2,84	2,94	3,04	3,04

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.2.1.21.	Kontribusi sektor kelautan & perikanan terhadap PDRB	%	19,06	18,58	18,73	18,88	19,03	19,03
2.2.1.22.	Kontribusi sektor Perdagangan dalam PDRB	%	13,29	12,64	12,84	13,04	13,24	13,24
2.2.1.23.	Kontribusi sektor Industri dalam PDRB	%	2,77	2,61	2,81	3,01	3,21	3,21
2.2.2.	KESEJAHTERAAN SOSIAL							
2.2.2.1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	67,05	67,60	68,15	68,55	69,06	69,06
2.2.2.2.	Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH)	%	90,70	99,27	99,42	99,57	99,72	99,72
2.2.2.3.	Rata-Rata Lama Sekolah Sinjai	%	7,48	7,75	7,86	8,05	8,16	8,16
2.2.2.4.	Harapan lama sekolah (HLS)	%	12,87	13,05	13,21	13,37	13,52	13,52
2.2.2.5.	Angka usia harapan hidup	%	67,17	67,30	67,44	67,57	67,79	67,79
2.2.2.6.	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,01	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
2.2.2.7.	Prevalensi balita gizi kurang	%	1,37	2,89	0,59	0,54	0,48	0,37
2.2.2.8.	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	100	100
2.2.2.9.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	57,40	69,9	70,25	70,6	70,95	70,95

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.2.2.10.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	97,72	82,44	83,14	83,79	84,49	84,49
2.2.2.11.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,28	2,65	2,64	2,58	2,53	2,53
2.2.2.12.	Rasio penduduk yang bekerja		0,98	0,97	0,98	0,99	100	100
2.2.2.13.	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	Angka	88,2	88,7	89,5	91,30	93,20	93,20
2.2.2.14.	IPG	%	98,2	98,02	98,22	98,28	98,28	99,82
	IDG	%	70,24	72,48	72,98	73,58	74,18	74,18
2.2.2.15.	Rasio Tuntas Baca Tulis Al Qur'an terhadap Jumlah Penduduk Islam		0,76	0,76	0,76	0,76	0,77	0,77
2.3	ASPEK PELAYANAN UMUM							
2.3.1.	Aspek Pelayanan Dasar							
2.3.1.1.	BIDANG URUSAN PENDIDIKAN							
2.3.1.1.1	Pendidikan Anak Usia Dini	%	87,31	82,86	100	100	100	100
2.3.1.1.2.	Angka Partisipasi Kasar							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	SD/MI/Sederajat :	%	109,40	107,70	115	115,5	115,5	115,5
	SMP/MTS/Sederajat :	%	77,29	78,77	117	118	119	119
2.3.1.1.3.	Persentase Angka Pendidikan yang Ditamatkan							
	Persentase SD/MI/Sederajat	%	98,51	90,83	100	100	100	100
	Persentase SMP/MTS/Sederajat	%	97,40	82,41	100	100	100	100
2.3.1.1.4.	Angka Partisipasi Murni							
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100,96	99,36	100	100	100	100
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	100,97	95,20	100	100	100	100
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	64,56	60,03	-	-	-	-
2.3.1.1.5.	Angka Partisipasi Sekolah							
	Angka partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	107,46	99,87	115	115,5	115,5	115,5
	Angka partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	116,82	99,54	117	118	119	119

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Angka partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	%	74,89	69,87	-	-	-	-
2.3.1.1.6.	Angka Putus Sekolah							
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,36	0,02	0	0	0	0
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	2,08	0,23	0	0	0	0
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	0,71	0,	-	-	-	-
2.3.1.1.7.	Angka Kelulusan							
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	98,51	99,01	100	100	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	97,40	99,14	100	100	100	100
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	100	100	-	-	-	-
2.3.1.1.8.	Angka Melanjutkan (AM);							
	Angka Melanjutkan (AM)dari SD/MI ke SMP/MTs	%	106,80	114,91	100	100	100	100
	Angka Melanjutkan (AM)dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	107,92	-	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.1.1.9.	Fasilitasi Pendidikan	%						
	Fasilitas Pendidikan Dalam Kondisi Bangunan Baik							
	Peresentase Sekolah Pendidikan SD/MI	%	84,5	86,86	87,00	88,00	90,00	90,00
	PRESENTASE Sekolah Pendidikan SMP/MTs & SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	%	84,75	86,21	87,00	88,00	90,00	90,00
2.3.1.1.10.	Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar							
	Rasio SD/MI		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	RASIO SMP/MTS		0,005	0,007	0,01	0,01	0,01	0,01
2.3.1.1.11.	Rasio Guru/Murid Jenjang Pendidikan Dasar		0,08	0,09	0,04	0,04	0,04	0,04
2.3.1.1.12.	Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun Perempuan & Laki-laki	%	41,56	31,83	100	100	100	100
2.3.1.1.13.	Penduduk yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (tidak buta aksara)	%	98,51	99,27	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.1.1.14.	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV							
	Rasio SD/MI		0,93	0,92	60,00	70,00	80,00	80
	Rasio SMP/MTs		0,97	0,93	60,00	70,00	80,00	80
2.3.1.2.	BIDANG URUSAN KESEHATAN							
2.3.1.2.1.	Angka Kematiaan Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran hidup	Bayi	3,30	12,71	13,2	13	12,1	12,1
2.3.1.2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi	Bayi	997	983	4,104	4,140	4,140	4,140
2.3.1.2.3.	Angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	Balita	56,45	21,00	2,4	2,4	2,4	2,4
2.3.1.2.4.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Bayi	0,78	0,86	9,3	9,2	7,2	7,2
2.3.1.2.5.	Angka Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	Ibu Hamil	1,65	0,92	292,4	241,5	241,5	241,5
2.3.1.2.6.	Rasio posyandu persatuan balita		0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.1.2.7.	Rasio Puskesmas Persatuan		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
	Rasio poliklinik persatuan		0,023	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
	Rasio pustu persatuan penduduk		0,023	0,022	0,25	0,25	0,25	0,25
2.3.1.2.8.	Rasio dokter per satuan penduduk		0,16	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
2.3.1.2.9.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk		0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
2.3.1.2.10.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	89,79	72,48	100	100	100	100
2.3.1.2.11.	Cakupan desa/ kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	%	100	51,25	100	100	100	100
2.3.1.2.12.	Cakup balita Gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100
2.3.1.2.13.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	0,007	-				
2.3.1.2.14.	Cakupan Balita pnemonia yang ditangani	%	-	0,32	65,00	70,00	75,00	80,00
2.3.1.2.15.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	13,36	23,14	65,5	68,1	37,5	23,1

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.1.2.16.	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk	%	169,97	64,48	95,1	111,6	96,1	75,5
2.3.1.2.18.	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 Penduduk	9,40	5,60	2,09	7,5	4,23	6,1
2.3.1.2.19.	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam programDOTS	%	100	100	100	100	100	100
2.3.1.2.20.	Proporsi kasus tuberkulosis yang di obati dan sembuh dalam program DOTS	%	100	31,52	64,5	71,3	67,2	31,5
2.3.1.2.21.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100
2.3.1.2.22.	Rasio Angka kejadian malaria	%	9,78	5,21	11,68	14,25	14,01	13,07
2.3.1.2.23.	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	100	100	100	100	100	100
2.3.1.2.24.	prevalensi HIV/AIDS (persen) dari totalpopulasi	%	0,011	0,007	0,011	0,011	0,011	0,081
2.3.1.2.25.	Proporsi jumlah penduduk 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	8,97	8,97	60,00	65,00	65,00	89,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.1.2.26.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	7,40	2,03	0,35	0,35	0,35	0,35
2.3.1.2.27.	Cakupan Kunjungan bayi	%	-	99,35	100	100	100	100
2.3.1.2.28.	Cakupan pembantu puskesmas	%	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50	77,50
2.3.1.2.29.	Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4	%	90,16	88,15	100	100	100	100
2.3.1.2.30.	Cakupan pelayanan nifas	%	99,34	96,47	100	100	100	100
2.3.1.2.31.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang tangani	%	62,42	55,56	100	100	100	100
2.3.1.2.32.	Cakupan Pelayanan anak balita	%	54,92	44,26	50,00	50,00	50,00	50,00
2.3.1.2.33.	cakupan pemberian makanan pendapatan ASI pada anak usia 6 -24 bulankeluarga miskin	%	100	100	100	100	100	100
2.3.1.2.34.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	88,48	33,50	87	100	100	100
2.3.1.2.35.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	88,08	49,25	0,35	0,35	0,35	0,35
2.3.1.2.36.	Cakupan pelayanan gawat darurat level Iyang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	10,036	3,303	1,6	1,2	1,2	1,2

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.1.2.37.	Cakupan desa kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi , 24 jam	%	100	100	100	100	100	100
2.3.1.3.	BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
2.3.1.3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	30,72	43,31	46,16	52,68	53,88	53,88
2.3.1.3.2.	Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk (Jiwa/Km)	Km/ jumlah penduduk	0,0047	0,0047	0,0046	0,0046	0,0045	0,0045
2.3.1.3.3.	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	30,72	43,31	0	0	0	0
2.3.1.3.4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	30,72	43,31	46,16	52,68	53,88	53,88
2.3.1.3.5.	persentase rumah tinggal bersanitasi	%	88,46	88,50	100	100	100	100
2.3.1.3.6.	persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	6,5	6,5	6,5	5,87	5,21	5,21

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.1.3.7.	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik /Pembuangan Aliran Air	%	81,43	81,43	81,43	81,43	81,43	81,43
2.3.1.3.8.	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
2.3.1.3.9.	Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	72,21	72,81	73,56	74,35	75,17	75,17
2.3.1.3.10.	Rasio Jaringan Irigasi	Mater/Ha	23,74	24,55	25,92	27,52	28,15	28,15
2.3.1.3.11.	Persentase penduduk berakses air minum	%	74,06	75,65	100	100	100	100
2.3.1.3.12.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan	%	74,25	75,64	100	100	100	100
2.3.1.3.13.	Persentase rumah areal kawasan kumuh	%	0,12	0,12	1,48	1,37	1,27	127%
2.3.1.3.14.	rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		0,005	0,005	0,053	0,053	0,053	0,053
2.3.1.3.15.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk		0,003	0,003	0,027	0,027	0,027	0,027
2.3.1.3.16.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB		3,40	3,40	29,37	29,41	29,45	29,45

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.1.3.17.	Luasan RTH Publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan	%	33,36	33,36	50,07	50,13	50,19	50,19
2.3.1.3.18.	Rasio bangunan ber IMB		0,75	0,75	0,753	0,754	0,754	0,754
2.3.1.3.19.	Ketaatan terhadap RTRW	%	100	100	100	100	100	100
2.3.1.4.	BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
2.3.1.4.1.	Rasio Rumah Layak Huni		0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,19
2.3.1.4.2.	Rasio permukiman layak huni		0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
2.3.1.4.3.	Cakupan Ketersediaan rumah layak huni	%	86,62	86,21	86,23	86,24	86,25	86,25
2.3.1.4.4.	persentase permukiman yang tertata	%	15,22	15,23	15,23	15,23	15,23	15,23
2.3.1.4.5.	persentase lingkungan permukiman kumuh	%	0,124	0,122	0,196	0,195	0,193	0,193
2.3.1.4.6.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkantoran	%	44,15	46,79	29,70	30,51	31,33	31,33
2.3.1.4.7.	proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	0,54	1,58	1,48	1,37	1,27	1,27

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.1.4.8.	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	%	1,41	0,28	3,11	5,93	8,76	8,76
2.3.1.5.	BIDANG URUSAN KETENTRAMAN , KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
5.2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100	100	100	100	100	100
5.3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	%	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73	27,73
5.4	Persentase Jumlah kasus kebakaran di WMKyg tertangani dalam waktu maksimal 15 Menit	%	100	100	100	100	100	100
5.5	Persentase Penegakan PERDA	%	100	100	100	100	100	100
	Persentase pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	%	100	100	100	100	100	100
2.3.1.6.	BIDANG URUSAN SOSIAL							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.1.6.1.	Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	17,47	28,99	10	15	20	20
2.3.1.6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	%	17,47	28,99	10	15	20	20
2.3.1.6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar	%	99,01	98,20	99	98	99	99
2.3.1.6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	0,04	-	0,01	0,05	0,05	0,05
2.3.1.6.5.	persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social	%	100	100	100	100	100	100
2.3.1.6.6.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social	%	100	100	100	100	100	100
2.3.2.	ASPEK PELAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.2.1.	BIDANG URUSAN TENAGA KERJA							
2.3.2.1.1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	0	0,67	1,99	2,64	3,27	3,27
2.3.2.1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0	100	50,00	75,00	80,00	80,00
2.3.2.1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	94,14	97,94	95,59	96,45	98,11	98,11
2.3.2.1.4.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	79,68	74,36	74,35	74,51	74,87	74,87
2.3.2.1.5.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	81,36	79,45	74,07	78,95	85,71	85,71
2.3.2.1.6.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	76,19	66,67	66,67	74,07	80,00	80,00
2.3.2.1.7.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	72,73	64,00	71,43	72,73	76,19	76,19

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.2.1.8.	Rasio lulusan S1/S2/S3		0,044	0,001	8,18	8,25	8,33	8,33
2.3.2.2.	BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
2.3.2.2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	53,48	39,03	41,15	42,78	44,53	44,53
2.3.2.2.2.	Persentase Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	26,67	26,67	28	28	28	28
2.3.2.2.3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	32,91	60,97	81	81	70,16	70,16
2.3.2.2.4.	Rasio KDRT		0,001	0,0012	0,01	0,01	0,02	0,02
2.3.2.2.5.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	53,48	95,67	50,55	-	-	-
2.3.2.2.6.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	53,48	95,67	69,43	72,90	76,54	76,54

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.2.2.7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100
2.3.2.2.8.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	0	100	100	100	100
2.3.2.2.9.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. (%)	%	28,57	0	100	100	100	100
2.3.2.2.10.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100
2.3.2.2.11.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	6,66	8,11	100	100	100	100
2.3.2.2.12.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	1,67	8,11	16,66	16,66	16,66	16,66

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.2.2.13.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100
2.3.2.2.14.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD		1,00	1,00	100	100	100	100
2.3.2.2.15.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP		1,00	0,99	8.120	19.041	8.418	8.418
2.3.2.3.	BIDANG URUSAN PANGAN							
2.3.2.3.1.	Persentase Ketersediaan pangan utama	%	23,24	22,62	75,00	80,00	85,00	95,00
2.3.2.3.2.	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100	100	66,66	75,00	82,35	89,00
2.3.2.4.	BIDANG URUSAN PERTANAHAN							
2.3.2.4.1.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	83,95	88,43	56,36	56,86	57,37	56,36
2.3.2.5.	BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.2.5.1.	Tersedianya Dokumen RPPLH	Ada / Tidak Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada
2.3.2.5.2.	Tersedianya Dokumen RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten	Ada / Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada
2.3.2.5.3.	Tersedianya Dokumen KLHS untuk K/R/P Tingkat Daerah Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.3.2.5.4.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Point	93,13	83,75	60,78	61,00	62,00	62,00
2.3.2.5.5.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas udara	Point	90,97	90,94	92,5	92,7	92,9	92,9
2.3.2.5.6.	Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL)	Point	42,86	42,86	42,86	44,46	44,46	44,46
2.3.2.5.7	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab usaha /atau Kegiatan yang diawasi Ketaatannya Terhadap PPLH, PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	%	3,57	28,57	16,67	50,00	100	100
2.3.2.5.8.	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Ada / Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.2.5.9.	Persentase Timbulan Sampah yang Ditangani	%	44,98	75,06	74	73	72	72
2.3.2.5.10.	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi Melalui 3R	%	100	100	100	100	100	100
2.3.2.5.11.	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	6,80	20,34	23,72	23,72	23,72	23,72
2.3.2.5.12.	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	44,98	75,06	74	73	72	72
2.3.2.5.13.	Nilai TPA (Program adipura)	Nilai	≥ 72	≥ 72	≥ 72	73	73	73
	IKK Permen 18/2020 :							
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	72.37	70.08	79.65	79.77	79.91	79.91
	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan /atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Prosentase yang melanggar)	%	96,42	71,43	83,33	50	10	10
	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di wilayah Kabupaten Kota	%	40,55	75,07	73	73	73	73

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.2.6.	BIDANG URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
2.3.2.6.1.	Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk	%	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
2.3.2.6.2.	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	%	0,99	1	0,99	0,99	0,99	0,99
2.3.2.6.3.	Rasio Pasangan Berakte Nikah	%	0,18	0,28	0,20	0,25	0,30	0,30
2.3.2.6.4.	Ketersediannya data base kependudukan skala Provinsi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.3.2.6.5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah / Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
2.3.2.6.6.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	98,76	99,52	99,78	99,80	99,96	99,96
2.3.2.6.7.	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	%	99,59	100	99,40	99,45	99,50	99,50
2.3.2.7.	BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.2.7.1.	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	97,01	97,01	98,51	100	100	100
2.3.2.7.2.	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan	Klp	1	1	1	1	1	1
2.3.2.7.3.	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Klp	70,14	70,14	70,14	70,14	70,14	70,14
2.3.2.7.4.	Persentase LSM aktif	%	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25
2.3.2.7.5.	Persentase LPM Berprestasi	%	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75
2.3.2.7.6.	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100	100
2.3.2.7.7.	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100	100
2.3.2.7.8.	Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	29,55	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	94,03	94,03	94,03	94,03	94,03	94,03
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	0	0	0	0	1,49	1,49
2.3.2.8	BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.2.8.1.	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	59,52	80,95	100	100	100	100
2.3.2.8.2.	Rasio Akseptor KB	%	74,21	74,23	10,13	83,92	86,61	86,61
2.3.2.8.3.	Angka Pemakaian Kontrasepsi / CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Tahun	%	74,21	74,23	73,31	74,99	76,03	76,03
2.3.2.8.4.	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15 – 19) Per 1.000 Perempuan usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	%	-	-	0,30	0,30	0,30	0,3
2.3.2.8.5.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di Bawah 20 Tahun	%	-	-	76,78	7,75	8,04	8,04
2.3.2.8.6.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi	%	22,54	21,06	20,69	19,80	20,36	20,36
2.3.2.8.7.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	21,67	24,03	21,88	21,94	23,03	23,03
2.3.2.8.8.	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	17,53	34,71	24,88	26,64	26,98	26,98

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.2.8.9.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB	%	47,31	55,60	3,62	37,00	29,87	29,87
2.3.2.8.10.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR)	%	54,99	45,89	57,54	52,84	55,84	55,84
2.3.2.8.11.	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber - KB	%	47,03	4,88	60,95	61,16	64,82	64,82
2.3.2.8.12.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	11,11	11,11	44,44	55	55	55
2.3.2.8.13.	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja / mahasiswa	%	8,22	8,22	1.022	1.044	822	822
2.3.2.8.14.	Cakupan PKB/PLKB yang di dayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan & Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	%	92,00	100	105,88	105,88	109,41	109,41
2.3.2.8.15.	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber -KB Mandiri	%	52,98	52,98	57,50	59,27	53,62	53,62

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.2.8.16.	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan	%	100	100	100	100	100	100
2.3.2.8.17.	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	%	3,28	3,28	149,48	146,41	142,78	142,78
2.3.2.8.18.	Persentase Faskes dan jejaringannya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	100	100	100	100	100	100
2.3.2.8.19.	Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga	%	100	100	16,72	16,73	16,74	16,74
2.3.2.9.	BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN							
2.3.2.9.1.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	216,102	180,3	294.195	318.632	344.423	362.010
2.3.2.9.2.	Rasio Ijin Trayek		0,001	0,005	0,06	0,07	0,06	0,06
2.3.2.9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum (%)	%	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.2.9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut	Pelabuhan	2	2	2	2	2	3
2.3.2.9.5.	Jumlah terminal bis	Pelabuhan	1	1	1	1	1	1
2.3.2.9.6.	Persentase Layanan Angkutan Darat	%	2,25	2,54	8,00	0,08	0,07	0,07
2.3.2.9.7.	Persentase Pemasangan Rambu-rambu	%	-	-	5,37	4,86	4,47	7,69
2.3.2.9.8.	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan		0,018	0,018	1,64	1,50	1,39	1,29
2.3.2.9.9.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	1.046.138	867.150	333.490	350.164	367.672	378.000
2.3.2.9.10.	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Ton	10.984.449	8.150.100	896.511	9.780.120	10.595.130	11.410.140
2.3.2.10.	BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
2.3.2.10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	90	90	90	90	90	90
2.3.2.10.1.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	92,93	93,29	93,29	93,54	93,54	93,54

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.2.10.1.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon	%	33,85	34,19	34,37	34,54	34,67	34,67
2.3.2.10.1.	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet		0,007	0,008	1,150	1,150	1,150	1,150
2.3.2.10.1.	Proporsi Rumah Tangga yang memiliki computer pribadi		0,24	24,31	24,45	24,45	24,51	24,51
2.3.2.11.	BIDANG URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
2.3.2.11.1.	Persentase koperasi aktif	%	65,15	67,14	67,38	67,61	67,83	67,83
2.3.2.11.2.	Persentase UKM non BPR / LKM Aktif	%	90,54	93,90	94,29	94,34	94,39	94,39
2.3.2.11.3.	Persentase BPR/LKM aktif	%	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
2.3.2.11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	93,33	93,90	94,29	94,34	94,39	94,39
2.3.2.12.	BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.2.12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	PMDN	1	1	2	3	4	11
2.3.2.12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp Juta)	Rupiah	1.000.000.000	2.000.000.000	2.500.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000	11.500.000.000
	Persetujuan Nilai Investasi	Proyek	1	1	5	5	5	17
		Rupiah	1.000.000.000	2.000.000.000	11.000.000.000	12.000.000.000	13.000.000.000	38.000.000.000
	Realisasi Nilai Investasi	Proyek	1	1	5	5	5	17
		Rupiah	1.000.000.000	2.000.000.000	11.000.000.000	12.000.000.000	13.000.000.000	38.000.000.000
2.3.2.12.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio Perbandingan	1:2	1:3	1:3	1:3	1:3	1:3
2.3.2.12.4.	Persentase Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (%)	%	25,90	6,91	10%	10%	10%	10%
2.3.2.13.	BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.2.13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100	100	100	100	100	100
2.3.2.13.2	Persentase wirausaha muda	%	8,51	8,53	8,55	8,56	8,75	8,75
2.3.2.13.3	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100	94,1	95,5	100	100	100
2.3.2.13.4.	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	%	40,20	40,20	40,21	40,25	40,32	40,32
2.3.2.13.5.	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	100	100	100	100	100	100
2.3.2.13.6.	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	Atlit	6	-	3	3	3	9
2.3.2.13.7.	1 Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam 1 Tahun	Medali	2	-	3	3	3	9
2.3.2.14.	BIDANG URUSAN STATISTIK							
2.3.2.14.1.	Tersedia Sistem Data Statistik yang Terintegrasi	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.2.14.2.	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.3.2.14.3.	Buku PDRB	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.3.2.15.	BIDANG URUSAN PERSANDIAN							
2.3.2.15.1.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100
2.3.2.16.	BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN							
2.3.2.16.1	Jumlah Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Event	3	1	0	3	3	10
2.3.2.16.2	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100%	100%	0	100%	100%	100%
2.3.2.16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	CB	3	11	12	13	14	14

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.2.16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Situs	105	107	108	109	110	110
2.3.2.17.	BIDANG URUSAN PERPUSTAKAAN							
2.3.2.17.1	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	pemustaka	215	0,74	100	100	100	100
2.3.2.17.2	Persentase Koleksi Buku yang Tersedia di Dalam Perpustakaan Daerah	%	0,64	0,50	100	100	100	100
2.3.2.17.3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	unit	0,004	0,004	0,15	0,45	0,45	0,45
2.3.2.17.4	Rata-rata pengunjung perpustakaan	Orang/ bulan	5,92	2,089	2.916	2.958	2.958	2.958
2.3.2.17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	judul	200	200	200	210	210	1020
2.3.2.18.	BIDANG URUSAN KEARSIPAN							
2.3.2.18.1	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	56,41	62,50	80	80	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.2.18.2	Menunjukkan jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kali	7	11	3	5	5	31
2.3.3.	ASPEK LAYANAN URUSAN PILIHAN							
2.3.3.1.	BIDANG URUSAN PARIWISATA							
1.1	Kunjungan Wisata	%	117,58	144,21	100%	100%	100%	100%
1.2	Lama Kunjungan Wisata	Kunjungan	104,451	134,516	135.420	136,336	137,265	647.988
2.3.3.2.	BIDANG URUSAN PERTANIAN							
2.3.3.2.1.	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan Terhadap PDRB	%	44,07	43,06	43,63	43,41	43,19	43,19
2.3.3.2.2.	Kontribusi Sektor Pertanian (palawija) Terhadap PDRB	%	7,69	7,08	15,05	14,51	13,99	13,99
2.3.3.2.3.	Kontribusi Sektor Perkebunan (tanaman keras) Terhadap PDRB	%	11,39	11,53	10,03	9,67	9,33	9,33

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.3.2.4.	Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	%	83,65	83,85	84,81	84,50	83,68	83,68
2.3.3.2.5.	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar	%	43,99	43,55	43,98	44,41	44,84	44,84
2.3.3.2.6.	Cakupan Bina Kelompok Petani	%	23,07	19,75	40,24	48,22	49,11	49,11
2.3.3.3.	BIDANG URUSAN PERDAGANGAN							
2.3.3.3.1.	Cakupan Bina Usaha Informal / Pedagang	%	-	-	88,75	100	100	100
2.3.3.4.	BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN							
2.3.3.4.1.	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	7,14	-	-	-	-	-
2.3.3.5.	BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN							
2.3.3.5.1.	Produksi perikanan	Ton	79.803,60	82.047,00	85.416	88.430	92.074	92.074

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.3.5.2.	Konsumsi ikan	Kg/Kapita/Thn	47	47	47	48	48	48
2.3.3.5.3.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	17,11	17,45	17,79	18,14	18,50	18,50
2.3.3.5.4.	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	%	21,98	22,41	22,58	23,31	23,78	23,78
2.3.4.	ASPEK PENUNJANG URUSAN							
2.3.4.1.	BIDANG URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
2.3.4.1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.3.4.1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.3.4.1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.4.1.4.	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.3.4.1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	98,29	99,58	100	100	100	100
2.3.4.1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	100	104,98	100	100	100	100
2.3.4.1.7.	Kesesuai Rencana Pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100	100
2.3.4.2.	BIDANG URUSAN KEUANGAN							
2.3.4.2.1.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.3.4.2.2.	Persentase SILPA	%	5,00	7,34	4,75	1,41	1,39	1,39
2.3.4.2.3.	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	33,14	28,58	29,52	28,26	27,9	27,90
2.3.4.2.4.	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	12,50	18,21	17,41	18,17	18,64	18,64

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.4.2.6.	Bagi Hasil Kabupaten / Kota dan Desa	%	0,25	0,19	0,21	0,19	0,19	0,19
2.3.4.2.7.	Penetapan APBD	Tepat waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.3.4.3.	KEPEGAWAIAN+ SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
2.3.4.3.1.	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	%	5,65	0,95	48	53	58	58
2.3.4.3.2.	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	-	-	5,2	5,2	5,2	5,2
2.3.4.3.3.	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	38	38	38	38	38	38
2.3.4.3.4.	Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	Jabatan	981	833	1609	1649	1690	1.690
2.3.4.3.5.	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	Pemangku Jabatan	3,083	3,063	3139	3218	3298	3298

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.4.4.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
2.3.4.4.1	Persentase implementaasi rencana Kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100
2.3.4.4.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	100	50,00	100	100	100	100
2.3.4.4.3	Persentase Perangkat Daerah yang di Fasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	36,00	69,05	100	7,14	4,76	4,76
2.3.4.4.4	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	%	100	100	100	100	100	100
2.3.4.5.	PENGAWASAN							
2.3.4.5.1	Persentase tindak lanjut temuan	%	71,08	71,28	80	81	81	81
2.3.4.5.2	Persentase Pelanggaran Pegawai	%	0,12	0,24	0	0	0	0
2.3.4.5.3	Jumlah Temuan BPK	Temuan	14	-	8	8	7	7

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja		Target Capaian setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.3.4.6.	SEKETARIAT DEWAN							
2.3.4.6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi /Kab/Kota	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.3.4.6.2	TeTersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi-fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi RPJM dan RKPD	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.3.4.6.3	Terintegritas program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan , pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan Dokumen Setwan DPRD	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

8.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 8.4

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023

No.	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Realisasi 2020	Target Tahun :			Kondisi Akhir 2023
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)						
1	URUSAN PENDIDIKAN						
1.1	Jumlah warga Negara usia 7 – 18 tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.2	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang Belum Menyelesaian Pendidikan Dasar Dan Atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.3	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	URUSAN KESEHATAN						
2.1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No.	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Realisasi 2020	Target Tahun :			Kondisi Akhir 2023
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4	Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.5	Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
3.1	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.2	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Pedesaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No.	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Realisasi 2020	Target Tahun :			Kondisi Akhir 2023
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.4	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
4.1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab / Kota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	URUSANKETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
5.1	Pelayanan Kementrian dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.4	Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No.	Indikator Kinerja Daerah	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Realisasi 2020	Target Tahun :			Kondisi Akhir 2023
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	URUSAN SOSIAL						
6.1	Persentase Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Yang Tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.2	Persentase jumlah anak terlantar di luar panti yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.3	Persentase jumlah lanjutan usia terlantar di luar panti yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.4	Persentase jumlah tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.5	Persentase penanganan jumlah korban bencana alam dan sosial skala kabupaten yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

8.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Suistainable Development Goals (TPB/SDG's)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat Provinsi. Penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 8.5
Penetapan Target Indikator TPB/SDGs
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian SDGs			
				(Tahun 2019)	2020	2021	2022	2023
Tujuan SDGs 01 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN								
Target 1.2 : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.								
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), DINAS SOSIAL	%	9,14	9,00	9,00	9,00	8,95
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan Substansial bagi kelompok miskin dan rentan.								
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	DINAS KESEHATAN	%	95,00	100	100	100	100
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan .	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA	orang	2.833	3.306	5.751	5.916	6.081
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan .	DINAS SOSIAL	KPM	8.320	-	10.200	10.500	10.500

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian SDGs			
				(Tahun 2019)	2020	2021	2022	2023
Target 1.4 : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro								
1.4.1.(a)	Persentase perempuan yang pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan .	DINAS KESEHATAN	%	99,20	100	100	100	100
1.4.1.(b)	Persentase Anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	DINAS Kesehatan	%	79,86	84,72	89,58	94,44	94,44
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	DP3AP2KB	%	38,30	38,40	65,00	65,00	65,00
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	DINAS PUPR	%	74,25	75,64	100	100	100
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	DINAS PUPR	%	88,46	88,50	100	100	100
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), DINAS PENDIDIKAN	%	99,12	99,12	100	100	100

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Capaian SDGs			
					2020	2021	2022	2023
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), DINAS PENDIDIKAN	%	73,39	73,52	100	100	100
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	%	99,64	100	99,40	99,45	99,50
Tujuan SDGs 02 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN								
Target 2.1 : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.								
2.1.1*	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence Of Undernourishment)	DINAS KETAHANAN PANGAN	%	11,80	11,50	11,5	10,4	9,2
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	DINAS KESEHATAN	%	2,90	18,00	17,00	16,00	16,00
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	DINAS KETAHANAN PANGAN	%	1,19	1,14	1,09	1,04	0,99
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	DINAS KETAHANAN PANGAN	kkal/kapita/hari	200,6	2.247,3	2.116,40	2.088,10	2.059,80

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Capaian SDGs			
					2020	2021	2022	2023
Target 2.2 : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.								
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	DINAS KESEHATAN	%	8,40	30,00	25,00	20,00	20,00
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	DINAS KESEHATAN	%	8,40	30,00	25,00	20,00	20,00
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	DINAS KESEHATAN	%	3,50	4,00	3,00	2,00	2,00
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	DINAS KESEHATAN	%	11,06	<15	<15	<15	<15
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	DINAS KESEHATAN	%	85,90	80,00	80,00	80,00	80,00
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	DINAS KETAHANAN PANGAN	Skor	Skor PPH = 88,2, Tingkat Konsumsi Pangan hewani = 24,00	Skor PPH = 88,7, Tingkat Konsumsi Pangan hewani = 24,00	Skor PPH = 89,5, Tingkat Konsumsi Pangan hewani = 24,00	Skor PPH = 91,3, Tingkat Konsumsi Pangan hewani = 24,00	Skor PPH = 93,2, Tingkat Konsumsi Pangan hewani = 24,00

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Capaian SDGs			
					2020	2021	2022	2023
Target 2.3 : Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.								
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA	%	48,89	50,79	55,55	60,92	66,98
2.4 : Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.								
2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	DINAS TANAMAN PANGAN,HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Ha	13.593	13.593	13.593	13.593	13.593
Tujuan SDGs 03 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA								
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.								
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	DINAS KESEHATAN	Kasus	165/100.00 KH	4/4.450 KH	3/4.050 KH	2/4.050 KH	2/4.050 KH

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Capaian SDGs			
					2020	2021	2022	2023
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	DINAS KESEHATAN	%	100	100	100	100	100
3.1.2(a)	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	DINAS KESEHATAN	%	99,20	100	100	100	100
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.								
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	Kasus	16,75	20,80	20,86	20,91	20,91
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	Kasus	3,30	12,71	11,10	10,10	10,00
3.2.2.(b)	Persentase Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi lengkap pada bayi	DINAS KESEHATAN	%	94,31	100	100	100	100
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.								
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	DINAS KESEHATAN	%	0,009	<1/100.000 Penduduk	<1/100.000 Penduduk	<1/100.000 Penduduk	<1/100.000 Penduduk

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Capaian SDGs			
					2020	2021	2022	2023
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	DINAS KESEHATAN	Per 100.000 pddk	223	65.5	68.1	37.5	23.1
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	DINAS KESEHATAN	per 1000 org	>1/1.000	>1/1.000	>1/1.000	>1/1.000	>1/1.000
3.3.3.(a)	Jumlah Kecamatan Yang mencapai eliminasi Malaria	DINAS KESEHATAN	Kec	1	9	9	9	9
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	DINAS KESEHATAN	%	100	100	100	100	100
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Flariasis dan Kusta)	DINAS KESEHATAN	Orang	85	1/10.000 pddk	1/10.000 pddk	1/10.000 pddk	1/10.000 pddk
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta	DINAS KESEHATAN	provinsi	0	1	1	1	1
3.3.5.(b)	Jumlah Kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	DINAS KESEHATAN	Kabupaten	0	1	1	1	1
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.								
3.4.1.(a)	Persentase Merokok Pada Penduduk Umur 18 tahun	DINAS KESEHATAN	%	30,25	< 20,00	< 20,00	< 20,00	< 20,00
3.4.1.(b)	Prevalensi Tekanan Darah tinggi	DINAS KESEHATAN	%	8,10	< 20,00	< 20,00	< 20,00	< 20,00

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Capaian SDGs			
					2020	2021	2022	2023
3.4.1.(c)	Prevalensi Obesitas Pada Penduduk umur 18 Tahun	DINAS KESEHATAN	%	5,08	< 20,00	< 20,00	< 20,00	< 20,00
3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	DINAS KESEHATAN	%	1	1	1	1	1
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.								
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	DP3AP2KB	persentase	29,79	30,59	24,00	24,00	23,50
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DP3AP2KB	persentase	70	70	70	70	70
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	DP3AP2KB	persentase	6.4	20	21	22	23
3.7.2*	Angka Kelahiran Pada Perempuan Umur 15-49 tahun (Age Spesific Fertiliti)	DP3AP2KB	Kelahiran pada perempuan umur 15-49 tahun	30,20	30,20	31	31	31

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Capaian SDGs			
					2020	2021	2022	2023
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate	DP3AP2KB	%	2,31	2,32	2,35	2,35	2,35
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.								
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	DINAS KESEHATAN	orang	0,2	21	20	20	20
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	DINAS KESEHATAN	Orang	262.130	259.478	285.426	313.969	345.369
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	DINAS KESEHATAN	%	95,00	100	100	100	100
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.								
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	DINAS KESEHATAN	%	100	86	88	90	90
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Capaian SDGs			
					2020	2021	2022	2023
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	DINAS KESEHATAN	Tenaga Medis : 100.000 Penduduk	88,00	5	5	5	5
Tujuan SDGs 04 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA								
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.								
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	DINAS PENDIDIKAN	%	85,00	89,97	100,00	100,00	100,00
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	DINAS PENDIDIKAN	%	75,00	89,74	90,00	95,00	100,00
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	DINAS PENDIDIKAN	%	79,00	81,71	85,00	90,00	95,00
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	DINAS PENDIDIKAN	%	115,84	112,27	115	115,5	115,5
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	DINAS PENDIDIKAN	%	114,54	107,23	117	118	119
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	DINAS PENDIDIKAN	Tahun	7,48	7,75	8,00	9,00	10,00
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Capaian SDGs			
					2020	2021	2022	2023
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	DINAS PENDIDIKAN	%	41,00	44,96	60,00	70,00	80,00
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.								
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi	DINAS PENDIDIKAN	%	86,81	86,32	100,00	100,00	100,00
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.								
4.6.1 (a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	DINAS PENDIDIKAN	%	100,00	99,52	100,00	100,00	100,00
4.6.1 (b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59	DINAS PENDIDIKAN	%	100,00	99,27	100,00	100,00	100,00
Tujuan SDGs 05 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN								
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.								
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DP3AP2KB	Dokumen (Perda/SK Bupati)	6	10	12	12	16

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian SDGs			
				(Tahun 2019)	2020	2021	2022	2023
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.								
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DP3AP2KB	Orang	12	26	10	10	10
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DP3AP2KB	%	9	10	15	15	10
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DP3AP2KB	Orang	5	10	5	5	5
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DP3AP2KB	%	100	100	100	100	100
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.								
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	DP3AP2KB		2,862	3,020	2.724	2750	2,812

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Capaian SDGs			
					2020	2021	2022	2023
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	DP3AP2KB	Jumlah	16,061	16.426	16.243	16.551	16,786
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	BPS/DP3AP2KB	Jumlah	30,20	30,20	38	38	38
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.								
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	DP3AP2KB	Orang	8	35	35	35	35
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	DP3AP2KB	Orang	3.168	6.340	3200	3300	3500
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.								
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	BPS, DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	%	76,17	85,00	55,02	55,02	55,03
Tujuan SDGs 06 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Capaian SDGs			
					2020	2021	2022	2023
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.								
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	DINAS PUPR	%	75,05	75,10	100	100	100
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	DINAS PUPR	Liter/Detik	700	700	700	700	700
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	DINAS PUPR	%	74,25	75,64	100	100	100
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	DINAS KESEHATAN	%	6,39	6,69	6,99	7,27	7,56
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	DINAS PUPR	%	75,05	75,10	100	100	100
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	DINAS KESEHATAN	Desa/Kel	80	80	80	80	80

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Capaian SDGs			
					2020	2021	2022	2023
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	DINAS KESEHATAN	Desa/Kel	61	80	80	80	80
6.2.1.(e)	Jumlah Kecamatan yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal	DINAS PUPR	Kec	4,00	0	4	4	4
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	DINAS PUPR	RT	300	0	350	400	450
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.								
6.3.1.(a)	Jumlah Kecamatan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	DINAS PUPR	Kec.	1	1	1	1	2
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	DINAS PUPR	%	0,10	0,20	0,20	0,25	0,26
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	%	93,13	83,75	87,5	87,5	87,5
Tujuan SDGs 07 : MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian SDGs			
				(Tahun 2019)	2020	2021	2022	2023
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.								
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	DISPERINDAGESDM	Unit	Tdk ada data, wewenang prov				
Tujuan SDGs 08 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA								
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.								
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	BPS, BAPPEDA	%	6,12	1,55	3,30 -4,40	4,28 -5,71	4,39 -5,86
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	BPS, BAPPEDA	Juta	44,90	46,15	51,65	52,15	44,90
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.								
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA	%	95,59	95,61	95,62	95,64	95,65
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Capaian SDGs			
					2020	2021	2022	2023
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA	%	1,11	1,2	1,3	1,4	1,45
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA	%	64,99	65,82	70,12	74,83	80
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA	%	45,97	47,70	44,27	44,30	44,41
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	DINAS KOPERASI , UKM DAN TENAGA KERJA	%	41,4	42,7	43,8	44,9	46,04
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.								
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	DINAS KOPERASI , UKM DAN TENAGA KERJA		89.500	97.000	97.500	98.000	98.500
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS, DINAS KOPERASI , UKM DAN TENAGA KERJA	%	2,28	2,65	2,7	2,8	2,9
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	DINAS KOPERASI , UKM DAN TENAGA KERJA	%	43,93	93,00	92	91	90
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Capaian SDGs			
					2020	2021	2022	2023
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	DINAS KOPERASI , UKM DAN TENAGA KERJA	%	72,41	-	74,90	75,19	75,47
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	DISPARBUD	%	0,38	0,38	0,39	0,40	0,41
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	DISPARBUD	Org	25	0	0	20	25
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	DISPARBUD	Org	44.997	134.516	135.420	136.316	137.240
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	DISPARBUD	Rupiah	658.110.000	476.026.000	520.000.000	546.000.000	573.300.000
8.9.2.*	Jumlah pekerja pada industri perawisata dalam proporsi terhadap total pekerja	DINAS KOPERASI , UKM DAN TENAGA KERJA	Orang	93	107	121	135	149
Tujuan SDGs 09 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI								
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.								
9.1.1	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.	DINAS PUPR	%					

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Capaian SDGs			
					2020	2021	2022	2023
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	DINAS PERHUBUNGAN	Unit	1	1	1	2	2
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	DINAS PERHUBUNGAN	Unit	2	2	2	2	2
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan kedalam rantai nilai dan pasar.								
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	DISPERINDAGESDM	%	14,29	3,29	37,33	38,34	40,10
9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.								
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	DISKOMINFO STATISTIK DAN PERSANDIAN	%	88,28	92,45	86,00	89,00	92,00
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	DISKOMINFO STATISTIK DAN PERSANDIAN	%	88,29	91,50	55,02	55,02	55,03
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	DISKOMINFO STATISTIK DAN PERSANDIAN	%	76,17	79,20	25,01	25,03	25,04
Tujuan SDGs 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA - DAN ANTAR NEGARA								
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Capaian SDGs			
					2020	2021	2022	2023
10.1.1.*	Koefisien Gini	DINAS SOSIAL	%	5	5			
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	DINAS SOSIAL	%	5	5			
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Tertinggal	DPMD	Desa Tertinggal	5	4	2	1	0
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	DPMD	Desa Mandiri	0	0	9	15	20
10.2.1.*	Proporsi penduduk yang hidup dibawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	DINAS SOSIAL	%					
Tujuan SDGs 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN								
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.								
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN PERTANAHAN	Unit	86,62	86,21	86,23	86,24	86,25
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Capaian SDGs			
					2020	2021	2022	2023
11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	BPBD	Desa / Kelurahan	-	-	-	3 Desa 2 Kelurahan	-
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	Jumlah Sistem	-	-	-	1	-
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Rupiah	3,633,000,000	70,266,000	50,000,000	30,000,000	20,000,000
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.								
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	%	55,47	57,29	59,29	61,49	63,49
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.								
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Dok	1	1	1	1	1
Tujuan SDGs 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KOMSUMSI YANG BERKELANJUTAN								
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Capaian SDGs			
					2020	2021	2022	2023
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Ton	23.194,4	21.594	25,82	26,00	27,20
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.								
12.5.1.(a)	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Ton	4.425,79	5.092,70	5.592,70	6.092,70	6.592,70
Tujuan SDGs 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA								
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.								
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Dok	1	1	1	1	1
				2020	2021	2022		2023
Tujuan SDGs 14 : MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN								
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.								
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/regulasi/ kebijakan/kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	DINAS PERIKANAN	Perda	1	1	1	1	1
14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	DINAS PERIKANAN	Org	847	897	947	997	1.047

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Capaian SDGs			
					2020	2021	2022	2023
Tujuan SDGs 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLAH HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI								
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.								
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	%	N/a	N/a	56,64	56,64	56,64
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.								
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	%	N/a	N/a	0,78	0,99	1,21
15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.								
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Dok	N/a	N/a	1	1	1
Tujuan SDGs 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN								
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Capaian SDGs			
					2020	2021	2022	2023
16.1.1.(a)	Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan pada satu tahun terakhir	POLRES, KESBANGPOL	Kasus	4	2	0	0	0
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	POLRES, KESBANGPOL	%	0,15	0,11	0	0	0
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	SATPOL - PP	%	100	100	100	100	100
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.								
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	DP3AP2KB	%	18	10	0	0	0
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DP3AP2KB	%	10	20	22	22	22
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	DP3AP2KB	%	4	2	4	5	5
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.								

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Capaian SDGs			
					2020	2021	2022	2023
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	DP3AP2KB	%	410	283	0	0	0
16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	SETDAKAB (BAGIAN HUKUM)	Orang					
16.3.1.(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	SETDAKAB (BAGIAN HUKUM)	Kasus					
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.								
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BAPPEDA	%	100	100	100	100	100
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BKAD, INSPEKTORAT	%	100	100	100	100	100

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Capaian SDGs			
					2020	2021	2022	2023
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB SINJAI	Predikat	B	B	BB	BB	BB
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	BAGIAN BARANG & JASA SETDAKAB SINJAI	%	80,82	85,82	90	100	100
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB SINJAI	%	57,25	61,50	62,50	63,5	65,50
16.6.2.(a)	Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi / Kabupaten / Kota)	BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB SINJAI	%	81,52	82,30	83,50	84,65	85,70
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.								
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	SEKRETARIAT DEWAN	%	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	%	6,47	4,06	15,7	16,4	17,5

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Capaian SDGs			
					2020	2021	2022	2023
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	KESBANG-POL	%	64,58	64,05	65,61	72,29	80,00
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.								
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	%	100,00	100	100	100	100
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	%	95,04	95,05	95,05	95,05	95,05
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	%	99,64	100	99,40	99,45	99,50
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.								
16.10.2.(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Ada/Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
16.10.2.(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	%	100	100	100	100	100

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Capaian SDGs			
					2020	2021	2022	2023
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Jumlah	0	1	2	5	10
Tujuan SDGs 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN								
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.								
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	%	10,37	9,89	10,56	11,46	11,61
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	%	0,15	0,13	0,88	0,91	0,94
17.1.2.*	Proporsi Anggaran domestik yang di danai oleh pajak domestik	BADAN PENDAPATAN DAERAH	%	16,05	14,56	15,59	15,78	15,61
17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.								
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK	%	37,11	25%	25.01	25.03	25.04

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Capaian SDGs			
					2020	2021	2022	2023
17.8.1.(a)	Persentase Kabupaten 3 Titik yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK	Titik	40	45	50	52	52
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.								
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BADAN PUSAT STATISTIK	%	100	98	100	100	100
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BADAN PUSAT STATISTIK	%	78,79	78,79	100	100	100
17.18.1.(c)	Jumlah Metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam sistem informasi rujukan Statistik (SiruSa)	BADAN PUSAT STATISTIK	Kegiatan	38	38	100	100	100
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	BAPPEDA	%	54	100	100	100	100
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.								
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (vital statistik register)	DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL	Ada / Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2019)	Target Capaian SDGs			
					2020	2021	2022	2023
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK	Pengunjung	6.529	6.529	9.860	11.113	12.524
17.19.2.(d)	Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BADAN PUSAT STATISTIK	%	98,75	98,75	100	100	100

BAB IX

PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 merupakan dokumen yang strategis bagi pembangunan Kabupaten Sinjai dalam sisa periode RPJMD. Dokumen Perubahan RPJMD ini merupakan dokumen yang telah menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada 2 (dua) awal periode. Perubahan-perubahan yang dimaksud adalah perubahan regulasi yang berlaku, dan perubahan lingkungan eksternal baik secara lokal, nasional maupun global. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap target-target yang telah ditetapkan dokumen perencanaan. Olehnya itu, Dokumen Perubahan RPJMD ini diharapkan mampu menjawab segala tantangan dan perubahan yang terjadi, terutama dalam pencapaian visi dan misi pemerintah daerah. Keterpaduan langkah yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan, sasaran, dan program pembangunan, lalu upaya-upaya yang harus dilakukan, serta penentuan keterlibatan dan peran dari berbagai pihak serta pemangku kepentingan.

9.1. Pedoman Transisi

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai periode 2018-2023, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan sasaran dan program pemerintah Kabupaten Sinjai. Pada Tahun 2023 yang akan datang merupakan tahun transisi pemerintahan Bupati Andi Seto Gadhista Asapa, SH., LL.M. dan Wakil Bupati Hj. Andi Kartini Ottong, SP., M.SP. Terkait dengan hal tersebut diperlukan pedoman transisi guna menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pada tahun 2023 yang harus disusun di tahun 2022. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 (masa transisi) yang disusun pada tahun 2023 atau setelah Perubahan RPJMD periode 2018-2023 berakhir, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sinjai tahun 2005-2025 untuk tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Program-program pada tahun 2023 masa transisi tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan aktivitas dan

capaian program tahun sebelumnya, sehingga setiap Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2023 tetap mengacu kepada program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 merupakan penjabaran tahap ketiga dan keempat RPJPD Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025. Sebagai upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program yang tercantum dalam perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023, maka ditetapkan kaidah kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

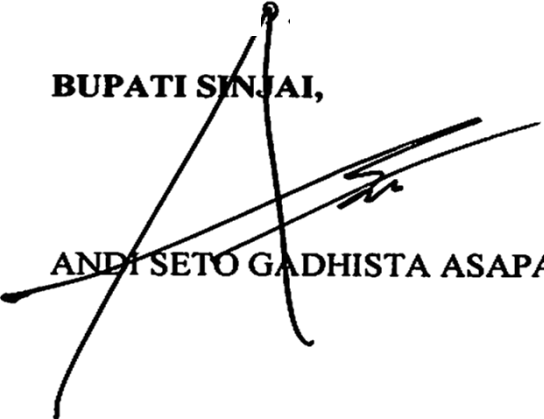
1. Pelaksanaan perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Sinjai;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Sinjai dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sinjai;
3. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai agar melaksanakan program-program dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Prioritas, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
5. Perubahan RPJMD ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melakukan penyusunan perubahan Renstra-PD sesuai dengan periode RPJMD perubahan ini. Renstra-PD ini memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program dan kegiatan perangkat daerah, serta indikator kinerja perangkat daerah. Renstra-PD selanjutnya menjadi acuan dalam penjabaran rencana tahunan perangkat daerah berupa Renja-PD, hingga penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah;
6. Dalam rangka perencanaan tahunan, Perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sinjai selama periode berlakunya RPJMD perubahan ini. RKPD disusun setiap tahunnya selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rencana anggaran daerah,

mulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan penetapan APBD setiap tahun anggaran;

7. Berkaitan dengan pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, setiap Perangkat Daerah (PD) perlu memperkuat peran pemangku

kepentingan dalam mendukung pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, dan melakukan sosialisasi baik aparat Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat sipil guna menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah secara optimal;

8. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Sinjai yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan Perubahan RPJMD ini, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Sinjai untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya. Pemerintah Kabupaten Sinjai bersama DPRD dan masyarakat harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama periode 5 (lima) tahun yang tertuang dalam Perubahan RPJMD dimaksud, dan untuk menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah secara optimal serta menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat.

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

